



PEMERINTAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



MULTI HELIX

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025



www.temanggungkab.go.id



info@temanggungkab.go.id

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

- Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 123);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor

- 128);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 129);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 162);
 26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2025 dan berakhir pada 31 Desember 2025.

Pasal 2

RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025;
- b. penyusunan Renja PD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025; dan
- c. pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.

Pasal 3

RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
- c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;

- d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
- e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
- f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;
- g. BAB VII : PENUTUP.

Pasal 4

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 LATAR BELAKANG	I-1
1.2 PROSES PENYUSUNAN	I-3
1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I-8
1.4 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I-12
1.5 MAKSUD DAN TUJUAN.....	I-13
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN	I-13
BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	II-1
2.1 KONDISI UMUM DAERAH	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1.1 Karakteristik Wilayah	II-1
2.1.1.2 Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II-2
2.1.1.3 Letak dan Kondisi Geografis.....	II-4
2.1.1.4 Kondisi Demografi.....	II-7
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-15
2.1.2.1 Indeks Pembangunan Manusia	II-15
2.1.2.2 Pertumbuhan Ekonomi	II-23
2.1.2.3 Struktur Ekonomi.....	II-31
2.1.2.4 PDRB Perkapita	II-35
2.1.2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	II-38
2.1.2.6 Tingkat Kemiskinan	II-50
2.1.2.7 Ketimpangan	II-58
2.1.2.8 Aspek Seni Budaya dan Olahraga	II-63
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II-64
2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-64
2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-92
2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan	II-148

2.1.3.4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.....	II-156
2.1.3.5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-161
2.1.3.6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	II-177
2.1.3.7	Unsur Kewilayahan.....	II-181
2.1.3.8	Unsur Pemerintahan Umum	II-185
2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah	II-187
2.1.4.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Rata-rata Per Kapita Tiap Bulan	II-187
2.1.4.2	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	II-188
2.1.4.3	Perkembangan Pelanggan Listrik	II-189
2.1.4.4	Perkembangan Hotel.....	II-189
2.1.4.5	Angka Kriminalitas	II-190
2.1.4.6	Jenis Pajak dan Retribusi Daerah	II-191
2.1.4.7	Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha	II-193
2.1.4.8	Kualitas Tenaga Kerja	II-194
2.1.4.9	Rasio Ketergantungan.....	II-194
2.1.4.10	Iklim Investasi	II-195
2.1.4.11	Fasilitas Wilayah Infrastruktur	II-195
2.2	EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	II-196
2.2.1	Evaluasi Kinerja Utama	II-196
2.2.2	Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-201
2.2.3	Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-232
2.2.4	Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Pilihan.....	II-256
2.2.5	Evaluasi Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan .	II-264
2.2.6	Evaluasi Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan ..	II-269
2.2.7	Evaluasi Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	II-278
2.2.8	Evaluasi Kinerja Unsur Kewilayahan.....	II-280
2.2.9	Evaluasi Kinerja Unsur Pemerintahan Umum	II-286
2.3	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	II-304
2.3.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	II-304
2.1.3.1	Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-304
2.1.3.2	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	II-305

2.4	ISU STRATEGIS	II-318
2.5	INOVASI DAERAH	II-321
2.6	PENGHARGAAN YANG DITERIMA KABUPATEN TEMANGGUNG....	II-396

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH..... III-1

3.1	ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	III-1
3.1.1	Kondisi Perekonomian Global dan Nasional	III-1
3.1.2	Proyeksi dan dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional	III-4
3.1.3	Kondisi Perekonomian Jawa Tengah	III-6
3.1.4	Proyeksi dan Arah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.....	III-7
3.1.5	Kondisi Perekonomian Kabupaten Temanggung.....	III-10
3.1.5.1	Pertumbuhan Ekonomi	III-11
3.1.5.2	Struktur Ekonomi.....	III-13
3.1.5.3	PDRB Perkapita	III-16
3.1.5.4	Inflasi	III-17
3.2	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-19
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-22
3.2.2	Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah.....	III-30
3.2.2.1	Persentase Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah	III-38
3.2.2.2	Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah .	III-39
3.2.2.3	Persentase Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah	III-40
3.2.2.4	Persentase Belanja Tidak Terduga.....	III-40
3.2.2.5	Konsistensi Rencana Belanja Daerah dengan Total Belanja Seluruh Perangkat Daerah	III-41
3.2.3	Arah Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah.....	III-41
3.2.3.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	III-42
3.2.3.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	III-42
3.3	OPINI BPK-RI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.....	III-45

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1

4.1	VISI DAN MISI RENCANA JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEMANGGUNG 2005-2025	IV-2
4.1.1	Visi	IV-2
4.1.2	Misi	IV-4
4.2	VISI DAN MISI RENCANA JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)	

KABUPATEN TEMANGGUNG 2025-2045	IV-5
4.2.1 Visi.....	IV-5
4.2.2 Misi.....	IV-6
4.3 TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026.....	IV-8
4.3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Daerah Tahun 2024-2026.....	IV-8
4.3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.....	IV-12
4.4 TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025	IV-17
4.4.1 Tema Pembangunan Tahun 2025	IV-17
4.4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2025	IV-18
4.5 ARAH KEBIJAKAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2045	IV-67
4.6 KONTRIBUSI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2019 PADA TAHUN 2024.....	IV-73
4.7 PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA TAHUN 2024	IV-74
4.8 SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET SDGs KABUPATEN TEMANGGUNG	IV-74
4.9 SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH DALAM MENDUKUNG PENANGANAN STUNTING KABUPATEN TEMANGGUNG.....	IV-77
4.10 DUKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM	IV-79
4.11 SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH DALAM MENDUKUNG PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) KABUPATEN TEMANGGUNG	IV-82
4.12 FASILITASI PERUBAHAN IKLIM	IV-86
4.13 SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	IV-89
4.14 KEBIJAKAN DAN STRATEGI HASIL MUSRENBANG RKPD 2025	IV-95
4.15 PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA.....	IV-104

4.16	PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN PEMERINTAHAN DAERAH	IV-105
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1	RENCANA KERJA DAERAH	V-1
5.1.1	Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Terhadap Arah Kebijakan RKP 2025	V-1
5.1.1.1	Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Terhadap Arah Kebijakan RKP Tahun 2025.....	V-2
5.1.1.2	Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional RKP 2025.....	V-25
5.1.2	Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Temang- gung Tahun 2025	V-209
5.1.3	Super Kebijakan Pembangunan Daerah yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)	V-273
5.1.4	Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Terhadap Sasaran dan Prioritas Daerah.....	V-290
5.1.4.1	Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	V-290
5.1.4.2	Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Hasil Musrenbang RKPD 2025.....	V-291
5.1.4.3	Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Penanganan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.....	V-294
5.1.4.4	Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Penanganan Stunting Kabupaten Temanggung.....	V-301
5.1.4.5	Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Target SDGs Kabupaten Temanggung ...	V-303
5.1.4.6	Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Temanggung.....	V-312
5.1.4.7	Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.....	V-314
5.1.4.8	Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas Brobudur	V-315

5.1.4.9 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019	V-318
5.1.4.10 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur pada Tahun 2025	V-318
5.1.4.11 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pembangunan Pintu Tol Bawen – Yogyakarta.....	V-319
5.1.5 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Terhadap Satu Data Indonesia.....	V-320
5.2 PENDANAAN DAERAH	V-320
5.2.1 Kegiatan Prioritas Per Program Berdasarkan Urusan dan Bidang.....	V-321
5.2.2 Pagu Indikatif Per Program Berdasarkan Urusan dan Bidang.....	V-342
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VI-1
6.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH.....	VI-1
6.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	VI-3
6.3 INDIKATOR KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VI-6
6.4 INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAERAH	VI-27
6.5 INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH DAERAH	VI-35
BAB VII PENUTUP	VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Wilayah Kabupaten Temanggung Berdasarkan Ketinggian	II-2
Tabel 2.2	Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung	II-3
Tabel 2.3	Sebaran Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT per Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2023	II-5
Tabel 2.4	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2023	II-7
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2018 sampai dengan Semester II Tahun 2023	II-8
Tabel 2.6	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Kawasan Gelangmanggung Tahun 2023	II-10
Tabel 2.7	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Kawasan Gelangmanggung Tahun 2019-2023	II-11
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk Tahun 2019 – 2023 dan Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan Tahun 2019 – 2023	II-12
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2023	II-13
Tabel 2.10	Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Tiap Kecamatan Tahun 2023	II-14
Tabel 2.11	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan Tahun 2023	II-15
Tabel 2.11	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2022	II-15
Tabel 2.12	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Tahun Sebelumnya Tahun 2019-2023	II-16
Tabel 2.13	Nilai PDRB Atas Harga Dasar Konstan 2010 (Miliar Rupiah) Tahun 2019-2023	II-17
Tabel 2.14	Pertumbuhan Lapangan Usaha Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah) Tahun 2019-2023	II-18
Tabel 2.15	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan Rata-Rata Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2019-2023	II-21
Tabel 2.16	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Target RKP Kewilayahan	II-22
Tabel 2.17	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023	II-23
Tabel 2.18	Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2023 (Persen)	II-24
Tabel 2.19	Nilai PDRB Atas Dasar Hara Berlaku Kabupputan Temanggung (Milyar Rupiah) Tahun 2019-2023	II-25
Tabel 2.20	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berla-ku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Temanggung	

	(miliar rupiah) Tahun 2019-2023	II-26
Tabel 2.21	Perbandingan PDRB (ADHK) dan PDRB (ADHB) Daerah Dengan Target RKPD Tahun 2019-2023 (Ribu Rupiah).....	II-27
Tabel 2.22	Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHK) dan PDRB Per Kapita (ADHB) Daerah dengan Target RKPD Tahun 2019-2023	II-28
Tabel 2.23	Perbandingan Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung...	II-29
Tabel 2.24	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Capaian Tahun Sebelumnya	II-32
Tabel 2.25	Perbandingan TPT Daerah dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2019-2023	II-33
Tabel 2.26	Perbandingan TPT Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten/Kota di Wilayah Gelangmanggung Tahun 2019-2023	II-34
Tabel 2.27	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka TPT Daerah dengan Target RKP Kewilayahan	II-34
Tabel 2.28	Perbandingan TPT Daerah dengan Nasional dan Provinsi Tahun 2019-2023	II-35
Tabel 2.29	Perbandingan Rasio Perubahan TPT dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung, dengan Capaian Nasional dan Jawa Tengah Tahun 2019-2023	II-36
Tabel 2.30	Rata-rata Pertumbuhan dan Perubahan Jumlah Penganggur Selama 5 Tahun.....	II-37
Tabel 2.31	Perbandingan Perubahan Jumlah Penganggur Daerah dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung	II-38
Tabel 2.32	Jumlah Penganggur pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2019-2023.....	II-39
Tabel 2.33	Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penganggur Daerah dengan Nasional Tahun 2019-2023.....	II-39
Tabel 2.34	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan Target RKPD.....	II-42
Tabel 2.35	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan Target RKPD Kewilayahan.....	II-42
Tabel 2.36	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan Capaian Tahun Sebelumnya Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023	II-43
Tabel 2.37	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan Rata-rata Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2019-2023.....	II-43
Tabel 2.38	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan Nasional	II-44
Tabel 2.39	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023	II-45
Tabel 2.40	Perubahan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten	

	Temanggung, Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Nasional	II-45
Tabel 2.41	Perbandingan Rasio Perubahan Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Capaian Nasional Tahun 2019-2023.....	II-46
Tabel 2.42	Tingkat Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Daerah dengan Capaian Wilayah Pengembangan Purwomanggung, Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.....	II-47
Tabel 2.43	Perubahan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Dibandingkan Jateng dan Nasional Tahun 2019-2023	II-48
Tabel 2.44	Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-49
Tabel 2.45	Perbandingan IPM, UHH, RLS, HLS, Pengeluaran per Kapita Daerah dengan Target RKPD	II-49
Tabel 2.46	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Daerah Dengan Capaian Tahun Sebelumnya.....	II-50
Tabel 2.47	Perbandingan IPM Daerah dengan Rata-Rata Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023	II-50
Tabel 2.48	Perbandingan Pertumbuhan AHH Daerah dengan Rata-Rata Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023	II-52
Tabel 2.49	Perbandingan Pertumbuhan HLS Daerah dengan Rata-Rata Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023.....	II-52
Tabel 2.50	Perbandingan Pertumbuhan RLS Daerah dengan Rata-Rata Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023.....	II-53
Tabel 2.51	Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita Daerah dengan Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023.....	II-55
Tabel 2.52	Perbandingan Rasio Gini Daerah dengan Target RKPD Tahun 2020-2023.....	II-56
Tabel 2.53	Perbandingan Rasio Gini Daerah dengan Capaian Tahun Sebelumnya.....	II-56
Tabel 2.54	Perbandingan Rasio Perubahan Rasio Gini dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Capaian Nasional Tahun 2019-2023	II-57
Tabel 2.55	Perbandingan Rasio Gini Daerah dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2023.....	II-57
Tabel 2.56	Distribusi Pendapatan Berdasar Kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-58
Tabel 2.57	Perubahan Capaian Distribusi Pengeluaran Kabupaten	

	Temanggung dan Rata-Rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Provinsi Tahun 2019-2023.....	II-59
Tabel 2.58	Perubahan Capaian Distribusi Pengeluaran Kabupaten Temanggung, Rata-Rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Nasional Kondisi Terkini.....	II-59
Tabel 2.59	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Kabupaten Temanggung.....	II-60
Tabel 2.60	Indek Pembangunan Olahraga.....	II-61
Tabel 2.61	APK dan APM Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-61
Tabel 2.62	Angka Putus Sekolah (APS) SD Sederajat dan SMP Sederajat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-62
Tabel 2.63	Laporan Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2023	II-63
Tabel 2.64	Persentase Satuan PNF Terakreditasi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-63
Tabel 2.65	Gambaran Urusan Kesehatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2022	II-64
Tabel 2.66	Aspek Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-72
Tabel 2.67	Gambaran Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-73
Tabel 2.68	Gambaran Urusan Perumahan di Kabupaten Temanggung	II-73
Tabel 2.69	Kinerja Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-75
Tabel 2.70	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten Temanggung	II-77
Tabel 2.71	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Kabupaten Temanggung.....	II-79
Tabel 2.72	Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-82
Tabel 2.73	Persentase Peserta Pelatihan Menjadi Wirausaha Baru Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-82
Tabel 2.74	Daftar Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-83
Tabel 2.75	Persentase Tenaga Kerja Formal.....	II-83
Tabel 2.76	Perusahaan yang Melaksanakan UMK di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-84
Tabel 2.77	Perusahaan yang Memenuhi Sarana Hubungan Industrial di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-85
Tabel 2.78	Jumlah Perselisihan yang terselesaikan dengan PB Tahun 2019-2023	II-86
Tabel 2.79	Persentase Peserta Pelatihan Produktivitas Kewirausahaan Yang Meningkatkan Produktivitasnya di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-86
Tabel 2.80	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-87

Tabel 2.81	Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-87
Tabel 2.82	Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-88
Tabel 2.83	Rasio PD yang Menerapkan Kebijakan Responsif Gender dalam Penyusunan Renja SKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-88
Tabel 2.84	Prevalensi Kasus Kekerasan terhadap Anak Perempuan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-89
Tabel 2.85	Persentase Desa Sayang Ibu dan Bayi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-89
Tabel 2.86	Kecamatan Layak Anak Tahun 2019-2023	II-90
Tabel 2.87	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-90
Tabel 2.88	Gambaran Ketahanan Pangan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-92
Tabel 2.89	Gambaran Urusan Pertanahan di Kabupaten Temanggung	II-92
Tabel 2.90	Klasifikasi dan Rentang Nilai IKLH	II-93
Tabel 2.91	Capaian IKLH Kabupaten Temanggung	II-93
Tabel 2.92	IKLH Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-94
Tabel 2.93	Gambaran Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-94
Tabel 2.94	Tabel Jakstrada dan Capaian Pengelolaan Sampah Tahun 2019-2023	II-96
Tabel 2.95	Kategorisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II-98
Tabel 2.96	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2022 dan 2023.....	II-98
Tabel 2.97	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2019-2023	II-98
Tabel 2.98	Persentase Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk Kabupaten Temanggung, Tahun 2019-2023	II-99
Tabel 2.99	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-100
Tabel 2.100	Persentase Pelayanan Surat Pindah dan Datang Tepat Waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-100
Tabel 2.101	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2022	II-101
Tabel 2.102	Persentase Penerbitan Akta Kematian Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-101
Tabel 2.103	Persentase Pelayanan Akta Perkawinan Non-Muslim Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-102
Tabel 2.104	Cakupan Pelayanan Akta Perceraian Non-Muslim Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-102
Tabel 2.105	Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-103
Tabel 2.106	Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-103
Tabel 2.107	Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)	II-103

Tabel 2.108	Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-104
Tabel 2.109	Persentase Desa yang berpredikat Mandiri di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-104
Tabel 2.110	Persentase Desa/Kelurahan Swasembada di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-104
Tabel 2.111	Persentase Desa Cepat Berkembang Berdasarkan Indeks Pembangunan Desa dan Kelurahan Tahun 2019-2023.....	II-105
Tabel 2.112	Persentase Desa yang Menetapkan Penyusunan RKPDes Tepat Waktu dan Sesuai Aturan Tahun 2019-2023	II-105
Tabel 2.113	Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan Penyusunan APBDes Tepat Waktu dan Sesuai Aturan Tahun 2019-2023	II-106
Tabel 2.114	Persentase Jumlah Desa yang Menerapkan Siskeudes Tahun 2019-2023	II-106
Tabel 2.115	Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan Semua Kegiatan di APBDes Tepat Waktu Tahun 2019-2023	II-107
Tabel 2.116	Persentase Laporan Administrasi Desa yang Tepat Waktu Tahun 2019-2023	II-107
Tabel 2.117	Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa Tahun 2019-2023	II-108
Tabel 2.118	Persentase Desa yang Tertib Mengelola Aset Desa Tahun 2019-2023	II-108
Tabel 2.119	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel yang Aktif Tahun 2019-2023	II-109
Tabel 2.120	Peringkat (Ranking) BUMDesa.....	II-109
Tabel 2.121	Persentase BUMDesa yang Aktif Tahun 2019-2023	II-110
Tabel 2.122	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif Tahun 2019-2023	II-110
Tabel 2.123	Persentase Pemberdayaan di Kawasan yang Telah Ditetapkan	II-111
Tabel 2.124	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019-2023	II-111
Tabel 2.125	Gambaran Urusan Perhubungan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-113
Tabel 2.126	Nilai Indek Tingkat Kematangan SPBE	II-116
Tabel 2.127	Indeks SPBE Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 .	II-116
Tabel 2.128	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-117
Tabel 2.129	Persentase PPID Badan Publik Aktif Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-117
Tabel 2.130	PPID Badan Publik Aktif Kabupaten Temanggung Tahun 2023	II-118
Tabel 2.131	Persentase KIM Aktif Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-120
Tabel 2.132	Persentase Kepatuhan LPP Terhadap Norma Siaran	II-121
Tabel 2.133	Lembaga Penyiaran Publik di Kabupaten Temanggung	II-121

Tabel 2.134	Persentase Ketersediaan Jaringan Internet Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-122
Tabel 2.135	Persentase Ketersediaan Jaringan Internet Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-124
Tabel 2.136	Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-125
Tabel 2.137	Sistem Informasi yang Terintegrasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2023.....	II-126
Tabel 2.138	Persentase Sistem Informasi yang Berfungsi Optimal Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-128
Tabel 2.139	Gambaran Urusan Koperasi, UKM dan Perdagangan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-129
Tabel 2.140	Gambaran Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-130
Tabel 2.141	Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-132
Tabel 2.142	Gambaran Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-133
Tabel 2.143	Gambaran Urusan Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-134
Tabel 2.144	Detail Ketersediaan Data Makro Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-134
Tabel 2.145	Gambaran Urusan Persandian di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-135
Tabel 2.146	Gambaran Urusan Kebudayaan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-136
Tabel 2.147	Gambaran Urusan Perpustakaan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-137
Tabel 2.148	Gambaran Urusan Kearsipan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-138
Tabel 2.149	Gambaran Urusan Perikanan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-139
Tabel 2.150	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-140
Tabel 2.151	Data Potensi Wisata/Daya Tarik Wisata di Kabupaten Temanggung	II-140
Tabel 2.152	Gambaran Kinerja Urusan Pertanian di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-143
Tabel 2.153	Gambaran Urusan Perdagangan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-147
Tabel 2.154	Gambaran Urusan Perindustrian di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-148
Tabel 2.155	Nilai EKPPD Tahun 2019-2023.....	II-149
Tabel 2.156	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2019-2023	II-150
Tabel 2.157	Penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-150
Tabel 2.158	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023	II-150
Tabel 2.159	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019-2023.....	II-151
Tabel 2.160	Nilai IKM Unit Pelayanan di Kabupaten Temanggung	

	Tahun 2023	II-151
Tabel 2.161	Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2023	II-153
Tabel 2.162	Survai Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2023	II-153
Tabel 2.163	Persentase RAPERDA yang Disahkan Tepat Waktu Tahun 2019-2023	II-154
Tabel 2.164	Gambaran Kinerja Sasaran Urusan Perencanaan Tahun 2019-2023	II-155
Tabel 2.165	Gambaran Kinerja Sasaran Urusan Perencanaan Tahun 2019-2023	II-156
Tabel 2.166	Tingkat Konsistensi Program Pembangunan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-156
Tabel 2.167	Program Pada RPJMD yang Tidak Dilaksanakan di RKPD 2023	II-157
Tabel 2.168	Program pada Perubahan RKPD diluar Perubahan RPJMD	II-158
Tabel 2.169	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019-2023	II-158
Tabel 2.170	Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapa- tan Daerah.....	II-159
Tabel 2.171	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-159
Tabel 2.172	Tanggal dan Nomor Peraturan Daerah tentang Penetapan APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2023	II-159
Tabel 2.173	Gambaran Urusan Keuangan Kabupaten Temanggung Tahun 2022	II-160
Tabel 2.174	Kondisi SILPA Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022	II-162
Tabel 2.175	Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-162
Tabel 2.176	Pencapaian skor dimensi IP ASN Tahun 2022 Dibanding- kan dengan Persentase Pengukuran.....	II-162
Tabel 2.177	Indeks Sistem Merit Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-163
Tabel 2.178	Persentase Pejabat yang Telah Lulus Diklat Kepemimpinan sesuai Jenjang Jabatan.....	II-164
Tabel 2.179	Persentase Pejabat yang Telah Lulus Diklat Kepemimpinan sesuai Jenjang Jabatan.....	II-165
Tabel 2.180	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-166
Tabel 2.181	Persentase Hasil Krenova Yang Dikembangkan di Kabupa- ten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-167
Tabel 2.182	Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Temang- gung Tahun 2019-2023.....	II-169
Tabel 2.183	Level Penilaian SPIP Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-170
Tabel 1.184	Persandingan Hasil Penilaian Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2023	II-170
Tabel 2.185	Gambaran Urusan Pengawasan Kabupaten Temanggung	

	Tahun 2019-2023	II-170
Tabel 2.186	Rekapitulasi Nilai Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022	II-171
Tabel 2.187	Capaian Rata-Rata IKM di Kecamatan Tahun 2019-2023 ..	II-173
Tabel 2.188	Capaian Persentase Kepemilikan KTP-El di Kecamatan Tahun 2019-2023	II-173
Tabel 2.189	Capaian Persentase Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2019-2023	II-174
Tabel 2.190	Capaian Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu Tahun 2019-2023.....	II-174
Tabel 2.191	Capaian Sarpras Lokal Kelurahan Kondisi Layak Tahun 2019-2023	II-175
Tabel 2.192	Capaian Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Aktif Tahun 2019-2023	II-175
Tabel 2.193	Capaian Penanganan Laporan Kejadian Tahun 2019-2023	II-175
Tabel 2.194	Capaian Tempat Ibadah Kondisi Baik Tahun 2019-2023 ..	II-176
Tabel 2.195	Capaian Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa/Kelurahan Tahun 2019-2023	II-176
Tabel 2.196	Capaian Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan APBDesa Tepat Waktu Tahun 2019-2023	II-176
Tabel 2.197	Capaian Persentase Sekolah yang Mendapatkan Pemaha- man Kebangsaan Tahun 2019-2023	II-177
Tabel 2.198	Persentase Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Pemaha- man Wawasan Kebangsaan Tahun 2019-2023	II-177
Tabel 2.199	Persentase Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan Tahun 2019-2023	II-178
Tabel 2.200	Persentase Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan Pembinaan Pencegahan, Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019-2023	II-178
Tabel 2.201	Persentase Jumlah Sekolah yang telah Mendapatkan Pembinaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019-2023	II-179
Tabel 2.202	Angka Konsumsi Rumah Tangga Rata-Rata Per Kapita Tiap Bulan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-181
Tabel 2.203	Persentase Konsumsi Rumah Tangga Bahan Makanan dan Non-Bahan Makanan Rata-Rata Per Kapita Tiap Bulan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-182
Tabel 2.204	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 Triwulan IV	II-182
Tabel 2.205	Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-183
Tabel 2.206	Jumlah Hotel di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-183
Tabel 2.207	Perkembangan Angka Kriminalitas Di Kabupaten Temang- gung Tahun 2019-2023 Triwulan IV	II-184
Tabel 2.208	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 Triwulan IV ...	II-186
Tabel 2.209	Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-187

Tabel 2.210	Kualitas Tenaga Kerja di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-187
Tabel 2.211	Rasio Ketergantungan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-188
Tabel 2.212	Indeks Kemudahan Berusaha Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-189
Tabel 2.213	Persentase Infrastruktur Wilayah Kondisi Baik Kabupaten Temanggung.....	II-189
Tabel 2.214	Simbol dan Status Capaian Kinerja RPJMD.....	II-190
Tabel 2.215	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama	II-190
Tabel 2.216	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2023 Triwulan IV	II-195
Tabel 2.217	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2023 Triwulan IV	II-201
Tabel 2.218	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 Triwulan IV	II-215
Tabel 2.219	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 Triwulan IV	II-217
Tabel 2.220	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023 Triwulan IV.....	II-219
Tabel 2.221	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Fungsi Lainnya Penanggulangan Bencana Tahun 2023 Triwulan IV	II-222
Tabel 2.222	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun Triwulan IV	II-224
Tabel 2.223	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2023 Triwulan IV	II-227
Tabel 2.224	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2023 Triwulan IV	II-230
Tabel 2.225	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2023 Triwulan IV.....	II-231
Tabel 2.226	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun 2023 Triwulan IV	II-232
Tabel 2.227	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2023 Triwulan IV	II-232
Tabel 2.228	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2023 Triwulan IV	II-235
Tabel 2.229	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 Triwulan IV.....	II-236
Tabel 2.230	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 Triwulan IV	II-238
Tabel 2.231	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2023 Triwulan IV	II-240
Tabel 2.232	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 Triwulan IV	II-241

Tabel 2.233	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 Triwulan IV.....	II-243
Tabel 2.234	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2023 Triwulan IV 022	II-244
Tabel 2.235	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 Triwulan IV.....	II-245
Tabel 2.236	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2023 Triwulan IV	II-246
Tabel 2.237	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tahun 2023 Triwulan IV	II-246
Tabel 2.238	Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2023 Triwulan IV.....	II-247
Tabel 2.239	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2023 Triwulan IV	II-248
Tabel 2.240	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2023 Triwulan IV	II-249
Tabel 2.241	Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 Triwulan IV.	II-250
Tabel 2.242	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2023 Triwulan IV	II-251
Tabel 2.243	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2023 Triwulan IV	II-252
Tabel 2.244	Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun 2023 Triwulan IV	II-255
Tabel 2.245	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2023 Triwulan IV	II-256
Tabel 2.246	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Tahun 2023 Triwulan IV	II-257
Tabel 2.247	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2023 Triwulan IV	II-258
Tabel 2.248	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Tahun 2023 Triwulan IV	II-262
Tabel 2.249	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan Tahun 2023 Triwulan IV.....	II-263
Tabel 2.250	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Keuangan Tahun 2023 Triwulan IV	II-265
Tabel 2.251	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Kepegawaian Tahun 2023 Triwulan IV	II-268
Tabel 2.252	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023 Triwulan IV	II-270
Tabel 2.253	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023 Triwulan IV ...	II-270
Tabel 2.254	Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2023 Triwulan IV	II-271
Tabel 2.255	Capaian Kinerja Unsur Kewilayahan Fungsi Kecamatan Tahun 2023 Triwulan IV	II-274
Tabel 2.256	Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Tahun	

	2023 Triwulan IV	II-280
Tabel 2.257	Capaian Sasaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 Triwulan IV.....	II-283
Tabel 2.258	Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 Triwulan IV.....	II-283
Tabel 2.259	Capaian Sasaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 Triwulan IV.....	II-284
Tabel 2.260	Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Uru- san Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 Triwulan IV.....	II-285
Tabel 2.261	Capaian Sasaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun 2023 Triwulan IV	II-287
Tabel 2.262	Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah urusan pemerintahan pilihan Tahun 2023 Triwulan IV	II-287
Tabel 2.263	Capaian Sasaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2023 Triwulan IV	II-288
Tabel 2.264	Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Unsur pendukung urusan pemerintahan Tahun 2023 Triwulan IV	II-289
Tabel 2.265	Capaian sasaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2023 Triwulan IV	II-289
Tabel 2.266	Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah unsur Penunjang urusan pemerintahan Tahun 2023 Triwulan IV	II-290
Tabel 2.267	Capaian Sasaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2023 Triwulan IV	II-291
Tabel 2.268	Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2023 Triwulan IV	II-292
Tabel 2.269	Capaian Sasaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Unsur Kewilayahan Tahun 2023 Triwulan IV	II-292
Tabel 2.270	Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Unsur kewilayahan Tahun 2023 Triwulan IV.....	II-293
Tabel 2.271	Capaian Sasaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2023 Triwulan IV	II-294
Tabel 2.272	Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2023 Triwulan IV	II-294
Tabel 2.273	Rangkuman Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Temanggung Tahun 2023 Triwulan IV.....	II-295
Tabel 2.274	Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019- 2024	II-314
Tabel 2.275	Krenova dan Penjaringan Inovasi Perangkat Daerah Kabu- paten Temanggung 2022	II-315

Tabel 2.276	Jumlah Penghargaan yang diterima Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023	II-357
Tabel 2.277	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019	II-357
Tabel 2.278	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020	II-360
Tabel 2.279	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021	II-362
Tabel 2.280	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022	II-363
Tabel 2.281	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023	II-367
Tabel 3.1	Kondisi Eksisting dan Kerangka Ekonomi Makro Nasional Tahun 2018-2025	III-6
Tabel 3.2	Kondisi Eksisting dan Proyeksi Kerangka Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2025	III-9
Tabel 3.3	Kondisi Eksisting dan Proyeksi Kerangka Ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2025	III-11
Tabel 3.4	Pertumbuhan Ekonomi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2025	III-12
Tabel 3.5	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung ADHK tahun 2018-2023.....	III-13
Tabel 3.6	Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.....	III-16
Tabel 3.7	Inflasi Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional.....	III-18
Tabel 3.8	Realisasi Pendapatan Kabupaten Temanggung.....	III-27
Tabel 3.9	Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019-2020....	III-35
Tabel 3.10	Target dan Realisasi Tahun 2021-2023, APBD 2024 dan Proyeksi 2025 Belanja Daerah Kabupaten Temanggung ...	III-36
Tabel 3.11	Persentase Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah.....	III-39
Tabel 3.12	Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah	III-40
Tabel 3.13	Persentase Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah.....	III-41
Tabel 3.14	Persentase Belanja Tidak Terduga terhadap Belanja Daerah	III-41
Tabel 3.15	Konsistensi Rencana Belanja Daerah dengan Total Belanja	III-42
Tabel 3.16	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Temanggung	III-45
Tabel 4.1	Keterkaitan Indikator Tujuan dan Sasaran Kabupaten Temanggung Tahun 2025.....	IV-10
Tabel 4.2	Keselarasan Target Indikator Makro RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024	IV-12
Tabel 4.3	Tema RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025.....	IV-17
Tabel 4.4	Prioritas dan Fokus Pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RKPD 2025	IV-26

Tabel 4.5	Persandingan antara Sasaran Pembangunan Daerah RPD Kabupaten Temanggung dengan Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029.....	IV-27
Tabel 4.6	Persandingan antara Prioritas Nasional RPJMN dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung ..	IV-30
Tabel 4.7	Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Sasaran PN RKP Tahun 2025	IV-32
Tabel 4.8	Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025.....	IV-38
Tabel 4.9	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Temanggung Tahun 2025.	IV-41
Tabel 4.10	Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD Tahun 2025	IV-55
Tabel 4.11	Keterkaitan Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah, Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas	IV-58
Tabel 4.12	Keterkaitan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025	IV-70
Tabel 4.13	Keterkaitan Tujuan SDGs, Sasaran Daerah dan Prioritas Daerah di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025	IV-75
Tabel 4.14	Sasaran, Prioritas Pembangunan, dan Program yang Mendukung Penanganan Stunting	IV-77
Tabel 4.15	Sasaran, Prioritas Pembangunan dan Program yang Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	IV-80
Tabel 4.16	Sasaran dan Prioritas Daerah yang Mendukung Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Temanggung Tahun 2025	IV-82
Tabel 4.17	Sasaran dan Prioritas Daerah yang Mendukung Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim di kabupaten Temanggung Tahun 2025.....	IV-86
Tabel 4.18	Ketersediaan Komponen SPM RPD Kabupaten Temanggung	IV-89
Tabel 4.19	Sasaran, Prioritas Daerah dan Program yang Mendukung Pemenuhan SPM di Kabupaten Temanggung Tahun 2025	IV-90
Tabel 4.20	Hasil Musrenbang RKPD Kecamatan Tahun 2025 Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan.....	IV-94
Tabel 5.1	Rekapitulasi Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Arah Kebijakan dalam RKP 2025.	V-2
Tabel 5.2	Persentase Dukungan Program Daerah Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Temanggung terhadap Arah Kebijakan Nasional Tahun 2025	V-3

Tabel 5.3	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Arah Kebijakan Transformasi Sosial.....	V-4
Tabel 5.4	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi	V-10
Tabel 5.5	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola.....	V-17
Tabel 5.6	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Arah Kebijakan Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	V-22
Tabel 5.7	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Arah Kebijakan Ketahanan Sosial dan Ekologi ..	V-23
Tabel 5.8	Rekapitulasi Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional RKP Tahun 2025	V-25
Tabel 5.9	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	V-29
Tabel 5.10	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	V-35
Tabel 5.11	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	V-37
Tabel 5.12	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	V-59
Tabel 5.13	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	V-63
Tabel 5.14	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.	V-74
Tabel 5.15	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	V-80
Tabel 5.16	Dukungan Program Daerah dalam RPD/RKPD Kabupaten Temanggung terhadap Program Prioritas/Kegiatan Prioritas dalam PN RKP 2025.....	V-104
Tabel 5.17	Dukungan Program Daerah dalam RPD Tahun 2025-2026 dan RKPD Tahun 2025 terhadap Program Prioritas/Kegiatan Prioritas Masing-Masing PN RKP Tahun 2025.....	V-209
Tabel 5.18	Rekapitulasi Dukungan Program dan Anggaran Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2025	V-210
Tabel 5.19	Dukungan Program Daerah Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung: Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial	V-212

Tabel 5.20	Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung: Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	V-230
Tabel 5.21	Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung: Reformasi Birokrasi.....	V-251
Tabel 5.22	Total Pagu Anggaran Program Prioritas yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025.....	V-272
Tabel 5.23	Keruntutan Kebijakan Pembangunan Daerah RKPD 2025 yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).....	V-274
Tabel 5.24	Dukungan Program dan Kegiatan Kabupaten Temanggung terhadap Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung SPM Tahun 2025.....	V-290
Tabel 5.25	Dukungan Program dan Kegiatan Kabupaten Temanggung terhadap Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Hasil Musrenbang RKPD 2025.....	V-291
Tabel 5.26	Program Daerah yang Mendukung Penanganan Kemiskinan	V-294
Tabel 5.27	Program Daerah yang Mendukung Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2025	V-302
Tabel 5.28	Program Daerah yang Mendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan Pengarusutamaan Gender	V-303
Tabel 5.29	Pemetaan Indikator SDGs dalam Dokumen Perencanaan Daerah.....	V-312
Tabel 5.30	Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Temanggung	V-313
Tabel 5.31	Program Daerah yang Mendukung Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.....	V-314
Tabel 5.32	Dukungan Program dan Kegiatan Kabupaten Temanggung Terhadap Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur Tahun 2025.....	V-315
Tabel 5.33	Dukungan Program Kabupaten Temanggung Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 .	V-318
Tabel 5.34	Dukungan Program Kabupaten Temanggung Terhadap Pembangunan Infrastruktur Tahun 2025	V-319
Tabel 5.35	Program Daerah yang Mendukung Satu Data Indonesia ...	V-320
Tabel 5.36	Rekapitulasi Anggaran Per Urusan dan Per Bidang	V-342
Tabel 5.37	Rencana Pembiayaan Per Urusan dan Program	V-345
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Menjabarkan Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025	VI-2
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025.....	VI-3
Tabel 6.3	Indikator Kinerja Program Kabupaten Temanggung Tahun	

	2025	VI-7
Tabel 6.4	Indikator Kinerja Program Prioritas Daerah	VI-27
Tabel 6.5	Indikator Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah	VI-35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur Penyusunan RKPD Tahun 2025	I-4
Gambar 1.2	Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025.....	I-5
Gambar 1.3	Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan....	I-15
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung.....	II-3
Gambar 2.2	Peta Posisi Kabupaten Temanggung terhadap Provinsi Jawa Tengah	II-5
Gambar 2.3	Peta Geologi Kabupaten Temanggung	II-7
Gambar 2.4	Kepadatan Penduduk Kawasan PURWOMANGGUNG Tahun 2022.....	II-9
Gambar 2.5	Gambaran Jumlah Penduduk Kab. Temanggung Tahun 2022.....	II-11
Gambar 2.6	Laju Pertumbuhan Penduduk Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023	II-11
Gambar 2.7	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung dan atau Kabupaten/Kota Kawasan PURWOMANGGUNG Tahun 2019-2023.....	II-12
Gambar 2.8	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung dan atau Kabupaten/Kota Kawasan PURWOMANG- GUNG Tahun 2019-2023.....	II-13
Gambar 2.9	Pertumbuhan Lapangan Usaha Tahun 2019-2023.....	II-25
Gambar 2.10	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Target RKPD Tahun 2019-2023.....	II-26
Gambar 2.11	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023	II-27
Gambar 2.12	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.....	II-30
Gambar 2.13	Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Kawasan Purwomanggung Tahun 2019-2023	II-37
Gambar 2.14	Pertumbuhan PDRB Perkapita Kab. Temanggung, Jawa Tengah, Nasional Tahun 2019-2023	II-37
Gambar 2.15	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Target RKPD Tahun 2019-2023.....	II-38
Gambar 2.16	Tingkat Perubahan TPT Kab. Temanggung Tahun 2019- 2023.....	II-39
Gambar 2.17	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Rata-rata Capaian Wilayah yang Setara Tahun 2019-2023.....	II-40
Gambar 2.18	Perbandingan TPT Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten/Kota di Wilayah Purwomanggung Tahun 2019-2023.....	II-42
Gambar 2.19	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Nasional dan Provinsi Tahun 2019-2023	II-43

Gambar 2.20	Tingkat Pertumbuhan Jumlah Penganggur Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-45
Gambar 2.21	Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penganggur Daerah dengan Rata-rata Capaian Wilayah yang Setara Tahun 2019-2023.....	II-46
Gambar 2.22	Perbandingan Perubahan Jumlah Penganggur Kabupaten Temanggung dengan Capaian Nasional sebelum Pandemi Covid-19 dan Kondisi Terkini.....	II-48
Gambar 2.23	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023....	II-51
Gambar 2.24	Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.....	II-53
Gambar 2.25	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-92
Gambar 2.26	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-97
Gambar 2.27	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	II-101
Gambar 2.28	<i>Screenshot</i> KRISNA 2025 Kabupaten Temanggung ..	II-132
Gambar 2.29	Irisan Kesesuaian Jumlah Program RPJMD Tahun 2018-2023 dengan Program RKPD Tahun 2022.....	II-158
Gambar 2.30	Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2023.....	II-163
Gambar 2.31	Perkembangan Pelanggan Listrik di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	II-183
Gambar 2.32	Capaian Indikator Kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2023 Triwulan IV.....	II-299
Gambar 2.33	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sampai dengan Tahun 2023 Triwulan IV.....	II-299
Gambar 2.34	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sampai dengan Tahun 2023 Triwulan IV.....	II-300
Gambar 2.35	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sampai dengan Tahun 2023 Triwulan IV	II-301
Gambar 2.36	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sampai dengan Tahun 2022	II-302
Gambar 2.37	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun 2023 Triwulan IV	II-305
Gambar 2.38	Capaian Indikator Kinerja Program Urusan pemerintahan Pilihan Tahun 2023 Triwulan IV	II-307
Gambar 2.39	Capaian Indikator Kinerja Program Unsur pendukung Urusan pemerintahan Tahun 2022.....	II-306
Gambar 2.40	Capaian Indikator Program Unsur pendukung urusan pemerintahan Tahun 2023 Triwulan IV	II-307
Gambar 2.41	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Unsur penunjang	

	urusan pemerintahan Tahun 2023 Triwulan IV	II-308
Gambar 2.42	Capaian Indikator Kinerja Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2022	II-309
Gambar 2.43	Capaian Indikator Kinerja Sasaran unsur pengawasan urusan pemerintahan Tahun 2023 Triwulan IV	II-310
Gambar 2.44	Capaian Indikator Kinerja Program unsur pengawasan urusan pemerintahan Tahun 2022	II-310
Gambar 2.45	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Unsur Kewilayahan Tahun 2023 Triwulan 1	II-311
Gambar 2.46	Capaian Indikator Kinerja Program Unsur kewilayahan Tahun 2023 Triwulan 1	II-312
Gambar 2.47	Capaian Indikator Kinerja Sasaran unsur pemerintahan umum Tahun 2023 Triwulan 1	II-312
Gambar 2.48	Capaian Indikator Kinerja Program Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2022	II-313
Gambar 2.49	Keterkaitan Inovasi Bumi Moetiara dengan RKP 2025...	II-334
Gambar 2.50	Tahapan Inovasi Bumi Moetiara	II-338
Gambar 2.51	Institusi/Stakeholder (Multihelix) dalam Bumi Moetiara.....	II-340
Gambar 2.52	Dampak Inovasi Bumi Moetiara.....	II-346
Gambar 3.1	Persentase Sumbangan Sektor Utama terhadap PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023	III-15
Gambar 3.2	Lapangan Usaha dengan Pertumbuhan Tertinggi di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023	III-15
Gambar 3.3	Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025	III-23
Gambar 3.4	Pendapatan Kabupaten Temanggung.....	III-26
Gambar 3.5	Belanja Daerah Kabupaten Temanggung	III-39
Gambar 4.1	Komponen penyusun RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025	IV-1
Gambar 4.2	Konsep THIS dalam Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2025	IV-22
Gambar 4.3	Peta Sebaran Penduduk Miskin dan Stunting Kabupaten Temanggung Tahun 2023	IV-23
Gambar 4.4	Keterkaitan dan Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Temanggung dengan Arah Kebijakan RPD.....	IV-24

1.1 LATAR BELAKANG

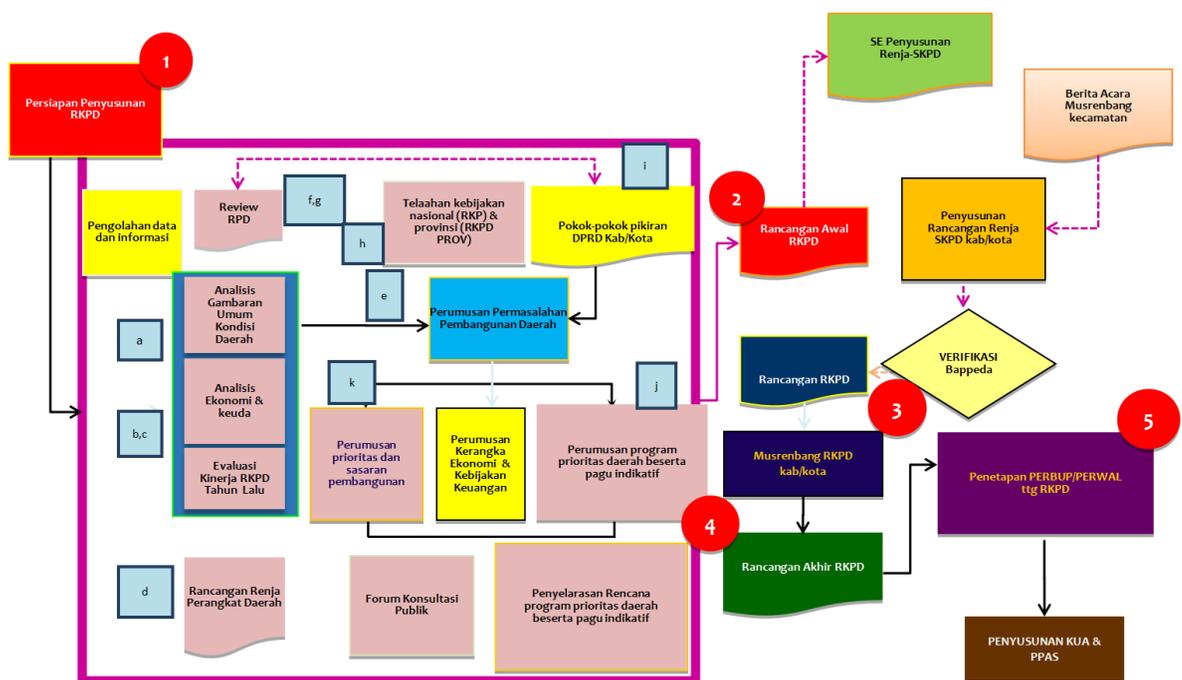
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025, merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 yaitu “Temanggung Makin Maju, Mandiri, Aman, Adil dan Sejahtera”. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2023 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, pada saat belum tersedia RPJMD, maka penyusunan RKPD akan mengacu pada RPJPD. Namun, sesuai dengan evaluasi Kementerian Dalam Negeri yang didasarkan pada aspirasi yang disampaikan oleh daerah, RPJPD yang ada belum dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD karena penyusunannya belum mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang menjadi dasar penyusunan RPD, yang nantinya menjadi pedoman penyusunan RKPD.

Perumusan Rancangan Akhir RKPD merupakan salah satu tahap dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu satu tahun. Berbagai tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang harus realistis dan mampu dicapai sebagai target serta mampu menjawab permasalahan-permasalahan pembangunan yang ada.

Penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dilakukan dengan menerapkan pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan *top-down/bottom-up*, serta dilakukan dengan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. RKPD merupakan dokumen

perencanaan tahunan yang dimulai penyusunannya dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari desa/kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kabupaten. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Temanggung akan menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Temanggung yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam penyusunan rancangan APBD Tahun 2025. Secara lebih jelas alur penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dijelaskan pada gambar berikut ini



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 1.1
Alur Penyusunan RKPD Tahun 2025

Proses rencana penyusunan RKPD Tahun 2025 yang mengikuti Alur penyusunan sebagaimana pada Gambar 1.1 di atas. Proses penyusunan secara alur waktu perencanaan dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022

Gambar 1.2
Proses Penyusunan RKPDP Kabupaten Temanggung Tahun 2025

1.2 PROSES PENYUSUNAN

Secara umum tahapan dan proses penyusunan rancangan RKPDP Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Rancangan Awal RKPDP

Perumusan dan Penyusunan Rancangan awal RKPDP Tahun 2025 dilaksanakan pada bulan Desember 2023. Rancangan awal RKPDP Tahun 2025 berisikan panduan dan koridor perencanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan pendekatan perencanaan teknokratik.

2. Musrenbang RKPDP di Kelurahan

Pelaksanaan Musrenbang RKPDP Tahun 2025 di kelurahan dilaksanakan pada tanggal 23-26 Oktober 2023. Peserta Musrenbang RKPDP pada 23 kelurahan rata-rata diikuti oleh 40 orang peserta yang terdiri lurah dan perangkat kelurahan, lembaga kemasyarakatan,

kader pemberdayaan masyarakat dan tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, kelompok perempuan, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kelurahan, perwakilan akademisi dan pelaku pendidikan, perwakilan rumah tangga miskin, perwakilan penyandang disabilitas, pengurus partai politik tingkat kelurahan, dan unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu.

Dalam rangka pemantauan pelaksanaan jalannya musrenbang RKPD di kelurahan, Bappeda membentuk Tim Evaluasi untuk melakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan Musrenbang, dengan tujuan mengetahui dan menilai pelaksanaan musrenbang RKPD di kelurahan apa sudah sesuai ketentuan yang berlaku, dengan menggunakan format penilaian yang terdapat pada lampiran Form L15 dari Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2021. Metode evaluasi yang digunakan dengan pemberian bobot penilaian terhadap aspek waktu pelaksanaan dan administrasi pendukungnya, persentase kehadiran dari berbagai unsur yang diundang beserta lampirannya, proses pelaksanaan dan hasilnya. Hasil penilaian digunakan untuk menentukan pelaksanaan musrenbang terbaik, yang akan diberikan hadiah berdasarkan peringkat pertama, kedua dan ketiga dengan besaran hadiah sesuai kemampuan daerah berupa tambahan pagu indikatif kelurahan.

3. Konsultasi Publik Rancangan Awal

Konsultasi publik yang dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Desember 2023 merupakan forum konsultasi yang diikuti oleh perangkat daerah dan perwakilan masyarakat, LSM, Lembaga Non Pemerintahan, Forum Anak, Forum Lansia, dan *stakeholders* lain yang turut dalam proses perencanaan pembangunan. Forum ini ditayangkan secara *live streaming* oleh TV Temanggung guna menjaring masukan dan saran dari peserta forum yang selanjutnya menjadi masukan dalam penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2025 dan RPJPD Tahun 2025-2045. Acara ini dilanjutkan dengan Pemberian Piagam Penghargaan Bupati Temanggung terhadap 15 tokoh yang telah berkontribusi terhadap capaian Perencanaan dan Pembangunan Daerah sejak tahun 2019 hingga tahun 2023.

4. Musrenbang RKPD di Kecamatan

Musrenbang RKPD di kecamatan berlangsung antara tanggal 8-11 Januari 2024. Peserta Musrenbang RKPD di kecamatan rata-rata

diikuti oleh terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, para Kepala Sub Bagian, para Kepala Seksi, dan unsur staf kecamatan, pengurus partai politik tingkat kecamatan dan/atau anggota DPRD daerah pemilihan setempat, delegasi dari Desa dan/atau Kelurahan, Tim Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan, unsur kelembagaan dan organisasi tingkat kecamatan, perwakilan kelompok profesi Tingkat Kecamatan, perwakilan rumah tangga miskin, perwakilan penyandang disabilitas, perwakilan unsur pendidikan/akademisi.

Sebagaimana Musrenbang RKPD di kelurahan, Bappeda juga mengirimkan Tim Evaluasi untuk melakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan Musrenbang RKPD di kecamatan, dengan menggunakan format yang terdapat pada lampiran Form C12 dari Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2021. Metode evaluasi yang digunakan dengan memberikan bobot penilaian terhadap aspek waktu pelaksanaan dan administrasi pendukungnya, persentase kehadiran dari berbagai unsur yang diundang beserta lampirannya, proses pelaksanaan dan hasilnya. Hasil penilaian digunakan untuk menentukan pelaksanaan Musrenbang RKPD terbaik, yang akan diberikan hadiah berdasarkan peringkat pertama, kedua dan ketiga dengan besaran hadiah sesuai kemampuan daerah berupa tambahan pagu indikatif kecamatan.

5. Forum Internal Perangkat Daerah

Forum Internal PD dilaksanakan pada tanggal 22-26 Januari 2024 dengan peserta internal PD dan *stakeholder* terkait untuk mensinergikan kegiatan pada perangkat daerah yang dibahas oleh internal PD sebelum dibawa ke forum PD.

6. Desk Hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan

Desk Hasil Musrenbang RKPD di kecamatan dilaksanakan pada 12 Februari 2024 diikuti oleh kecamatan pengusul dan Perangkat Daerah (PD) pengampu hasil Musrenbang RKPD dengan maksud untuk melakukan Sinkronisasi Hasil Musrenbang RKPD baik dari Nomenklatur Kegiatan dan Sub Kegiatan, Kewenangan, Volume dan Harga Satuan, serta Teknis Pelaksanaannya. Selanjutnya hasil desk menjadi acuan kecamatan dalam menginput usulan ke aplikasi SIPD sesuai hasil desk bersama PD pengampu.

7. Forum Khusus dengan Perangkat Daerah

Forum Khusus dengan PD dilaksanakan pada hari Senin, 13 Februari 2024. Pelaksanaannya dibagi menjadi 3 forum yaitu forum khusus anak, forum penanggulangan kemiskinan dan stunting, dan forum ekonomi kreatif. Forum khusus ini dihadiri oleh peserta yang terdiri dari perwakilan anak, rumah tangga miskin, penyandang disabilitas, penyandang penyakit yang rentan penolakan sosial, pemerhati kemiskinan, komite ekonomi kreatif, PD dan *stakeholder* terkait untuk menghasilkan keputusan mengenai kebutuhan kelompok masyarakat tertentu yang dapat diakomodir dan yang tidak dapat diakomodir oleh PD.

8. Desk Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Klinik Perencanaan

Desk Rancangan Renja PD dilaksanakan minggu ketiga Februari 2024 dengan mengundang Perangkat Daerah dan tim verifikator dari Bappeda yang bertujuan untuk menyelaraskan rencana kerja perangkat daerah terutama lokus dan anggaran kegiatan yang diusulkan dengan hasil Musrenbang kecamatan dan kelurahan serta pokok-pokok pikiran DPRD, dan juga pencermatan serta penyelarasan lebih mendalam bagi perangkat daerah yang mempunyai amanat SPM dan SDG's. Desk rancangan Renja juga melihat kesesuaian dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terutama dari sisi tujuan dan sasaran yang diwujudkan dalam program dan kegiatan perangkat daerah. Selanjutnya perencanaan yang bersifat *Top-down planning* ini akan menjadi muatan rancangan RKPD. Jika dipandang perlu maka perangkat daerah dapat memanfaatkan klinik perencanaan Bappeda untuk asistensi lebih dalam atas rencana kerja mereka. Hasil desk yang juga menampung usulan PD terhadap kebutuhan mendesak yang belum terakomodir dalam pagu indikatif yang diberikan, selanjutnya ditampung dan disampaikan oleh bidang sektoral kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Temanggung, untuk memperoleh persetujuan TAPD sesuai kemampuan keuangan daerah.

9. Forum Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah dilaksanakan pada 21 Februari 2024 dan pelaksanaannya dibagi kedalam 2 (dua) bidang. Bidang pertama yaitu Bidang Pembangunan Manusia yang dilaksanakan di Aula Progo Bappeda dan diikuti oleh 97 peserta. Bidang kedua yaitu Bidang

Pemerintahan dan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur yang dilaksanakan di Aula Sumbing Sindoro dan diikuti oleh 83 peserta. Hasil dari kegiatan ini adalah pembicaraan tentang isu strategis dan permasalahan pembangunan, rancangan Renja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD, prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Musrenbang Wilayah, Provinsi, dan Nasional, daftar usulan kegiatan yang belum diakomodir (*long list*) dalam rancangan RKPD.

10. Musrenbang RKPD di Kabupaten

Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan pada 7 Maret 2024 dengan mengundang Forkompimda, Pimpinan DPRD, Kepala Perangkat Daerah, Delegasi Kecamatan, Kepala Instansi Vertikal, unsur kelembagaan dan organisasi tingkat kabupaten, perwakilan kelompok profesi tingkat kabupaten, perwakilan akademisi dan pelaku pendidikan antara lain perwakilan perguruan tinggi dan perwakilan sekolah, pengurus partai politik tingkat kabupaten, perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar, LSM/Ormas, Tokoh masyarakat, unsur pengusaha/Investor, penyandang disabilitas, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat tertentu. Kegiatan Musrenbang Kabupaten akan ditayangkan secara *live streaming* oleh TV Temanggung, guna menjaring banyaknya masukan dan saran dari peserta guna menjadi masukan dalam penyusunan rancangan RKPD. Hasil dari kegiatan ini adalah kesepakatan isu strategis dan permasalahan pembangunan, kesepakatan prioritas program dan kegiatan, tanggapan atas masukan yang dituangkan dalam Berita Acara hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Temanggung untuk penyempurnaan rancangan akhir RKPD Tahun 2025.

Pada acara Musrenbang RKPD Kabupaten Temanggung juga akan diumumkan Penerima Penghargaan Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2025 di kelurahan dan kecamatan. Masing-masing penghargaan diberikan untuk 3 (tiga) kelurahan dan 3 (tiga) kecamatan terbaik berdasarkan SK Bupati.

11. Penyusunan Rancangan RKPD pasca Musrenbang

Tahapan pasca musrenbang RKPD untuk memperbaiki rancangan RKPD dengan masukan dan saran yang ada juga untuk memberi kesempatan perangkat daerah untuk memastikan lokasi kegiatan yang direncanakan.

12. *Reviu* Inspektorat

Dokumen perencanaan yang telah disesuaikan dengan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten dilakukan *reviu* oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung. *Reviu* ini dilaksanakan dengan tujuan untuk sinkronisasi antara Kebijakan Pusat, Provinsi, dan Daerah untuk Perencanaan Tahun 2025 di Kabupaten Temanggung.

13. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

Hasil dari semua proses yang dilakukan kemudian dirangkum menjadi rancangan Akhir RKPD yang berisi narasi lengkap dari Rancangan Peraturan Bupati, pendahuluan sampai dengan penutup termasuk matriks rencana program dan kegiatan beserta anggarannya.

14. Asistensi RKPD dari Provinsi Jawa Tengah

Rancangan Akhir RKPD sebelum ditetapkan harus mendapatkan asistensi/fasilitasi oleh Provinsi Jawa Tengah pada Minggu IV Bulan Mei 2023 melalui Surat Fasilitasi Rancangan Akhir Perkada RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2025 yang disampaikan kepada Kabupaten/Kota dengan mengirimkan surat permohonan fasilitasi dari Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Kepala BAPPEDA Provinsi beserta kelengkapannya. Asistensi ini bertujuan untuk sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dengan Kabupaten.

15. Penetapan RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati pada bulan Juni 2024.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

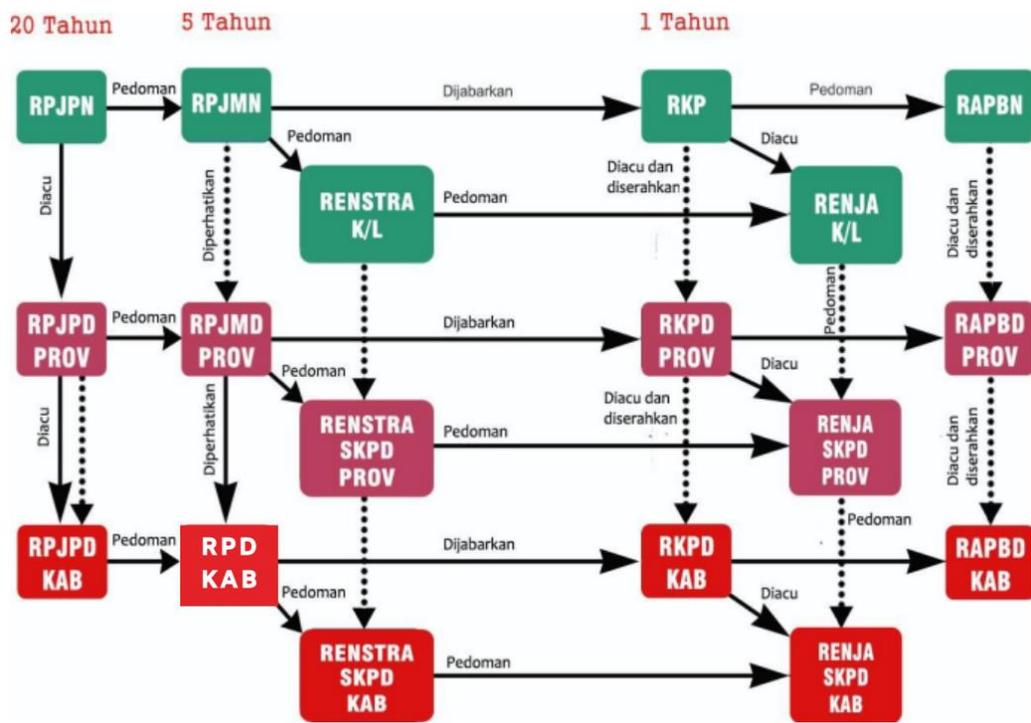
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 123);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 129);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 162);
26. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12).

1.4 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 berpedoman pada sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah, dokumen perencanaan sektoral yang ada serta merujuk juga pada penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan level pemerintahan desa. Hubungan keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 1.3
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Dokumen RKPD dalam kaitannya dengan dokumen sektoral seperti SPM, SDGs, Reformasi Birokrasi dan dokumen sektoral lainnya juga mengacu kepada dokumen-dokumen tersebut yang dituangkan dalam penyajian capaian-capaian indikator SPM maupun indikator yang berhubungan dengan SDGs dan Reformasi Birokrasi.

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Tujuan penyusunan adalah sebagai berikut.

1. Pedoman dalam penyusunan KUA/PPAS dan untuk menyusun RAPBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025;
2. Memberikan arah, acuan, dan indikator capaian yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan

1.6 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai Latar Belakang, Proses Penyusunan, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat gambaran umum kondisi daerah, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Ringkasan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Identifikasi Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat Arah Kebijakan dilihat dari kondisi perekonomian global dan nasional, kondisi perekonomian Jawa Tengah, dan kondisi perekonomian Kabupaten Temanggung, Pertumbuhan Ekonomi, Struktur Ekonomi, PDRB Perkapita serta inflasi.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan tentang Indikator Tujuan, Indikator Sasaran per Misi dengan Urusan/Bidang dan prioritas pembangunan daerah dengan mempertimbangkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2023.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat: rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD), dan capaian yang direncanakan dalam RPD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat tentang indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dirumuskan dari indikator tujuan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator sasaran yang kemudian disebut sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB VII PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan dan manfaat Dokumen RKPD.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografi

A. Letak dan Kondisi Geografis

1. Posisi Astronomis

Secara astronomis, Kabupaten Temanggung berada pada koordinat $110^{\circ}46'23''$ – $110^{\circ}46'30''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}32'14''$ – $7^{\circ}32'35''$ Lintang Selatan.

2. Posisi Geografis

Kabupaten Temanggung berada di tengah-tengah tiga pusat kegiatan ekonomi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Semarang (77 Km), Yogyakarta (64 Km), dan Purwokerto (134 Km).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023

Gambar 2.1
Peta Posisi Kabupaten Temanggung terhadap Provinsi Jawa Tengah

3. Kemiringan Lahan

Topografi Wilayah Kabupaten Temanggung kompleks dan beragam, meliputi: dataran, perbukitan, pegunungan, lembah, dan gunung dengan kemiringan antara 0%–70%. Pola topografi wilayah mirip sebuah cekungan raksasa yang terbuka di bagian Tenggara, sedangkan di bagian Selatan dan Barat dibatasi oleh Gunung Sumbing (3.340 m dpl) dan Gunung Sindoro (3.115 m dpl) dan di bagian Utara

dibatasi oleh Gunung Jurang Grawah (2.565 m dpl) dan pegunungan kecil lainnya yang membujur dari Timur Laut ke arah Tenggara. Berdasarkan klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten Temanggung meliputi: datar seluas 968 ha (1,17%), bergelombang seluas 32.492 ha (39,31%), curam seluas 31.232 ha (37,88%), dan sangat curam seluas 17.983 ha (21,64%).

4. Ketinggian Lahan

Wilayah Kabupaten Temanggung berada pada ketinggian 400- >1.500 m dpl. Wilayah tersebut merupakan daerah lereng Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang terhampar dari sisi Selatan, Barat sampai dengan Utara. Apabila ditinjau berdasarkan klasifikasi ketinggian Kabupaten Temanggung terbagi dalam 5 wilayah ketinggian sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Kabupaten Temanggung Berdasarkan Ketinggian

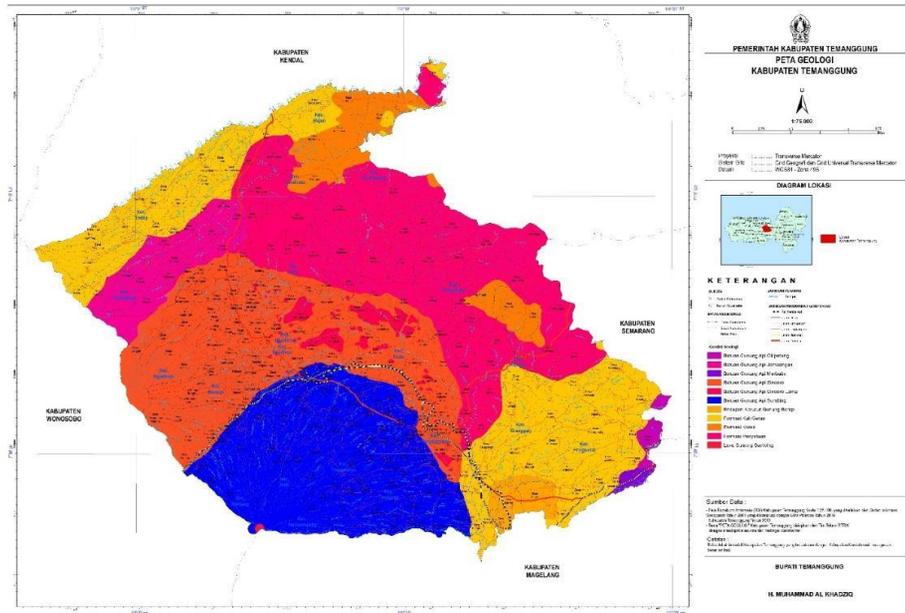
No	Wilayah Ketinggian (meter dpl)	Luas (Ha)	Luas (%)	Kecamatan
1	0– 500	8.538	9,77	Bejen, Candiroto, Gemawang, Kandangan, Kranggan, Temanggung, Tembarak, Selopampang, Pringsurat, Kaloran
2	500– 750	38.421	43,99	Bejen, Candiroto, Gemawang, Jumo, Kedu, Kandangan, Parakan, Bulu, Temanggung, Kaloran, Kranggan, Pringsurat, Tembarak, Tlogomulyo, Selopampang, Tretep, Wonoboyo
3	750– 1.000	20.106	23,02	Bejen, Tretep, Wonoboyo, Ngadirejo, Candiroto, Jumo, Gemawang, Kandangan, Selopampang, Kedu, Parakan, Kledung, Bulu, Kaloran, Pringsurat, Kandangan, Selopampang, Tembarak, Tlogomulyo
4	1.000–1.250	7.834	8,97	Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang, Bejen, Kandangan, Kaloran
5	1.250– 3550	12.167	14,25	Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang
Jumlah		86,483	100	

Sumber: Statistik Kabupaten Temanggung, 2023

5. Geologi

Dilihat dari sisi geologi, lahan seluas 86,483 ha jenis tanah di Kabupaten Temanggung meliputi: Latosol coklat (32,13%), Latosol coklat kemerahan (9,53%), Latosol merah kekuningan (35,33%), Regosol (20,14%), dan Andosol (2,60%). Selanjutnya apabila dilihat dari jenis batuan dan mineral yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung dapat

dikelompokkan menjadi: 1) Batuan Andesit, 2) Batu gamping, 3) Batu kali, 4) Batu tras, 5) Bentonit, 6) Diatomae, 7) Kerikil, dan 8) Pasir. Apabila dilihat luas wilayah secara administrasi, kemiringan dan ketinggian disebabkan karena metode dan pendekatan penghitungan.



Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Gambar 2.2
Peta Geologi Kabupaten Temanggung

B. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 86.483 ha yang terletak di antara 7°32'14" - 7°32'35" Lintang Selatan dan 110°46'23" - 110°46'30" Bujur Timur. Secara administrasi terdiri dari 20 kecamatan 266 desa dan 23 kelurahan.

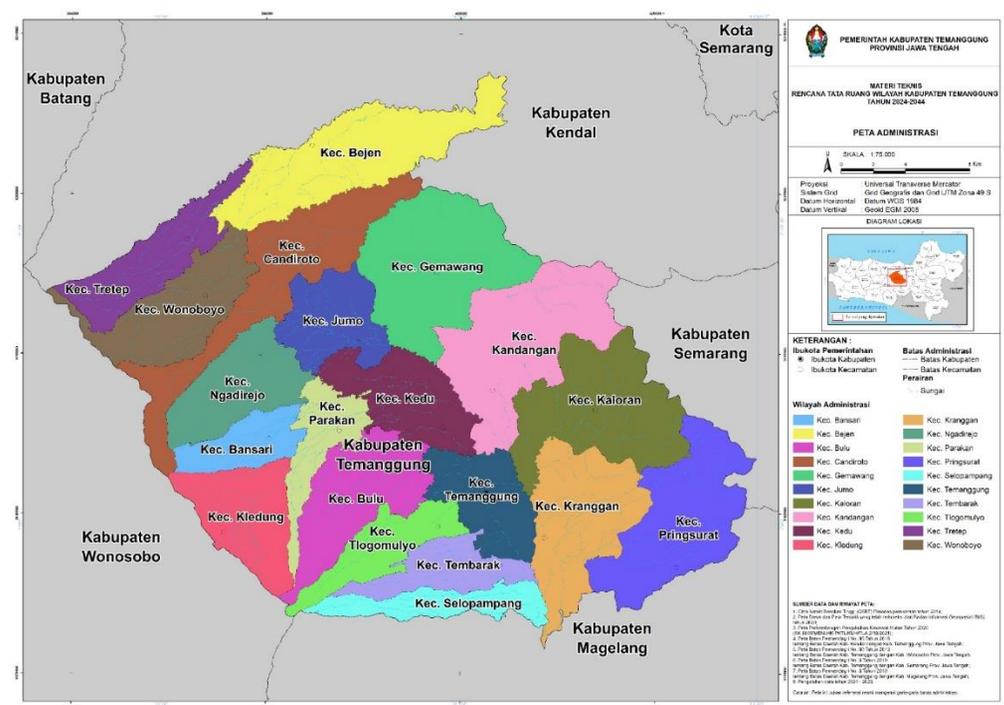
Wilayah Kabupaten Temanggung berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di wilayah Provinsi Jawa Tengah, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo. Batas wilayah dengan kecamatan dan desa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung

No.	Batas Wilayah	Kabupaten Lain	Kecamatan yang berbatasan	Desa yang berbatasan
1.	Sebelah Utara	Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang	Bejen, Candiroto, Gemawang, Kandangan	<ul style="list-style-type: none"> Desa Bejen, Desa Selosabrang, Desa Petung, Desa Duren, dan Desa Ngalyan di Kecamatan Bejen. Desa Canggal di Kecamatan Candiroto. Desa Muncar dan Desa Karangseneng di Kecamatan Gemawang.

No.	Batas Wilayah	Kabupaten Lain	Kecamatan yang berbatasan	Desa yang berbatasan
				<ul style="list-style-type: none"> Desa Margolelo dan Desa Kedawung di Kecamatan Kandangan.
2.	Sebelah Timur	Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang	Kandangan, Kaloran, Pringsurat	<ul style="list-style-type: none"> Desa Tlogopucang dan Desa Kedawung di Kecamatan Kandangan. Desa Kaloran, Desa Kalimanggis, dan Desa Getas di Kecamatan Kaloran. Desa Wonokerso, Desa Soborejo, dan Desa Klepu di Kecamatan Pringsurat
3.	Sebelah Selatan	Kabupaten Magelang	Pringsurat, Kranggan, Selopampang, Tlogomulyo, Bulu	<ul style="list-style-type: none"> Desa Soropadan, Desa Kupon, Desa Kebumen, Desa Pringsurat, dan Desa Rejosari di Kecamatan Pringsurat. Desa Nguwet, Desa Pare, dan Desa Bengkal di Kecamatan Kranggan. Desa Bagusari, Desa Kebonagung, Desa Gambasan, Desa Salamrejo, Desa Selopampang, dan Desa Tanggulanom di Kecamatan Selopampang. Desa Losari dan Desa Pagersari di Kecamatan Tlogomulyo
4.	Sebelah Barat	Kabupaten Wonosobo	Kledung, Candiroti, Wonobojo	<ul style="list-style-type: none"> Desa Batusari dan Desa Kledung di Kecamatan Kledung. Desa Canggal di Kecamatan Candiroti. Desa Cemoro di Kecamatan Wonobojo.

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, Tahun 2023



Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Gambar 2.3
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung

Secara administratif Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 Kecamatan, 266 Desa, 23 Kelurahan, 1.568 Dusun, 1.731 lingkungan, 1.506 RW, dan 5.921 RT dengan pusat pemerintahan berada di Kota Temanggung. Sebaran jumlah desa, kelurahan, RW dan RT menurut kecamatan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Sebaran Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT Per kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Desa		Kelurahan		Total	
					RW	RT	RW	RT	RW	RT
1	Bulu	4.528,08	19	0	84	302	0	0	84	302
2	Tembarak	2.456,95	13	0	67	224	0	0	67	224
3	Temanggung	3.223,04	6	19	20	87	119	541	139	628
4	Pringsurat	5.955,16	14	0	113	364	0	0	113	364
5	Kaloran	6.367,29	14	0	111	416	0	0	111	416
6	Kandangan	7.060,93	16	0	101	378	0	0	101	378
7	Kedu	3.714,43	14	0	108	424	0	0	108	424
8	Parakan	2.355,01	14	2	50	239	27	120	77	359
9	Ngadirejo	3.783,09	19	1	97	396	3	30	100	426
10	Jumo	3.095,19	13	0	60	273	0	0	60	273
11	Tretep	3.533,54	11	0	25	141	0	0	25	141
12	Candiroto	6.320,89	14	0	74	275	0	0	74	275
13	Kranggan	5.316,79	12	1	97	358	7	29	104	387
14	Tlogomulyo	2.644,79	12	0	47	156	0	0	47	156
15	Selopampang	2.240,04	12	0	46	128	0	0	46	128
16	Bansari	2.037,44	13	0	46	189	0	0	46	189
17	Kledung	3.704,70	13	0	38	160	0	0	38	160
18	Bejen	6.608,75	14	0	51	170	0	0	51	170
19	Wonobooyo	4.373,40	13	0	53	209	0	0	53	209
20	Gemawang	7.163,90	10	0	62	312	0	0	62	312
	Jumlah	86.483.41	266	23	1.350	5.201	156	720	1.506	5.921

Sumber: DPUPR, 2024

Kecamatan paling luas di Kabupaten Temanggung adalah Kecamatan Gemawang dengan luas 7.164 ha atau setara dengan 8,28% dari total luas wilayah Kabupaten Temanggung, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Bansari dengan luas 2.037 ha (2,35%). Kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling banyak adalah Kecamatan Temanggung dengan 6 desa dan 19 Kelurahan, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Gemawang dengan jumlah 10 desa.

C. Karakteristik Wilayah

Kabupaten Temanggung merupakan kabupaten yang terletak di bagian Tengah Provinsi Jawa Tengah dengan keuntungan lokasi strategis yang berada di tengah-tengah tiga pusat kegiatan ekonomi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yaitu Semarang (77 km), Yogyakarta (64 km) dan Purwokerto (134 km). Kabupaten Temanggung merupakan bagian dari Wilayah Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Gelangmanggung (Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung). Kawasan ini di dukung oleh potensi pariwisata yaitu pelestarian Kawasan Borobudur sebagai destinasi pariwisata kelas dunia yang dipadukan dengan wisata alam Gunung Merapi-Merbabu-Telomoyo dan Gunung Sindoro-Sumbing. Kabupaten Temanggung dengan strategi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagai pendukung pengembangan wilayah koridor Borobudur-Dieng dan Gelangmanggung serta Kawasan perkotaan Muntilan-Mungkid-Kota Magelang-Temanggung.

Selain itu pengembangan wilayah dilakukan Upaya peningkatan pada sektor pertanian dan kehutanan, pengembangan industri ekonomi kreatif dan industri pengolahan hasil pertanian dan kehutanan.

Potensi komoditas utama pada Kabupaten Temanggung berasal dari sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor perdagangan besar dan eceran. Selain tiga sektor tersebut, Kabupaten Temanggung juga memiliki sektor potensial yang juga berkontribusi dalam pertumbuhan perekonomian daerah yaitu sektor pariwisata. Salah satu komoditas utama di Kabupaten Temanggung yaitu sektor pengolahan meliputi industri kayu, barang dari kayu dan gabus, dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya, industri makanan dan minuman, industri pengolahan tembakau.

Keunggulan Kabupaten Temanggung pada sektor pertanian khususnya hortikultura adalah bawang putih, bawang merah dan cabai. Pemerintah Kabupaten Temanggung bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sejak tahun 2021 telah mengembangkan bawang putih lokal yang mempunyai umbi yang cukup besar, seperti bawang putih impor dan diberi nama varietas Geol Temanggung Agrihorti (GTA). Pada Tahun 2022 Kementrian Pertanian pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian bernomor 1899/PVL/2022 telah mematenkan varietas GTA. Umur panen bawang putih varietas GTA adalah 106 hari dengan hasil ubinan berdasarkan pengukuran mencapai 12,8 – 15 ton/ha. Diharapkan Kabupaten Temanggung dapat mendukung budidaya dan swasembada bawang putih di Indonesia. Luas lahan food estate pada Tahun 2021 yaitu 339 hektare, dan pada Tahun 2023 bertambah luasannya mencapai 1.000 hektar. Jenis tanaman yang ditanam salah satunya adalah bawang merah, food estate berada di Kawasan Embung Bansari yang mampu menghasikan bawang merah sebanyak 15,7 ton per hektar di Tahun 2022.

Produk hortikultura unggulan yang lain adalah cabai rawit dan cabai besar. Cabai besar dengan luas panen 3.521 hektare, total produksi sebesar 272.971,20 kuintal dengan produktivitas 77,53 kuintal/hektare. Cabai rawit luas lahan panen 6.664,50 hektare, total produksi 506.502 kuintal dengan produktivitas 76 kuintal/hektare.

Produk perkebunan Kabupaten Temanggung yang unggul adalah tembakau dan kopi. Tembakau srintil merupakan tembakau berkualitas terbaik di dunia yang ditanam dengan kearifan lokal berasal dari varietas asli Temanggung yaitu varietas Kemloko 1 dan Kemloko 2 ditanam dengan

ketinggian di atas 800 mdpl dan tidak bisa dihasilkan di daerah lain hanya bisa di hasilkan di desa Legoksari, Losari, Pagergunung, Pagersari, Tlilir, Wonosari, Bansari, Wonotirto, banaran, Gandu, Gedegan dan Kemloko. Selain tembakau Srintil, tembakau Kabupaten Temanggung menjadi salah satu supplier pabrik rokok terbesar di Indonesia. Total produksi tembakau pada tahun 2023 sebesar 96.857,30 Kuintal, luas panen 14.764,05 hektar dengan produktivitas sebesar 6,56 kuintal/hektar.

Produk unggulan perkebunan yang lain adalah kopi robusta dan kopi arabika, yang mempunyai citra rasa yang berbeda dengan daerah lain. Temanggung menjadi produsen kopi terbesar di Jawa Tengah. Produksi kopi robusta tahun 2023 sebesar 84.769 kuintal, luas panen 12.972,20 hektar, dengan produktivitas sebesar 6,63 kuintal/hektar. Untuk total produksi kopi arabika pada Tahun 2023 sebesar 9.924,34 kuintal, luas panen 1.699,95 hektar dengan produktivitas 5,75 kuintal/hektar.

Pada sektor pariwisata, Kabupaten Temanggung memiliki destinasi wisata berupa kawasan Jumprit yang menjadi lokasi pengambilan air suci pada hari raya Waisak dan situs Liyangan yang merupakan situs peninggalan Kerajaan Mataram Kuno. Selain itu, Temanggung juga menjadi daerah perlintasan bagi wisatawan dari arah Semarang dan Yogyakarta yang ingin mengunjungi Borobudur serta kawasan wisata Dieng yang terletak di Wonosobo. Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dinbudpar) pada Tahun 2023 berfokus mengembangkan wisata alam. Terdapat lima kecamatan yang potensi alamnya dapat diangkat ke kancah nasional hingga internasional, yakni Kecamatan Kledung, Ngadirejo, Tretep, Bejen, dan Wonoboyo.

2.1.1.2 Kondisi Demografi

A. Jumlah dan Sebaran Penduduk

Jumlah penduduk pada tahun 2023 Semester II adalah 817.483 jiwa dengan kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Temanggung Semester II Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)	Kepadatan penduduk (jiwa/ha)
1	Bulu	4.528,08	45,28	50.379	1112,59	11,13
2	Tembarak	2.456,95	24,57	32.278	1313,74	13,14
3	Temanggung	3.223,04	32,23	84.747	2629,41	26,29

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)	Kepadatan penduduk (jiwa/ha)
4	Pringsurat	5.955,16	59,55	53.837	904,04	9,04
5	Kaloran	6.367,29	63,67	47.212	741,48	7,41
6	Kandangan	7.060,93	70,61	54.385	770,22	7,70
7	Kedu	3.714,43	37,14	60.828	1637,61	16,38
8	Parakan	2.355,01	23,55	54.786	2326,36	23,26
9	Ngadirejo	3.783,09	37,83	58.605	1549,13	15,49
10	Jumo	3.095,19	30,95	31.109	1005,07	10,05
11	Tretep	3.533,54	35,34	22.012	622,94	6,23
12	Candiroto	6.320,89	63,21	33.941	536,97	5,37
13	Kranggan	5.316,79	53,17	50.737	954,28	9,54
14	Tlogomulyo	2.644,79	26,45	23.721	896,89	8,97
15	Selopampang	2.240,04	22,40	20.959	935,65	9,36
16	Bansari	2.037,44	20,37	24.904	1222,32	12,22
17	Kledung	3.704,70	37,05	28.822	777,98	7,78
18	Bejen	6.608,75	66,09	22.006	332,98	3,33
19	Wonobojo	4.373,40	43,73	27.457	627,82	6,28
20	Gemawang	7.163,90	71,64	34.758	485,18	4,85
Jumlah		86.483,41	864,83	817.483	945,25	9,45

Sumber: DKB semester II 2023, PDAK – Kementerian Dalam Negeri RI Tahun 2023(data diolah)

Pada Tahun 2023 kecamatan dengan jumlah penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Temanggung. Jumlah penduduk Kecamatan Temanggung sebanyak 84.747 jiwa dimana mencakup 10,367 % dari jumlah total keseluruhan penduduk Kabupaten Temanggung. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Selopampang dengan jumlah penduduk sebanyak 20.959 jiwa.

Tiga kecamatan dengan jumlah penduduk paling padat adalah Kecamatan Temanggung dengan kepadatan 2.538,10 jiwa/km², diikuti Kecamatan Parakan dengan kepadatan 2.464,51 jiwa/km², Kecamatan Kedu dengan kepadatan 1.739,93 jiwa/km² dan rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Temanggung tahun 2023 adalah 938,93 jiwa/km².

Sebaran jumlah penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

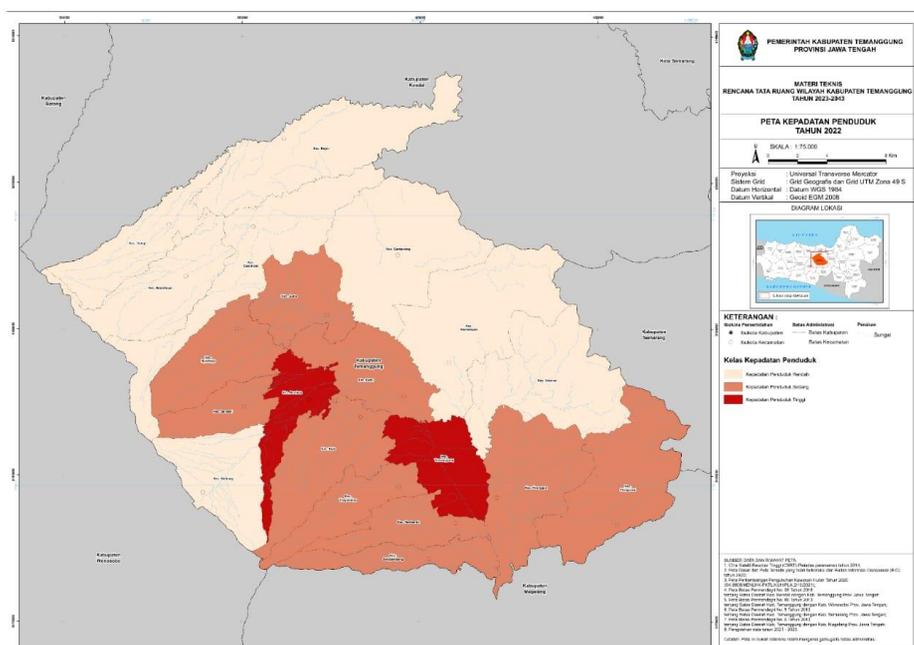
Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2018 sampai dengan Semester II Tahun 2023

No.	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Bulu	48.785	48.840	49.301	49.879	50.379

No.	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
2.	Tembarak	31.107	31.274	31.545	31.821	32.278
3.	Temanggung	83.157	83.138	83.271	83.911	84.747
4.	Pringsurat	52.122	52.458	52.791	53.078	53.837
5.	Kaloran	45.631	46.065	46.248	46.707	47.212
6.	Kandangan	52.160	52.648	53.084	53.716	54.385
7.	Kedu	58.889	58.935	59.318	60.035	60.828
8.	Parakan	53.588	53.897	54.076	54.174	54.786
9.	Ngadirejo	56.233	56.921	57.371	57.834	58.605
10.	Jumo	30.002	30.172	30.344	30.582	31.109
11.	Tretep	21.113	21.238	21.394	21.587	22.012
12.	Candiroto	32.956	32.857	33.166	33.468	33.941
13.	Kranggan	49.021	49.254	49.750	50.234	50.737
14.	Tlogomulyo	22.832	23.087	23.208	23.437	23.721
15.	Selopampang	20.175	20.465	20.618	20.708	20.959
16.	Bansari	24.203	24.298	24.409	24.579	24.904
17.	Kledung	27.902	28.009	28.171	28.494	28.822
18.	Bejen	21.482	21.693	21.643	21.734	22.006
19.	Wonobooyo	26.294	26.540	26.781	27.107	27.457
20.	Gemawang	33.612	33.767	33.940	34.355	34.758
	JUMLAH	783.550	791.264	800.429	807.440	817.483

Sumber : Dindukcapi, SIPD Kabupaten Temanggung Semester II Tahun 2023

Jumlah di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2019 dengan jumlah penduduk 783.550 jiwa bertambah menjadi 817.483 jiwa pada Tahun 2023, naik sejumlah 33.933 jiwa. Gambaran penyebaran jumlah penduduk Kabupaten Temanggung di 20 kecamatan dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Gambar 2.4
Gambaran Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Jumlah penduduk terbesar pada akhir Tahun 2023 adalah di Kecamatan Temanggung. Hal tersebut dikarenakan pusat perekonomian Kabupaten Temanggung berada di Kecamatan Temanggung.

Kepadatan penduduk Kabupaten Temanggung relatif lebih rendah dibandingkan dengan Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung.

Tabel 2.6
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Kawasan Gelangmanggung Tahun 2023

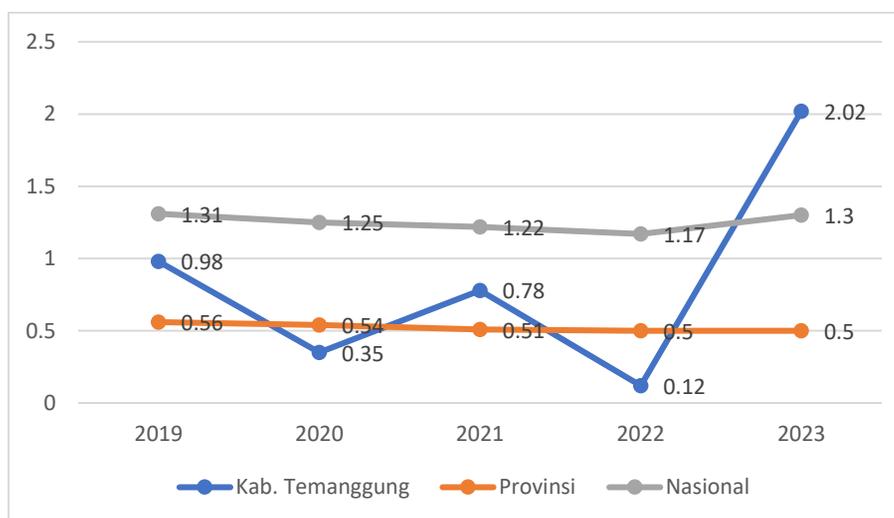
Kab/Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk Tahun 2023	Kepadatan Penduduk Tahun 2023 (Jiwa/Km ²)
Kota Magelang	18,12	127.675	7.046,082
Kab. Magelang	1.102,93	1.312.573	1.190,078
Kab. Temanggung	864,83	817.483	945,25
Rata-rata			3.060,47

Sumber: ^(a) Dindukcapil semester II Tahun 2023, data diolah

^(b) BPS Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2023

Rata-rata kepadatan penduduk di wilayah pengembangan Gelangmanggung adalah 3.060,47 jiwa/km². Daerah dengan jumlah penduduk paling padat adalah Kota Magelang dengan kepadatan mencapai 7.046,082 jiwa/km². Kepadatan penduduk Kabupaten Temanggung berada di bawah rata-rata kepadatan penduduk di wilayah pengembangan Gelangmanggung, dengan kepadatan 945,25 jiwa/km².

Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan jumlah penduduk dengan faktor penambah jumlah kelahiran dan migrasi masuk serta faktor pengurang jumlah kematian dan migrasi keluar pada suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung tergolong fluktuatif sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2023, SIPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Gambar 2.5
Laju Pertumbuhan Penduduk Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif, dan pertumbuhan penduduk pada Tahun 2023 lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

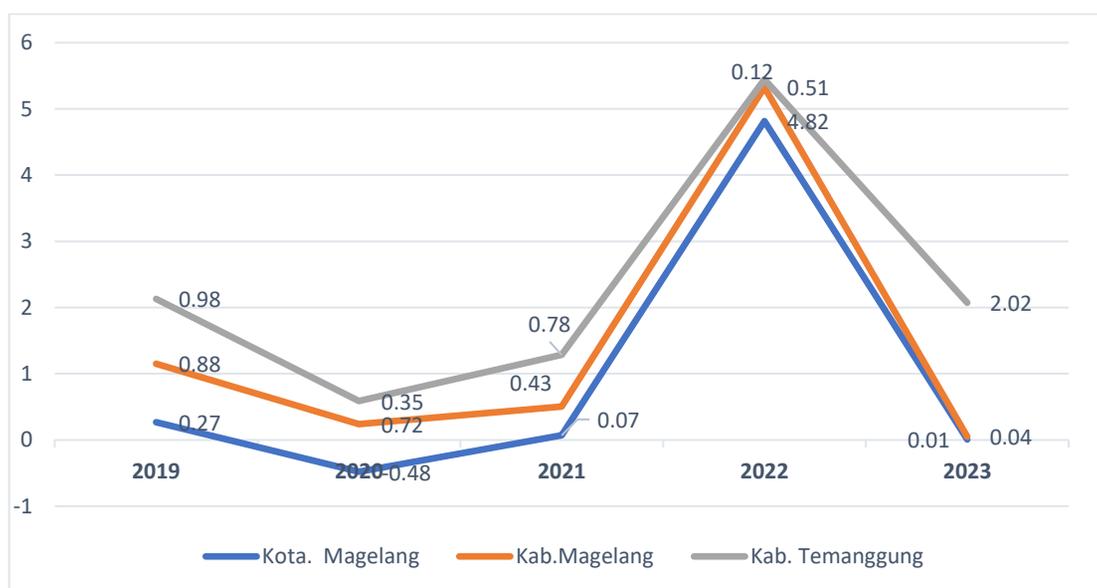
Tabel 2.7
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2019-2023

Kab/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)					Laju Pertumbuhan Penduduk (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Kota. Magelang	122.111	121.526	121.610	127.466	127.675	0,27	-0,48	0,07	4,82	0,01
Kab. Magelang	1.290.591	1.299.859	1.305.512	1.312.175	1.312.573	0,88	0,72	0,43	0,51	0,04
Kab. Temanggung	791.264	794.055	800.276	801.276	817.483	0,98	0,35	0,78	0,12	2,02
Rata-rata	734.655	738.480	742.466	746.972	752.577	0,56	0,52	0,54	0,61	0,75
Rata-rata 5 tahun						0,48				

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk pada pengembangan wilayah Gelangmanggung Tahun 2019-2023 adalah 0,48%, secara kepadatan penduduk Kabupaten Temanggung lebih baik jika dibandingkan rata-rata penduduk di wilayah pengembangan Gelangmanggung.

Laju pertumbuhan penduduk di Kawasan Gelangmanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut ini.



Gambar 2.6
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Gelangmanggung Tahun 2019-2023

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk per Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Tahun 2019 – 2023 dan Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan Tahun 2019 – 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2019-2023					Laju Pertumbuhan Penduduk 2019-2023				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bulu	48.785	48.840	49.215	49.879	50.379	1,38%	0,11%	0,77%	1,35%	1,00%
2	Tembarak	31.107	31.274	31.501	31.821	32.278	1,20%	0,54%	0,73%	1,02%	1,44%
3	Temanggung	83.157	83.138	83.404	83.911	84.747	0,65%	-0,02%	0,32%	0,61%	1,00%
4	Pringsurat	52.122	52.458	52.746	53.078	53.837	1,04%	0,64%	0,55%	0,63%	1,43%
5	Kaloran	45.631	46.065	46.295	46.707	47.212	1,18%	0,95%	0,50%	0,89%	1,08%
6	Kandangan	52.160	52.648	53.030	53.716	54.385	1,05%	0,94%	0,73%	1,29%	1,25%
7	Kedu	58.889	58.935	59.264	60.035	60.828	1,41%	0,08%	0,56%	1,30%	1,32%
8	Parakan	53.588	53.897	54.130	54.174	54.786	0,55%	0,58%	0,43%	0,08%	1,13%
9	Ngadirejo	56.233	56.921	57.355	57.834	58.605	0,87%	1,22%	0,76%	0,84%	1,33%
10	Jumo	30.002	30.172	30.389	30.582	31.109	1,17%	0,57%	0,72%	0,64%	1,72%
11	Tretep	21.113	21.238	21.362	21.587	22.012	0,99%	0,59%	0,58%	1,05%	1,97%
12	Candiroto	32.956	32.857	33.116	33.468	33.941	1,03%	-0,30%	0,79%	1,06%	1,41%
13	Kranggan	49.021	49.254	49.578	50.234	50.737	1,15%	0,48%	0,66%	1,32%	1,00%
14	Tlogomulyo	22.832	23.087	23.207	23.437	23.721	0,54%	1,12%	0,52%	0,99%	1,21%
15	Selopampang	20.175	20.465	20.614	20.708	20.959	0,95%	1,44%	0,73%	0,46%	1,21%
16	Bansari	24.203	24.298	24.416	24.579	24.904	0,91%	0,39%	0,49%	0,67%	1,32%
17	Kledung	27.902	28.009	28.208	28.494	28.822	1,07%	0,38%	0,71%	1,01%	1,15%
18	Bejen	21.482	21.693	21.748	21.734	22.006	0,96%	0,98%	0,25%	-0,06%	1,25%
19	Wonobojo	26.294	26.540	26.767	27.107	27.457	0,47%	0,94%	0,86%	1,27%	1,29%
20	Gemawang	33.612	33.767	33.931	34.355	34.758	1,02%	0,46%	0,49%	1,25%	1,17%
Jumlah		791.264	795.556	800.276	807.440	817.483	0,98%	0,54%	0,59%	0,90%	1,24%

Sumber: DKB semester II 2023, PDAK – Kementerian Dalam Negeri RI Tahun 2023(data diolah)

Meskipun jumlah penduduk total Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 cenderung bertambah, namun laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung pada Tahun 2019-2022 di tiap kecamatan cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2022, laju pertumbuhan penduduk tinggi di Kecamatan Tretep sebesar 1,97% atau bertambah 43.599 jiwa.

B. Struktur Penduduk

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: Dindikcapil Kabupaten Temanggung, Semester II Tahun 2023

Gambar 2.7

Grafik Piramida Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Temanggung pada Semester II Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2023

No.	Kelompok Usia	Jumlah	%
1	0 – 4	51.763	6,33
2	5 – 9	58.621	7,17
3	10 – 14	66.171	8,09
4	15 – 19	58.843	7,20
5	20 – 24	61.892	7,57
6	25 – 29	59.352	7,26
7	30 – 34	57.338	7,01
8	35 – 39	55.884	6,84
9	40 – 44	58.791	7,19
10	45 – 49	57.773	7,07
11	50 – 54	58.016	7,10
12	55 – 59	53.831	6,58
13	60 – 64	43.772	5,35
14	65 – 69	33.669	4,12
15	70 – 74	20.612	2,52

No.	Kelompok Usia	Jumlah	%
16	≥ 75	21.155	2,59
Jumlah		817.483	100

Sumber: Dindikcapil Kabupaten Temanggung, Semester II Tahun 2023

Kelompok umur paling terbanyak di Kabupaten Temanggung adalah penduduk usia 10-14 tahun dengan jumlah 66.171 jiwa atau setara dengan 8,09% dari total penduduk Kabupaten Temanggung, berikutnya kelompok usia 20-24 tahun, dengan jumlah 61.892 jiwa atau setara dengan 7,57%.

Jumlah penduduk Kabupaten Temanggung sebanyak 817.483 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 412.163 jiwa (50,42%), sedangkan penduduk perempuan sebanyak 405.320 jiwa (49,58%) di mana jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,24% dari tahun sebelumnya. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan dengan rasio 101,41. Sebaran jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kepadatan penduduk di tiap kecamatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10
Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin di Tiap Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jenis Kelamin				Sebaran		Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	% Laki-laki	Perempuan	% Perempuan	Kecamatan	%	
1	Bulu	25.599	50,81%	24.780	49,19%	50.379	6,16%	103%
2	Tembarak	16.491	51,09%	15.787	48,91%	32.278	3,95%	104%
3	Temanggung	42.129	49,71%	42.618	50,29%	84.747	10,37%	99%
4	Pringsurat	26.993	50,14%	26.844	49,86%	53.837	6,59%	101%
5	Kaloran	23.652	50,10%	23.560	49,90%	47.212	5,78%	100%
6	Kandangan	27.577	50,71%	26.808	49,29%	54.385	6,65%	103%
7	Kedu	30.742	50,54%	30.086	49,46%	60.828	7,44%	102%
8	Parakan	27.595	50,37%	27.191	49,63%	54.786	6,70%	101%
9	Ngadirejo	29.635	50,57%	28.970	49,43%	58.605	7,17%	102%
10	Jumo	15.634	50,26%	15.475	49,74%	31.109	3,81%	101%
11	Tretep	11.276	51,23%	10.736	48,77%	22.012	2,69%	105%
12	Candiroto	17.042	50,21%	16.899	49,79%	33.941	4,15%	101%
13	Kranggan	25.228	49,72%	25.509	50,28%	50.737	6,21%	99%
14	Tlogomulyo	12.106	51,03%	11.615	48,97%	23.721	2,90%	104%
15	Selopampang	10.595	50,55%	10.364	49,45%	20.959	2,56%	102%
16	Bansari	12.654	50,81%	12.250	49,19%	24.904	3,05%	103%
17	Kledung	14.636	50,78%	14.186	49,22%	28.822	3,53%	103%
18	Bejen	11.105	50,46%	10.901	49,54%	22.006	2,69%	102%
19	Wonoboyo	13.959	50,84%	13.498	49,16%	27.457	3,36%	103%
20	Gemawang	17.515	50,39%	17.243	49,61%	34.758	4,25%	102%

No	Kecamatan	Jenis Kelamin				Sebaran		Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	% Laki-laki	Perempuan	% Perempuan	Kecamatan	%	
	Jumlah	412.163	50,42%	405.320	49,58%	817.483	100,00%	102%

Sumber: Dindikcapil Kabupaten Temanggung, Semester II Tahun 2023.

Kualitas sumber daya manusia dilihat dari keahlian, kemampuannya dan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Asumsinya, semakin tinggi pendidikan diharapkan semakin tinggi kemampuan dan keahlian yang dimilikinya. Indikator jenjang pendidikan yang ditamatkan bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan program wajib belajar 9 tahun. Komposisi penduduk Kabupaten Temanggung berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan										Jumlah
		Strata III	Strata II	DIV/Strata I	DIII	DI/DII	SLTA	SLTP	SD	Tidak/belum tamat SD	Tidak/Belum sekolah	
1	Bulu	2	58	1.115	409	140	5.006	6.090	9.710	14.667	13.182	50.379
2	Tembarak	6	26	716	171	116	3.446	4.876	6.707	5.295	10.919	32.278
3	Temanggung	11	462	6.320	2.013	637	17.984	10.875	15.177	11.177	20.091	84.747
4	Pringsurat	3	48	1.141	317	169	7.461	10.651	12.045	4.177	17.825	53.837
5	Kaloran	1	24	881	248	197	4.694	7.063	10.127	5.248	18.729	47.212
6	Kandangan	5	38	1.006	313	223	5.132	6.993	10.067	6.701	23.907	54.385
7	Kedu	2	81	1.758	569	290	7.128	7.579	12.173	13.751	17.497	60.828
8	Parakan	11	122	2.190	792	292	8.821	7.119	9.040	9.252	17.147	54.786
9	Ngadirejo	1	33	1.436	515	256	6.939	10.486	15.848	9.926	13.165	58.605
10	Jumo	2	19	694	236	161	2.991	4.361	6.880	5.462	10.303	31.109
11	Tretep	1	6	140	48	43	770	2.856	5.937	4.656	7.555	22.012
12	Candiroto	2	17	827	331	200	3.433	4.427	8.215	9.291	7.198	33.941
13	Kranggan	3	62	1.392	401	212	7.513	9.224	8.592	7.473	15.865	50.737
14	Tlogomulyo	3	10	333	125	46	2.079	3.689	5.817	4.683	6.936	23.721
15	Selopampang	2	10	470	134	73	2.560	3.257	5.576	3.460	5.417	20.959
16	Bansari	0	14	442	141	62	2.234	3.891	5.198	9.062	3.860	24.904
17	Kledung	1	10	246	95	37	1.899	3.826	6.903	4.225	11.580	28.822
18	Bejen	1	14	330	133	86	2.271	3.793	6.121	2.527	6.730	22.006
19	Wonobojo	2	10	350	105	81	1.898	4.542	8.278	3.671	8.520	27.457
20	Gemawang	1	15	381	131	89	2.162	4.151	7.783	7.237	12.808	34.758
	Jumlah	60	1.079	22.168	7.227	3.410	96.421	119.749	176.194	141.941	249.234	817.483
	Persentase (%)	0,007	0,132	2,712	0,884	0,417	11,795	14,649	21,553	17,363	30,488	100

Sumber: Dindikcapil Kabupaten Temanggung, 2022

Berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk Temanggung didominasi kategori tidak/belum sekolah sebesar 30,488%, disusul dengan jenjang tamat SD sebesar 21,55%. Untuk tamatan jenjang perguruan tinggi masih relatif kecil yaitu 2,712%. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pendidikan adalah karena mahal biaya pendidikan.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro salah satunya dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Pembangunan ekonomi Kabupaten Temanggung mengalami perubahan fluktuatif seiring dengan dinamika pembangunan mulai dari Tahun 2016-2019, namun pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung mengalami kontraksi akibat dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 dan 2022, perkembangan ekonomi sudah semakin membaik pasca pandemi Covid-19, dimana capaian Tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,20 persen, meningkat dari capaian Tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,34 persen. Sementara itu, pada Tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung sebesar 5,00 persen yang mengalami perlambatan dibanding Tahun 2022. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Tahun Sebelumnya
Tahun 2019-2023

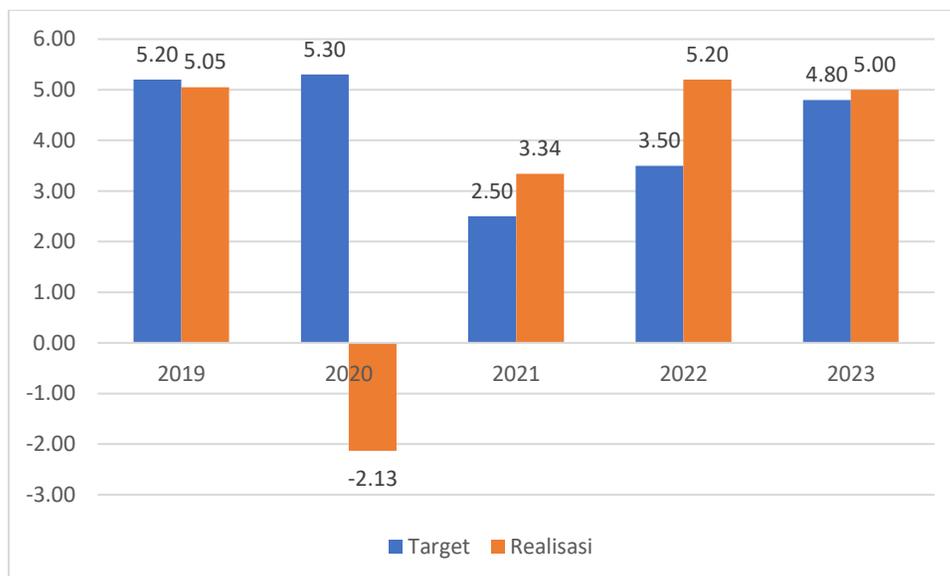
Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung			
	Target	Realisasi	Perubahan	Kinerja Pencapaian Target RKPD
2019	5,2	5,05	-0,08	100%
2020	5,3	-2,13	-7,18	100%
2021	2,5	3,34	5,47	100%
2022	3,5	5,2	1,86	100%
2023	4,8	5	-0,2	100%

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Pada periode 2019-2020 perubahan pertumbuhan ekonomi berada pada posisi negatif (<0) akibat pandemi covid-19 dengan puncak penurunan terendah mencapai -7,18 pada tahun 2020. Pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 mulai terlihat pada tahun 2021 dengan perubahan pertumbuhan ekonomi dengan arah positif (>0) mencapai 5,47 menjadi 3,34 persen. Perubahan pertumbuhan ekonomi juga berlanjut pada kondisi

terkini pada tahun 2022 dengan perubahan positif mencapai 1,86 menjadi 5,20 persen, dan melambat -0,2 menjadi 5,00 persen.

Perbandingan pertumbuhan ekonomi daerah dengan target RKPD pada tahun 2023 telah mencapai 100% kinerja pencapaian target RKPD yang mana dari target yang ditetapkan sebesar 4,80% telah dapat tercapai sebesar 5%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung 5 tahun terakhir jika dibandingkan dengan target dapat dilihat pada tabel gambar berikut.



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 2.8
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Target RKPD
Tahun 2019-2023

Guna mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dapat diketahui dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Nilai PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Konstan (tahun dasar 2010) Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah) Tahun 2019-2023

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.269,02	3.331,08	3.358,51	3.456,66	3.500,84
B	Pertambangan dan Penggalian	116,31	118,76	126,77	121,77	125,574
C	Industri Pengolahan	3.971,38	3.947,19	4.025,97	4.069,85	4.245,85
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,70	14,10	14,78	15,56	16,47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,74	13,00	13,73	13,76	14,36
F	Konstruksi	764,99	749,62	806,12	836,12	901,12
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	3.445,11	3.314,95	3.559,94	3.712,94	3.928,94

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
	Mobil dan Sepeda Motor					
H	Transportasi dan Pergudangan	771,94	533,79	548,56	907,26	978,95
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	267,28	249,09	264,11	303,84	341,79
J	Informasi dan Komunikasi	332,03	378,99	401,67	410,67	456,86
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	466,12	475,46	491,70	494,23	508,6
L	Real Estate	134,95	134,87	137,94	145,94	158,14
M,N	Jasa Perusahaan	58,37	54,68	56,33	59,51	64,76
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	402,52	396,03	395,00	401,33	421,83
P	Jasa Pendidikan	669,62	668,34	671,96	682,91	730,41
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	178,40	192,22	193,28	198,27	214,78
R,S,T,U	Jasa lainnya	339,57	318,57	321,56	356,76	388,26
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		14.483,26	15.214,06	15.387,93	16.187,37	16.997,53

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Nilai PDRB Temanggung tahun 2023 atas dasar harga konstan sebesar 16,98 triliun rupiah, naik dari tahun 2022 yang sebesar 15,38 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Temanggung mulai bangkit kembali pasca pandemi covid-19. Salah satu sektor yang berkontribusi cukup tinggi terhadap nilai PDRB di Kabupaten Temanggung adalah sektor industri pengolahan yang masih memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kabupaten Temanggung yaitu sebesar 25,92 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 4,32 persen. Dari angka-angka indeks harga implisit PDRB dapat diketahui kenaikan harga dari waktu ke waktu baik secara agregat maupun secara sektoral. Pertumbuhan lapangan usaha Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

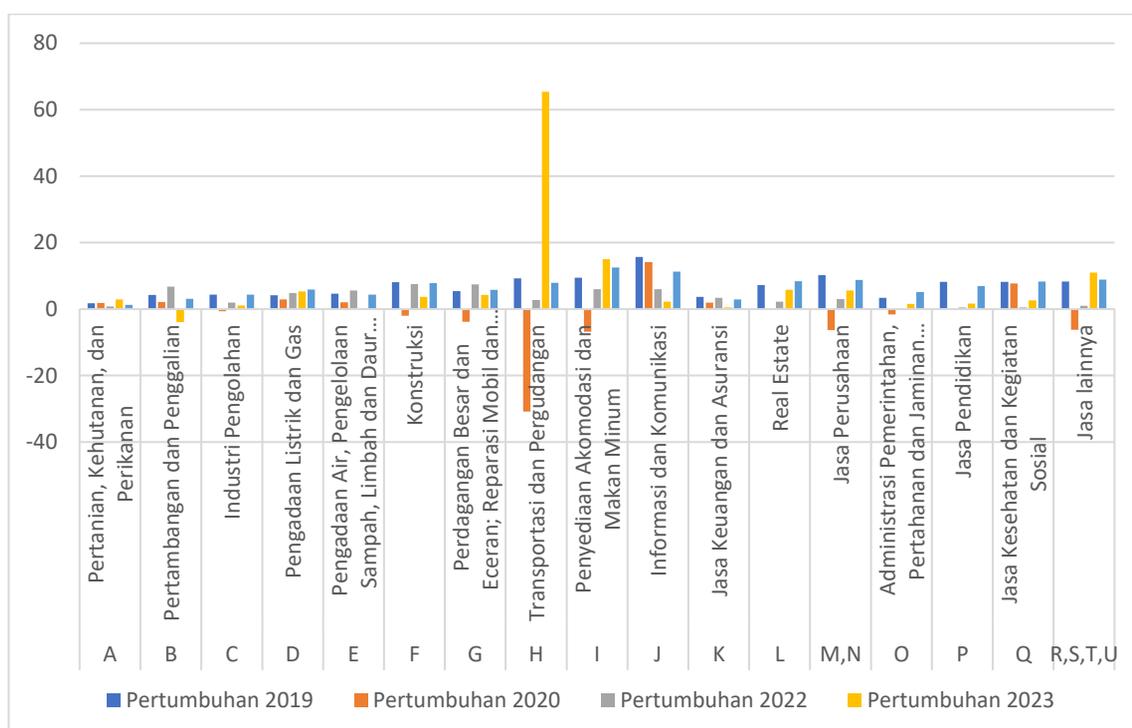
Tabel 2.14
Pertumbuhan Lapangan Usaha Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)
Tahun 2019-2023

Kategori	Uraian	Pertumbuhan 2019	Pertumbuhan 2020	Pertumbuhan 2021	Pertumbuhan 2022	Pertumbuhan 2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,73	1,9	0,82	2,92	1,28
B	Pertambangan dan Penggalian	4,24	2,11	6,74	-3,94	3,12
C	Industri Pengolahan	4,39	-0,61	2	1,09	4,32
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,18	2,92	4,82	5,28	5,86

Kategori	Uraian	Pertumbuhan 2019	Pertumbuhan 2020	Pertumbuhan 2021	Pertumbuhan 2022	Pertumbuhan 2023
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,68	2,04	5,62	0,22	4,36
F	Konstruksi	8,15	-2,01	7,54	3,72	7,77
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,39	-3,78	7,39	4,3	5,82
H	Transportasi dan Pergudangan	9,29	-30,85	2,77	65,39	7,9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,41	-6,81	6,03	15,04	12,49
J	Informasi dan Komunikasi	15,69	14,14	5,98	2,24	11,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,73	2	3,42	0,51	2,91
L	Real Estate	7,21	-0,06	2,28	5,8	8,36
M,N	Jasa Perusahaan	10,22	-6,32	3,02	5,65	8,82
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,41	-1,61	-0,26	1,6	5,11
P	Jasa Pendidikan	8,16	-0,19	0,54	1,63	6,96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,21	7,75	0,55	2,59	8,32
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,33	-6,18	0,96	10,95	8,83
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		6,85	-2,13	3,34	5,2	5

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024

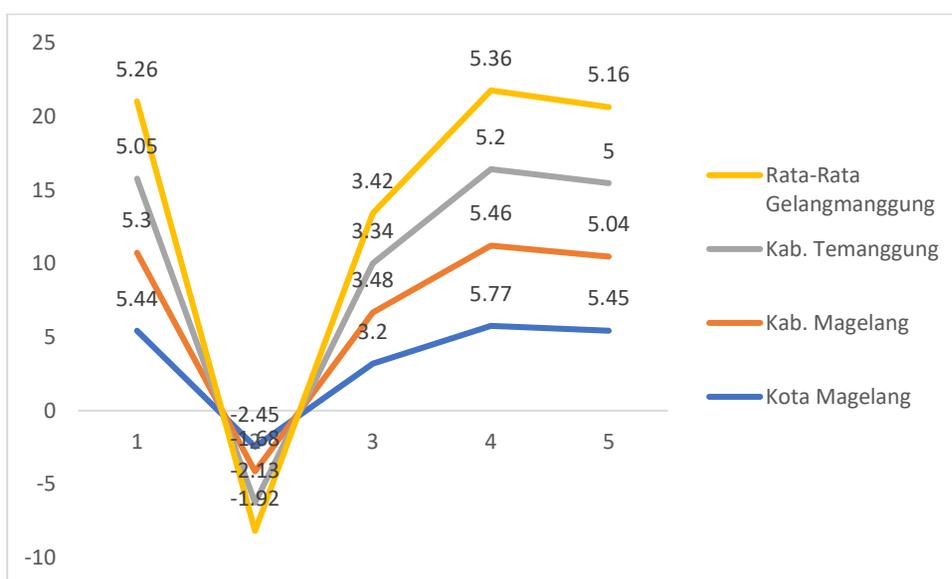
Berdasarkan harga konstan 2010 pada tabel di atas nilai PDRB Temanggung pada tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,20 persen dan melambat pada Tahun 2023 menjadi 5,00 persen. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif dimana 10 lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar 5-10%, sedangkan lapangan usaha lainnya tercatat kurang dari 5% (<5%). Pertumbuhan lapangan Usaha Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut ini.



Gambar 2.9
Pertumbuhan Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 Kabupaten Temanggung

Guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi diperlukan daya ungkit sektor pertanian melalui pengembangan industri pengolahan berbasis produk pertanian lokal. Sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mencapai target tahun 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung melakukan langkah-langkah strategis seperti dengan perbaikan infrastruktur dasar masyarakat yaitu perbaikan jalan di beberapa titik pusat kegiatan ekonomi untuk memperlancar distribusi barang dan mempersingkat waktu tempuh perjalanan sehingga roda perekonomian dapat terpacu dan biaya pengangkutan lebih efisien. Selain itu pemerintah daerah juga melakukan penguatan peranan UMKM, peningkatan lapangan kerja dan investasi, serta peningkatan daya saing ekonomi.

Selain Kabupaten Temanggung, peningkatan pertumbuhan ekonomi juga dialami oleh wilayah setara. Berikut pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung jika disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada wilayah pengembangan Gelangmanggung.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.10
Pertumbuhan Ekonomi pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2019-2023

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dengan rata-rata capaian pada wilayah pengembangan Gelangmanggung menunjukkan kecenderungan yang sama yaitu pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan signifikan pada Tahun 2020 akibat pandemi covid-19, dan mulai mengalami peningkatan pada Tahun 2021-2022, melambat di Tahun 2023 dengan rata-rata 5,16%.

Adapun perbandingan pertumbuhan ekonomi daerah dengan rata-rata pada wilayah pengembangan Gelangmanggung yang selama 5 tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel 2.15
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan Rata-Rata Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2019-2023

Kabupaten / Kota	2019		2020		2021		2022		2023	
	Realisasi	Perub.	Realisasi	Perub.	Realisasi	Perub.	Realisasi	Perub.	Realisasi	Perub.
Kota Magelang	5,44	5,44	-2,45	-7,89	3,2	5,65	5,77	2,57	5,45	-0,32
Kabupaten Magelang	5,3	5,30	-1,68	-6,98	3,48	5,16	5,46	1,98	5,04	-0,42
Kabupaten Temanggung	5,05	5,05	-2,13	-7,18	3,34	5,47	5,2	1,86	5	-0,20
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	5,26	5,26	-2,09	-7,35	3,35	5,43	5,48	2,14	5,16	-0,31
JAWA TENGAH	5,36	5,36	-2,65	-8,01	3,32	5,97	5,31	1,99	4,98	-0,33
NASIONAL	5,02	5,02	-2,07	-7,09	3,69	5,76	5,72	2,03	5,04	-0,68

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Perbandingan perubahan pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata capaian pada wilayah yang setara sebelum pandemi covid-19 dan kondisi terkini pada periode tahun 2019-2023 sangat signifikan. Pada periode sebelum pandemi covid-19, perubahan pertumbuhan ekonomi pada wilayah pengembangan Gelangmanggung mengalami penurunan drastis

pada tahun 2020 dengan nilai negatif (<0) yang mana perubahan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung sedikit lebih baik dibandingkan capaian wilayah yang setara yakni -7,18, sedangkan rata-rata wilayah Gelangmanggung mengalami penurunan mencapai -7,35.

Sedangkan pada kondisi terkini, perkembangan perekonomian semakin membaik, ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung maupun wilayah setara yang berada di kawasan Gelangmanggung. Pada kondisi terkini tahun 2023 perubahan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung melambat dibandingkan Tahun 2022 dengan perubahan -0,20, tetapi masih relatif bagus jika dibandingkan dengan rata-rata capaian wilayah yang setara pada wilayah Gelangmanggung.

Selain perbandingan dengan wilayah setara, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung juga dibandingkan dengan target RKP Kewilayahan, capaian nasional dan provinsi tahun 2019-2025 sebagai berikut.

Tabel 2.16
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Target RKP Kewilayahan

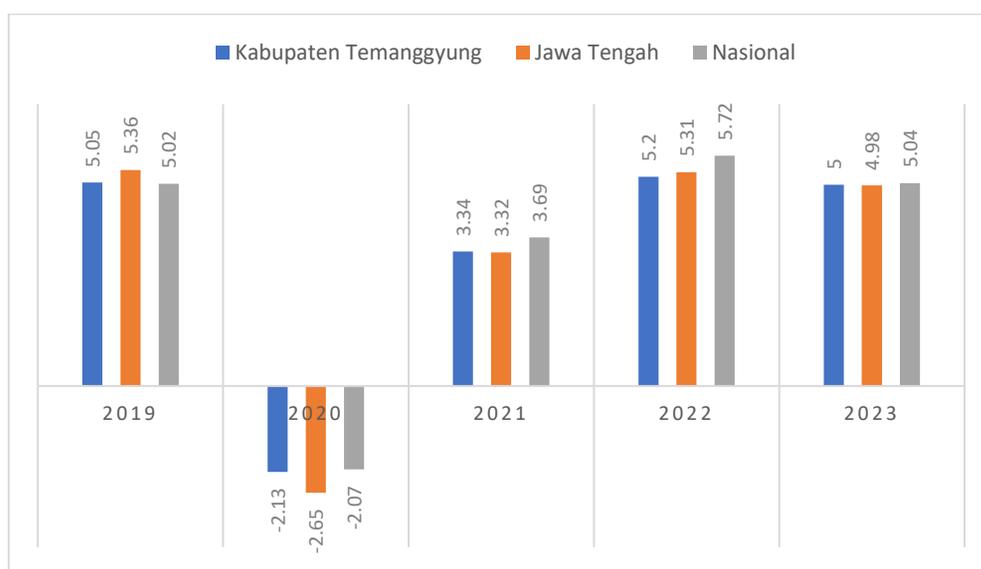
Indikator	Target RKP Kewilayahan (Jawa-Bali) Tahun 2022*	Realisasi Capaian Tahun 2022**	Kinerja Pencapaian Target RKP Kewilayahan
Pertumbuhan Ekonomi	5,2-5,5	5	96%

* *Perpres 85 Tahun 2021 tentang RKP Tahun 2023*

** *BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI, 2023*

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023

Berdasarkan Perpres 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, target RKP Kewilayahan (Jawa-Bali) Tahun 2023 yakni 5,2 -5,5. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian Tahun 2023, perbandingan pertumbuhan ekonomi daerah dengan target RKP Kewilayahan baru mencapai 96%.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI, 2024

Gambar 2.11

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Berdasarkan perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dengan capaian nasional maupun Provinsi Jawa Tengah secara umum menunjukkan kondisi yang sama, yang mana terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada Tahun 2020 akibat dampak pandemi covid-19. Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dan Nasional melambat bila dibandingkan angka Tahun 2022.

Adapun secara lebih rinci, perubahan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dengan capaian nasional dan provinsi sebagai berikut.

Tabel 2.17
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Wilayah	2019		2020		2021		2022		2023	
	Realisasi	Perubahan								
KAB TEMANGGUNG	5,05	-0,08	-2,13	-7,18	3,34	5,47	5,2	1,86	5	-0,02
JAWA TENGAH	5,36	0,06	-2,65	-8,01	3,32	5,97	5,31	1,99	4,98	-0,33
NASIONAL	5,02	-0,15	-2,07	-7,09	3,69	5,76	5,72	2,03	5,04	-0,68

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI, 2024

Berdasarkan perbandingan perubahan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dengan capaian nasional maupun Provinsi Jawa Tengah diketahui bahwa kecenderungan perubahan pertumbuhan ekonomi pada periode 2019-2020 memiliki persamaan yakni menurun pada posisi <0 sebagai akibat dari pandemi covid-19. Sedangkan setelah pandemi dan kondisi terkini, perubahan pertumbuhan ekonomi menunjukkan perbaikan ke arah positif (>0) yang mana perubahan ekonomi Kabupaten Temanggung

Tahun 2023 melambat -0,02 sedangkan pada Tingkat provinsi nasional juga melambat. Melambatkan pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2020 menurut lapangan usaha di Kabupaten Temanggung disebabkan menurunnya lapangan usaha pertanian dari 2,92% menjadi 1,28% dan sektor jasa lainnya dari 10,95% menjadi 8,83%.

Berdasarkan pembagian wilayah di Jawa Tengah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah yang dilihat dari tingkat kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi serta berfungsi untuk mengembangkan wilayah yang masih berada pada performa pertumbuhan yang rendah dan mendorong Kerjasama antar daerah yang saling menguntungkan pada berbagai sektor maka dilakukan percepatan Pembangunan di wilayah pengembangan Gelangmanggung. Prioritas pengembangan wilayah Gelangmanggung untuk tahun 2025 diarahkan untuk capaian sasaran pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, TPT, dan IPM. Pengembangannya antara lain untuk melestarikan Kawasan Borobudur sebagai situs warisan budaya dunia yang dipadukan dengan wisata alam Gunung Merapi-Merbabu-Telomoyo dan Gunung Sindoro-Sumbing. Kabupaten Temanggung menjadi Kawasan pendukung pengembangan wilayah koridor Borobudur-Dieng.

2.1.2.2 Struktur Ekonomi

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan struktur perekonomian suatu daerah adalah distribusi kategori lapangan usaha PDRB secara keseluruhan. Distribusi kategori lapangan usaha ini juga menunjukkan komposisi atau susunan kegiatan ekonomi dalam sistem perekonomian. Kategori yang dominan atau diandalkan mempunyai nilai persentase yang paling besar dalam struktur tersebut, dan dapat menjadikan ciri khas perekonomian di wilayah yang bersangkutan. Distribusi ekonomi untuk menggambarkan struktur perekonomian dihitung dari nilai PDRB menurut harga berlaku. Secara lengkap distribusi PDRB yang menggambarkan struktur perekonomian di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.18
Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2023 (Persen)

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,36	24,42	23,91	23,41	22,94
B	Pertambangan dan Penggalian	0,86	0,90	0,93	0,84	0,82
C	Industri Pengolahan	27,21	27,46	27,11	26,19	25,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,08	0,07	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan	0,07	0,08	0,08	0,07	0,07

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
	Sampah, Limbah dan Daur Ulang					
F	Konstruksi	5,12	5,06	5,37	5,45	5,63
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,62	20,14	20,90	20,79	20,95
H	Transportasi dan Pergudangan	4,36	3,15	3,18	5,08	5,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,62	1,53	1,58	1,73	1,77
J	Informasi dan Komunikasi	1,48	1,70	1,72	1,61	1,65
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,21	3,29	3,40	3,40	3,29
L	Real Estate	0,76	0,77	0,76	0,75	0,75
M,N	Jasa Perusahaan	0,39	0,38	0,76	0,38	0,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,69	2,70	2,54	2,42	2,40
P	Jasa Pendidikan	4,97	5,10	4,94	4,62	4,59
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,18	1,32	1,27	1,21	1,23
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,02	1,93	1,87	1,98	2,04
	PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa struktur ekonomi Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 yang paling dominan adalah Industri Pengolahan yaitu sebesar 25,92%, diikuti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 22,94% dilanjutkan dengan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 20,95%.

Sedangkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir yang digunakan sebagai dasar penghitungan struktur ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.19
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Temanggung (Milyar Rupiah)
Tahun 2019-2023

Kategori Lapangan Usaha	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,73	1,86	0,86	2,92	1,28
B. Pertambangan dan Penggalan	4,24	2,11	6,75	-3,94	3,12
C. Industri Pengolahan	4,39	-0,62	2,00	1,09	4,32
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,22	2,87	4,84	5,26	5,86
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,74	2,02	5,62	0,22	4,36
F. Konstruksi	8,15	-2,01	7,54	3,72	7,77
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,39	-3,79	7,40	4,30	5,82
H. Transportasi dan Pergudangan	9,29	-30,59	2,37	65,39	7,90
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,41	-6,81	6,03	15,04	12,49
J. Informasi dan Komunikasi	15,69	14,14	5,98	2,24	11,25
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,73	2,01	3,42	0,51	2,91
L. Real Estate	7,21	-0,10	2,32	5,80	8,36
M,N. Jasa Perusahaan	10,21	-6,32	3,01	5,65	8,82
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,41	-1,61	-0,26	1,60	5,11
P. Jasa Pendidikan	8,16	-0,19	0,54	1,63	6,96
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,22	7,70	0,59	2,59	8,32

Kategori Lapangan Usaha	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2022
R,S,T,U. Jasa Lainnya	8,33	-6,22	0,98	10,95	8,83
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,05	-2,13	3,34	5,20	5

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat pada Tahun 2023 Kabupaten Temanggung melambat, walaupun ada penurunan pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan, akan tetapi ada lapangan usaha pendukung yang capaiannya meningkat diantaranya adalah:

1. Kontribusi sektor industri pengolahan mengalami peningkatan sebesar 4,32% dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 1,09%
2. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang mengalami peningkatan sebesar 4,36% dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 0,22%
3. Konstruksi mengalami peningkatan sebesar 7,77% dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 3,72%
4. Sektor informasi dan komunikasi mengalami peningkatan sebesar 11,25% dari tahun sebelumnya sebesar 2,24%
5. Jasa Keuangan dan Asuransi mengalami peningkatan sebesar 2,91% dari tahun sebelumnya sebesar 0,51%
6. Real Estate mengalami peningkatan sebesar 8,36% dari tahun sebelumnya sebesar 5,80%
7. Jasa Perusahaan mengalami peningkatan sebesar 8,82% dari tahun sebelumnya sebesar 5,65%
8. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami peningkatan sebesar 5,11% dari tahun sebelumnya sebesar 1,60%
9. Jasa Pendidikan mengalami peningkatan sebesar 6,96% dari tahun sebelumnya sebesar 1,63%
10. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial meningkat 8,32% dari tahun sebelumnya sebesar 2,59%.

Sedangkan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun terakhir yang digunakan sebagai dasar penghitungan struktur ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.20
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Temanggung (milyar rupiah) Tahun 2019-2023

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.057,41	5.263,68	5.411,36	5.789,18	6.174,02
B	Pertambangan dan	186,80	194,99	210,32	208,32	221,12

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
	Penggalian					
C	Industri	5.889,85	5.920,28	6.134,63	6.476,56	6.974,71
	Pengolahan					
D	Pengadaan Listrik dan Gas	16,16	16,54	17,21	18,20	19,46
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15,31	16,51	17,61	17,91	18,88
F	Konstruksi	1.107,96	1.090,85	1.214,05	1.347,25	1.516,25
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.464,46	4.341,92	4.730,06	5.141,96	5.637,46
H	Transportasi dan Pergudangan	943,70	679,50	718,50	1.256,77	1.477,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	350,65	329,87	356,76	427,39	475,63
J	Informasi dan Komunikasi	320,72	366,50	388,56	398,56	444,36
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	694,55	708,79	769,23	841,11	884,52
L	Real Estate	164,70	165,41	171,05	184,41	201,91
M,N	Jasa Perusahaan	85,10	81,44	84,89	93,62	106,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	582,67	582,67	574,17	599,52	645,12
P	Jasa Pendidikan	1075,52	1.075,52	1.118,47	1.143,37	1.234,27
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	255,95	283,38	287,61	299,99	332,09
R,S,T,U	Jasa lainnya	437,48	415,39	423,32	489,22	549,22
	PDRB	21.648,99	21.577,05	22.627,79	24.733,34	26.912,32

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Nilai PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2023 mencapai 26.912,32 milyar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 2.178,98 milyar rupiah dibandingkan dengan Tahun 2022 yang mencapai 24.733,34 milyar rupiah.

Tabel 2.21
Perbandingan PDRB (ADHK) dan PDRB (ADHB) Daerah dengan Target RKPD Tahun 2019-2023 (Ribu Rupiah)

Tahun	Target PDRB ADHB	Realisasi PDRB ADHB	Target PDRB ADHK*	Realisasi PDRB ADHK
2019	21.500.000	21.648.988,07	15.000.000	15.214.058,87
2020	21.700.000	21.557.077,66	15.000.000	14.890.755,46
2021	22.500.000	22.627.792,08	15.000.000	15.387.930,43
2022	24.000.000	24.733.340,00	16.000.000	16.187.370,00
2023	29.000.000	26.912.320,00	17.000.000	16.997.530,00

Sumber: BPS Kab. Temanggung, 2024, *Target Bappeda Kab. Temanggung

Realisasi PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2020 lebih rendah dari target yang ditetapkan, dimana banyak sektor yang tidak tumbuh secara normal karena terdampak pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2022 dan 2023 realisasi PDRB Kabupaten Temanggung telah melebihi target yang telah ditetapkan karena pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat pasca pandemi covid-19.

2.1.2.3 PDRB per Kapita

Meskipun belum dapat mencerminkan tingkat pemerataan, PDRB perkapita dapat dijadikan salah satu tolok ukur guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian khususnya tingkat kemakmuran penduduk pada suatu wilayah secara makro. PDRB perkapita menggambarkan rata-rata besarnya output barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk pada suatu daerah selama satu tahun. Semakin besar PDRB perkapita suatu daerah dapat menggambarkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.22
Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHK) dan PDRB Per Kapita (ADHB) Daerah dengan Target RPKD Tahun 2019-2023

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)			Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)		
	Target	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)	Target	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)
2019	20.600.000,00	28.173.930	6,63	14.600.000,00	19.799.530	4,66
2020	21.200.000,00	27.325.870	-3,01	14.800.000,00	18.875.600	-4,67
2021	22.000.000,00	28.484.021	4,24	15.050.000,00	19.370.430	2,62
2022	23.000.000,00	30.938.180	8,62	15.600.000,00	20.248.290	4,53
2023	29.570.000,00	33.290.000	7,60	20.010.000,00	21.020.000	3,81

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk, sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kabupaten Temanggung lebih baik daripada target daerah. Walaupun pada tahun 2020 terjadi penurunan nilai PDRB per Kapita baik ADHB maupun ADHK, namun capaian PDRB per Kapita Kabupaten Temanggung tetap konsisten melampaui target daerah yang telah ditentukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan penduduk di Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun semakin membaik. Berikut perbandingan pertumbuhan PDRB perkapita Kabupaten Temanggung jika dibandingkan rata-rata capaian wilayah yang setara.

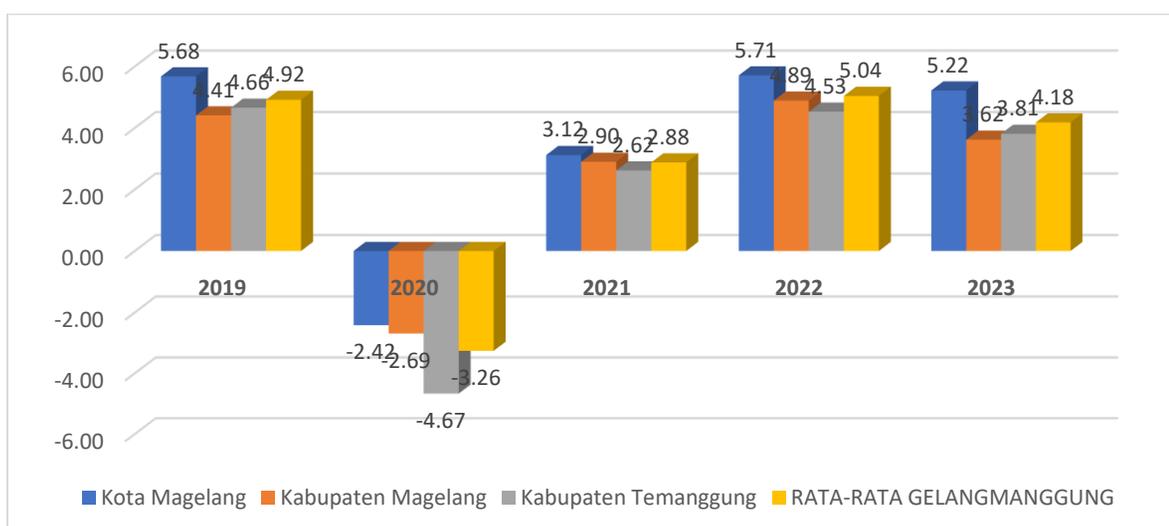
Tabel 2.23
Perbandingan Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung

Kabupaten /Kota	2019		2020		2021		2022		2023	
	Nilai (Ribuan Rupiah)	Pertumbuhan (%)								
Kota Magelang	53.231,38	5,68	51.942,91	-2,42	53.563,81	3,12	56.62,76	5,71	59.480,00	5,22
Kabupaten Magelang	18.101,09	4,41	17.613,16	-2,69	18.124,47	2,90	19.011,00	4,89	19.700,00	3,62
Kabupaten Temanggung	19.799,53	4,66	18.875,60	-4,67	19.370,43	2,62	20.248,29	4,53	21.020,00	3,81
RATA-RATA GELANG-MANGGUNG	30.377,33	4,92	29.477,22	-3,26	30.352,90	2,88	13.086,43	5,04	33.400,00	4,44

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada masa pandemi covid-19 tahun 2020, pertumbuhan PDRB per kapita ADHK pada wilayah Gelangmanggung mengalami penurunan yang cukup signifikan, akan tetapi dampak yang terjadi di Kabupaten Temanggung dapat dikategorikan lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan wilayah yang setara dibuktikan dengan pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK Kabupaten Temanggung yang lebih baik dibandingkan rata-rata wilayah setara. Pada Tahun 2021 yang merupakan pasca pandemi, pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung juga menunjukkan capaian yang cukup baik dibandingkan rata-rata wilayah Gelangmanggung dengan pertumbuhan sebesar 2,62%. Akan tetapi pada kondisi terkini, pertumbuhan PDRB perkapita ADHK Kabupaten Temanggung sedikit dibawah rata-rata capaian wilayah setara. Hal ini disebabkan melonjaknya pertumbuhan PDRB per kapita ADHK di Kota Magelang yang merupakan kawasan perkotaan bergerak pada sektor sekunder (non-pertanian), sedangkan Kabupaten Temanggung didominasi oleh kawasan perdesaan bergerak pada sektor primer (pertanian).

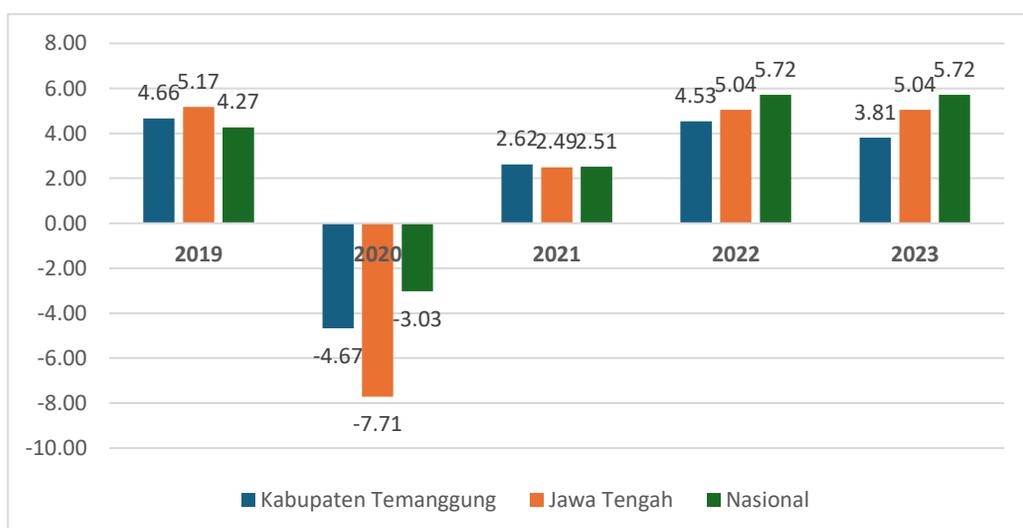
Berikut adalah gambar Pertumbuhan PDRB Per kapita ADHK pada wilayah pengembangan Gelangmanggung Tahun 2019-2023.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.12
Pertumbuhan PDRB Per kapita Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2019-2023

Pertumbuhan PDRB Perkapita Kab. Temanggung, Jawa Tengah, Nasional Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

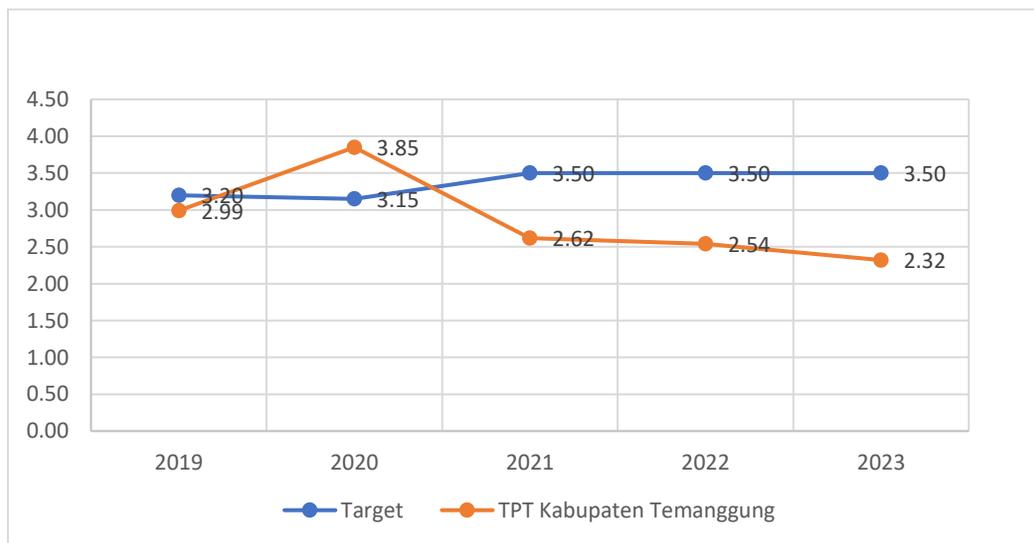
Gambar 2.13
Pertumbuhan PDRB Perkapita Kab. Temanggung, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023

Pertumbuhan PDRB Perkapita antara Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional cenderung bergerak secara fluktuatif. Pada periode 2018-2020, kondisi pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung masih berada dalam *range* pertumbuhan provinsi dan nasional dimana Kabupaten Temanggung lebih tinggi dibandingkan nasional namun lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Pada masa pasca pandemi covid-19 tahun 2021, Kabupaten Temanggung berhasil bangkit yang dibuktikan dengan pertumbuhan PDRB Perkapita yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Akan tetapi, pada Tahun 2023 pertumbuhan PDRB Perkapita berada di

bawah pendapatan perkapita provinsi dan nasional. Menindaklanjuti hal tersebut, Kabupaten Temanggung berupaya untuk meningkatkan distribusi produk barang dan jasa lokal sehingga selain dapat melayani permintaan dan kebutuhan lokal namun juga dapat melayani wilayah sekitarnya. Selain itu, Kabupaten Temanggung juga membuka peluang investasi dari berbagai sektor baik dalam maupun luar wilayah untuk mendorong pertumbuhan PDRB Perkapita serta pemerataan kesejahteraan Masyarakat.

2.1.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikasi perlunya peningkatan penyerapan tenaga kerja, salah satunya dengan penciptaan lapangan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Temanggung dengan target RKPD yang telah ditentukan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

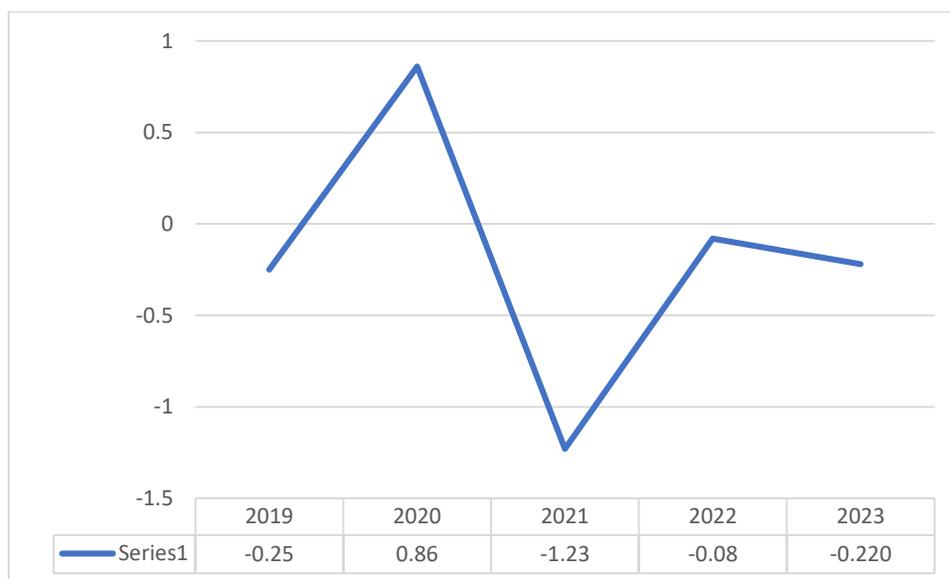


Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 2.14
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Target RKPD Tahun 2019-2023

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah dengan target RKPD sudah mencapai 100% kinerja pencapaian target RKPD. Pada tahun 2020, tingkat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sempat lebih tinggi dibandingkan target yang disebabkan oleh pandemi covid-19, namun pada tahun selanjutnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Temanggung berangsur membaik yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) yang lebih rendah dibandingkan target daerah serta tingkat perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ≤ 0 sebagaimana grafik dan tabel berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 2.15
Tingkat Perubahan TPT Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

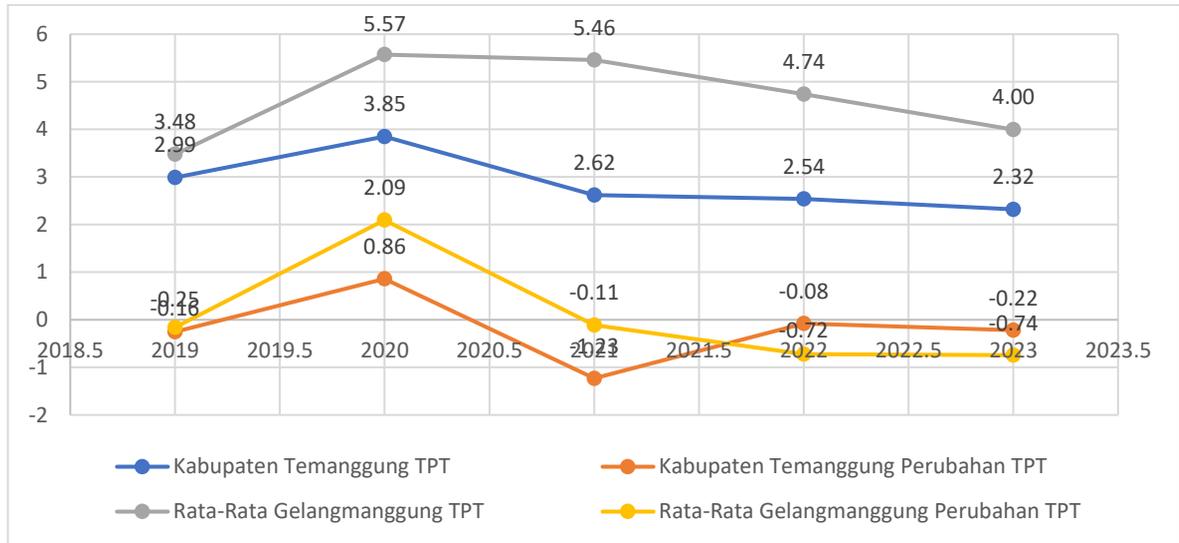
Tabel 2.24
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Tahun	Target RKPD	TPT Kabupaten Temanggung	Perubahan TPT Kabupaten Temanggung	Kinerja Pencapaian Target RKPD
2019	3,20	2,99	-0.25	100%
2020	3,15	3,85	0.86	99,28%
2021	3,50	2,62	-1.23	100%
2022	3,50	2,54	-0.08	100%
2023	3,50	2,32	-0,22	100%

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah dengan capaian tahun sebelumnya menunjukkan bahwa Tingkat pengangguran terbuka (TPT) daerah lebih baik dari capaian tahun sebelumnya. Ditinjau dari perubahan TPT, ada kondisi sebelum Covid-19 perubahan TPT Kabupaten Temanggung cenderung fluktuatif yang mana pada tahun 2019 perubahan TPT sempat mengalami penurunan namun pada tahun 2020 mengalami lonjakan akibat banyaknya tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya. Sedangkan pada kondisi terkini yakni pada tahun 2022 dan 2023, tingkat perubahan TPT Kabupaten Temanggung menunjukkan nilai ≤ 0 yang berarti tenaga kerja yang tidak termanfaatkan semakin berkurang dan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada pada sektor pertanian dan industri padat karya.

Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian wilayah pengembangan Gelangmanggung, perbandingan Tingkat pengangguran terbuka (TPT) daerah dengan rata-rata capaian wilayah yang setara pada periode 2019-2023 sebagai berikut.



Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.16
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2019-2023

Tabel 2.25
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung 2018-2022

Tahun	Kabupaten Temanggung		Rata-Rata Wilayah Pengembangan Gelangmanggung	
	TPT	Perubahan TPT	TPT	Perubahan TPT
2019	2,99	-0,25	3,35	-0,16
2020	3,85	0,86	5,22	2,09
2021	2,62	-1,23	5,05	-0,11
2022	2,54	-0,08	4,74	-0,72
2023	2,32	-0,22	4,19	-0,74

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

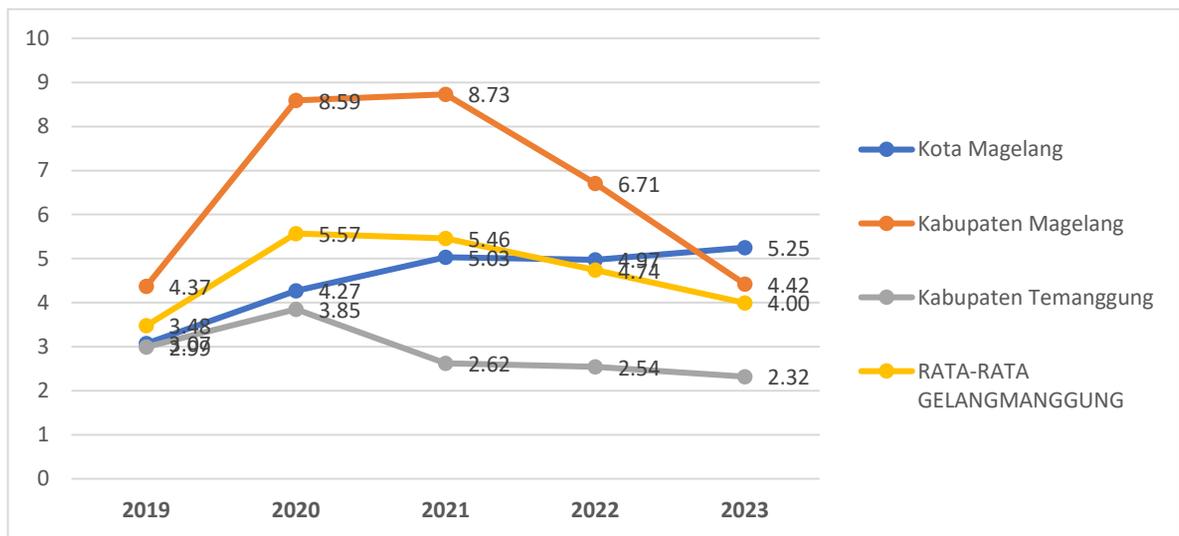
Secara umum TPT dan Perubahan Kabupaten Temanggung lebih baik dibandingkan dengan rata-rata wilayah setara (Gelangmanggung). Jika ditinjau lebih rinci, TPT Kabupaten Temanggung menempati posisi pertama jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Gelangmanggung dengan perubahan sebesar -1.23 pada tahun 2021 dan -0,22 pada tahun 2023. Pada tahun 2020 yang merupakan puncak pandemi covid-19, TPT Kabupaten Temanggung maupun Gelangmanggung menunjukkan kenaikan, namun jika dicermati lebih rinci perubahan TPT Kabupaten Temanggung lebih baik dari rata-rata capaian wilayah setara (Gelangmanggung). Hal tersebut mengindikasikan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Temanggung lebih baik dibandingkan rata-rata

capaian wilayah setara yang dibuktikan dengan nilai TPT sebesar <3% sedangkan pada wilayah Gelangmanggung mencapai >4%. Secara rinci, TPT Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di wilayah Gelangmanggung sebagai berikut.

Tabel 2.26
Perbandingan TPT Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2019-2023

Kabupaten / Kota	TPT				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Magelang	3,07	4,27	5,03	4,97	5,25
Kabupaten Magelang	4,37	8,59	8,73	6,71	4,42
Kabupaten Temanggung	2,99	3,85	2,62	2,54	2,32
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	3,48	5,57	5,46	4,74	4,00

Sumber: BPS, 2024



Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.17
Perbandingan TPT Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2019-2023

Selain dibandingkan dengan rata-rata capaian wilayah setara, perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah dengan capaian nasional juga menunjukkan nilai yang lebih baik. Hal tersebut dibuktikan dari perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah dengan target RKP Kewilayahan yang telah mencapai 100% kinerja pencapaian target RKP Kewilayahan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.27
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan target RKP Kewilayahan

Indikator	Target RKP Kewilayahan (Jawa-Bali) Tahun 2022*	Realisasi Capaian Tahun 2022**	Kinerja Pencapaian Target RKP Kewilayahan
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,3 – 5,6	2,32	100%

* Perpres 85 Tahun 2021 tentang RKP Tahun 2023

** BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI, 2022

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023

Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah dengan capaian nasional Tahun 2019-2023 sebagai berikut.



Sumber : BPS, 2023

Gambar 2.18
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Nasional dan Provinsi Tahun 2019-2023

Tabel 2.28
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Nasional dan Provinsi Tahun 2019-2023

Tahun	Kabupaten Temanggung		Jawa Tengah		Nasional	
	TPT	Perubahan TPT	TPT	Perubahan TPT	TPT	Perubahan TPT
2019	2,99	-0,25	4,49	-0,02	5,28	-0,06
2020	3,85	0,86	6,48	1,99	7,07	1,79
2021	2,62	-1,23	5,95	-0,53	6,49	-0,58
2022	2,54	-0,08	5,57	-0,38	5,83	-0,66
2023	2,32	-0,22	5,13	-0,44	5,32	-0,51

Sumber: BPS, 2024

Secara umum selama 5 tahun terakhir, perubahan TPT Kabupaten Temanggung lebih baik dari nasional maupun provinsi. Walaupun pada masa pandemi covid-19 perubahan TPT mengalami peningkatan, namun perubahan TPT di Kabupaten Temanggung lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dengan perubahan sebesar 0,86 pada tahun 2020. Pada kondisi terkini, perubahan TPT Kabupaten Temanggung juga menunjukkan nilai yang lebih baik dibandingkan nasional maupun provinsi dengan penurunan sebesar -1,23 pada tahun 2021 dan -0,22 pada tahun 2023. Selain dari perubahannya, TPT di Kabupaten Temanggung juga jauh lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional dengan TPT terendah pada tahun 2023 sebesar 2,32 sedangkan provinsi dan nasional secara berturut-turut mencapai 5,13 dan 5,32. Hal ini karena sektor pertanian terutama pada komoditas tembakau dan industri

pengolahan kayu yang padat karya sehingga banyak menyerap tenaga kerja.

Antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada kondisi normal adalah hubungan terbalik, yaitu semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka TPT makin rendah. Pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan penurunan angka TPT menunjukkan bahwa upaya pembangunan yang telah dilaksanakan daerah menunjukkan capaian yang positif. Hal ini karena beberapa sektor ekonomi mengalami kemajuan dan menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran berkurang. Dengan asumsi dasar bahwa rasio antara pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja tetap, artinya tidak ada pergeseran yang signifikan terhadap pola produksi dan teknologi yang digunakan. Dengan kata lain tidak ada perubahan pola produksi padat karya ke padat modal ataupun dengan penggunaan alat berteknologi yang menggunakan lebih sedikit tenaga kerja dalam memproduksi.

Perbandingan Rasio Perubahan TPT dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29
Perbandingan Rasio Perubahan TPT dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Tahun	Kabupaten Temanggung			Jawa Tengah			Nasional		
	TPT	Perubahan TPT	PE	TPT	Perubahan TPT	PE	TPT	Perubahan TPT	PE
2019	2,99	-0,25	5,05	4,49	-0,02	5,4	5,28	-0,06	5,02
2020	3,85	0,86	-2,13	6,48	1,99	-2,65	7,07	1,79	-2,07
2021	2,62	-1,23	3,34	5,95	-0,53	3,32	6,49	-0,58	3,69
2022	2,54	-0,08	5,2	5,57	-0,38	5,31	5,83	-0,66	5,72
2023	2,32	-0,22	5	5,13	-0,44	4,98	5,83	-0,51	5,04

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Pada kondisi pasca pandemi dan terkini pertumbuhan ekonomi baik pada tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional sudah menunjukkan peningkatan yang ditunjukkan dengan penurunan perubahan TPT. Secara umum dampak pandemi terhadap TPT di Kabupaten Temanggung lebih rendah dibandingkan provinsi dan nasional. Hal tersebut disebabkan dari sisi pertumbuhan jumlah perkerja, dampak covid-19 relatif kecil terjadi di sektor pertanian yang menjadi sektor utama di Kabupaten Temanggung dengan tren yang tumbuh positif, sementara sektor lainnya (non-pertanian, industri, dan jasa) mengalami kontraksi. Adapun faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung yakni karena adanya sumber daya alam yang berlimpah khususnya pada sektor pertanian

tembakau maupun industri pengolahan kayu serta sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyerapan angkatan kerja dapat optimal.

Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki hubungan yang erat karena penduduk yang bekerja berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa sedangkan pengangguran tidak memberikan kontribusi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diharapkan mampu menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan jumlah pengangguran bersifat negatif, artinya peningkatan pertumbuhan ekonomi membawa dampak terhadap penurunan jumlah pengangguran. Adapun tingkat pertumbuhan jumlah penganggur di Kabupaten Tahun 2019-2023 sebagai berikut.



Sumber : Bappeda, 2023

Gambar 2.19
Tingkat Pertumbuhan Jumlah Penganggur Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Berdasarkan gambar diatas, pertumbuhan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 cenderung fluktuatif dengan tren menurun. Adapun rata-rata pertumbuhan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir <0 dengan nilai sebesar -4,53%. Adapun rincian pertumbuhan dan perubahan jumlah pengangguran di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30
Rata-rata Pertumbuhan dan Perubahan Jumlah Penganggur selama 5 Tahun Kabupaten Temanggung

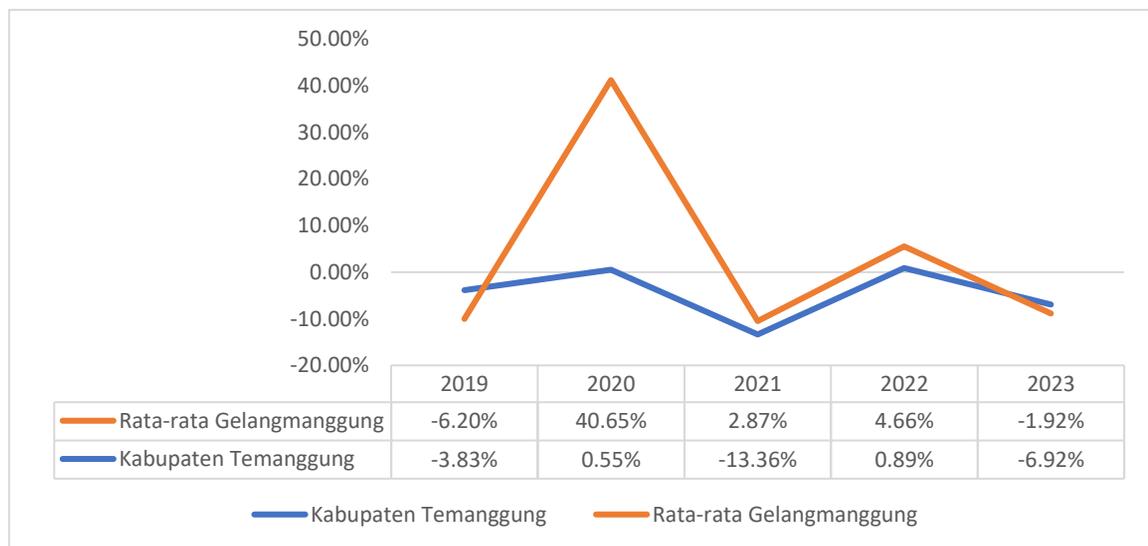
Tahun	Kabupaten Temanggung		
	Jumlah Penganggur	Pertumbuhan (%)	Perubahan
2019	13.681	-3,83	-545
2020	13.756	0,55	75
2021	11.918	-13,36	-1.838
2022	12.024	0,89	106
2023	11.192	-6,92	-832
Rata-rata 5 tahun	12.541	-4,53	-606,8

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Pada Tahun 2019 dan 2023, perubahan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung mengalami sedikit peningkatan karena adanya

PHK pada sektor jasa padat karya. Akan tetapi pada kondisi terkini jumlah penganggur mengalami penurunan yang signifikan dengan adanya tambahan serapan tenaga kerja. Rata-rata tingkat perubahan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun terakhir <0 dengan pengurangan sebanyak 606,8 orang. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi meningkatnya jumlah pengangguran diantaranya penciptaan lapangan kerja baru, perluasan kerja di sektor informal, peningkatan keahlian dan kompetensi tenaga kerja, peningkatan kewirausahaan, memperkuat sistem informasi pasar kerja dan perlindungan sosial bagi pekerja.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota pada wilayah pengembangan Gelangmanggung, pertumbuhan jumlah penganggur Kabupaten Temanggung jauh lebih baik dari rata-rata capaian wilayah setara yang ditunjukkan dengan persentase pertumbuhan yang jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata capaian wilayah setara sebagaimana gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.20

Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penganggur Daerah dengan Rata-Rata Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2019-2023

Adapun perbandingan perubahan jumlah penganggur Kabupaten Temanggung dengan rata-rata capaian wilayah yang setara secara rinci tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2.31
Perbandingan Perubahan Jumlah Penganggur Daerah dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung

Tahun	Kabupaten Temanggung	Rata-Rata Capaian Gelangmanggung
2019	-3.83%	-6.20%
2020	0.55%	40,65%

Tahun	Kabupaten Temanggung	Rata-Rata Capaian Gelangmanggung
2021	-13.36%	2,87%
2022	0.89%	4,66%
2023	-6,92%	-1,92%

Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa perubahan jumlah penganggur Kabupaten Temanggung lebih baik dari rata-rata capaian wilayah yang setara. Pada Tahun 2021 perubahan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung mengalami penurunan signifikan mencapai -13,36%, sedangkan kondisi pada wilayah pengembangan Gelangmanggung masih mengalami peningkatan sebesar 2,87%. Pada tahun 2023 juga menunjukkan kondisi yang lebih baik dimana perubahan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung mencapai 6,92% dan lebih rendah dibandingkan rata-rata wilayah setara yang mencapai 1,92%.

Adapun secara rinci jumlah penganggur Kabupaten/Kota yang berada pada wilayah Pengembangan sebagai berikut.

Tabel 2.32
Jumlah Penganggur pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2019-2023

Kabupaten / Kota	Jumlah Penganggur (Orang)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Magelang	2.769	5.699	5.769	4.487	4.487*
Kabupaten Magelang	22.922	33.080	38.976	40.895	36.841
Kabupaten Temanggung	13.681	13.756	11.918	12.024	11.192
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	13.124	17.512	18.888	19.135	17.507

Sumber: BPS, 2023, *masih menggunakan angka tahun 2022

Selain dibandingkan dengan wilayah setara, jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung juga dapat dibandingkan dengan capaian Jawa Tengah dan Nasional pada Tahun 2019-2023 sebagai berikut.

Tabel 2.33
Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penganggur Daerah dengan Nasional Tahun 2019-2023

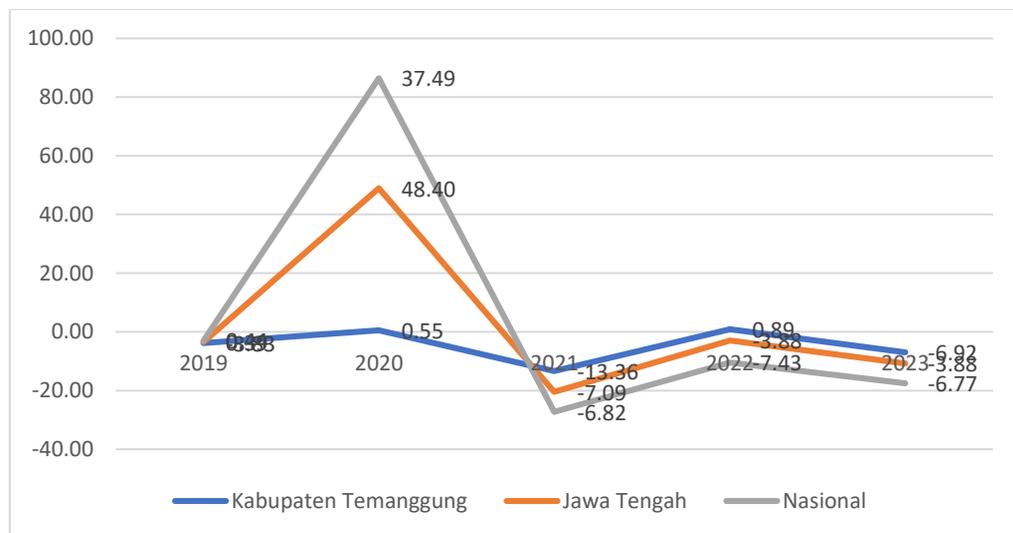
Tahun	Kabupaten Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
2019	-3.83%	0.39%	0.44%
2020	0.55%	48.40%	37.49%
2021	-13.36%	-7.09%	-6.82%
2022	0.89%	-3.88%	-7.43%
2023	-4.53%	-3.88%	-6.77%
Rata-rata	-4.53%	6.78%	3.38%

Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan jumlah penganggur Kabupaten Temanggung lebih baik dari nasional maupun provinsi. Ditinjau dari rata-rata selama 5 tahun terakhir,

pertumbuhan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung <0 dengan nilai sebesar -4.53% sedangkan pada tingkat provinsi maupun nasional mencapai >3%.

Adapun perbandingan perubahan jumlah penganggur Kabupaten Temanggung dengan capaian nasional secara rinci sebagai berikut.



Sumber: BPS, 2024

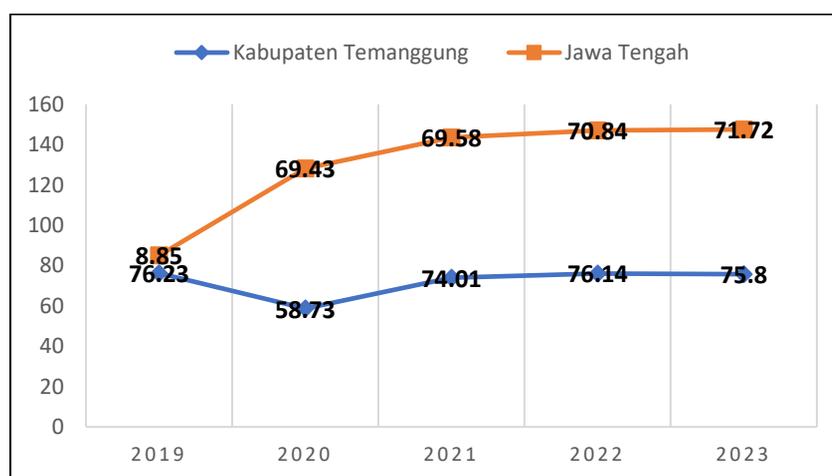
Gambar 2.21
Perbandingan Perubahan Jumlah Penganggur Kabupaten Temanggung dengan Capaian Nasional

Perubahan jumlah penganggur Kabupaten Temanggung lebih baik dari capaian nasional. Tahun 2020 lebih rendah yakni hanya sebesar 0,55%, sedangkan pada tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pertumbuhan jumlah penganggur meningkat secara signifikan mencapai >35% dari kondisi sebelumnya. Adapun pada kondisi pasca pandemi terlihat bahwa pemulihan ekonomi semakin membaik yang salah satunya ditunjukkan dengan penurunan pertumbuhan jumlah penganggur baik pada tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Pada tahun 2023 penurunan pertumbuhan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung lebih baik dari nasional dan provinsi dengan pengurangan mencapai -6,92%, sedangkan secara provinsi dan nasional secara berturut-turut hanya mencapai -3,88% dan -6,77%. Hal ini dapat disebabkan karena meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Temanggung.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Rasio Penduduk Bekerja (TPAK) memberikan gambaran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja baik dengan bekerja maupun mencari pekerjaan yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. TPAK tinggi

merupakan salah satu indikasi tingginya kesempatan kerja yang tersedia sehingga orang terserap dalam lapangan kerja yang ada atau sedang mencari kerja atau bahkan mempersiapkan usaha. Akan tetapi, peningkatan TPAK juga dapat menjadi salah satu faktor peningkatan jumlah pengangguran pada kondisi dimana rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja dipengaruhi oleh penduduk usia kerja yang tidak bekerja.

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.22
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Pada periode 5 tahun terakhir, kondisi ketenagakerjaan penduduk Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi. Jika dibandingkan dengan TPAK Provinsi Jawa Tengah, TPAK Kabupaten Temanggung menunjukkan nilai yang lebih tinggi kecuali pada tahun 2020 saat pandemi melanda. Tingginya TPAK Kabupaten Temanggung ini menunjukkan bahwa lebih tingginya pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Di sisi lain, tingginya TPAK tidak selalu menggambarkan penduduk yang aktif bekerja karena adanya peralihan menjadi ibu rumah tangga maupun penambahan jumlah penduduk usia kerja dari mahasiswa.

2.1.2.5 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu global dan masih menjadi prioritas pembangunan nasional. Kemiskinan masih menjadi persoalan mendasar yang mendapat perhatian serius dari pemerintah yang belum dapat teratasi. Terkait masalah kemiskinan tersebut, salah satu aspek penting

dalam mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah penyediaan data yang akurat.

A. Persentase Penduduk Miskin (PO)

Potret kemiskinan Kabupaten Temanggung dilihat dari tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin) dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.34
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan Target RKPD

Tahun	Tingkat Kemiskinan (%)		Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2019	9,36	9,42	81.223	72.570
2020	8,85	9,96	76.798	77.330
2021	10,36	10,17	72.372	79.100
2022	10,00	9,33	80.126	73.040
2023	9,80	9,26	75.495	72.960

Sumber: BPS, 2024

Angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan dari 9,42% pada Tahun 2019 menjadi 9,26% pada Tahun 2023. Pada tahun 2021 angka kemiskinan Kabupaten Temanggung meningkat pada capaian angka 10,17% sebagai dampak adanya pandemi covid-19. Dilihat dari jumlah penduduk, berbanding lurus dengan persentase penduduk miskin yang meningkat, jumlah penduduk miskin juga mengalami peningkatan. Namun pada Tahun 2023 tingkat kemiskinan mencapai angka 9,26% lebih rendah daripada capaian sebelum adanya pandemi. Hal tersebut mengindikasikan mulai pulihnya kondisi perekonomian di Temanggung.

Perbandingan Tingkat kemiskinan daerah dengan capaian nasional juga menunjukkan nilai yang lebih baik. Hal tersebut dibuktikan dari perbandingan Tingkat Kemiskinan daerah dengan target RKP Kewilayahan yang telah mencapai 100% kinerja pencapaian target RKP Kewilayahan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.35
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan target RKP Kewilayahan

Indikator	Target RKP Kewilayahan (Jawa-Bali) Tahun 2022*	Realisasi Capaian Tahun 2023	Kinerja Pencapaian Target RKP Kewilayahan
Tingkat Kemiskinan	10,27-11,42	9,26	100%

* Perpres 85 Tahun 2021 tentang RKP Tahun 2022

** BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI, 2022

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023

Perbandingan target dan realisasi angka Kemiskinan Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Tabel 2.36
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan Capaian Tahun Sebelumnya Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Tahun	Temanggung		Jawa Tengah	Nasional
	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi
2019	9,36	9,42	10,8	9,22
2020	8,85	9,96	11,41	10,19
2021	10,36	10,17	11,79	9,71
2022	10	9,33	10,93	9,57
2023	9,8	9,26	10,77	9,36

Sumber: BPS, 2024

Jika dibandingkan dengan Jawa Tengah dan nasional, capaian persentase penduduk miskin Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 lebih baik dibandingkan provinsi juga capaian nasional. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat cukup berhasil menurunkan kemiskinan.

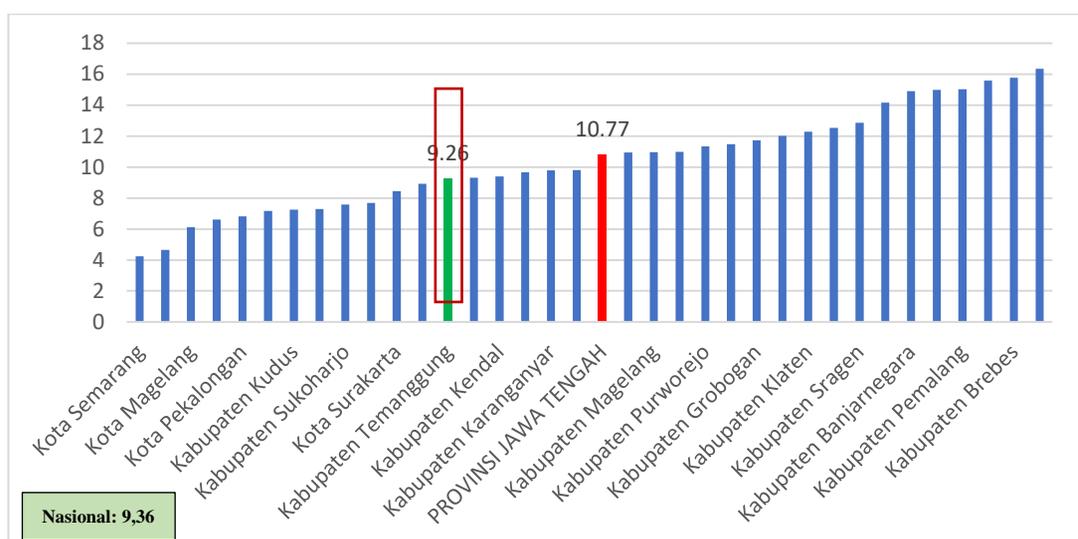
Sedangkan posisi relatif dan perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung dilihat pada konstelasi Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.37
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan Rata-rata Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2019-2023

Kabupaten / Kota	Persentase Penduduk Miskin					Perubahan (%) Penduduk Miskin				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Magelang	10,67	11,27	11,91	11,09	10,96	-0,56	0,6	0,64	-0,82	-0,13
Kota Magelang	7,46	7,58	7,75	7,10	6,11	-0,41	0,12	0,17	-0,65	-0,99
Kabupaten Temanggung	9,42	9,96	10,17	9,33	9,26	-0,45	0,54	0,21	-0,84	-0,77
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	9,18	9,60	9,94	9,17	8,78	-0,19	0,20	0,21	-0,27	0,40
JAWA TENGAH	10,80	11,41	11,79	10,93	10,77	-0,52	0,61	0,38	-0,86	-0,16
NASIONAL	9,22	10,19	9,71	9,57	9,36	-0,44	0,97	-0,48	-0,14	-0,21

Sumber: BPS, 2024

Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 pada wilayah pengembangan Gelangmanggung menempati posisi kedua setelah Kota Magelang. Hal ini menunjukkan bahwa posisi relatif tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung pada wilayah pengembangan Gelangmanggung lebih baik dari kabupaten yang lain. Sedangkan di Provinsi Jawa Tengah posisi relatif Kabupaten Temanggung menempati urutan ke-13 dibandingkan kabupaten/kota lain dapat terlihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.23
Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Gambaran kemiskinan di Kabupaten Temanggung pada kondisi terkini serta perbandingannya dengan rata-rata pada wilayah pengembangan Gelangmanggung dan nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan Capaian Nasional

Tahun	Kabupaten Temanggung		Rata-rata GELANGMANGGUNG		Nasional	
	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan
2019	9,42	-0,45	9,18	- 0,19	9,22	-0,44
2020	9,96	0,54	9,60	0,20	10,19	0,97
2021	10,17	0,21	9,94	0,21	9,71	-0,48
2022	9,33	-0,84	9,17	- 0,27	9,57	-0,14
2023	9,26	-0,07	8,78	- 0,40	9,36	-0,21

Sumber: BPS, 2023

Seiring dengan pulihnya perekonomian global dan nasional juga berimbas pada progres perbaikan kemiskinan ditunjukkan dengan data pada tahun 2023, kemiskinan Kabupaten Temanggung maupun rata-rata pada wilayah pengembangan Gelangmanggung serta nasional mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Pembahasan tentang kemiskinan tidak terlepas dari pembahasan mengenai penduduk miskin. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Adapun jumlah penduduk miskin dan pertumbuhannya di Kabupaten Temanggung, wilayah pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.39
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)						Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Magelang	143,4	137,4	146,34	154,91	145,33	144,49	-4,18	6,51	5,86	-6,18	-0,58
Kota Magelang	9,6	9,1	9,27	9,44	8,65	7,45	-5,21	1,87	1,83	-8,37	-13,87
Kabupaten Temanggung	75,4	72,6	77,33	79,09	73,04	72,96	-3,71	6,52	2,28	-7,65	-0,11
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	76,13	73,03	77,65	81,15	75,67	74,97	-4,37	4,97	3,32	-7,4	-4,85
JAWA TENGAH	3.897,20	3.743,23	3.980,90	4.109,75	3.831,44	3.791,50	-3,95	6,35	3,24	-6,77	-1,04
NASIONAL	25.674,58	24.785,87	27.549,69	26.503,65	26.363,27	25.900,00	-3,46	11,15	-3,8	-0,53	-1,76

Sumber: BPS, 2024

Dilihat lebih rinci berdasarkan jumlah penduduk miskin, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota dalam wilayah pengembangan Gelangmanggung, Kabupaten Temanggung menempati urutan kedua setelah Kota Magelang. Dalam kurun waktu tahun 2019-2023, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung berfluktuasi dan mengalami peningkatan cukup tinggi pada tahun 2020-2021 akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2023, penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung menunjukkan capaian yang lebih dari rata-rata wilayah pengembangan Gelangmanggung, provinsi maupun nasional

Perubahan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung, Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.40
Perubahan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung, Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Nasional

Tahun	Kabupaten Temanggung		Rata-rata GELANGMANGGUNG		Nasional	
	Realisasi	Perubahan (%)	Realisasi	Perubahan (%)	Realisasi	Perubahan (%)
2019	72,60	-3,71	73,03	-4,37	24.785,87	-3,46
2020	77,33	6,52	77,65	4,96	27.549,69	11,15
2021	79,09	2,28	81,15	3,32	26.503,65	-3,8
2022	73,04	-7,65	75,67	-7,40	26.363,27	-0,53
2023	72,96	-0,11	74,97	-4,85	25.900,00	-1,76

Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung cenderung mengalami kenaikan akibat pandemi Covid-19 puncaknya di Tahun 2021 yang menyebabkan gangguan pada aktivitas ekonomi yang berlangsung di Kabupaten Temanggung. Tahun 2023 Kabupaten Temanggung memiliki capaian yang relatif lebih baik jika dibandingkan dengan capaian rata-rata di Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Nasional.

Pertumbuhan ekonomi berdampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, di mana pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan mempengaruhi pada peningkatan kesejahteraan dan berkurangnya kemiskinan. Perbandingan rasio perubahan persentase penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dengan rata-rata capaian nasional Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.41
Perbandingan Rasio Perubahan Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Capaian Nasional Tahun 2019-2023

Tahun	Kabupaten Temanggung				Nasional			
	% Kemiskinan		Pertumbuhan Ekonomi		% Kemiskinan		Pertumbuhan Ekonomi	
	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan
2019	9,42	-0,45	5,05	-0,08	9,22	-0,44	5,02	-0,15
2020	9,96	0,54	-2,13	-7,18	10,19	0,97	-2,07	-7,09
2021	10,17	0,21	3,34	5,47	9,71	-0,48	3,7	5,77
2022	9,33	-0,84	5,20	1,86	9,57	-0,14	5,31	1,61
2023	9,26	-0,07	5,00	-0,20	9,36	-0,21	5,04	-0,27

Sumber: BPS, 2024

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 turun mengindikasikan capaian positif dengan penurunan sebesar -0,07, kondisi tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,00. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang baik pada menurunnya angka kemiskinan. Pada tingkat nasional, peningkatan pertumbuhan ekonomi juga berkorelasi positif terhadap penurunan kemiskinan. Jika dibandingkan dengan nasional, capaian penurunan kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung menunjukkan hasil yang lebih baik dari capaian nasional. Kondisi tersebut mengindikasikan keberhasilan kebijakan dalam percepatan pemulihan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar melihat berapa persentase dan jumlah penduduk miskin, akan tetapi juga memperhatikan tingkat kedalaman (P1) dan keparahan dari kemiskinan (P2). Selain menekan jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan seharusnya juga dapat mengurangi Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan. Semakin kecil P1 maupun P2 semakin baik karena menunjukkan semakin kecilnya kedalaman dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin baik terhadap Garis Kemiskinan maupun di antara penduduk miskin itu sendiri.

B. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk

miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 jika dibandingkan dengan wilayah pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.42
Tingkat Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dengan Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Kabupaten/ Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)					Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Magelang	0,99	1,12	0,85	0,47	0,74	-0,08	0,13	-0,27	-0,38	0,27
Kabupaten Magelang	0,98	1,23	1,63	1,66	1,73	-0,57	0,25	0,4	0,03	0,07
Kabupaten Temanggung	0,51	0,86	1,57	1,06	0,99	-0,85	0,35	0,71	-0,51	-0,07
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	0,83	1,07	1,35	1,06	1,15	-0,5	0,24	0,28	-0,29	0,09
JAWA TENGAH	1,53	1,72	1,91	1,77	1,75	-0,32	0,19	0,19	-0,14	-0,02
NASIONAL	1,5	1,75	1,67	1,56	1,53	-0,13	0,25	-0,08	-0,11	-0,03

Sumber: BPS, 2024

Perbandingan perubahan pencapaian indeks kedalaman kemiskinan daerah dengan capaian nasional menunjukkan nilai yang lebih baik dibandingkan nasional maupun provinsi. Pada Tahun 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Temanggung mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu Tahun 2019-2023 berfluktuasi dan meningkat cukup tajam pada tahun 2021, kondisi tersebut terjadi sebagai imbas pandemi Covid-19 yang menyebabkan peningkatan kemiskinan di berbagai daerah termasuk Kabupaten Temanggung. Namun setelah itu, kembali menurun pada Tahun 2023 seiring dengan pemulihan pasca pandemi yang melanda. Jika dilihat lebih rinci, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 selalu berada di bawah angka rata-rata wilayah pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Hal ini berarti rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas garis kemiskinan di Kabupaten Temanggung lebih baik daripada tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.

C. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Selain Indeks Kedalaman Kemiskinan, indikator yang juga perlu dilihat adalah Indeks Keparahan Kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai

indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Gambaran Indeks Keparahan Kemiskinan pada wilayah pengembangan Gelangmanggung dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.43
Perubahan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Dibandingkan Jateng dan Nasional Tahun 2019-2023

Kabupaten / Kota	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)					Perubahan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Magelang	0,19	0,23	0,15	0,06	0,12	-0,02	0,04	-0,08	-0,09	0,06
Kabupaten Magelang	0,17	0,2	0,35	0,41	0,41	-0,17	0,03	0,15	0,06	0
Kabupaten Temanggung	0,05	0,11	0,39	0,19	0,17	-0,24	0,06	0,28	-0,2	-0,02
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	0,137	0,18	0,30	0,22	0,23	-0,14	0,04	0,12	-0,01	0,01
JAWA TENGAH	0,3	0,34	0,45	0,42	0,42	-0,15	0,04	0,11	-0,03	0,00
NASIONAL	0,36	0,47	0,42	0,38	0,38	-0,05	0,11	-0,05	-0,04	0,00

Sumber : BPS, 2024

Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data pada tabel di atas, Indeks Keparahan Kemiskinan pada Tahun 2023 sebesar 0,17 menurun dari yang sebelumnya sebesar 0,19 pada Tahun 2022. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi dan meningkat cukup tajam pada Tahun 2021 sama seperti Indeks Kedalaman Kemiskinan di mana pandemi Covid-19 ikut memperparah kondisi kemiskinan yang terjadi di daerah. Kondisi kemiskinan menunjukkan perbaikan pada Tahun 2023 ditunjukkan dengan Indeks Keparahan Kemiskinan yang menurun seiring dengan semakin pulihnya kondisi perekonomian dan kesehatan pasca pandemi. Jika dilihat lebih rinci, nilai Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 selalu berada di bawah angka rata-rata pada wilayah pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Hal ini berarti penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin di Kabupaten Temanggung dapat dikatakan masih lebih baik daripada tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.

2.1.2.6 Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dikenal secara universal ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). IPM merupakan salah satu indikator yang dapat mewakili keterbandingan hasil pembangunan manusia antar daerah. Konsep pembangunan manusia sebagai ukuran pencapaian hasil

pembangunan menempatkan manusia pada posisi yang sebenarnya yaitu manusia sebagai penerima akhir dari hasil-hasil pembangunan. Angka IPM mengindikasikan tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan. Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.44
Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No.	Variabel	2019	2020	2021	2022	2023
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	68,83	69,57	69,88	70,77	71,33
A	Usia Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	75,48	75,58	75,64	75,7	75,77
B	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,13	12,14	12,08	12,55	12,61
	Rata-rata Lama sekolah (Tahun)	7,15	7,24	6,94	7,41	7,5
C	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)	9.489	9.343	9.142	9.773	10.108

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Status pencapaian IPM dikategorikan dalam empat kategori, yaitu: (a) Sangat Tinggi (IPM ≥ 80); (b) Tinggi, (IPM 70-80); (c) Sedang, (IPM 60-70); dan (d) Rendah, (IPM < 60). Berdasarkan status tersebut, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 termasuk pada kategori tinggi dengan nilai 71,33. Dilihat pada tabel di atas, capaian IPM Kabupaten Temanggung selama tahun 2019-2023 terus menunjukkan peningkatan dari 68,83 pada tahun 2019 menjadi 71,33 pada Tahun 2023, serta mengalami peningkatan status dari kategori Sedang (2019-2021) menjadi kategori Tinggi (2023). Peningkatan capaian IPM Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 turut dipengaruhi peningkatan komponen-komponen pembentuk IPM yang terdiri dari Usia Harapan Hidup Saat Lahir, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah serta Pengeluaran per Kapita Disesuaikan di mana seluruh komponen tersebut juga mengalami peningkatan.

Perbandingan target dan realisasi IPM Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.45
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), UHH, RLS, HLS, Pengeluaran Per Kapita Daerah dengan Target RKPD

No	Variabel	Temanggung			Jawa Tengah	Nasional
		Target	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Realisasi
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	70,49	71,33	100%	73,39	74,39
A	Usia Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	75,53	75,77	100%	74,69	73,93

No	Variabel	Temanggung			Jawa Tengah	Nasional
		Target	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Realisasi
B	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,49	12,61	100%	12,85	13,15
C	Rata-rata Lama sekolah (Tahun)	7,8	7,5	96,15%	8,01	8,77
D	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)	9.715	10.108	100%	11.835	11,899

Sumber: BPS dan BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian IPM Kabupaten Temanggung masih berada di bawah IPM Jawa Tengah. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Temanggung masih berada di bawah kemajuan pembangunan Jawa Tengah pada umumnya. Capaian IPM Kabupaten Temanggung jika dibandingkan dengan capaian nasional juga masih berada di bawah capaian nasional.

Tabel 2.46
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Daerah dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Kabupaten/ Kota	IPM						Pertumbuhan IPM (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Temanggung	68,83	69,56	69,57	69,88	70,77	71,33	1,061	0,01	0,45	1,27	0,79

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Apabila melihat nilai capaian IPM tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan capaian IPM atau IPM daerah lebih baik dengan capaian tahun sebelumnya.

Capaian dan pertumbuhan IPM Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan kabupaten/kota dalam Wilayah Pengembangan Gelangmanggung serta perbandingannya dengan Jawa Tengah dan nasional dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.47
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dearah dengan Rata-Rata Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Kabupaten/ Kota	IPM					Pertumbuhan IPM (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Magelang	78,8	78,99	79,43	80,39	81,17	14,02	0,24	0,56	1,21	0,97
Kabupaten Magelang	69,87	69,87	70,12	70,85	71,45	-10,78	0	0,36	1,04	0,85
Kabupaten Temanggung	69,56	69,57	69,88	70,77	71,33	1,061	0,01	0,45	1,27	0,79
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	72,74	72,81	73,14	74,00	74,65	1,43	0,08	0,46	1,17	0,87
JAWA TENGAH	71,73	71,87	72,16	72,79	73,39	0,86	0,2	0,4	0,87	0,82
NASIONAL	71,92	71,94	72,29	72,91	74,39	0,74	0,03	0,49	0,86	2,03

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah lebih baik dengan capaian tahun sebelumnya. Selain itu, pertumbuhan IPM Kabupaten Temanggung selama Tahun 2019-2023 cukup fluktuatif. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan IPM pada wilayah pengembangan Gelangmanggung Tahun 2019-2023, pertumbuhan IPM Kabupaten Temanggung tergolong

moderat. Pertumbuhan capaian IPM Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 menunjukkan progres yang semakin membaik dalam kurun waktu lima tahun terakhir, progres tersebut juga menunjukkan perkembangan yang lebih baik dari Provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Meski menunjukkan progres yang positif, capaian IPM Kabupaten Temanggung, capaian IPM masih berada di bawah capaian rata-rata pada wilayah pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah maupun nasional, sehingga Kabupaten Temanggung masih memerlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan capaian IPM melalui peningkatan di bidang pendidikan, kesehatan maupun ekonomi untuk mewujudkan pembangunan manusia yang semakin berkualitas.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan standar untuk mengukur kualitas hidup masyarakat di suatu daerah dari sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Sektor kesehatan direpresentasikan dengan indikator usia harapan hidup saat lahir, sektor pendidikan direpresentasikan dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta sektor ekonomi direpresentasikan dengan indikator pengeluaran per kapita disesuaikan.

Komponen dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu :

A. Usia Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)

Usia Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir. UHH merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses hingga kualitas kesehatan.

UHH di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 telah mencapai 75,77 dan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya selalu terjadi peningkatan, lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan dapat melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, karena lama hidup seseorang tidak terlepas dari tingkat kesehatan yang bersangkutan. Kesehatan masyarakat antara lain dipengaruhi oleh asupan gizi yang baik, tingkat kepedulian dan perawatan terhadap kesehatan sehingga angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan.

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan komponen dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada indikator Capaian dan pertumbuhan UHH Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan kabupaten/kota wilayah pengembangan Gelangmanggung serta perbandingannya dengan

Jawa Tengah dan nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.48
Perbandingan Pertumbuhan AHH Daerah dengan Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Kabupaten / Kota	Usia Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)					Pertumbuhan UHH				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Magelang	73,56	73,72	73,88	74,03	74,2	0,09	0,16	0,16	0,15	0,23
Kabupaten Magelang	76,75	76,85	76,93	77,02	77,22	0,03	0,1	0,08	0,09	0,26
Kabupaten Temanggung	75,48	75,58	75,64	75,7	75,77	0,01	0,1	0,06	0,06	0,09
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	75,26	75,38	75,48	75,58	75,73	0,04	0,12	0,10	0,10	0,19
JAWA TENGAH	74,23	74,37	74,47	74,57	74,69	0,05	0,14	0,1	0,1	0,16
NASIONAL	71,34	71,47	71,57	71,85	73,93	0,14	0,13	0,1	0,28	2,89

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Tren UHH Kabupaten Temanggung dari Tahun 2019-2023 menunjukkan capaian yang bagus karena terus meningkat. Peningkatan capaian tersebut mengindikasikan perbaikan pembangunan pada bidang kesehatan. Jika dilihat perbandingan capaian Kabupaten Temanggung dengan rata-rata pada wilayah pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah serta nasional, indikator Usia Harapan Hidup Saat Lahir memiliki capaian yang lebih baik. Namun jika dilihat berdasarkan pertumbuhannya, Kabupaten Temanggung memiliki progres yang tidak cukup baik meskipun mengalami peningkatan capaian setiap tahunnya.

B. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 mencapai 12,61 yang artinya tingkat anak-anak Temanggung yang pada Tahun 2022 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati Pendidikan selama 12,61 tahun (Diploma I) lebih baik dari capaian Tahun 2020 (12,14). Capaian HLS Temanggung pada Tahun 2023 lebih rendah dari capaian Jawa Tengah (12,85) dan Nasional (13,15).

Capaian dan pertumbuhan komponen IPM pada indikator Harapan Lama Sekolah Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan wilayah pengembangan Gelangmanggung serta perbandingannya dengan Jawa Tengah dan nasional dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.49
Perbandingan Pertumbuhan HLS Daerah dengan Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Kabupaten / Kota	HLS (Tahun)					Pertumbuhan HLS				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Magelang	12,53	12,54	12,55	12,58	12,61	0,05	0,01	0,01	0,03	0,24

Kabupaten Magelang	13,81	14,14	14,15	14,31	14,4	0,01	0,33	0,01	0,16	0,63
Kabupaten Temanggung	12,13	12,14	12,32	12,55	12,61	0,05	0,01	0,18	0,23	0,48
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	12,82	12,94	13,01	13,15	13,21	0,04	0,12	0,07	0,14	0,45
JAWA TENGAH	12,68	12,7	12,77	12,81	12,85	0,05	0,02	0,07	0,04	0,31
NASIONAL	12,95	12,98	13,08	13,1	13,15	0,04	0,03	0,1	0,02	0,38

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Capaian HLS Kabupaten Temanggung selama lima tahun terakhir terus menunjukkan adanya peningkatan. HLS Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 sebesar 12,61, hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata anak berusia 7 tahun yang masing jenjang pendidikan pada Tahun 2023 diharapkan dapat bersekolah hingga 12,61 tahun atay setara Diploma I. Dilihat berdasarkan pertumbuhannya, progres HLS Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan yang positif terutama setelah pandemi Covid-19. jika dibandingkan dengan rata-rata capaian pada wilayah pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah serta nasional, capaian HLS Kabupaten Temanggung juga masih berada di bawah capaian tersebut, oleh karena itu pembangunan di sektor pendidikan masih perlu untuk terus ditingkatkan.

C. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2023 mencapai 7,5 naik 1,21 poin dibandingkan capaian tahun 2022. Ini artinya rata-rata penduduk Temanggung mencapai Pendidikan Dasar sampai kelas 7 (kelas 1 SMP), belum sampai kelas 8. Capaian RLS Temanggung di bawah capaian Jawa Tengah (8,01) dan capaian Nasional (8,77). Dan ini diasumsikan menjadi salah satu komponen penghambat pertumbuhan IPM di Kabupaten Temanggung selama kurun waktu Tahun 2019-2023.

Capaian dan pertumbuhan komponen IPM pada indikator Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan wilayah pengembangan Gelangmanggung serta perbandingannya dengan Jawa Tengah dan nasional dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.50
Perbandingan Pertumbuhan RLS Daerah dengan Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah , dan Nasional Tahun 2019-2023

Kabupaten / Kota	RLS (Tahun)					Pertumbuhan RLS				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Magelang	7,77	7,78	7,79	7,81	7,82	0,2	0,01	0,01	0,02	0,13
Kabupaten Magelang	10,33	10,39	10,62	10,94	11,2	0,02	0,06	0,23	0,32	2,38

Kabupaten Temanggung	7,15	7,24	7,25	7,41	7,5	0,21	0,09	0,01	0,16	1,21
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	8,42	8,47	8,55	8,72	8,84	0,14	0,05	0,08	0,17	1,24
JAWA TENGAH	7,53	7,69	7,75	7,93	8,01	0,18	0,16	0,06	0,18	1,01
NASIONAL	8,34	8,48	8,54	8,69	8,77	0,17	0,14	0,06	0,15	0,92

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Capaian RLS Kabupaten Temanggung selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang baik. RLS Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 sebesar 7,5, hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata penduduk berusia 25 tahun ke atas di Kabupaten Temanggung telah menempuh pendidikan selama 7,5 tahun atau setara dengan telah mengenyam pendidikan sampai kelas VII (putus sekolah di kelas VIII). Pencapaian tersebut masih harus ditingkatkan karena jika dibandingkan dengan wilayah pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional di mana capaian Kabupaten Temanggung termasuk rendah.

Faktor penghambat Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Temanggung di antaranya adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kultur sosial budaya masyarakat. Upaya tindak lanjut nya adalah penanganan Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS) dengan menambah dan meningkatkan sarana pelayanan pendidikan dan tenaga pendidik yang berkompetensi untuk meningkatkan capaian RLS sekaligus HLS.

D. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Indikator Pengeluaran per Kapita Disesuaikan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung ini masih sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung ini masih rendah jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Pengeluaran per kapita per tahun penduduk Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp 10.108.000,00, lebih rendah dari rata-rata pengeluaran per kapita per tahun penduduk Provinsi Jawa Tengah yang sebesar Rp.11.835.000,00 sedangkan rata-rata pengeluaran per kapita per tahun penduduk Nasional adalah sebesar Rp. 11.899.000,00.

Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*). Pengeluaran per kapita dapat menggambarkan tingkat kemapanan

seseorang. Capaian dan pertumbuhan komponen IPM pada indikator Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan wilayah pengembangan Gelangmanggung serta perbandingannya dengan Jawa Tengah dan nasional dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.51
Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita Daerah dengan Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Kabupaten / Kota	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rp)					Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Magelang	9.387	9.301	9.440	10.011	10.493	4,01	-0,92	1,49	6,05	4,81
Kabupaten Magelang	12.514	12.210	12.349	12.816	13.175	4,34	-2,43	1,14	3,78	2,8
Kabupaten Temanggung	9.489	9.343	9.408	9.773	10.108	3,8	-1,54	0,7	3,88	3,43
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	10.463	10.285	10.399	10.867	11.259	4,05	-1,63	1,11	4,57	3,68
JAWA TENGAH	11.102	10.930	11.034	11.377	11.835	3,02	-1,55	0,95	3,11	4,03
NASIONAL	11.299	11.013	11.156	11.479	11.890	2,17	-2,53	1,3	2,9	3,58

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan penduduk Kabupaten Temanggung terus mengalami peningkatan dari Tahun 2019 hingga 2022 meskipun pada Tahun 2020 sempat mengalami penurunan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Pada tahun 2023 Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan di Kabupaten Temanggung telah mencapai 10.108 Ribu Rupiah per tahun. Jika dibandingkan dengan capaian rata-rata pada wilayah pengembangan Gelangmanggung, capaian Kabupaten Temanggung masih berada di bawah bahkan paling rendah di antara kabupaten/kota yang ada pada wilayah pengembangan Gelangmanggung. Selain itu jika dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, capaian Kabupaten Temanggung juga masih berada di bawahnya.

2.1.2.7 Ketimpangan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup menjadi jaminan bahwa kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara merata. Oleh karena itu, laju pertumbuhan ekonomi seyogyanya harus diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan agar hasil-hasil pertumbuhan tersebut dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, sasaran pembangunan tidak hanya berhenti sampai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja, melainkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperhitungkan pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas ketika semakin besar masyarakat yang terlibat dan menikmati hasil ekonomi produktif di dalam sistem perekonomian.

Tingkat ketimpangan menjadi masalah yang perlu dituntaskan bersama. Ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan di suatu daerah dapat menimbulkan masalah sosial, oleh sebab itu Pemerintah Daerah seharusnya mendistribusikan pendapatan ke seluruh wilayah kecamatan agar tidak terjadi ketimpangan, dengan membangun infrastruktur dan memberdayakan masyarakat sekitarnya, sehingga dapat mengurangi tingkat ketimpangan tersebut. Ketimpangan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat melalui indikator Rasio Gini dan/atau Distribusi Pengeluaran Menurut Bank Dunia.

A. Rasio Gini

Rasio Gini digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar penduduk. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0-1, dimana semakin tinggi nilai Rasio Gini menunjukkan ketidakmerataan yang semakin tinggi. Perubahan Rasio Gini juga merupakan indikasi adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk.

Rasio Gini Kabupaten Temanggung Tahun 2023 telah mencapai 100% kinerja pencapaian target RKPD. Adapun perbandingan Rasio Gini daerah dengan target RKPD selama periode Tahun 2020-2023 sebagai berikut.

Tabel 2.52
Perbandingan Rasio Gini Daerah dengan Target RKPD Tahun 2020-2023

Tahun	Target	Realisasi	Kinerja
2020	NA	0,382	100%
2021	0,382	0,374	100%
2022	0,374	0,370	100%
2023	0,363	0,359	100%

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Perkembangan nilai Rasio Gini Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.53
Perbandingan Rasio Gini Daerah dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023
Kota Magelang	0,41	0,45	0,43	0,42
Kabupaten Magelang	0,37	0,38	0,36	0,36
Kabupaten Temanggung	0,38	0,37	0,37	0,36
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	0,39	0,40	0,39	0,38
JAWA TENGAH	0,36	0,37	0,37	0,37
NASIONAL	0,39	0,38	0,38	0,39

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Nilai Rasio Gini Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu Tahun 2020 hingga Tahun 2023 menunjukkan penurunan. Nilai Rasio Gini yang terus menurun mengindikasikan adanya perbaikan pemerataan dalam periode tersebut. Penurunan nilai Rasio Gini juga dapat diartikan bahwa

distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan. Pada Tahun 2023 nilai Rasio Gini Kabupaten Temanggung adalah sebesar 0,359 yang berada pada kategori sedang/moderat.

Perbandingan nilai Rasio Gini dan pertumbuhan ekonomi antara Kabupaten Temanggung dan nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54
Perbandingan Rasio Perubahan Rasio Gini dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Capaian Nasional Tahun 2019-2023

Tahun	Kabupaten Temanggung				Nasional			
	Gini Ratio	Perubahan	Pertumbuhan Ekonomi	Perubahan	Gini Ratio	Perubahan	Pertumbuhan Ekonomi	Perubahan
2019			5,05	-0,08			5,02	-0,15
2020	0,382		-2,13	-7,18	0,385		-2,07	-7,09
2021	0,374	-0,008	3,34	5,47	0,381	-0,004	3,70	5,77
2022	0,370	-0,004	5,20	1,86	0,381	0	5,31	1,61
2023	0,357	-0,013	5,00	-0,20	0,388	0,007	5,04	-0,27

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Ketimpangan pendapatan memiliki kaitan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan pendapatan yang digambarkan menggunakan Rasio Gini, dapat diukur dengan pendapatan per kapita atau pengeluaran per kapita yang mana kedua hal tersebut menggambarkan kondisi perekonomian penduduk di suatu wilayah. Dilihat dari tabel di atas, peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung berkorelasi positif terhadap penurunan ketimpangan (Rasio Gini).

Tabel 2.55
Perbandingan Rasio Gini Daerah dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan gelangmanggung, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2023

Tahun	Kabupaten Temanggung		Rata-rata GELANGMANGGUNG		Nasional	
	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan
2020	0,382	-	0,386	-	0,385	-
2021	0,374	-0,008	0,403	-0,008	0,381	-0,004
2022	0,370	-0,004	0,387	-0,004	0,381	0
2023	0,359	-0,011	0,379	-0,011	0,388	0,007

Sumber : BPS dan BPS Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa rasio gini Kabupaten Temanggung mencatatkan nilai sebesar 0,357. Setelah tahun 2020 atau pasca pandemi Covid-19, nilai Rasio Gini mengalami penurunan seiring dengan kondisi perekonomian yang berangsur pulih sehingga pemerataan pendapatan juga dapat meningkat. Jika dibandingkan dengan rata-rata Purwomanggung dan nasional, Rasio Gini Kabupaten Temanggung memiliki nilai yang lebih kecil meskipun berada pada kategori yang sama yaitu kategori ketimpangan sedang

B. Distribusi Pengeluaran Menurut Kriteria Bank Dunia

Selain Rasio Gini, ukuran lain yang sering digunakan sebagai

alternatif untuk menghitung kesenjangan penduduk adalah “distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia” yaitu persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah. Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

1. Ketimpangan pengeluaran tinggi (*high inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah kurang dari 12%
2. Ketimpangan pengeluaran sedang (*moderate inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah antara 12-17%
3. Ketimpangan pengeluaran rendah (*low inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah lebih dari 17%

Berikut gambaran distribusi pengeluaran Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 berdasar kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional dari tahun 2019-2023.

Tabel 2.56
Distribusi Pendapatan Berdasar Kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Perubahan
2019	-	18,39	0,05
2020	-	17,54	-0,85
2021	18,30	18,78	1,24
2022	18,50	18,46	-0,32
2023	18,70	19,52	1,06

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Secara keseluruhan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019-2023), ketimpangan pengeluaran menurut kriteria Bank Dunia di Kabupaten Temanggung termasuk kategori rendah (*low inequality*). Pada Tahun 2023 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah adalah sebesar 19,52%, kondisi tersebut menurun jika dibandingkan kondisi Tahun 2022 sebesar 18,46%. Perkembangan distribusi pengeluaran Kabupaten Temanggung menurut kriteria Bank Dunia dalam kurun waktu Tahun 2019-2023 berfluktuasi dan menurun cukup tajam pada Tahun 2020, kondisi tersebut terjadi sebagai imbas pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian yang kemudian juga berdampak pada meningkatnya kemiskinan serta ketimpangan. Jika dibandingkan dengan target sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, kondisi Tahun 2023 telah mencapai target.

Perbandingan Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung, wilayah Pengembangan Gelangmanggung Provinsi Jawa Tengah, Nasional Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel

berikut.

Tabel 2.57
Perubahan Capaian Distribusi Pengeluaran Kabupaten Temanggung dan Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Provinsi Tahun 2019-2023

Kabupaten / Kota	Distribusi Pengeluaran Berdasar Kriteria Bank Dunia					Perubahan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Magelang	15,17	16,26	14,9	16,24	16,07	-1,12	1,09	-1,36	1,34	-0,17
Kabupaten Magelang	17,71	18,57	18,01	18,82	19,03	-0,81	0,86	-0,56	0,81	0,21
Kabupaten Temanggung	18,39	17,54	18,78	18,46	19,52	0,05	-0,85	1,24	-0,32	1,06
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	17,09	17,46	17,23	17,84	18,21	-0,63	0,37	-0,23	0,61	0,37
JAWA TENGAH	18,71	18,53	18,34	18,51	18,74	0,81	-0,18	-0,19	0,17	0,23

Sumber : BPS dan BPS Temanggung, 2024

Distribusi Pengeluaran Kabupaten Temanggung Tahun 2023 capaiannya 19,52% dapat diartikan distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia untuk kelompok berpenghasilan rendah berkurang 1,06. Jika dibandingkan dengan rata-rata pada wilayah pengembangan Gelangmanggung dan Provinsi angka Distribusi Pengeluaran Berdasar Kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 masih berada di bawah, meskipun kondisi di Kabupaten Temanggung menunjukkan ketimpangan yang rendah atau pemerataannya tinggi.

Perbandingan kondisi Distribusi Pengeluaran Berdasar Kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung kondisi terkini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.58
Perubahan Capaian Distribusi Pengeluaran Kabupaten Temanggung, Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Nasional Kondisi Terkini

Tahun	Kabupaten Temanggung		Rata-rata GELANGMANGGUNG		JAWA TENGAH	
	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan
2019	18,39	0,05	17,09	-0,63	18,71	0,81
2020	17,54	-0,85	17,46	0,37	18,53	-0,81
2021	18,78	1,24	17,23	-0,23	18,34	-0,19
2022	18,46	-0,32	17,84	0,61	18,51	0,17
2023	19,52	1,06	18,21	0,37	18,74	0,23

Sumber : BPS dan BPS Temanggung, 2024

Kondisi ketimpangan di Kabupaten temanggung dilihat berdasarkan distribusi pengeluaran menurut kriteria Bank Dunia pada masa Covid-19 yaitu Tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Gangguan kesehatan serta perekonomian yang terkontraksi membawa pengaruh yang signifikan tidak hanya pada peningkatan kemiskinan tetapi juga berdampak pada ketimpangan yang meningkat. Namun, setelah Tahun 2020, kondisi ketimpangan menunjukkan perbaikan pada Tahun 2021

dengan peningkatan pemerataan yang lebih baik. Jika dibandingkan dengan rata-rata pada wilayah pengembangan Gelangmanggung dan Jawa Tengah, kondisi ketimpangan menunjukkan belum adanya perbaikan pada Tahun 2021, namun mulai membaik pada Tahun 2023. Kebijakan percepatan pemulihan kesehatan dan ekonomi pasca pandemi terbukti memberikan dampak yang positif terhadap penurunan ketimpangan dan peningkatan pemerataan yang lebih baik.

2.1.2.8 Aspek Seni Budaya dan Olahraga

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. IPK merupakan instrumen disusun Kemendikbud bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Indeks ini diperlukan untuk mengukur pencapaian pembangunan kebudayaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, IPK bukan mengukur nilai budaya, tetapi lebih memotret pencapaian pembangunan kebudayaan di wilayah tersebut. Dengan mengetahui pencapaian pembangunan kebudayaan, maka setiap pemerintah daerah dapat menentukan arah kebijakan agar dapat menaikkan pencapaian pembangunan kebudayaan di wilayah masing-masing. Gambaran capaian IPK Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.59
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	n.a.	n.a.	3,31	3,67	n.a.

Olahraga pada dasarnya merupakan kebutuhan setiap manusia di dalam kehidupan, agar kondisi fisik dan kesehatannya tetap terjaga dengan baik. Olahraga dapat meningkatkan kesehatan dan mencegah timbulnya berbagai penyakit. Peran olahraga mendukung terciptanya sumber daya manusia yang memiliki kualitas fisik yang baik. Selain bermanfaat untuk jasmani, olahraga juga berperan dalam pengembangan karakter. Kesadaran masyarakat untuk berolahraga memberikan kontribusi dalam pembangunan individu dan masyarakat yang cerdas,

sehat, terampil, tangguh, kompetitif, sejahtera, dan bermartabat. Program yang telah dilaksanakan untuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk berolahraga salah satunya adalah pelaksanaan kegiatan Senam PORPI (Persatuan Olahraga Pernapasan Indonesia) Kabupaten Temanggung yang mengambil tempat di Pasar Curug Titang.

Sedangkan untuk mengukur kemajuan pembangunan digunakan indeks pembangunan olahraga (*Sport Development Index*). Indeks pembangunan olahraga adalah istilah baru dalam olahraga Indonesia. Ini semacam metode pengukuran yang diklaim sebagai alternatif baru untuk mengukur kemajuan pembangunan olahraga yang meliputi sembilan dimensi (variabel) yaitu ruang terbuka olahraga, sumberdaya manusia olahraga, partisipasi masyarakat, kebugaran, performa, kesehatan, literasi fisik, perkembangan performa, dan ekonomi. Pembangunan olahraga di suatu daerah tentunya memiliki peran penting dalam kemajuan olahraga secara umum di Indonesia. Gambaran capaian kinerja keolahragaan di Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.60
Indeks Pembangunan Olahraga

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	n.a	n.a	3,31	2,97	2,97

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, dan sebagai salah satu target yang menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki akses yang sama terhadap pelayanan dasar. Indikator untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah diantaranya adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Capaian APK dan APM semua jenjang pendidikan di Kabupaten Temanggung periode 2019-2023 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.61
APK dan APM Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
APK PAUD 0-6 th (%)	37,53	38,27	40,31	39,59	48,11
APK PAUD 4-6 th (%)	73,99	74,16	72,07	75,18	70,81
APK SD/MI (%)	106,89	106,86	98,07	100,45	165,08
APK SMP/MTs (%)	97,26	98,17	98,56	95,35	159,33
APM SD/MI (%)	96,97	97,62	91,24	94,12	104,62

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
APM SMP/MTs (%)	84,52	85,25	77,18	79,77	134,35

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2024

Selama tiga tahun (2019-2021) berturut-turut, APK PAUD 0-6 tahun di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren meningkat, capaian tersebut pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 39,59%. Penurunan tersebut dikarenakan terjadi peningkatan jumlah penduduk yang berusia 0-6 tahun sebesar 10,4% dari tahun 2021 akan tetapi kenaikan tersebut tidak diimbangi dengan kenaikan siswa yang bersekolah di jenjang PAUD pada tahun 2022 yang hanya mengalami kenaikan sebesar 7,8%. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 48,11%, namun jumlah penduduk usia 0-6 tahun menurun menjadi 64.662 orang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Selanjutnya, di tingkat Sekolah Dasar (SD) Terdapat selisih antara APM dan APK SD/MI. Hal tersebut kemungkinan disebabkan banyaknya anak di bawah usia 7 tahun yang telah memasuki Sekolah Dasar, sementara penegakan aturan usia minimal masuk SD baru diterapkan secara efektif di tahun 2017.

Kesenjangan APK dan APM juga ditemukan di jenjang pendidikan SMP/MTs sederajat di tahun 2023. Rendahnya APM SMP Sederajat diantaranya disebabkan karena terdapat anak usia 13-15 tahun yang sudah bersekolah di jenjang pendidikan menengah, dan adanya anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah.

Angka Putus Sekolah untuk jenjang pendidikan dasar menunjukkan kecenderungan tetap, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.62
Angka Putus Sekolah (APS) SD Sederajat dan SMP Sederajat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Putus Sekolah (APS) SD Sederajat (%)	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02
2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP Sederajat	0,29	0,21	0,37	0,29	0,21

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2024

Selama lima tahun terakhir Angka Putus Sekolah (APS) jenjang SD menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2019, namun berbanding terbalik dengan APS jenjang SMP sederajat yang awalnya mengalami penurunan namun naik pada tahun 2021, dan kembali turun pada tahun 2022 dan tahun 2023 APS SMP menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan APS SD berdasarkan Profil Pendidikan Tahun 2022, sebagian besar siswa SMP/MTs mengalami putus sekolah di kelas 7 dan didominasi oleh siswa laki-laki.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya APS pada siswa SD/MI dan SMP/MTs umumnya adalah faktor motivasi anak, perhatian/persepsi orang tua siswa, memiliki kebutuhan khusus (anak berkebutuhan khusus), budaya, dan faktor ekonomi orang tua siswa.

Berdasarkan Surat Mendikbudristek Nomor 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024 tentang Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, hasil capaian literasi dan numerasi pendidikan Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

Tabel 2.63
Laporan Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Indikator	Jenjang	Capaian	Target
Skor Kemampuan Numerasi	SD	49.50	44.57
Skor Kemampuan Numerasi	SMP	66.49	72.88
Skor Kemampuan Literasi	SD	65.51	61.15
Skor Kemampuan Literasi	SMP	76.52	73.58

Sumber : Lampiran Surat Mendikbudristek 2024

Capaian Laporan Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung dari 4 indikator terdapat 3 indikator yang sudah memenuhi target, yaitu Skor Kemampuan Numerasi SD dan Skor Kemampuan Literasi SD dan SMP, sedangkan terdapat 1 indikator capaiannya belum memenuhi target yaitu Skor Kemampuan Numerasi SMP. Beberapa faktor yang menyebabkan capaian Skor kemampuan Numerasi SMP lebih rendah dari target yaitu Data peta kebutuhan PTK dalam memaksimalkan pembelajaran untuk peningkatan kemampuan numerasi siswa, maka perlu diketahui pemetaan jumlah PTK yang tersedia dan yang dibutuhkan, kualitas pembelajaran konten pembelajaran mampu meningkatkan numerasi siswa terutama jika konten pembelajaran tnhj paersebut berasal dari guru berkualitas, Reflesi dari perbaikan pembelajaran perlu dilakukan secara berklanutan melalui komunitas belajar sebagai wadah bagi PTK untuk terus berupaya meningkatkan kualitas layanannya.

Pada tahun 2023 persentase PNF Terakreditasi menunjukkan kenaikan namun masih jauh dari angka 100%. Persentase Satuan Pendidikan Nonformal (satuN PNF) Terakreditasi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.64
Persentase Satuan PNF Terakreditasi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Satuan PNF Terakreditasi	15	18	19	19	19
2	Jumlah Satuan PNF	54	61	59	59	59
3	Persentase	27,78	29,51	32,20	32,20	32,20

Sumber: Bidang PPNF

Satuan PNF Terakreditasi yang pada tahun 2018 berjumlah 13

meningkat menjadi 19 pada tahun 2022, dan Satuan PNF pada tahun 2018 berjumlah 54 meningkat menjadi 59 pada tahun 2022.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Indikator aspek kesehatan yang digunakan untuk mengukur kinerja bidang kesejahteraan sosial adalah Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKBa).

AKI, AKB, dan AKBa di Kabupaten Temanggung selama periode 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Di tahun 2020 angka kematian untuk ibu, dan bayi mengalami peningkatan, dimana peningkatan tertinggi terjadi untuk kematian ibu. Kondisi tersebut disebabkan oleh hampir seluruh fasilitas kesehatan tidak dapat menyediakan layanan kesehatan secara optimal karena persebaran covid-19. Selain itu, masyarakat juga cenderung enggan untuk mengakses sebagian besar layanan kesehatan tersebut karena khawatir tertular. Kondisi tersebut menunjukkan penyediaan layanan kesehatan khususnya untuk ibu hamil serta deteksi dan penanganan komplikasi kehamilan dan persalinan belum optimal.

Gambaran kinerja kesehatan di Kabupaten Temanggung periode 2019 sampai dengan 2023 ditampilkan pada tabel berikut

Tabel 2.65
Gambaran Urusan Kesehatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,48	75,58	75,64	75,70	75,77
2	Indeks Kinerja RSUD	%	70,7	69,05	93	95	95
3	Angka Kematian Ibu	per 100.000 Kelahiran Hidup	85,27	95,83	174,38	75,32	44,96
4	Angka kematian bayi (AKB)	per 1000 kelahiran hidup	12,51	12,65	12,72	13,23	13,04
5	Prevalensi ballita gizi buruk	%	0,27	0,18	0,18	0,31	0,22
6	Prosentase rumah tangga yang memiliki jamban	%	89,14	97,72	100	100	90,22
7	Persentase Puskesmas yang sarprasnya sesuai standar	%	96,15	96,15	100	100	100
8	Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	%	99,22	98,41	97,73	98,72	99,02
9	Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	%	100	100	100	100	100
10	Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	100	100	100	100	100
11	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki	%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
	kompetensi kebidanan						
12	Persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	%	100	100	100	100	100
13	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	99,09	100
14	Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	%	100	100	100	100	100
15	Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup	per 1.000 KH	9,00	9,77	9,54	9,15	9,2
16	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	99,67	80,40	81,64	92,95	100
17	Angka Kematian Balita	per 1.000 KH	14,68	13,90	14,05	15,60	16,1
18	Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	30,95	84,92	82,05	100
19	Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	86,60	51,81	69,25	89,07	100
20	Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	94,25	62,64	89,52	83,22	100
21	Persentase kunjungan baru di pelayanan kesehatan dasar (Kunjungan Rawat Jalan di Puskesmas)	%	36,06	38,09	33,83	55,32	45,5
22	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik pemerintah terakreditasi utama	%	40	40	40	40	100
23	Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	22,63	19,99	30,97	84,78	100
24	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	75,91	77,37	92,50	100	100
25	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	88,86	83,06	100	100	100
26	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	72,11	38,19	67,88	95,65	100
27	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini	%	68,41	74,42	73,49	87,03	100

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
	HIV sesuai standar						
28	Persentase Penanganan KLB 1x24 jam	%	100	100	100	100	100
29	Angka Kesakitan kasus malaria (API)	maks per 1.000 penduduk	0,008	0	0,0005	0,0002	0,0002
30	Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	maks per 100.000 penduduk	37,62	51,13	3,75	3,62	2,09
31	Angka Penemuan Kasus Baru Kusta	Maks per 100.000 penduduk	0,1	0,38	0	0,125	0,0004
32	Persentase Desa/kelurahan UCI	%	98,96	99,31	99,31	99,65	100
33	Persentase anak umur 1 tahun diimunisasi campak	% minimal	95,6	95,75	81,16	97,05	99,85
34	Prevalensi gizi kurang (underweight) pada anak balita (0-60 bulan)	% maksimal	3,35	3,79	3,10	4,21	4,03
35	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	% maksimal	20,40	14,23	13,13	13,03	9,84
36	Persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	% minimal	86,03	74,15	84,02	82,33	87,42
37	Prevalensi anemia pada ibu hamil	% maksimal	15,72	14,18	13,64	13,44	11,41
38	Persentase desa bebas rawan gizi	%	100	100	100	100	100
39	Persentase rumah sehat	%	80,10	83,75	82,16	87,42	100
40	Cakupan nilai akreditasi RSUD	%	100	100	100	100	100
41	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit	%	51,13	50,73	55,90	56,35	56,99
42	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	%	97,06	100	100	100	100
43	Cakupan puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar	%	n.a	n.a	19,23	100	100
44	Cakupan Penggunaan Obat Rasional (POR) di puskesmas	%	n.a	n.a	80,77	100	100
45	Pengawasan makanan minuman di pasar tradisional	%	n.a	n.a	100	100	100
46	Persentase sarana pelayanan mendapatkan ijin kesehatan	%	n.a	n.a	100	100	100
47	Cakupan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) yang mendapat SPP-IRT	%	n.a	n.a	100	100	100
48	Persentase Rumah Tangga Sehat (PHBS Rumah Tangga) Strata Utama dan Paripurna	%	89,15	92,92	94,42	94,96	96

Sumber: Dinkes Kabupaten Temanggung, 2024

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Angka Harapan Hidup selalu terjadi peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, karena lama hidup seseorang tidak terlepas dari tingkat kesehatan yang bersangkutan. Derajat Kesehatan masyarakat antara lain dipengaruhi oleh peningkatan pelayanan kesehatan baik akses maupun mutu pelayanan, jaminan kesehatan, penyehatan lingkungan, asupan gizi yang baik, tingkat kepedulian dan perawatan terhadap kesehatan sehingga angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan pada umumnya.

Angka Harapan Hidup Kabupaten Temanggung tahun 2023 yang tergolong cukup tinggi, dan mengalami kenaikan sebesar 0,07 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara mikro, individu dengan harapan hidup yang tinggi secara ekonomis memiliki peluang untuk memperoleh pendapatan yang tinggi. Keluarga dengan usia harapan hidup yang tinggi cenderung untuk menginvestasikan pendapatannya di bidang pendidikan dan menabung. Dengan demikian, tabungan nasional akan meningkat, investasi akan meningkat dan pada gilirannya akan meningkatkan pembangunan.

Pada tahun 2021 Angka Kematian Ibu meningkat secara drastis yaitu sebesar 174,38% per 100.000 kelahiran hidup dengan jumlah kematian ibu sebanyak 17 kematian dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 95,83 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang menjadi penyebab kematian ibu tertinggi di tahun 2021 yakni 9 orang (52,94%). Kasus kematian ibu yang terjadi di Kabupaten Temanggung disebabkan mayoritas karena ibu hamil memiliki riwayat penyakit dan kurang optimalnya kunjungan nifas. Pada tahun 2023, angka kematian ibu mengalami penurunan yang sangat signifikan dibanding tahun 2022 yaitu menjadi sebesar 44,96.

Angka kematian bayi pada tahun 2019-2023 setiap tahunnya mengalami peningkatan sebagaimana tersebut pada tabel di atas. Dari tahun 2019 hingga tahun 2023 AKB mengalami peningkatan dari 12,51 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 13,04 per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan bahwa program-program untuk mengurangi angka kematian bayi senantiasa harus tetap dikedepankan, misalnya program pelayanan kesehatan ibu hamil, program imunisasi, pencegahan penyakit menular pada anak-anak, program ASI Eksklusif, program gizi masyarakat serta pemberian makanan sehat untuk ibu hamil.

Untuk tahun 2023 jumlah kematian bayi sebanyak 116 kematian yang

tersebar di seluruh Kecamatan dan wilayah Puskesmas. Mayoritas penyebab kematian adalah BBLR, asfiksia dan kelainan kongenital.

Persentase balita gizi buruk cenderung fluktuatif, angka ini selalu ada di bawah 10%, termasuk kategori rendah menurut WHO dan masih berada di bawah target nasional yaitu kurang dari 0,5%. Status gizi balita bersifat labil, karena sangat dipengaruhi pola asupan makanan bergizi dan penyakit penyerta, misalnya BBLR, diare, cacangan, demam berdarah, thypus dan lain-lain. Sedangkan untuk persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap jamban sehat pada tahun 2019-2022 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 90,22% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 100%, akan tetapi jika dilihat pada target RPJMD perubahan 2018-2023 tercapai 100%.

Untuk data capaian Puskesmas yang sarprasnya sesuai standar tahun 2023 digunakan standar berdasarkan Rencana Aksi Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2020 – 2024, Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama (FKTP) yaitu Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar merupakan Puskesmas dengan capaian pemenuhan SPA lebih dari 60% dan pada tahun 2023 telah mencapai 100%.

Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan belum bisa 100% karena proses perencanaan dan pengadaan obat di Kabupaten Temanggung dilakukan setahun sekali di awal tahun sehingga dimungkinkan terjadi perubahan dalam kebutuhan dalam bulan-bulan terakhir yang disebabkan karena perubahan dari segi jumlah pasien yang berobat (metode konsumsi) dan jenis penyakit yang muncul (metode epidemiologi) sehingga tidak bisa tepat 100%. Selain jenis penyakit yang muncul bervariasi faktor lain yang menyebabkan ketersediaan obat belum mencapai angka 100% adalah keterlambatan pengiriman obat, ketidaksesuaian tanggal kedaluwarsa dengan pemesanan, dan belum semua obat masuk ke *e-catalog* serta sisanya masih proses tender cepat.

Indikator cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar merupakan salah satu indikator SPM Bidang Kesehatan dengan target 100% setiap tahunnya atau dengan kata lain semua bayi baru lahir harus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 seluruh bayi baru lahir telah mendapatkan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir sesuai standar 100%. Pada tahun 2022 angka capaiannya hanya 99,09%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat seperti kelengkapan sarana dan prasarana penanganan kegawatdaruratan penyakit pada bayi, pengelolaan manajemen laktasi yang

belum maksimal, dan keterampilan tenaga kesehatan dalam menangani kasus kegawatdaruratan. Dan pada tahun 2023 capainnya naik menjadi 100% dari tahun sebelumnya.

Semua balita di Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 telah mendapatkan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar 100%, yang merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan bagi masyarakat khususnya balita (0-60 bulan). Indikator cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 80,40% disebabkan adanya pandemi Covid-19 sehingga kegiatan posyandu dibatasi yang mengakibatkan pelayanan tidak maksimal. Pada tahun 2021 hingga tahun 2023 setiap tahunnya mengalami peningkatan sebesar 100% atau terdapat 43.520 balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar.

Tahun 2021 dengan adanya pandemi Covid-19 pelaksanaan pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar tidak maksimal sehingga hanya mencapai 84,92%. Pada tahun 2022, persentase anak usia pendidikan dasar yang Mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sudah mencapai 82,05% dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 100%.

Persentase warga negara Indonesia usia 15-59 dan usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar merupakan indikator SPM Bidang kesehatan dimana targetnya adalah 100% yang artinya bahwa semua warga negara usia 15-59 tahun dan 60 tahun ke atas wajib mendapatkan skrining kesehatan. Dari tahun 2019 hingga tahun 2022 belum semua sasaran mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, hal ini dikarenakan yang mendapatkan skrining kesehatan baru sasaran yang datang ke fasilitas kesehatan yang dilayani skrining kesehatan, sedangkan yang tidak mengunjungi fasilitas kesehatan belum mendapatkan skrining kesehatan, di tahun 2020 dengan adanya pandemic Covid-19 membuat warga enggan untuk pergi ke fasilitas Kesehatan untuk memeriksakan dirinya. Akan tetapi pada tahun 2021 hingga tahun 2023 warga negara usia 15-59 dan 60 tahun yang mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar terus mengalami peningkatan hingga sampai dengan tahun 2023 telah tercapai 100%

Untuk data pelayanan kesehatan penderita Hipertensi dan DM baru dapat diperoleh mulai tahun 2017 karena pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan baru diimplementasikan mulai tahun 2017. Jumlah penderita hipertensi dan DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar masih sangat kecil pada awalnya, dikarenakan data yang diperoleh hanya berdasarkan laporan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama belum termasuk Fasilitas Kesehatan

Tingkat Lanjut dan Fasilitas Kesehatan Swasta, namun seiring bertambahnya waktu telah tercapai pelayanan 100% pada tahun 2023.

Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat dilaksanakan berdasarkan Permenkes tentang SPM Bidang Kesehatan dan dimulai tahun 2018 dengan capaian belum memenuhi target 100% yaitu hanya 69,36%. Indikator persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar pada tahun 2023 capaiannya sebesar 100%, capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor seperti telah dilaksanakan deteksi dini khususnya di lingkungan sekolah dan masyarakat, pengobatan yang dilakukan telah sesuai standar, sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat, mengadakan bimtek kepada puskesmas terkait capaian kinerja, dan adanya advokasi terhadap para *stakeholder* di tingkat kabupaten.

Indikator persentase orang terduga TBC merupakan salah satu indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Bidang Kesehatan dimana targetnya sebesar 100% yang artinya semua orang terduga TB wajib menerima pemeriksaan penunjang TB sesuai standar. Jumlah orang terduga TB yang dilakukan pemeriksaan penunjang TB ditemukan dan tercatat tahun 2023 adalah sebanyak 8.577 orang dengan capaian yang meningkat sebesar 100% dari target 100%.

Dari tahun 2019-2023 semua kejadian Luar Biasa (KLB) di lakukan Penyelidikan Epidemiologi dan penanggulangan < 24 jam atau 100% dapat ditanggulangi. Bila dilihat dari tahun 2020 dan 2021 jumlah frekuensi KLB menurun dari 4 kejadian menjadi 3 kejadian, hal didorong oleh adanya kewaspadaan dini terhadap penyakit menular di masing-masih wilayah puskesmas, dimana bila ada kenaikan kasus penyakit menular di wilayah kerjanya segera ditindaklanjuti dengan penanganan untuk mencegah peningkatan atau penyebaran kasus penyakit tersebut. Pada tahun 2023 juga terjadi penurunan terdapat 11 KLB yang terjadi yaitu KLB difteri, diare, keracunan makanan, campak, pertusis yang tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan, namun dapat ditangani karena Dinas Kesehatan memiliki tenaga epidemiologi yang memadai sehingga melakukan PE (Penyelidikan Epidemiologi) dengan optimal.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk di Kabupaten Temanggung dari tahun 2019 hingga tahun 2023 terdapat 2 (dua) kasus malaria di wilayah kerja puskesmas Traji dan Puskesmas Kedu dimana masih di bawah target <1 per 1.000 penduduk dikarenakan Kabupaten Temanggung bukan merupakan daerah endemis malaria dan kewaspadaan dini tetap berlanjut agar tidak muncul kasus

malaria.

Penyakit DBD masih menjadi permasalahan kesehatan prioritas di Kabupaten Temanggung, Angka Kesakitan (*Incident rate/IR*) DBD di Kabupaten Temanggung tahun 2021 sebesar 3,75 per 100.000 penduduk, angka ini jauh dibawah target yang ditetapkan (<20 per 100.000 penduduk). Bila dibandingkan pada tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan, hal ini disebabkan karena dalam penegakan diagnosa DBD pada tahun 2021 didasarkan pada standar WHO Tahun 2011 yang dilaporkan dalam format pencatatan pelaporan E-DBD Tronik. Pada tahun 2022 nilai IR DBD per 100.000 penduduk sebesar 3,62 dan tahun 2023 nilai IR DBD per 100.000 penduduk menurun sebesar 2,09.

Selama tahun 2019-2023 capaian desa UCI tercapai 100% dikarenakan melakukan advokasi secara berkelanjutan kepada semua desa/kelurahan untuk melaksanakan imunisasi. Kemudian untuk persentase anak umur 1 tahun yang mendapat imunisasi campak dari tahun 2019-2023 fluktuatif walaupun sudah melebihi target yang ditentukan yaitu 99,85%. Imunisasi Campak merupakan indikator bahwa anak usia 1 tahun sudah mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).

Persentase rumah sehat dari tahun ke tahun fluktuatif. Untuk tahun 2021 rumah sehat menurun menjadi 82,16% walaupun telah melebihi target sebesar 81% sedangkan pada Tahun 2022 dan 2023 sebesar 100%, hal tersebut didukung dengan adanya upaya pembinaan bagi rumah yang belum memiliki kategori sehat. Kegiatan untuk meningkatkan cakupan rumah sehat juga didukung oleh kegiatan yang dilakukan oleh sektor terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sosial dan Dinas Lingkungan Hidup.

Persentase Rumah Tangga Sehat (PHBS Rumah tangga) starta utama tahun 2023 capaian masih 96%. Capaian tersebut telah melebihi dari target yang ditentukan yaitu sebesar 83,09%. Petugas telah melakukan pendataan terkait data PHBS dan melakukan upaya peningkatan kerjasama dengan kader posyandu dalam kegiatan pendataan di masing masing desa se-Kabupaten Temanggung.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang diukur dengan aspek fasilitas dan infrastruktur wilayah dengan komponen: kapasitas air baku, daerah irigasi (DI) dalam kondisi baik, jalan kondisi baik, jembatan kondisi baik, dan rasio tingkat pelayanan ruas jalan. Perkembangan kinerja aspek ini ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.66
Aspek Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

Komponen	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase infrastruktur kondisi baik (%)	81,17	82,37	83,70	83,79	84,54
Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (%)	86,73	93,90	94,52	95,32	95,95
Persentase jaringan irigasi kondisi baik (%)	57,41	59,97	58,11	58,83	59,36
Persentase Jalan Kondisi Mantap (%)	89,14	83,33	89,29	88,15	80,16
Persentase Jembatan dalam kondisi baik (%)	92,28	92,87	92,88	92,88	94,36

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2024

Infrastruktur wilayah dalam kondisi baik pada tahun 2018 sampai dengan 2023 mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2023 telah mencapai 84,54%.

Indikator program persentase jalan kondisi mantap pada tahun 2023 tercapai 89,16%. Capaian tersebut telah melebihi target yang telah ditentukan dalam RPJMD 2018-2023 sebesar 84,85%. Panjang jalan kabupaten dengan kondisi baik sepanjang 579,972 Km dari keseluruhan panjang jalan kabupaten yaitu 650.476 Km. Sedangkan panjang jalan yang rusak atau tidak mantap sepanjang 70,504 Km. Kerusakan jalan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya air, perubahan suhu, cuaca, temperatur udara, material konstruksi perkerasan, kondisi tanah dasar yang tidak stabil, proses pemadatan di atas lapisan tanah dasar yang kurang baik dan tonase atau muatan kendaraan-kendaraan berat yang melebihi kapasitas serta volume kendaraan yang semakin meningkat.

Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum di Kabupaten Temanggung dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 adalah 95,95% atau sebanyak 260.833 rumah tangga yang berakses minum layak dari 271.854 rumah tangga yang ada. Hal tersebut menunjukkan bahwa dilihat dari ketersediaan air minum layak, Kabupaten Temanggung telah memenuhi standar pelayanan minimal air minum.

Cakupan daerah irigasi kondisi baik pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Jumlah daerah irigasi kondisi baik sebanyak 342,5 unit dari jumlah daerah irigasi sebanyak 577 unit atau seluas 10.0512,17 Ha dari 17.708,78 Ha pada tahun 2023, sedangkan pada tahun 2022 daerah irigasi dalam kondisi baik tercapai sebanyak 339,5 unit atau seluas 10.417,61 Ha.

Persentase jembatan kabupaten kondisi baik pada tahun 2022 tercapai

sebesar 92,88% atau sebanyak 313 unit jembatan dalam kondisi baik dari 337 unit jembatan di Kabupaten Temanggung. Capaian jembatan kabupaten dalam kondisi baik dari tahun 2019 hingga 2023 ada peningkatan. Pada tahun 2023 meningkat 1,48% dari capaian tahun 2022, hal tersebut didukung dari sub kegiatan pengembangan jembatan, sub kegiatan penggantian jembatan dan sub kegiatan pemeliharaan rutin jembatan.

Selanjutnya capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.67
Gambaran Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

No	Indikator	Sat	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase infrastruktur kondisi baik	%	81,17	82,37	83,70	83,79	84,54
2	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai tata ruang	%	87,70	89,20	88,54	88,56	89,56
3	Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi	%	n.a	91,89	95,29	97,97	98,32
4	Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik	%	57,41	59,97	58,11	58,83	59,36
5	Cakupan Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum	%	86,73	93,90	94,52	95,32	95,95
7	Persentase pelayanan drainase skala Kawasan/kota	%	46,14	46,59	22,54	69,04	69,21
8	Persentase desa terfasilitasi kegiatan Bankeu/Hibah	%	n.a	n.a	100	100	100
9	Prosentase Gedung pemerintah dalam kondisi baik	%	n.a	63,10	86,82	86,82	86,82

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2024

Meski fluktuatif tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang secara umum cukup baik dan memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ketahun.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan

Penyediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang layak huni menjadi prioritas urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Gambaran capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam kurun waktu 5 tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.68
Gambaran Urusan Perumahan di Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase	%	n.a	98,71	98,99	98,99	99,12

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
	perumahan dan permukiman layak huni						
2	Prosentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	10,67	8,12	6,5	5,25	4,5
3	Cakupan Rumah Tangga yang mendapatkan akses sanitasi	%	90,19	92,38	82,68	88,11	94,39
3	Persentase Rumah Layak Huni	%	88,38	90,24	91,15	94,75	95,50
4	Persentase Kawasan kumuh perkotaan	%	11,93	7,09	5,55	4,86	4,86
5	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	n,a	100	100	100	100
6	Prosentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah yang memperoleh fasilitas rumah layak huni	%	n,a	100	100	100	100

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui perkembangan realisasi capaian sampai tahun 2023, yang menunjukkan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) mengalami penurunan sebesar 4,5% % atau secara jumlah sebanyak 9.828 unit rumah tidak layak huni. Capaian tersebut merupakan hasil kerjasama pemerintah Kabupaten Temanggung dengan stakeholder terkait meningkatkan sinergitas dengan seluruh pihak terkait dalam memaksimal pelaksanaan pembangunan RTLH menjadi RLH serta melakukan pendataan lebih intensif dengan pihak terkait untuk keakuratan data jumlah rumah di Kabupaten Temanggung meliputi rumah layak huni dan tidak layak huni.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dalam rangka pencapaian target sasaran Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, program-program dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diimplementasikan oleh Satpol PP dan Damkar dengan 1 (satu) indikator sasaran dan 8 (delapan) indikator program.

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diimplementasikan oleh BPBD dengan 1 (satu) indikator sasaran dan 9 (sembilan) indikator program, Kinerja Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.69
Kinerja Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Rasa Aman	angka	4,23	4,36	4,48	4,55	4,55
2	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	%	100	100	100	100	100
3	Rasio Linmas per RT	rasio	1,38	1,38	1,42	1,42	1,6
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	%	n,a	n,a	100	100	100
5	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	%	60,64	60,64	60,64	60,64	60,64
6	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	%	42,86	55,56	76,67	60,00	48,88
7	Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten	Angka	n,a	n,a	310	468	545
8	Persentase Aparatur yang Memenuhi Standar Kualifikasi	%	35,9	35,19	32,14	80,00	96,36
9	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	42,5	55,5	47,72	43,75	38,93
10	Indeks Resiko Bencana	Angka	144,51	214,81	251,07	174,59	236,83
11	Cakupan desa tangguh bencana	%	10,47	6,67	7,04	11,98	11,98
13	Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	%	100	90	100	100	100
15	Persentase Tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100
16	Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana	%	66,19	65,73	67,74	100	100
17	Persentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana	%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
18	Persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana	%	100	100	100	100	100
19	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	n,a	n,a	100	100	100
20	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	n,a	n,a	100	100	100
21	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	n,a	n,a	100	100	100

Sumber: Satpol PP dan Damkar, BPBD Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa capaian kinerja bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 mengalami peningkatan kecuali capaian kinerja Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) yang turun dari angka 60% menjadi 48,88% pada tahun 2023 dan capaian Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran menurun menjadi 38,93% pada tahun 2023. Meskipun terlihat mengalami penurunan kinerja akan tetapi dari jumlah kasus kebakaran yang tertangani di WMK yang tertangani dalam waktu 15 menit mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika tahun 2022 jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani 15 menit adalah 21 dan jumlah jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK 35. Pada tahun 2023 jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani 15 menit adalah 44 dari 131 kasus kebakaran dan jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK 90. Hal ini merupakan perhatian bagi pemerintah daerah mengingat lokasi pos pemadam kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran. Sedangkan pada capain Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran menurun akan tetapi jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap oleh dinas pemadam dan penyelamat meningkat hingga 51 dari jumlah kejadian 131 dibanding tahun sebelumnya sebesar 28 dari jumlah kejadian 64.

Indikator kinerja cakupan penanganan bencana kebakaran mampu di pertahankan sampai dengan tahun 2023 mengingat topologi Kabupaten Temanggung yang pegunungan dengan wilayah yang luas. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) merupakan daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) dimana dengan terbentuknya beberapa pos diharapkan dapat diberikan bantuan untuk penanggulangan bencana kebakaran dengan sesegera mungkin (tingkat *Response Time* 15 menit). Dalam

5 tahun terakhir kasus yang tertangani di WMK berfluktuatif . Meskipun demikian jumlah kasus kebakaran yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat dan kerjasama pemerintah daerah dalam meminimalisir kejadian kebakaran dilaksanakan dengan baik.

Indeks Rasa Aman merupakan salah satu variabel dalam Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), sebagai variabel yang menyatakan perasaan masyarakat terhadap rasa aman di daerahnya, Indeks Rasa Aman terdiri dari 4 indikator yakni kesadaran hukum, organisasi sipil, mitigasi resiko sosial dan penyelesaian sengketa secara beradab. Selanjutnya, untuk pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati tahun 2018 mengalami penurunan dikarenakan di tahun 2018 penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati baru mencakup perda reklame dan Perda PGOT, Penanganan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati penyelesaiannya melaksanakan sosialisasi, pendataan dan pembinaan kepada pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati (*preventif non yustisial*).

Tahun 2022 strategi yang dilakukan pemerintah daerah dalam menagani pelanggaran perda reklame sedikit berubah yaitu dengan adanya instruksi Bupati agar setiap Kecamatan membantu Satpol PP dalam menertibkan reklame yang melanggar Perda sehingga meskipun dengan keterbatasan sarana serta anggaran, semua pelanggaran Perda dapat terselesaikan (100 %). Selain penegakan Perda K4/reklame juga terdapat pelanggaran Perda PGOT yaitu anak punk yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Mayoritas anak punk tersebut berasal dari luar Kabupaten Temanggung. Pada bulan februari 2021 tim Penegakan Perda Satpol PP berhasil menutup aktifitas galian C di desa Kwadungan Jurang Kecamatan Kledung dan permasalahan sewa penggunaan lahan Pemda di perumahan Madureso Temanggung Tahun 2021.

Tabel 2.70
Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Desa Rawan Bencana	n,a	n,a	217	217	217
Total		n,a	n,a	n,a	217	217
2	Desa tangguh bencana	n,a	n,a	18	26	26
3	Pelatihan, simulasi, informasi	n,a	n,a	94	237	237
4	EWS	n,a	n,a	85	85	85
5	Plank evakuasi	n,a	n,a	45	46	46
Total		n,a	n,a	n,a	242	394

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
6	Kejadian Bencana alam	n,a	n,a	280	317	430
7	Kejadian Bencana Non Alam	n,a	n,a	0	0	0
Total		n,a	n,a	280	317	430
IRBI		n,a	n,a	251,07	174,59	236,83

Sumber : BPBD Kab Temanggung, 2024

Indeks Resiko Bencana mulai diberlakukan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 setelah RPJMD perubahan. Target nilai IRBI tahun 2023 adalah 192,08 dan sampai dengan Tahun 2023 telah mencapai 236,83% dari target sehingga tercapai 100%. Namun terdapat perbedaan hasil perhitungan nilai IRBI dari sumber BNPB pada tahun 2023 sebesar 236,83 dengan kelas risiko tinggi. Capaian tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan mitigasi bencana dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana yaitu dengan adanya peningkatan pembentukan Destana.

Dengan adanya program pembentukan Destana cakupan desa tangguh bencana sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 terus mengalami peningkatan. Capaian destana pada tahun 2023 masih diangka 11,98% dikarenakan belum ada penambahan desa tangguh bencana dan telah melebihi target yang ditentukan yaitu 10,47%.

Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana pada tahun 2023 mencapai angka 100%. Jika dilihat dari tahun 2019 -2022 jumlah mitigasi bencana tiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini didukung partisipasi pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas kemampuan TRC BPBD Kabupaten Temanggung. Pada tahun 2023 capaian masih sama dengan tahun 2022 dikarenakan pada tahun 2023 belum ada penambahan mitigasi bencana di desa/daerah rawan bencana.

Kabupaten Temanggung memiliki beberapa jenis potensi bencana yang dapat mengganggu kondusifitas wilayah antara lain banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Dari beberapa jenis bencana tersebut, bencana banjir dan kekeringan memberikan dampak yang paling luas dibandingkan bencana lainnya.

Kajian risiko bencana akan disusun secara bertahap selama dua tahun yaitu 2023 dan 2024. Pada tahun 2023 akan disusun Peta Risiko Bencana, sedangkan pada tahun 2024 akan disusun Kajian Risiko Bencana Kabupaten Temanggung.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan salah satu permasalahan utama dalam urusan sosial, Gambaran penanganan PMKS di Kabupaten Temanggung periode 2019-2023 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.71
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	n,a	n,a	100	64,30	65,28
2	Cakupan pemberdayaan PSKS perorangan, keluarga, masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100
3	Persentase pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kab/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal	%	100	100	100	100	0
4	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi social diluar panti	%	100	100	100	100	100
5	Persentase warga penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi social diluar panti	%	100	100	100	100	100
6	Persentase warga lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100
7	Persentase warga gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100
8	Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi pemerlu pelayanan sosial diluar panti	%	1,31	2,20	4,22	11,58	8,82
9	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	100	0	100	100	100
10	Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	%	54	63	98,78	100	100
11	Cakupan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota	%	100	100	78,44	91,11	100
12	Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	%	n,a	n,a	63,72	100	100
13	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan social untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	46	83	100	61,70	52,77
14	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
15	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung telah mampu melaksanakan kewajiban pelayanan dasar masyarakat dalam bidang sosial melalui penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditandai dengan capaian kinerja dalam penanganan masalah sosial yang telah memenuhi target.

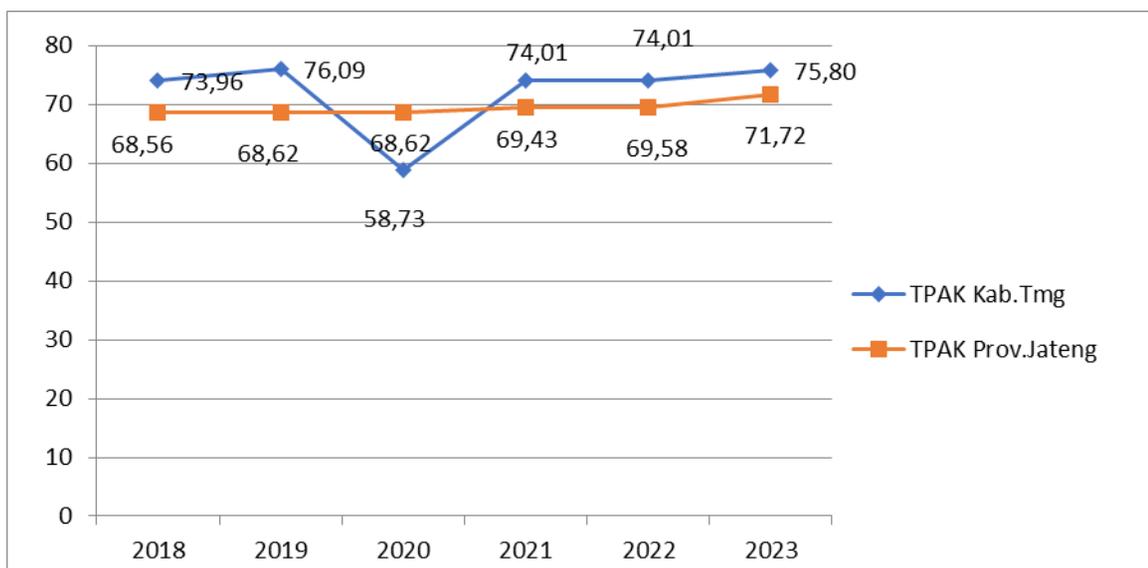
Pada indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada tahun 2023 mencapai angka 65,28%. Indikator persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar terdapat peningkatan capaian dibandingkan tahun 2022 yang awalnya 64,30% menjadi 65,28% pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan terdapat kenaikan jumlah DT PPFM sebesar 24,51% dibandingkan tahun 2021. Hal tersebut merupakan dampak dari pandemi Covid yang mempengaruhi berbagai sektor , salah satunya adalah sektor tenaga kerja. Dimana beberapa pabrik di kabupaten Temanggung menjadi gulung tikar. Selain kedua hal tersebut, capaian Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di luar panti sosial mengalami penurunan pada tahun 2022 yang sebesar 8,82% (di data pokok menjelaskan tw 4 akan tercapai)

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK tinggi merupakan salah satu indikasi tingginya kesempatan kerja yang tersedia sehingga orang terserap dalam lapangan kerja yang ada atau sedang mencari kerja atau bahkan mempersiapkan usaha.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.24

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

Sepanjang 5 tahun terakhir, kondisi ketenagakerjaan penduduk Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 ke 2020 TPAK Kabupaten Temanggung mengalami penurunan, hal ini tersebut dikarenakan adanya pandemi covid. Akan tetapi setelah 2021 TPAK Kabupaten Temanggung semakin meningkat hingga tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,79%. Faktor yang mempengaruhi TPAK dari berkurang dan bertambahnya angkatan kerja, diantaranya yang beralih ke ibu rumah tangga, mendapat tambahan jumlah penduduk usia kerja dari mahasiswa, dimana ibu rumah tangga dan mahasiswa merupakan usia kerja tetapi bukan angkatan kerja. Faktor pendorong dalam capaian indikator TPAK yaitu adanya keinginan masyarakat untuk bekerja di usia kerja. Sedangkan untuk faktor penghambat tidak tercapainya TPAK yaitu menurunnya permintaan akan produk kayu olahan yang berdampak pada berkurangnya jumlah pekerja di sektor ini, dimana industri pengolahan kayu menjadi salah satu sektor industri yang penting di Kabupaten Temanggung. Upaya pencapaian target kinerja tahun 2023 adalah meningkatkan wirausaha baru dengan meningkatkan kompetensi SDM.

2) Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

Indikator ini digunakan untuk mengukur peran pemerintah dalam memberikan pelatihan kerja terhadap animo masyarakat yang menginginkan pelatihan kerja, Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar

berikut:

Tabel 2.72
Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	240	320	112	80	464
2	Jumlah pendaftar pelatihan	352	545	322	112	641
3	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	68,18	58,72	34,78	71,43	72,39

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2024

Pelatihan keterampilan berbasis kompetensi pada tahun 2023 telah tercapai sebesar 100% dengan jumlah siswa yang dilatih sebanyak 464 orang. Faktor pendorong persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi adalah meningkatnya jumlah pencari kerja di sektor non formal.

3) Persentase peserta pelatihan keterampilan yang menjadi wirausaha baru/telah bekerja

Pelatihan keterampilan berbasis kompetensi di titik beratkan pada penguasaan kemampuan kerja, Kemampuan kerja tersebut mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai standar yang ditetapkan di tempat kerja, Kemudian diharapkan lulusan peserta pelatihan dapat membuka usaha sendiri ataupun bekerja.

Tabel 2.73
Persentase Peserta Pelatihan Menjadi Wirausaha Baru Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah peserta pelatihan keterampilan	240	320	112	80	140
2	Jumlah peserta pelatihan keterampilan yang menjadi wirausaha baru/telah bekerja	93	61	59	35	90
3	Persentase	38,75	19,06	52,68	43,75	64,29

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2024

Persentase peserta pelatihan keterampilan yang menjadi wirausaha baru/telah bekerja pada tahun 2023 mencapai angka sebesar 64,29%, naik sebesar 20,54% dari tahun 2022 dengan capaian sebesar 43,75%. Pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi di Kabupaten Temanggung di di anggarakan dengan DBHCHT namun hanya ada 2 (jenis) pelatihan yaitu pelatihan digital marketing dan kuliner kreatif yang diikuti oleh 140 orang dan 90 orang diantaranya telah menjadi wirausaha baru.

4) Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan

Pencari kerja yang terdaftar difasilitasi penempatan dengan sistem AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah/Provinsi), Serta AKAN (Antar Kerja Antar Negara). Persentase pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 terlihat fluktuatif, hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan permintaan tenaga kerja yang ada dengan ketrampilan dan latar belakang pendidikan pencari kerja yang mendaftar.

Tabel 2.74
Daftar Pencari Kerja yang ditempatkan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	2,357	602	1,749	773	679
2	Pencari Kerja terdaftar	3,406	1,088	2,242	1442	800
3	Persentase	69,2	55,33	78,01	53,61	84,88

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan cenderung fluktuatif karena besar kecilnya persentase tergantung pada banyaknya pendaftar dan seberapa banyak dapat menempatkan. Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan cenderung fluktuatif karena ar kecilnya persentase tergantung pada banyaknya pendaftar dan seberapa banyak dapat menempatkan. Pada tahun 2023 persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan sebesar 84,88% atau mengalami kenaikan sebesar 31,27%. Faktor pendorong dalam pencapaian target ini adalah adanya penguatan jejaring dengan HRD Perusahaan retail untuk bersedia rekrutmen di Temanggung.

5) Persentase Tenaga Kerja formal

Tenaga kerja formal ialah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan sebagai tenaga kerja terlatih (*skilled worker*). Mereka memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat, kontrak kerja yang resmi, dan berada didalam organisasi yang berbadan hukum.

Tabel 2.75
Persentase Tenaga Kerja Formal Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah tenaga kerja formal	139.942	139.942	83.003	129.788	116.970
2	Jumlah tenaga kerja total	441.632	441.632	343.400	443.009	471.459
3	Persentase	31,69	31,69	24,17	29,30	24,81

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2024

Pada tahun 2022 jumlah tenaga formal mengalami kenaikan dari 83.003 menjadi 129.788. Selain itu jumlah tenaga kerja total juga mengalami kenaikan dari 343.400 menjadi 443.009, sehingga mengakibatkan presentase tenaga kerja formal mengalami kenaikan menjadi 29,30%. Untuk tahun 2023 persentase mengalami penurunan menjadi 24,81% karena terjadi penurunan pada jumlah tenaga kerja formal sebanyak 12.818 namun tenaga kerja total meningkat sebanyak 28.450. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja formal adalah memberikan pelatihan peningkatan kompetensi SDM sesuai dengan kebutuhan kerja formal.

6) Persentase Perusahaan yang Telah Membayarkan Upah Sesuai UMK

Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah Upah Minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota, UMK Kabupaten Temanggung tahun 2023 adalah sebesar Rp2.027.569,32,-. Diharapkan semua perusahaan informal di Kabupaten Temanggung semuanya telah membayar tenaga kerjanya dengan upah yang besarnya memenuhi UMK Tahun 2023.

Tabel 2.76
Perusahaan yang Melaksanakan UMK di Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Perusahaan	397	397	119	119	114
2	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan UMK	71	84	82	91	93
3	Persentase	17,88	21,16	68,91	76,47	81,58

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang membayar upah sesuai UMK meningkat sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Sejak tahun 2019, Dinperinaker berupaya keras untuk mendapatkan data dengan mengadakan kunjungan langsung ke perusahaan yang ada di Kabupaten Temanggung. Pada tahun 2021 terdapat penurunan jumlah perusahaan. Jumlah perusahaan yang dimaksud merupakan perusahaan terkecuali mikro dan kecil sehingga dihasilkan data sebanyak 119. Dari 119 perusahaan sejumlah 91 perusahaan telah membayar upah sesuai UMK. Perhitungan tersebut menerapkan PP No.36 Tahun 2021 pasal 36 ayat 1 disebutkan bahwa : Ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 sampai dengan pasal 35, dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil. Pada tahun 2023 perusahaan yang membayar upah sesuai UMK meningkat menjadi 93 perusahaan namun jumlah perusahaan

di Kabupaten Temanggung menjadi 114 perusahaan dikarenakan adanya Perusahaan yang telah berhenti beroperasi sehingga presentase perusahaan yang membayar upah sesuai UMK sebesar 81,58%.

7) Persentase Perusahaan Yang Memenuhi Sarana Hubungan Industrial

Sarana hubungan industrial yang dihitung adalah (a) Perjanjian kerja bersama/perjanjian kerja yang berpedoman pada peraturan perusahaan bagi perusahaan yang belum memiliki serikat pekerja; (b) Serikat Pekerja; (c) LKS Bipartit; dan (d) Kepesertaan BPJS. Persentase pemenuhan sarana hubungan industrial dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Tabel 2.77
Perusahaan yang Memenuhi Sarana Hubungan Industrial di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Perusahaan	397	397	119	119	114
2	Jumlah Perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial	15	15	18	66	81
3	Persentase	3,78	3,78	15,13	55,46	71,05

Sumber: *Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2024*

Mulai Tahun 2019 data didapat dengan kunjungan langsung ke perusahaan-perusahaan sekabupaten Temanggung dan baru terdata 98 perusahaan, kemudian pada Tahun 2020 ada penambahan data menjadi 110 perusahaan, dan di Tahun 2021 dan Tahun 2022 terdata 340 perusahaan, akan tetapi yang dihitung hanya 53 perusahaan besar yang memiliki pekerja 50 orang ke atas, dan 66 perusahaan diantaranya memenuhi sarana HI. Pada Tahun 2023 jumlah perusahaan yang memenuhi sarana Hubungan Industrial sebanyak 81 perusahaan, dan persentase sebesar 71,05%. Hal ini telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 15,59%.

8) Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama

Perselisihan hubungan industrial yang dimediasi adalah perselisihan hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja atau serikat pekerja. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan secara berjenjang.

Namun demikian Disnaker Kabupaten Temanggung hanya dapat melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai pada tahap mediasi dengan Perjanjian Bersama, Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama Tahun 2019-2023 fluktuatif mengikuti jumlah perselisihan yang terjadi,

Tabel 2.78
Jumlah Perselisihan yang terselesaikan dengan PB Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kasus yang dicatatkan	3	14	17	14	20
2	Jumlah kasus yang terselesaikan dengan PB	2	13	14	15	20
3	Persentase	66,67	92,86	82,35	93,33	100,00

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2020 tingkat penyelesaiannya naik. Kemudian pada Tahun 2021 ada 17 kasus yang masuk dengan 14 kasus berhasil diselesaikan dengan PB. Untuk Tahun 2022 ada 15 kasus yang masuk dengan 14 kasus yang telah diselesaikan. Namun pada tahun 2023 terdapat 20 (dua puluh) kasus perselisihan yang tercatat dan seluruh kasus telah berhasil diselesaikan dengan PB. Dengan demikian presentase perselisihan industrial diluar pengadilan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama pada Tahun 2023 sebesar 100%.

9) Persentase Peserta Pelatihan yang Menjadi Wirausaha Berkembang

Peningkatan produktivitas kewirausahaan dilakukan dengan kegiatan pelatihan skill personal, sehingga diharapkan dapat meningkatkan dari wirausaha rintisan menjadi berkembang.

Tabel 2.79
Presentase Peserta Pelatihan Produktivitas Kewirausahaan yang Meningkatkan Produktivitasnya di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

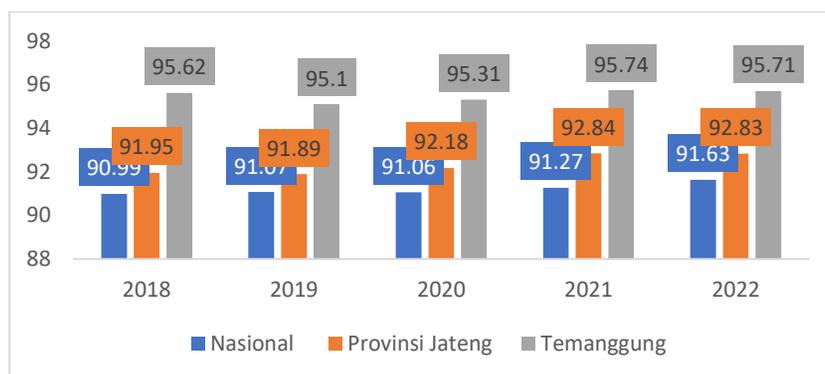
No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan yang meningkat produktivitasnya (kuantitas dan kualitas)	5	5	27	25	95
2	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	25	25	50	48	140
3	Persentase	20,00	20,00	54,00	52,08	67,86

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2024

Pelatihan produktivitas bagi wirausaha baru pada Tahun 2021 berjumlah 50 orang, dari jumlah tersebut 27 orang peserta diantaranya telah meningkat produktivitasnya. Tahun 2022 berjumlah 48 orang, 25 orang telah meningkat produktivitasnya. Tahun 2023 persentase peserta pelatihan produktivitas kewirausahaan mengalami peningkatan menjadi 67,86% dengan diikuti oleh 140 peserta pelatihan dan 95 peserta diantaranya yang meningkat produktivitasnya.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1) Indeks Pembangunan Gender (IPG)



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 2.26

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

Tabel 2.80

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indek Pembangunan Gender (IPG)	95,10	95,31	95,74	95,71	95,99

Sumber: DPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 202

Berdasarkan data dari Kementrian PP dan PA tahun 2023 capaian IPG Kabupaten Temanggung sebesar 95,99 atau terdapat peningkatan capaian sebesar 0,28 dibandingkan dengan tahun 2022.

2) Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi dalam beberapa bentuk, dan penanganan pun menyesuaikan kebutuhan pemulihan dari bentuk kekerasan yang mereka alami.

Tabel 2.81

Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Perempuan dan Anak korban kekerasan	48	42	11	22	13
2	Jumlah perempuan dan Anak	551,996	509,853	506,308	516,213	514,578
3	Persentase	0,0094	0,008	0,002	0,0043	0,0025

Sumber: DPPAPPKB Kabupaten Temanggung, Polres Temanggung, 2024

Pada tahun 2023 ada 13 kasus yang melapor atau 0,0025 dari jumlah perempuan dan anak sebanyak 514.578. Capaian tersebut jika dibandingkan dengan target tahun 2023 tercapai 100% dari target 0,004.

Adapun kasus tersebut diantaranya adalah kasus KDRT sebanyak 3 kasus, perbuatan tidak menyenangkan terdapat 3 kasus, pemerkosaan terdapat 2 kasus, penelantaran terdapat 1 kasus, pelecehan seksual terdapat 3 kasus, dan kekerasan fisik terdapat 2 kasus.

3) Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Pemerintah

Salah satu ukuran kontribusi perempuan dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan keluarga adalah partisipasi angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan dapat dilihat dari jumlah semua angkatan kerja perempuan baik di sektor swasta maupun sektor pemerintah. Partisipasi angkatan kerja perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2023 sebanyak 2,42%.

Tabel 2.82
Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah perempuan di lembaga pemerintah	3.711	3.536	3.349	5.026	5.313
2	Jumlah angkatan kerja perempuan	196.675	174.643	187.543	185.816	219.154
3	Persentase (%)	1,89	2,02	1,79	2,70	2,42

Sumber : DPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel di atas keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Temanggung mengalami penurunan pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu dari 2,70% di tahun 2022 menjadi 2,42% di tahun 2023. Hal ini disebabkan karena terdapat pegawai perempuan di lingkungan Pemkab Temanggung yang purna tugas.

4) Rasio Perangkat Daerah yang Menerapkan Kebijakan Responsif Gender dalam Penyusunan Renja SKPD

Dengan mengintegrasikan Aspirasi Kebutuhan permasalahan laki-laki dan perempuan ke dalam perencanaan PUG, didasarkan kepada hasil analisis gender yang menggunakan data terpilah/statistik gender. Untuk menyusun Anggaran Responsif Gender (ARG) digunakan Analisa Gender yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan pembangunan.

Tabel 2.83
Rasio PD yang Menerapkan Kebijakan Responsif Gender dalam Penyusunan Renja SKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PD yang menerapkan ARG	20	21	38	46	46
2	Jumlah PD	46	46	46	46	46
3	Persentase (%)	43,48	45,65	82,61	100,00	100,00

Sumber: DPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2024

Capaian pada tahun 2022 dan 2023 terkait dengan rasio PD yang menerapkan kebijakan responsive gender telah mencapai 100%. Faktor pendorongnya adalah adanya bimbingan teknis yang mendorong OPD untuk menyusun ARG.

5) Prevalensi Kasus Kekerasan terhadap Anak Perempuan

Tabel 2.84
Prevalensi Kasus Kekerasan terhadap Anak Perempuan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kekerasan terhadap anak perempuan yang melapor dan ditangani	16	24	5	3	5
2	Jumlah anak perempuan	111.545	113.700	114.319	107.733	105.447
3	Persentase	0,014	0,021	0,0044	0,003	0,005

Sumber: DPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2024

Adapun kasus yang menimpa perempuan dan anak perempuan di kabupaten Temanggung pada tahun 2023 sebesar 5 kasus. Kekerasan terhadap anak perempuan terus menurun dari tahun 2019-2022, sedangkan di tahun 2023 mengalami peningkatan kasus.

6) Persentase Desa Sayang Ibu dan Bayi

Salah satu upaya Pemerintah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan adalah dengan Gerakan Sayang Ibu (GSI). Gerakan Sayang Ibu (GSI) merupakan gerakan percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi yang dilaksanakan bersama-sama. Yakni, antara pemerintah dan masyarakat untuk lebih meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian terhadap kesehatan ibu dan bayi.

Tabel 2.85
Persentase Desa Sayang Ibu dan Bayi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah desa sayang ibu dan bayi	82	82	91	115	289
2	Jumlah desa	266	266	289	289	289
3	Persentase	30,83	30,83	31,49	39,79	100,00

Sumber: DPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel di atas, jumlah desa yang sudah mempunyai satgas GSI, dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2023 jumlah GSIB di Temanggung sebanyak 289 desa/kelurahan atau tercapai 100% dari jumlah desa/kelurahan sebanyak di Kabupaten Temanggung. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menurunkan AKB dan AKI, diantaranya adalah dengan integrasi kegiatan yang ada ditingkat desa, yaitu desa Siaga dan memaksimalkan FKD/Forum.

7) Persentase Terbentuknya Kecamatan Layak Anak

Tabel 2.86
Kecamatan Layak Anak Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kecamatan layak Anak	8	12	16	16	16
2	Jumlah Kecamatan	20	20	20	20	20
3	Persentase	40	60	80	80	80

Sumber: DPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2024

Persentase kecamatan dan kelurahan layak anak semakin meningkat dan sudah mencapai 80%. Hingga tahun 2023 hanya 4 kecamatan yang belum berpredikat kecamatan layak anak yaitu Kecamatan Tretep, Wonobojo, Kledung, Bejen. Kegiatan Kecamatan dan kelurahan/desa layak Anak sifatnya adalah pembinaan dan pengembangan dalam kegiatan kecamatan, desa/kelurahan layak anak, bersama lintas sektoral. Pembentukan rintisan kelurahan layak anak tersebut didasarkan pada pemilikan sarana prasarana baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan indikator desa/kelurahan layak anak. Dengan adanya indikator tersebut akan kita temukan beberapa hambatan dan masalah yang pada dasarnya merupakan temuan yang harus di selesaikan.

8) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Salah satu ukuran kontribusi perempuan dalam perekonomian adalah partisipasi angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah besarnya jumlah perempuan yang bekerja pada angkatan kerja.

Tabel 2.87
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah angkatan kerja perempuan	196,675	174,643	174,643	190,121	202.533
2	Jumlah perempuan dalam usia kerja	296,141	307,055	307,055	304,068	253.372
Persentase		66,41	56,87	56,87	62,52	79,93

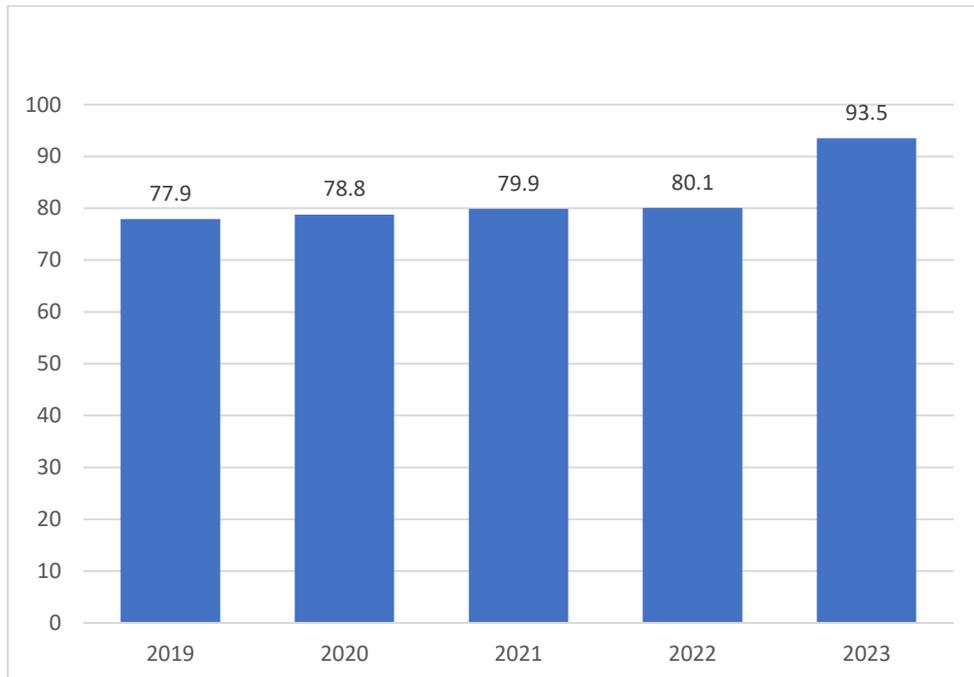
Sumber: DPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2024

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Temanggung mengalami kondisi yang fluktuatif. Berdasarkan angka capaian indikator program pada tahun 2021 dan 2022 capaiannya sama. Namun pada tahun 2023 capaian partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan capaian yaitu menjadi 79,93%.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

1) Skor Pola Pangan Harapan

Realisasi Skor PPH di Kabupaten Temanggung dari tahun 2019 s.d 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 2.27
Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Berdasarkan diagram batang di atas, skor pola pangan harapan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2018-2023 cenderung meningkat. Skor pola pangan harapan Kabupaten Temanggung menunjukkan ketersediaan pangan untuk konsumsi di Kabupaten Temanggung cukup memadai untuk pemenuhan konsumsi dan penyediaan pangan di wilayah Kabupaten Temanggung. Pada tahun 2018 skor PPH menurun dari tahun 2017 karena perubahan metode penghitungan. Tahun 2018-2023 mengalami peningkatan dari 72,8 menjadi 93,5. Capaian Tahun 2023 naik menjadi 93,5 atau sudah tercapai 100% dari target 78,3. Peningkatan ketersediaan pangan untuk menutupi defisit konsumsi pada dasarnya dapat dilakukan melalui peningkatan produksi dalam negeri (intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi maupun rehabilitasi) dan impor. Pengembangan komoditas sayuran dan buah hendaknya diarahkan pada pola jenis buah dan sayuran yang berbasis sumberdaya lokal seperti pisang, jeruk, pepaya serta sayuran hijau dan kacang-kacangan serta kelompok sayuran yang relatif tidak tergantung musim, mudah dibudidayakan dan daya terima masyarakat cukup tinggi terhadap komoditas tersebut. Berikut ini gambaran Bidang Pangan di Kabupaten Temanggung:

Tabel 2.88
Gambaran Ketahanan Pangan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio ketersediaan pangan	%	na	na	147,06	122,54	133,42
2	Persentase desa pelaksana program ketahanan pangan	%	na	17,3	28,03	32,53	27,68
3	Rasio lumbung pangan masyarakat	%	na	17,3	56,0	58	58
4	Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	na	na	100	100	100

Sumber: DKPPP Temanggung, 2024

Rasio ketersediaan pangan dipengaruhi oleh produksi bersih beras serta jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sampai 2023 rasio ketersediaan pangan telah tercapai 100%. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang keamanan pangan adalah tingkat keamanan pangan yang beredar di masyarakat. Oleh karena itu secara rutin dilakukan pemeriksaan sampel bahan pangan segar asal tumbuhan dan semua sampel yang diujikan selama tahun 2018 sampai dengan 2023 aman.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga stabilisasi harga dan untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap kebutuhan pangan strategis adalah dengan adanya Gerakan Pangan Murah.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Capaian Indikator Kinerja Daerah bidang Pertanian hingga tahun 2023 dapat diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.89
Gambaran Urusan Pertanian di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanian	%	100	100	100	100	100

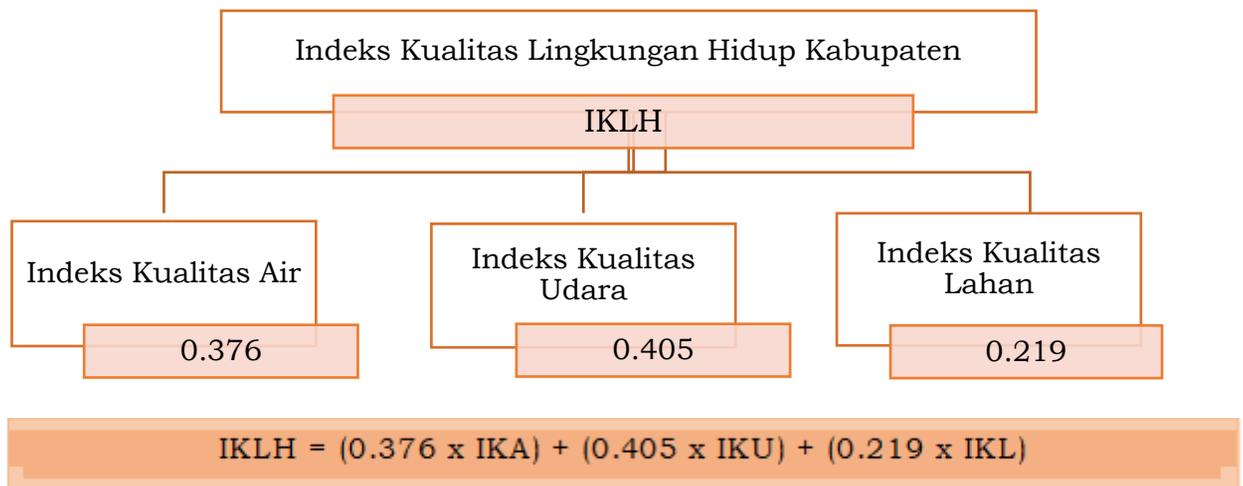
Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 capaian indikator program persentase penyelesaian fasilitasi pertanian dapat terealisasi 100%, tahun 2023 sebanyak 18 (delapan belas) permasalahan pertanian telah terfasilitasi 100%. Faktor pendorong capaian indikator ini adanya koordinasi yang baik antar instansi Perangkat Daerah untuk menghindari konflik sosial pertanian dengan memfasilitasi penyelesaian pertanian.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup terukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dengan komponennya Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Tutupan Lahan. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan ditingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perhitungan IKLH telah mengalami beberapa kali penyesuaian, perbedaan terletak pada cara perhitungan dan parameter yang digunakan. Cara perhitungan IKLH mulai akhir tahun 2020 menggunakan rumus sebagai berikut:



Tabel 2.90

Klasifikasi Dan Rentang Nilai IKLH

Klasifikasi	Rentang Nilai
Sangat Baik	90 - 100
Baik	70 - 89,9
Sedang	50 - 69,9
Buruk	25 - 49,9
Sangat Buruk	0 - 24,9

Sumber: Metode Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2020-2024 KLHK

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.91

Capaian IKLH Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Capaian Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
	IKLH	69,65	65,61	69,51	69,86	74,83
1	IKU	81,96	83,65	80,89	83,82	85,10
2	IKA	51,11	41,11	54,45	52,22	64,07

No	Uraian	Capaian Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
3	IKL	74,33	74,33	74,33	74,33	74,33
	Perhitungan rumus lama	Perhitungan rumus baru				
	$IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$	$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$				

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2024

Tabel 2.92
IKLH Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Tahun	Penduduk	Luas Wilayah (Km ²)	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Air	Indeks Tutupan Hutan	IKLH
1	2019	789,508	870,65	81,96	51,11	74,33	69,65
2	2020	794,055	870,65	83,65	41,11	74,33	65,61
3	2021	762,980	870,65	80,89	54,45	74,33	69,51
4	2022	801,267	870,65	83,82	52,22	74,33	69,86
5	2023	799.764	870,65	85,10	64,07	74,33	74,83

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Temanggung tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Terdapat beberapa nilai IKLH tahun 2023 apabila di dibandingkan dengan dengan tahun-tahun sebelumnya merupakan capaian tertinggi. Hal ini dipengaruhi karena adanya peningkatan kualitas air maupun udara di Kabupaten Temanggung, akan tetapi masih terdapat kendala atau hambatan diantaranya hasil uji kualitas air tidak bisa langsung diketahui, melalui Pengujian di Laboratorium terlebih dahulu hingga keluar sertifikat hasil uji.

Sedangkan capaian IKLH tahun 2023 berdasarkan Surat Setditjen PPKL Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 terdapat konversi dalam perhitungan IKLH. Sehingga terdapat perbedaan capaian terkait dengan IKLH dan komponen penyusunnya. Untuk nilai IKU berdasarkan hasil konversi yaitu sebesar 84,60, nilai IKA sebesar 73,77, nilai IKL sebesar 58,89, dan untuk capaian IKLH hasil konversi adalah sebesar 75,12.

Berikut ini adalah gambaran bidang lingkungan hidup Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Tabel 2.93
Gambaran Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	61,4	31,36	100	100	100
2	Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	%	na	na	0	100	100
3	Indeks Kualitas Air	Angka	51,1	41,11	54,5	52,22	64,07
4	Indeks Kualitas Udara	Angka	81,96	83,65	80,9	83,82	85,10
5	Indeks Kualitas Tutupan	%	74,3	74,33	74,3	74,3	74,33

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
	Lahan						
6	Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung	%	0,17	0,17	0,1	1,75	2,46
7	Cakupan RTH Publik	%	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
8	Persentase usaha yang memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3	%	na	na	0	100	100
9	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	%	41,6	14,71	100	100	100
10	Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	26,47	26,48	27,3	27,87	27,87
11	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	-	-	82,4	84,62	178
12	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
13	Persentase sampah yang tertangani	%	31,96	24,23	32,00	59,06	61,30
14	Cakupan layanan persampahan	%	47,06	45,33	53,63	61,25	68,51

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2024

Pada Tahun 2021 Kabupaten Temanggung telah menyusun Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2051 sejumlah 1 (satu) dokumen. Dokumen RPPLH merupakan upaya perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kurun waktu mulai tahun 2022 s.d tahun 2052 di Kabupaten Temanggung. Faktor penghambatnya adalah dokumen RPPLH belum di Perda-kan sedangkan tindaklanjutnya adanya fasilitasi penyusunan Naskah Akademis RPPLH oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung pada tahun 2023.

Adapun dukungan dan kontribusi Kabupaten Temanggung dalam upaya pencapaian Pembangunan Rendah Karbon. Nilai kumulatif potensi penurunan emisi berdasarkan data yang dilaporkan pada platform AKSARA dari periode 2010-2023 menunjukkan terdapat 4 total kegiatan aksi PRK perubahan iklim yang telah dilaksanakan dengan total potensi penurunan emisi kumulatif sebesar 103.314,79 Ton CO₂EQ. Total pencapaian penurunan emisi dan intensitas emisi Kabupaten Temanggung 2010-2023 sebagai berikut.



Gambar 2.27
Total Pencapaian Penurunan Emisi dan Intensitas Emis Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2023

Proporsi penurunan emisi bersih berdasarkan pelaporan Rencana Aksi Daerah dari semua sektor Pembangunan utama dibagi menjadi sektor energi, transportasi, hutan dan lahan, pertanian, pesisir laut, industry dan persampahan. Pada periode 2021 dan 2021 sektor yang memberikan kontribusi penurunan emisi di Kabupaten Temanggung didominasi oleh sektor pertanian.

Capaian persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup pada tahun 2023 sudah mencapai target, dari 1 usaha/kegiatan yang mengajukan persetujuan lingkungan sudah dapat dilakukan penilaian dan diterbitkan persetujuan, sehingga tercapai sebesar 100%.

Tabel 2.94
Target Jakstrada dan Capaian Pengelolaan Sampah Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pengelolaan Sampah (%)					
	a. Target	100	97	98	99	99
	b. Realisasi		24,32	32	59,06	61,30
2.	Pengurangan Sampah (%)					
	a. Target	20	22	24	26	27
		35,342,81	39,199,77	43,114,05	37,973,09	49.287,35
	b. Realisasi		0,09	10,03	27,73	30,06
			164,00	18,256,30	40,499,26	44.305,18
3.	Penanganan Sampah (%)					
	a. Target	80	75	7	73	72
		141,371,25	133,635,59	132,934,98	106,616,77	131.432,94
	b. Realisasi	31,96	24,23	21,97	31,33	31,24%
		154,74	44,003,97	40,112,11	45,764,61	46.030,71

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2024

Mengacu Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Sratategi Kabupaten Temanggung dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Jakstrada Penanganan Pengelolaan Sampah) yang menargetkan pengelolaan sampah tahun 2023 sebesar 99% dari seluruh timbulan sampah yang terdiri dari persentase pengurangan dan penanganan, maka pada Triwulan IV tahun 2023 pengelolaan sampah baru mencapai 61,30%. Pengurangan sampah sebesar 44.305,18 ton atau 30,06% dari total timbulan sampah. Apabila dibandingkan dengan target Jakstrada, pengurangan sampah telah melebihi target yaitu 111,33%. Proporsi penurunan emisi bersih berdasarkan pelaporan Rencana Aksi Daerah dari semua sektor Pembangunan utama dibagi menjadi sektor energi, transportasi, hutan dan lahan, pertanian, pesisir laut, industry dan persampahan. Pada periode 2021 dan 2021 sektor yang memberikan kontribusi penurunan emisi di Kabupaten Temanggung didominasi oleh sektor pertanian.

Kondisi Cakupan Pelayanan Persampahan tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi peningkatan sebanyak 21 (dua puluh satu) desa. Jumlah desa dan kelurahan terlayani oleh Pemerintah Daerah sebanyak 142 desa/kelurahan atau bertambah satu desa jika dibandingkan dengan tahun 2022. Sedangkan untuk desa/kelurahan yang terlayani oleh swasta/mandiri sebanyak 56 desa/kelurahan atauterdapat peningkatan sebanyak 20 desa/kelurahan, sehingga total sebanyak 198 desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung yang mendapat pelayanan persampahan atau sebesar 68,51% dari total jumlah desa/kelurahan. Faktor pendorong cakupan pelayanan persampahan adalah adanya sinergi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dengan pihak swasta dan Pemerintah Desa/kelurahan dalam pelayanan persampahan.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Dokumen kependudukan yang ditingkatkan kualitas pelayanannya yaitu:

- a. Kartu Keluarga (KK);
- b. KTP-el;
- c. Akta Kelahiran;
- d. Akta perkawinan;

- e. Akta Kematian;
- f. Surat keterangan Pindah.

Dengan dasar diatas maka untuk penilaian indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan 6 pelayanan di atas sebagai sampel pelayanan Kependudukan dan pencatatan Sipil.

Tabel 2.95
Kategorisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
25,00 - 64,99	D	tidak baik
65,00 - 76,60	C	kurang baik
76,61 - 88,30	B	Baik
88,31 - 100,00	A	sangat baik

Sumber : PermenPAN & RB No, 14 Tahun 2017

Tabel 2.96
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2022 dan 2023

No	Jenis Pelayanan	Nilai IKM	
		2022	2023
1	Kartu Keluarga (KK)	85,28	85,97
2	KTP-el	83,60	85,29
3	Akta Kelahiran	85,14	86,14
4	Akta Perkawinan	83,33	85,59
5	Akta Kematian	85,13	86,60
6	Surat Keterangan Pindah	86,58	86,98
	rata-rata nilai IKM	84,84	86,095

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung, 2024

Dari data di atas nilai IKM terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2023 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2022. Kenaikan nilai IKM diantaranya pada pelayanan akta kartu keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta kematian.

1) Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga

Berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bahwa Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota. Persentase kepemilikan Kartu Keluarga disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.97
Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1,	Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	257,391	257,772	266,270	269,212	272.755
2	Jumlah KK	263,885	262,643	270,220	269,219	272.937

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) (%)	97,54	98,15	98,53	99,99	99,93

Sumber : Dindukcapil Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kepemilikan kartu keluarga dari tahun 2019 s/d 2023 terus meningkat. Jumlah kepemilikan KK s/d tahun 2023 adalah 272.755 dari jumlah Jumlah KK 272.937 jadi pada tahun 2023 terdapat 182 kartu keluarga yang belum dicetak.

2) Persentase Kepemilikan KTP Elektronik

Wajib Kartu Identitas Anak (KIA) adalah anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah, Persentase Kepemilikan KIA bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.98
Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penduduk usia > 17tahun yang ber-KTP (jiwa)	589.079	499.679	597.354	600.882	614.258
2	Jumlah penduduk usia > 17 tahun atau telah menikah (jiwa)	591.955	594.852	599.276	605.188	615.343
	Persentase (%)	99,51	84	99,68	99,29	99,82

Sumber : Dindukcapil Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP dari tahun 2019-2023 naik sementara pada tahun 2020 menurun dikarenakan adanya covid-19 sehingga untuk pelayanan perekaman KTP-el sempat berhenti. Pada tahun 2021 pelayanan sudah berangsur kembali normal sehingga presentase kepemilikan KTP-el pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terus naik. Jumlah wajib KTP-el yang belum mempunyai KTP-el terbanyak berada di Kecamatan Kedu yaitu 111 jiwa.

3) Persentase kepemilikan KIA

Wajib Kartu Identitas Anak (KIA) adalah anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah, Persentase Kepemilikan KIA bisa dilihat pada table berikut ini.

Tabel 2.99
Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1,	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	117,231	132,497	179,382	100,409	165.059
2	Jumlah wajib KIA	221,911	232,772	252,351	201,731	196.309
	Persentase Kepemilikan KIA	52,83	56,92	65,02	49,77	84.08

Sumber : Dindikcapil Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel di atas dapat diperoleh gambaran bahwa kepemilikan KIA dari tahun 2019 s/d 2023 naik. Capaian KIA sdi tahun 2023 sebesar 84,21 %. untuk meningkatkan kepemilikan KIA Dinas terus mengembangkan Inovasi pelayanan yang sudah ada diantaranya melalui Jemput Bola Pelayanan KIA ke Koordinator Wilayah Dindikpora dan PPAI kabupaten Temanggung, inovasi pelayanan BUNDAKU (ibu melahirkan dapat akta kelahiran, kartu identitas anak (KIA) dan Kartu Keluarga (KK) baru. Di Kabupaten Temanggung jumlah anak yang belum memiliki KIA sebanyak 31.250 anak atau sebanyak 15,92%.

4) Persentase Pelayanan Surat Pindah dan Datang Tepat Waktu

Surat Keterangan Penduduk Pindah dan Datang adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana Dindikcapil untuk Warga Negara Indonesia yang melaporkan kedatangannya guna masuk menjadi penduduk di Kabupaten Temanggung dan pindah ke luar Kabupaten/Provinsi, Batasan waktu pelayanan surat pindah datang tepat waktu yaitu 7 hari :

Tabel 2.100
Persentase Pelayanan Surat Pindah dan Datang Tepat Waktu di Kabupaten
Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penerbitan pindah datang tepat waktu	9,176	13,494	18,722	15,325	16.604
2	Jumlah pemohon surat pindah dan datang	9,176	13,494	18,722	15,325	16.604
	Persentase Pelayanan surat pindah dan datang tepat waktu	100	100	100	100	100

Sumber: Dindikcapil Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa presentase pelayanan surat pindah dan datang tepat waktu tercapai 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pemohon surat pindah dan datang sudah terlayani secara tepat Waktu yaitu satu hari jadi sesuai Keputusan Bupati Temanggung Nomor 060/85 Tahun 2022 tentang Standar pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

5) Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Tabel 2.101
Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kepemilikan Akta Kelahiran	530.737	551.910	556.084	590.887	632.245
2	Jumlah penduduk	791.264	795.556	800.429	801.267	811.615
	Persentase Kepemilikan Akta kelahiran	67,07	69,37	70,02	73,74	77,90

Sumber : Kepemilikan dokumen tahun 2023 PDAK-Kementerian Dalam Negeri, 2024

Dari tabel dapat dilihat bahwa angka kepemilikan akta kelahiran naik dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan tertib administrasi kependudukan khususnya dalam pembuatan akta kelahiran serta perubahan regulasi pemerintah pusat yang mempermudah beberapa syarat pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Kepemilikan akta kelahiran terus meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah jiwa pada tahun 2023 yang belum memiliki akta kelahiran adalah sebanyak 179.370 jiwa.

6) Persentase Penerbitan Akta Kematian

Tabel 2.102
Persentase Penerbitan Akta Kematian Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penerbitan akta kematian	8.666	5.023	8.194	5.676	7.955
2	Jumlah pemohon akta kematian	8.666	5.023	8.194	5.676	7.955
	Persentase penerbitan akta kematian	100	100	100	100	100

Sumber : PDAK – Kementerian Dalam Negeri RI Tahun, 2024

Pada tahun 2021 penerbitan Akta Kematian meningkat karena adanya semua kasus kematian yang disebabkan oleh covid-19 di catatkan kematiannya di Dindukcapil. Sedangkan untuk tahun 2022 jumlah pendaftar akta kematian lebih turun. Data pendaftar akta kematian tahun 2023 sampai dengan triwulan IV adalah 7.955 kematian.

7) Cakupan Pelayanan Akta Perkawinan Tepat Waktu

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya mencatatkan perkawinan bagi penduduk yang beragama Katholik, Kristen, Hindu, Budha, Konghuchu dan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara untuk pencatatan perkawinan penduduk yang beragama Islam dilaksanakan di Kantor Urusan Agama. Batasan waktu Pelayanan Akta Perkawinan Tepat Waktu adalah 3 hari. Semua permohonan pencatatan perkawinan telah diterbitkan akta perkawinannya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.103
Persentase Pelayanan Akta Perkawinan Non Muslim Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kutipan akta perkawinan yang diterbitkan	133	151	200	137	126
2	Jumlah permohonan pencatatan perkawinan	133	151	200	137	126
	Cakupan pelayanan akta perkawinan non muslim	100	100	100	100	100

Sumber: Dindikcapil Kabupaten Temanggung, 2024

8) Cakupan Pelayanan Akta Perceraian Tepat Waktu

Akta Perceraian diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri. Batasan waktu Pelayanan Akta Perceraian Tepat Waktu adalah 4 hari. Perceraian yang dicatat hanya bagi penduduk yang beragama Katholik, Kristen, Hindu, Budha, Konghuchu dan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara untuk pencatatan perceraian penduduk yang beragama Islam dilaksanakan di Pengadilan Agama. Hingga saat ini tidak ada permohonan pencatatan perceraian yang didaftarkan yang tidak diterbitkan akta perceraiannya sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.104
Cakupan Pelayanan Akta Perceraian Non Muslim Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1,	Jumlah kutipan akta perceraian yang diterbitkan	27	32	40	42	24	28
2	Jumlah permohonan pencatatan perceraian	27	32	40	42	24	28
	Presentase pelayanan akta perceraiannon muslim	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dindikcapil Kabupaten Temanggung, 2024

9) Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, instansi pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan, Berdasarkan pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan yang berhak menerima hak akses data kependudukan yaitu lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan badan, Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.105
Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1,	Jumlah perangkat daerah yang telah melaksanakan PKS pemanfaatan data	21	21	26	26	26
2	Jumlah per angkat daerah pengguna data kependudukan	21	21	31	30	30
	Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	100	100	83,87	86,67	86,67

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 terdapat 26 OPD dan BHI yang telah melaksanakan perjanjian kerjasama pemanfaatan data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari 30 OPD dan BHI di Kabupaten Temanggung.

10) Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.106
Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1,	Jumlah inovasi layanan	12	20	29	19	20	23
2	Jenis Layanan	31	31	31	24	24	24
	Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	38,71	64,52	93,55	79,16	83,33	83,33

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Nomor 060/047/2021 tanggal 7 Juni 2021 terdapat 24 jenis pelayanan dengan jumlah inovasi di tahun 2023 sebanyak 23 inovasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penambahan Inovasi pelayanan yang di laksanakan Dinas Dukcapil pada tahun 2023 triwulan I adalah Pelayanan Kecamatan Penyangga yaitu pelayanan adminduk di tiga Kecamatan yang ditunjuk sebagai kecamatan penyangga yaitu Kecamatan Parakan, Kecamatan Ngadirejo dan Kecamatan Kandangan

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1) Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun

Klasifikasi status desa berdasarkan rentang nilai pada Indeks Desa Membangun (IDM) sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.107
Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)

Status Desa	Rentang Nilai
Mandiri	IDM > 0,8155
Maju	0,7072 < IDM < 0,8155
Berkembang	0,5989 < IDM < 0,7072
Tertinggal	0,4907 < IDM < 0,5989
Sangat tertinggal	IDM < 0,4907

Sumber : Kementrian Desa PDPT, 2020

Tabel 2.108
Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

Kondisi Desa	2019	2020	2021	2022	2023
Rata-rata nilai IDM	0,67	0,68	0,69	0,72	0,74

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2024

Nilai rata-rata IDM di Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan capaian dari angka Tahun 2021, sehingga predikat desa berkembang menjadi desa maju pada tahun 2022. Sedangkan untuk capaian rata-rata IDM tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,74%. Kenaikan rata-rata IDM Kabupaten Temanggung disebabkan karena kenaikan indeks komposit sosial pada indikator akses pendidikan PAUD dan penyelenggaraan pendidikan non formal serta indeks komposit lingkungan pada indikator pencegahan pencemaran air, tanah dan udara, pada indikator potensi rawan bencana melalui kegiatan penyediaan mitigasi dan penanggulangan bencana.

2) Persentase Desa yang Berpredikat Mandiri

Persentase desa yang berpredikat Mandiri/Maju di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.109
Persentase Desa yang berpredikat Mandiri di Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

Kondisi Desa	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Desa Mandiri	0	10	15	26	55
Jumlah Desa	266	266	266	266	266
Persentase	0	3,76	5,64	9,77	20,68

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2024

Terdapat peningkatan yang signifikan desa dengan status mandiri dari yang semula tahun 2022 sebanyak 26 desa menjadi 55 desa atau sebesar 20,68% di tahun 2023. Kenaikan status desa tersebut disebabkan karena terdapat kenaikan pada beberapa indikator perbaikan akses pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

3) Persentase Desa yang Berklasifikasi Swasembada

Pengertian secara umum, desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Di desa ini adat istiadat dalam masyarakatnya sudah tidak mengikat, hubungan antar manusia bersifat rasional.

Tabel 2.110
Persentase Desa/Kelurahan Swasembada di Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

Kondisi Desa	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Desa/Kelurahan	58	58	81	81	111
Jumlah Desa/Kelurahan	289	266	266	266	266
Persentase	20,07	21,80	30,45	30,45	41,73

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2024

Angka kemajuan dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 sampai dengan 2023. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang signifikan terkait desa yang berklasifikasi swasembada. Capaian pada tahun 2023 sudah tercapai sebesar 41,73% atau sebanyak 111 desa. Peningkatan tersebut didukung dengan adanya Permendagri nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman penyusunan dan pendayagunaan data profil Desa dan Kelurahan. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk peningkatan desa/kelurahan swasembada di Temanggung yaitu melakukan pendampingan dan identifikasi desa potensi swasembada dan berkoordinasi secara aktif dengan Kemendagri.

4) Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Indeks Pembangunan Desa

Desa cepat berkembang, yaitu desa yang dekat atau mudah berhubungan dengan kota. Kegiatan ekonominya tidak tergantung pada sektor primer atau agraris saja. Masyarakatnya menunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaannya. Desa cepat berkembang biasanya telah mencapai desa swasembada.

Berikut ini capaian persentase desa cepat berkembang di Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

Tabel 2.111
Persentase Desa Cepat Berkembang Berdasarkan Indeks Pembangunan Desa dan Kelurahan Tahun 2019-2023

Kondisi Desa	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Desa Cepat Berkembang	58	40	95	116	116
Jumlah Desa dan kelurahan	289	266	266	266	266
Persentase	20,06	15,03	35,71	43,61	43,61

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2024

Persentase desa yang cepat berkembang di Kabupaten Temanggung tahun 2023 masih sama dengan capaian tahun 2022. Berdasarkan Indeks Pembangunan Desa rata-rata di Kabupaten Temanggung menunjukkan desa cepat berkembang sejumlah 116 desa dan desa berkembang ada 150.

5) Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan

Tabel 2.112
Persentase Desa yang Menyelesaikan Penyusunan RKPDesa Tepat Waktu dan Sesuai Aturan Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Desa yang menetapkan RKPDesa tepat waktu	117	205	256	266	256
Jumlah Desa	266	266	266	266	266
Persentase	43,98	77,07	96,24	100	100

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2024

Desa yang menyelesaikan RKPDesa tepat waktu dan sesuai aturan mengalami peningkatan mulai dari tahun 2022, sedangkan untuk capaian tahun 2023 sama dengan capaian tahun 2022 yaitu sebesar 100% atau sebanyak 266 desa telah menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu. Peningkatan tersebut didukung dengan adanya Adanya Perbup Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.

- 6) Persentase Jumlah Desa Yang Menyelesaikan Penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan

Tabel 2.113
Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan Penyusunan APBDes Tepat Waktu dan Sesuai Aturan Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	228	224	266	266	266
Jumlah Desa	266	266	266	266	266
Persentase	85,71	84,21	100	100	100

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2024

Desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 telah mencapai 100%, karena penetapan APBDes Tahun 2023 ditetapkan sebelum tanggal 31 Desember.

- 7) Persentase Desa yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Desa yang Sesuai Aturan

Kabupaten Temanggung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menjalin kerjasama dengan Badan Pemeriksa Pembangunan dan Keuangan Provinsi Jawa Tengah untuk menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diterapkan mulai Tahun 2018. Penerapan Siskeudes berbasis aplikasi ini dilaksanakan di 266 desa se-Kabupaten Temanggung.

Tabel 2.114
Persentase Desa yang Menerapkan Siskeudes Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Desa yang menerapkan siskeudes	266	266	266	266	266
Jumlah desa	266	266	266	266	266
Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2024

Persentase desa yang menerapkan siskeudes mulai tahun 2019-2023 sudah mencapai 100%, hal tersebut didukung dengan adanya pengadaan server dan aplikasi yang sudah digunakan untuk mendukung penerapan pengelolaan keuangan desa secara *online*. Selain itu, desa sudah menerapkan Aplikasi Siskeudes, personil desa/kaur keuangan yang terampil IT, kesesuai kegiatan dengan perencanaannya sehingga

memudahkan desa dalam pengelolaan keuangan desa, semua desa sampai sudah menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan.

8) Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan Semua Kegiatan di APBDes Tepat Waktu

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi kewenangan cukup luas kepada Desa untuk membangun sarana dan prasarana desa sesuai kebutuhan masyarakat Desa. Persentase Desa yang menyelesaikan semua kegiatan tepat waktu mengalami peningkatan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.115
Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan Semua Kegiatan di APBDes Tepat Waktu Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Desa yang menyelesaikan semua kegiatan APBDes tepat waktu	266	266	256	266	266
Jumlah Desa	266	266	266	266	266
Persentase	100	100	96,24	100	100

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes mencapai 100%. Hal ini didukung dengan adanya Perbup nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa di Desa.

9) Persentase Laporan Administrasi Desa yang Tepat Waktu

Pemerintah desa bertanggung jawab memenuhi kebutuhan masyarakat desa dengan berpedoman pada asas pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut UU Nomor 6 tahun 2014, desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota, Administrasi pemerintah desa memegang peranan yang penting karena keterlibatannya yang besar pada proses pembangunan pemerintah dan Tertib administrasi sangat didambakan oleh instansi termasuk pemerintahan desa, karena pekerjaan dalam suatu pemerintahan membutuhkan ketepatan waktu, kejelasan kerja, keterbukaan dan kesederhanaan agar mereka yang dilayani menjadi puas, Persentase desa yang tertib administrasi mengalami peningkatan tiap tahun ditunjukkan pada tabel:

Tabel 2.116
Persentase Laporan Administrasi Desa yang Tepat Waktu Tahun 2019-2023

Kondisi Desa	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah desa yang tertib administrasi	234	264	266	266	266
Jumlah Desa	266	266	266	266	266
Persentase	87,97	86,84	100	100	100

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2024

10) Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa

Implementasi karakter disiplin pada perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsi dapat diukur dengan menggunakan indikator tertib dengan aturan-aturan yang ada, melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, tanpa ada paksaan dari siapapun, dan taat untuk menjalankan tugas dan fungsi. Jumlah aparatur desa yang disiplin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.117
Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa Tahun 2019-2023

Kondisi Desa	2019	2020	2021	2022	2023
jumlah kepala desa dan perangkat desa yang melanggar disiplin	36	18	0	0	0
jumlah kepala desa dan perangkat desa	266	266	266	266	266
Persentase	13,53	6,77	0	0	0

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2024

Tingkat disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa meningkat dari tahun 2019-2020 dan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 tidak ada pelanggaran disiplin Kepala Desa dan Perangkat. Persentase pelanggaran disiplin Kepala Desa tahun 2023 menunjukkan tidak ada Kepala Desa dan perangkat desa yang melanggar disiplin yang dikasuskan sampai ke ranah hukum.

11) Persentase Desa yang Tertib Pengelolaan Aset

Pengertian aset desa berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 angka 11 yaitu barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Tabel 2.118
Persentase Desa yang Tertib Mengelola Aset Desa Tahun 2019-2023

Kondisi Desa	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah desa yang tertib mengelola aset	191	212	264	266	266
Jumlah Desa	266	266	266	266	266
Persentase	71,80	79,69	99,24	100	100

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2023 sudah ada laporan in put aplikasi SIPADES secara *online*, dalam pengelolaan aset semua pengelola memahami alur tentang pencatatan, ketidاكلancaran dalam pembuatan laporan akhir tahun dan laporan aset rutin dilakukan tiap bulan, hal itu karena telah dilakukan upaya adanya pendampingan dan sosialisasi pada saat in put aplikasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset

dan pelaporannya

12) Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Aktif

LKD dapat dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan Masyarakat dengan memperhatikan sendiri sosial budaya masyarakat, LKD terdiri dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), TP, PKK, Karang Taruna, LPMD, Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan Lembaga Kemasyarakatan desa lainnya.

LKD adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam rangka membantu Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, Kriteria LKD yang aktif adalah:

- Kepengurusan (SK Kepala Desa);
- Administrasi (Buku kegiatan, Buku kas, struktur organisasi, papan nama, dan stempel);
- Ketersediaan anggaran (dukungan dana dari APBDes).

Tabel 2.119
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel yang Aktif Tahun 2019-2023

No	Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah LKD aktif			8,639	8,639	8,639
	Rukun Tetangga (RT)	5,178	5,201	5,201	5,201	5,201
	Rukun Warga (RW)	1,348	1,350	1,350	1,350	1,350
	TP, PKK	310	310	310	310	310
	LPMD/K	289	289	289	289	289
	Posyandu	289	578	1489	1489	1489
2	Jumlah LKD			8,639	8,639	8,639
	Rukun Tetangga (RT)	5,178	5,201	5,201	5,201	5,201
	Rukun Warga (RW)	1,348	1,350	1,350	1,350	1,350
	TP, PKK	310	310	310	310	310
	LPMD/K	289	289	289	289	289
	Posyandu	289	578	1489	1489	1489
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2024

13) Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang Aktif

Berikut merupakan pemeringkatan Badan Usahan Milik Desa (BUMDesa) berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2022 Tentang Formula Pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama:

Tabel 2.120
Peringkat (Ranking) BUMDesa

Status Desa	Jumlah Skor
Maju	>= 85 - 100
Berkembang	>= 70 - 85
Pemula	>= 55 - 70
Perintis	<55

Sumber: Kepmendes Nomor 145 Tahun 2022 Tentang Formula Pemeringkatan BUMDesa/ BUMDesma

Tabel 2.121
Persentase BUMDesa yang Aktif Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah BUMDesa yang aktif	163	163	227	257	258
Jumlah BUMDesa	266	266	266	266	266
Persentase BUMDesa yang aktif	61,28	61,28	85,34	96,62	96,99

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2024

Persentase BUMDesa yang aktif pada tahun 2019 sampai tahun 2023 cenderung meningkat. Namun, di Kabupaten Temanggung pemeringkatan BUMDes masih didasarkan pada BUMDesa yang aktif, pada tahun 2023 dengan klasifikasi tingkat dasar ada 82 desa, tingkat tumbuh 153 desa, tingkat Berkembang 20 desa dan Tingkat Maju 3 desa. Hal ini didukung dengan adanya Perda nomor 3 Tahun 2016 tentang BUMDes, Perbup nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan BUMDes dan BUMDesa Bersama, dan adanya Forum BUMDesa.

14) Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif

Lembaga ekonomi masyarakat desa terdiri dari UP2K-PKK, UED-SP, Pasar Desa dan CPPD seluruhnya aktif karena selalu dilakukan pembinaan, pendampingan serta monitoring dan evaluasi setiap tahunnya.

Tabel 2.122
Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat desa yang aktif	118	118	118	118	118
- UP2K-PKK	30	30	30	30	30
- UED-SP	35	35	35	35	35
- Pasar Desa	24	24	24	24	24
- CPPD	29	29	29	29	29
Jumlah Lembaga Ekonomi masyarakat desa	118	118	118	118	118
- UP2K-PKK	30	30	30	30	30
- UED-SP	35	35	35	35	35
- Pasar Desa	24	24	24	24	24
- CPPD	29	29	29	29	29
Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2024

Lembaga ekonomi masyarakat desa dari UP2K-PKK, UED-SP, Pasar Desa dan CPPD seluruhnya aktif karena selalu dilakukan pembinaan, pendampingan serta monitoring dan evaluasi setiap tahunnya.

15) Persentase Pemberdayaan di Kawasan yang Telah Ditetapkan

Isu-isu yang diangkat dalam pembangunan kawasan perdesaan antara lain rural-urban linkage; pertumbuhan; lapangan pekerjaan; infrastruktur; serta sinergisme antar sektor, pasar, dan masyarakat; dengan dukungan dana dari APBN berupa dana perimbangan dan APBD yang dialokasikan pada masing-masing sektor. Pemegang kewenangan pembangunan kawasan perdesaan adalah Pemerintah Daerah yang bersinergi dengan

masyarakat dan komponen lainnya kecuali yang berskala lokal Desa. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 85. Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.123
Persentase Pemberdayaan di Kawasan yang Telah Ditetapkan Tahun 2019-2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kawasan yang dikembangkan	1	1	1	1	1
Jumlah kawasan yang telah ditetapkan dengan Perbup	1	1	1	1	1
Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2024

Upaya pemberdayaan berupa fasilitasi kegiatan pengembangan kawasan perdesaan mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengembangan kawasan sudah dilaksanakan pada Tahun 2018 hingga tahun 2023. Arah pengembangan kawasan perdesaan yang dilakukan pada tahun tahun 2021 berfokus di Kecamatan Bansari dengan konsep pengembangan Eduwisata Bansari. Desa yang tergabung dalam kawasan perdesaan memiliki potensi yang sama sehingga perlu pengelolaan yang lebih maksimal, serta adanya semangat dan kreativitas pengurus BUMDesa Bersama, Sedangkan pada tahun 2022 pemberdayaan Kawasan Perdesaan Eduwisata Pertanian di Kecamatan Kranggan yang meliputi 5 desa yaitu Desa Ngropoh, Desa Purwosari, Desa Kramat, Desa Sanggrahan, dan Desa Pendowo. Pada tahun 2023 jumlah pemberdayaan kawasan masih melanjutkan tahun 2022 yaitu Kawasan Kranggan.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Gambaran pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Temanggung periode 2019-2023 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.124
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,88	0,98	0,98	0,54	0,54
2	Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/Kelurahan	%	100	100	100	100	100
3	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed	%	11,44	13,76	12,99	11,47	8,60
4	Persentase Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	1,52	2,16	1,02	2,45	1,02
5	Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 th (ASFR 15-19 th)	%	29,43	21,32	9,80	6,67	14,10
6	Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman	%	83,03	82,61	75,29	76,58	80,14

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
	tentang semua jenis metode kontrasepsi modern						
7	Persentase kepesertaan KB aktif	%	77,50	74,71	75,29	76,58	80,14
8	Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	48,02	45,38	45,21	45,03	45,77
9	Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM)	%	29,82	33,85	33,85	33,85	51,94
10	Indek Pembangunan Keluarga	%	0,00	0,00	55,97	55,97	58,19

Sumber: DPPAPKB Kabupaten Temanggung, 2024

Menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan serta Surat Mendagri Nomor 470/3376/SJ dan 470/3375/SJ tanggal 5 Juni 2020 untuk menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPKB) pada tahun 2023 sudah melakukan penyusunan dokumen GDPK.

Pelaksanaan GDPK tercantum dalam Perda Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana, Pelaksanaan GDPK diselenggarakan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikut sertakan peran masyarakat. Koordinasi GDPK dilaksanakan oleh tim koordinasi GDPK sebagai wadah koordinasi yang bersifat nonstruktural.

Indikator persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang di Kabupaten Temanggung belum mencapai target yang ditetapkan. PUS dengan MKJP adalah jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang (Implant, IUD, MOP, dan MOW). Capaian peserta KB berdasar hasil laporan dari SIMANTAP KON KB sampai tahun 2023, tercapai 47.176 atau 45,77% dari peserta KB sebanyak 103.082 PUS. Penurunan tersebut disebabkan karena masih tingginya rumor kegagalan IUD di masyarakat, dukungan anggaran pencabutan implan rendah berakibat peserta KB yang seharusnya dicabut dan ingin berKB lagi menjadi PUS *drop out*, masih rendahnya animo masyarakat tdalam pelayanan KB MOW dan MOP, peserta KB MKJP dari MOW dan MOP sudah banyak yang *drop out*, dan meningkatnya kemandirian menggunakan alat kontrasepsi suntik.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Gambaran urusan perhubungan di Kabupaten Temanggung periode 2019-2023 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.125
Gambaran Urusan Perhubungan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Presentase penurunan angka kecelakaan	%	0,30	5,79	1,62	1,64	1,67
2	Persentase ruas jalan yang didukung perlengkapan jalan yang memadai	%	33,82	34,78	35,27	41,06	41,55
3	Persentase potensi titik parkir yang tertangani	%	95,45	97,27	98,18	98,18	100
4	Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	%	102,21	83,60	96,28	99,56	99,63
5	Persentase bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar	%	25	25	25	50	50
6	Persentase bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar	%	12,5	25	37,5	50	62,50
7	Persentase bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar	%	43,48	47,83	56,52	60,87	65,22
8	Persentase Pelayanan Angkutan Umum	%	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00
9	Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif	%	85,71	100	100	100	100
10	Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	71,43	71,43	85,71	85,71	100
11	Prosentase Penerangan Jalan di Jalan Kabupaten	%	31,68	31,69	31,69	32,08	32,49
12	Rasio ijin trayek	angka	0,0781	0,07783	0,07697	0,02336	0,07712
13	Jumlah uji KIR angkutan umum	angka	1466	1331	1.043	985	811
14	Jumlah terminal bus	angka	8	8	8	8	8
15	Persentase layanan angkutan darat	%	0,0205	0,0737	0,0956	0,0243	0,0193
16	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	100	100	100	100	100
17	Pemasangan rambu-rambu	%	62,75	64,55	66,09	66,17	66,69
18	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	angka	1,05	1,05	1,05	1,05	1,06
19	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	jiwa	4.953.879	1.253.673	830.977	3.385.970	4.252.716
20	Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun	jiwa	6.345.857	1.997.427	1.453.391	4.381.964	6.120.310

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel tersebut urusan pemerintahan bidang perhubungan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Capaian dalam bidang perhubungan diharapkan dapat menunjang Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mencapai Misi ke 2 Kabupaten Temanggung yaitu Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan.

Dalam rangka mensinergikan dan menyelaraskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024, Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Perhubungan secara bertahap mulai

melengkapi data-data capaian dimaksud, dimana capaian hingga tahun 2021¹ antara lain:

- a. Rasio konektivitas transportasi Kabupaten Temanggung sebesar 80%;
- b. Rasio kejadian kecelakaan transportasi Kabupaten Temanggung sebesar 62%;
- c. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi sebesar 84%;
- d. *On time performance* layanan transportasi sebesar 78%; dan
- e. Persentase penurunan emisi GRK sektor transportasi sebesar 68%.

Pada tahun 2023 tercatat sejumlah 294 kejadian kecelakaan sehingga sampai dengan saat ini terjadi penurunan angka kecelakaan yaitu sebesar 1,67%. Adapun indikator menurunnya angka kecelakaan lalu lintas dapat tercapai adanya faktor pendorong sinergitas para pemangku kepentingan di bidang keselamatan untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun faktor terhambatnya belum sinerginya para pemangku kepentingan di bidang keselamatan untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada Tahun 2023 prosentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai mengalami peningkatan capaian yaitu sebesar 41,55%. Hal ini didorong dengan adanya kewajiban untuk menyediakan perlengkapan jalan yang memadai guna meminimalisir fatalitas kecelakaan lalu lintas sehingga dapat mendorong terwujudnya keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 2019 s.d. 2023 terdapat jumlah trayek di Kabupaten Temanggung dengan total trayek sebanyak 45 trayek sebagaimana Keputusan Bupati Temanggung Nomor 551.2/395 tahun 2016 tentang Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Temanggung. Pada tahun 2022 jumlah trayek yang terlayani angkutan umum sebanyak 45 trayek. Kondisi pada tahun 2023 ini jumlah trayek yang terlayani angkutan umum sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 45 trayek atau telah mencapai 100%.

Pada Tahun 2023 persentase penerangan jalan di Kabupaten Temanggung yaitu sebesar 32,49%. Panjang jalan kabupaten sebagaimana surat keputusan

¹ Sumber : Dinas Perhubungan, 2021

Bupati Temanggung Nomer 050/405 tahun 2018 tanggal 22 November tahun 2018 tentang ruas-ruas jalan yang berstatus sebagai jalan kabupaten total 650.476 Km atau 650.476.000 m. Dengan jarak ideal antar PJU adalah 50 m maka perkiraan total kebutuhan PJU pada ruas jalan kabupaten sebesar 13009,52 dengan jarak ideal 50 m.

Rasio Ijin Trayek sangat dipengaruhi oleh banyaknya Ijin Trayek yang dikeluarkan apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan Penduduk, sehingga dari tabel diatas pada kurun tahun 2019 s.d. 2023 mengalami fluktuasi rasio ijin trayek. Jumlah ijin trayek akan bertambah ketika terdapat jalur – jalur trayek angkutan umum baru, yang terlayani oleh angkutan umum. Untuk tahun 2023 terdapat pengurangan armada sebanyak 1 unit di trayek Temanggung-Kandangan-Malebo-Braman karena kendaraan menjadi plat hitam, sehingga besaran rasio trayek yaitu sebesar 0,07712.

Jumlah uji KIR angkutan umum cenderung mengalami penurunan dari tahun 2019 s.d. 2023, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adanya penurunan jumlah angkutan umum setiap tahunnya, mutasi keluar kendaraan, dan sebagian besar disebabkan pemilik kendaraan yang tidak melakukan uji berkala serta balik nama truk umum (plat kuning) menjadi plat hitam. Namun, untuk persentase kepemilikan KIR angkutan umum yang dilakukan Dinas Perhubungan Temanggung berdasarkan kendaraan wajib uji aktif setiap tahunnya adalah 100%.

Jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas tahun 2019-2023 mengalami peningkatan. Ketersediaan anggaran untuk pengadaan rambu lalu lintas, mendorong peningkatan jumlah rambu lalu lintas yang dapat di pasang. Pada tahun 2020-2022 jumlah pemasangan rambu lalu lintas meningkat hal ini disebabkan karena kegiatan pengadaan rambu lalu lintas tahun 2020-2022 telah dilaksanakan. Pada Tahun 2023 jumlah presentase Pemasangan rambu-rambu mengalami peningkatan sebanyak 66,69% karena bertambahnya Pemasangan rambu sebanyak 1.778.

Tren rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dalam kurun waktu 2019-2023 di Temanggung cenderung stabil. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan panjang jalan kabupaten yang konstan, begitu pula dengan jumlah armada angkutan umum yang cenderung lambat pertumbuhannya. Secara umum bahwa rata – rata setiap 1 Km Panjang Jalan Kabupaten dilalui oleh 1 Angkutan Umum. Akan tetapi dalam hal ini belum semua jaringan jalan kabupaten telah dilalui angkutan umum.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

1) Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat seperti tertera pada Tabel berikut:

Tabel 2.126
Nilai Indek Tingkat Kematangan SPBE

Nilai Indeks	Predikat
4,2 – 5,0	Memuaskan
3,5 – < 4,2	Sangat baik
2,6 – < 3,5	Baik
1,8 – < 2,6	Cukup
< 1,8	Kurang

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2024

Realisasi Indeks SPBE Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.127
Indeks SPBE Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,82	3,61	2,78	3,12	3,12

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2024

Nilai kematangan penyelenggaraan SPBE yang diperoleh Kabupaten Temanggung tentunya menjadikan penyelenggaraan SPBE masih perlu ditingkatkan dengan upaya perbaikan, baik didomain kebijakan SPBE, pelaksanaan tata kelola SPBE maupun layanan SPBE. Salah satu strateginya adalah dengan mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2023 masih menggunakan angka capaian tahun 2022 yaitu sebesar 3,12. Hal ini dikarenakan nilai evaluasi SPBE tahun 2023 baru dapat disajikan pada Triwulan I tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kemenpan RB.

Untuk meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Temanggung akan diukur dengan beberapa parameter antara lain Indeks Pelaksanaan SPBE, indeks ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan (*maturity level*) untuk menilai domain Kebijakan Internal SPBE, domain Tata Kelola SPBE, dan domain Layanan SPBE.

2) Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan keterbukaan dan pelayanan publik pada masyarakat salah satunya dapat diukur dari Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan pemeringkatan keterbukaan badan publik kabupaten/kota terhadap implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP.

Fokus utama evaluasi dan penilaian badan publik dengan hasil akhir adalah kepatuhan badan publik menjalankan standar pelayanan informasi publik, terutama menyangkut keterbukaan program, kegiatan, kinerja dan anggaran.

Tabel 2.128
Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	80,03	95,5	89,56	88,33	97,38
2	Kategori	Menuju Informatif				

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel di atas, selama kurun waktu lima tahun pelaksanaan pemeringkatan keterbukaan badan publik, nilai PPID Kabupaten Temanggung dapat dikatakan mengalami kenaikan. Pada tahun 2023 nilai KIP mengalami kenaikan mencapai 97,38 dengan kategori Menuju Informatif. Capaian tersebut dikarenakan oleh upaya dan kerja keras dari seluruh pemangku keterbukaan informasi publik di Pemkab Temanggung, baik PPID Utama, PPID Pembantu dan semua stakeholder.

Upaya tersebut antara lain dengan penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana PPID, pengesahan regulasi dan SOP, pendampingan, monitoring dan evaluasi rutin PPID Pembantu, pengembangan website dan dashboard PPID serta peningkatan layanan kepada masyarakat.

3) Persentase PPID Badan Publik yang Aktif

Melalui PPID masyarakat dapat menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. Penilaian PPID Badan Publik yang aktif baru dilaksanakan mulai tahun 2017. Realisasi persentase PPID badan publik yang aktif Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.129
Persentase PPID Badan Publik Aktif Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PPID badan publik yang aktif	38	45	50	62	80
2	Jumlah PPID badan publik	355	341	341	341	341

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
3	Persentase PPID badan publik yang aktif (%)	10,7	13,20	14,66	18,18	23,46

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase PPID badan publik yang aktif dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan. Faktor pendorong capaian Jumlah PPID badan publik yang aktif adalah keaktifan dari PPID utama Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan pendampingan, pembinaan dan jemput bola kepada PPID pelaksana dilingkungan Pemkab Temanggung. Dalam hal pendampingan diwujudkan dengan monev rutin terkait kelengkapan kelembagaan dan data PPID pelaksana yang dilaksanakan tiap triwulan. Pembinaan dilaksanakan dengan kegiatan peningkatan kapasitas pengelola PPID Pelaksana, meliputi bimtek, workshop, dan pelatihan. Secara lebih rinci, keaktifan PPID Pembantu Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.130

PPID Badan Publik Aktif Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No	Nama Badan Publik	2023
1	Sekretariat DPRD	Aktif
2	Dinas Kesehatan	Aktif
3	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Aktif
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Aktif
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Aktif
6	Dinas Penanaman Modal	Aktif
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Aktif
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Aktif
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Aktif
10	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Aktif
11	Dinas Perhubungan	Aktif
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aktif
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Aktif
14	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Aktif
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Aktif
16	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Aktif
17	Inspektorat	Aktif
18	Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Aktif
19	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Aktif
20	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aktif
21	Rumah Sakit Umum Kab. Temanggung	Aktif
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Aktif
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Aktif

No	Nama Badan Publik	2023
24	Kecamatan Temanggung	Aktif
25	Kecamatan Tembarak	Aktif
26	Kecamatan Pringsurat	Aktif
27	Kecamatan Kaloran	Aktif
28	Kecamatan Kranggan	Aktif
29	Kecamatan Parakan	Aktif
30	Kecamatan Kedu	Aktif
31	Kecamatan Bulu	Aktif
32	Kecamatan Kandangan	Aktif
33	Kecamatan Candiroto	Aktif
34	Kecamatan Jumo	Aktif
35	Kecamatan Wonobojo	Aktif
36	Kecamatan Ngadirejo	Aktif
37	Kecamatan Bejen	Aktif
38	Kecamatan Tretep	Aktif
39	Kecamatan Kledung	Aktif
40	Kecamatan Selopampang	Aktif
41	Kecamatan Gemawang	Aktif
42	Kecamatan Bansari	Aktif
43	Desa Joho	Aktif
44	Desa Lungge	Aktif
45	Desa Gilingsari	Aktif
46	Desa Kerokan	Aktif
47	Desa Bengkal	Aktif
48	Desa Pare	Aktif
49	Desa Purwosari	Aktif
50	Desa Selompampang	Aktif
51	Desa Pringsurat	Aktif
52	Desa Kupen	Aktif
53	Desa Pagergunung	Aktif
54	Desa Ngipik	Aktif
55	Desa Tlogowungu	Aktif
56	Desa Gandon	Aktif
57	Desa Geblog	Aktif
58	Desa Tegowanuh	Aktif
59	Desa Nglondong	Aktif
60	Desa Watukumpul	Aktif
61	Desa Ringinanom	Aktif
62	Desa Tanurejo	Aktif
63	Desa Kwadungan Jurang	Aktif
64	Desa Pandemulyo	Aktif
65	Desa Wadas	Aktif
66	Desa Ngemplak	Aktif
67	Desa Candiroto	Aktif
68	Desa Giyono	Aktif
69	Desa Banaran	Aktif
70	Desa Nglarangan	Aktif
71	Desa Tlogo	Aktif

No	Nama Badan Publik	2023
72	Desa Purwosari	Aktif
73	Desa Ngadirejo	Aktif
74	Desa Munggangsari	Aktif
75	Desa Batusari	Aktif
76	PDAM Tirta Agung	Aktif
77	PD BPR Bank Pasar	Aktif
78	PD BPR BKK Temanggung	Aktif
79	PD Aneka Usaha	Aktif

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel tersebut tingkat laporan Perangkat Daerah kepada PPID lebih dari 50%. Dari 45 Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Temanggung 42 Perangkat Daerah telah malapor kepada PPID.

Persentase PPID badan publik yang aktif dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan, namun demikian masih terbilang kecil.

Mulai tahun 2021 terdapat inovasi Sistem Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (SIMONEV KIP) yang merupakan aplikasi untuk membantu memonitor capaian updating data dan informasi oleh PPID Pelaksana. SIMONEV KIP juga menjadi solusi atas permasalahan seringnya mutasi/perpindahan tugas admin PPID Pelaksana.

4) Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang Aktif

Indikator keaktifan KIM adalah melaksanakan kegiatan rutin dalam peningkatan literasi media masyarakat, diseminasi informasi dan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.131
Persentase KIM Aktif Kabupaten Temanggung, Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kelompok informasi masyarakat yang aktif	5	5	7	9	71
2	Jumlah kelompok informasi masyarakat	32	32	32	32	90
3	Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	15,63	15,63	21,88	28,13	78,89

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2024

Persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang aktif dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan. Pada triwulan tahun 2023 terdapat 90 KIM yang aktif karena ada pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat baru yang ada di Kabupaten Temanggung. Capaian indikator kinerja Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif adalah 78.88 % atau 100% dari target yang ditetapkan di tahun 2023 sebesar 30%.

Faktor pendorong capaian indikator tersebut diantaranya adalah

semangat masyarakat dalam turut serta mendesiminasikan dan meningkatkan literasi informasi. Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung secara berkala monitoring dan evaluasi serta membina dan mendampingi dalam meningkatkan kualitas materi yang diunggah di media social. Kelompok Informasi Masyarakat berperan aktif dalam menjalankan tugas sebagai kelompok yang mempunyai peran sebagai fasilitator, mitra Pemerintah Daerah juga sebagai penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat, sebagai pelancar arus informasi serta sebagai terminal informasi bagi masyarakat desa, meskipun kegiatan tersebut belum semuanya terdokumentasi dengan rapi.

5) Persentase Kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Terhadap Norma Siaran

Persentase kepatuhan LPP terhadap norma siaran selalu 100%, artinya setiap ada pengaduan selalu dapat ditindaklanjuti. Persentase kepatuhan LPP terhadap norma siaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.132
Persentase Kepatuhan LPP Terhadap norma Siaran Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang patuh	8	8	8	8	8
2	Jumlah Lembaga Penyiaran Publik (LPP)	8	8	8	8	8
3	Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2024

Persentase kepatuhan LPP terhadap norma siaran selalu 100%, artinya setiap ada pengaduan selalu dapat ditindak lanjuti dan tidak ditemukan pelanggaran kode etik atau norma siaran.

Faktor pendorong ketercapaian indikator ini adalah pemahaman dan kepatuhan merata insan penyiaran terhadap P3 (Pedoman Program Siaran) dan SPS (Standar Program Siaran).

Di wilayah Kabupaten Temanggung terdapat total 8 Lembaga Penyiaran Publik, terdiri dari 5 Radio Swasta, 1 Radio Komunitas, 1 Radio Publik Lokal, 1 Televisi Publik Lokal yang secara lengkap disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.133
Lembaga Penyiaran Publik di Kabupaten Temanggung

No	Nama LPP	Alamat	Frekuensi
1	Radio Erte FM	Jl. Gerilya Kowangan, Temanggung	94.8 Mhz
2	Radio Angkasa 7	Jl. Gilingsari Kav. 2-3 Tegaltemu Manding, Temanggung	88.1 Mhz
3	Radio O2	Jl. Jenderal Sudirman No.164, Rejosari, Kowangan, Temanggung	98.1 MHz
4	Radio Ofa	Komplek Wisma Soemodilogo, Kranggan, Temanggung	101.5 MHz
5	Radio Best/Pop FM	Jl. Randusari No. 5 Temanggung	103.1 MHz

No	Nama LPP	Alamat	Frekuensi
6	Radio Shofar	Jl. Soepono No. 11 Temanggung	107.7 MHz
7	Radio Santika	Jl. Jenderal Sudirman No.60, Jampirejo barat, Jampirejo, Temanggung	96.4 FM
8	Temanggung TV	Jl. S. Kadar Maron No.21, Sawah & Hutan, Kedungumpul, Kandangan, Temanggung	3970.8/H/03000

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2024

Dalam rangka pengawasan isi siaran masyarakat dapat melaksanakan secara langsung dan melaporkan kepada Dinas Kominfo atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah. Untuk menguatkan peran pengawasan isi siaran ini, KPID Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Dinas Kominfo membentuk kelompok masyarakat pemantau isi siaran dengan beranggotakan organisasi masyarakat, unsur mahasiswa dan birokrasi.

Tingkat kepatuhan lembaga penyiaran terhadap norma siaran di Kabupaten Temanggung tergolong baik, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat berat dan serius, apabila ada hanya pelanggaran yang bersifat ringan terkait konten siaran yang langsung ditindaklanjuti oleh lembaga penyiaran yang bersangkutan

6) Persentase Ketersediaan Akses Internet Publik

Ruang publik (area publik) adalah kawasan umum yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung yang digunakan oleh masyarakat sebagai tempat berkumpul dan beraktivitas. Lokasi area publik ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kominfo. Sampai dengan akhir tahun 2023 ini tercatat ada 60 area publik yang menjadi urusan Dinkominfo dalam pemenuhan kebutuhan akses internet. Jumlah area publik yang sudah terfasilitasi jaringan internet publik dari Dinkominfo dengan kecepatan 2 mbps dedicated mulai tahun 2019 s.d tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.134
Persentase Ketersediaan Jaringan Internet Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah area publik yang sudah terfasilitasi akses internet	41	44	44	48	60
2	Jumlah area publik	60	60	60	60	60
3	Persentase ketersediaan akses internet publik	68,3	73,33	73,33	80,00	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2024

Pada tahun 2023 semua area publik di Kabupaten Temanggung sudah terfasilitasi wifi publik. Dengan demikian target ketersediaan akses internet area publik di tahun 2023 telah tercapai 100%. Faktor pendorong

ketercapaian indikator tersebut terdiri atas faktor teknis dan non teknis. Secara teknis beberapa hal yang mendorong capaian indikator adalah kecukupan *bandwidth* untuk area publik didukung oleh penyedia ISP dengan jalur terpisah dari jalur utama Jaringan Internet Pemerintah Daerah sehingga secara beban *bandwidth* cenderung stabil dan tercukupi; tersedianya jaringan internet secara mandiri non jaringan kominfo pada beberapa fasilitas publik seperti puskesmas seharusnya bisa menjadi salah satu pendukung tercapainya indikator ketersediaan akses internet publik. Namun hal tersebut akan menjadi layanan dengan tampilan berbeda karena tidak melalui *landing page* / *login page* jaringan publik kominfo, dimana pada halaman login terdapat informasi Free Wifi Pemerintah Kabupaten Temanggung; dan lokasi pada daftar area publik yang menjadi target kegiatan berdasarkan tinjauan pemetaan jaringan sangat memungkinkan untuk dilakukan koneksi sehingga bisa diselenggarakan hotspot untuk area tersebut.

Pada tahun 2022 terjadi penurunan dalam jumlah OPD,UPT (Eks UPT) dan Desa/Kelurahan dikarenakan menyesuaikan dengan status kantor dan perubahan SOTK dalam hal ini adalah OPD dan UPT sehingga mengalami perubahan menjadi 384 yang pada tahun 2021 berjumlah 395.

Faktor pendorong ketercapaian indikator ketersediaan jaringan intranet adalah sebagai berikut :

- a) Peraturan Daerah nomor 22 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Bupati Temanggung nomor 83 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mendorong pemanfaatan jaringan intranet untuk proses bisnis Pemerintah Kabupaten Temanggung
- b) Telah tersedia repeater di beberapa lokasi yang dapat mendukung koneksi jaringan ke kantor – kantor pemerintah desa tersebut;
- c) Dari sisi kemampuan dan *occupancy* kapasitas alat masih mencukupi untuk mengcover beban trafik internet maupun intranet kantor – kantor Pemerintah Desa tersebut;
- d) Telah diaktifkan jaringan VPN (*Virtual Private Network*) Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk mengakomodir kantor-kantor pemerintah desa yang belum terhubung dengan jaringan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk melakukan akses pada aplikasi yang

bersifat internal dan berjejaring intra. Sehingga tidak ada kendala manakala kantor tersebut belum terhubung secara langsung dengan jaringan lokal Pemerintah Kabupaten Temanggung.

e) Persentase Ketersediaan Jaringan Intranet

Jaringan intranet dilewatkan melalui media kabel (wired) dan nirkabel (*wireless*) dengan topologi tertentu. Sistem ini merupakan jalan utama interkoneksi untuk pemanfaatan layanan SPBE.

Angka presentasi ketersediaan jaringan intranet diperoleh dari rumus jumlah OPD, UPT dan Desa/Kelurahan yang terhubung dengan jaringan dari Dinkominfo dibagi dengan jumlah seluruh OPD, UPT dan Desa/Kelurahan dikali 100%. Adapun capaian persentase ketersediaan jaringan intranet dari tahun 2019 s.d. tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.135
Persentase Ketersediaan Jaringan Intranet Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	OPD pengguna jaringan intranet	317	324	348	323	384
2	Jumlah OPD, UPT (eks UPT) dan Desa/Kel.	395	395	395	384	384
3	Ketersediaan jaringan intranet	80,25	82,03	88,10	84,11	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2024

Ketersediaan jaringan intranet sejak tahun 2018 s.d 2023 cenderung meningkat bahkan mencapai 100%, hal tersebut karena tahapan pengembangan distribusi jaringan sesuai dengan perencanaan serta dukungan penganggaran. Server VPN sudah aktif sehingga semua klien baik yang secara fisik terhubung maupun tidak bisa menggunakan jaringan intra pemerintah daerah. Jumlah yang sudah terhubung secara fisik 325 sisanya menggunakan jaringan VPN (Virtual Private Network) berdasarkan permintaan sesuai kebutuhan.

Adapun faktor pendorong ketercapaian indikator ini adalah adanya Peraturan Daerah nomor 22 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Bupati Temanggung nomor 83 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mendorong pemanfaatan jaringan intranet untuk proses bisnis Pemerintah Kabupaten Temanggung; telah tersedia repeater di beberapa lokasi yang dapat mendukung koneksi jaringan ke kantor-kantor pemerintah desa tersebut; dari sisi kemampuan dan occupancy kapasitas alat masih mencukupi untuk mengcover beban trafik internet maupun intranet kantor- kantor Pemerintah Desa tersebut; dan telah diaktifkan jaringan VPN (*Virtual Private Network*) Pemerintah

Kabupaten Temanggung untuk mengakomodir kantor-kantor pemerintah desa yang belum terhubung dengan jaringan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk melakukan akses pada aplikasi yang bersifat internal dan berjejaring intra

Pemanfaatan VPN (*Virtual Private Network*) menjadi pilihan terakhir untuk meng-cover kebutuhan jaringan intra bagi Kantor Pemerintah yang tidak terhubung secara langsung dengan jaringan Pemerintah Kabupaten. Jika VPN telah efektif berlaku untuk kebutuhan jaringan tertutup, maka secara keseluruhan kantor Pemerintahan telah tersedia jaringan intranet.

7) Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi

Tingkat laporan Perangkat dari terintegrasi pada sistem informasi, yang merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Realisasi persentase sistem informasi yang terintegrasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.136
Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah sistem informasi yang terintegrasi	61	82	87	53	54
2	Jumlah sitem informasi	461	507	512	101	105
3	Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi	13,23	16,17	16,99	52,48	51,43

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2024

Persentase sistem informasi yang terintegrasi pada tahun 2018-2023 cenderung mengalami peningkatan, karena adanya pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi lainnya. Namun demikian masih diperlukan regulasi yang mengatur pengembangan sistem informasi sebagai Upaya yang dilaksanakan dalam rangka mempetahankan capaian indikator kinerja ini adalah melakukan pembangunan jaringan berbasis fiber optik untuk integrasi jaringan seluruh Perangkat Daerah acuan dasar dalam perencanaan integrasi sistem informasi.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase sistem informasi yang terintegrasi pada tahun 2019-2023 cenderung mengalami peningkatan. Adapun data sistem informasi yang terintegrasi sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 2.137
Sistem Informasi yang Terintegrasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No	Nama Sistem Informasi	Jumlah	Keterangan (Terintegrasi Dengan)
1	Aplikasi Android Kependudukan Temanggung Gandem Pol	1	Data Kependudukan
2	Aplikasi Android Temanggung Gandem	1	Gandem, E-Statistik, PPID, JDIH, Media Center
3	Aplikasi ANJAB dan ABK	1	E-Kinerja
4	Aplikasi Dashboard Geospasial	1	GIS Tata Ruang
5	Aplikasi Pendataan Pemudik	1	Data Kependudukan
6	Aplikasi SANKA Android	1	Data Kependudukan
7	Aplikasi SANKA Web	1	Data Kependudukan
8	Bankdata	1	Gandem (Gabungan Data Temanggung)
9	BKPSDM	1	Simpeg, E-Kinerja, Absensi
10	Dashboard SIMPUS	1	simpus di puskesmas se-Kabupaten Temanggung
11	data	1	Gandem (Gabungan Data Temanggung)
12	e-dokum (katalog dokumen hukum)	1	jdih
13	e-kinerja	1	simpeg, e-tp, monitor absen
14	E-Office	1	simpeg, jdih
15	e-peluk ASN	1	simpeg
16	e-risalah	1	Jdih
17	E-Retribusi Pasar	1	Bank Jateng
18	e-Statistik	1	PPID, Temanggung Gandem
19	E-Surat RSUD	1	Simpeg
20	e-TPP	1	simpeg, e-kinerja, monitor absen
21	Gabungan Data (Gandem)	1	bank data, sipd, data
22	GIS Tata Ruang	1	GIS Terintegrasi
23	JDIH	1	e-dokumen
24	layanan kependudukan online	1	data kependudukan
25	LPSE	1	Sirup
26	Mapatda	1	sibangda, sig-mapatda
27	Media Center	1	Temanggung Gandem
28	Monitorabsen (E-Absensi)	1	e-tp
29	Portal VPN dan SSO	1	sistem informasi lain
30	PPDB Online	1	PPDB Pusat
31	PPID Pembantu	53	PPID Utama
32	PPID Utama	1	Temanggung Gandem
33	SIK	1	data kependudukan
34	SID	289	PPID
35	SIG-mapatda-bppkad	1	mapatda
36	SIMBOS	1	SIMBOS Pusat
37	SIMKB	1	Data kependudukan
38	SIMPAS	1	retribusi pasar
39	simpeg	1	e-kinerja, e-tp, monitor absen, p2kp
40	simpelbangda	1	Sirup
41	SIMPKK	1	Data Kependudukan
42	SIMPUS	26	capil dan bpjs
43	SIMRS	1	BPJS
44	SIPD	1	Gandem (Gabungan Data Temanggung)
45	SIPT Upload	1	sipt.temanggungkab.go.id
46	Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOF)	1	MAPATDA
47	sms	1	Lapor SP4N
48	Website Corona	1	Corona Jateng
49	Sirup	1	Simpelbangda
50	P-Care	1	Simpus
51	Siap Pakde	1	Bank Jateng
52	E Pak Guru	1	Simpeg
53	SIM UKPBJ	1	Dengan SIMPEG, SIRUP
54	HELPDESK	1	Dengan SIMPEG
55	WaGe	1	Dengan WA service
56	Web Kecamatan	1	PPID

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2024

Dalam hal perencanaan pembangunan, pemerintah Kabupaten Temanggung telah menerapkan sistem *e-planning*. Sistem *e-planning* yang dibangun oleh Pemerintah Temanggung digunakan mulai tahun 2019

untuk penyusunan RKPD tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Untuk penyusunan RKPD tahun 2022 sampai sekarang menggunakan *e-planning* dari Kemendagri yang terintegrasi dalam SIPD. Penggunaan *e-planning* lebih bertujuan untuk menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan, dimulai dari dokumen RPJMD, Renstra PD, dokumen RKPD dan dokumen Renja PD. Dalam proses perencanaan menggunakan SIPD RI, setiap sub kegiatan di *tagging* dengan prioritas Provinsi Jawa Tengah. Untuk *tagging* dengan Prioritas Nasional belum bisa dilaksanakan karena dalam SIPD RI belum terdapat menu.

Sedangkan, dalam aspek pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Temanggung juga telah menggunakan sistem *e-budgetting*. *E-budgetting* yang dibangun oleh Pemerintah Temanggung digunakan mulai tahun 2019 untuk penyusunan APBD tahun 2020 sampai dengan APBD tahun 2021. Untuk penyusunan APBD tahun 2022 sampai sekarang menggunakan sistem *e-budgetting* dari Kemendagri yang terintegrasi dalam SIPD. Dalam sistem *e-budgetting* tersebut sudah terintegrasi dengan e-ASB yaitu standar yang digunakan untuk menentukan anggaran belanja daerah yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan. Penggunaan *e-budgetting* juga telah terkoneksi dengan *e-planning* dengan tujuan untuk lebih menjamin konsistensi program dan sub kegiatan dari proses perencanaan sampai dengan penganggaran.

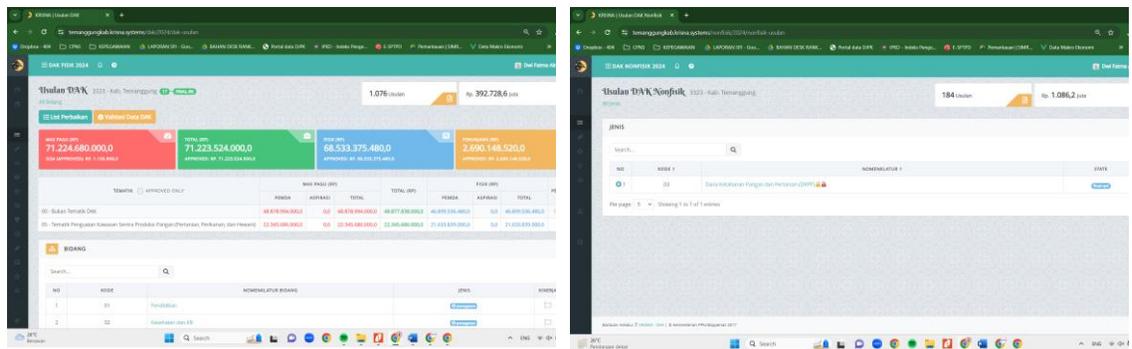
Selain *e-planning* dan *e-budgetting*, pemerintah Kabupaten Temanggung juga telah menerapkan *e-procurement*. *E-procurement* adalah suatu sistem yang digunakan untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang bertujuan untuk menjamin transparansi, mudah diakses informasinya dan memberikan rasa keadilan dalam pelaksanaannya. Sedangkan sistem aplikasi yang digunakan adalah menggunakan website yang disediakan oleh LKPP yang terdiri dari SIRUP dan LPSE yang saling terkoneksi. SIRUP sendiri merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat rencana pengadaan barang dan jasa secara elektronik sedangkan LPSE merupakan sistem pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Dengan penggunaan sistem SIRUP dan LPSE ini, semua kegiatan pengadaan barang dan jasa terpublikasikan secara transparan mulai dari proses perencanaan pengadaan sampai dengan pelaksanaannya.

Dalam rangka mendukung kinerja Pemerintah Nasional untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung menggunakan aplikasi SIPD P3DN dalam

melakukan pengadaan barang/Jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Temanggung. Untuk memaksimalkan upaya pemerintah daerah tersebut, maka dibuatlah Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang dicantumkan dalam SK bupati Nomor 530/60 Tahun 2022 dengan melibatkan berbagai Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Temanggung.

Dalam melaksanakan pengawasan P3DN maka Inspektorat dalam hal ini dibantu oleh Inspektur Pembantu IV *me-review* atas *sampling* terhadap paket pekerjaan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam pengadaan Barang/Jasa.

Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di Kabupaten Temanggung didukung dengan aplikasi KRISNA SELARAS. Dalam proses perencanaan penentuan lokpri Kabupaten Temanggung memperhatikan prioritas nasional baik untuk DAK Fisik dan DAK Non Fisik.



Sumber: Bappeda Kabupaetn Temanggung, 2024

Gambar 2.28
Screencapture KRISNA 2024 Kabupaten Temanggung

8) Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal

Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal pada tahun 2019-2023 mengalami peningkatan, karena telah diadakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan sistem informasi. Namun pada tahun 2021 terjadi sedikit penurunan dari tahun 2020. Oleh karena itu masih diperlukan peningkatan kemauan dan kemampuan bagi pengelola agar sistem informasi dapat berfungsi secara optimal.

Tabel 2.138
Persentase Sistem Informasi yang Berfungsi Optimal Kabupaten Temanggung, Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah sistem informasi yang berfungsi optimal	185	265	267	72	82
2	Jumlah sistem informasi	461	507	512	101	105
3	Persentase Sistem Informasi yang berfungsi optimal	40,13	52,27	52,15	71,29	71,29

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2024

Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal pada tahun

2019-2023 mengalami peningkatan, karena telah diadakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan sistem informasi. Namun demikian masih diperlukan peningkatan kemauan dan kemampuan bagi pengelola agar sistem informasi dapat berfungsi secara optimal.

Perubahan jumlah sistem informasi menyesuaikan dengan hasil evaluasi aplikasi yang pada dasarnya adalah duplikasi atas satu aplikasi menjadi beberapa aplikasi sesuai jumlah lembaga pengguna. Hal ini sama dengan penyesuaian pada indikator sistem informasi yang terintegrasi

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Gambaran kinerja bidang urusan koperasi, UKM dan perdagangan di Kabupaten Temanggung periode tahun 2019-2023 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.139
Gambaran Urusan Koperasi, UKM dan Perdagangan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Koperasi Sehat	%	8,72	5,95	7,35	15,09	28,18
2	Prosentase usaha mikro yang naik kelas	%	n.a	0,012	0,035	0,0148	0,0207
3	Persentase koperasi aktif	%	12,99	13,81	22,86	27,47	28,82
4	Persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi	%	24,97	21	3,98	100	43,98
5	Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif	%	na	na	57,35	89,14	80,65
6	Prosentase usaha mikro aktif	%	na	32,20	33,07	100,00	100,00
7	Persentase Usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha	%	0	0	0,93	1,40	1,58

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab, Temanggung 2024

Persentase penambahan nilai aset koperasi pada tahun 2023 tercapai sebesar 43,98%. Perhitungan penambahan nilai aset koperasi tersebut berdasarkan pada nilai aset koperasi aktif dan melaporkan RAT selama 3 tahun terakhir. Untuk penghitungan capaian kinerjanya menggunakan koperasi yang aktif.

Persentase Usaha Mikro aktif di Kabupaten Temanggung mulai tahun 2022 hingga tahun 2023 adalah sebesar 100%. Mengalami peningkatan

dibanding tahun 2021 karena pelaku usaha sudah bisa bisa bangkit menjalankan produksinya kembali dengan adanya kegiatan UMKM di berbagai event dan program Bantuan Presiden bagi Usaha Mikro (BPUM) tahun 2020 dan 2021 sehingga bisa menambah modal usaha para pelaku UMKM untuk bangkit dan memulai kembali usahanya. Data UMKM aktif diperoleh dari pendataan Sistem Informasi Data Tunggal Tahun 2022 dengan menggunakan aplikasi SIDT KU MKM data sampai dengan bulan Desember 2022.

Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha merupakan indikator baru, pelaksanaannya dimulai pada Tahun 2021 triwulan 2, yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan atau perkembangan usaha para pelaku UMKM. Fasilitasi pengembangan usaha antara lain pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada para pelaku UMKM baik itu pelatihan yang bersumber dari dana APBN Pusat, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten. Fasilitasi pengembangan usaha antara lain pelatihan membatik, pelatihan barista kopi, pelatihan furniture, pelatihan kerajinan hantaran, pelatihan kemasan, pelatihan pemasaran baik secara *offline* maupun *online*, pelatihan digitalisasi produk, pelatihan tata boga, fasilitasi sertifikasi (merk, halal, Pirt). Tahun 2022 baru dilaksanakan pelatihan Optimalisasi Bisnis dan *Start Up* bagi Wirausaha Baru atau pemula, pelatihan design produk dan inovasi produk, serta pelatihan manajemen keuangan.

Diharapkan setelah diberikan pelatihan-pelatihan para pelaku usaha bisa meningkatkan kreatifitasnya dalam berproduksi misalkan diversifikasi produk, Bisa memasarkan produknya secara *online* maupun *offline*.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Perekonomian daerah dapat menjadi modal pembangunan daerah serta mewujudkan tujuan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perekonomi secara makro ditunjang oleh adanya usaha yang dilakukan oleh masyarakat sehingga bisa meningkatkan investasi dan penyerapan investasi. Hal ini diperlukan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Tabel 2.140
Gambaran Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kemudahan Berusaha	Angka	n.a	n.a	78	82	82
2	Nilai Realisasi Investasi	Milyar	375,6	1,245,66	1,496,68	1,836,01	2000,79
3	Persentase tersedianya kajian teknis potensi	%	18,75	28,13	28,13	28,13	28,13

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
	investasi						
4	Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih	%	100	0	44,19	100,00	100,00
5	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	%	60	60	60	100	100
6	Persentase pelayanan perizinan online	%	46,2	98,48	98,35	98,09	100
7	Persentase perijinan yang bebas calo	%	100	100	100	100	100
8	Persentase perizinan yang diterbitkan Tepat waktu	%	81,21	96,20	100	100	100
9	Persentase kesesuaian Pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	%	100	93,37	93,53	100	100
10	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100
11	Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Penanaman Modal Kab, Temanggung, 2024

Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 tidak dapat ditampilkan Indeks Kemudahan Berusaha dikarenakan memang tidak pernah dilakukan pengukuran Indeks Kemudahan Berusaha, Indeks Kemudahan Berusaha merupakan indikator baru, dan baru dapat dilaksanakan pengukuran pada triwulan 4 Tahun 2021 dengan hasil yang diperoleh adalah 78, angka tersebut sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023 target Indeks Kemudahan Berusaha masih menggunakan capaian tahun 2022 yaitu sebesar 82, hal ini disebabkan karena Indeks Kemudahan Berusaha masih dalam proses pengukuran.

Dari tahun ke tahun realisasi investasi mengalami kenaikan. Hal tersebut merupakan upaya bersama pemerintah Kabupaten Temanggung dalam melakukan kemudahan akses berinvestasi baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Realisasi investasi berdasarkan pencatatan realisasi investasi bidang usaha baru tahun berjalan yang tercatat di sistem OSS Pusat berdasarkan notifikasi perizinan.

Kegiatan pengkajian teknis investasi sampai dengan tahun 2020 telah terlaksana 9 kajian. Pada tahun 2021 dan 2022 kegiatan kajian teknis investasi tidak dilaksanakan karena keterbatasan SDM dan adanya refocusing anggaran. Sedangkan pada tahun 2020 dilaksanakan 9 Kajian Teknis Potensi Investasi yaitu potensi investasi terkait bawang putih, Bukit Wagir Bawang, Curug Surodipo, Kawasan Wisata Bejen Tretep Wonobojo, Bukit Kembang Arum, UMKM Desa Bansari, Rest Area Pringsurat, Pengembangan Kawasan Kledung.

Kegiatan pelayanan perizinan *online* pada tahun 2020 sebesar 91,60%. Kecenderungan perizinan *online* dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 meningkat karena selain perizinan berusaha yang melalui OSS juga ada perizinan selain izin berusaha yaitu melalui aplikasi *Sicantik Cloud* yang terus diusahakan penyempurnaan aplikasinya dengan tahapan pembuatan format izin yang belum pernah diterbitkan bisa dilayani secara *online*. Sedangkan dari tahun 2021 kegiatan perizinan secara *online* sudah terlayani langsung oleh sistem.

Pada tahun 2020 pelaksanaan perizinan mencapai 93,37%, hal ini disebabkan karena ada IMB yang ditetapkan di akhir bulan Desember, sementara kegiatan diakhir tahun sudah tidak ada. Selanjutnya dalam rangka pengawasan dan pengendalian untuk izin yang telah diterbitkan akan diverifikasi lapangan di tahun berikutnya. Pada tahun 2021 kesesuaian perizinan terutama IMB baru mencapai 93,53%, hal ini dikarenakan dari 170 permohonan terdapat 11 permohonan yang tidak sesuai dengan pengajuan izin serta belum ada kesadaran masyarakat atau kurangnya sosialisasi Perda Nomor 11 tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2022 telah dilaksanakan Pengawasan dan Pengendalian terhadap 164 izin yang diterbitkan, dari 164 izin yang telah diterbitkan tersebut kondisi di lapangan sesuai dengan izin yang diajukan. Pada tahun 2023 triwulan IV baru dilaksanakan pemantauan terhadap 130 PBG dan kesemuanya sudah sesuai dengan peruntukannya.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Indikator-indikator Indek pembangunan pemuda terdiri dari pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan dan lapangan kerja, kepemimpinan dan partisipasi, serta gender dan diskriminasi.

Tabel 2.141
Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Variabel	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendidikan Dasar	3,50	3,00	4,00	4,00	4,00
2	Lapangan kerja dan kesempatan kerja	2,50	2,50	3,00	3,50	3,50
3	Partisipasi dan kepemimpinan	3,33	3,67	4,00	4,00	4,00
4	Gender dan diskriminasi	3,67	4,67	4,67	4,67	4,67
5	Kesehatan dan kesejahteraan	3,75	3,50	3,25	3,75	3,75
	Rata-rata	3,35	3,57	3,78	3,98	3,98

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel di atas disajikan hasil perhitungan 14 sub variabel data Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Temanggung Tahun 2022, hasil kerjasama Bappeda Kabupaten Temanggung dengan P5 Undip. Capaian IPP

pada tahun 2023 masih menggunakan capaian tahun 2022. Faktor penghambat dari penghitungan IPP yaitu belum tersedianya data yang akurat dan valid tentang data kepemudaan, sehingga upaya yang dapat dilakukan yaitu melakukan penyusunan data base tentang kegiatan kepemudaan, informasi data kepemudaan.

Tabel 2.142
Gambaran Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Angka	n,a	n,a	3,31	2,97	2,97
2	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	62,96	96,43	93,10	92,86	93,10
3	Persentase pelatih olahraga bersertifikat	%	54,31	56,06	100	96,43	96,43
4	Persentase prestasi olahraga	%	46,51	54,29	21,62	70	70
5	Persentase atlet berprestasi	%	70,43	63,66	46,81	83,19	83,19
6	Persentase gugus depan yang aktif	%	n,a	n,a	80,61	100	100

Sumber: Dindikpora Kab, Temanggung, 2024

Dari tabel tersebut urusan kepemudaan dan olahraga pada tahun 2023 masih banyak indikator yang menggunakan capaian tahun 2022, namun capaian tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung mendukung tugas Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dalam melakukan pembinaan pemuda serta keolahragaan baik dilingkup sekolah maupun diluar sekolah.

Adapun masalah dalam ketercapaian Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) yaitu masih adanya keterbatasan sarana dan prasaran yang sesuai dengan standar minimal dan pelatih yang berkompeten, tidak terdatanya atlit temanggung yang mengikuti lomba atau event yang diikuti. Sehingga upaya yang dapat dilakukan yaitu pembibitan atlit dari usia dini, peningkatan kompetensi pelatih, peningkatan kualitas sarpras pendukung olahraga, penerimaan atlit temanggung ke turnamen dan kejuaraan yang memiliki penghargaan dan terdatanya atlit perprestasi di kabupaten temanggung melalui informasi atlet yang akurat.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Tersedianya data statistik yang menggambarkan kondisi makro daerah sangat penting untuk kemajuan daerah, karena data tersebut digunakan sebagai bahan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah.

Ketersediaan data-data tersebut didukung dengan adanya data statistik sektoral yang menjadi kewenangan pemerintah daerah serta data statistik dasar yang menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS).

Tabel 2.143
Gambaran Urusan Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Data makro yang tersedia	-	5	5	7	5	5
2	Kebutuhan data makro	-	5	5	7	5	5
3	Cakupan ketersediaan data makro daerah Berusaha	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab, Temanggung, 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa cakupan ketersediaan data makro pada tahun 2023 Triwulan-4 sudah tercapai 100%. pada tahun 2023 ini terdapat 5 (lima) data makro daerah yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Ketimpangan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia. Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per Kapita dan Indeks Ketimpangan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia merupakan perhitungan yang dilakukan di tahun berikutnya karena merupakan indikator makro yang dihitung periode satu tahun penuh.

Faktor pendorong capaian kinerja Cakupan ketersediaan data makro daerah adalah sinergitas kerja sama Dinkominfo dan BPS Temanggung dan ketersediaan data disetiap OPD dilingkup Pemkab Temanggung.

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja diatas adalah dengan melakukan komunikasi dan koordinasi secara berkelanjutan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Temanggung selaku pemegang kewenangan pelaksanaan statistik dasar dilingkup Kabupaten Temanggung.

Adapun detail ketersediaan data makro Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.144
Detail Ketersediaan Data Makro Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No	Jenis Data	Tahun	
		2022	2023
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	tersedia	tersedia
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	tersedia	tersedia
3	Pertumbuhan Ekonomi	tersedia	tersedia
4	Pendapatan per kapita	tersedia	tersedia
5	Persentase Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	tersedia	tersedia
	TOTAL	tersedia	tersedia

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2024

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Dalam menyelenggarakan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), faktor keamanan informasi merupakan aspek yang sangat penting diperhatikan, mengingat kinerja tata kelola TIK akan terganggu jika informasi sebagai salah satu objek utama mengalami masalah keamanan informasi yang menyangkut kerahasiaan, keutuhan, dan kesediaan. Untuk mendapatkan gambaran kondisi kesiapan dan kematangan keamanan informasi dilakukan melalui evaluasi Indeks Keamanan Informasi (KAMI), dengan tujuan mengetahui kekurangan manajemen keamanan sistem informasi di pemerintahan dan merumuskan rekomendasi perbaikannya. Hal ini terbukti dengan telah disahkan Peraturan Presiden no. 82 tahun 2022 Tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital yang menjadi pedoman untuk tata Kelola keamanan informasi di Pemerintah Daerah.

Sedangkan indikator kinerja urusan persandian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.145
Gambaran Urusan Persandian di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan dan penilaian resiko	3	4	7	4	2
2	Jumlah sistem elektronik	461	507	512	100	104
3	Tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan resiko keamanan informasi	0,65	0,79	1,37	4,00	1,92

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan resiko keamanan informasi mulai tahun 2018. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan Security Assessment melalui kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan mandiri.

Faktor Pendorong Pencapaian target Pengelolaan resiko keamanan informasi adalah adanya kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara serta Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan Assessment Keamanan Informasi di kabupaten Temanggung dengan Anggaran dari BSSN dan Provinsi Jawa Tengah.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kerawanan keamanan informasi adalah dengan cara mengurangi aplikasi yang tidak terpakai untuk dinonaktifkan sehingga dapat mengurangi celah kerawanan terhadap data center yang ada.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. IPK merupakan instrumen disusun Kemendikbud bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Indeks ini diperlukan untuk mengukur pencapaian pembangunan kebudayaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. IPK bukan mengukur nilai budaya, tetapi lebih memotret pencapaian pembangunan kebudayaan di wilayah tersebut. Dengan mengetahui pencapaian pembangunan kebudayaan, maka setiap pemerintah daerah dapat menentukan arah kebijakan agar dapat menaikkan pencapaian pembangunan kebudayaan di wilayah masing-masing. Secara keseluruhan capaian kinerja urusan kebudayaan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.146
Gambaran Urusan Kebudayaan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	%	n,a	n,a	3,31	3,67	3,67
2	Persentase kelompok Budaya yang produktif	%	0	0	125,61	125,61	125,61
3	Persentase kelompok kesenian yang produktif	%	45,16	18,63	28,98	31,71	47,14
4	Persentase pelestarian Sejarah Lokal	%	0,03	2,64	2,64	6,61	7,05
5	Persentase Pelestarian Cagar Budaya	%	3,63	3,63	3,63	5,18	5,18

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Temanggung, 2024

Persentase kelompok seni yang produktif yang di hitung capaiannya adalah kelompok seni yang terfasilitasi mulai tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2023 terdapat penambahan 175 kelompok budaya sehingga presentase kelompok seni budaya yang produktif mengalami kenaikan dari tahun 2022 yaitu dari 31,71 menjadi 47,14. Kelompok kesenian yang terfasilitasi sampai dengan tahun 2023 diberikan kepada 430 kelompok seni di Temanggung.

Berdasarkan tabel capaian di atas, indikator program dalam Urusan Kebudayaan mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah

Kabupaten Temanggung mendukung upaya pemerintah pusat dalam memajukan menjaga kelestarian kebudayaan khususnya budaya lokal Kabupaten Temanggung.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Kinerja perpustakaan selama periode lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Gambaran kinerja perpustakaan di Kabupaten Temanggung periode 2019 sampai dengan 2023 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.147
Gambaran Urusan Perpustakaan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Peminjam di Perpustakaan	%	77,78	78,88	75,38	86,13	83,43
2	Persentase Pertumbuhan Jumlah Pengunjung Perpustakaan	%	20,57	-6,51	-60,70	1009,05	41,79
3	Persentase Perpustakaan yang aktif	%	36,83	39,41	39,46	97,68	56,68
4	Cakupan naskah kuno Kabupaten Temanggung dan koleksi nasional yang dilestarikan	%	n,a	n,a	0,039	99,12	100

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung, 2024

Persentase Peminjam Perpustakaan di Kabupaten Temanggung selama 6 (enam) tahun cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018 sebesar 89,37% di tahun 2019 turun menjadi 77,78% dan naik kembali di tahun 2020 menjadi 78,88%. Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 75,38% kemudian Tahun 2022 mengalami kenaikan dan mencapai mencapai 86,13% dari target sebesar 80%. Sedangkan pada tahun 2023 mencapai 83,43%, capaian ini sudah melebihi dari target yang ditetapkan, akan tetapi masih diperlukan upaya-upaya lebih intensif untuk lebih meningkatkan layanan sirkulasi bahan pustaka. Faktor penghambat indikator persentase peminjam perpustakaan di Kabupaten Temanggung yaitu karena rendahnya keinginan meminjam buku di perpustakaan karena koleksi yang dimiliki tidak update sehingga kurang menarik bagi pemustaka, serta masih rendahnya SDM pengelola perpustakaan (belum semua perpustakaan memiliki pengelola khusus yang memiliki kompetensi di bidang perpustakaan/Latar belakang pendidikan perpustakaan).

Indikator persentase pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan pada ahun 2023 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena dalam rumus perhitungan persentase, pembanding di dalam perhitungan menggunakan indikator pengunjung tahun lalu sehingga mengakibatkan persentase pertumbuhan jumlah pengunjung yang dicapai sampai dengan

akhir tahun 2023 hanya mencapai 41,79%. Upaya dan penanganan lebih lanjut agar supaya jumlah pengunjung lebih meningkat adalah sosialisasi Si Petak lebih menyeluruh kepada seluruh perpustakaan, menambah kegiatan pembinaan perpustakaan bagi pengelola perpustakaan, menambah kegiatan untuk meningkatkan minat baca, mengadakan kerja sama tukar pinjam koleksi antar perpustakaan, memperbanyak inovasi kegiatan pelibatan masyarakat di perpustakaan sehingga masyarakat lebih berminat untuk mengunjungi perpustakaan tidak hanya untuk membaca tetapi melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan literasi.

Indikator pertumbuhan perpustakaan aktif pada tahun 2023 mengalami penurunan capaian dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu tercapai sebesar 56,68%. Sedangkan upaya yang dilakukan berupa Mengadakan sosialisasi Si Petak, menambah kegiatan pembinaan perpustakaan bagi pengelola perpustakaan, menambah kegiatan untuk meningkatkan minat baca, mengadakan kerja sama tukar pinjam koleksi antar perpustakaan, memperbanyak kegiatan pelibatan masyarakat di perpustakaan.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Salah satu ukuran keberhasilan kinerja urusan kearsipan diukur melalui penghitungan Indeks manajemen kearsipan yang diperoleh dari hasil audit kearsipan eksternal yang dilakukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah terhadap Dinas Kearsipan dan Kabupaten Temanggung dan audit kearsipan internal yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung selaku Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Temanggung. Secara keseluruhan gambaran capaian kinerja urusan kearsipan di Kabupaten Temanggung periode 2019 sampai dengan tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.148
Gambaran Urusan Kearsipan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Manajemen Kearsipan	angka	65,44	65,44	54,03	62,46	72,76
2	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	%	25,87	30,52	32,56	34,30	36,05
3	Persentase Arsip Vital Konvensional yang Dialihmediakan	%	n,a	10	20	40,08	50,08

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel tersebut urusan kearsipan di Kabupaten Temanggung tahun 2023 telah mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022.

Hal ini menunjukkan pengelolaan kearsipan semakin membaik setelah mengalami penurunan akibat pandemi covid yang menurunkan kinerja sektor di Temanggung. Arsip vital konvensional yang dialihmediakan sampai dengan tahun 2023 triwulan IV telah mencapai 100% yaitu 2.454 dokumen sertifikat tanah dari total 4.900 dokumen atau sebanyak 50,08% dari target 50%. Data dukung arsip (vital) konvensional yang sudah di alihmediakan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 yaitu aset milik Pemerintah Kabupaten Temanggung berupa BPKB sebanyak 1.561 dokumen dan sertifikat tanah sebanyak 893 dokumen. Metode tindakan alih media yang digunakan yaitu scanning.

2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Sektor perikanan di Kabupaten Temanggung terdiri dari budidaya perikanan dalam kolam yaitu ikan nila, ikan lele dan ikan mas, Perkembangan kinerja urusan perikanan selama periode lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Gambaran kinerja urusan perikanan di Kabupaten Temanggung periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.149
Gambaran Urusan Perikanan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	22,96	23,34	24,34	24,34	24,39
2	Produktivitas Ikan Nila	Kg/m ²	3,61	3,82	4,05	5,40	6,20
3	Produktivitas Ikan Lele	Kg/m ²	9,63	10,52	10,76	12,60	13,08
4	Produktivitas Ikan Mas	Kg/m ²	5,42	5,53	5,62	5,80	6,00
5	Persentase nelayan perairan umum yang terbina	%	n,a	n,a	12,48	43,58	36,70
6	Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	%	n,a	n,a	222	100	45,00
7	Persentase tersedianya data dan informasi produksi olahan hasil perikanan	%	n,a	n,a	100	100	100

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel di atas secara keseluruhan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan mengalami kondisi yang fluktuatif. Indikator yang mengalami penurunan adalah sebagai berikut :

- a. Persentase nelayan perairan umum yang terbina mengalami penurunan dikarenakan tidak adanya anggaran khusus untuk sosialisasi dimaksud dan hanya bisa dilaksanakan pada saat penebaran benih ikan di perairan umum;
- b. Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan mengalami penurunan dikarenakan Keterbatasan ketersediaan benih untuk ditebar di

perairan umum.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan di Kabupaten Temanggung memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan didukung oleh keberagaman daya tarik wisata yang ada yaitu alam, budaya dan buatan.

Tabel 2.150
Capaian kinerja Urusan Pariwisata di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	1,62	0,50	1,53	1,53	1,53
2	Persentase obyek wisata yang berkembang	%	25,00	30,56	32,29	34,00	42,00
3	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	%	12,30	-64,85	12,62	80,96	26,78
4	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1	1	1	1	1
5	Persentase Peningkatan Desa Wisata	%	6,39	6,57	7,27	8,65	12,03
6	Persentase desa wisata naik klasifikasi	%	6,39	89,47	80,95	73,91	60,71
7	Persentase Peningkatan pelaku Ekraft	%	6,39	na	6,32	9,90	9,91

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel di atas secara keseluruhan capaian kinerja urusan pariwisata mengalami kondisi yang fluktuatif. Pertumbuhan jumlah wisatawan dari tahun 2022-2023 mengalami penurunan. Lama tinggal wisatawan hanya 1 (satu) hari, hal ini disebabkan karena data yang dihimpun dari hotel baik bintang maupun non bintang yang ada di Kabupaten Temanggung bila di rata-rata hanya 1 hari.

Persentase desa wisata tahun 2019-2023 meningkat disebabkan karena animo dan kesadaran masyarakat terhadap manfaat keberadaan Desa Wisata meningkat. Melalui Desa Wisata diharapkan bias meningkatkan ekonomi lokal/daerah dan berpotensi meningkatkan pendapatan. Persentase desa wisata naik klasifikasi mengalami penurunan karena mekanisme assesment desa wisata dilakukan setiap 4 tahun sekali sesuai perundang undangan, yang mengakibatkan jumlah desa wisata naik klasifikasi hanya 4 tahun sekali. Pada Tahun 2023 jumlah desa wisata bertambah sebanyak 5 desa wisata sedangkan desa yang naik klarifikasi masih tetap dengan Tahun 2022 yaitu 17 desa.

Tabel 2.151
Data Potensi Wisata/Daya Tarik Wisata
Di Kabupaten Temanggung

No	Nama DTW	Kategori	Alamat (Desa/Kelurahan, Kecamatan)	Kecamatan	Keterangan (Berkembang)
1	2	3	4	5	6
1	Gardu Pandang Bansari	Alam	Ds. Mranggen Kidul	Bansari	✓

No	Nama DTW	Kategori	Alamat (Desa/Kelurahan, Kecamatan)	Kecamatan	Keterangan (Berkembang)
1	2	3	4	5	6
2	Banyu Ciblon Lestari (BCL)	Buatan	Ds. Tlogowero	Bansari	✓
3	Sidengok	Alam	Ds. Mranggen Kidul,	Bansari	
4	Sindoro Waterpark	Buatan	Ds. Rejosari	Bansari	
5	Goa Lawa	Alam	Ds. Ngaliyan	Bejen	
6	Curug Onje	Alam	Ds. Duren	Bejen	
7	Perkebunan Bojongrejo	Alam	Ds. Bejen	Bejen	
8	Bukit Kembang Arum	Alam	Ds. Prangkokan	Bejen	✓
9	Bejen Forest Park	Alam	Ds. Bejen	Bejen	✓
10	Desa Wisata Cepit Pagergunung	Desa Wisata	Ds. Pagergunung	Bulu	✓
11	Goa Wonotirto	Alam	Ds. Tritis, Wonotirto	Bulu	
12	Monumen Meteorit	Buatan	Ds. Wonotirto	Bulu	✓
13	Situs Gondosuli	Budaya	Ds. Gondosuli	Bulu	
14	Watu Wayang	Alam	Ds. Gondosuli	Bulu	
15	Pemandian Simpleng	Buatan	Ds. Gondosuli	Bulu	✓
16	Tuk Mulyo	Buatan	Ds. Pandemulyo	Bulu	✓
17	Curug Guwung	Alam	Ds. Gunungpayung	Candirotto	
18	Desa Wisata Gunungpayung	Desa Wisata	Ds. Gunungpayung	Candirotto	
19	Makam R. Trenggono kusumo	Budaya	Ds. Muneng	Candirotto	
20	Sibajak Green Canyon	Buatan	Ds. Canggal	Candirotto	✓
21	Curug Lawe	Alam	Ds. Muncar	Gemawang	
22	Perkebunan Gesing	Alam	Ds. Gesing	Kandangan	
23	Sigrowong	Alam	Ds. Gesing	Kandangan	
24	Perkebunan Rowoseneng	Alam	Ds. Ngemplak	Kandangan	
25	Embung Tuk Buntu/Tlogopucang	Buatan	Ds. Tlogopucang	Kandangan	
26	Watu Layah	Alam	Ds. Tlogopucang	Kandangan	
27	Watu Angkrik	Alam	Ds. Tlogopucang	Kandangan	
28	Embung Tlogopucang	Buatan	Ds. Tlogopucang	Kandangan	
29	Kampung Aren Tlogopucang	Buatan	Ds. Tlogopucang	Kandangan	
30	Pusat Ayam Cemani	Buatan	Ds. Kedu	Kedu	
31	Makam ki Ageng Makukuhan	Budaya	Ds. Kedu	Kedu	✓
32	Desa Wisata Kedu	Desa Wisata	Ds. Kedu	Kedu	
33	Desa Wisata Makukuhan	Desa Wisata	Ds. Kedu	Kedu	
34	Pasar Papringan	Buatan	Ds. Ngadimulyo	Kedu	✓
35	Dupu Dupu	Buatan	Ds. Kedu	Kedu	
36	Pemandian Cahaya Langgeng	Buatan	Ds. Bojonegoro	Kedu	✓
37	Watu Mlongso	Alam	Ds. Tlahab	Kledung	
38	Sedadap	Alam	Ds. Kwadungan Gunung	Kledung	✓
39	Wisata Alam Posong	Alam	Ds. Tlahap	Kledung	✓

No	Nama DTW	Kategori	Alamat (Desa/Kelurahan, Kecamatan)	Kecamatan	Keterangan (Berkembang)
1	2	3	4	5	6
40	Watukelir	Alam	Ds. Kwadungan Gunung	Kledung	
41	Embung Kledung	Buatan	Ds. Kledung	Kledung	✓
42	Pendakian Gunung Sindoro	Alam	Ds. Kledung	Kledung	✓
43	Rest Area Kledung	Buatan	Ds. Kledung	Kledung	✓
44	Desa Wisata Tlahap	Desa Wisata	Ds. Tlahap	Kledung	
45	Sidengkeng	Alam	Ds. Petarangan	Kledung	
46	Taman Posong	Buatan	Ds. Tlahab	Kledung	✓
47	Curug Goa Lawa	Alam	Ds.Purwosari	Kranggan	
48	Curug Kreo	Alam	Ds.Purwosari	Kranggan	
49	Curug Watu Wayang	Alam	Ds.Purwosari	Kranggan	
50	Curug Dadap	Alam	Ds.Purwosari	Kranggan	
51	Curug Grenjeng	Alam	Ds.Purwosari	Kranggan	
52	Desa Wisata Purwosari	Desa Wisata	Ds.Purwosari	Kranggan	
53	Desa Wisata Ngropoh	Desa Wisata	Ds Ngropoh	Kranggan	✓
54	Embung Abimanyu	Buatan	Ds Ngropoh	Kranggan	
55	Wisata Alam Jumprit (Wapit)	Alam	Ds Tegalrejo	Ngadirejo	✓
56	Mata Air Jumprit	Alam	Ds Tegalrejo	Ngadirejo	✓
57	Desa Wisata Tegalrejo	Desa Wisata	Ds Tegalrejo	Ngadirejo	
58	Desa Wisata Banyu Suci	Budaya	Ds Tegalrejo	Ngadirejo	
59	Situs Liyangan	Budaya	Ds Purbosari	Ngadirejo	✓
60	Desa Wisata Liyangan	Desa Wisata	Ds. Purbosari	Ngadirejo	
61	Candi Pringapus	Budaya	Ds. Pringapus	Ngadirejo	✓
62	Endong Sewu	Budaya	Ds. Pringapus	Ngadirejo	
63	Alam Sewu	Alam	Ds. Giripurno	Ngadirejo	✓
64	Sindumoyo	Alam	Ds. Katekan	Ngadirejo	
65	Kolam Cinta Liyangan	Buatan	Ds. Purbosari	Ngadirejo	✓
66	Sendang Sengon	Buatan	Ds. Banjarsari	Ngadirejo	✓
67	Desa Wisata Traji	Desa Wisata	Ds. Traji	Parakan	
68	Sendang Sidhukun	Alam	Ds. Traji	Parakan	
69	Wisata Tirto Aji	Budaya	Ds. Traji	Parakan	
70	Curuk Krecek Getas	Alam	Ds. Getas	Kaloran	✓
71	Pasar Buah Pringsurat	Buatan	Ds. Pingit	Pringsurat	
72	Rest Area dan Pasar Buah	Buatan	Ds. Ngipik	Pringsurat	
73	Desa Wisata Soropadan	Desa Wisata	Ds. Soropadan	Pringsurat	
74	Hutan Walitis	Alam	Ds. Tanggulanom	Selopampang	✓
75	Taman Kali Progo	Buatan	Kel Madureso	Temanggung	✓
76	Monumen Bambang Soegeng	Buatan	Kel Madureso	Temanggung	
77	Taman Kartini	Buatan	Kel Kowangan	Temanggung	✓
78	Pikatan Water Park	Buatan	Ds. Mudal	Temanggung	✓

No	Nama DTW	Kategori	Alamat (Desa/Kelurahan, Kecamatan)	Kecamatan	Keterangan (Berkembang)
1	2	3	4	5	6
79	Curug Titang	Alam	Ds. Nampirejo	Temanggung	
80	Pasar Curug Thitang	Buatan	Ds. Kethitang	Temanggung	✓
81	Pemandian Tirta Asri	Buatan	Kel Kowangan	Temanggung	✓
82	Desa Wisata Menggoro	Desa Wisata	Ds. Menggoro	Tembarak	
83	Masjid Menggoro	Budaya	Ds. Menggoro	Tembarak	✓
84	Makam Kyai Pahing	Budaya	Ds. Menggoro	Tembarak	
85	Wisata Gunung Sumbing	Alam	Ds. Legoksari	Tlogomulyo	
86	Pesona Wagir Bawang	Alam	Ds. Simpar	Tretep	✓
87	Pemandian Tlogowangi	Buatan	Ds. Tlogowangi	Tretep	
88	Embung Pelangi	Buatan	Ds. Nglarangan	Tretep	
89	Wates Pas	Alam	Ds. Wates	Tretep	
90	Ekowisata Cemoro	Buatan	Ds. Cemoro	Wonoboyo	
91	Curug Surodipo/ Trocoh	Alam	Ds. Tawang Sari,	Wonoboyo	
92	Desa Wisata Tawang Sari	Desa Wisata	Ds. Tawang Sari	Wonoboyo	
93	Curug Ponco Tunggal & Pendakian Sigandul	Alam	Ds. Cemoro	Wonoboyo	
94	Puncak Botorono	Alam	Ds. Petarangan	Kledung	✓
95	Sigandul View	Alam	Ds. Kwadungan Jurang	Kledung	✓
96	Pengilon Edupark	Alam	Ds. Pengilon	Bulu	✓
97	Kledung Park	Alam	Ds. Kledung	Kledung	✓
98	Kolam Renang Tuk Segaran	Buatan	Ds. Tembarak	Tembarak	✓
99	Rowo Gembongan	Alam	Ds. Tegowanuh	Kaloran	✓
100	Gardu Pandang Bansari	Buatan	Ds. Mranggen Kidul	Bansari	✓

Sumber : Dinbudpar Kabupaten Temanggung, 2024

3. Urusan Pemerintah Bidang Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor dengan kontribusi terbesar kedua setelah industri pengolahan dalam perekonomian daerah Kabupaten Temanggung. Sektor pertanian menjadi tumpuan mata pencaharian mayoritas penduduk Kabupaten Temanggung dan sebagai penyedia bahan pangan masyarakat, sehingga urusan bidang pertanian ini perlu mendapatkan perhatian khusus untuk mewujudkan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Temanggung.

Tabel 2.152

Gambaran Kinerja Urusan Pertanian di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat ketersediaan energy perkapita (standard nasional 2400)	kkal/kapita/hari	2.576	2.271	2.934	3.198	3.113

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
2	Tingkat ketersediaan protein perkapita (standard nasional 63)	kkal/kapita/hari	130,02	124,99	62,59*	83,19	76,75
3	Tingkat Ketersediaan lemak perkapita (Standart nasional 37, minimal 25% dari tingkat konsumsi protein)	kkal/kapita/hari	na	na	79	64,66	63,63
4	Peningkatan produktifitas Padi	kwintal/ha	6,4	5,9	5,9	6,315	6,346
5	Peningkatan produktifitas Jagung	kwintal/ha	5,08	4,9	4,5	4,6	4,6
6	Peningkatan produktifitas Ubi Kayu	kwintal/ha	27,12	32,91	32,912	34,00	33,96
7	Produktivitas Bawang Putih	kwintal/ha	7,91	6,58	6,51	6,91	7,14
8	Produktivitas Bawang Merah	kwintal/ha	8	7,36	7,14	8,10	7,66
9	Produktivitas Cabai Rawit	kwintal/ha	6,66	6,97	6,98	7,63	7,60
10	Produktivitas Cabai Besar	kwintal/ha	7,25	7,21	7,05	7,90	7,75
11	Produktivitas Tembakau	kwintal/ha	0,68	0,678	0,688	0,668	0,656
12	Produktivitas Kopi Robusta	kwintal/ha	0,69	0,67	0,71	0,69	0,65
13	Produktivitas Kopi Arabika	kwintal/ha	0,617	0,62	0,611	0,59	0,57
14	Produktifitas Cengkeh	kwintal/ha	0,326	0,302	0,232	0,417	0,283
15	Produktifitas Vanili	kwintal/ha	0,258	0,209	0,293	0,302	0,296
16	Produktivitas ternak sapi (data RPH dan qurban)	Kg/Ekor	176,80	177	177,20	177,40	177,60
17	Produktivitas ternak domba	Kg/Ekor	13,67	13,68	13,69	13,70	13,71
18	Produktivitas ternak kambing	Kg/Ekor	13,67	13,68	13,69	13,70	13,71
19	Produktivitas ternak ayam pedaging	Kg/Ekor	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
20	Produktivitas ternak ayam petelur	Kg/Ekor	10,88	10,88	10,26	10,35	10,88
21	Produktivitas ternak ayam buras	Kg/Ekor	0,69	0,70	0,70	0,70	0,70
22	Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	%	na	na	76,64	79,15	79,15
23	Persentase penanganan penyakit hewan	%	na	na	96,68	100	97,26
24	Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	60	84,298	82,96	100	82,10
25	Persentase pengendalian bencana pertanian	%	na	na	41,2	41,45	40,30
26	Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	0,59	0,68	0,81	1,03	1,48

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel di atas, Ketersediaan Energi per Kapita di kabupaten Temanggung cenderung fluktuatif. Menurut Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan untuk Kabupaten/Kota (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No,65/Permentan/OT.140/12/2010) standar ketersediaan energi minimal adalah 90% dari 2,400 kkal/hari bagi setiap penduduk, dengan asumsi kebutuhan standar kalori untuk beraktifitas secara normal adalah adalah 2,100 kkal. Dengan demikian capaian ketersediaan energi untuk Kabupaten Temanggung telah memenuhi, bahkan melampaui standar pelayanan minimal yang berlaku. Penurunan capaian kesediaan

energi per Kapita pada tahun 2023 dikarenakan tingkat produksi sumber energi dipengaruhi oleh iklim, budaya masyarakat, pola konsumsi.

Ketersediaan protein per kapita di kabupaten Temanggung cenderung mengalami kondisi yang fluktuatif. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2021 yang disebabkan menurunnya ketersediaan protein nabati akibat luas tanam pangan serealia (padi dan jagung) berkurang dan adanya serangan hama, Pada sektor ketersediaan protein hewani, berkurangnya ketersediaan disebabkan penurunan produksi ikan, ternak serta penurunan produksi telur.

Ketersediaan lemak perkapita mengalami penurunan dikarenakan tingkat produksi lemak dipengaruhi oleh iklim, budaya masyarakat, pola konsumsi.

Produktifitas Ubi Kayu mengalami penurunan dikarenakan adanya serangan hama penyakit tanaman, tanaman rusak karena kondisi cuaca/iklim dan sarpras pertanian yang perlu ditingkatkan (benih, pupuk, ketersediaan air).

Produktivitas tanaman pangan (padi dan bawang putih) cenderung meningkat di tahun 2023, peningkatan ini didorong oleh berbagai bentuk kegiatan fasilitasi pemerintah guna meningkatkan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam melaksanakan budidaya tanaman pangan, mendorong masyarakat untuk meningkatkan penggunaan benih unggul serta gerakan pengendalian hama dan penyakit tanaman secara terpadu.

Produktivitas beberapa jenis tanaman hortikultura pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2022, terutama pada komoditas tanaman bawang merah dan cabai. Hal ini dikarenakan factor cuaca terutama curah hujan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan serangan penyakit pada tanaman hortikultura.

Rata-rata produktivitas tanaman perkebunan di kabupaten Temanggung cenderung terjadi fluktuasi. Pada komoditas tembakau terjadi penurunan produktifitas dibanding tahun sebelumnya. Tanaman tembakau sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca baik pada masa tanam, saat panen maupun pasca panen. Selain itu, di tahun 2020 mengalami penurunan luasan karena pengaruh isu pabrik rokok mengurangi pembelian tembakau serta informasi harga beli tembakau yang belum pasti. Produktifitas tanaman kopi mengalami kondisi fluktuasi pada tiap tahunnya. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan produktifitas kopi diantaranya melalui pengembangan kopi dengan benih unggul yang berkualitas, peremajaan kopi yang sudah tua dengan cara penyambungan dengan benih entres yang

berkualitas dan bersertifikat, pelatihan budidaya, pemeliharaan dan pemangkasan kopi yang efektif dengan bimbingan lapang oleh penyuluh maupun sekolah lapang bagi kelompok tani. Produktifitas tanaman cengkeh juga mengalami kondisi yang fluktuatif, hal ini disebabkan banyaknya tanaman cengkeh yang mati karena serangan penyakit PBKc. Beberapa upaya telah dilakukan diantaranya melalui pelatihan pemanfaatan agensia hayati dalam penanggulangan penyakit PBKc serta bantuan pengadaan bibit tanaman cengkeh sebagai upaya penanaman baru tanaman yang mati. Mekanisasi pertanian berperan penting dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian.

Penanganan penyakit hewan pada Tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan obat hewan dan alat kesehatan hewan masih minim.

Pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan kurangnya sumber daya manusia di lapangan sehingga jangkauan pengawasannya kurang luas.

Pengendalian bencana pertanian juga mengalami penuruna karena terbatasnya pengetahuan petani dalam pengendalian OPT.

Kelembagaan petani juga merupakan salah satu permasalahan yang harus diperhatikan, Data 2021 kenaikan kelas kelompok sebesar 0,81% atau 22 kelompok tani dan pada tahun 2023 masih tercapai sebanyak 28 kelompok (1,03%) dari total kelompok tani yang terdaftar 2,709 karena masih menggunakan capaian tahun 2022. Peningkatan kualitas kelompok tani didorong oleh pembinaan dan pendampingan yang intensif oleh penyuluh pertanian dalam peningkatan kapasitas petani, penyelenggaraan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis bagi kelompok tani/Gapoktan dan peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani melalui sekolah lapang, Selain peningkatan kualitas kelompok tani, dalam aspek pengarahannya kelembagaan petani menjadi korporasi telah dilakukan yang ditandai dengan pendirian “Koperasi Tawon Sindoro Sumbing” di Kecamatan Bansari sebagai salah satu penunjang program food estate di Kabupaten Temanggung.

Produktivitas ternak potong di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023 mengalami kenaikan pada tiap tahunnya, walaupun rata-rata kenaikannya tidak cukup signifikan. Hal ini disebabkan populasi ternak di Kabupaten Temanggung cenderung pada posisi yang stagnan.

Persentase penanganan penyakit hewan merupakan salah satu indikator untuk mengukur fungsi kesehatan hewan. Penyakit yang sering

terjadi di Kabupaten Temanggung antara lain: cacangan, gangguan reproduksi, demam tiga hari/BEF, Newcastle Disease, Avian Influenza, Kembang, Malnutrisi, Toxoplasmosis, Diare, Fraktur, Luka, Scabies, dan lain-lain.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Sektor perdagangan menyumbang kontribusi terbesar ketiga setelah sektor pertanian dan sektor industri pengolahan dalam perekonomian daerah Kabupaten Temanggung, Pasar daerah merupakan salah satu penggerak sektor perdagangan di Kabupaten Temanggung. Dalam perkembangannya pasar daerah menghadapi persaingan dengan pasar modern yang mulai merebak, maka dari itu diperlukan peningkatan layanan pengelolaan pasar daerah dengan fokus kepada penyediaan sarana prasarana pasar, kebersihan pasar hingga ketertiban para pedagangnya, Kabupaten Temanggung memiliki 6 (enam) pasar daerah yaitu pasar Temanggung, pasar Parakan, pasar Ngadirejo, pasar Candirot, pasar Kranggan/Agro dan pasar Pingit.

Tabel 2.153
Gambaran Urusan Perdagangan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	20,35	20,14	20,14	20,14	20,79
2	Persentase Pasar daerah dalam kondisi baik	%	54	50	50	66,67	83,33
3	Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	%	28,55	29,12	29,59	62,28	70,34
4	Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar	%	70,05	98,71	64,45	105,58	107,19
5	Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan	%	18,7	18,46	13,17	53,27	60,88
6	Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi	%	66,57	66,30	69,32	98,08	74,79
7	Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB sector perdagangan	%	58,90	20,42	32,09	27,80	86,17
8	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	%	7,98	39,90	79,02	101,12	95,82

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kontribusi sektor perdagangan pada tahun 2019-2023 mengalami kondisi yang fluktuatif. Capaian kinerja urusan perdagangan tahun 2023 pada kinerja persentase pasar daerah dalam kondisi baik sebesar 83,33%, persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang 70,34%, realisasi pendapatan pasar telah mencapai 90,73 % yang terdiri dari pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar dan pendapatan dari sewa Barang milik Daerah (BMD). Sedangkan kinerja

persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan penting lainnya Tahun 2023 sebesar 74,79% yang diperoleh dari 4 (empat) pasar daerah yaitu pasar Temanggung, pasar Parakan, pasar Ngadirejo dan pasar Kranggan. Capaian indikator ini Tahun 2023 menurun dibandingkan Tahun 2022 dikarenakan tidak ada petugas khusus yang melakukan pemantauan harga. Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan sebesar 60,88%, Kontribusi nilai ekspor terhadap PRDB sektor perdagangan 2022–2023 mengalami kenaikan. Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena banyak anak timbangan yang tidak di tera ulang.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki peranan sebagai penggerak utama perekonomian Kabupaten Temanggung dan menempati urutan pertama dibandingkan dengan 17 lapangan usaha lainnya.

Tabel 2.154
Gambaran Urusan Perindustrian di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Kontribusi sector perindustrian terhadap PDRB	%	27,21	27,47	27,47	27,47	26,19
2	Presentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	%	n,a	n,a	18,46	64,62	70,46
3	Presentase Pembinaan Industri Penghasil Cukai	%	n,a	n,a	2,09	9,92	12,29

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, 2024

Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB tahun 2023 capaiannya menurun dibanding Tahun 2022 karena adanya penurunan jumlah industri pengolahan kayu di Kabupaten Temanggung dimana industri tersebut merupakan salah satu sektor industri utama di Kabupaten Temanggung.

Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menangani bidang perindustrian, hanya sebatas Industri Kecil Menengah (IKM) saja. Dan Sesuai RPIK Tahun 2021, fokus untuk menangani IKM produk unggulan daerah seperti tembakau, kopi, pengolahan kayu, gula aren, batik, sapu ijuk, batu bara, genteng dan furniture. Pada tahun 2023, jumlah IKM Unggulan Daerah yang telah terfasilitasi sebanyak 229 dari 325 IKM unggulan daerah dengan persentase sebesar 70,46%.

IKM Industri Tembakau di Kabupaten Temanggung jumlahnya sangat besar, yaitu sebanyak 3,580 unit usaha, namun hanya 2 unit usaha yang menghasilkan cukai. Sedangkan IKM tembakau yang sudah dibina sebanyak 355, sehingga pada tahun 2023 capaian kinerja presentase pembinaan industry penghasil cukai mengalami kenaikan menjadi 12,29%.

2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Fungsi Sekretariat Daerah

- 1) Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

Nilai EKPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 2.155
Nilai EKPPD Tahun 2019-2023

No	Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai	3,35	3,35	3,05	3,43	3,43
2	Kategori	ST	ST	Sedang	Tinggi	Tinggi
3	Kepmendagri	Piagam Penghargaan Kemendagri tanggal 25 April 2020	Piagam Penghargaan Kemendagri tanggal 25 April 2020	Piagam Penghargaan Kemendagri tanggal 29 April 2023	Kepmendagri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023	Kepmendagri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023
4	Tingkat	Nasional	Nasional	Nasional	Nasional	Nasional

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel di atas, Nilai EKPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 berada pada posisi nilai diatas 3 dengan kategori Sangat Tinggi (ST), hal ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Temanggung berkinerja tinggi berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

- 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan penilaian yang dilakukan oleh Kementrian PAN dan RB atas capaian kinerja instansi pemerintah yang akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah pada tahun berikutnya, SAKIP diimplementasikan secara Self Assesment oleh masing-masing instansi pemerintah daerah. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa Kabupaten Temanggung melakukan tahapan dalam sistem tersebut secara mandiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pemantauan dan pengendalian hingga menyampaikan pelaporan akuntabilitas kerjanya kepada Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan Peraturan Kementrian PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah bahwa, rumus penghitungan dari nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah penggabungan nilai dari 5 indikator yaitu perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (10%), capaian kinerja (20%).

Nilai AKIP Kabupaten Temanggung Tahun 2019 sampai 2023 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.156
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Nilai	Kategori
1	2019	60,16	B
2	2020	62,11	B
3	2021	63,84	B
4	2022	64,73	B
5	2023	65,17	B

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel di atas, Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Temanggung Tahun 2019 sampai Tahun 2023 cenderung meningkat dari 60,16 menjadi 65,17 dengan kategori B.

3) Indeks Reformasi Birokrasi

Data penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.157
Penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Nilai
1	2019	62,76
2	2020	62,70
3	2021	63,42
4	2022	64,61
5	2023	69,05

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Temanggung, 2024

Selain penilaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan secara mandiri juga telah dilakukan penilaian dari Kementrian PAN dan RB di tahun 2023 dengan hasil Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah **69,05** dengan kategori "B" terinci sebagai berikut:

Tabel 2.158
Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023

No.	Komponen	Nilai
1	RB General	62,13
2	RB Tematik	6,92
3	Total Nilai	69,05
4	Total Bobot RB General	100
5	Bobot RB General Penyesuaian	100
6	RB General Penyesuaian	62,13
Index RB		69,05

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Temanggung, 2024

4) Kompetensi Penyelenggara Pelayanan Publik

Untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung. Bagian Organisasi Setda setiap tahun telah melaksanakan survey PPID di seluruh Perangkat Daerah yang memiliki layanan langsung kepada masyarakat sebagai berikut:

Tabel 2.159
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019-2023

No	Tahun	Nilai
1	2019	79,95
2	2020	80,41
3	2021	82,06
4	2022	83,41
5	2023	84,97

Sumber : Bagian Ortala Setda Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Temanggung dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 menyatakan bahwa kinerja unit pelayanan dapat dikategorikan “baik”, dengan nilai yang tiap tahun naik, menandakan bahwa unit pelayanan selalu melaksanakan rekomendasi dan perbaikan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Pada tahun 2023, Kabupaten Temanggung telah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara mandiri terhadap Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh 65 unit pelayanan, sebagaimana berikut:

Tabel 2.160
Nilai IKM Unit Pelayanan di Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No.	Unit Pelayanan	Tahun 2023		Ket
		IKM Unit Pelayanan	Mutu	
1	Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga	88,65	A (Sangat Baik)	
2	Dinas Kesehatan	92,75	A (Sangat Baik)	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	85,26	B (Baik)	
4	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	81,86	B (Baik)	
5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	76,61	B (Baik)	
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	92,51	A (Sangat Baik)	
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	86,83	B (Baik)	
8	Dinas Sosial	85,86	B (Baik)	
9	Dinas Perhubungan	79,18	B (Baik)	
10	Dinas Perumahan Rakyat, Kawassan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	76,98	B (Baik)	
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	79,79	B (Baik)	
12	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	87,66	B (Baik)	
13	Dinas Penanaman Modal	85,20	B (Baik)	
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	79,90	B (Baik)	

No.	Unit Pelayanan	Tahun 2023		Ket
		IKM Unit Pelayanan	Mutu	
15	RSUD	86,69	B (Baik)	
16	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	88,13	B (Baik)	
17	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	84,76	B (Baik)	
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	81,26	B (Baik)	
19	Bagian PBJ	82,18	B (Baik)	
20	Kecamatan Temanggung	85,98	B (Baik)	
21	Kecamatan Kranggan	82,08	B (Baik)	
22	Kecamatan Pringsurat	85,78	B (Baik)	
23	Kecamatan Kandungan	86,97	B (Baik)	
24	Kecamatan Kaloran	84,00	B (Baik)	
25	Kecamatan Kedu	88,70	A (Sangat Baik)	
26	Kecamatan Tlogomulyo	84,76	B (Baik)	
27	Kecamatan Tembarak	88,01	B (baik)	
28	Kecamatan Selopampang	85,41	B (Baik)	
29	Kecamatan Bulu	86,88	B (Baik)	
30	Kecamatan Parakan	84,02	B (Baik)	
31	Kecamatan Kledung	82,55	B (Baik)	
32	Kecamatan Bansari	84,22	B (Baik)	
33	Kecamatan Ngadirejo	85,99	B (Baik)	
34	Kecamatan Gemawang	84,04	B (Baik)	
35	Kecamatan Jumo	87,36	B (Baik)	
36	Kecamatan Candiroto	84,28	B (Baik)	
37	Kecamatan Bejen	86,20	B (Baik)	
38	Kecamatan Wonobojo	84,88	B (Baik)	
39	Kecamatan Tretep	85,30	B (Baik)	
40	Puskesmas Temanggung	85,65	B (Baik)	
41	Puskesmas Dharmarini	84,50	B (Baik)	
42	Puskesmas Kranggan	82,54	B (Baik)	
43	Puskesmas Pare	90,03	A (Sangat Baik)	
44	Puskesmas Pringsurat	84,17	B (Baik)	
45	Puskesmas Rejosari	90,88	A (Sangat Baik)	
46	Puskesmas Kaloran	82,08	B (Baik)	
47	Puskesmas Tepusen	84,46	B (Baik)	
48	Puskesmas Kandungan	85,76	B (Baik)	
49	Puskesmas Jumo	92,8	A (Sangat Baik)	
50	Puskesmas Gemawang	79,28	B (Baik)	
51	Puskesmas Kedu	79,75	B (Baik)	
52	Puskesmas Tlogomulyo	85,94	B (Baik)	
53	Puskesmas Tembarak	90,69	A (Sangat Baik)	
54	Puskesmas Selopampang	90,37	B (Baik)	
55	Puskesmas Bulu	89,90	A (Sangat Baik)	
56	Puskesmas Parakan	84,30	B (Baik)	
57	Puskesmas Traji	84,62	B (Baik)	
58	Puskesmas Kledung	78,65	B (Baik)	
59	Puskesmas Bansari	81,74	B (Baik)	
60	Puskesmas Ngadirejo	82,91	B (Baik)	
61	Puskesmas Banjarsari	81,95	B (Baik)	
62	Puskesmas Candiroto	78,29	B (Baik)	
63	Puskesmas Bejen	79,46	B (Baik)	
64	Puskesmas Wonobojo	86,27	B (Baik)	
65	Puskesmas Tretep	86,06	B (Baik)	
Nilai Rata-rata IKM Tahun 2023		84,97	B (Baik)	

Sumber: Bag, Organisasi, Setda Kabupaten Temanggung, 2024

Perangkat daerah menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 memiliki beberapa tugas yaitu membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas serta pelayanan administratif. Pelaksanaan tugas telah diwadahi oleh unsure dalam perangkat daerah tersebut bertanggung jawab kepada Bupati

melalui proses pengintegrasian dan sinkronisasi dari tujuan dan kegiatan sebagai pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah dalam mencapai visi misi pemerintahan daerah melalui koordinator yaitu Sekretariat Daerah yang mempunyai fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggung jawaban yang disampaikan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat maka perangkat daerah yang memiliki tupoksi melayani masyarakat secara langsung melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM), antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Kecamatan.

Tabel 2.161

Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No	Uraian	Nilai	Kategori
1	Persyaratan Pelayanan	3,80	A
2	Prosedur Pelayanan	3,68	A
3	Jangka Waktu Pelayanan	3,59	A
4	Tarif Pelayanan	3,89	A
5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,79	A
6	Kompetensi Pelayanan	3,77	A
7	Perilaku Pelaksana	3,86	A
8	Penangan Pengaduan	3,74	A
9	Sarana Prasarana	3,72	A

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2023

Berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat pelayanan Dinas Kesehatan dinilai Baik oleh masyarakat. Unsur pelayanan yang mendapatkan nilai tertinggi adalah Tarif pelayanan yang mendapatkan nilai 3,88. Dan unsure pelayanan yang perlu ditingkatkan adalah unsur Jangka waktu pelayanan. Tindak lanjut dari hasil survey kepuasan masyarakat meningkatkan dan mensinergikan komitmen pegawai dalam melayani masyarakat.

Tabel 2.162

Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No	Uraian	Nilai	Kategori
1	Persyaratan Pelayanan	3,25	B
2	Prosedur Pelayanan	3,22	B
3	Jangka Waktu Pelayanan	3,19	B
4	Tarif Pelayanan	3,78	A
5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,17	B
6	Kompetensi Pelayanan	3,29	B
7	Perilaku Pelaksana	3,38	A
8	Penangan Pengaduan	3,95	A
9	Sarana Prasarana	3,35	A

Sumber: Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung, 2024

Secara umum pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dinilai sangat memuaskan oleh masyarakat pengguna layanan. Unsur pelayanan

yang mendapatkan nilai tertinggi adalah Penanganan Pengaduan dengan nilai 3,95. Sedangkan unsure pelayanan yang mendapatkan nilai terendah adalah produk spesifikasi jenis layanan dengan nilai 3,17. Untuk menindaklanjuti penilaian masyarakat terhadap persyaratan pelayanan yang masih rendah Dinas Penanaman Modal akan melakukan penyerdehanan dalam prosedur pelayanan dan mempercepat proses perizinan dengan bekerjasama dengan Perangkat Dinas Teknis terkait untuk menempatkan staf yang ditunju kberjaga di Front Office Dinas Penanaman Modal. Percepatan pelayanan saat ini didukung dengan penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sehingga akan mempermudah proses pengesahan Kepala Dinas. Selain itu dengan dokumen yang berbentuk softfile diharapkan dapat memudahkan distribusi dokumen kepada pemohon tanpa perlu datang kekantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Selain itu dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, Pemerintah Daerah menggunakan kriteria yang ditetapkan Ombudman RI. Berdasarkan SK Ketua Ombudman RI Nomor 418 Tahun 2023 Kabupaten Temanggung memperoleh nilai 87,77 dengan kategori B, opini kualitas tinggi dan zonasi hijau Tahun 2023.

2. Fungsi Sekretariat DPRD

1) Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dengan persetujuan bersama Bupati, Realisasi persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu di Kabupaten Temanggung dari tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 2.163
Persentase RAPERDA yang Disahkan Tepat Waktu Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1,	Jumlah PERDA yang ditetapkan	19	19	16	16	19
2,	Jumlah RAPERDA yang diajukan	26	21	20	18	19
	% RAPERDA yang disahkan tepat waktu	73,08	90,48	80,00	88,89	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu fluktuatif, Pada tahun 2023 jumlah PERDA yang ditetapkan sebanyak 19 RAPERDA dari yang diajukan sebanyak 19 PERDA.

2.1.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

1) Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan merupakan urusan penunjang dalam pelaksanaan urusan pilihan dan wajib, Perencanaan pembangunan memiliki kewenangan untuk menyusun perencanaan daerah jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Guna memastikan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung sudah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat, maka diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.

Keterlibatan seluruh stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan daerah menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah berkualitas serta mampu menyelesaikan permasalahan pembangunan.

Tabel 2.164

Gambaran Kinerja Sasaran Urusan Perencanaan Tahun 2018-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	n,a	n,a	4,5	4,5	4,5
2	Persentase ketercapaian kinerja pembangunan daerah	%	98,48	86,60	92,35	98,66	98,96
3	Manajemen Risiko Indeks	Level	n,a	Level 1	Level 2	Level 2	Level 2

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, 2024

Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) menjadi salah satu kunci penting dalam capaian pembangunan di suatu daerah dengan orientasi utama adalah sinergitas dan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Capaian kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) tahun 2023 masih sama dengan capaian kinerja tahun 2022.

Capaian Persentase ketercapaian kinerja pembangunan daerah pada tahun 2023 tercapai sebesar 98,96%. Capaian tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 98,66%.

Indikator Manajemen risiko indeks merupakan indikator baru yang tertuang dalam perubahan RPJMD sehingga nilai indikator tersebut

ditahun 2019 belum dihitung. Capaian kinerja Manajemen risiko indeks pada tahun 2023 pada level 2.

Tabel 2.165

Gambaran Kinerja Sasaran Urusan Perencanaan Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Peyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Tersusunnya Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah Tepat Waktu	%	100	94,81	87,22	100	100
3	Tingkat Konsistensi Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	%	96,12	96,55	100	91,94	93,65
4	Tingkat Konsistensi Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur	%	95,10	94,92	100	95,74	95,83
5	Tingkat Konsistensi Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	93,53	96,82	100	90,54	90,91
6	Tingkat Konsistensi Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Terhadap Renstra	%	93,50	96,43	100	98,80	90,91

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, 2024

Setiap tahun pemerintah daerah menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai bentuk dokumen perencanaan jangka pendek. RKPD disusun sebagai penjabaran arah kebijakan tahunan selama 5 tahun yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan program tahunan yang ada di dalam RPJMD.

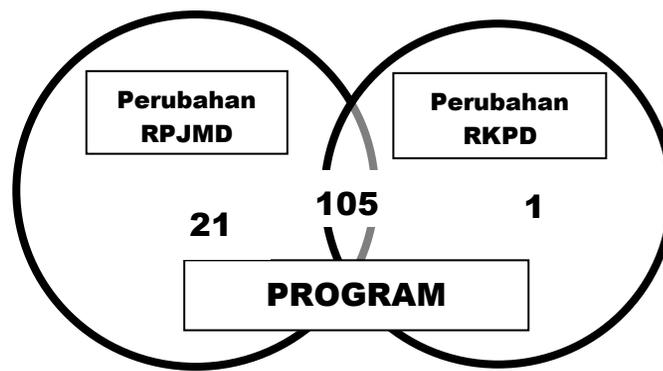
Tabel 2.166

Tingkat Konsistensi Program Pembangunan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Program Pembangunan dalam RKPD sesuai dengan RPJMD	121	124	120	111	105
2.	Jumlah Program Pembangunan dalam RPJMD	125	125	126	126	126
3.	Persentase (%)	96,8	99,2	95,2	88,10	83,33

Sumber : RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Kesesuaian program RPJMD dan RKPD dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.29

Irisan Kesesuaian Jumlah Program RPJMD Tahun 2019-2023 dengan Program RKPD Tahun 2023

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa jumlah program dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019–2023 yang sesuai dengan RKPD Tahun 2023 sebanyak 105 program.

Tabel 2.167

Program Pada RPJMD yang Tidak Dilaksanakan di RKPD 2023

No	Program Perubahan RPJMD Tidak Dilaksanakan di Perubahan RKPD	PD Pengampu
1	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	DPUPR
2	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	DPRKPLH
3	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	DPRKPLH
4	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	DPRKPLH
5	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	DPRKPLH
6	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	DINSOS
7	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	DINPERINA KER
8	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	DINKOPDAG
9	Program pengembangan UMKM	DINKOPDAG
10	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	DINKOPDAG
11	Program Perlindungan Perempuan	DPPKBPPPA
12	Program Penanganan Kerawanan Pangan	DKPPP
13	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKPPP
14	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	DKPPP
15	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	DKPPP
16	Program Pencacatan Sipil	DINDUKCAPIL
17	Program Peningkatan Kerjasama Desa	DINPERMADES
18	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	DINBUDPAR
19	Program pembinaan sejarah	DINBUDPAR
20	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	DINPUSIP
21	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	KECAMATAN

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2023 (data diolah)

Dari 21 program RPJMD yang tidak dilaksanakan di RKPD, karena keterbatasan keuangan pemerintah daerah untuk membiayai program tersebut.

Tabel 2.168
Program pada Perubahan RKPD diluar Perubahan RPJMD

No	Program Perubahan RKPD Diluar Perubahan RPJMD	PD Pengampu
1	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DPRKPLH

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, data diolah

2. Keuangan

1) Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari hasil audit BPK RI atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Terdapat 4 jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK-RI, yakni opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan opini tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*).

Adapun Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama 5 Tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.169
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Opini LKPD (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPPKAD Kabupaten Temanggung, 2024

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir (Tahun 2019 sampai 2023) memperoleh opini WTP yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan maka skor tertinggi dengan bobot 15. Data dukung Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan piagam penghargaan dari Menteri Keuangan RI.

2) Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan

Persentase dari realisasi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah Tahun Anggaran 2019-2023 di Kabupaten Temanggung pada tabel berikut ini.

Tabel 2.170**Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah**

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Total Pendapatan Daerah	Persentase
2019	278.306.408.650	1.840.953.306.303	15,12
2020	307.456.823.576	1.830.815.032.558	16,79
2021	364.099.510.273	1.950.257.238.731	18,67
2022	308.726.486.721	1.849.550.699.127	16,69
2023	351.823.679.260	2.005.427.452.487	17,54

Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung, 2024

Pendapatan asli daerah tahun 2023 tercapai sebesar 17,54% dari realisasi pendapatan daerah. Sedangkan untuk tahun 2022 capaian realisasi pendapatan asli daerah menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Penghitungan IPKD berdasar Permendagri nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan dihitung dengan 6 (enam) dimensi yaitu:

Tabel 2.171**Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023**

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai IPKD	70,00	68,16	69,52	62,74	68,08

Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung, 2024

Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tahun 2023 sebesar 68,08 %.Capaian IPKD mengalami keznaiikan dibandingkan tahun 2022 yang tercapai sebesar 62,74%. Hal tersebut disebabkan karena penurunan nilai dalam 2 dimensi dari 5 dimensi yang menjadi indikator penilaian yaitu Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dimensi Kondisi Keuangan Daerah. Dalam proses penginputan data Tim IPKD yang terdiri dari beberapa Perangkat Daerah masih dalam proses mempelajari cara terbaru dalam menginput data.

4) Ketepatan Waktu dalam Pengesahan APBD

Dalam kurun waktu 5 tahun penetapan dan pengesahan APBD Kabupaten Temanggung selalu tepat waktu, dan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.172**Tanggal dan Nomor Peraturan Daerah tentang Penetapan APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2024**

Tahun Anggaran	Tanggal Perda	Nomor Perda
2019	28 Desember 2018	12 Tahun 2018
2020	16 Desember 2019	14 Tahun 2019
2021	28 Desember 2020	25 Tahun 2020

Tahun Anggaran	Tanggal Perda	Nomor Perda
2022	28 Desember 2021	11 Tahun 2021
2023	27 Desember 2022	16 Tahun 2022
2024	28 Desember 2023	11 Tahun 2023

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2024

Tabel 2.173

Gambaran Urusan Keuangan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%	97,83	96,49	99,77	99,73	100
2	Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	%	100	100	100	100	100
3	Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	0,57	0,86	100	42,86	100
4	Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100
5	Persentase realisasi keuangan	%	94,57	93,68	89,00	90,55	94,70
6	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	95,74	85,11	89,13	95,65	100
7	Opini BPK atas LKPD	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	%	80,95	81,55	84,52	100	100
9	Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	98,55	78,75	78,83	88,21	94,33
10	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	%	1,14	1,053	0,70	1,94	0,85
11	Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100
12	Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100
13	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	98,91	100	103,54	98,74	101,47
14	Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2024

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, sejak tahun 2022 Kabupaten Temanggung sudah menggunakan electronic- Analisis Standar Biaya (ASB) yang sudah terintegrasi dengan

aplikasi perencanaan SIPD-Kemendagri terutama kegiatan fisik yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung. Electronic – Analisis Standar Biaya (e-ASB) membantu Pemerintah Daerah dalam menetapkan plafon anggaran menjadi lebih objektif, meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan penganggaran yang lebih efektif dan efisien untuk semua Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung.

Dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak lupa melibatkan stakeholder terkait dalam hal ini adalah masyarakat. Perencanaan yang baik tidak hanya yang bersifat top down melainkan juga bersifat bottom up untuk mengakomodir aspirasi dan kepentingan masyarakat umum. Untuk mendukung perencanaan tersebut Kabupaten Temanggung telah melakukan berbagai upaya termasuk dengan membuat Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam perbup tersebut menjelaskan bahwa Pengguna SIPD (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah) terdiri dari Perangkat Daerah, Anggota DPRD, Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.

SIPD adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang memuat pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Masyarakat melalui admin Daerah membuat “akun masyarakat” yang berwenang untuk menambah, merubah, dan menghapus usulan kegiatan dalam perencanaan pembangunan.

Selain itu untuk mendukung keuangan yang transparan dan akuntabel pemerintah Kabupaten Temanggung telah membuat Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung. Dalam Peraturan Bupati tersebut terdapat lampiran yang menjelaskan Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang dapat masyarakat akses melalui internet.

Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak Tahun 2023 menurun dibanding Tahun disebabkan oleh sudah tidak dilaksanakannya pendataan massal PBB-P2 serta kurang maksimalnya sosialisasi mengenai pendaftaran objek baru PBB-P2. Selain itu petugas dan sumber daya bidang

pendapatan sangat terbatas untuk melaksanakan pendataan objek pajak. Dan target jumlah pajak akan meningkat seiring dengan aktifitas perekonomian di masyarakat.

Tabel 2.174
Kondisi SILPA Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Tahun	APBD	SILPA	%
1	2019	1.969.512.901.837	123.395.072.830	6,27
2	2020	1.955.541.334.850	162.448.209.105	8,31
3	2021	1.993.303.970.309	254.248.460.087	12,76
4	2022	2.163.271.983.090	180.406.907.044	8,33
5	2023	2.156.455.999.239	143.407.757.117	6,65

Sumber : BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2024

Dari tabel tersebut menggambarkan pengelolaan keuangan dan program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Temanggung berjalan dengan baik. Hal ini didukung dengan SILPA Kabupaten Temanggung yang sudah dibawah 30% setiap tahunnya.

3. Kepegawaian

1) Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.175
Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No.	Dimensi Pengukuran	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kualifikasi	10,34	10,82	11,907	12,39	20,98
2.	Kompetensi	11,48	9,15	9,343	12,73	13,6
3.	Kinerja	25,07	25,09	25	23,01	24,97
4.	Disiplin	4,95	4,97	4,997	5	5
TOTAL		51,74	50,03	51,247	53,13	64,55

Sumber : BKPSDM Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan hasil tersebut, diketahui bahwa meskipun masih tetap berada dalam kategori sangat rendah namun terjadi peningkatan angka IP ASN. Untuk mengetahui penyebab masih rendahnya angka IP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung di tahun 2023, perlu dilihat pencapaian skor masing-masing dimensi IP ASN sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.176
Pencapaian skor dimensi IP ASN Tahun 2023 Dibandingkan dengan Persentase Pengukuran

Dimensi IP	Bobot	Skor riil	Capaian (dengan pembulatan)
Kualifikasi	25% (0,25)	20,98	83,92%
Kompetensi	40% (0,40)	13,60	34%
Kinerja	30% (0,30)	24,97	83,23%
Disiplin	5% (0,05)	5	100%

Sumber: BKPSDM Kabupaten Temanggung, 2024

Pencapaian dimensi IP ASN diatas, terlihat bahwa pencapaian skor paling rendah terlihat pada dimensi kompetensi yaitu sebesar 34%, padahal bobot dimensi kompetensi menyumbang nilai paling besar terhadap pengukuran IP ASN yaitu sebesar 40%. Skor dimensi kompetensi diperoleh melalui pendataan terhadap riwayat keikutsertaan PNS dalam kegiatan diklat atau bimbingan teknis minimal 20 JP selama 1 tahun terakhir dan seminar selama 2 tahun terakhir yang relevan dengan tugas dan jabatannya.

Capaian IP ASN Tahun 2023 yaitu sebesar 64,55 lebih tinggi dari target yang direncanakan yaitu 50,09. Nilai IP ASN yang melebihi target tersebut disebabkan oleh sudah terinputnya sebagian besar data kinerja pegawai (P2KP) dan data kompetensi pegawai (sertifikat diklat) yang merupakan bagian dari dimensi penilaian IP ASN.

2) Indeks Sistem Merit

Penilaian sistem merit dilakukan dengan sistem penilaian mandiri, yaitu setiap instansi melaporkan hasil penilaian mandiri beserta data dukung kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) secara online melalui aplikasi **sipinter** yang dilakukan setiap tahun di akhir tahun. Hasil indeks sistem merit akan dijadikan dasar rekomendasi dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut implementasi sistem merit. Pengukuran indeks sistem merit dinilai berdasarkan/mencakup 8 aspek yang terdiri atas 47 sub aspek, dengan cara mengkalikan bobot masing-masing sub aspek dengan skor, Bobot masing-masing sub aspek telah ditetapkan oleh KASN, Skor juga ditetapkan oleh KASN berdasarkan kondisi riil sub aspek pada tiap-tiap instansi, Hasil Pengukuran mandiri penilaian Sistem Merit yang telah mendapatkan verifikasi dari KASN dapat dilihat pada tabel:

Tabel 2.177
Indeks Sistem Merit Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Penilaian Sistem Merit	n,a	218	113	200	258
2.	Indeks Sistem Merit	n,a	0,52	0,259	0,482	0,62

Sumber : Download Aplikasi sipinter, *=Penilaian mandiri

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa hasil penilaian atau skor indeks sistem merit pada tahun 2021 sangat jauh menurun capaian skornya dibandingkan capaian Tahun 2020. Hal ini disebabkan pada Tahun 2020 penilaian Sistem Merit dilakukan secara mandiri lewat aplikasi **Sipinter**, namun penilaian mandiri yang kita laksanakan belum mendapatkan verifikasi atau penilaian dari KASN.

Pada tahun 2023 capaian kinerja sasaran indeks sistem merit menggunakan hasil penilaian sistem merit dari KASN, dengan nilai yang diperoleh sebesar 258 atau indeks sebesar 0,62 dan kategori Baik.

Nilai Indeks Merit Sistem Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 berdasarkan penilaian KASN pada setiap aspek diantaranya yaitu pada aspek Perencanaan Kebutuhan mendapat nilai 37,5, aspek Pengadaan mendapat nilai 40, aspek Pengembangan Karier mendapat nilai 45, aspek Promosi dan Mutasimen dapat nilai 30, aspek Manajemen Kinerja mendapat nilai 50, aspek Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin mendapat nilai 27,5, aspek Perlindungan dan Pelayanan mendapat nilai 12, aspek Sistem Informasi mendapat nilai 16, Sehingga total dari keseluruhan aspek berjumlah 258 poin.

4. Pendidikan dan Pelatihan

- 1) Persentase Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang Memenuhi Kompetensi Diklat Kepemimpinan.

Tabel 2.178

Persentase Pejabat yang Telah Lulus Diklat Kepemimpinan sesuai Jenjang Jabatan

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pejabat yang telah lulus diklat PIM	240	169	157	141	177
2	Jumlah pejabat	633	624	626	481	482
3	Persentase pejabat yang memenuhi kompetensi diklat PIM (%)	37,91	27,08	25,08	30,13	36,72

Sumber: BKPSDM Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Persentase jumlah pejabat yang telah lulus diklatpim sampai dengan tahun 2023 tercapai 36,72% lebih dari target tahun ini sebesar 35%, capaian tersebut merupakan capaian akhir tahun 2023. Pencapaian target indikator ini dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuatif baik dari jumlah pejabat maupun dari jumlah pejabat yang mengikuti diklat. Jumlah pejabat mengalami perubahan naik atau turun setiap tahun dikarenakan antara lain adanya perubahan SOTK, adanya mutasi dan pensiun pejabat serta kebijakan pengisian jabatan yang kosong.

Sementara itu, untuk jumlah pejabat yang telah mengikuti diklat kepemimpinan mengalami penurunan di tahun 2020sampaidengan 2023dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini antara lain disebabkan pertama, ketersediaan anggaran yang berbeda dan fluktuatif dari tahun ke tahun, selain itu adanya keterbatasan kuota dari penyelenggara diklat

manajerial (BPSDMD Provinsi Jawa Tengah) serta karena adanya proses manajemen kepegawaian yaitu adanya pejabat yang pensiun, promosi maupun mutasi, promosi jabatan berdampak pada pengurangan jumlah pejabat yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan (pejabat yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan pada eselon sebelumnya tidak ikut dihitung lagi jika yang bersangkutan promosi ke eselon yang lebih tinggi) dan penambahan jumlah pejabat yang belum mengikuti diklat kepemimpinan (pejabat baru yang promosi ke eselon lebih tinggi).

- 2) Persentase ASN yang Memiliki Kompetensi Diklat Teknis dan Fungsional Pada tahun 2021 pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri dilaksanakan secara kolaborasi antar perangkat daerah (Bintek Smart City).

Tabel 2.179

Persentase Pejabat yang Telah Lulus Diklat Kepemimpinan sesuai Jenjang Jabatan

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PNS yang ikut diklat teknis/fungsional	325	462	861	1,047	1.878
2	Jumlah PNS	6,670	6,280	5,910	6,347	59.298
3	Persentase PNS yang ikut diklat teknis/fungsional	4,87	7,36	14,57	16,50	31,67

Sumber: BKPSDM Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Persentase jumlah pejabat yang telah lulus diklatpim sampai dengan tahun 2023 tercapai 36,72% lebih dari target tahun ini sebesar 35%, capaian tersebut merupakan capaian akhir tahun 2023. Pencapaian target indikator ini dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuatif baik dari jumlah pejabat maupun dari jumlah pejabat yang mengikuti diklat. Jumlah pejabat mengalami perubahan naik atau turun setiap tahun dikarenakan antara lain adanya perubahan SOTK, adanya mutasi dan pensiun pejabat serta kebijakan pengisian jabatan yang kosong.

Sementara itu, untuk jumlah pejabat yang telah mengikuti diklat kepemimpinan mengalami penurunan di tahun 2020sampaidengan 2023dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini antara lain disebabkan pertama, ketersediaan anggaran yang berbeda dan fluktuatif dari tahun ke tahun, selain itu adanya keterbatasan kuota dari penyelenggara diklat manajerial (BPSDMD Provinsi Jawa Tengah) serta karena adanya proses manajemen kepegawaian yaitu adanya pejabat yang pensiun, promosi maupun mutasi, promosi jabatan berdampak pada pengurangan jumlah

pejabat yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan (pejabat yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan pada eselon sebelumnya tidak ikut dihitung lagi jika yang bersangkutan promosi ke eselon yang lebih tinggi) dan penambahan jumlah pejabat yang belum mengikuti diklat kepemimpinan (pejabat baru yang promosi ke eselon lebih tinggi).

5. Penelitian dan Pengembangan

1) Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah pada Pasal 35 menyebutkan bahwa Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan berwenang dan bertanggung jawab atas kelitbangan pemerintahan dalam negeri di kabupaten/kota, sehingga Bappeda juga harus memastikan bahwa setiap perumusan kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung harus memanfaatkan hasil-hasil kelitbangan.

Dalam hubungannya dengan perencanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Temanggung yang berbasis kelitbangan sesuai Perbub yang telah disebutkan sebelumnya, maka beberapa fungsi utama Bidang Litbang antara lain pelaksanaan pengkajian, pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di kabupaten serta penyusunan kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di kabupaten, Oleh sebab itu salah satu indikator kinerja sasaran yang dibebankan kepada bidang litbang adalah prosentase pemanfaatan hasil kelitbangan.

Tabel 2.180
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan di Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pemanfaatan hasil kelitbangan	19	3	6	8	1
2	Jumlah hasil kelitbangan	10	3	6	8	1
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan Laporan Akhir Analisis Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023, bahwa jumlah Hasil Penelitian dan Pengkajian di Kabupaten Temanggung meliputi 1 indeks yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Indeks tersebut dimanfaatkan sebagai indikator kinerja Pemerintah Daerah dalam mendukung target RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Bappeda sebagai unsur penunjang perencanaan dan kelitbangan daerah mampu mengarahkan stakeholder untuk berkomitmen dalam melakukan pembangunan daerah dengan berdasar hasil penelitian dan pengembangan yang telah ada.

2) Persentase hasil Krenova yang dikembangkan

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menumbuhkembangkan inovasi, memberikan stimulasi dan fasilitasi, menciptakan iklim kondusif di wilayahnya serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah oleh Kabupaten/Kota. Upaya menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi telah dilakukan melalui penyelenggaraan Lomba Kreativitas dan Inovasi (KRENOVA) Tingkat Kabupaten Temanggung yang diselenggarakan secara rutin sejak tahun 2012. Selanjutnya upaya dan langkah-langkah pengembangan dan stimulasi kepada para inventor/inovator dilaksanakan melalui : (a) Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual; (b) Diseminasi dan pengenalan hasil-hasil invensi/inovasi kepada masyarakat luas agar bermanfaat dalam bentuk penyertaan Pameran; (c) Pelatihan hilirisasi teknologi / inkubator bisnis; (d) Mendorong inventor/inovator menjadi wirausaha-wirausaha baru berbasis teknologi dalam wadah Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) dari Kemenristekdikti.

Tabel 2.181
Persentase Hasil Krenova Yang Dikembangkan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Hasil Krenova yang dikembangkan	4	5	10	10	16
2	Hasil Krenova terjaring	6	5	10	10	16
3	Persentase	66,67	100	100	100	100

Sumber :Bappeda Kabupaten Temanggung, 2024

Persentase Inovasi Daerah yang dikembangkan pada tahun 2023 sebanyak 16 inovasi. Inovasi tersebut didefinisikan sebagai inovasi yang memiliki keunggulan, spesifikasi khusus yang sudah dikembangkan dan dimanfaatkan, serta memiliki dampak yang luas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 16 inovasi tersebut meliputi :

- a) Inventor MASKUPIS “ Masker Kulit Pisang”

- b) Inventor Dessert "PUPPI" Puding Pelepeh Pisang Alternatif Pengobatan Anemia Defisiensi Besi (PUTIK "puding cantik")
- c) Inventor Mentelsi " Permen telang penurunan hipertensi "
- d) Inventor Siwangi Bumbon Pawon (Inovasi Bawang Merah dari Biji) (SMK N 1 Temanggung)
- e) Inventor Pengembangan Alat Peraga Palabil Pecahan Berbantuan Aplikasi Java dalam Pemahaman Konsep Dan Operasi Hitung Pecahan di Sekolah Dasar (Choirul Azizah)
- f) Inventor Implementasi Lipan Penta untuk Meningkatkan Hasil Belajar Murid Materi Pengolahan Data Melalui Penerapan Pembelajaran Realistic Mathematics Education di Sekolah Dasar (Choirul Azizah)
- g) Inventor Metode Agapie untuk Peningkatan Mutu Pendidikan Dalam Mewujudkan Merdeka Belajar di Sekolah Dasar Kabupaten Temanggung (Choirul Azizah)
- h) Inventor Pesawat Swayasa Aerotek XI (Aerotek)
- i) Inventor Pemanfaatan Bunga Putri Malu Carmyosa (SMP N 2 Kedu)
- j) Inventor Wayang Kardus Pada Komunitas Dongeng Kuy: Aksi Gen Z Melestarikan Budaya Dongeng Sebagai Transformasi Nasionalisme Sejak Dini di Era Digital yang Ramah Anak dan Lingkungan (Sovi Puji Utami)
- k) Inventor Molen Listrik (Baryono)
- l) Inventor Creative Ice Cream Ginger Lime (Tim Kedai Citiis)
- m) Inventor Traktor Amfibi (SMA N Candiroto)
- n) Inventor Pemanfaatan Sel Surya Untuk Cadangan Listrik (SMA N Candiroto)
- o) Inventor Agridaya Smart Farm Inovasi Teknologi Pengairan, Pengelolaan Hama dan Pemupukan Modern sebagai Upaya Peningkatan Produktivitas Pertanian Kabupaten Temanggung
- p) Inventor Sobat Bima (DPUPR Temanggung)

Lomba Kreativitas dan Inovasi (Krenova) Masyarakat di Kabupaten Temanggung merupakan kegiatan rutin yang telah dilaksanakan sejak tahun 2012 sebagai bentuk apresiasi kepada para mitra dan inovator yang secara nyata mendukung dalam memajukan produk inovasi untuk masyarakat luas, Jumlah peserta cenderung naik setiap tahun, berkat berbagai upaya sosialisasi dan publikasi ke berbagai sekolah, media elektronik, sosial media maupun lewat koordinasi dengan para P3MD (pendamping desa) sebagai pihak yang diharapkan dapat menjangkau karya-

karya inovasi di tingkat desa, Selanjutnya para pemenang KRENOVA dikirim ke lomba Krenova tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Beberapa penghargaan yang di raih Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai pemenang krenova Tingkat Provinsi Jawa Tengah, yaitu :

- a) Mesin Perajang Rumput dan Pembuat Ceriping pemenang harapan Lomba Krenova Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012;
- b) Antiseptik Daun Jambu (*Guava Leaf Antiseptic*) pemenang harapan Lomba Krenova Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016, serta mendapatkan hibah pendanaan dari Kemenristekdikti melalui program Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT);
- c) Mesin Sangan Kopi juara utama Lomba Krenova Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, hibah pendanaan dari Kemenristekdikti melalui program Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT);
- d) Inovasi Pewarna Alam Shibiru menjadi Juara Dua lomba Krenova Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.
- e) Minyak Kopi Terapi Herbal untuk Kesehatan menjadi pemenang utama peringkat 9 Lomba Kreativitas dan inovasi masyarakat (Krenova) dan Penjaringan Inovasi Masyarakat tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.
- f) Ijuk Ukir Ranjau Binatang pemenang Harapan 4 Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat dan Penjaringan Inovasi Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

2.1.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Fungsi Inspektorat Daerah

- 1) Indeks Persepsi Anti Korupsi

Tabel 2.182
Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,92	3,92	3,61	4,06	4,06

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2023, hasil penilaian IPAK Kabupaten Temanggung dari Kementerian PAN dan RB adalah 4,06. Pelaksanaan Penilaian Indeks Persepsi Anti Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan hasilnya dilaporkan melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Nilai IPAK Kabupaten Temanggung Tahun 2022 berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, tanggal 6 Desember

2022 mencapai 81,22 turun 4,71 dibandingkan dengan hasil penilaian tahun 2021. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi 4,061 (nilai konversi) turun 0,239 dari tahun lalu. Namun demikian target nilai 3,95 pada Tahun 2023 sudah tercapai.

2) Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Tabel 2.183
Level Penilaian SPIP Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Level SPIP	3,045	3,045	3,045	3,008	3,000

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung, 2024

Level SPIP Tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Adapun kenaikan nilai dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.184
Persandingan Hasil Penilaian Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2023

No	Komponen Penilaian	Skor		+/-
		2022	2023	
1	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,008	3,000	(0,008)
2	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2,797	2,934	0,137
3	Nilai Indeks Efektivitas pengendalian Korupsi (IEPK)	2,920	2,910	(0,010)

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan hasil penilaian baseline pelaksanaan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023, nilai maturitas SPIP Kabupaten Temanggung mendapatkan nilai 3,000. Terdapat penurunan nilai dari sebelumnya yaitu 3,008, hal ini dikarenakan adanya peraturan yang baru dengan skala nilai dan parameter berbeda yang tercantum dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah. Dalam penilaian yang baru mencakup Nilai Manajemen Resiko Indeks (MRI), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK).

Tabel 2.185
Gambaran Urusan Pengawasan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	%	100	100	100	100	100
2	Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan,	%	n.a	n.a	35,21	80,28	95,77

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
	pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi						
3	Persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	%	n.a	n.a	12,37	38,17	49,82
4	Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	%	n.a	n.a	15,46	91,17	98,11
5	Nilai maturitas SPIP	Angka	3,045	3,045	3,045	3,008	3,000
6	Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	n.a	40	100	100	100
7	Persentase Tindak Lanjut Aduan <i>Whistle Blowing</i> , Benturan Kepentingan dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	n.a	100	100	100	100
8	Nilai Survey Penilaian Integritas	%	n.a	n.a	78,70	77,37	77,37
9	Persentase penanganan aduan masyarakat	%	n.a	100	100	100	100

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung, 2024

Dalam melaksanakan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu I dengan kegiatan pengawasan meliputi Reviu Laporan Kinerja, Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (semua perangkat daerah), Reviu LPPD, Reviu Renja dan RKPD, RPJMD dan Renstra. Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.186
Rekapitulasi Nilai Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023

No.	Perangkat Daerah	LHE	LKE	Nilai AKIP 2022	Nilai AKIP 2023	Predikat Tahun 2023
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	V	V	80,07	82,45	A
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	V	V	73,45	74,00	BB
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	V	V	70,52	73,25	BB
4	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	V	V	72,20	72,70	BB
5	Setda Temanggung (Bagian Umum)	V	V	69,20	72,10	B

No.	Perangkat Daerah	LHE	LKE	Nilai AKIP 2022	Nilai AKIP 2023	Predikat Tahun 2023
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	V	V	68,07	71,40	B
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	V	V	67,25	70,85	B
8	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	V	V	68,59	70,75	B
9	Dinas Kesehatan	V	V	75,20	70,20	BB
10	Sekretariat DPRD	V	V	64,95	69,85	B
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	V	V	67,93	69,35	B
12	Kecamatan Kedu	V	V	68,18	69,25	B
13	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	V	V	64,25	69,15	B
14	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	V	V	67,28	69,10	B
15	Dinas Sosial	V	V	66,96	68,90	B
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	V	V	63,54	68,75	B
17	Dinas Penanaman Modal	V	V	67,91	68,65	B
18	Kecamatan Parakan	V	V	62,86	68,60	B
19	Kecamatan Wonobojo	V	V	73,66	68,60	BB
20	Kecamatan Pringsurat	V	V	61,01	68,55	B
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	V	V	64,47	68,45	B
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	V	V	65,81	68,10	B
23	Kecamatan Bulu	V	V	65,42	68,20	B
24	Kecamatan Kaloran	V	V	63,54	68,15	B
25	Kecamatan Kledung	V	V	69,28	67,85	B
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	V	V	63,87	67,70	B
27	Kecamatan Gemawang	V	V	65,61	67,70	B
28	Kecamatan Kandang	V	V	61,32	67,10	B
29	Kecamatan Bejen	V	V	62,97	67,10	B
30	Kecamatan Selopampang	V	V	65,47	67,05	B
31	Kecamatan Jumo	V	V	66,28	66,95	B
32	Kecamatan Tretep	V	V	63,36	65,75	B
33	Kecamatan Bansari	V	V	65,25	65,15	B
34	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	V	V	69,82	69,91	B
35	Dinas Perhubungan	V	V	64,25	70,50	B
36	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	V	V	66,92	67,18	B
37	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	V	V	68,78	69,10	B
38	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	V	V	66,93	70,75	B
39	Inspektorat	V	V	70,22	73,20	BB
40	Kecamatan Temanggung	V	V	63,21	64,98	B
41	Kecamatan Tembarak	V	V	61,18	65,58	B
42	Kecamatan Candiroto	V	V	65,96	66,60	B
43	Kecamatan Ngadirejo	V	V	66,30	66,80	B
44	Kecamatan Kranggan	V	V	65,47	67,35	B
45	Kecamatan Tlogomulyo	V	V	63,09	65,58	B
46	RSUD	V	V	65,47	67,95	B

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel tersebut nilai AKIP Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 rata-rata mendapatkan nilai B (Baik).

2.1.3.7 Unsur Kewilayahan

1. Fungsi Kecamatan

- 1) Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan

Tabel 2.187
Capaian Rata-Rata IKM di Kecamatan Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Temanggung	81,68	82,58	85,20	85,32	85,98
2	Tembarak	84,33	84,83	85,75	87,50	88,01
3	Pringsurat	82,66	82,58	83,00	76,67	85,78
4	Kaloran	82,66	82,58	83,00	83,50	98,96
5	Parakan	71,83	85,97	81,02	81,02	84,05
6	Bulu	82,90	82,53	84,90	86,70	86,88
7	Kedu	81,00	83,00	88,39	89,52	88,70
8	Kandangan	82,66	82,58	85,97	84,41	86,97
9	Candiroto	71,83	81,25	87,38	84,87	84,28
10	Ngadirejo	85,11	81,08	88,40	89,32	85,99
11	Jumo	81,08	90,52	90,52	85,75	85,75
12	Wonoboyo	84,00	84,19	84,22	84,44	84,44
13	Kranggan	71,83	71,83	83,07	84,38	82,54
14	Bejen	71,83	78,19	84,08	85,50	86,20
15	Kledung	n,a	79,95	81,46	82,50	82,55
16	Bansari	n,a	82,95	79,91	82,00	84,22
17	Tlogomulyo	79,53	83,06	83,06	83,84	84,76
18	Selopampang	n,a	82,41	80,71	87,49	87,49
19	Gemawang	n,a	81,50	82,33	83,50	84,04
20	Tretep	71,83	83,47	83,47	83,99	85,30

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk Kecamatan Kedu, Candiroto dan Ngadirejo capaiannya menurun dibanding tahun sebelumnya karena sumber daya manusia dan sarana prasarana pelayanan terbatas sehingga masyarakat menilai lebih rendah dari tahun sebelumnya.

2) Persentase Kepemilikan KTP-El di Kecamatan

Tabel 2.188
Capaian Persentase Kepemilikan KTP-El di Kecamatan Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Temanggung	99,90	102,91	96,69	100,52	99,90
2	Tembarak	99,41	99,34	99,56	98,63	102,85
3	Pringsurat	97,24	95,63	99,72	99,68	102,78
4	Kaloran	99,36	99,34	98,11	99,64	103,83
5	Parakan	105,79	101,13	97,56	97,56	102,96
6	Bulu	98,90	99,76	96,48	100,12	103,03
7	Kedu	94,28	99,41	99,68	96,80	100,54
8	Kandangan	96,73	95,31	99,76	98,86	105,23
9	Candiroto	103,43	104,84	96,96	100,43	102,47
10	Ngadirejo	100,41	100,40	98,32	98,79	103,93
11	Jumo	100,76	100,13	97,77	100,95	103,58
12	Wonoboyo	95,84	99,24	99,57	99,20	104,20
13	Kranggan	101,77	100,72	97,40	101,38	103,78
14	Bejen	89,94	99,38	99,48	99,45	100
15	Kledung	102,02	104,06	98,09	100,47	102,59
16	Bansari	97,83	99,70	99,78	98,81	100
17	Tlogomulyo	98,85	96,01	99,72	98,80	104,03
18	Selopampang	96,83	96,28	99,61	98,76	102,94

No	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
19	Gemawang	98,21	100,26	97,14	100,50	103,63
20	Tretep	95,00	100,16	100,57	97,02	103,13

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Persentase kepemilikan KTP El di Kecamatan Temanggung pada Tahun 2023 lebih rendah dari Tahun 2022 karena kurangnya kesadaran masyarakat akan tertibnya administrasi kependudukan bagi mereka.

3) Persentase Realisasi Penerimaan PBB

Tabel 2.189
Capaian Persentase Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Temanggung	93,22	93,89	93,44	93,14	91,93
2	Tembarak	100	100	100	99,96	99,85
3	Pringsurat	99,24	96,98	99,67	96,47	98,19
4	Kaloran	100	100	96,68	99,09	100
5	Parakan	97,73	91,49	97,89	97,37	98,43
6	Bulu	100	100	100	100	97,58
7	Kedu	97,32	100	100	100	99,53
8	Kandangan	100	100	99,10	95,77	96,35
9	Candiroto	100	100	100	100	100
10	Ngadirejo	100	97,69	100	99,23	98,28
11	Jumo	100	100	100	100	100
12	Wonobojo	100	100	100	100	100
13	Kranggan	97,63	95,63	96,93	95,39	93,63
14	Bejen	100	100	100	100	99,89
15	Kledung	100	100	100	97,92	100
16	Bansari	100	100	100	100	100
17	Tlogomulyo	100	100	100	100	100
18	Selopampang	100	100	100	100	100
19	Gemawang	100	100	100	100	100
20	Tretep	100	100	100	100	100

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Pada Tahun 2023 realisasi penerimaan PBB di beberapa Kecamatan menurun dari tahun sebelumnya karena ada sebagian wajib pajak yang berdomisili diluar kecamatan sehingga menghambat dalam penagihan. SPT (identitas WP) yang tidak jelas karena sertifikat masih menjadi tanggungan pengembang perumahan. Selain itu di beberapa perumahan terdapat SPT yang alamatnya tidak jelas, sehingga sulit dilacak.

4) Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Tabel 2.190
Capaian Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Temanggung	100	66,67	100	100	100
2	Tembarak	100	84,62	100	100	100
3	Pringsurat	7,14	100	100	100	100
4	Kaloran	100	100	100	100	100
5	Parakan	100	100	100	100	100
6	Bulu	84,00	100	100	100	100
7	Kedu	0	100	100	100	100
8	Kandangan	100	100	100	100	100
9	Candiroto	100	71,43	100	100	100

No	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
10	Ngadirejo	100	100	100	100	100
11	Jumo	100	100	100	100	100
12	Wonoboyo	92,31	100	100	100	100
13	Kranggan	100	91,67	100	100	100
14	Bejen	100	100	100	100	100
15	Kledung	100	100	92,31	100	100
16	Bansari	0	100	100	100	100
17	Tlogomulyo	100	75,00	91,67	100	100
18	Selopampang	16,67	83,33	100	100	100
19	Gemawang	100	100	100	100	100
20	Tretep	100	100	100	100	100

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

5) Persentase Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Kondisi Layak

Tabel 2.191
Capaian Sarpras Lokal Kelurahan Kondisi Layak Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Temanggung	73,42	54,49	68,69	65,48	85,45
2	Parakan	86,30	90,79	90,79	90,79	90,79
3	Ngadirejo	100	100	100	100	100
4	Kranggan	100	100	85,71	90,14	97,18

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

6) Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Aktif

Tabel 2.192
Capaian Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Aktif Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Temanggung	100	100	93,37	92,49	100
2	Parakan	99,00	99,26	98,73	98,73	100
3	Ngadirejo	100	100	100	100	100
4	Kranggan	100	100	100	100	100

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

7) Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Tabel 2.193
Capaian Penanganan Laporan Kejadian Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Temanggung	100	100	95,24	100	100
2	Tembarak	100	100	100	100	100
3	Pringsurat	100	100	100	100	100
4	Kaloran	100	100	100	100	100
5	Parakan	100	100	100	100	100
6	Bulu	100	100	100	100	100
7	Kedu	100	100	100	100	100
8	Kandangan	0	100	100	100	100
9	Candiroto	100	100	100	100	100
10	Ngadirejo	n,a	100	100	100	100
11	Jumo	100	100	100	100	100
12	Wonoboyo	90,91	100	100	100	100
13	Kranggan	100	100	100	100	100
14	Bejen	100	100	100	100	100
15	Kledung	100	100	100	100	100
16	Bansari	100	100	100	100	100
17	Tlogomulyo	n,a	100	100	100	100
18	Selopampang	100	100	0	100	100
19	Gemawang	100	100	100	100	100
20	Tretep	100	100	100	100	100

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

8) Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik

Tabel 2.194
Capaian Tempat Ibadah Kondisi Baik Tahun 2019-2023

No.	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Temanggung	94,33	95,02	90,32	90,43	90,43
2	Tembarak	74,42	74,42	86,90	93,15	94,52
3	Pringsurat	97,14	96,85	96,85	96,85	100
4	Kaloran	100	96,53	96,53	96,53	100
5	Parakan	94,24	97,41	100	100	100
6	Bulu	93,06	85,44	85,44	85,44	85,44
7	Kedu	92,05	92,79	91,95	94,92	94,92
8	Kandangan	55,10	90,20	87,34	87,35	87,35
9	Candirotto	97,69	97,69	87,71	87,71	87,71
10	Ngadirejo	99,13	98,71	98,73	98,73	100
11	Jumo	93,70	98,03	98,03	98,03	98,03
12	Wonoboyo	98,55	99,28	100	100	100
13	Kranggan	100	100	100	100	100
14	Bejen	87,04	85,45	100	100	100
15	Kledung	100	100	100	100	100
16	Bansari	83,33	83,33	100	100	100
17	Tlogomulyo	90,91	94,37	94,37	94,37	94,37
18	Selopampang	71,58	80,68	80,68	80,68	80,68
19	Gemawang	84,15	84,15	100	100	100
20	Tretep	100	92,47	92,47	93,15	100

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

9) Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa/Kelurahan

Tabel 2.195
Capaian Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa/Kelurahan Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Temanggung	0	0	0	0	0
2	Tembarak	0,63	0,63	0	0,60	0
3	Pringsurat	0	0	0	0	0
4	Kaloran	0	0	0	0	0
5	Parakan	0	0	0	0	0
6	Bulu	0	0,4	0	0	0
7	Kedu	0	0	0	1,38	0
8	Kandangan	0	0,48	0	0	0
9	Candirotto	0	0	0	0	0
10	Ngadirejo	0	0	0	0	0
11	Jumo	0	1,30	0	0	0
12	Wonoboyo	0,76	0	0,68	0	0
13	Kranggan	0	0	0,51	0	0
14	Bejen	0,65	0,65	0	0	0
15	Kledung	0,72	0	0	0	0
16	Bansari	0	2,92	0	0	0
17	Tlogomulyo	0	0,71	0	0	0
18	Selopampang	0	0	0	0	0
19	Gemawang	0	0	0	0	0
20	Tretep	0	0	0	0	0

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

10) Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan APBDesa Tepat Waktu

Tabel 2.196
Capaian Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan APBDesa Tepat Waktu Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Temanggung	100	100	100	100	100
2	Tembarak	100	100	100	100	100
3	Pringsurat	100	100	100	100	100
4	Kaloran	100	100	100	100	100
5	Parakan	100	100	100	100	100
6	Bulu	0	100	100	100	100
7	Kedu	50	100	100	100	100

No	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
8	Kandangan	100	100	100	100	100
9	Candiroto	100	100	100	100	100
10	Ngadirejo	100	100	100	100	100
11	Jumo	100	100	100	100	100
12	Wonobojo	100	100	100	100	100
13	Kranggan	100	100	100	100	100
14	Bejen	100	100	100	100	100
15	Kledung	100	100	100	100	100
16	Bansari	100	100	100	100	100
	Tlogomulyo	91,67	100	100	100	100
18	Selopampang	100	100	100	100	100
19	Gemawang	100	100	100	100	100
20	Tretep	100	100	100	100	100

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

2.1.3.8 Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Persentase Sekolah yang Mendapatkan Pemahaman Kebangsaan

Tabel 2.197
Capaian Persentase Sekolah yang Mendapatkan Pemahaman Kebangsaan Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah sekolah yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	0	0	0	52	56
2	Jumlah keseluruhan sekolah yang ada	80	80	80	80	80
3	Prosentase sekolah yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	0	0	0	65	70

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Temanggung, 2024

Pada tahun 2019-2021 belum dilaksanakan karena fokus pelaksanaan sosialisasi di tingkat desa, Pelaksanaan sosialisasi wawasan kebangsaan di sekolah telah dilaksanakan dan diikuti oleh pelajar SMP dari 50 SMP di Kabupaten Temanggung yang dilaksanakan di Gedung Juang, SMP 2 Temanggung dan di SMP 1 Tlogomulyo.

2. Cakupan Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan

Tabel 2.198
Persentase Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Desa/Kel yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	3	0	14	169	230
2	Jumlah keseluruhan Desa/Kel yang ada	289	289	289	289	289
3	Prosentase Desa/Kel yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	1,03	0	4,8	58,48	79,58

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Temanggung, 2024

Pada tahun 2020 tidak ada sosialisasi wawasan kebangsaan di desa/kelurahan karena anggaran di refocusing. Pada tahun 2023, pelaksanaan sosialisasi wawasan kebangsaan telah dilakukan di 230 kelurahan/desa di Kecamatan Temanggung.

3. Cakupan Terbentuknya FKUB di Kecamatan

Tabel 2.199
Persentase Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah FKUB di kecamatan	0	0	0	20	20
2	Jumlah kecamatan di kab, Temanggung	20	20	20	20	20
3	Persentase Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan (%)	0	0	0	100	100

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Temanggung, 2024

Pembentukan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) di kecamatan hanya dilakukan 1 kali di masing-masing kecamatan pada tahun 2022 sehingga tercapai sebesar 100%.

4. Persentase Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Pembinaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Tabel 2.200
Persentase Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan Pembinaan Pencegahan, Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	1	183	106	32	230
2	Jumlah keseluruhan Desa / Kelurahan yang ada	289	289	289	289	289
3	Persentase Desa/Kel yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	0,35	63,32	36,68	11,1	79,58

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Temanggung, 2024

Pada tahun 2023 sosialisasi Pencegahan Narkoba dilaksanakan dengan kegiatan Deklarasi Anti Narkoba kepada seluruh jajaran Kepala Desa di Kabupaten Temanggung, Sosialisasi dilaksanakan di Desa Ngropoh Kranggan dan Menggoro Tembarak.

5. Cakupan Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba di tingkat SMP baik negeri maupun swasta di Kabupaten Temanggung. Jumlah Sekolah yang menjadi target pembinaan adalah 80 Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta. Jumlah sekolah yang telah mendapatkan

pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba sebagai berikut:

Tabel 2.201
Persentase jumlah sekolah yang telah Mendapatkan Pembinaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah sekolah yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	0	0	0	30	56
2	Jumlah sekolah yang ada	80	80	80	80	80
3	Prosentase sekolah yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	0	0	0	38	70

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Temanggung, 2024

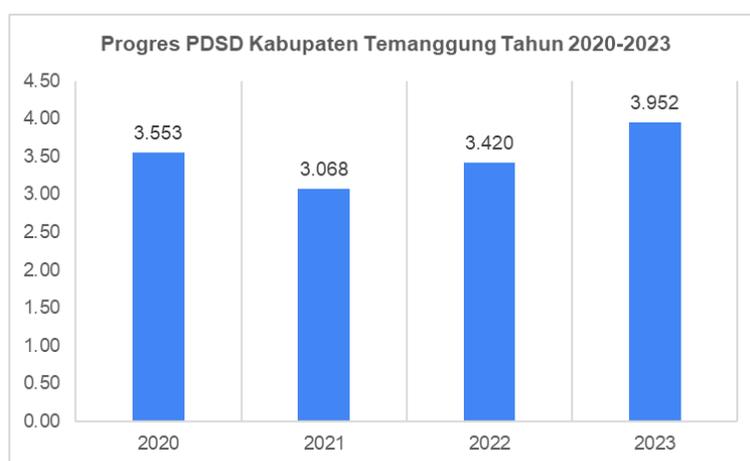
Pada tanggal 1 April 2023 telah dilaksanakan Sosialisasi Anti Narkoba dengan melibatkan Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas serta Kejuruan. Ada 29 Sekolah Menengah Pertama yang mengikuti sosialisasi pada bulan April, Kemudian pada bulan Mei dilaksanakan Sosialisasi Anti Narkoba di Tuk Budoyo pada 10 Sekolah Menengah Atas.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Dalam rangka mendorong Pemetaan Daya Saing Nasional dan peningkatan daya saing daerah, ketersediaan data dan informasi yang akurat sangat perlu untuk dipahami oleh Pemerintah Daerah terkait dengan kondisi daya saing pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Daya daing ini dapat dimanfaatkan sebagai instrument evaluasi dan kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada daya saing.

Pengukuran aspek daya saing daerah melalui pengukuran Pemetaan Daya Saing Daerah (PDSD) Kabupaten Temanggung yang didasarkan pada empat aspek yaitu aspek ekosistem inovasi, aspek pasar/*market*, aspek sumber daya manusia/*human capital*, dan aspek penguat/*enabling environment*.

Berdasarkan hasil pengukuran daya saing daerah, progres capaian Pemetaan Daya Saing Daerah (PDSD) Kabupaten Temanggung tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Laporan PDSB Kabupaten Temanggung Tahun 2023, 2024

Gambar 2.30

Progres Nilai PDSB Kabupaten Temanggung

Berdasarkan gambar diatas, pada tahun 2020 nilai PDSB Kabupaten Temanggung 3,553 dan nilainya turun pada tahun 2021 karena dampak Covid-19 yang mempengaruhi berbagai sektor khususnya aspek pasar. Selanjutnya pada tahun 2022 dan 2023 capaian nilai PDSB Kabupaten Temanggung kembali meningkat dimana tahun 2023 nilai PDSB mencapai 3,952 dengan progres kenaikan sebesar 11,22% dibandingkan tahun 2020.



Sumber: Laporan PDSB Kabupaten Temanggung Tahun 2023, 2024

Gambar 2.31

Progres Nilai Aspek PDSB Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2023

Berdasarkan gambar di atas, progres capaian berdasarkan aspek dalam kurun waktu tahun 2020-2023 aspek pasar merupakan aspek yang memiliki fluktuasi progres yang cukup besar dibanding aspek lainnya dengan progress sebesar 15,74%. Pada tahun 2021, capaian aspek pasar mengalami penurunan dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19. Setelah tahun 2021, capaian aspek pasar terus meningkat hingga pada tahun 2023 dapat melampaui capaian pada tahun 2020. Namun secara keseluruhan, setiap aspek mengalami peningkatan dan menunjukkan progres yang semakin membaik.

Meningkatnya capaian nilai PDSD pada Tahun 2023 dipengaruhi sejumlah faktor. Peningkatan daya saing Kabupaten Temanggung dilihat dari komponen aspek menunjukkan bahwa aspek pasar merupakan aspek yang berkontribusi paling besar dalam peningkatan capaian PDSD. Aspek pasar memiliki progres paling tinggi dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan bahwa produk-produk industri semakin kompetitif, hal ini dapat dilihat semakin menguatnya pola kemitraan di antara perusahaan maupun membaiknya kelembagaan baik pelaku usaha pertanian, asosiasi pedagang dan UMKM. Selain itu, semakin terbukanya akses keuangan bagi dunia usaha maupun UMKM menjadikan aspek pasar menjadi pengungkit daya saing Kabupaten Temanggung. Apabila dilihat dari stabilitas pasar juga didukung oleh regulasi Pemda yang mendorong efisiensi pasar serta menekan laju inflasi daerah (terdapat regulasi ≥ 16 sektor usaha). Berdasarkan data dari pengukuran daya saing, ukuran pasar Kabupaten Temanggung meningkat didukung oleh pesatnya pertumbuhan nilai ekspor. Aspek pasar sendiri juga didukung oleh kondisi tenaga kerja usia produktif dan terdidik yang bergerak aktif dalam angkatan kerja yang tersebar di antara banyak instansi/lembaga maupun perusahaan.

Beberapa indikator yang dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah selain ditunjukkan dengan nilai PDSD diatas antara lain:

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita tiap bulan

Pengeluaran konsumsi rumah tangga rata-rata per kapita tiap bulan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi banyaknya jumlah anggota rumah tangga, Angka konsumsi rumah tangga rata-rata per kapita tiap bulan tahu 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.202
Angka Konsumsi Rumah Tangga Rata-Rata Per Kapita Tiap Bulan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Konsumsi Rumah Tangga	15,585,59	15,586,21	16,168,80	17,669,40	17,669,40

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, Data 2023 masih menggunakan data 2022

Pengeluaran konsumsi rumah tangga rata-rata per kapita tiap bulan penduduk Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Semakin besar angka konsumsi rumah tangga maka semakin atraktif bagi kemampuan ekonomi daerah.

Pola pengeluaran merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan penduduk, Pengeluaran dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan (pangan) dan pengeluaran bukan makanan (sandang, papan, kesehatan, pendidikan). Semakin tinggi persentase pengeluaran non makanan menunjukkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduk.

Pola pengeluaran konsumsi penduduk Kabupaten Temanggung selama dua tahun terakhir hampir sama. Konsumsi non makanan relative lebih banyak dibanding konsumsi makanan, Menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung semakin baik.

Distribusi persentase pengeluaran penduduk Kabupaten Temanggung menurut Kelompok Bahan Makanan dan Non Bahan Makanan masih menggunakan data tahun 2022 karena penghitungan dilakukan pada akhir tahun, data dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 2.203
Persentase Konsumsi Rumah Tangga Bahan Makanan dan Non Bahan Makanan Rata-Rata Per Kapita Tiap Bulan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Non Makanan	n,a	51,70	52,69	51,38	52,56
Makanan	n,a	48,30	47,31	48,62	47,44

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2023 di link BPS data masih versi 2021

2. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Temanggung tahun 2023 sebesar 1,05 Km untuk setiap 1,000 kendaraan bermotor. Sampai pada tahun 2023, ketersediaan prasarana jalan di Kabupaten Temanggung memadai sehingga dapat menunjang aktivitas lalu lintas kendaraan di Kabupaten Temanggung. Perkembangan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.204
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 Triwulan IV

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Panjang jalan (Km)	650,467	650,467	650,467	650,467	650,467
Jumlah kendaraan (unit)	618	618	618	618	616
Ratio (Km/1000 kendaraan)	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, 2024

3. Perkembangan Pelanggan Listrik

Jumlah pelanggan listrik adalah banyaknya pelanggan di suatu daerah yang memakai fasilitas listrik, Data yang digunakan adalah data pelanggan PLN di Kabupaten Temanggung. Perkembangan pelanggan listrik di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Jumlah

pelanggan listrik di tahun 2021 mencapai 234,737 pelanggan, sedangkan pada tahun 2022 jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Temanggung meningkat menjadi 240,996 pelanggan sebagaimana tersebut pada tabel berikut ini:

Tabel 2.205
Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan	221,265	228,137	234,737	240,996	240,996

Sumber: Temanggung Dalam Angka BPS Kab, Temanggung, 2022 data BPS masih menggunakan data 2022



Sumber: BPS Kab, Temanggung, 2022

Gambar 2.32
Perkembangan Pelanggan Listrik Di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

4. Perkembangan Hotel

Kabupaten Temanggung dengan sumber daya alamnya yang menonjol dapat menjadi modal untuk pengembangan pariwisata. Dukungan infrastruktur yang mendukung obyek wisata terutama adalah jasa akomodasi. Perkembangan hotel di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan sejak tahun 2019, Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah bahwa hingga saat ini terdapat 17 hotel yang terdiri dari 15 (lima belas) hotel non bintang dan 2 (dua) hotel bintang. Peningkatan jumlah hotel di Kabupaten Temanggung memberikan efek positif, diantaranya menampung tenaga kerja sekitar, peningkatan pertumbuhan ekonomi, berkontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah dan kemajuan industri pariwisata.

Tabel 2.206
Jumlah Hotel di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Hotel	14	17	17	17	17

Sumber: Dinbudpar Kab. Temanggung, 2024

5. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas di Kabupaten Temanggung adalah 0,83,berikut ini perkembangan angka kriminalitas di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Tabel 2.207
Perkembangan Angka Kriminalitas Di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kasus Narkoba	22	27	26	33	33
2	Jumlah kasus Pembunuhan	1	3	2	2	2
3	Jumlah Kejahatan Seksual	0	6	10	6	6
4	Jumlah kasus Penganiayaan	0	17	0	6	6
5	Jumlah kasus Pencurian	40	62	30	28	28
6	Jumlah kasus Penipuan	0	4	10	9	9
7	Jumlah kasus Pemalsuan uang	3	1	1	0	0
8	Total Jumlah Tindak Kriminal	66	127	79	84	84
9	Jumlah Penduduk	791,264	795,556	800,276	807,440	807,440
10	Angka Kriminalitas	0,83	1,60	0,01	10,48	10,48

Sumber: Polres Temanggung, BNN, 2024

Angka Kriminalitas Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 mengalami kondisi yang fluktuatif dan pada posisi 10,48 pada tahun 2023. Semakin rendah angka kriminalitas, maka tingkat keamanan di Kabupaten Temanggung semakin baik, dengan demikian mendorong iklim berinvestasi yang kondusif di Kabupaten Temanggung.

6. Jenis Pajak dan Retribusi Daerah

a. Pajak Daerah

Berikut merupakan jenis pajak daerah yang ada di Kabupaten Temanggung:

- 1) Pajak hotel;
- 2) Pajak restoran dan sejenisnya;
- 3) Pajak rumah makan dan sejenisnya;
- 4) Pajak kantin dan sejenisnya;
- 5) Pajak jasa boga/katering dan sejenisnya;
- 6) Pajak permainan billiar dan bowling;
- 7) Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron;
- 8) Pajak reklame kain;
- 9) Pajak reklame selebaran;
- 10) Pajak penerangan jalan sumber lain;
- 11) Pajak parkir;
- 12) Pajak air tanah;
- 13) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
- 14) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

b. Retribusi Daerah

Berikut merupakan jenis retribusi daerah di Kabupaten Temanggung:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis;
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- 3) Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat;
- 4) Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 5) Retribusi Pelataran ;
- 6) Retribusi Kios;
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 8) Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
- 9) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- 10)Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan;
- 11)Retribusi Penyewaan Bangunan;
- 12)Retribusi Pemakaian Ruangan;
- 13)Retribusi Pemakaian Alat;
- 14)Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan;
- 15)Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha;
- 16)Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal;
- 17)Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir;
- 18)Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan;
- 19)Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan;
- 20)Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
- 21)Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum;
- 22)Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing;

Penerimaan pajak daerah di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan, pada tahun 2020 sebesar Rp 47.887.604.813 naik menjadi Rp52,832,020,942,00 di tahun 2021 Pajak daerah didominasi oleh pajak penerangan jalan dan pajak bumi dan bangunan, Sedangkan retribusi daerah tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi dimana penerimaan tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp16,189,001,249,00 dan terendah di tahun 2020 sebesar Rp8,436,170,882,00. Retribusi terbanyak pada retribusi jasa umum yaitu retribusi pelayanan pasar. Adapun Jumlah dan macam pajak

dan retribusi daerah Kabupaten Temanggung ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.208
Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1)	Pajak Daerah	53.424.094.046	47.887.604.813	52.832.020.942	58.425.439.009	58.425.439.009
	Pajak Hotel	253.504.852	170.636.594	165.229.973	160.983.816	160.983.816
	Pajak Restoran	1.873.169.859	1.916.160.155	2.125.018.457	1.651.644.422	1.651.644.422
	Pajak Hiburan	131.081.750	39.936.150	14.158.750	78.310.150	78.310.150
	Pajak Reklame	542.925.078	519.430.836	832.726.326	515.450.117	515.450.117
	Pajak Penerangan Jalan	17.577.126.015	15.932.617.325	17.219.779.238	15.727.797.110	15.727.797.110
	Pajak BPHTB	19.014.475.009	16.156.615.814	16.472.087.860	15.938.739.936	15.938.739.936
	Pajak Air Tanah	188.164.850	272.188.236	311.626.105	259.907.791	259.907.791
	Pajak Parkir	112.142.925	114.054.600	101.799.300	94.690.933	94.690.933
	Pajak Bumi dan Bangunan	13.597.151.854	12.765.965.103	15.589.594.933	23.997.914.734	23.997.914.734
	Tungakan Pajak PBB	134.351.854	-	-	-	-
2)	Retribusi Daerah	16.189.001.249	8.436.170.882	9.400.033.763	6.827.327.510	6.827.327.510
	Retribusi Jasa Umum	7.642.891.349	5.719.411.972	6.835.412.583	5.137.116.885	5.137.116.885
	Retribusi Jasa Usaha	1.675.887.900	1.162.596.760	1.077.724.500	970.705.050	970.705.050
	Retribusi Perizinan Tertentu	6.870.222.000	1.554.162.150	1.486.896.680	719.505.575	719.505.575

Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung, Tahun 2022 Data masih 2022

Pasca pandemi covid-19 pertumbuhan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan yang berpengaruh terhadap kemandirian dan pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan produktivitas dan daya saing daerah.

7. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha merupakan peraturan daerah yang memberikan kemudahan dalam melaksanakan usaha antara lain sebagai berikut:

- a. Perda No. 12 Tahun 2004 tentang Upaya Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
- b. Perda No. 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
- c. Perda No. 21 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal;
- d. Perda No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;

- e. Perda No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. Perda No. 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- g. Perda No. 7 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Tabel 2.209
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Perda	5	5	5	7	7

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Temanggung, 2024

Dengan bertambahnya Peraturan Daerah di Kabupaten Temanggung yang mendukung iklim berusaha, pada Tahun 2021 sejumlah 5 Perda menjadi 7 Perda pada tahun 2022, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung konsisten dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada berbagai sektor. Pelaku Usaha di Kabupaten Temanggung diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Kualitas Tenaga Kerja

Semakin tinggi tingkat pendidikannya maka kualitas tenaga kerja semakin tinggi dan sebaliknya. Tingginya tingkat pendidikan seseorang akan terlihat dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga produktif dalam bekerja dan menggambarkan sebagai tenaga kerja yang berkualitas.

Tabel 2.210
Kualitas Tenaga Kerja di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah lulusan Perguruan Tinggi	35,296	29,928	30,586	22,276	22,276
2.	Jumlah Penduduk	791,264	795,556	800,276	807,440	807,440
3.	Rasio lulusan S1/S2/S3	0,045	0,038	0,038	0,026	0,026

Sumber: Dindikcapil Kabupaten Temanggung, Data masih tahun 2022

9. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk produktif adalah penduduk usia 15-64 tahun, sedangkan penduduk tidak produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun dan diatas 65 tahun. Kondisi Rasio Ketergantungan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.211
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Penduduk Usia <15 tahun	176,538	177,988	178,179	179,389	179,389
2.	Jumlah Penduduk usia >64 tahun	67,615	64,267	67,131	71,458	71,458
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif	244,153	242,247	245,310	250,847	250,847
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	547,111	553,309	555,119	556,593	556,593
5.	Rasio ketergantungan	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1
6.	Persentase	44,62	43,79	44,19	45,07	45,07

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Temanggung, 2024

Angka ketergantungan pada tahun 2022 sebesar 45,07% naik dari Tahun 2021 sebesar 44,19%. Semakin naik angka ketergantungan mengandung arti semakin naik pula beban tanggungan bagi kelompok usia produktif dalam menanggung kelompok usia non produktif. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa di Kabupaten Temanggung setiap dua orang penduduk berusia produktif harus menanggung beban satu orang penduduk yang tidak produktif.

Rasio ketergantungan di Kabupaten Temanggung relatif sama yaitu setiap dua orang penduduk berusia produktif harus menanggung beban satu orang penduduk yang tidak produktif. Dari peta persebaran *dependency ratio* bahwa di semua Kecamatan merata sama yaitu 2:1 hanya selisih dua angka di belakang koma.

Bila selisih dua angka di belakang koma dipetakan terlihat bahwa Kecamatan Bejen memiliki *dependency ratio* lebih tinggi dari kecamatan yang lain dan ada 4 (empat) kecamatan yang memiliki *dependency ratio* lebih rendah yaitu Kecamatan Kandangan, Kledung, Tembarak dan Selopampang.

Persentase ketergantungan Kabupaten Temanggung tahun 2022 mencapai angka 45,07% yang bermakna bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 45 penduduk usia non produktif. Peluang melimpahnya usia produktif di Kabupaten Temanggung agar dimanfaatkan bagaimana meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM menjadi lebih unggul dan berdaya saing.

10. Iklim Investasi

Perekonomi secara makro ditunjang oleh adanya usaha yang dilakukan oleh masyarakat sehingga bisa meningkatkan investasi dan penyerapan investasi, Hal ini diperlukan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai tujuan ke-3 RPJMD Kabupaten Temanggung 2019-2023. Peningkatan tersebut dapat ditingkatkan melalui intervensi pemerintah dalam mewujudkan

kemudahan berusaha, “Kemudahan berusaha” adalah salah satu faktor yang akan mendorong peningkatan investasi. Sedangkan gambaran iklim investasi di Kabupaten Temanggung berdasarkan perhitungan Indeks Kemudahan Berusaha sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.212
Indeks Kemudahan Berusaha Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Indeks Kemudahan Berusaha
1	2019	n.a.
2	2020	n.a.
3	2021	78
4	2022	82
5	2023	82

Sumber : DPMPSTSP Kabupaten Temanggung, 2024

11. Fasilitas wilayah Infrastruktur

Fasilitas wilayah infrastruktur merupakan gambaran ketersediaan fasilitas fisik wilayah sebagai akses distribusi barang dan jasa, penyediaan akses berupa prasarana jalan dan jembatan yang dilengkapi dengan transportasi publik, jaringan komunikasi, dan jaringan energi untuk mendukung perekonomian yang inklusif dan berdaya saing. Dalam rangka mengukur ketersediaan fasilitas infrastruktur tersebut, digunakan indikator penilaian pesersentase infrastruktur wilayah kondisi baik, Indikator ini disusun dengan menjumlahkan persentase jalan kondisi mantap, jembatan kabupaten kondisi baik, persentase jaringan irigasi kondisi baik, dan persentase rumah berakses air minum layak, Gambaran ketersediaan fasilitas infrastruktur wilayah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.213
Persentase Infrastruktur Wilayah Kondisi Baik Kabupaten Temanggung

Komponen	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan (%)	81,17	82,37	83,70	83,79	83,79
a.Rumah tangga berakses air minum layak (%)	86,73	93,90	94,52	95,32	95,32
b.Daerah Irigasi dlm kondisi baik (%)	57,41	59,97	58,11	58,83	58,83
c. Jalan kondisi baik (%)	89,14	83,33	89,29	88,15	88,15
d.Jembatan kondisi baik (%)	91,39	92,28	92,88	92,88	92,88

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2024

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan membandingkan target, realisasi dan capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja misi pada tahun N-2, N-1 terhadap target RPJMD 2019-2023

dengan mencantumkan status capaiannya. Adapun status capaian digambarkan dalam simbol penanda dengan bentuk dan warna yang berbeda untuk memudahkan evaluasi, Simbol penanda yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.214
Simbol dan Status Capaian Kinerja RPJMD

Simbol	Status capaian kinerja RPJMD
	Telah tercapai (100)
	Upaya Keras (0 sampai dengan 99,99)

2.2.1 Evaluasi Kinerja Utama

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD 2019-2023, bahwa indikator tujuan merupakan indikator kinerja utama penyelenggaraan pemerintah daerah, Berikut adalah capaian kinerja 8 indikator kinerja utama sampai dengan tahun 2023 (Triwulan IV).

Tabel 2.215
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPd 2023	Cap, RPJMD s.d 2023 (%)	Status Cap.
						Target	Realisasi			
1	Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkeadilan dan berdaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*	-	70,49	70,77	70,49	70,77	100	100	
		Angka Kemiskinan*	%	9,80	9,33	9,80	9,26	100	100	
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi*	%	4,8	5,20	4,8	5,20	100	100	
		Pendapatan Perkapita*	Jutaan rupiah	29,57	30,93	29,57	30,93	100	100	
		Tingkat pengangguran terbuka (TPT)*	%	3,50	2,54	3,50	2,54	100	100	
		Ketimpangan Pendapatan*	%	18,70	18,46	18,70	19,52	100	100	
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks reformasi Birokrasi*	Angka	65	64,61	65	65,17	100	100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	Angka	82	83,41	82	83,41	100	100	

No	Tujuan	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RPKD 2023	Cap, RPJMD s.d 2023 (%)	Status Cap.
						Target	Realisasi			
	RATA - RATA							100	100	

Sumber: *) BPS kabupaten Temanggung,

**) Bagian Organisasi, Setda Kabupaten Temanggung

BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Pada tahun 2023 sampai dengan triwulan IV, capaian indikator kinerja utama RPJMD s.d. 2023 sebesar 100% dengan status upaya keras, Penjelasan terkait peningkatan kinerja dari indikator kinerja utama (8 indikator), sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimana angka ini mengindikasikan tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan. IPM pada tahun 2022 (70,77)² meningkat dari pada tahun 2021 (69,88), capaian angka ini melebihi dari target yang ditetapkan pada RPKD 2022 dan target Perubahan RPJMD 2019-2023. Akan tetapi, IPM Kabupaten Temanggung masih berada dibawah IPM Jawa Tengah dan Nasional.

Pencapaian IPM ini dipengaruhi oleh 4 (empat) komponen yang memerlukan perhatian untuk dapat ditingkatkan kembali, Angka Harapan Hidup (AHH) yang berkaitan dengan derajat kesehatan masyarakat perlu didukung peningkatan asupan gizi yang baik serta perawatan terhadap kesehatan. Selain itu, komponen angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sangat berkaitan erat dengan peningkatan dimensi pengetahuan serta komponen Pengeluaran per Kapita yang berkaitan erat dengan dimensi hidup layak dengan ditunjukkan melalui kemampuan daya beli masyarakat atau angka konsumsi rumah tangga yang dapat menggambarkan peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Hal ini didukung dari indikator perhitungan IPM tersebut yaitu Angka Harapan Hidup di Kabupaten yang cukup baik (75,70) yang lebih tinggi daripada capaian Provinsi Jawa Tengah (74,57), capaian Harapan Lama Sekolah masih dapat tumbuh menguat di tengah pandemi (capaian 12,55) dan Rata-Rata Lama Sekolah dapat meningkat (capaian 7,41), serta pengeluaran

²Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2021

per kapita mulai meningkat kembali (9,773 ribu rupiah/tahun).

Dalam pengukuran kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun dimana pertumbuhan IPM ini menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya, dan semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya. Berdasarkan masing-masing data komponen IPM, dapat disimpulkan bahwa dari capaian dimensi pengetahuan terutama pada capaian RLS yang masih harus berupaya keras untuk mencapai angka optimal. Hal ini ditunjukkan bahwa RLS Kabupaten Temanggung dalam posisi paling rendah apabila dibandingkan dengan pengembangan Gelangmanggung.

2. Angka Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Kabupaten Temanggung tahun 2022 mencapai 73,04 ribu orang³ (9,33%) lebih sedikit jika dibandingkan dengan penduduk miskin tahun 2021 yang tercatat sebesar 79,09 ribu orang (10,17%). Angka kemiskinan Kabupaten Temanggung tahun 2023 (9,16%) lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah (10,93%) dimana indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Temanggung tahun 2023 relatif lebih kecil (1,06%) dari pada Provinsi Jawa Tengah (1,77%), serta indeks keparahan kemiskinan tahun 2023 relatif lebih kecil (0,19%) daripada Provinsi Jawa Tengah (0,42%)⁴.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi 5,2%⁵. Geliat perekonomian sudah mulai terlihat membaik walaupun capaian tersebut apabila disandingkan dengan wilayah pengembangan Gelangmanggung, Kabupaten Temanggung berada pada posisi dua terendah. Upaya pemerintah daerah menggenjot semua sektor lapangan usaha dan tetap dilakukan perbaikan infrastruktur dasar masyarakat seperti perbaikan jalan di beberapa titik pusat kegiatan ekonomi guna memperlancar roda perekonomian.

Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi didasarkan atas

³Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2022

⁴Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2022

⁵Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, "Kabupaten Temanggung dalam Angka 2022".

aktivitas ekonomi pada masing-masing sektor atau lapangan usaha. Tiga sektor utama yang menjadi penggerak utama ekonomi di Kabupaten Temanggung, yaitu sektor pertanian, industri manufaktur dan perdagangan⁶. Sementara itu faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung adalah investasi baik itu investasi fisik maupun investasi modal manusia berupa pendidikan⁷. Pertumbuhan ekonomi bisa naik dengan meningkatkan produktivitas pada setiap sektor perekonomian di Kabupaten Temanggung.

4. Pendapatan per Kapita

Angka ini menggambarkan pendapatan per individu penduduk per tahun yang dihitung dari PDRB ADHB dibagi dengan jumlah penduduk, Pada tahun 2022 pendapatan per kapita meningkat menjadi 39,930⁸ juta rupiah. Hal ini dipengaruhi oleh nilai PDRB yang ikut naik karena pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung meningkat cukup signifikan di tahun 2022.

5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pada kurun lima tahun terakhir, TPT Kabupaten Kabupaten Temanggung tergolong rendah (<3%) serta pencapaian TPT Kabupaten Temanggung lebih baik dibandingkan pencapaian TPT Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional, TPT pada tahun 2022 sebesar 2,54 (dari 100 penduduk usia produktif Kabupaten Temanggung terdapat 2-3 orang pengangguran)⁹. Meskipun demikian, hal tersebut tidak akan mengendorkan semangat kinerja Kabupaten Temanggung untuk dapat mengurangi pengangguran.

6. Ketimpangan Pendapatan

Pada tahun 2022 ketimpangan pendapatan menurun dari angka 18,78 menjadi 18,78. Ketimpangan pendapatan tersebut diukur dari distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia dengan jumlah pendapatan dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibagi total keseluruhan pendapatan seluruh penduduk dikali 100%. Pemerintah Kabupaten Temanggung tetap terus berupaya melaksanakan strategi untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan untuk menanggulangi terjadinya ketimpangan.

⁶Laporan Akhir Analisis Ekonomi Makro Kabupaten Temanggung Tahun 2021". Kerjasama antara Magister Ekonomika Pembangunan FEB UGM dan BAPPEDA Kabupaten Temanggung

⁷Laporan Akhir Analisis Ekonomi Makro Kabupaten Temanggung Tahun 2021". Kerjasama antara Magister Ekonomika Pembangunan FEB UGM dan BAPPEDA Kabupaten Temanggung

⁸Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2021

⁹Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2021

7. Indeks Reformasi Birokrasi

Pada tahun 2022, capaian indeks reformasi birokrasi (64,61) mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 (63,42). Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik. Pencapaian tahun 2022 perlu ditingkatkan lagi dengan strategi peningkatan kapasitas, manajemen, dan kinerja Pemerintah Daerah serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, serta peningkatan kapaistas manajemen dan kinerja Pemerintah Desa dan partisipasi masyarakat.

8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Realisasi indeks kepuasan masyarakat terlihat meningkat pada tahun 2022 (83,41) dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 (82,06). Pengukuran IKM ini menggunakan survei kepuasan masyarakat secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan publik. Nilai IKM Kabupaten Temanggung tahun 2022 sudah menggunakan hasil pengolahan data Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh 65 unit pelayanan. Guna peningkatan indeks kepuasan masyarakat maka perlu adanya inovasi percepatan dan perbaikan pelayanan publik, pemanfaatan kemajuan teknologi informasi maupun peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pelayan publik (Pemerintah).

2.2.2 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Evaluasi kinerja pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang pendidikan diimplementasikan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melalui 2 indikator kinerja sasaran dan 29 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut;

Tabel 2.216
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
Tahun 2023

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD (2023)	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 s,d TW IV (%)	Cap. RPJMD s,d 2023 (%)	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d Tw IV			
	Terpenuhi ya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	tahun	7,80	7,41	7,80	7,5	95,00	96,15	▼
		Angka Harapan Lama Sekolah (AHLs)	tahun	12,49	12,32	12,49	12,55	100	100	●
RATA-RATA								97,5	97,5	▼
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentas e APK SD Sederajat	%	105,05	100,45	105,05	100,45	100	100	●
		Rasio APK Perempua n/Laki- laki SD/SDLB /MI/ Paket A	%	0,965	0,974	0,965	0,974	100	100	●
		Persentas e APM SD Sederajat	%	98,30	91,24	98,30	104,62	1,064	100	●
		Rasio APM Perempua n/Laki- laki SD/SDLB /MI/Pake t A	angka	0,975	0,987	0,975	0,987	100	100	●
		Persentas e ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	%	79,50	89,49	79,50	89,49	100	100	●
		Persentas e SD terakredit asi minimal B	%	96,97	98,16	96,97	98,39	100	100	●
		Angka kelulusan SD	%	100	100	100	100	100	100	●
		Angka putus sekolah SD sederajat	%	0,03	0,03	0,03	0,0157	100	100	●
		Persentas e Pendidika n SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	53,90	61,22	53,90	61,22	100	100	●
		Persentas e APK SMP Sederajat	%	98,59	95,35	98,59	159,33	100	100	●
		Rasio APK Perempua n/Kali- laki	%	1	1,003	1	1,043	100	100	●

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD (2023)	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 s,d TW IV (%)	Cap. RPJMD s,d 2023 (%)	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d Tw IV			
		SMP/SMP LB/MTs/ Paket B								
		Persentas e APM SMP sederajat	%	88	79,77	88	134,35	100	100	●
		Rasio APM Perempua n/Laki- laki SMP/SMP LB/ MTs/ Paket B	%	1,055	1,056	1,055	0,926	100	100	●
		Angka Melanjutk an dari SD sederajat ke SMP sederajat	%	98,50	98,21	98,50	91,12	92,51	92,51	▼
		Persentas e ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	%	95,17	94,14	95,17	94,14	98,92	98,92	▼
		Prosentas e SMP terakredit asi minimal B	%	97,20	86,75	97,20	86,75	89,25	89,25	▼
		Angka kelulusan SMP	%	100	100	100	100	100	100	●
		Angka putus sekolah SMP sederajat	%	0,20	0,29	0,20	0,29	56,81	56,81	▼
		Persentas e pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	63,21	65,53	63,21	65,53	100	100	●
		Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisi pasi dalam Pendidika n dasar(SD/ MI, SMP/MTs	%	100	95,55	100	95,55	95,55	95,55	▼
		Persentas e APK Pendidika n Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	%	76,60	75,18	76,60	75,18	98,14	98,14	▼

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD (2023)	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 s,d TW IV (%)	Cap. RPJMD s,d 2023 (%)	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d Tw IV			
		Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)	%	40,41	39,59	40,41	39,59	97,98	97,98	▼
		Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	94,74	100	94,74	94,74	94,74	▼
		Persentase TK terakreditasi minimal B	%	51	60,30	51	62,27	100	100	●
		Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	%	47,47	48,29	47,47	48,29	100	100	●
		Persentase Angka Melek Huruf usia ≥ 15 tahun	%	98,64	99,59	98,64	98,72	100	100	●
		Persentase angka kelulusan Pendidikan kesetaraan	%	97,19	85,86	97,19	85,86	88,34	88,34	▼
		Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	%	100	27,48	100	27,48	27,48	27,48	▼
		Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah	%	15,80	8,52	15,80	8,86	100	100	●

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD (2023)	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 s,d TW IV (%)	Cap. RPJM D s,d 2023 (%)	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d Tw IV			
	RATA-RATA							94,07	94,07	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Capaian kinerja RKPD dan RPJMD sampai dengan triwulan I tahun 2023 pada indikator sasaran sebesar 97,50 % dengan status upaya keras. Capaian kinerja program RKPD dan RPJMD sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar 94,07 %. Berikut faktor penghambat dan upaya tindak lanjut pada indikator yang masih berstatus upaya keras yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status indikator tersebut :

- a. Pada indikator sasaran yaitu indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS), faktor penghambatnya adalah Kondisi sosial ekonomi masyarakat, kultur sosial budaya masyarakat. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan SPM Pendidikan secara menyeluruh, peningkatan kualitas layanan pendidikan, sosialisasi gerakan kembali ke sekolah.
- b. Pada indikator program yaitu indikator Persentase APM SD Sederajat, faktor penghambatnya adalah banyaknya peserta didik yang usianya tidak dihitung sebagai komponen Angka Partisipasi Murni (APM). Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sosialisasi kepada masyarakat tentang akses pendidikan disesuaikan dengan usia APM.
- c. Pada indikator program yaitu Angka putus sekolah SD sederajat, faktor penghambatnya adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat, kultur sosial budaya masyarakat, penyediaan sarpras pendidikan yang belum merata di semua wilayah. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah penerapan SPM Pendidikan secara menyeluruh, peningkatan kualitas layanan pendidikan lewat perbaikan sarpras dan peningkatan kapasitas SDM. Peningkatan layanan pendidikan Non Formal, sosialisasi gerakan kembali ke sekolah.
- d. Pada indikator program yaitu Persentase APK SMP Sederajat, faktor penghambatnya adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat, kultur sosial budaya masyarakat. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah penerapan SPM Pendidikan secara

- menyeluruh, peningkatan kualitas layanan pendidikan, sosialisasi gerakan kembali ke sekolah.
- e. Pada indikator program yaitu Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B, faktor penghambatnya adalah pemahaman akses pendidikan lebih diutamakan kepada gender laki-laki. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah penerapan SPM Pendidikan secara menyeluruh, peningkatan kualitas layanan pendidikan, sosialisasi gerakan kembali ke sekolah.
 - f. Pada indikator program yaitu Persentase APM SMP sederajat, faktor penghambatnya adalah banyaknya peserta didik yang usianya tidak dihitung sebagai komponen APM. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah penerapan SPM Pendidikan secara menyeluruh, peningkatan kualitas layanan pendidikan, sosialisasi gerakan kembali ke sekolah.
 - g. Pada indikator program yaitu Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/ MTs/ Paket B, faktor penghambatnya adalah pemahaman akses pendidikan lebih diutamakan kepada gender laki-laki. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah penerapan SPM Pendidikan secara menyeluruh, peningkatan kualitas layanan pendidikan, sosialisasi gerakan kembali ke sekolah.
 - h. Pada indikator program yaitu Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat, faktor penghambatnya adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat, kultur sosial budaya masyarakat, pandemi covid-19; penyediaan sarpras pendidikan yang belum merata di semua wilayah. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah penerapan SPM Pendidikan secara menyeluruh, peningkatan kualitas layanan pendidikan lewat perbaikan sarpras dan peningkatan kapasitas SDM, Peningkatan layanan pendidikan Non Formal, sosialisasi gerakan kembali ke sekolah.
 - i. Pada indikator program yaitu Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik, faktor penghambatnya adalah kondisi sarpras di beberapa sekolah tidak sesuai dengan data ada di Dapodik, Terjadinya bencana alam dan keadaan darurat lainnya. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah pendataan kondisi sarpras yang sesuai dengan kondisi di sekolah dan alternatif penganggaran disesuaikan dengan persyaratan sumber dana tersebut, penetapan standar prosedur apabila terjadi kondisi bencana alam dan keadaan darurat lainnya.

- j. Pada indikator program yaitu Persentase SMP terakreditasi minimal B, faktor penghambatnya adalah keterbatasan kuota pelaksanaan akreditasi; keterbatasan anggaran pelaksanaan akreditasi. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah penerapan SPM Pendidikan secara menyeluruh, pengelolaan anggaran sekolah yang ditujukan pada pelaksanaan akreditasi, usulan penambahan kuota akreditasi.
- k. Pada indikator program yaitu Angka putus sekolah SMP sederajat, faktor penghambatnya adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat, kultur sosial budaya masyarakat, penyediaan sarpras pendidikan yang belum merata di semua wilayah. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah penerapan SPM Pendidikan secara menyeluruh, peningkatan kualitas layanan pendidikan lewat perbaikan sarpras dan peningkatan kapasitas SDM, Peningkatan layanan pendidikan Non Formal, sosialisasi gerakan kembali ke sekolah.
- l. Pada indikator program yaitu Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs), faktor penghambatnya adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat, kultur sosial budaya masyarakat. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan SPM Pendidikan secara menyeluruh, peningkatan kualitas layanan pendidikan, sosialisasi gerakan kembali ke sekolah.
- m. Pada indikator program yaitu Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun), faktor penghambatnya adalah pelayanan pendidikan untuk jenjang PAUD Formal yang relatif belum merata, serta kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat, Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan SPM Pendidikan khususnya di jenjang PAUD, Peningkatan kualitas pendidikan jenjang PAUD Formal.
- n. Pada indikator program yaitu Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun), faktor penghambatnya adalah pelayanan pendidikan untuk jenjang PAUD Formal yang relatif belum merata, serta kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah penerapan SPM Pendidikan khususnya di jenjang PAUD dan peningkatan kualitas pendidikan jenjang PAUD Formal.

- o. Pada indikator program yaitu Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, faktor penghambatnya adalah pelayanan pendidikan untuk jenjang PAUD Formal yang relatif belum merata, serta kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah penerapan SPM Pendidikan khususnya di jenjang PAUD dan peningkatan kualitas pendidikan jenjang PAUD Formal.
- p. Pada indikator program yaitu Persentase angka kelulusan Pendidikan kesetaraan, upaya tindak lanjut untuk meningkatkan persentase angka kelulusan Pendidikan Kesetaraan adalah dengan menerapkan SPM Pendidikan secara menyeluruh, kegiatan belajar mengajar sesuai kurikulum yang ditetapkan.
- q. Pada indikator program yaitu Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan, faktor penghambatnya adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat, kultur sosial budaya masyarakat, keterbatasan layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga kesetaraan. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan kampanye Gerakan Kembali Ke Sekolah, Pendataan AUSTS dan Kebijakan tindaklanjutnya, penataan layanan pendidikan kesetaraan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah layanan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan diimplementasikan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah dengan 1 indikator kinerja sasaran dan 44 indikator kinerja program, Dan RSUD ada 1 indikator kinerja sasaran dan 2 indikator kinerja program dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini

Tabel 2.217
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2023
s.d Triwulan IV

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 20 22	2023		Tingkat Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2023	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tah un	75,53	75,70	75,53	75,70	100	100	
		Indeks Kinerja RSUD	%	80	93	80	93	100	100	

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun20 22	2023		Tingkat Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2023	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
RATA - RATA								100	100	●
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya	Angka Kematian Ibu	%	67,5	75,32	67,5	9,06	100	100	●
		Angka kematian bayi (AKB)	%	12	13,23	12	13,10	90,81	90,81	▼
		Prevalensi ballita gizi buruk	%	0,5	0,31	0,5	0,31	100	100	●
		Prosentas e rumah tangga yang memiliki jamban	%	83,84	100	83,84	90,22	100	100	●
		Persentas e Puskesmas yang sarprasny a sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentas e ketersedia an obat sesuai kebutuha n	%	98	98,72	98	98,37	100	100	●
		Cakupan ibu hamil mendapat kan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	●
		Cakupan ibu bersalin mendapat kan pelayanan persalina n kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	●
		Cakupan pertolong an persalina n oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompeten si kebidana n	%	100	100	100	100	100	100	●

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun20 22	2023		Tingkat Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2023	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		Persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	●
		Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	%	72	100	72	100	100	100	●
		Angka Kematian Neonatal per 1,000 Kelahiran Hidup	%	7	9,15	7	7	83,81	83,81	▼
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	92,95	100	100	100	100	●
		Angka Kematian Balita	%	13,6	15,60	13,6	16,70	77,24	77,24	▼
		Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	82,05	100	100	100	100	●
		Persentase warga negara Indonesia usia 15 s,d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	89,07	100	100	100	100	●
		Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun	%	100	83,22	100	100	100	100	●

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun20 22	2023		Tingkat Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2023	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		keatas mendapat kan skrining kesehatan sesuai standar								
		Persentas e kunjunga n baru di pelayanan kesehatan dasar (Kunjung an Rawat Jalan di Puskesma s)	%	43,5	43	43,5	45,45	100	100	●
		Persentas e fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik pemerinta h terakredit asi utama	%	53,85	40,00	53,85	100,00	100	100	●
		Persentas e penderita Hipertensi mendapat kan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	84,78	100	14,53	14,53	14,53	▼
		Persentas e penderita Diabetes Melitus (DM) mendapat kan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	123,45	100	39,17	39,17	39,17	▼
		Persentas e Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat kan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	104	100	50,46	50,46	50,46	▼
		Persentas e orang terduga TBC	%	100	95,65	100	36,34	36,34	36,34	▼

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun20 22	2023		Tingkat Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2023	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		mendapat kan pelayanan TBC sesuai standar								
		Persentas e orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapat kan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	87,03	100	18,62	18,62	18,62	▼
		Persentas e Penangan an KLB 1x24 jam	%	100	100	100	100	100	100	●
		Angka penemua n kasus malaria	%	<1	0,0002	<1	0,0001	100	100	●
		Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	%	<20	3,62	<20	0,87	100	100	●
		Angka Penemua n Kasus Baru Kusta	%	<1	0,125	<1	0,00	100	100	●
		Persentas e Desa/kel urahan UCI	%	100	99,65	100	0,00	0,00	0,00	▼
		Persentas e anak umur 1 tahun diimunisa si campak	%	95	97,05	95	19,26	20,28	20,28	▼
		Prevalensi gizi kurang (underwei ght) pada anak balita (0- 60bulan)	%	15,5	3,41	15,5	5,07	100	100	●
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	%	27	13,03	27	10	100	100	●

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun20 22	2023		Tingkat Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2023	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		Persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	%	80	82,33	80	87,57	100	100	●
		Prevalensi anemia pada ibu hamil	%	20	13,44	20	2,83	100	100	●
		Persentase desa bebas rawan gizi	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase rumah sehat	%	82	87,42	82	80,41	98,06	98,06	▼
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	%	100	100	100	100	100	100	●
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman	Cakupan puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar	%	62	100	62	100	100	100	●
		Cakupan Penggunaan Obat Rasional (POR) di puskesmas	%	77	96,15	77	84,62	100	100	●
		Pengawasan makanan minuman di pasar tradisional	%	100	100	100	0	0	0	▼
		Persentase sarana pelayanan mendapatkan ijin kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	●
		Cakupan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) yang mendapat SPP-IRT	%	100	100	100	100	100	100	●
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat (PHBS)	%	83,09	94,96	83,09	0,37	0,44	0,44	▼

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun20 22	2023		Tingkat Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2023	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		Rumah Tangga) Strata Utama dan Paripurna								
6	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan nilai akreditasi RSUD	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentas e pemenuh an kebutuha n sarana dan prasarana rumah sakit	%	54	56,35	54	56,35	100	100	●
RATA-RATA								98,67	98,67	●

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Capaian kinerja RKPD dan RPJMD sampai dengan tahun 2023 pada indikator sasaran telah tercapai 100%, capaian indikator kinerja program pada RKPD dan RPJMD sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar 98,67% dengan status upaya keras.

Berikut faktor penghambat dan upaya tindak lanjut pada indikator yang masih berstatus upaya keras yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status indikator tersebut :

- a. Pada indikator kinerja program Angka kematian bayi (AKB), faktor penghambatnya adalah kelengkapan sarana prasarana penanganan kegawatdarutan asfiksi atau penyakit pada bayi dan kapasitas dan keterampilan tenaga kesehatan dalam penanganan kasus kegawadaruratan dan stabilisasi pasien pra rujukan; sistem rujukan untuk penanganan rujukan persalinan, penanganan bayi dengan komplikasi serta kualitas kunjungan neonatal dan pengelolaan manajemen laktasi yang belum maksimal. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melaksanakan pola perbaikan nutrisi pada ibu hamil, peningkatan kualitas pelayanan persalinan dan peningkatan kualitas pelayanan bayi baru lahir; perbaikan serta peningkatan kualitas, mutu dan komitmen dalam pelaksanaan kunjungan neonatal dan pelaksanaan manajemen laktasi (IMD); peningkatan gizi pada balita ini dipengaruhi oleh peningkatan pengetahuan ibu tentang gizi, melalui kegiatan

sosialisasi dan penyuluhan, perbaikan ekonomi keluarga, perbaikan perilaku pengasuhan, konsumsi makanan dengan gizi seimbang dan peningkatan kesehatan ibu dan anak serta berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan balita yaitu dengan melakukan pengamatan/pemantauan tumbuh kembang balita secara rutin setiap bulan.

- b. Pada indikator program Persentase rumah tangga yang memiliki jamban, faktor penghambat masih adanya perilaku/ kebiasaan/ budaya masyarakat yang belum memprioritaskan kepemilikan jamban. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah mengalokasikan anggaran desa untuk bantuan pengadaan jamban. Dinas kesehatan juga melaksanakan koordinasi lintas sektor terkait pengadaan jamban untuk syarat rumah sehat dan terus mengembangkan inovasi MINTI JAMBUL agar dapat diadopsi oleh puskesmas lain.
- c. Pada indikator kinerja program Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar, faktor penghambat Melatih kader kesehatan untuk turut medampingi, mendeteksi ibu hamil dengan masalah kesehatan serta gencar melakukan sosialisasi terkait semua aspek kesehatan ibu hamil dalam rangkaian kegiatan KIA (kelas ibu hamil, kunjungan ANC, posyandu. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melatih kader kesehatan untuk turut medampingi, mendeteksi ibu hamil dengan masalah kesehatan serta gencar melakukan sosialisasi terkait semua aspek kesehatan ibu hamil dalam rangkaian kegiatan KIA (kelas ibu hamil, kunjungan ANC, posyandu, dll).
- d. Pada indikator kinerja program Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan kesehatan sesuai standar, faktor penghambat pelaksanaan pendampingan ibu hamil yang mempunyai faktor resiko kehamilan; pemberian pelayanan ANC sampai dengan nifas sesuai standar dan sosialisasi perencanaan kehamilan sehat kepada masyarakat masih proses pelaksanaan oleh Dinas Kesehatan. Dalam indikator ini sasaran menggunakan angka estimasi berdasarkan perhitungan Kemenkes yang ditetapkan dengan SK Bupati Temanggung Nomor 440/020 Tahun 2023. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan Melatih kader kesehatan untuk turut medampingi, mendeteksi ibu hamil dengan masalah kesehatan serta gencar melakukan sosialisasi

terkait semua aspek kesehatan ibu hamil dalam rangkaian kegiatan KIA (kelas ibu hamil, kunjungan ANC, posyandu).

- e. Pada indikator kinerja program Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, faktor penghambatnya dikarenakan pelaksanaan pendampingan ibu hamil yang mempunyai faktor risiko kehamilan; pemberian pelayanan ANC sampai dengan nifas sesuai standar dan sosialisasi perencanaan kehamilan sehat kepada masyarakat masih proses pelaksanaan oleh Dinas Kesehatan. Dalam indikator ini sasaran menggunakan angka estimasi berdasarkan perhitungan Kemenkes yang ditetapkan dengan SK Bupati Temanggung No.440/020 Tahun 2023. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan refreshing pengetahuan tenaga kesehatan terhadap penanganan kasus kegawat daruratan maternal internal di setiap Puskesmas; mengagendakan kunjungan tim spesialis kebidanan ke Puskesmas untuk pendeteksian dan penanganan resiko tinggi ibu hamil dan bersalin dan; mengadakan jadwal rutin kunjungan tim spesialis untuk peningkatan pengetahuan nakes dalam penanganan kegawatdaruratan maternal di pelayanan dasar.
- f. Pada indikator kinerja program Persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan, faktor penghambatnya dikarenakan pelaksanaan pendampingan ibu hamil yang mempunyai faktor resiko kehamilan; pemberian pelayanan ANC sampai dengan nifas sesuai standar dan sosialisasi perencanaan kehamilan sehat kepada masyarakat masih proses pelaksanaan oleh Dinas Kesehatan. Dalam indikator ini sasaran menggunakan angka estimasi berdasarkan perhitungan Kemenkes yang ditetapkan dengan SK Bupati Temanggung No.440/020 Tahun 2023. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah peningkatan kesiapan Puskesmas mampu tatalaksana persalinan dan Puskesmas PONED terhadap kasus kegawatdaruratan serta pemenuhan sarana prasarana utk penanganan kasus kegawatdaruratan termasuk sarana prasarana untuk rujukan.
- g. Pada indikator kinerja program Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, faktor penghambatnya adalah masih menggunakan data riil bayi baru lahir tahun 2022. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan

tersebut adalah adanya tindakan optimalisasi pemeliharaan dan pembangunan fasilitas kesehatan yang lengkap (RS; Puskesmas, Klinik) sebagai fasilitas layanan kesehatan bayi baru lahir di Kabupaten Temanggung termasuk tersediannya puskesmas PONED (Ngadirejo, Pringsurat; Gemawang; Bejen) untuk mempermudah akses layanan Kesehatan yang terus dilakukan perbaikan.

- h. Pada indikator kinerja program Angka Kematian Neonatal per 1,000 Kelahiran Hidup, faktor penghambatnya adalah kualitas kunjungan neonatal yang belum optimal serta pengelolaan manajemen laktasi yang belum maksimal. Dalam kelengkapan sarana prasarana masih belum semua Puskesmas memiliki sarana prasarana penanganan kegawatdaruratan terutama asfiksi atau penyakit pada bayi yang optimal. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kesehatan dalam penanganan kasus kegawatdaruratan dan stabilisasi pasien pra rujukan juga perlu ditingkatkan. Perbaikan sistem sangat diperukan terutam terkait sistem rujukan untuk penanganan rujukan persalinan, penanganan bayi dengan komplikasi.
- i. Pada indikator kinerja program Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar, faktor penghambat masih menggunakan daata data penduduk yang di rilis disdukcapil tahun 2022 semester 2. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah peningkatan kesiapan Puskesmas mampu tatalaksana persalinan dan Puskesmas PONED kasus kegawatdaruratan; pemenuhan sarana prasarana untuk Puskesmas Ramah Anak dan penggerakan kegiatan kelas balita sudah mampu menjangkau sasaran/masyarakat.
- j. Pada indikator kinerja program Angka Kematian Balita, faktor penghambatnya adalah risiko kehamilan tinggi dan adanya infeksi pada bayi, kurangnya pendidikan pola asuh balita dan pemantauan tumbuh kembang balita. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah pedeteksian faktor risiko kehamilan secara rutin dan berkala; peningkatan dan pengelolaan pendidikan pola asuh terhadap bayi dan balita serta pendidikan/ pelatihan/ pemberdayaan kegiatan deteksi faktor risiko pada bayi dan balita oleh keluarga.

- k. Pada indikator kinerja program Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, faktor penghambatnya adalah perhitungan untuk capaian skrining dilaksanakan bulan Mei dan November namun sudah mulai dilakukan pada beberapa sekolah. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melaksanakan kerjasama dengan pihak sekolah untuk pemantauan kesehatan secara virtual dan *offline* bila memungkinkan serta sosialisasi untuk menanamkan kesadaran siswa untuk aktif mendeteksi kesehatan pribadi dan segera menghubungi pihak sekolah / tenaga kesehatan bila ada gejala.
- l. Pada indikator kinerja program Persentase warga negara Indonesia usia 15 s,d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, faktor penghambatnya adalah adanya kendala pada pemeriksaan posbindu yang belum optimal karena tidak mampu menyelenggarakan tempat periksaan standar yaitu pemeriksaan berat badan untuk indikator obesitas, tekanan darah untuk identifikasi hipertensi, pemeriksaan gula darah dan kesehatan jiwa, Kesadaran masyarakat untuk hidup sehat kurang optimal. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah meningkatkan layanan skrining dengan peningkatan peran kader, peran masyarakat dan pengaktifan kembali posyandu untuk penjangkaran deteksi.
- m. Pada indikator kinerja program Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, faktor penghambatnya adalah belum semua posyandu lansia aktif dan kurangnya kesadaran masyarakat. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah aktivasi kegiatan Posyandu lansia; peningkatan kemampuan kader lansia dan melibatkan lintas sektor terkait untuk berpartisipasi dalam kegiatan di Posyandu lansia.
- n. Pada indikator kinerja program Persentase kunjungan baru di pelayanan kesehatan dasar (Kunjungan Rawat Jalan di Puskesmas), faktor penghambatnya adalah adanya fasilitas kesehatan swasta (klinik, praktek bidan mandiri dll) sehingga masyarakat tidak selalu ke puskesmas dan belum semua data kunjungan terinput dalam SIMPUS. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan

tersebut adalah dengan melakukan promosi di media sosial terkait layanan puskesmas untuk meningkatkan kunjungan.

- o. Pada indikator kinerja program Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik pemerintah terakreditasi utama, faktor penghambatnya adalah Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah meningkatkan pendampingan dari Dinas Kesehatan.
- p. Pada indikator kinerja program Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, faktor penghambatnya adalah belum ada survey akreditasi dari Kementerian Kesehatan. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah mendorong pelaksanaan deteksi dini dan penemuan kasus hipertensi melalui kerjasama lintas program yang ada di Puskesmas; mendorong peningkatan pelayanan kasus hipertensi sesuai standar serta menghimpun data dari faskes swasta di wilayah kerja Puskesmas, Selain itu Dinas Kesehatan optimis dapat mencapai target karena terdapat data skrining vaksinasi yang nantinya dapat dipergunakan untuk pendataan penderita hipertensi dan dilakukan tindak lanjut berupa layanan kesehatan ke fasilitas kesehatan.
- q. Pada indikator kinerja program Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, faktor penghambatnya adalah dalam pelaporan data *by name by address* dari faskes swasta belum optimal karena laporan belum rutin dilakukan sehingga evaluasi masih belum berjalan optimal, Dalam keberjalanan program pelayanan hipertensi sesuai standar tidak semua kasus hipertensi tercover kegiatan Prolanis sehingga sulit untuk memenuhi indikator kunjungan minimal 1 bulan sekali pada penderita DM. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah mendorong pelaksanaan deteksi dini dan penemuan kasus DM melalui kerjasama lintas program yang ada di Puskesmas, mendorong peningkatan pelayanan kasus DM sesuai standar, menghimpun data dari faskes swasta di wilayah kerja Puskesmas.
- r. Pada indikator kinerja program Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, faktor penghambatnya adalah masyarakat enggan melaporkan keluarganya yang ODGJ. Upaya tindak lanjut untuk

mengatasi permasalahan tersebut adalah membuat kerjasama dengan RSJ Magelang untuk peningkatan kualitas SDM Kesehatan dalam pemeriksaan dan penanganan kesehatan jiwa pada ODGJ, mendorong pelaksanaan deteksi dini dan penemuan kasus ODGJ melalui kerjasama lintas program yang ada di Puskesmas; mendorong peningkatan pelayanan kasus ODGJ sesuai standard an meningkatkan peran lintas sektor dalam pelayanan dan penanganan kasus ODGJ.

- s. Pada indikator kinerja program Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar, faktor penghambatnya adalah kendala pemeriksaan TCM bagi terduga TBC, dari 16 modul TCM yang seharusnya bisa digunakan, hanya tinggal 9 modul yang bisa beroperasi (2 modul di RSUD Temanggung, 3 modul di Puskesmas Ngadirejo dan 4 modul di Puskesmas Bulu), dengan utilisasi penggunaan alat TCM lebih dari 200%, Dalam 1 bulan kapasitas maksimal pemeriksaan 1 modul TCM adalah 50 pemeriksaan terduga TBC. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan penegakan diagnosis terduga TBC di fasilitas pelayanan kesehatan non TCM dapat dilakukan dengan pemeriksaan mikroskopis, Kegiatan investigasi kontak pasien TBC yang selama ini sudah berjalan juga semakin dimaksimalkan lagi.
- t. Pada indikator kinerja program Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar, faktor penghambatnya adalah penjangkaran pada kelompok populasi kunci masih belum maksimal, masih ada populasi beresiko seperti ibu hamil dan pasien TB yang menolak diperiksa HIV, Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan perluasan layanan *test and treat* HIV AIDS di Kabupaten Temanggung, dengan pembentukan Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP) HIV AIDS di tingkat Puskesmas.
- u. Pada indikator kinerja program Persentase Desa/kelurahan UCI, faktor penghambatnya adalah pendataan dilakukan diakhir tahun dan adanya penolakan imunisasi di desa Bonjor dan Plosogaden. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melakukan advokasi secara berkelanjutan kepada semua desa/kelurahan untuk melaksanakan imunisasi.

- v. Pada indikator kinerja program Persentase anak umur 1 tahun diimunisasi campak, faktor penghambatnya adalah tidak tersedia data penduduk berdasarkan umur tertentu. Adanya penolakan imunisasi di Desa tertentu. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat melalui tenaga kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemberian media KIE terkait imunisasi. Untuk peningkatan kualitas imunisasi dilakukan deteksi penyakit PD3I melalui surveilans aktif Puskesmas dan RS dengan pembinaan dan pendampingan Puskesmas, *sweeping door to door* untuk penjangkauan sasaran yang belum mendapatkan layanan imunisasi, Dilakukan juga pelaporan KIPI, Penyelidikan Epidemiologi keaduan KIPI dan kajian terkait KIPI bersama dengan tenaga kesehatan, Selain itu dilakukan kerjasama lintas program, lintas sektor, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program imunisasi, Pelaksanaan validasi data terkait capaian imunisasi dan data alokasi vaksin ke Puskesmas dan RS. Dilakukannya pendataan aset pendukung pelaksanaan program imunisasi, serta supervisi ke Puskesmas dan RS terkait progrm Imnisasi.
- w. Pada indikator kinerja program Persentase rumah sehat, faktor penghambatnya adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang indikator rumah sehat. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui kegiatan yang dilakukan oleh DPRKPLH dan DPU.
- x. Pada indikator kinerja program Pengawasan makanan minuman di pasar tradisional, faktor penghambatnya adalah capaiannya cakupan pengawasan makanan minuman di pasar tradisional masih 0% dikarenakan pada triwulan I belum dilaksanakan pengawasan dan baru dilakukan pada bulan April. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melakukan pengawasan makan dan minuman di pasar tradisional pada triwulan II dan IV.
- y. Pada indikator kinerja program Persentase Rumah Tangga Sehat (PHBS Rumah Tangga) Strata Utama dan Paripurna, faktor penghambatnya adalah perubahan indikator PHBS yang belum final dari Kementerian Kesehatan. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah peningkatan kerjasama dengan kader posyandu dalam kegiatan pendataan di masing masing desa se-

Kabupaten Temanggung bekerjasama dengan kader posyandu dan koordinasi lintas program.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang diimplementasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan 2 indikator kinerja sasaran dan 9 indikator kinerja program penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut Ini.

Tabel 2.218
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Tingkat Cap. RKPD 2023 s,d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	%	84	83,79	84	84,71	100	1000	●
		Persentase Pemanfaatan Tata Ruang Sesuai rencana tata ruang	%	89,50	88,56	89,50	89,56	100	100	●
RATA-RATA								100	100	●
1,	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi (D,I)	%	97	97,97	97	97,97	100	100	●
		Persentase jaringan irigasi kondisi baik	%	59,32	58,83	59,32	59,36	100	100	100
2,	Program Pengelolaan dan Pengembangan Penyediaan Air Minum	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	%	90	95,32	90	95,32	100	100	●
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	100	100	100	100	100	●
4,	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	%	50	69,04	50	69,33	100	100	●
5,	Program Pengembangan Pemukiman	Persentase desa terfasilitasi kegiatan bankeu/hibah	%	100	100	100	100	100	100	●

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Tingkat Cap. RKPD 2023 s,d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
6,	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase gedung Pemerintah kondisi Baik	%	80	86,82	80	86,82	100	100	●
7,	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase trotoar kondisi baik	%	62	73,93	62	65,88	100	100	●
8,	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan Kabupaten kondisi mantap	%	85	88,15	85	87,12	100	100	●
		Persentase jembatan Kabupaten kondisi baik	%	93,73	92,88	93,73	94,36			●
9,	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Tersedianya layanan informasi jasa konstruksi	%	90	100	90	100	100	100	●
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	%	88,1	88,56	88,1	89,31	100	100	●
Rata-Rata								100	100	●

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Capaian kinerja RKPD dan RPJMD sampai dengan triwulan I tahun 2023 indikator sasaran sebesar 99,62 % dengan status upaya keras. Capaian kinerja program RKPD dan RPJMD sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar 100 %. Berikut faktor penghambat dan upaya tindak lanjut pada indikator yang masih berstatus upaya keras yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status indikator tersebut :

- a. Pada indikator sasaran yaitu indikator persentase infrastruktur kondisi baik faktor penghambatnya adalah belum optimalnya tertanganinya infrastruktur secara merata. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mengoptimalkan penanganan infrastruktur dari berbagai sumber penganggaran.
- b. Pada indikator sasaran yaitu indikator persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang faktor penghambat diantaranya adalah 1). Masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tata ruang 2). Belum lengkapnya instrumen dasar atau aturan dalam kegiatan pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang, dan 3). Belum terstrukturnya lembaga pengawasan dan pengendalian tata ruang. Upaya tindak lanjut

untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mempercepat pengesahan Perda RTRW dan Perbup RDTR; Melakukan Komunikasi aktif dengan Kementerian ATR; Memfasilitasi kegiatan Forum Penataan Ruang (lintas OPD); dan Memberi surat teguran kepada pelanggar Tata Ruang.

- c. Pada indikator program yaitu indikator persentase jaringan irigasi kondisi baik faktor penghambat diantaranya adalah 1). Adanya bencana Alam 2). Kondisi eksisting infrastruktur jaringan irigasi tingkat kerusakan lebih tinggi daripada kemampuan anggaran untuk rehabilitasi/pemeliharaannya, dan 3). Alih fungsi lahan pertanian. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan pencegahan dini pada infrastruktur jaringan irigasi yang berada pada daerah yang rawan akan bencana dengan tujuan mencegah kerusakan lebih tinggi akibat kejadian bencana.
- d. Pada indikator program yaitu indikator persentase jembatan kabupaten kondisi baik faktor penghambat adalah masih adanya ruas jembatan yang masih dibawah standar. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mengoptimalkan standar kualitas pelayanan jembatan dan memprioritaskan pembangunan infrastruktur jembatan.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman diimplementasikan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dengan 1 indikator kinerja sasaran dan 6 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja pada tabel berikut:

Tabel 2.219
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Tingkat Cap. RKPD 2022 s,d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2022	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni	%	97,97	98,99	97,97	98,99	100	100	
Rata-Rata								100	100	
1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	5	5,25	5	4,50	100	100	

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Tingkat Cap. RKPD 2022 s,d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2022	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	%	86,8	88,11	86,8	88,11	100	100	●
2	Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	%	89,42	94,75	89,42	94,75	100	100	●
		Persentase kawasan kumuh perkotaan	%	18,25	4,86	18,25	4,86	100	100	●
		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100	100	●
Rata-Rata								100	100	●

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD sampai dengan triwulan IV tahun 2023 pada indikator sasaran sebesar 100 %. Capaian indikator program sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar 100 % berstatus upaya keras. Berikut faktor penghambat dan upaya tindak lanjut pada indikator yang masih berstatus upaya keras yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status indikator tersebut yaitu pada indikator program yaitu indikator persentase rumah tidak layak huni (RTLH) dengan faktor penghambat diantaranya adalah penganggaran RTLH masih bertumpu dari Bankeu Prov dan APBN, kuantitas/jumlah personil ASN teknis bidang perumahan permukiman kurang untuk melakukan pendataan/pemutakhiran data. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan meningkatkan sinergitas dengan seluruh pihak terkait dalam memaksimal pelaksanaan pembangunan RTLH menjadi RLH serta melakukan pendataan lebih intensif dengan pihak terkait untuk keakuratan data jumlah rumah di Kabupaten Temanggung meliputi rumah layak huni dan tidak layak huni.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat diimplementasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melalui 1 indikator kinerja sasaran dan 8 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.220
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Tingkat Cap. RKPD 2023 s,d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Indek Rasa Aman	Angka	4,44	4,55	4,44	4,55	100	100	●
RATA-RATA								100	100	●
1	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	%	100	100	100	100	100	100	●
		Rasio Linmas per RT	rasio	1,62	1,42	1,62	1,627	100	100	●
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	%	100	100	100	100	100	100	●
2	Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	%	61	60,64	60,81	60,64	99,42	99,42	▼
		Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	%	69,8	60	69,8	63	89,54	89,54	▼
		Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten	angka	44	468	43	137	100	100	●
		Persentase aparatur yang memenuhi standar kualifikasi	%	44	80	43	96	100	100	●
		Persentase warga negara yang	%	100	43,75	100	43	42,86	42,86	▼

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Tingkat Cap. RKPD 2023 s,d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran								
RATA-RATA								89,96	89,96	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD sampai dengan triwulan I tahun 2023 pada indikator sasaran sebesar 89,96 %. Capaian indikator program sampai dengan triwulan I tahun 2023 sebesar 89,96 % berstatus upaya keras. Berikut faktor penghambat dan upaya tindak lanjut pada indikator yang masih berstatus upaya keras yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status indikator tersebut yaitu :

- a. Pada indikator program yaitu indikator rasio Linmas per RT, faktor penghambatnya adalah 1). Animo masyarakat untuk menjadi anggota Linmas sangat kecil, karena tidak mendapatkan gaji/upah/tunjangan/santunan apa pun, sehingga anak muda lebih memilih untuk bekerja di sektor ekonomi yang lain. 2). Pemutakhiran data jumlah Linmas sangat sulit dilaksanakan karena dari pihak desa kesulitan untuk melaksanakan pendataan (ujung-ujungnya dikira memberi bantuan) , dan 3). Sebaran jumlah Linmas yang tidak merata. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengadakan pembinaan linmas ke desa/kelurahan.
- b. Pada indikator program yaitu indikator cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten, faktor penghambatnya adalah 1). Wilayah Temanggung yang luas dengan topografi pegunungan, perbukitan dan Lembah. 2). Model permukiman yang berkerumun mengakibatkan akses jalan lingkungan yang kecil; dan 3). Pengetahuan warga mengenai bahaya kebakaran masih rendah. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan sarpras, kompetensi pegawai, dan melakukan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pada indikator program yaitu indikator Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*), faktor penghambatnya diantaranya adalah 1). Kondisi kendaraan damkar yang kurang layak untuk pelaksanaan

operasi penanggulangan kebakaran khususnya saat dipergunakan dlm kondisi kecepatan tinggi, berisi air dan jalan yang berliku, naik turun atau gelombang yang dapat membahayakan keselamatan orang yang ada didalam kendaraan maupun yang berada di sekitar kendaraan damkar, 2). Kondisi pemukiman yang berkelompok serta akses jalan yang kecil, menyulitkan kendaraan damkar untuk cepat sampai ke lokasi kejadian, 3). Kompetensi anggota damkar khususnya penerapan strategi pemadaman disesuaikan dengan objek yang terbakar dan lingkungan sekitarnya perlu ditingkatkan, karena setiap kebakaran memiliki strategi pemadaman yang berbeda agar proses pemadaman dapat cepat, efektif dan efisien, 4). Kesadaran masyarakat saat terjadi kebakaran masih rendah, mulai dari masyarakat yang tidak memberi jalan untuk kendaraan damkar meski sudah dinyalakan sirine maupun masyarakat yang berkerumun di lokasi kebakaran untuk mengambil foto atau menonton yang menghambat pergerakan anggota dan kendaraan damkar dalam proses pemadaman, 5). Kondisi peralatan pemadam kebakaran seperti (mesin pompa air, selang, koneksi, nozel, dll) yang sudah tua dan lapuk karena usia dan sering dipergunakan mengakibatkan proses pemadaman lambat, lama, tidak efektif dan efisien contohnya, selang yang bocor di beberapa titik, nozel yg semprotannya tidak sempurna, dll. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memberikan sosialisasi kepada warga agar cepat memberikan laporan bila terjadi kebakaran dan menambah pos pemadam di Kawasan.

- d. Pada indikator program yaitu indikator Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, faktor penghambat diantaranya adalah 1). Wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontour pegunungan, portal, jalan sempit, 2). Lokasi Pos Pemadam Kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran, 3). Luasnya daerah layanan tidak sebanding dengan jumlah Pos Pembantu yang hanya berdiri di Pringsurat dan Candiroto serta minimnya sarana dan prasarana untuk pendukung penyelamatan dan evakuasi, 4). Terbatasnya sumber air dan belum tersedianya sumber air (*groundtank*) di masing - masing Pos untuk mempercepat proses pelayanan kebakaran. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan

kebakarandan memenuhi kebutuhan sarana sumber air (*groundtank*) di Pos Damkar.

Sementara itu, capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Fungsi Penanggulangan Bencana yang diimplementasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan 1 indikator kinerja sasaran, dan 9 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana berikut ini:

Tabel 2.221
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Fungsi Lainnya Penanggulangan Bencana Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2023	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Indek Resiko Bencana	angka	192,08	174,59	192,08	78,76	100	100	●
RATA-RATA								100	100	●
1	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan desa tangguh bencana	%	10,47	11,98	10,47	11,98	100	100	●
		Persentase tertangannya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase Tertangannya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana	%	86,4	109,22	86,4	109,22	100	100	●
		Persentase tertangannya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada	%	100	100	100	100	100	100	●

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2023	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		pasca bencana								
		Persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana	%	100	100	100	100	0	0	▼
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	●
RATA-RATA								88,89	88,89	▼

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD sampai dengan triwulan I tahun 2023 pada indikator sasaran sebesar 88,89 %. Capaian indikator program sampai dengan triwulan I tahun 2023 sebesar 88,89 % berstatus upaya keras. Berikut faktor penghambat dan upaya tindak lanjut pada indikator yang masih berstatus upaya keras yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status indikator tersebut yaitu pada indikator program yaitu indikator persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana, faktor penghambatnya adalah tidak adanya bantuan yang diberikan kepada korban bencana pada pasca bencana dikarenakan bantuan yang diberikan kepada korban adalah pada saat tanggap darurat bencana. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah peningkatan pemberian

bantuan kepada korban bencana pada pasca bencana sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Sosial diimplementasikan oleh Dinas Sosial dengan 1 indikator kinerja sasaran dan 14 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 2.222
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Sosial (PMKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	63	64,30	63	65,29	100	100	
RATA-RATA								100	100	
1	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	100	
2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%	100	100	100	100	100	100	
3	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak telantar yang	%	100	100	100	100	100	100	

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKP 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti								
		Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	●
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial		1,22	11,58	1,22	1,05	86,34	86,34	●
4	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	%	85	100	85	100	100	100	●
		Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	%	95	91,11	95	100	100	100	●

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	%	10,2	100	10,2	100	100	100	●
		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	48	61,70	48	53,69	100	100	●
5	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	%	100	100	100	100	100	100	●
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase terpeliharaan Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	100	100	100	●
RATA-RATA								100	100	●

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD sampai dengan triwulan IV tahun 2023 pada indikator sasaran sebesar 100%. Capaian indikator program sampai dengan triwulan I tahun 2023 sebesar 91,78 % berstatus upaya keras. Berikut faktor penghambat dan upaya tindak lanjut pada indikator yang masih berstatus upaya keras yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status indikator tersebut yaitu :

- a. Pada indikator sasaran yaitu indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani, faktor penghambat adalah masih terdapat exclusion error dan inclusion error dalam DKD dikarenakan kurang aktifnya desa/kelurahan. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah adanya kegiatan yang dapat menampung atau memfasilitasi bagi PPKS secara berkelanjutan.
- b. Pada indikator program yaitu indikator Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di luar panti sosial, faktor penghambat Kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi PPKS di luar panti merupakan kegiatan respon kasus, kurang optimalnya dukungan kegiatan bimbingan bagi disabilitas, dan masih ada lansia

yg tidak dapat dilayani di panti dikarenakan kondisi bedrest, dan belum optimalnya operasional Rumah singgah. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah meningkatkan koordinasi dinas terkait dan mengoptimalkan dukungan pada kegiatan bimbingan dan pembinaan yang berkelanjutan.

- c. Pada indikator program yaitu indikator Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial, faktor penghambat adalah perubahan penerima menyebabkan Perubahan di Anggaran Perubahan dan SK Bupati. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah mengkoordinasi dan mengkomunikasi dengan pengurus panti terkait adanya perubahan kebijakan.
- d. Pada indikator program yaitu indikator Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota, faktor penghambat adalah masih ada penerima bantuan yang belum mempunyai KTP elektronik. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah meningkatkan koordinasi dengan Disdukcapil terkait percepatan perekaman KTP elektronik pada para calon penerima bantuan.

2.2.3 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Evaluasi kinerja pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Tabel 2.223
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
	Meningkatnya investasi sektor riil	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	76,1	74,01	76,1	75,8	99,61	99,61	▼
Rata - Rata								99,61	99,61	▼
1	Program Penempatan Tenaga Kerja	Presentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	65	53,61	65	84,88	100	100	●
		Tingkat setengah penganggur	%	5,7	4,57	5,7	4,40	100	100	●

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		an								
		Persentase Tenaga Kerja formal	%	31	29,30	31	24,81	80,03	80,03	▼
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Presentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru	%	45	43,75	45	64,29	100	100	●
		Persentase pencari kerja mendapatk an pelatihan berbasis kompetensi	%	65	71,43	65	72,39	100	100	●
		Persentase peserta pelatihan kewirausah aan yang menjadi wirausaha berkemban g	%	45	52,08	45	67,86	100	100	●
3	Program Hubungan Industrial	Proporsi kepesertaan BPJS ketenagake rjaan	%	79	84,89	79	90,83	100	100	●
		Persentase perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	%	58	76,47	58	81,58	100	100	●
		Persentase perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial	%	45	55,46	45	71,05	100	100	●
		Persentase perselisihan hubungan industri di luar pengadilan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	100	93,33	100	100	100	100	●
RATA-RATA								98,00	98,00	▼

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD sampai dengan triwulan IV tahun 2023 pada indikator sasaran sebesar 99,61% berstatus upaya keras. Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD pada indikator program

sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar 98,003% berstatus upaya keras. Berikut faktor penghambat dan upaya tindak lanjut pada indikator yang masih berstatus upaya keras yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status indikator tersebut yaitu :

- a. Pada indikator sasaran yaitu indikator Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), faktor penghambat karena menurunnya permintaan akan produk kayu olahan yang berdampak pada berkurangnya jumlah pekerja di sektor ini, dimana industri pengolahan kayu menjadi salah satu sektor industri yang penting di Kabupaten Temanggung. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan meningkatkan wirausaha baru dengan peningkatan kompetensi SDM dan memperluas kesempatan kerja.
 - b. Pada indikator program yaitu indikator Persentase Tenaga Kerja formal, faktor penghambat karena terjadi penurunan pada jumlah tenaga kerja formal disebabkan rendahnya daya saing industri dan berkembangnya sektor industri informal seperti teknologi informasi, ekonomi digital dan jasa transportasi daring. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan meningkatkan lapangan kerja formal serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), mulai dari segi pendidikan, keterampilan dan sertifikasi.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diimplementasikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 2 indikator kinerja sasaran dan 8 (delapan) indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel:

Tabel 2.224
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1	Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	95,7	95,71	95,7	95,99	100	100	
		Persentase perempuan dan anak korban kekerasan	%	0,004	0,043	0,004	0,025	100	100	
RATA-RATA								100	100	
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	presentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	%	2,34	2,70	2,34	2,42	100	100	
		Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD	%	45,71	100	45,71	100	100	100	
2	Program Perlindungan Perempuan	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	%	0,011	0,003	0,011	0,005	100	100	
		Persentase perempuan korban kekerasan	%	0,011	0,004	0,011	0,017	100	100	
3	Program peningkatan kualitas keluarga	Persentase desa sayang ibu dan bayi	%	62,28	39,79	62,28	100	100	100	
		Persentasre rumah sakit sayang ibu dan bayi	%	100	100	100	100	100	100	
4	Program Pemenuhan Hak Anak /PHA)	Persentase terbentuknya kecamatan layak anak	%	60	80	60	80	100	100	
5	Program perlindungan khusus anak	Persentase anak korban kekerasan	%	0,011	0,0048	0,011	0,0035	100	100	
RATA-RATA								100	100	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD sampai dengan triwulan IV tahun 2023 pada indikator sasaran sebesar 100%. Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD pada indikator program sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar 100 % berstatus telah tercapai.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang Pangan diimplementasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan 1 indikator kinerja sasaran dan 4 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 2.225
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2023	Status Cap
						Target	Realisa si s.d TW IV			
1	Meningkatnya kedaulatan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	-	78,30	80,10	78,30	93,50	100	100	●
RATA - RATA								100	100	●
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Rasio ketersediaan pangan	%	100	122,54	100	136,11	100	100	●
2,	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	persentase desa pelaksana program ketahanan pangan	%	27,68	32,53	27,68	27,68	100	100	●
3,	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rasio lumbung pangan masyarakat	%	56	58,00	56	58,00	100	100	●
4,	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	90	100	90	98,82	100	100	●
RATA-RATA								100	100	●

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD sampai dengan triwulan IV tahun 2023 pada indikator sasaran sebesar 100%. Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD pada indikator program sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar 100 % berstatus telah tercapai.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pertanahan diimplementasikan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dengan 1 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 2.226
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi sd TW IV			
1,	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	%	100	100	100	100	100	100	
RATA-RATA								100	100	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah.

Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD sampai dengan triwulan IV tahun 2023 pada indikator sasaran sebesar 100% dengan status Telah Tercapai artinya semua permasalahan pada fasilitasi pertanahan telah terselesaikan.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup diimplementasikan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dengan 1 indikator kinerja sasaran dan 14 indikator kinerja program daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel:

Tabel 2.227
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s,d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	70,53	69,86	70,53	74,83	100	100	
RATA - RATA								100	100	
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	62,73	100	62,73	100	100	100	
		Persentase persetujuan	%	100	100	100	100	100	100	

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisa si Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s,d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2023	Status Cap
						Target	Realisa si s.d TW IV			
		n pernyataan kesanggup an pengelolaa n dan pemantaua n lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkunga n Hidup								●
3	Program Pengendalian dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Angk a	46	52,22	46	64,07	100	100	●
		Indeks kualitas udara	Angk a	86	83,82	86	85,10	98,95	98,95	▼
4	Program Pengelolaan Keanekaraga man Hayati	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	74,33	74,33	74,33	74,33	100	100	●
		Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap total luas lahan di Kabupaten Tmg	%	0,067	1,75	0,067	2,46	100	100	●
		Cakupan RTH Publik	%	0,07	1,10	0,07	1,10	100	100	●
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase usaha yang memiliki persetujua n teknis pengelolaa n limbah B3	%	100	80	100	100	100	100	●
6	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasa n Usaha/Kegi atan yang memiliki Dokumen Lingkunga n Hidup	%	100	100	100	100	100	100	●
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Cakupan sekolah berwawasa n lingkungan	%	26,88	27,87	26,88	27,87	100	100	●
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase penghargaa n bidang lingkungan hidup	%	66,67	84,62	66,67	178	100	100	●
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemara n dan/atau perusakan lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	●

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisa si Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s,d TW IV	Cap. RPJMD D s,d 2023	Status Cap
						Target	Realisa si s.d TW IV			
		hidup yang ditindakkan juti								
10	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	%	38,2	59,06	38,2	61,62	100	100	●
		Cakupan layanan persampahan	%	55	61,25	55	68,51	100	100	●
RATA-RATA								99,92	99,92	▼

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD sampai dengan triwulan IV tahun 2023 pada indikator sasaran sebesar 100 %. Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD pada indikator program sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar 99,92 % berstatus upaya keras. Berikut faktor penghambat dan upaya tindak lanjut pada indikator yang masih berstatus upaya keras yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status indikator tersebut yaitu pada indikator program yaitu indikator Indeks Kualitas Udara, faktor penghambatnya adalah Pengambilan titik sampel dilakukan di 4 (empat) lokasi yaitu pada kawasan perkantoran, perindustrian, permukiman, dan transportasi. Berdasarkan hasil laboratorium(1), perhitungan pada kawasan perindustrian mengalami kenaikan NO₂ dari 10,73 µg/Nm³ menjadi 15,18 µg/Nm³ yang disebabkan karena perlakuan dalam operasional boiler pabrik industri tidak sesuai dengan standar operasional prosedur dan Pengambilan sampel dilakukan pada musim kemarau yang secara tidak langsung mempengaruhi kondisi partikel udara. Musim kemarau tahun ini lebih awal apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya(2), selain itu kondisi suhu yang lebih panas(3) dan lebih kering akan berdampak pada kondisi lingkungan antara lain debu yang berterbangan terbawa angin yang mempengaruhi kualitas udara. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan pergeseran titik sampling uji kualitas udara di sekitar area titik sampling sebelumnya.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Kependudukan dan Catatan Sipil diimplementasikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan 1 indikator kinerja sasaran dan 10 indikator kinerja program, dengan

capaian sebagaimana tertuang pada tabel:

Tabel 2.228
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan
Catatan Sipil Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Sat,	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap, RKPD Tahun 2023 s,d TW IV	Cap, RPMJD s,d 2023	Status Cap,
						Target	Realisasi s,d, TW IV			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Angka	80	84,84	80	86,095	100	100	●
Rata - Rata								100	100	●
1	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	%	97,4	98,38	97,4	99,93	100	100	●
		Persentase kepemilikan KTP el	%	99	99,29	99	99,82	100	100	●
		Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	72	78,76	72	84,21	100	100	●
		Persentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	●
2	Program pencatatan sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	75	73,18	75	77,90	100	100	●
		Persentase penerbitan akta kematian	%	99	100	99	100	100	100	●
		Cakupan pelayanan akta perkawinan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	●
		Cakupan pelayanan akta perceraian tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	●
3	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	60	86,67	60	86,67	100	100	●
		Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	%	90	83,33	90	95,83	100	100	●
RATA-RATA								100	100	●

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD sampai dengan triwulan IV tahun 2023 pada indikator sasaran sebesar 100%. Capaian kinerja

RKPD ataupun RPJMD pada indikator program sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar 100 % berstatus telah tercapai.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diimplementasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan 2 indikator kinerja sasaran dan 13 indikator kinerja program, dengan capaian sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 2.229
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	Angka	0,71	0,72	0,71	0,74	100	100	●
		Persentase desa yang berpredikat mandiri	%	6,39	9,77	6,39	20,68	100	100	●
RATA-RATA								100	100	●
1	Program penataan Desa	Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada	%	40	30,45	40	41,73	100	100	●
		Persentase Desa/ Kelurahan yang Cepat Berkembang berdasarkan Indek Pembangunan Desa	%	37	43,61	37	43,61	100	100	●
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan	%	100	100	100	100	100	100	●
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	90	100	90	100	100	100	●
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	90	100	90	100	100	100	●
		Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan	%	85	100	85	100	100	100	●

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu	%	85	100	85	100	100	100	●
		Persentase Pelanggaran disiplin kepala desa	%	10	0	10	0	100	100	●
		Persentase desa yang tertib pengelolaan aset	%	85	100	85	100	100	100	●
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	%	35	100	35	100	100	100	●
		Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif	%	32	85,34	32	96,62	100	100	●
		Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif	%	10	100	10	100	100	100	●
RATA - RATA								100	100	●

Sumber: BAPPEDA Temanggung, 2024 data diolah,

Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD sampai dengan triwulan IV tahun 2023 pada indikator sasaran sebesar 100%. Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD pada indikator program sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar 100 % berstatus telah tercapai.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diimplementasikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 1 indikator kinerja sasaran dan 9 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel:

Tabel 2.230
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realis asi Tahun 2022	2023		Cap. RKP D 2023 s,d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2023	Status Cap
						Target	Realis asi s.d TW IV			
1	Terkendali nya laju pertumbuh an penduduk	Laju Pertumbu han Penduduk (LPP)	%	0,80	0,98	0,81	0,54	100	100	●
RATA-RATA								100	100	●
1	Program pengendali an penduduk dan informasi keluarga	Persentas e Penyediaa n Data Mikro Keluarga di Desa/Kel urahan	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentas e pasangan usia subur yang ingin ber- KB tidak terpenuhi / unmetnee d	%	9,17	11,47	9,17	8,60	100	100	●
		Persentas e Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	2,04	2,45	2,04	1,02	100	100	●
		Angka Kelahiran Remaja Usia 15- 19 th (ASFR 15- 19 th)	%	26,3	6,67	26,3	14,10	100	100	●
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana /KB	presentas e PUS yang memiliki pengetah uan dan pemaham an tentang semua jenis metode kontrasep si modern	%	76,2	76,58	76,5 8	80,14	100	100	●
		Persentas e kepeserta an KB aktif	%	76,21	76,58	76,5 8	80,14	100	100	●
		Persentas e keberhasi lan	%	49,2	45,03	49,2	45,77	93,04	93,04	▼

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realis asi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s,d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2023	Status Cap
						Target	Realis asi s.d TW IV			
		pemakaia n metode kontrasep si jangka panjang								
		Persentas e kampung KB yang memenuh i Indeks Desa Membang un (IDM)	%	33,9	33,85	33,9	52,71	100	100	●
3	Program Pemberday aan dan Peningkata n Keluarga Sejahtera (KS)	Indek Pembang unan Keluarga	%	50	55,97	45	58,19	100	100	●
RATA-RATA								99,22	99,22	▼

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD sampai dengan triwulan IV tahun 2023 pada indikator sasaran sebesar 100%. Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD pada indikator program sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar 99,22 % berstatus upaya keras. Berikut faktor penghambat dan upaya tindak lanjut pada indikator yang masih berstatus upaya keras yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status indikator tersebut yaitu pada indikator program yaitu indikator Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang, faktor penghambat (1) Wilayah tertentu cenderung ke KB mandiri / non MKJP : Tretep, Wonobojo , Kledung, Bansari, Tembarak (2) Masih adanya bidan yang mempromosikan alat kontrasepsi suntik dibandingkan dengan MKJP (3) PUS yang menikah diusia dini belum siap untuk ber-KB (4) Masih adanya PUS yang trauma menggunakan alat kontrasepsi MKJP , karena efek dari rumor penggunaannya (5) Tidak semua masyarakat dengan keyakinan tertentu menerima jenis alat kontrasepsi MKJP (6) karena pasangannya bekerja diluar daerah sehingga tidak mau ber KB. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adanya (1) adanya inovasi berupa aplikasi SIMATAPKON KB (Sistem Informasi Manajemen Pencatatan dan Pelaporan Kontrasepsi Keluarga Berencana), Sehingga bisa mengetahui segmentasi sasaran dalam pelayanan KB MKJP (2) semua balai KB (20 kecamatan) menjadi pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) (3)

memberikan advokasi dan komunikasi informasi edukasi (KIE) kepada calon akseptor maupun akseptor (4) pelayanan rutin di 37 fasilitas kesehatan (26 puskesmas, 4 Rumah Sakit, 5 Bidan Praktek Mandiri, 2 Balai Pengobatan) (5) pelayanan dalam rangka momentum strategis (pendekatan pelayanan) secara gratis (6) peningkatan pelayanan KB MKJP di PMB/Praktek Bidan Mandiri.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang perhubungan diimplementasikan oleh Dinas Perhubungan dengan 1 indikator kinerja sasaran dan 10 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel:

Tabel 2.231
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	%	1,61	1,59	1,61	1,67	100	100	●
RATA-RATA								100	100	●
1,	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadahi	%	38,65	41,06	38,65	41,55	100	100	●
		Persentase potensi titik parkir yang tertangani	%	100	100	98,18	100	100	100	●
		Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan	%	99,5	99,5	99,56	99,63	100	100	●
		Persentase bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar	%	50	50	50	50	100	100	●
		Persentase bengkel umum kelas 2 yang	%	62,5	62,5	50	62,5	100	100	●

No	Program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		memenuhi standar								
		Persentase bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar	%	65,22	60,87	60,87	65,22	100	100	●
		Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	%	87,18	100	100	100	100	100	●
		Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	100	85,71	100	100	100	100	●
		Persentase penerangan jalan di ruas jalan Kabupaten	%	14,26	32,08	14,26	32,49	100	100	●
RATA-RATA								100	100	●

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah,

Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD sampai dengan triwulan IV tahun 2023 pada indikator sasaran sebesar 100%. Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD pada indikator program sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar 100 % berstatus telah tercapai.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika diimplementasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan 2 indikator kinerja sasaran dan 7 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 2.232
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Sasaran / Program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2022	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d, TW IV			
1	Meningkatnya kualitas	Indeks Sistem Pemerintahan	Angka	3,0	3,12	3,0	3,12	100	100	●

No	Sasaran / Program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2022	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d, TW IV			
	pelayanan publik	n Berbasis Elektronik (SPBE)								
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	96,00	88,33	96,00	97,25	100	100	●
RATA -RATA								100	100	●
1,	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase PPID badan publik yang aktif	%	30	18,18	30	23,46	100	100	●
		Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	%	30	28,13	30	53,57	100	100	●
		Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	%	100	100	100	100	100	100	●
2,	Program pengelolaan aplikasi informatika	Persentase ketersediaan jaringan intranet	%	100	84,11	100	100	100	100	●
		Persentase sistem informasi yang terintegrasi	%	50	52,48	50	51,43	100	100	●
		Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	%	60	71,29	60	78,10	100	100	●
		Persentase ketersediaan akses internet publik	%	96	88,33	96	97,25	100	100	●
RATA-RATA								100	100	●

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD sampai dengan triwulan IV tahun 2023 pada indikator sasaran sebesar 100 %. Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD pada indikator program sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar 100 % berstatus telah tercapai

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diimplementasikan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana

tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 2.233
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2022	Status Cap
						Target	Realisasi s.d tw IV			
1	Meningkatnya investasi sektor riil	Persentase Koperasi sehat	%	10,71	15,09	10,71	28,18	100	100	●
		Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	%	0,015	0,0148	0,015	0,0177	100	100	●
RATA - RATA								100	100	●
1,	Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase koperasi aktif	%	22	27,47	22	28,82	100	100	●
2	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi	%	30	110,11	30	43,98	100	100	●
3	Program Pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif	%	75	89,14	75	80,65	100	100	●
4	Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro UKM	Persentase usaha mikro aktif	%	35	100	35	100	100	100	●
		Persentase Usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha	%	1,07	1,40	1,07	1,58	100	100	●
RATA-RATA								100	100	●

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD sampai dengan triwulan IV tahun 2023 pada indikator sasaran sebesar 100 %. Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD pada indikator program sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar 100 % berstatus telah tercapai.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Kinerja penyelenggaran pelayanan umum Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal diimplementasikan oleh Dinas Penanaman Modal dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran dan 10 (sepuluh) indikator

kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel:

Tabel 2.234
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s,d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2023	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1	Meningkatnya investasi sektor riil	Indeks Kemudahan Berusaha	Angka	65	78	65	82	100	100	●
Rata - Rata								100	100	●
1,	Program Pengembangan Iklim penanaman modal	Nilai realisasi investasi	Milyar	625	1836,01	625	2000,79	100	100	●
		Persentase sedianya kajian teknis potensi investasi	%	10	28,13	10	28,13	100	100	●
		Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan perizinan yang terlatih	%	100	100	100	100	100	100	●
2	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sector/bidang unggulan	%	100	60	100	100	100	100	●
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan online	%	100	98,09	100	100	100	100	●
		Persentase perijinan yang bebas calo	%	100	47	100	100	100	100	●
		Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	%	95	100	95	100	100	100	●
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Perzinan yang diterbitkan	%	100	94	100	100	100	100	●
		Persentase Pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	%	100	100	100	100	100	100	●
RATA-RATA								100	100	●

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD sampai dengan triwulan IV tahun 2023 pada indikator sasaran sebesar 100%. Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD pada indikator program sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar 100 % berstatus telah tercapai.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja penyelenggaran pemerintah daerah Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga diimplementasikan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 2.235
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisa si Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi sd TW IV			
1	Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	3,56	3,98	3,56	3,98	100	100	●
		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)		3,41	2,97	3,41	2,97	87,10	87,10	▼
RATA-RATA								95,52	95,52	▼
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	80,76	93,10	80,76	93,10	100	100	●
2	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Prosentase pelatih olahraga bersertifikat	%	35,40	96,00	35,40	96,43	100	100	●
		Persentase prestasi olah raga	%	59,00	70,00	59,00	70,00	100	100	●
		Persentase atlet berprestasi	%	21,00	40,91	21,00	83,19	100	100	●
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase gugus depan yang aktif	%	92,89	100	92,89	100	100	100	●
RATA-RATA								100	100	●

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD sampai dengan triwulan IV tahun 2023 pada indikator sasaran sebesar 95,52% berstatus upaya keras. Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD pada indikator program sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar 100% atau telah tercapai. Berikut faktor penghambat dan upaya tindak lanjut pada indikator yang masih berstatus upaya keras yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status indikator tersebut yaitu pada indikator sasaran yaitu indikator Indeks Pembangunan Olahraga (IPO), faktor penghambat adanya keterbatasan sarpras yang sesuai dengan standar minimal dan pelatih

yang berkompeten, tidak terdatanya atlet temanggung yang mengikuti lomba atau event yang diikuti. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan Pembibitan atlet dari usia dini, peningkatan kompetensi pelatih, peningkatan kualitas sarpras pendukung olahraga, penerimaan atlet temanggung ke turnamen dan kejuaraan yang memiliki penghargaan dan terdatanya atlet perprestasi di kabupaten temanggung melalui informasi atlet yang akurat.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Statistik diimplementasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan 1 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.236
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Sasaran/program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1,	Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial	Cakupan ketersediaan data makro daerah	%	100	100	100	100	100	100	
Rata - rata								100	100	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD pada indikator program sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar 100 % berstatus telah tercapai.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Persandian diimplementasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan 1 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 2.237
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Sasaran/program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk	Tingkat penilaian persiapan/ pengelola	%	1	4	1	1,92	100	100	

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap RKP D Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d.TW IV			
	Pengamanan	an resiko keamana n informasi								
RATA-RATA								100	100	

Sumber: BAPPEDA Temanggung, 2024, data diolah

Capaian kinerja RKPd ataupun RPJMD pada indikator program sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar 100% berstatus telah tercapai. Tingkat penilaian persiapan/pengelolaan resiko keamanan informasi didukung oleh adanya kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara serta Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah yang bersedia melakukan assessment keamanan informasi di Kabupaten Temanggung.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Kinerja penyelenggaraan pelayanan umum Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan diimplementasikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan 1 (satu) Indikator kinerja Sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja program daerah berikut:

Tabel 2.238
Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan
Bidang Kebudayaan Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKP D Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1	Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	%	3,51	3,67	3,41	3,67	100	100	
RATA-RATA								100	100	
1	Program pengelolaan kebudayaan	Persentase kelompok Budaya yang produktif	%	80,64	125,61	80,64	125,95	100	100	
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kelompok kesenian yang produktif	%	32,16	31,71	32,16	47,17	100	100	
3	Program Pembinaan Sejarah	Persentase pelestarian Sejarah Lokal	%	6,73	6,61	6,73	7,05	100	100	
4	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Pelestarian Cagar Budaya	%	5,18	5,18	5,18	5,18	100	100	
RATA-RATA								100	100	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD sampai dengan triwulan IV tahun 2023 pada indikator sasaran sebesar 100%. Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD pada indikator program sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar 100 % berstatus telah tercapai.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan diimplementasikan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan dengan 1 indikator kinerja sasaran dan 3 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 2.239
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD 2023	Realisa si Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1	Meningkat nya budaya literasi masyarak at	Persentase peminjam di perpustak aan	%	82	86,13	80	83,47	100	100	●
RATA-RATA								100	100	●
1	Program pengelolaa n dan pengemba ngan perpustak aan	Persentase pertumbu han jumlah pengunju ng perpustak aan	%	40	1009,0 5	40	41,79	100	100	●
		Persentase perpustak aan yang aktif	%	35,62	97,68	35,62	56,58	100	100	●
		Cakupan naskah kuno Kabupaten Temanggu ng dan koleksi nasional yang dilestarikan	%	100	99,12	100	100,01	100	100	●
RATA-RATA								100	100	●

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD sampai dengan triwulan IV tahun 2023 pada indikator sasaran sebesar 100 %. Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD pada indikator program sampai dengan triwulan

IV tahun 2023 sebesar 100 % berstatus telah tercapai.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Kinerja penyelenggaran pemerintah daerah Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan diimplementasikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan 1 (satu) indikator sasaran dan 2 (dua) indikator, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 2.240
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realis asi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realis asi s.d TW IV			
1	Meningkat nya kualitas manajeme n pemerinta han	Indeks Manajeme n Kearsipan	Angk a	67	62,46	67	72,76	100	100	
Rata - Rata								100	100	
1	Program pengelolaa n dan pelestaria n arsip daerah	Persentase Pengelolaa n Arsip Secara Baku	%	31,98	34,30	31,98	36,05	100	100	
		Persentase arsip vital konvensio nal yang dialihmedi akan	%	50	40,08	50	50,08	100	100	
RATA-RATA								100	100	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD sampai dengan triwulan IV tahun 2023 pada indikator sasaran sebesar 100 %. Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD pada indikator program sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar 100 % berstatus telah tercapai.

2.2.4 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Pilihan

Evaluasi kinerja urusan pemerintahan pilihan antara lain:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Kinerja penyelenggaran pelayanan umum Urusan Pemerintahan bidang perikanan diimplementasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan melalui 1 indikator kinerja sasaran dan 6 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 2.241

Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1		Tingkat konsumsi ikan	kg/kap/th	21,34	24,34	21,34	24,39	100	100	●
RATA - RATA								100	100	●
1,	Program pengelolaan perikanan budidaya	Produktivitas Ikan Nila	Kg/m ²	6,20	5,40	6,20	6,20	100	100	●
		Produktivitas Ikan Lele	Kg/m ²	13,8	12,60	13,8	13,80	100	100	●
		Produktivitas Ikan Mas	Kg/m ²	6	5,80	6	6,00	100	100	●
2,	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Prosentase nelayan perairan umum yang terbina	%	30	43,58	30	36,70	100	100	●
3,	Program pengawasan sumber daya kelautan dan Perikanan	Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	%	33	100	33	45	100	100	●
3,	Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase tersedianya data dan informasi produksi olahan hasil perikanan	%	100	100	100	100	100	100	●
RATA-RATA								100	100	●

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah.

Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD sampai dengan triwulan IV tahun 2023 pada indikator sasaran sebesar 100 %. Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD pada indikator program sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar 100 % berstatus telah tercapai.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Kinerja penyelenggaran pelayanan umum Urusan Pemerintahan bidang pariwisata diimplementasikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melalui 1 indikator kinerja sasaran dan 6 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja berikut ini

Tabel 2.242
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realis asi Tahun 2022	2023		Cap, RKPD 2022 s.d TW IV	Cap, RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisa si s.d TW IV			
1		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	1,65	1,53	1,65	1,53	92,73	92,73	▼
RATA-RATA								92,73	92,73	▼
1,	Program Peningkata n Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase obyek wisata yang berkembang	%	41,66	34	41,66	42	100	100	●
		Pertumbuh an jumlah wisatawan	%	21	103,8 1	21	26,78	100	100	●
		Lama tinggal wisatawan	%	1	1	1	1	100	100	●
2	Program Pengemban gan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkata n desa wisata	%	11,76	8,65	11,7 6	12,03	100	100	●
		Persentase desa wisata naik klasifikasi	%	5	73,91	5	60,71	100	100	●
		Persentase Peningkata n Pelaku Ekonomi Kreatif	%	9,02	9,90	9,02	9,91	100	100	●
Rata-Rata								100	100	●

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD sampai dengan triwulan IV tahun 2023 pada indikator sasaran sebesar 92,73%. Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD pada indikator program sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar 100 % berstatus telah tercapai. Berikut faktor penghambat dan upaya tindak lanjut pada indikator yang masih berstatus upaya keras yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status indikator tersebut yaitu pada indikator sasaran yaitu Indikator Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB, faktor penghambat perhitungan dilakukan oleh BPS. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut meningkatkan komunikasi dan koordinasi secara intensif ke BPS.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang pertanian diimplementasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan 3 indikator kinerja sasaran dan 23 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.243
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2023
s.d Triwulan IV

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realis asi Tahun 2022	2023		Cap. RKP 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisas i s.d TW IV			
1		Tingkat ketersediaan energi perkapita		2935	3198	2935	3113	100	100	●
		Tingkat ketersediaan protein perkapita		103,8	83,19	103,8	76,65	73,94	73,94	▼
		Tingkat ketersediaan lemak perkapita		37,50	64,66	37,50	63,63	100	100	●
RATA - RATA								91,31	91,31	▼
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produktivitas Padi	kwin tal/ha	63,3	63,15	63,3	63,46	100	100	●
		Peningkatan Produktivitas Jagung	kwin tal/ha	46	46,10	46	46,10	100	100	●
		Peningkatan Produktivitas Ubi Kayu	kwin tal/ha	339,8	340,00	339,8	339,96	100	100	●
		Produktivitas bawang putih	kwin tal/ha	79,6	69,16	79,6	71,41	89,71	89,71	▼
		Produktivitas bawang merah	kwin tal/ha	80,15	81	80,15	76,65	95,63	95,63	▼
		Produktivitas cabai rawit	kwin tal/ha	55,00	76,36	55,00	76	100	100	●
		Produktivitas cabai besar	kwin tal/ha	69,5	79,04	69,5	77,53	100	100	●
		Produktivitas tembakau	kwin tal/ha	6,8	6,68	6,8	6,56	96,48	96,48	▼
		Produktivitas kopi robusta	kwin tal/ha	7,25	6,93	7,25	6,53	90,13	90,13	▼
		Produktivitas kopi arabika	kwin tal/ha	7	5,90	7	5,75	82,19	82,19	▼
		Produktivitas Cengkeh	kwin tal/ha	2,45	4,17	2,45	2,83	100	100	●
		Produktivitas Vanili	kwin tal/ha	2,95	3,02	2,95	2,96	100	100	●
		Produktivitas ternak sapi	Kg/Ekor	177,60	177,40	177,60	177,60	100	100	●
		Produktivitas ternak domba	Kg/Ekor	13,71	13,70	13,71	13,71	100	100	●
Produktivitas ternak kambing	Kg/Ekor	13,71	13,70	13,71	13,71	100	100	●		
Produktivitas ternak ayam ras pedaging	Kg/Ekor	0,75	0,75	0,75	0,75	100	100	●		

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realis asi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisas i s.d TW IV			
		Produktivitas ternak ayam ras petelur	Kg/ Ekor	10,88	10,35	10,88	10,88	100	100	●
		Produktivitas ternak ayam buraas	Kg/ Ekor	0,7	0,70	0,7	0,70	100	100	●
2,	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	%	76,55	79,15	76,55	79,15	100	100	●
3,	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penanganan penyakit hewan	%	90	96,68	90	97,26	100	100	●
		Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	70	100	70	82,10	100	100	●
4,	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengendalian bencana pertanian	%	40,30	41,45	40,30	40,30	100	100	●
5,	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	0,98	1,03	0,98	1,03	100	100	●
RATA-RATA								98,00	98,00	▼

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024, data diolah

Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD sampai dengan triwulan IV tahun 2023 pada indikator sasaran sebesar 91,31 %. Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD pada indikator program sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar 98,00 % berstatus Upaya keras. Berikut faktor penghambat dan upaya tindak lanjut pada indikator yang masih berstatus upaya keras yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status indikator tersebut yaitu :

- a. Pada Indikator sasaran yaitu indikator tingkat ketersediaan protein perkapita, faktor penghambat dikarenakan tingkat produksi bahan pangan sumber protein dipengaruhi oleh iklim, budaya masyarakat,

pola konsumsi. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan peningkatan produksi bahan pangan sumber protein yang beragam melalui pengembangan sumber daya lokal yaitu pangan lokal yang menjadi sumber protein dengan optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai penyedia sumber pangan rumah tangga.

- b. Pada beberapa indikator program yaitu pada indikator program produktivitas bawang putih, produktivitas bawang merah, produktivitas cabai rawit, dan produktivitas cabai besar, faktor penghambat adanya fluktuasi harga dengan disparitas yang terlalu tinggi, harga saprodi yang terus naik, adanya serangan hama penyakit, cuaca ekstrim, ditambah dengan kebijakan impor yang kadang kurang berpihak kepada petani kecil. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan status indikator adalah produktivitas bawang merah dan produktivitas bawang putih adalah dengan menjamin harga komoditas, melalui kerjasama semua pihak baik petani pemerintah maupun swasta, sedangkan pada indikator kinerja program produktivitas cabai rawit dan produktivitas cabai besar yaitu dengan terus mengupayakan peningkatan ilmu budidaya atau *Good Agricultural Practices* (GAP), pasca panen atau *Good Handling Practices* (GHP), PPHT dengan teknologi yang ada dan terus berkembang.
- c. Pada indikator program Produktivitas tembakau, faktor penghambat diantaranya karena *Good Agricultural Practices* (GAP) belum diterapkan, budidaya belum efisien, iklim (Cuaca dan Angin) tidak mendukung, *Good Handling Practices* (GHP) belum diterapkan, mutu belum optimal, dan tata niaga yang semrawut, Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan status indikator adalah dengan melakukan efisiensi dalam budidaya, meningkatkan produktifitas, meningkatkan kualitas dan mitigasi iklim.
- d. Pada indikator program yaitu indikator Produktivitas kopi robusta, faktor penghambat di karena kondisi tanaman yang sebagian sudah tua dan tidak produktif perlu peremajaan, kurangnya kegiatan untuk peningkatan produksi, serta mengalami serangan hama penyakit. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan status indikator adalah dengan melakukan peremajaan tanaman kopi, dukungan serta fasilitasi kegiatan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) Kopi, Sosialisasi *Good Agricultural Practices* (GAP), penerapan *Good*

Handling Practices (GHP) dan Good Manufacturing Practices (GMP).

- e. Pada indikator program yaitu indikator Produktivitas kopi arabika, faktor penghambat yaitu kurangnya dukungan kegiatan dan kesadaran petani untuk melakukan konservasi lahan di Lereng Susi Prau. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan status indikator adalah mengembangkan penanaman kopi arabika di Lereng Susi Prau dengan dukungan serta fasilitasi kegiatan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) Kopi, Sosialisasi *Good Agricultural Practices (GAP)*, penerapan *Good Handling Practices (GHP)* dan *Good Manufacturing Practices (GMP)*.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang perdagangan diimplementasikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dengan 1 indikator kinerja sasaran dan 7 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 2.244
Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RPKD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1,		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	20	20,14	20	20,79	100	100	●
Rata - Rata								100	100	●
1,	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik	%	67	66,67	67	83,33	100	100	●
		Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	%	70	62,27	70	70,43	100	100	●
		Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar	%	90	105,58	90	90,73	100	100	●
		Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan	%	34	53,27	34	60,88	100	100	●
2,	Program Stabilisasi	Persentase ketersediaan	%	68,41	98,08	68,41	74,79	100	100	●

No	Program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s,d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
	Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab Inflasi								
3,	Program Pengembangan ekspor	Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB Sektor Perdagangan	%	2,56	27,80	2,56	86,17	100	100	●
4,	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang di tera ulang	u n i t	95	101,12	95	95,82	100	100	●
Rata-Rata								100	100	●

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD sampai dengan triwulan IV tahun 2023 pada indikator sasaran sebesar 100%. Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD pada indikator program sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar 100% berstatus telah tercapai.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Kinerja penyelenggaran pelayanan umum Urusan Pemerintahan bidang perindustrian diimplementasikan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan 1 indikator kinerja sasaran dan 2 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini;

Tabel 2.245
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1	Meningkatnya investasi sektor riil	Kontribusi sektor perindustrian Terhadap PDRB	%	27	27,47	27	26,19	97	97	▼
Rata-Rata								97	97	▼
1,	Program Perencanaan dan Pengembangan Industri	Persentase IKM industri yang berbasis pada komoditas	%	35	64,62	35	70,46	100	100	●

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Satuan	Targe t Akhir RPJMD 2023	Realisa si Tahun 2022	2023		Cap. RKPD 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisa si s.d TW IV			
		unggulan daerah								
2,	Program Pengemda lian ijin usaha industry Kab/Kota	Prosentase pembinaa n industri penghasil cukai	%	5,3	9,92	5,3	12,29	100	100	
Rata-Rata								100	100	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD sampai dengan triwulan IV tahun 2023 pada indikator sasaran sebesar 97% berstatus Upaya keras. Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD pada indikator program sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar 100% berstatus telah tercapai. Berikut faktor penghambat dan upaya tindak lanjut pada indikator yang masih berstatus upaya keras yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status indikator tersebut yaitu pada indikator sasaran yaitu indikator Persentase Kontribusi sektor perindustrian Terhadap PDRB masih rendah yang disebabkan oleh penurunan jumlah industri pengolahan kayu di Kabupaten Temanggung dimana industry tersebut merupakan salah satu sektor industri utama di Kabupaten Temanggung. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan status indikator adalah Melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap industri kecil menengah agar IKM dapat mengembangkan usahanya.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi diimplementasikan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melalui 1 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 2.246
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Tahun 2023 s.d
Triwulan IV

No	Sasaran/ program	Indikator r kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2022	2023		Cap. RKPD 2022	Cap. RPJMD s.d 2022	Status Cap
						Target	Realisasi s.d tw IV			
1	Program Pengemba ngan Kawasan Transmigrasi	Persentase calon transmigran yang mendapatkan pembekaa	%	100	100	100	100	100	100	

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi 2022	2023		Cap. RKPD 2022	Cap. RPJMD s.d 2022	Status Cap
						Target	Realisasi s.d tw IV			
		lan								
Rata - rata								100	100	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023, data diolah

Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD sampai dengan triwulan IV tahun 2023 pada indikator program sebesar 100%. Hal ini berarti calon transmigran yang akan ditempatkan mendapatkan pembekalan sehingga tidak mengundurkan diri.

2.2.5 Evaluasi Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Evaluasi kinerja unsur pendukung urusan pemerintahan antara lain:

1. Fungsi Sekretariat Daerah

Kinerja penyelenggaran pelayanan umum urusan pemerintahan fungsi Sekretariat Daerah diimplementasikan oleh Sekretariat Daerah dengan 2 indikator kinerja sasaran dan 21 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.247
Capaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan
Sekretariat Daerah Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2022 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1	Meningkat nya kualitas manajeme n pemerinta han	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggar aan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Ang ka	3,5	3,35	3,5	3,43	98	98	
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	%	25	100	25	100	100	100	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	-	BB	B	BB	B	93,10	93,10	
RATA-RATA								97,03	97,03	
1	Program pemerinta han dan kesejahter aan rakyat	Cakupan pilar batas yang terinventaris ir	%	100	100	100	100	100	100	
		Persentase pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2022 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		Cakupan kecamatan tertib administrasi	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	%	90	90,95	90	91,55	100	100	●
		Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati	%	30	60	30	41,66	100	100	●
		Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi	%	90	100	90	100	100	100	●
		Persentase permasalahan hukum yang ditangani secara litigasi	%	75	100	75	100	100	100	●
2,	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	80	50	80	83,33	100	100	●
		Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu	%	100	100	100	99,81	99,81	99,81	▼
3,	Program pengembangan dan pengendalian perekonomian daerah	persentase pengadaan barang/jasa yang berhasil dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase penggunaan E-procurement terhadap	%	100	100	100	100	100	100	●

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2022 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		belanja pengadaan								
		persentase kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	%	100	96,51	100	127,4 4	100	100	●
		Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	%	95	99,37	95	99,89	100	100	●
4,	Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupaten /Kota	Presentase Pemenuhan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LKjIP		74,5	100	74,5	100	100	100	●
		Persentase pemenuhan Pelayanan kedinasan pimpinanDae rah	%	100	100	100	100	100	100	●
RATA-RATA								99,99	99,99	▼

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD sampai dengan triwulan IV tahun 2023 pada indikator sasaran sebesar 97,03 %. Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD pada indikator program sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar 99,99 % berstatus Upaya keras. Berikut faktor penghambat dan upaya tindak lanjut pada indikator yang masih

berstatus upaya keras yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status indikator tersebut yaitu :

- a. Pada indikator sasaran yaitu indikator Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD), faktor penghambatnya adalah Surat Edaran dan Petunjuk Teknis terkait penyusunan LPPD tahun 2022 dikeluarkan oleh Kemendagri mendekati batas pengumpulan data LPPD, dan terdapat beberapa perubahan rumus Indikator Kinerja Kunci karena menyesuaikan dengan SE dan juknis terbaru, sehingga membutuhkan waktu untuk memperbaiki data Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan status indikator adalah melakukan koordinasi dengan Bappeda, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, melakukan koordinasi dengan OPD untuk melakukan pengumpulan data dukung lebih awal.
- b. Pada indikator sasaran yaitu indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP), faktor penghambatnya adalah (a) Dokumen perencanaan belum sesuai dengan Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja (b) Target yang cenderung tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (c) Belum ada monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi AKIP dari APIP Pemda (d) belum ada reward dan/atau punishment atas hasil evaluasi SAKIP internal. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan status indikator adalah mengoptimalkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, memperbaiki perencanaan kinerja dan menyinkronkan sasaran Bupati sampai dengan sasaran kinerja pegawai.
- c. Pada indikator program yaitu indikator Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu, faktor penghambat yaitu Proses perencanaan dilaksanakan pada tahun berjalan sehingga pelaksanaan lelang dan pekerjaan terlambat , Pelaksanaan kegiatan tidak dapat diselesaikan tepat waktu karena kejadian kahar (bencana alam/banjir), penyelesaian pekerjaan akan dilaksanakan pada tahun 2024 setelah musim penghujan selesai (sekitar bulan April), dan perangkat dinas terlambat input dan yang diinput bukan data terbaru. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan status indikator adalah Perencanaan diusahakan N-1 dan meningkatkan pembinaan jasa konstruksi dan juga pembinaan terhadap konsultan pengawas.

2. Fungsi Sekretariat DPRD

Kinerja penyelenggaraan pelayanan umum fungsi Sekretariat DPRD yang diimplementasikan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan 1 indikator kinerja sasaran dan 3 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana berikut:

Tabel 2.248
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Sasaran /Program	Indikator Kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2022 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan	Persentase RAPER DA yang disahkan tepat waktu	%	91,50	88,89	91,50	100	100	100	●
RATA-RATA								100	100	●
1	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda	%	26,67	27,78	26,67	47	100	100	●
		Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	%	58	88,15	58	90,38	100	100	●
RATA-RATA								100	100	●

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD sampai dengan triwulan I tahun 2023 pada indikator sasaran sebesar 100%. Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD pada indikator program sampai dengan triwulan I tahun 2023 sebesar 100%.

2.2.6 Evaluasi Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Evaluasi kinerja unsur penunjang urusan pemerintahan antara lain:

1. Perencanaan

Kinerja penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan pembangunan diimplementasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan 4 indikator kinerja sasaran, dan 6 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana

tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 2.249
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap.
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1	Meningkat nya kualitas manajeme n pemerinta han	Indeks Perencanaa n Pembangun an Daerah	%	4,2	4,5	4,2	4,5	100	100	●
		Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangun an Daerah	%	90	96,66	90	98,96	100	100	●
		Manajemen Risiko Indeks	Level	Level 2	Level 3	Level 2	Level 2	100	100	●
Rata-Rata								100	100	●
1	Program perencana an, evaluasi, dan informasi pembangu nan daerah	Persentase penyusun an dokumen perencana an pembangu nan daerah yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase tersusunn ya laporan evaluasi pembangu nan daerah tepat waktu	%	95	87,22	95	100	100	100	●
2	Program Koordina si dan Sinkronis asi Perencana an	Tingkat konsistens i kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pembangu nan manusia	%	90	90,54	90	90,91	100	100	●

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisas i Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap.
						Target	Realisas i s.d TW IV			
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	90	98,80	90	90,91	100	100	●
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang ekonomi	%	90	91,94	90	93,65	100	100	●
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang infrastruktur	%	90	95,74	90	95,83	100	100	●
RATA-RATA								100	100	●

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah.

Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD sampai dengan triwulan IV tahun 2023 pada indikator sasaran sebesar 100%. Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD pada indikator program sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar 100 % berstatus telah tercapai.

2. Keuangan

Kinerja penyelenggaraan Fungsi penunjang keuangan diimplementasikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dengan 2 indikator kinerja sasaran, dan 14 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.250
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Keuangan Tahun 2023 s.d
Triwulan IV

No	Sasaran / program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap, RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap, RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan	%	15	16,69	15	17,54	100	100	●
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)		79,5	62,74	79,5	68,08	85,64	85,64	▼
RATA-RATA								92,82	92,82	▼
1,	Program pengelolaan Keuangan daerah (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%	100	99,73	100	100	100	100	●
		Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	%	89,96	100	89,96	100	100	100	●
		Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100	42,86	100	100	100	100	●
		Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase realisasi keuangan	%	93	87,61	93	94,70	100	100	●
		Cakupan Laporan keuangan daerah yang akuntabel	%	90	95,65	90	100	100	100	●
		Opini BPK atas LKPD	%	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100	●

No	Sasaran / program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap, RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap, RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	%	88,1	100	88,1	100	100	100	●
		Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	99,1	88,21	98,9	94,33	95,18	95,18	▼
3,	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	%	1,27	1,94	1,27	0,85	67,12	67,12	▼
		Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	95	96,35	95	101,47	100	100	●
		Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	%	95	100	95	100	100	100	●
		RATA-RATA								97,30

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD sampai dengan triwulan IV tahun 2023 pada indikator sasaran sebesar 92,82 %. Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD pada indikator program sampai dengan triwulan

IV tahun 2023 sebesar 97,30 % berstatus Upaya keras. Berikut faktor penghambat dan upaya tindak lanjut pada indikator yang masih berstatus upaya keras yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status indikator tersebut yaitu :

- a. Pada indikator sasaran yaitu indikator Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) faktor penghambanya yaitu Nilai IPKD merupakan nilai yang didapat dari kolaborasi kinerja OPD di seluruh Kabupaten Temanggung baik dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. Dalam hal ini BPKPAD selaku fasilitator untuk menyajikan data dalam lingkup Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung, tidak memiliki kewenangan mandiri secara kedinasan dalam menentukan capaian kinerja karena data yang disajikan bersumber dari semua OPD dan merupakan hasil konsolidasi kinerja keuangan seluruh OPD di Kabupaten Temanggung. Secara makro IPKD merupakan indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak hanya menjadi indikator kinerja BPKPAD secara mandiri. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan status indikator adalah dengan meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah.
- b. Pada indikator program yaitu indikator Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja, faktor penghambat dikarenakan beberapa aset belum termanfaatkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait pemanfaatan aset Pemda. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan status indikator adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan SKPD tentang pemanfaatan barang milik daerah.
- c. Pada indikator program yaitu indikator Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak, faktor penghambat dikarenakan secara keseluruhan, penurunan Indikator peningkatan jumlah objek pajak disebabkan oleh sudah tidak dilaksanakannya pendataan massal PBB-P2 serta kurang maksimalnya sosialisasi mengenai pendaftaran objek baru PBB-P2. Selain itu petugas dan sumber daya bidang pendapatan sangat terbatas untuk melaksanakan pendataan objek pajak. Dan target jumlah pajak akan meningkat seiring dengan aktifitas perekonomian di masyarakat.. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan status indikator adalah Peningkatan anggaran dan peningkatan kapasitas SDM petugas untuk kegiatan pendataan baru dan intensifikasi pendataan objek pajak daerah.

3. Kepegawaian

Kinerja penyelenggaran kepegawaian diimplementasikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan 2 indikator kinerja sasaran dan 9 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel:

Tabel 2.251
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Kepegawaian Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1	Meningkat nya kualitas manajeme n pemerinta han	Indeks Profesionalism e ASN	Angka	50,09	53,13	50,09	64,54	100	100	●
		<i>Indeks Merit System</i>	Angka	0,61	0,482	0,61	0,62	100	100	●
Rata-rata								100	100	●
1, V	Program Kepegawai an Daerah	Persentase penyusunan formasi pegawai	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase penyelesaian usulan pensiun PNS tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	●
		Persentase Keterisian Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas	%	80	86,51	80	89,42	100	100	●
		Persentase Perempuan pada Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas	%	48	42,09	48	41,91	87,31	87,31	▼
		<i>Persentase pelanggaran disiplin ASN</i>	%	0,2	0,02	0,2	0,18	100	100	●
		Persentase penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN	%	90	14,29	90	71,43	79,37	79,37	▼
		Persentase pelaksanaan updating data kepegawaian	%	95	100	95	100	100	100	●
		Persentase penyelesaian	%	100	100	100	100	100	100	●

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisas i s.d TW IV			
		pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional								
RATA-RATA								96,29	96,29	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD sampai dengan triwulan IV tahun 2023 pada indikator sasaran sebesar 100 %. Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD pada indikator program sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar 96,29% berstatus Upaya keras. Berikut faktor penghambat dan upaya tindak lanjut pada indikator yang masih berstatus upaya keras yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status indikator tersebut yaitu :

- a. Pada indikator program yaitu indikator Persentase Perempuan pada Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas, faktor penghambat adalah Keterbatasan SDM yang akan diproyeksikan untuk menduduki jabatan dan berkurangnya jumlah ASN perempuan yang menduduki jabatan fungsional karena kebijakan penyederhanaan birokrasi dengan penyetaraan ke jabatan fungsional.. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan status indikator adalah Menambah kuota peserta diklatpim dan peningkatan kompetensi khususnya bagi ASN perempuan.
 - b. Pada indikator program yaitu indikator Persentase penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN, faktor penghambat dikarenakan Terjadinya kasus pada akhir triwulan IV sehingga pada bulan tersebut masih dilakukan tahapan penyelesaian kasus. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan status indikator adalah memaksimalkan dan mengupayakan penyelesaian kasus di triwulan berkenaan.
4. Pendidikan dan Pelatihan
- Kinerja penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diimplementasikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan 2 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.252
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisas i s.d TW IV			
1	Program Pengemban gan Sumber Daya Manusia	Persentase Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administra si, dan Pejabat Pengawas yang memiliki Kompetensi Diklat Kepemimpi nan	%	35	30,13	35	36,72	100	100	●
		Persentase ASN yang memiliki kompetensi Teknis dan Fungsional sesuai jabatannya	%	18	16,50	18	31,67	100	100	●
RATA-RATA								100	100	●

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD pada indikator program sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar 100 % berstatus telah tercapai.

5. Penelitian dan Pengembangan

Kinerja penyelenggaran Fungsi penunjang penelitian dan pengembangan diimplementasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan 2 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini;

Tabel 2.253
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan
Pengembangan Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Sasaran/ program	Indikato r kinerja	Sat,	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisas i s.d TW IV			
1,		Indeks Inovasi Daerah	predi kat	Sangat inovatif	Inovatif	Sanga t inovati f	Sanga t Inovati f	100	100	●
RATA - RATA								100	100	●
1,	Program penelitian dan pengemban gan	Persentas e pemanfa atan hasil penelitia	%	100	100	100	100	100	100	●

No	Sasaran/ program	Indikator kinerja	Sat,	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD Tahun s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1,		Indeks Inovasi Daerah	predi kat	Sangat inovatif	Inovatif	Sanga t inovati f	Sanga t Inovati f	100	100	●
RATA - RATA								100	100	●
		n dan pengkajia n								
		Persentas e hasil kreasi dan inovasi yang dikemba ngkan	%	65	100	65	100	100	100	●
RATA-RATA								100	100	●

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD pada indikator program sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar 100% berstatus telah tercapai sesuai target.

2.2.7 Evaluasi Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Kinerja pengawasan diimplementasikan oleh Inspektorat dengan 1 satu indikator kinerja sasaran dan 9 indikator kinerja program daerah, dengan capaian kinerja tertuang pada tabel:

Tabel 2.254
Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Sat,	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD Tahun s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1	Meningkat nya kualitas manajemen pemerintah an	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	An gk a	3,95	3,61	3,95	4,06	100	100	●
RATA-RATA								100	100	●
1	Program Penyeleng garaan Pengawasa n	Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	%	100	100	100	100	100	100	●
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelengga raan pemerintah an daerah pada tahap perencanaa n,	%	46	80,28	46	95,77	100	100	●

No	Sasaran/ Program	Indikator kinerja	Sat,	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPDT ahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD Tahun s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisas i s.d TW IV			
		pelaksanaan , pelaporan dan evaluasi								
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaa n, akuntabilita s keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	%	23	38,17	23	49,82	100	100	●
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelengga raan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	%	48	91,17	48	98,11	100	100	●
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampin gan Dan Asistensi	Nilai maturitas SPIP	Angk a	3,3	3,008	3,3	3,008	90,91	90,91	▼
		Persentase perangkat daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) / Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	60	100	60	100	100	100	●
		Persentase tindak lanjut aduan Whistle blowing, Benturan Kepentingan , dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100	100	100	100	100	100	●
		Nilai Survey Penilaian Integritas	Angk a	81,97	77,37	81,97	77,37	94,39	94,39	▼
		Prosentase penanganan aduan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	●
RATA-RATA								98,36	98,36	▼

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD sampai dengan triwulan IV tahun 2023 pada indikator sasaran sebesar 100%. Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD pada indikator program sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar 98,36% berstatus Upaya keras. Berikut faktor penghambat dan upaya tindak lanjut pada indikator yang masih berstatus upaya keras yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status indikator tersebut yaitu :

- a. Pada indikator program yaitu indikator Nilai maturitas SPIP, faktor penghambat tersebut antara lain: (1) Belum semua OPD dan personil mengerti akan pentingnya SPIP; (2) Pergeseran/ mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah (RTP) sehingga diperlukan refresh atas informasi terkait SPIP kepada Perangkat Daerah; (3) APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh, terbentur dengan terbatasnya sumber daya manusia; (4) Terbitnya regulasi baru PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah “SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dimana SPIP Terintegrasi merupakan gabungan antara Manajemen Risiko, Pencegahan Korupsi dan Kapabilitas APIP sehingga parameter penilaiannya bertambah/berkembang. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut antara lain: (1) Perlu diadakan Bimtek dan pendampingan penyusunan rencana Tindak Pengendalian secara rutin kepada Perangkat daerah, mengingat belum semua perangkat daerah memahami penyusunan Risk Register dan RTP; (2) Perlu dilakukan evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian; (3) Perlu dilakukan Self Assesment atas pelaksanaan maturitas SPIP di Kabupaten Temanggung secara rutin (2x setahun); (4) Perlu dilaksanakan sosialisasi, pendampingan dan Bimtek tentang Maturitas Penyelenggaraan SPIP kepada OPD.
- b. Pada indikator program yaitu indikator Nilai Survey Penilaian Integritas, faktor penghambat adalah adanya mutasi pegawai sesaat sebelum survei dilaksanakan. Upaya yang dilakukan untuk

menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu berkoordinasi dengan BKPSDM mengenai informasi kepegawaian yang paling update sesaat sebelum survei dilaksanakan agar populasi sample tepat.

2.2.8 Evaluasi Kinerja Unsur Kewilayahan

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Fungsi Kecamatan diimplementasikan Kecamatan dengan 1 indikator sasaran kinerja daerah dan 9 indikator kinerja program daerah, dengan capaian kinerja berikut:

Tabel 2.255
Capaian Kinerja Unsur Kewilayahan Fungsi Kecamatan Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Sat,	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1,	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-rata IKM di Kecamatan	%	84,00	84,56	84,00	86,14	99,83	99,83	▼
		1. Temanggung	%	84,00	85,2	84,00	85,981	100	100	
		2. Tembarak	%	84,00	87,5	84,00	88,01	100	100	
		3. Pringsurat	%	84,00	76,67	84,00	85,78	100	100	
		4. Kaloran	%	84,00	83,50	84,00	98,96	100	100	
		5. Parakan	%	84,00	81,02	84,00	84,05	100	100	
		6. Bulu	%	84,00	86,7	84,00	86,88	100	100	
		7. Kedu	%	84,00	89,52	84,00	88,70	100	100	
		8. Kandangan	%	84,00	84,41	84,00	86,97	100	100	
		9. Candiroto	%	84,00	84,87	84,00	84,28	100	100	
		10. Ngadirejo	%	84,00	88,41	84,00	85,99	100	100	
		11. Jumo	%	84,00	85,75	84,00	85,75	100	100	
		12. Wonobooyo	%	84,00	84,44	84,00	84,44	100	100	
		13. Kranggan	%	84,00	84,38	84,00	82,54	98,26	98,26	
		14. Bejen	%	84,00	85,50	84,00	86,20	100	100	
		15. Kledung	%	84,00	82,50	84,00	82,55	98,27	98,27	
		16. Bansari	%	84,00	82,00	84,00	84,22	100	100	
		17. Tlogomulyo	%	84,00	83,84	84,00	84,76	100	100	
		18. Selopampang	%	84,00	87,49	84,00	87,49	100	100	
		19. Gemawang	%	84,00	83,50	84,00	84,04	100	100	
20. Tretep	%	84,00	83,99	84,00	85,30	100	100			
Rata - Rata								99,83	99,83	▼
1,	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	%	100	98,87	100	102,77	100	100	●
		1. Temanggung		100	98,99	100	99,9	100	100	
		2. Tembarak		100	98,63	100	102,85	100	100	
		3. Pringsurat		100	99,68	100	102,78	100	100	

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Sat,	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		4. Kaloran		100	99,64	100	103,83	100	100	
		5. Parakan		100	99,76	100	102,96	100	100	
		6. Bulu		100	98,94	100	103,03	100	100	
		7. Kedu		100	98,71	100	100,54	100	100	
		8. Kandangan		100	98,86	100	105,23	100	100	
		9. Candiroto		100	98,82	100	102,47	100	100	
		10. Ngadirejo		100	98,79	100	103,93	100	100	
		11. Jumo		100	99,68	100	103,58	100	100	
		12. Wonoboyo		100	99,20	100	104,2	100	100	
		13. Kranggan		100	98,80	100	103,78	100	100	
		14. Bejen		100	99,45	100	100	100	100	
		15. Kledung		100	99,01	100	102,59	100	100	
		16. Bansari		100	98,81	100	100	100	100	
		17. Tlogomulyo		100	98,80	100	104,03	100	100	
		18. Selopampang		100	98,76	100	102,94	100	100	
		19. Gemawang		100	98,80	100	103,63	100	100	
		20. Tretep		100	95,17	100	103,13	100	100	
2,		Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	98,72	100	98,683	98,683	98,683	▼
		1. Temanggung		100	93,14	100	91,93	91,93	91,93	
		2. Tembarak		100	99,96	100	99,85	99,85	99,85	
		3. Pringsurat		100	96,47	100	98,19	98,19	98,19	
		4. Kaloran		100	99,09	100	100	100	100	
		5. Parakan		100	97,37	100	98,43	98,43	98,43	
		6. Bulu		100	100	100	97,58	97,58	97,58	
		7. Kedu		100	100	100	99,53	99,53	99,53	
		8. Kandangan		100	95,77	100	96,35	96,35	96,35	
		9. Candiroto		100	100	100	100	100	100	
		10. Ngadirejo		100	99,23	100	98,28	98,28	98,28	
		11. Jumo		100	100	100	100	100	100	
		12. Wonoboyo		100	100	100	100	100	100	
		13. Kranggan		100	95,39	100	93,63	93,63	93,63	
		14. Bejen		100	100	100	99,89	99,89	99,89	
		15. Kledung		100	97,92	100	100	100	100	
		16. Bansari		100	100	100	100	100	100	
		17. Tlogomulyo		100	100	100	100	100	100	
		18. Selopampang		100	100	100	100	100	100	
		19. Gemawang		100	100	100	100	100	100	
		20. Tretep		100	100	100	100	100	100	

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Sat,	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
3,	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP- Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	●
		1. Temanggung		100	100	100	100	100	100	
		2. Tembarak		100	100	100	100	100	100	
		3. Pringsurat		100	100	100	100	100	100	
		4. Kaloran		100	100	100	100	100	100	
		5. Parakan		100	100	100	100	100	100	
		6. Bulu		100	100	100	100	100	100	
		7. Kedu		100	100	100	100	100	100	
		8. Kandangan		100	100	100	100	100	100	
		9. Candiroto		100	100	100	100	100	100	
		10. Ngadirejo		100	100	100	100	100	100	
		11. Jumo		100	100	100	100	100	100	
		12. Wonobojo		100	100	100	100	100	100	
		13. Kranggan		100	100	100	100	100	100	
		14. Bejen		100	100	100	100	100	100	
		15. Kledung		100	100	100	100	100	100	
		16. Bansari		100	100	100	100	100	100	
		17. Tlogomulyo		100	100	100	100	100	100	
		18. Selopampang		100	100	100	100	100	100	
		19. Gemawang		100	100	100	100	100	100	
		20. Tretep		100	100	100	100	100	100	
		Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi layak	%	100	86,60	100	93,355	93,355	93,355	▼
		1. Temanggung		100	65,48	100	85,45	85,45	85,45	
		2. Parakan		100	90,79	100	90,79	90,79	90,79	
		3. Ngadirejo		100	100	100	100	100	100	
		4. Kranggan		100	90,14	100	97,18	97,18	97,18	
		Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	%	100	98,18	100	100	100	100	●
		1. Temanggung		100	93,97	100	100	100	100	
		2. Parakan		100	98,73	100	100	100	100	
		3. Ngadirejo		100	100	100	100	100	100	
		4. Kranggan		100	100	100	100	100	100	
4,	Program Koordi	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100	●

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Sat,	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPDP Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
	nasi Ketentr aman dan Keterti ban Umum	1. Temanggung		100	100	100	100	100	100	
		2. Tembarak		100	100	100	100	100	100	
		3. Pringsurat		100	100	100	100	100	100	
		4. Kaloran		100	100	100	100	100	100	
		5. Parakan		100	100	100	100	100	100	
		6. Bulu		100	100	100	100	100	100	
		7. Kedu		100	100	100	100	100	100	
		8. Kandangan		100	100	100	100	100	100	
		9. Candiroto		100	100	100	100	100	100	
		10. Ngadirejo		100	100	100	100	100	100	
		11. Jumo		100	100	100	100	100	100	
		12. Wonoboyo		100	100	100	100	100	100	
		13. Kranggan		100	100	100	100	100	100	
		14. Bejen		100	100	100	100	100	100	
		15. Kledung		100	100	100	100	100	100	
		16. Bansari		100	100	100	100	100	100	
		17. Tlogomulyo		100	100	100	100	100	100	
		18. Selopampang		100	100	100	100	100	100	
		19. Gemawang		100	100	100	100	100	100	
		20. Tretep		100	100	100	100	100	100	
5,	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	80	94,87	80	95,27	100	100	
		1. Temanggung		80	90,43	80	90,43	100	100	
		2. Tembarak		80	93,15	80	93,15	100	100	
		3. Pringsurat		80	96,85	80	96,85	100	100	
		4. Kaloran		80	96,53	80	96,53	100	100	
		5. Parakan		80	100	80	100	100	100	
		6. Bulu		80	85,44	80	85,44	100	100	
		7. Kedu		80	94,92	80	94,92	100	100	
		8. Kandangan		80	87,35	80	87,35	100	100	
		9. Candiroto		80	87,71	80	87,71	100	100	
		10. Ngadirejo		80	98,73	80	100	100	100	
		11. Jumo		80	98,03	80	98,03	100	100	
		12. Wonoboyo		80	100	80	100	100	100	
		13. Kranggan		80	100	80	100	100	100	
		14. Bejen		80	100	80	100	100	100	
		15. Kledung		80	100	80	100	100	100	
		16. Bansari		80	100	80	100	100	100	
		17. Tlogomulyo		80	94,37	80	94,37	100	100	
		18. Selopampang		80	80,68	80	80,68	100	100	
		19. Gemawang		80	100	80	100	100	100	
		20. Tretep		80	93,15	80	100	100	100	

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Sat,	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
6,	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan	%	1	0,10	1	0	100	100	
		1. Temanggung		1	0	1	0	100	100	
		2. Tembarak		1	0,6	1	0	100	100	
		3. Pringsurat		1	0	1	0	100	100	
		4. Kaloran		1	0	1	0	100	100	
		5. Parakan		1	0	1	0	100	100	
		6. Bulu		1	0	1	0	100	100	
		7. Kedu		1	1,38	1	0	100	100	
		8. Kandangan		1	0	1	0	100	100	
		9. Candiroto		1	0	1	0	100	100	
		10. Ngadirejo		1	0	1	0	100	100	
		11. Jumo		1	0	1	0	100	100	
		12. Wonobojo		1	0	1	0	100	100	
		13. Kranggan		1	0	1	0	100	100	
		14. Bejen		1	0	1	0	100	100	
		15. Kledung		1	0	1	0	100	100	
		16. Bansari		1	0	1	0	100	100	
		17. Tlogomulyo		1	0	1	0	100	100	
		18. Selopampang		1	0	1	0	100	100	
		19. Gemawang		1	0	1	0	100	100	
		20. Tretep		1	0	1	0	100	100	
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBDesa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	
		1. Temanggung		100	100	100	100	100	100	
		2. Tembarak		100	100	100	100	100	100	
		3. Pringsurat		100	100	100	100	100	100	
		4. Kaloran		100	100	100	100	100	100	
		5. Parakan		100	100	100	100	100	100	
		6. Bulu		100	100	100	100	100	100	
		7. Kedu		100	100	100	100	100	100	
		8. Kandangan		100	100	100	100	100	100	
		9. Candiroto		100	100	100	100	100	100	
		10. Ngadirejo		100	100	100	100	100	100	
		11. Jumo		100	100	100	100	100	100	
		12. Wonobojo		100	100	100	100	100	100	
		13. Kranggan		100	100	100	100	100	100	
		14. Bejen		100	100	100	100	100	100	

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Sat,	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
		15. Kledung		100	100	100	100	100	100	
		16. Bansari		100	100	100	100	100	100	
		17. Tlogomulyo		100	100	100	100	100	100	
		18. Selopampang		100	100	100	100	100	100	
		19. Gemawang		100	100	100	100	100	100	
		20. Tretep		100	100	100	100	100	100	
RATA-RATA								99,18	99,18	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD sampai dengan triwulan IV tahun 2023 pada indikator sasaran sebesar 99,83%. Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD pada indikator program sampai dengan triwulan I tahun 2023 sebesar 99,18 % berstatus Upaya keras. Berikut faktor penghambat dan upaya tindak lanjut pada indikator yang masih berstatus upaya keras yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status indikator tersebut yaitu :

- a. Pada indikator Sasaran yaitu indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan, faktor penghambat dikarenakan kurangnya pelatihan dan bimtek bagi pegawai kecamatan khususnya staf *front office* sehingga dalam pelayanan kurang maksimal. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengadakan pelatihan bagi pegawai kecamatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kinerja pelayanan.
- b. Pada indikator program yaitu indikator Persentase realisasi penerimaan PBB, faktor penghambat belum tercapainya indikator kinerja program tersebut antara lain (1) Wajib Pajak terbiasa membayar menjelang jatuh tempo; (2) Masih adanya SPPT yang bermasalah, adanya keterlambatan penyampaian SPPT karena Wajib Pajak berada di luar kota, dan Wajib Pajak tidak ditemukan. Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan tertib administrasi PBB dengan melakukan monitoring secara berkala ke desa-desa dan sosialisasi kepada warga masyarakat.
- c. Pada indikator program yaitu indikator Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi layak, faktor penghambat dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengusulkan masih kurang selain itu kelengkapan data masih belum sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Upaya tindak lanjut untuk

mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan update data setiap tiga bulan sekali dan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan data secara lengkap sesuai kondisi di lapangan sehingga dalam melakukan pengusulan kebutuhan sarpras di kelurahan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.2.9 Evaluasi Kinerja Unsur Pemerintahan Umum

Capaian Kinerja pemerintahan Umum diimplementasikan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dengan 1 indikator kinerja sasaran, dan 10 indikator kinerja program daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tabel berikut ini,

Tabel 2.256
Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Sasaran/ program	Indikator Kinerja	Sat,	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
1	Meningkat nya nilai kehidupa n bermasyar a kat dan wawasan kebangsaan	Indeks Gotong Royong	Ang ka	4,22	4,33	4,22	4,33	100	100	●
		Indeks toleransi	ang ka	4,19	4,5	4,19	4,5	100	100	●
RATA-RATA								100	100	●
1	Program Penguata n Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase sekolah yang mendapat kan pemahaman kebangsaan	%	62	65	62	70	100	100	●
		Cakupan desa/ kelurahan yang mendapat kan pembinaan wawasan kebangsaan	%	10	58,48	10	79,58	100	100	●
2	Program Peningkat an Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidika n Melalui Pendidika n Politik dan Pengemba ngan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pemilih yang mengguna kan hak pilihnya	%	87	87,21	87	87,21	100	100	●
		Persentase keterwakila n perempuan di lembaga politik	%	30	32,73	30	32,73	100	100	●
		Persentase keterwakila n perempuan di DPRD	%	30	33,33	30	33,33	100	100	●

No	Sasaran/ program	Indikator Kinerja	Sat,	Target Akhir RPJMD 2023	Realisasi Tahun 2022	2023		Cap. RKPD Tahun 2023 s.d TW IV	Cap. RPJMD s.d 2023	Status Cap
						Target	Realisasi s.d TW IV			
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan	%	100	0	100	100	100	100	
4	Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase terdeteksi dan tertangannya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi	%	100	100	100	100	100	100	
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase terdeteksi dan tertangannya konflik politik dan keamanan daerah	%	100	100	100	100	100	100	
		Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%	10	11,07	10	79,58	100	100	
		Cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%	35	38	35	70	100	100	
RATA-RATA								100	100	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

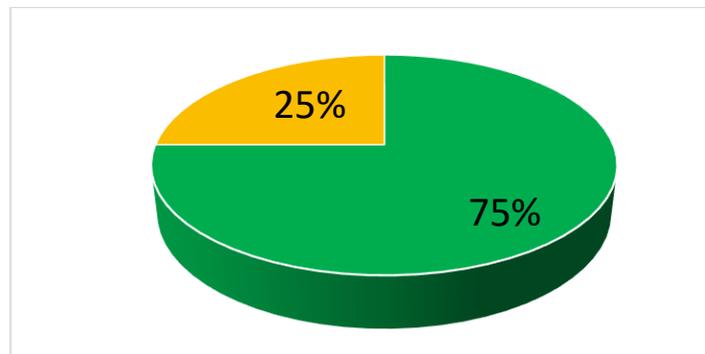
Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD sampai dengan triwulan IV tahun 2023 pada indikator sasaran sebesar 100%. Capaian kinerja RKPD ataupun RPJMD pada indikator program sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar 100%.

2.2.10 Ringkasan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Hasil evaluasi kinerja program penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 s.d Triwulan I diketahui bahwa

pada setiap misi ada beberapa program dengan status Telah Tercapai dan Upaya Keras sebagaimana berikut :

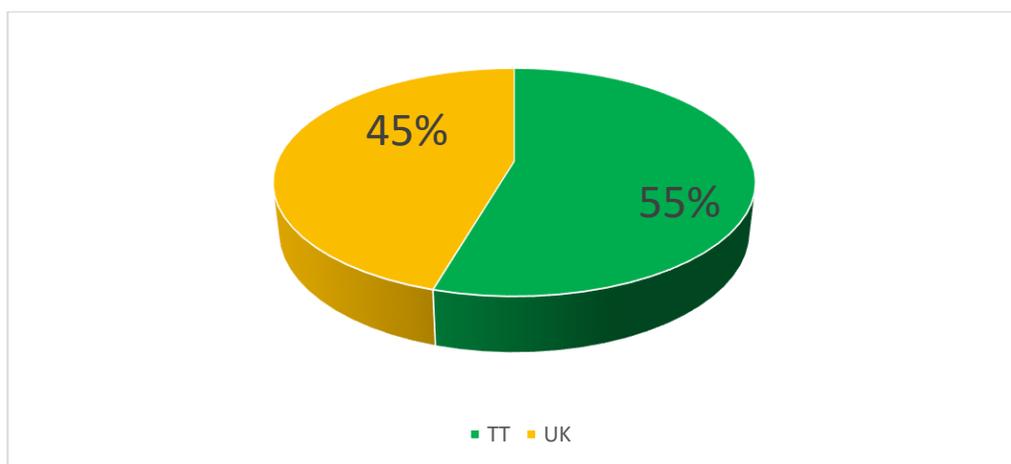
1. Capaian indikator tujuan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 s.d Triwulan IV ada 8 indikator dengan status Telah Tercapai sejumlah 6 indikator (75%) dan 2 indikator dengan status Upaya Keras (25%).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Gambar 2.32
Capaian Indikator Kinerja Tujuan Sampai dengan Tahun 2023 s.d Triwulan IV

2. Capaian indikator sasaran urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada Tahun 2023 s.d. Triwulan IV ada 10 indikator sasaran, dengan status Telah Tercapai sejumlah 6 indikator (55%) dan 5 indikator dengan status Upaya Keras (45%) sebagaimana dalam gambar berikut ini:



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Gambar 2.33
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sampai dengan Tahun 2023 s.d. Triwulan IV

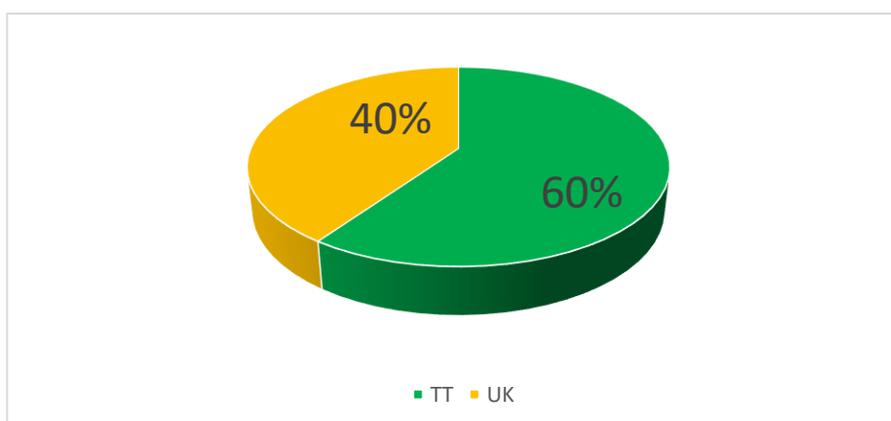
Rincian capaian sasaran urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.257
Capaian Sasaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Urusan Pemerintahan
Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 s.d Triwulan IV

NO	Urusan / Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD		
			TT	UK	JML
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	97,54	6	4	10
1	Bidang Pendidikan	97,50	1	1	2
2	Bidang Kesehatan – Dinkes	100	1	0	1
3	Bidang Kesehatan - RSUD	100	1	0	1
4	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	99,62	0	2	2
5	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	1	0	1
6	Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat – Satpol PP Damkar	100	1	0	1
7	Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat – BPBD	100	1	0	1
8	Bidang Sosial	85,69	0	1	1

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Dari 139 indikator kinerja program yang mendukung urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di tahun 2023 s.d. Triwulan IV terdapat 83 indikator dengan status Telah Tercapai (50%) dan 56 indikator dengan status perlu Upaya Keras (40%).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Gambar 2.34
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan
dengan Pelayanan Dasar sampai dengan
Tahun 2023 s.d Triwulan IV

Rincian capaian program perbidang sebagaimana tabel berikut:

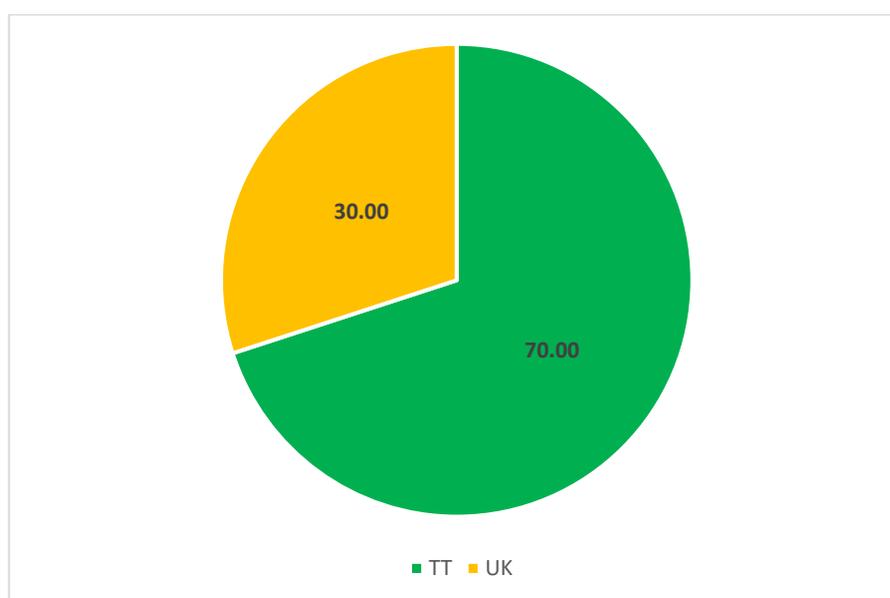
Tabel 2.258
Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan
Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Urusan / Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD		
			TT	UK	JML
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	91,46	71	52	123
1	Bidang Pendidikan	97,50	13	16	29
2	Bidang Kesehatan – Dinkes	64,47	19	25	44
3	Bidang Kesehatan - RSUD	100,00	2	0	2
4	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	99,84	9	2	12

No	Urusan / Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD		
			TT	UK	JML
5	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	99,59	5	1	6
6	Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat – Satpol PP Damkar	89,96	4	4	8
7	Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat – BPBD	89	8	1	9
8	Bidang Sosial	91,78	11	3	14

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

3. Capaian indikator sasaran yang mendukung Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Tahun 2023 s.d. Triwulan IV ada 20 indikator sasaran, dengan status telah tercapai sejumlah 14 indikator (70%) dan status Upaya Keras ada 6 indikator (30%) sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut ini;



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Gambar 2.35

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sampai dengan Tahun 2023 s.d Triwulan IV

Rincian capaian sasaran Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar per bidang sebagaimana tabel berikut:

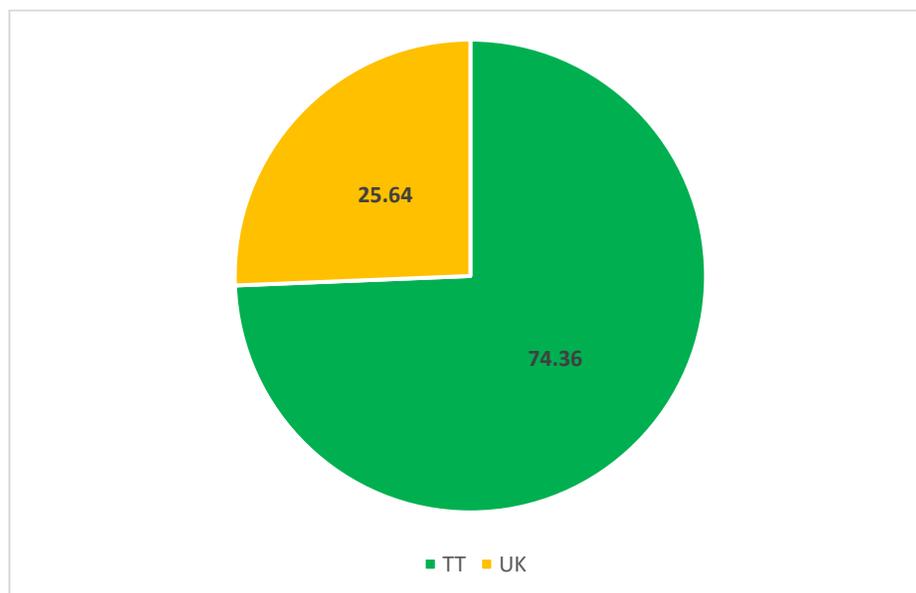
Tabel 2.259
Capaian Sasaran Penyelenggaran Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 s.d. Triwulan IV

No	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD		
			TT	UK	JML
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		14	6	20
1	Bidang Tenaga Kerja	100,00	1	0	1
2	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	100,00	2	0	2
3	Bidang Pangan	100,00	1	0	1
4	Bidang Pertanahan	-	-	-	-

No	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD		
			TT	UK	JML
5	Bidang Lingkungan Hidup	99,05	0	1	1
6	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100,00	1	0	1
7	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100,00	2	0	2
8	Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	100,00	1	0	1
9	Bidang Perhubungan	100,00	1	0	1
10	Bidang Komunikasi dan Informatika	96,01	1	1	2
11	Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	70,52	1	1	2
12	Bidang Penanaman Modal	100,00	1	0	1
13	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	93,55	1	1	2
14	Bidang Statistik	-	-	-	-
15	Bidang Persandian	-	-	-	-
16	Bidang Kebudayaan	100,00	1	0	1
17	Bidang Perpustakaan	51,55	0	1	1
18	Bidang Kearsipan	93,23	0	1	1

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Dari 117 indikator program yang mendukung Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Tahun 2023 s.d. Triwulan IV terdapat 87 indikator program Telah Tercapai (74,36%) dan 30 indikator perlu Upaya Keras (25,64%).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Gambar 2.36

Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sampai dengan Tahun 2023 s.d. Triwulan IV

Rincian capaian program per bidang sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.260

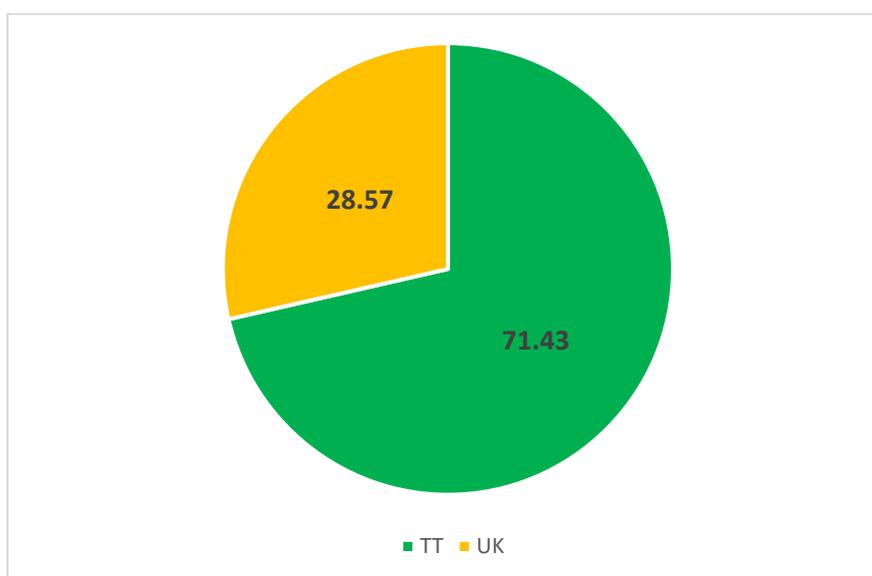
Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD		
			TT	UK	JML
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	78,93	87	30	117

No	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD		
			TT	UK	JML
1	Bidang Tenaga Kerja	85,30	6	4	10
2	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	95,49	7	1	8
3	Bidang Pangan	67,04	2	2	4
4	Bidang Pertanahan	100,00	1	0	1
5	Bidang Lingkungan Hidup	79,58	10	4	14
6	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99,63	8	2	10
7	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98,60	12	1	13
8	Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	97,28	7	2	9
9	Bidang Perhubungan	98,27	8	2	10
10	Bidang Komunikasi dan Informatika	96,05	5	2	7
11	Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	48,16	2	3	5
12	Bidang Penanaman Modal	98,71	9	1	10
13	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	100,00	5	0	5
14	Bidang Statistik	0,00	0	1	1
15	Bidang Persandian	0,00	1	0	1
16	Bidang Kebudayaan	99,01	3	1	4
17	Bidang Perpustakaan	65,57	0	3	3
18	Bidang Kearsipan	92,02	1	1	2

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

4. Capaian indikator sasaran yang mendukung urusan pemerintahan pilihan pada tahun 2023 s.d Triwulan IV ada 7 indikator. Terdapat 5 indikator dengan status Telah Tercapai (71,43%) dan 2 indikator dengan status Upaya Keras (28,57%).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Gambar 2.37

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun 2023 s.d Triwulan IV

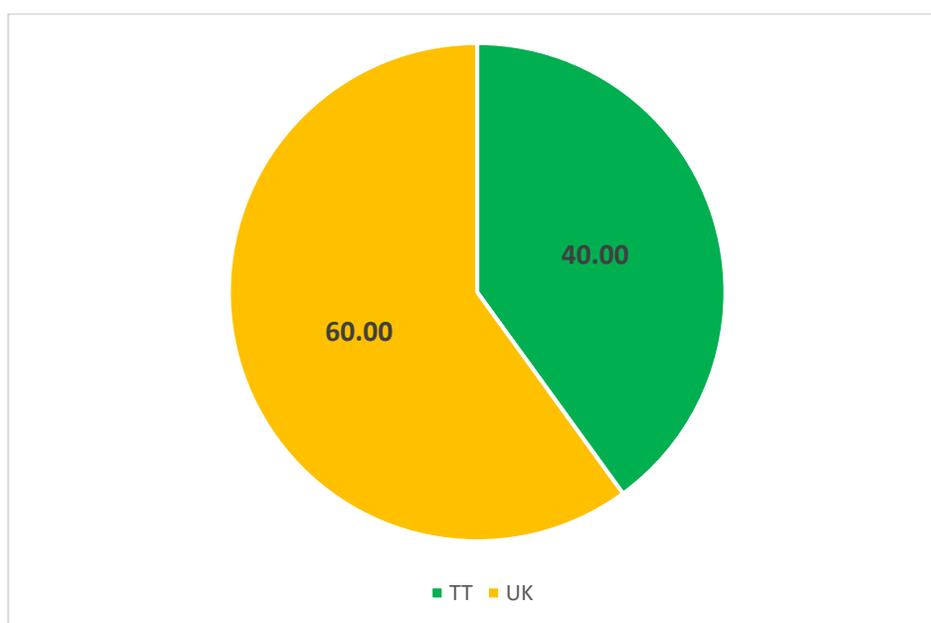
Rincian capaian sasaran urusan pemerintahan pilihan per bidang dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.261
Capaian Sasaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD		
			TT	UK	JML
	Urusan Pemerintahan Pilihan		5	2	7
1	Bidang Kelautan dan Perikanan	100,00	1	0	1
2	Bidang Pariwisata	92,73	0	1	1
3	Bidang Pertanian	93,38	2	1	3
4	Bidang Perdagangan	100,00	1	0	1
5	Bidang Perindustrian	100,00	1	0	1
6	Bidang Transmigrasi	-	-	-	-

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Dari 45 indikator program yang mendukung urusan pemerintahan pilihan di Tahun 2023 s.d Triwulan IV terdapat 18 indikator Telah Tercapai (40%) dan 27 indikator dengan status Upaya Keras (60%).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Gambar 2.38
Capaian Indikator Kinerja Program urusan pemerintahan pilihan
Tahun 2023 s.d Triwulan IV

Rincian capaian program per bidang dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

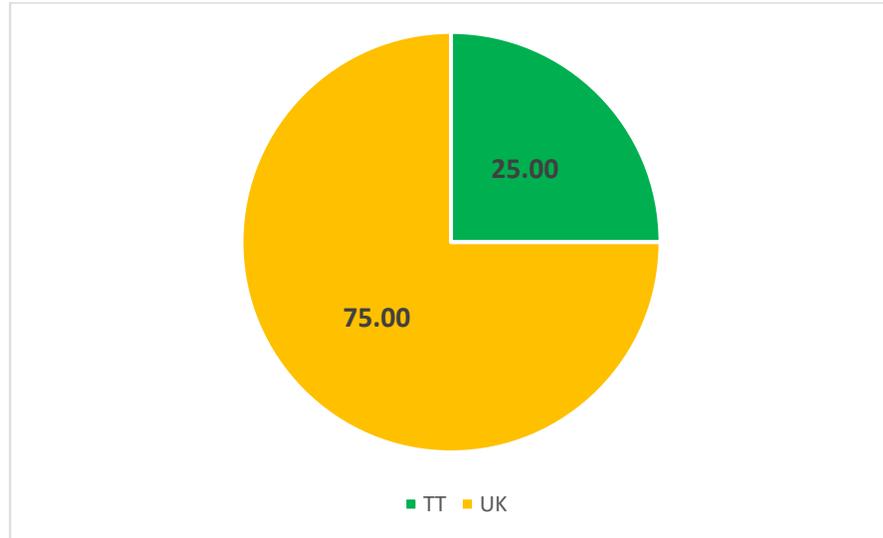
Tabel 2.262
Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD		
			TT	UK	JML
	Urusan Pemerintahan Pilihan	70,03	18	27	45
1	Bidang Kelautan dan Perikanan	83,04	2	4	6
2	Bidang Pariwisata	64,18	2	4	6
3	Bidang Pertanian	89,16	11	12	23
4	Bidang Perdagangan	65,80	2	5	7
5	Bidang Perindustrian	18,00	0	2	2
6	Bidang Transmigrasi	100,00	1	0	1

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

5. Bahwa capaian indikator sasaran yang mendukung unsur

pendukung urusan pemerintahan pada tahun 2023 s.d Triwulan I ada 4 indikator. Terdapat 1 indikator dengan status Telah Tercapai (25,00%) dan 3 indikator dengan status Upaya Keras (75,00%).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021, data diolah

Gambar 2.39
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2023 s.d. Triwulan IV

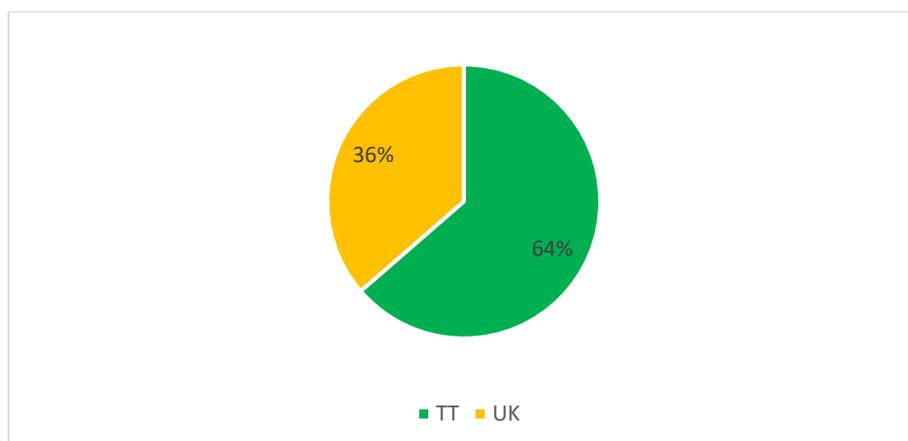
Rincian capaian sasaran unsur pendukung urusan pemerintahan per bidang dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.263
Capaian Sasaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD		
			TT	UK	JML
	Unsur pendukung urusan pemerintahan		1	3	4
1	Sekretariat Daerah	96,02	1	2	3
2	Sekretariat DPRD	0,00	0	1	1

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Dari 24 indikator program yang mendukung Unsur pendukung urusan pemerintahan di Tahun 2023 s.d Triwulan I terdapat 14 indikator Telah Tercapai (64%) dan 10 indikator dengan status Upaya Keras (36%).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Gambar 2.40
Capaian Indikator Kinerja Program Unsur pendukung urusan pemerintahan Tahun 2023 s.d Triwulan IV

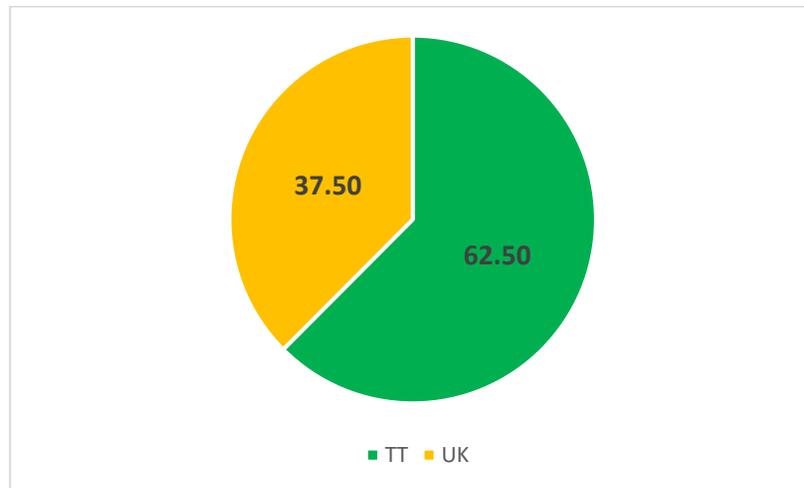
Rincian capaian program per bidang dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.264
Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Unsur pendukung urusan pemerintahan Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD		
			TT	UK	JML
	Unsur pendukung urusan pemerintahan	95,18	14	8	24
1	Sekretariat Daerah	78,52	13	6	19
2	Sekretariat DPRD	33,33	1	2	3

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

6. Bahwa capaian indikator sasaran yang mendukung unsur penunjang urusan pemerintahan pada tahun 2023 s.d Triwulan IV ada 8 indikator. Terdapat 5 indikator dengan status Telah Tercapai (62,50%) dan 3 indikator dengan status Upaya Keras (37,50%).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Gambar 2.41
Capaian Indikator Kinerja Sasaran unsur penunjang urusan pemerintahan Tahun 2023 s.d Triwulan IV

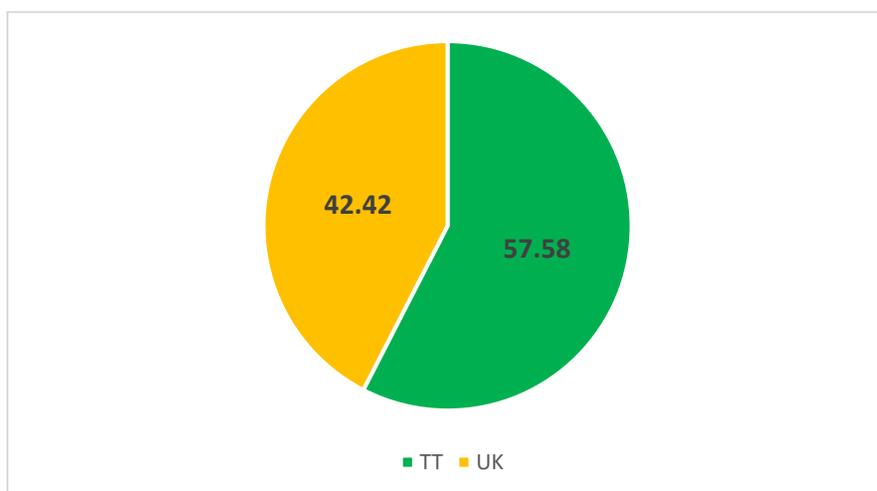
Rincian capaian sasaran unsur pendukung unsur penunjang urusan pemerintahan per bidang dapat di lihat pada tabel:

Tabel 2.265
Capaian sasaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD		
			TT	UK	JML
	Unsur penunjang urusan pemerintahan		5	3	8
1	Perencanaan	100,00	3	0	3
2	Keuangan	80,19	0	2	2
3	Kepegawaian	89,51	1	1	2
4	Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-
5	Penelitian dan Pengembangan	100,00	1	0	1

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Dari 33 indikator program yang mendukung unsur penunjang urusan pemerintahan di Tahun 2023 s.d Triwulan IV terdapat 19 indikator Telah Tercapai (57,58%) dan 14 indikator perlu Upaya Keras (42,42%).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Gambar 2.42
Capaian Indikator Kinerja Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2023 s.d. Triwulan IV

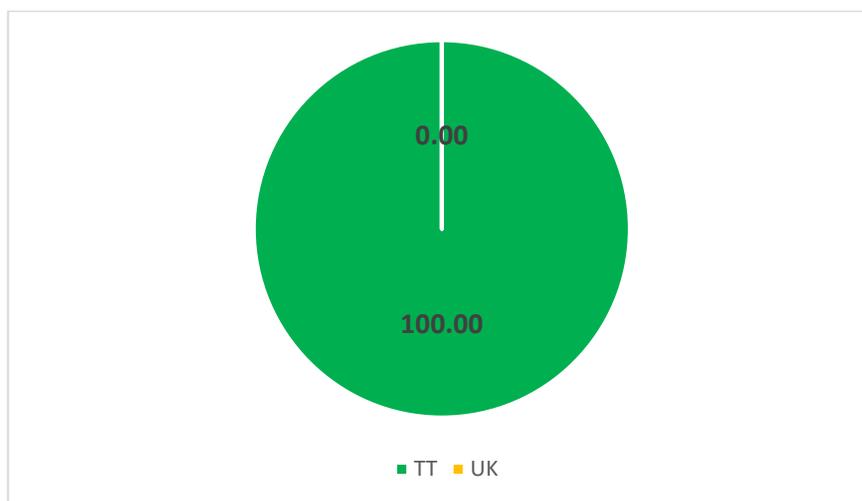
Rincian capaian program per bidang dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.266
Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah unsur penunjang urusan pemerintahan Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD		
			TT	UK	JML
	Unsur penunjang urusan pemerintahan		19	14	33
1	Perencanaan	88,07	2	4	6
2	Keuangan	80,19	9	5	14
3	Kepegawaian	84,94	6	3	9
4	Pendidikan dan Pelatihan	88,11	0	2	2
5	Penelitian dan Pengembangan	100,00	2	0	2

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

- Bahwa capaian indikator sasaran yang mendukung unsur pengawasan urusan pemerintahan pada tahun 2023 s.d Triwulan IV ada 1 indikator dengan status Telah Tercapai (100%).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Gambar 2.43
Capaian Indikator Kinerja Sasaran unsur pengawasan urusan pemerintahan Tahun 2023 s.d Triwulan IV

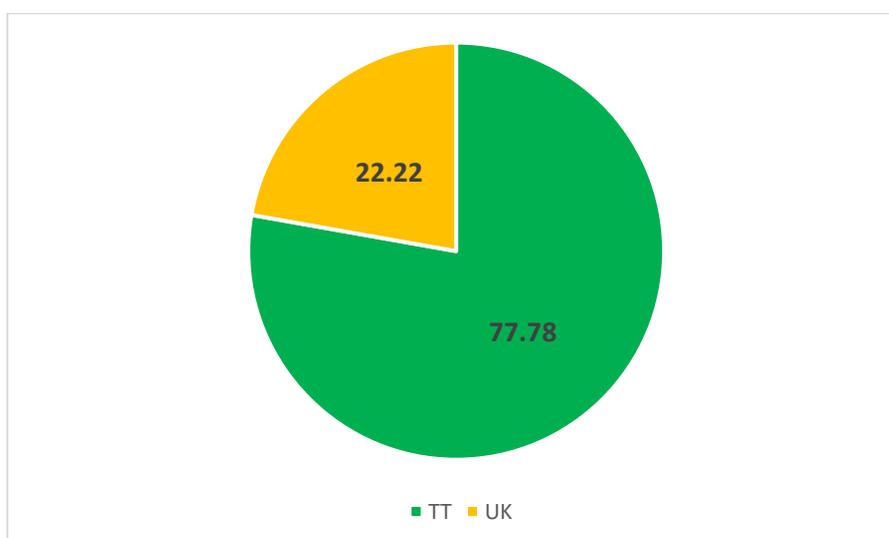
Rincian capaian sasaran unsur pengawasan urusan pemerintahan per bidang dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.267
Capaian Sasaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2023 s.d Triwulan IV

NO	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD		
			TT	UK	JML
	Unsur pengawasan urusan pemerintahan		1	0	1
1	Inspektorat Daerah	100,00	1	0	1

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Dari 9 indikator program yang mendukung unsur pengawasan urusan pemerintahan di Tahun 2023 s.d. Triwulan IV terdapat 7 indikator Telah Tercapai (77,78%) dan 2 indikator Upaya Keras (22,22%).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Gambar 2.44
Capaian Indikator Kinerja Program Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2023 s.d. Triwulan IV

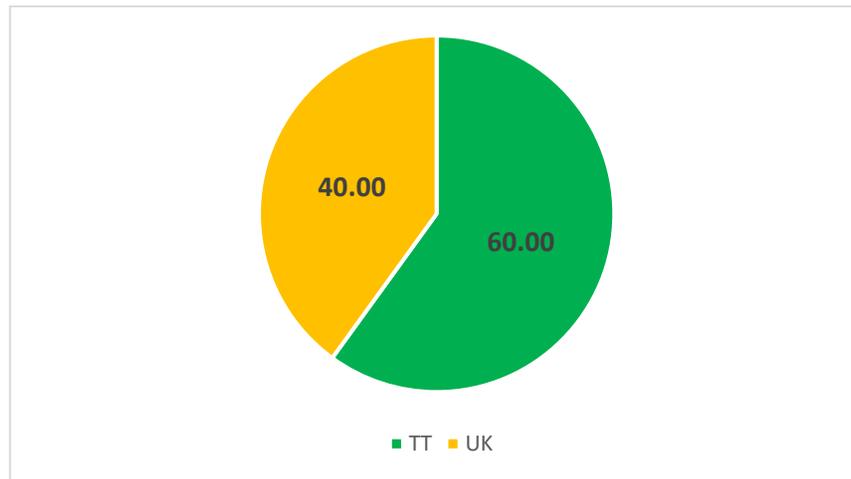
Rincian capaian program per bidang dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.268
Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD		
			TT	UK	JML
	Unsur pengawasan urusan pemerintahan		7	2	9
1	Inspektorat Daerah	98,39	7	2	9

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

8. Bahwa capaian indikator sasaran yang mendukung unsur kewilayahan pada tahun 2023 s.d Triwulan IV ada 1 indikator dengan status Upaya Keras (99,11%).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Gambar 2.45
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Unsur Kewilayahan
Tahun 2023 s.d Triwulan IV

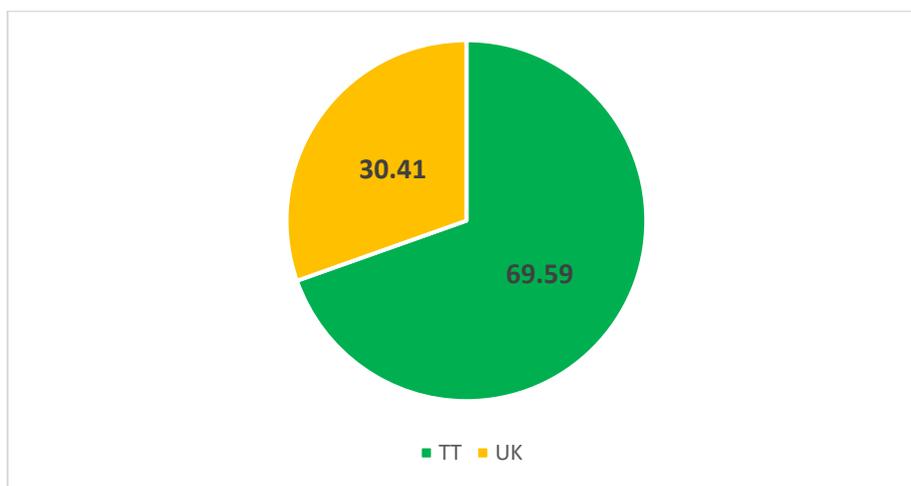
Rincian capaian sasaran unsur kewilayahan per bidang dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.269
Capaian Sasaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Unsur Kewilayahan Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD		
			TT	UK	JML
	Unsur kewilayahan		12	8	20
1	Kecamatan	99,11	12	8	20

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Dari 148 indikator program yang mendukung Unsur kewilayahan di Tahun 2023 s.d Triwulan IV terdapat 103 indikator Telah Tercapai (55,56%) dan 45 indikator Upaya Keras (30,41%).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Gambar 2.46
Capaian Indikator Kinerja Program Unsur kewilayahan
Tahun 2023 s.d Triwulan IIV

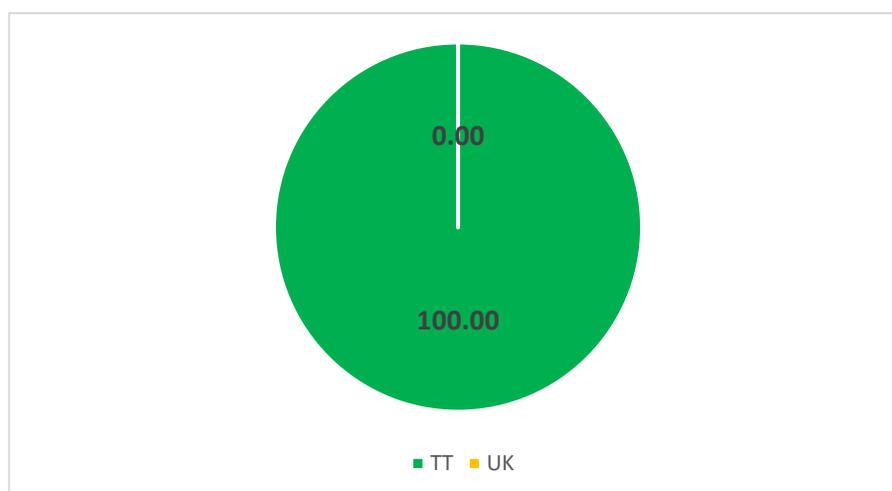
Rincian capaian program per bidang dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.270
Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Unsur kewilayahan Tahun 2023 s.d. Triwulan IV

No	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD		
			TT	UK	JML
	Unsur kewilayahan		90	58	148
1	Kecamatan	97,26	90	58	148

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

9. Bahwa capaian indikator sasaran yang mendukung unsur pemerintahan umum pada tahun 2023 s.d. Triwulan IV ada 2 indikator dengan status Telah Tercapai (100%).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Gambar 2.47
Capaian Indikator Kinerja Sasaran unsur pemerintahan umum Tahun 2023 s.d.
Triwulan IV

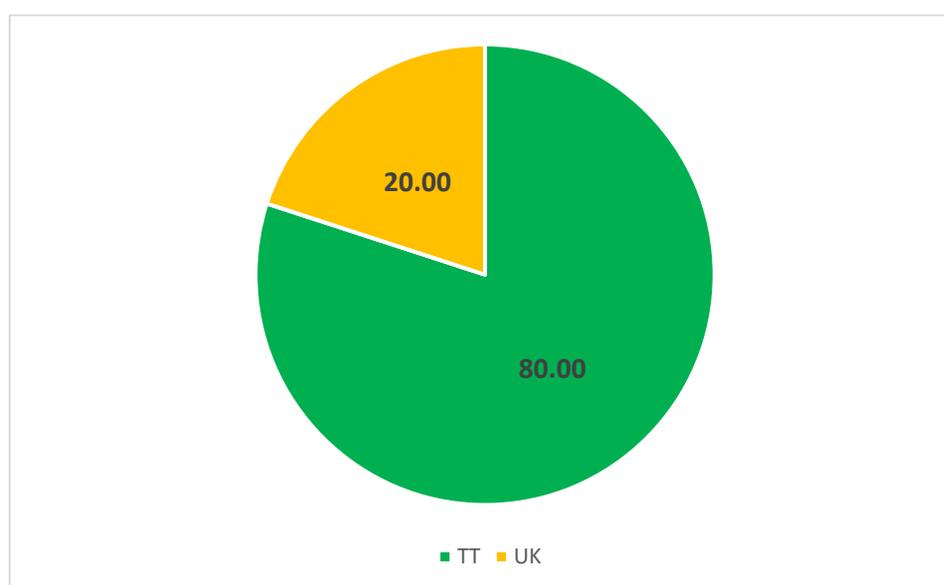
Rincian capaian sasaran unsur pemerintahan umum per bidang dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.271
Capaian Sasaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2023 s.d. Triwulan IV

No	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD		
			TT	UK	JML
	Unsur Pemerintahan Umum		2	0	2
1	Fungsi Lainnya - Kesatuan Bangsa Politik	100,00	2	0	2

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Dari 10 indikator program yang mendukung unsur pemerintahan umum di Tahun 2023 s.d Triwulan IV, terdapat 8 indikator Telah Tercapai (80%) dan 2 indikator Upaya Keras (20%).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Gambar 2.48
Capaian Indikator Kinerja Program Unsur Pemerintahan Umum
Tahun 2023 s.d. Triwulan IV

Rincian capaian program per bidang dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.272
Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2023 s.d. Triwulan IV

No	Urusan /Bidang	Rata-Rata Capaian (%)	IKD		
			TT	UK	JML
	Unsur Pemerintahan Umum		8	2	10
1	Fungsi Lainnya - Kesatuan Bangsa Politik	98,69	8	2	2

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Kinerja pembangunan daerah Kabupaten Temanggung diukur dari ketercapaian program pembangunan daerah. RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 memuat 8 indikator tujuan, 72 indikator sasaran dan 510 indikator program. Hasil evaluasi pencapaian target kinerja pembangunan daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 s.d. Triwulan IV dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.273
Rangkuman Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Temanggung
Tahun 2023 s.d Triwulan IV

No	Indikator	Jumlah	Status Capaian	Persentase
1	Indikator Tujuan	6	Telah Tercapai	75%
		2	Upaya Keras	25%
2	Indikator Sasaran	43	Telah Tercapai	59,72%
		29	Upaya Keras	40,28%
3	Indikator Program	324	Telah Tercapai	63,53%
		186	Upaya Keras	36,47%

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diidentifikasi dari permasalahan yang berkaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. Ditinjau dari keterkaitan permasalahan pembangunan dengan hasil evaluasi, seluruh permasalahan hasil evaluasi menjadi permasalahan pembangunan. Adapun hasil identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan sebagai berikut:

2.3.1.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Beberapa identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah di antaranya:

1. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung;
2. Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Temanggung;
3. Masih adanya kasus gizi buruk;
4. Masih tingginya kasus kematian ibu;
5. Masih adanya kasus kematian bayi dan balita;
6. Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal;
7. Perlunya peningkatan penanganan persampahan di Kabupaten Temanggung;
8. Masih tingginya lahan potensial kritis;
9. Perlunya peningkatan konservasi lingkungan hidup,
10. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik.

2.3.1.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
 - 1) Bidang Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan mempunyai pengaruh penting terhadap kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan dalam pembangunan pendidikan dapat menghasilkan sumber daya manusia berkualitas, berkarakter dan berdaya saing. Namun demikian, pembangunan pendidikan di Kabupaten Temanggung masih mempunyai permasalahan dan tantangan untuk penanganannya, di antaranya:

- a) Belum tercapainya angka rata-rata lama sekolah sesuai Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Temanggung tahun 2023 yaitu sebesar 7,50;
- b) Masih terdapat angka putus sekolah pada jenjang SD dan SMP Sederajat;
- c) Masih terdapat fasilitas pendidikan ruang kelas dalam kondisi kurang baik;
- d) Masih terdapat SMP yang belum terakreditasi minimal. Terjadi penurunan persentase SMP yang terakreditasi minimal selama tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2021 tercapai sebesar 88,75%, tahun 2022 tercapai sebesar 86,75% dan tahun 2023 tercapai sebesar 85,71%, hal ini terjadi disebabkan karena persepsi yang kurang tepat bahwa pelaksanaan dan hasil akreditasi merupakan tanggung jawab pimpinan, dan semakin baik jenjang akreditasi semakin sulit mengakses bantuan dari Pemerintah Pusat. Selain itu, masih ada keterbatasan kuota dan anggaran pelaksanaan akreditasi;
- e) Masih terdapat penduduk lulusan SMP yang belum memiliki sertifikat Pendidikan sebesar 55,95%;
- f) Masih rendahnya angka partisipasi pendidikan kesetaraan pada penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah, pada tahun 2023 yaitu sebesar 51,95%;
- g) Menurunnya persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun) dari 75,18% pada tahun 2022 menjadi 70,81% di tahun 2023.

2) Bidang Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan memiliki faktor strategis juga dalam pembangunan manusia yang berkaitan dengan derajat kesehatan masyarakat, Pembangunan kesehatan tersebut sesuai siklus kehidupan manusia. Upaya peningkatan derajat kesehatan di Kabupaten Temanggung masih menemui berbagai permasalahan dan tantangan diantaranya:

- a) Masih ditemukan kasus kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup) pada tahun 2023 yaitu sebesar 13,04% yang disebabkan belum optimalnya

kelengkapan sarana prasarana penanganan kegawatdaruratan asfiksi atau penyakit pada bayi dan kapasitas, belum optimalnya keterampilan tenaga kesehatan dalam penanganan kasus kegawadaruratan dan stabilisasi pasien pra rujukan, belum optimalnya sistem rujukan untuk penanganan rujukan persalinan, penanganan bayi dengan komplikasi serta kualitas kunjungan neonatal yang belum optimal dan pengelolaan manajemen laktasi yang belum maksimal;

- b) Masih tingginya Angka Kematian Balita (per 1000 kelahiran hidup) yaitu sebesar 16,10%, yang disebabkan karena faktor risiko yang dialami oleh ibu pada saat kehamilan dan balita dengan infeksi meningitis, kelainan jantung, sesak nafas serta kurangnya pendidikan pola asuh balita dan pemantauan tumbuh kembang balita;
- c) Masih tingginya Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2023 yaitu sebesar 9,22%, hal ini disebabkan karena kualitas kunjungan neonatal yang belum optimal dan pengelolaan manajemen laktasi yang belum maksimal, belum lengkapnya sarana prasarana penanganan kegawatdaruratan asfiksia atau penyakit pada bayi, belum optimalnya kapasitas dan keterampilan tenaga kesehatan dalam penanganan kasus kegawadaruratan dan stabilisasi pasien pra rujukan, serta belum optimalnya sistem rujukan untuk penanganan rujukan persalinan, penanganan bayi dengan komplikasi.
- d) Masih ditemukannya kasus Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Untuk Penyakit tidak menular disebabkan oleh masih terdapat pola pikir masyarakat terkait kunjungan ke pelayanan kesehatan yang dilakukan hanya saat sakit serta adanya rekapitulasi data kasus hipertensi dari fasilitas kesehatan swasta yang belum melaporkan kepada Dinas Kesehatankasus, adanya perubahan prevalensi penderita hipertensi berdasarkan Riskesdas tahun 2018 terkait sasaran hipertensi yaitu 35,5% dari total penduduk usia > 15 tahun juga menjadi salah satu hambatan dalam capaian indikator ini serta dalam pelaporan data by name by address dari faskes swasta belum optimal karena laporan belum rutin dilakukan sehingga evaluasi masih belum berjalan optimal. Sedangkan faktor penyebab kasus Penyakit Menular antara lain Masyarakat beranggapan bahwa TBC bisa diobati secara mandiri, Kesadaran populasi berisiko HIV/AIDS untuk tes HIV masih belum optimal, belum adanya regulasi/kebijakan Pemda tentang Pemeriksaan Triple Eliminasi (HIV, Sifilis dan Hepatitis B) wajib bagi ibu hamil untuk

pencegahan Penularan Penyakit dari Ibu ke Anak (PPIA), Tidak optimalnya deteksi dini pada kelompok rentan / potensial wabah serta adanya perbedaan data dan perbedaan persepsi kriteria DBD berdasarkan WHO dengan persepsi di masyarakat yang menyebabkan penanganan DBD kurang optimal.

3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan dan tantangan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain:

- a) Masih adanya resiko kerusakan jalan karena masih banyaknya genangan pada musim penghujan yang juga berkaitan dengan masih kurangnya drainase jalan yang dibangun, yaitu baru 69,21% jalan kabupaten yang dilengkapi drainase;
- b) Masih diperlukannya upaya untuk menjaga trotoar dalam kondisi baik. Hingga tahun 2023 capaian totoar dalam kondisi baik baru 66,66%;
- c) Masih diperlukannya upaya untuk meningkatkan akses air minum layak menuju akses air minum aman. Hingga tahun 2023, akses air minum baru dihitung menggunakan akses layak dengan capaian 95,95%.

4) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang perlu diatasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman diantaranya :

- a) Masih adanya RTLH di Kabupaten Temanggung sampai akhir tahun 2023 sebanyak 9.828 unit atau 4,5% dari total 218.519 unit rumah;
- b) Masih diperlukannya upaya untuk meningkatkan akses sanitasi layak menuju akses sanitasi aman. Hingga tahun 2023, sanitasi baru dihitung menggunakan akses layak dengan capaian 94.39%.

5) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan di Kabupaten Temanggung masih terdapat permasalahan yang perlu perhatian di antaranya:

- a) Belum optimalnya penanganan bencana kebakaran dengan capaian tahun 2023 sebesar 60,64%, hal ini disebabkan karena Temanggung memiliki wilayah yang luas dengan topologi pegunungan dan memiliki model permukiman yang berkerumun dengan jalan lingkungan yang sempit sehingga terkadang sulit dalam menjangkau lokasi kebakaran, pengetahuan warga mengenai bahaya kebakaran masih rendah, dan sarana prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran belum sesuai jangkauan wilayah

b) Rendahnya persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yaitu masih sebesar 39% yang disebabkan karena wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontour pegunungan, portal, dan jalan sempit, serta minimnya sarana prasarana untuk pendukung penyelamatan dan evakuasi dan masih terbatasnya sumber air dan belum tersedianya sumber air (groundtank) di masing-masing Pos untuk mempercepat proses pelayanan kebakaran.

6) Bidang Sosial

Pembangunan di bidang sosial untuk mewujudkan peningkatan taraf hidup manusia maupun masyarakat melalui upaya-upaya menuju kesejahteraan. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang menjadi tantangan untuk diperhatikan yaitu:

- a) Masih tingginya angka kemiskinan Kabupaten Temanggung tahun 2023 berdasarkan data dari BPS mencapai angka sebesar 9,26%;
- b) Belum optimalnya persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mana pada tahun 2021 mencapai angka 100%. Namun, pada tahun 2022 angka capaian turun menjadi 64,30% dan di tahun 2023 menjadi 65,29%.

7) Bidang Penanggulangan Bencana

Permasalahan yang dihadapi pada bidang penanggulangan bencana yaitu masih diperlukan peningkatan penanganan bencana untuk mencapai target risiko bencana, cakupan desa tangguh bencana, desa mitigasi terhadap desa rawan bencana.

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Bidang Tenaga Kerja

Pembangunan di bidang tenaga kerja menjadi penting karena perlu adanya perhatian terhadap penduduk usia kerja, ketersediaan lapangan pekerjaan maupun kompetensi tenaga kerja sehingga Kabupaten Temanggung berupaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, meskipun masih terdapat beberapa tantangan dan permasalahan antara lain:

- a) Masih adanya pengangguran yang ditunjukkan dengan angka TPT sebesar 2,32% pada tahun 2023 yang disebabkan adanya pemutusan hubungan kerja serta menurunnya permintaan akan produk kayu olahan yang berdampak pada berkurangnya jumlah pekerja di sektor ini, dimana industri pengolahan kayu menjadi salah satu sektor industri yang penting di Kabupaten Temanggung;
- b) Masih adanya tenaga kerja yang belum memenuhi standar kompetensi

yang dibutuhkan karena terbatasnya skill yang dimiliki;

c) Masih kurangnya peluang kerja formal di Kabupaten temanggung.

2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan pemberdayaan perempuan bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, sedangkan pembangunan perlindungan anak bertujuan untuk memenuhi hak anak dan melindungi anak dari berbagai kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya, dimana pembangunan ini sinergi dari seluruh pihak, Namun demikian, masih ditemukan permasalahan dan tantangan sebagai berikut:

a) Belum optimalnya pemberdayaan terhadap perempuan karena keterbatasan perempuan dalam memahami potensi diri yang ada dan kuatnya budaya patriatri dimana laki laki mempunyai kedudukan lebih tinggi dari perempuan;

b) Masih kurangnya persentase keterwakilan perempuan di Lembaga pemerintahan.

3) Bidang Pangan

Terwujudnya kedaulatan pangan masyarakat melalui ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi, serta keamanan pangan menjadi tujuan dalam pembangunan di bidang pangan, Dalam mewujudkan hal tersebut, masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu:

a) Masih diperlukan upaya-upaya untuk tetap mencukupi ketersediaan pangan di Kabupaten Temanggung karena ada jeda masa panen sehingga perlu penyimpanan hasil panen di Gudang cadangan pangan;

b) Masih rendahnya persentase kelompok tani yang naik kelas, capaian tahun 2023 hanya 40% hal ini disebabkan oleh Sebagian kelompok tani yang tidak aktif;

c) Diversifikasi pangan masih banyak menemui masalah karena masyarakat sudah terbiasa makan makanan yang berasal dari beras sehingga diperlukan pemahaman yang terus menerus kepada masyarakat terkait pentingnya diversifikasi pangan termasuk dibutuhkan sentuhan inovasi teknologi yang mampu menghasilkan bahan pangan lokal tertentu.

4) Bidang Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup menjadi penting untuk mencegah kerusakan lingkungan, di mana dalam pelaksanaan pembangunannya terdapat beberapa permasalahan di antaranya:

- a) Masih tingginya lahan potensial kritis yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung yaitu seluas 10,280 Ha pada tahun 2023 dengan penanganan yang baru mencapai 2,46% dari luas lahan kritis yang ada, hal ini disebabkan tingginya alih fungsi lahan yang tidak semestinya (lahan tanaman keras ditanami tanaman semusim).);
 - b) Adanya fenomena perubahan iklim yang berpotensi memberikan dampak merugikan tidak hanya pada sektor lingkungan tetapi juga sektor lainnya seperti kesehatan, bencana, kebakaran, polusi, penurunan debit mata air, penurunan kualitas dan produktifitas pertanian, dan lain sebagainya;
 - c) Terjadinya penurunan kualitas air sebagai dampak berkembangnya industri;
 - d) Diperlukan evaluasi dalam pengukuran kualitas udara yang lebih akurat melalui pemanfaatan teknologi dan alat ukur yang tepat.
- 5) Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masih ditemukan beberapa permasalahan antara lain:
- a) Belum maksimalnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b) Perlunya peningkatan kepemilikan KIA, hingga tahun 2023 persentasenya sebesar 84,21%;
 - c) Perlunya peningkatan kepemilikan Akte Kelahiran, hingga tahun 2023 persentasenya baru 77,90%.
- 6) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa yang dapat berperan dalam pembangunan daerah, namun demikian masih ada permasalahan yang dihadapi antara lain:
- a) Diperlukan pendampingan dan identifikasi desa potensi swasembada, hal ini mengingat peran penting desa dalam pembangunan suatu daerah. Dalam hal ini sumber daya pengelola yang masih rendah serta potensi desa masih dipandang rendah dan belum mampu menopang hidup sehingga pengembangan unit-unit usaha di desa masih perlu upaya keras agar menarik untuk dikembangkan.
 - b) Belum seluruh desa berpredikat mandiri, Adapun capaian tahun 2023 desa berpredikat mandiri baru sebesar 20,68%.
- 7) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Permasalahan yang masih dihadapi dalam upaya pembangunan bidang

pengendalian penduduk dan keluarga berencana antara lain:

- a) Masih adanya sasaran unmetneed pada tahun 2023 sebesar 8,60% atau 11.059 pasangan dari jumlah total 128.622 pasangan usia subur yang disebabkan karena kurangnya penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya keluarga berencana.
- b) Belum maksimalnya persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2023 yang tercapai sebesar 52,71% atau hanya 68 kampung KB dari 129 desa yang memenuhi IDM. Hal ini disebabkan karena potensi kader dalam mendukung program masih belum maksimal dan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kampung KB.

8) Bidang Perhubungan

Bidang perhubungan juga mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah, namun masih ditemukan beberapa permasalahan sektor perhubungan di antaranya masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan karena terlalu banyaknya lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung. Permasalahan terkait sarana dan prasarana perhubungan yang ada di Kabupaten Temanggung yaitu masih banyak ruas jalan kabupaten yang belum didukung perlengkapan jalan seperti Lampu Penerangan Jalan Umum, rambu lalu lintas, guardrail atau pagar pengaman jalan yang memadai terutama di ruas jalan akses menuju tempat pariwisata. Permasalahan lain yang ditemukan di antaranya masih tingginya tingkat kejadian laka lantasi yang salah satunya potensi disebabkan dengan adanya kendaraan bermotor yang tidak layak jalan. Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas tahun 2023 sebanyak 294 kejadian. Selain itu masih adanya terminal tipe C dalam kondisi kurang baik, Terminal tipe C dengan kondisi kurang baik yaitu terminal Candiroto, namun akan dilaksanakan rehab pada kurun tahun 2020-2023.

9) Bidang Komunikasi dan Informatika

Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika perlu ditingkatkan dalam rangka pembangunan daerah, meskipun demikian, usaha tersebut masih menemui tantangan dan permasalahan di antaranya adalah

- a) Masih diperlukan pengoptimalan pelayanan komunikasi dan informatika untuk masyarakat karena masih ada *blank spot* di wilayah Kabupaten Temanggung;
- b) Masih adanya PPID Badan Publik yang tidak aktif khususnya PPID Pembantu, salah satunya disebabkan karena keterbatasan kompetensi SDM pelaku PPID. Persentase PPID Badan Publik yang tidak aktif pada

tahun 2023 sebesar 23,46%.

10) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pemberdayaan koperasi dan UKM mempunyai peran dalam pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta pendistribusian hasil pembangunan. Akan tetapi, masih terdapat permasalahan beserta tantangan yang dihadapi Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- a) Masih terdapat koperasi tidak sehat yang memerlukan pengawasan;
- b) Terdapat banyak Usaha Kecil dan Menengah muncul namun tidak naik kelas karena standar omset yang meningkat berdasarkan UU Cipta Kerja dan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021;
- c) Masih diperlukan penguatan dalam pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif;
- d) Perlunya peningkatan pemberian dukungan fasilitasi pengembangan usaha bagi usaha mikro.

11) Bidang Penanaman Modal

Beberapa permasalahan dan tantangan yang masih ditemukan pada pembangunan di bidang penanaman modal yaitu masih rendahnya investasi Penanaman Modal Asing (PMA) karena rendahnya minat terhadap lokasi yang ditawarkan.

12) Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Kualitas dan kapasitas kepemudaan memiliki pengaruh yang cukup penting bagi pembangunan serta meningkatkan prestasi keolahragaan, meski demikian beberapa permasalahan yang dihadapi di antaranya adalah masih minimnya prestasi bidang Kepemudaan dan Olahraga karena kurangnya kapasitas SDM, keterbatasan sarpras yang sesuai dengan standar minimal dan pelatih yang berkompeten, tidak terdatanya atlet temanggung yang mengikuti lomba atau event yang diikuti.

13) Bidang Statistik

Permasalahan pembangunan di bidang statistik berkaitan erat dengan cakupan ketersediaan data makro daerah, di antaranya:

- a) Masih adanya dualisme data statistik yang berasal dari kegiatan sektoral yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan data statistik yang sama yang dikelola BPS dari kegiatan statistik dasar;
- b) Perlu peningkatan pengelolaan data statistik sektoral;
- c) Perlu peningkatan validitas data produsen;
- d) Perlunya peningkatan koordinasi dalam pengumpulan data dari produsen data di luar Pemkab Temanggung (karena keterbatasan kewenangan produsen data dalam diseminasi data statistik).

14) Bidang Persandian

Permasalahan pembangunan di bidang persandian, antara lain :

- a) Belum optimalnya kualitas keamanan informasi Pemerintah Daerah yang disebabkan karena untuk melaksanakan pentest terhadap sistem atau aplikasi Pemerintah Daerah masih terdapat keterbatasan kemampuan SDM Persandian dan Keamanan informasi yang dapat mengoperasikan program dan kegiatan;
- b) Belum optimalnya jumlah sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan.

15) Bidang Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan dihadapkan pada permasalahan sebagai berikut:

- a) Perkembangan jumlah pelaku/kelompok seni dan budaya belum berbanding lurus dengan penyelenggaraan event seni dan budaya serta kualitas SDM yang belum merata menyebabkan masih ditemukan kelompok kesenian yang tidak produktif;
- b) Masih belum optimalnya pembinaan sejarah Kabupaten Temanggung karena penggalan dan pendokumentasian sejarah lokal di Kabupaten belum terlaksana dengan baik serta semakin berkurangnya narasumber yang dapat menggali sejarah lokal Temanggung.

16) Bidang Perpustakaan

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam rangka pembangunan di bidang perpustakaan diantaranya:

- a) Masih kurangnya upaya pembudayaan Gemar Membaca di kalangan masyarakat;
- b) Perlu adanya peningkatan upaya pelestarian koleksi nasional dan koleksi naskah kuno di Kabupaten Temanggung.

17) Bidang Kearsipan

Dalam penyelenggaraan kearsipan masih ditemukan permasalahan yaitu diperlukan peningkatan perbaikan dalam pengelolaan arsip untuk meningkatkan indeks manajemen kearsipan.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Bidang Kelautan dan Perikanan

Pembangunan di bidang kelautan dan perikanan masih mempunyai permasalahan yang masih dihadapi yaitu:

- a) Perlu peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum;
- b) Masih perlunya peningkatan swasembada pada ikan konsumsi;
- c) Masih perlunya peningkatan pembinaan nelayan perairan umum.

2) Bidang Pertanian

Pembangunan di bidang pertanian mempunyai peranan penting karena sebagai pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, Permasalahan yang dihadapi pada bidang pertanian:

- a) Penurunan luas panen tanaman pangan disebabkan adanya peralihan komoditas dan peralihan peruntukan lahan;
- b) Penurunan produksi tanaman pangan disebabkan karena penurunan luas panen, perubahan iklim yang ekstrem, serta serangan hama dan penyakit tanaman;
- c) Penurunan produktivitas tanaman pangan yang berbanding lurus dengan berkurangnya jumlah produksi dan luas panen;
- d) Penurunan produktivitas hasil peternakan;
- e) Terbatasnya pengetahuan petani dalam pengendalian OPT mengakibatkan ketidakmampuan dalam pengendalian bencana pertanian.

3) Bidang Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berpotensi untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, sumber pendapatan daerah, pemberdayaan UKM, dan upaya penyediaan lapangan pekerjaan, Namun demikian, masih dihadapkan dengan permasalahan di antaranya:

- a) Kurangnya perencanaan pada saat pembangunan maupun pengembangan destinasi menyebabkan perkembangan objek wisata kurang optimal;
- b) Masih rendahnya ketertarikan dan pemahaman desa untuk membentuk desa wisata yang disebabkan karena kurangnya pembinaan serta pendampingan dimulai dari perencanaan dan pengelolaan destinasi wisata, serta kurangnya peningkatan intensitas pembinaan atau pendampingan desa wisata;
- c) Masih rendahnya sumber daya pelaku wisata dan ekonomi kreatif pendukung wisata serta keterbatasan jumlah SDM dalam melakukan pendataan pelaku ekonomi kreatif (ekraf) dan belum tersedia aturan secara detail yang mengatur tentang pelaku ekraf.

4) Bidang Perdagangan

Permasalahan yang masih dihadapi di bidang perdagangan di antaranya:

- a) Kualitas sarana dan prasarana pasar belum kompetitif untuk bersaing dengan pasar modern karena masih dalam kondisi kurang baik;
- b) Ketertiban pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan masih kurang karena kurangnya kesadaran pedagang untuk menempati zona dagang;

- c) Diperlukan perbaikan pada sarana prasarana pendukung pasar untuk memperlancar informasi dan komunikasi antara pasar dengan Dinas.

5) Bidang Perindustrian

Pembangunan di bidang perindustrian masih dihadapkan oleh beberapa permasalahan dan tantangan antara lain:

- a) Masih terdapat IKM Unggulan Daerah yang belum mendapatkan fasilitasi;
- b) Belum optimalnya pembinaan industri penghasil cukai dikarenakan adanya penyesuaian terhadap landasan hukum terkait anggaran DBHCHT.

4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1) Fungsi Sekretariat Daerah

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada fungsi sekretariat daerah antara lain:

- a) Masih terdapat Peraturan Daerah yang belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati;
- b) Dokumentasi perundangan melalui JDIIH belum berjalan dengan efektif;
- c) Masih diperlukan peningkatan upaya implementasi Reformasi Birokrasi;
- d) Diperlukan peningkatkan kualitas pelayanan publik oleh masing-masing perangkat daerah;
- e) Diperlukan perbaikan dan peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- f) Masih terdapat pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang terhambat sehingga tidak selesai tepat waktu;
- g) Masih terdapat BUMD yang belum mendapatkan opini WTP atas pemeriksaan KAP;
- h) Diperlukan pengoptimalan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan mempersiapkan secara baik perencanaan yang dari OPD serta kebijakan dari masing masing kepala OPD dalam pelaksanaan kegiatan;
- i) Diperlukan pengoptimalan dalam penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan;
- j) Perlunya peningkatan pencatatan non-tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

2) Fungsi Sekretariat DPRD

Beberapa permasalahan yang ada pada fungsi Sekretariat DPRD antara lain:

- a) Pengesahan Raperda yang tepat waktu cenderung menurun karena membutuhkan waktu penyusunan yang lebih lama termasuk proses pembahasan dan harmonisasi;
- b) Masih rendahnya jumlah Perda Inisiatif dibandingkan dengan Raperda yang diusulkan oleh eksekutif;
- c) Diperlukan pengoptimalan pelaksanaan kegiatan aspirasi sesuai dengan yang direncanakan.

5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan yang baik akan mampu menjamin terlaksananya pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, Dalam proses pelaksanaan perencanaan pembangunan masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu:

- a) Perlunya peningkatan keoptimalan persentase ketercapaian kinerja pembangunan daerah;
- b) Perlunya peningkatan konsistensi kegiatan rencana pembangunan;
- c) Perlunya peningkatan kualitas pengendalian monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan.

2) Keuangan

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi antara lain:

- a) Perlu peningkatan indeks pengelolaan keuangan daerah (IKPD);
- b) Perlunya peningkatan pemahaman SDM dalam pemanfaatan aset daerah;
- c) Perlu peningkatan anggaran dan kapasitas SDM untuk pendataan baru dan intensifikasi pendataan objek pajak daerah.

3) Kepegawaian

Permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dalam pembangunan di bidang kepegawaian antara lain:

- a) Perlu penerapan sistem merit secara optimal dalam pengelolaan kepegawaian di Kabupaten Temanggung;
- b) Perlunya peningkatan keterwakilan jumlah perempuan dalam JPT, JA, dan JP dalam rangka pengarusutamaan gender;
- c) Perlunya optimalisasi pelaksanaan updating data kepegawaian.

4) Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan yang ditemukan pada bidang pendidikan dan pelatihan yaitu masih rendahnya capaian peningkatan kompetensi pengembangan ASN yang diukur melalui kinerja persentase kompetensi diklat kepemimpinan dimana jumlah pejabat yang telah lulus diklat

kepemimpinan.

5) Penelitian dan Pengembangan.

Pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan dihadapkan dengan permasalahan belum adanya sumber daya manusia khususnya fungsional peneliti bidang penelitian dan pengembangan.

6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1) Fungsi Inspektorat Daerah

Penerapan sistem pengawasan masih dihadapkan permasalahan antara lain:

- a) Diperlukan upaya peningkatan indeks persepsi anti korupsi;
- b) Perlu peningkatan optimalisasi maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c) Perlu peningkatan pengawasan baik perencanaan, keuangan maupun penyelenggaraan kinerja.

7. Unsur Kewilayahan

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan terkait unsur kewilayahan (Kecamatan), antara lain :

- a) Masih terdapat sarana dan prasarana lokal kelurahan di kecamatan dalam kondisi kurang baik;
- b) Perlu pengoptimalan kualitas layanan publik di kecamatan;
- c) Perlunya upaya untuk mendorong masyarakat melakukan pembayaran PBB tepat waktu.

8. Kesatuan Bangsa dan Politik

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi terkait Kesatuan Bangsa dan Politik di antaranya diperlukan peningkatan cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

2.3.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah sebuah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang sangat signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat sangat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa depan. Sumber perumusan isu strategis Kabupaten Temanggung tahun 2025 disusun berdasarkan:

- 1) Permasalahan pembangunan dalam RPD
- 2) Permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKPD

- 3) Arah kebijakan RPD, dan
- 4) Arah kebijakan RKP

Adapun isu-isu strategis yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Penurunan Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations, 1996).

Capaian angka kemiskinan kabupaten temanggung tahun 2023 sebesar 9,26 dengan jumlah penduduk miskin 73,040 jiwa, Indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1,77, kemiskinan ekstrim 0,96 dengan 7,510 jiwa dan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,19.

Adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dengan menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada 2024 diperlukan upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem yang harus dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi, serta upaya validasi data dan mempertajam basis data untuk mencapai ketepatan target dan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

2. Penurunan Stunting

Penanganan permasalahan gizi yang menjadi prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu menurunkan angka prevalensi stunting pada balita menjadi 14 persen dan angka *prevalensi wasting* pada balita menjadi 7 persen sampai dengan tahun 2024. Angka stunting di Kabupaten Temanggung turun dari 28 menjadi 11,59. Stunting dapat disebabkan karena banyak faktor, di antaranya adalah kesehatan ibu yang kurang bagus serta pemenuhan gizi yang baik dan cukup bagi anak. Oleh karena itu penanganan stunting memerlukan keterlibatan dan kontribusi semua stakeholder khususnya dalam pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitive. Di sisi lain, pemenuhan hak anak seutuhnya untuk bisa tumbuh dan berkembang secara optimal sehingga menjadi generasi penerus yang berkualitas dan berdaya saing menjadi tantangan pembangunan yang harus diperhatikan.

3. Kualitas pembangunan manusia

Kualitas pembangunan manusia dapat diukur dari capaian Indeks Pembangunan Manusia yang dilihat dari tiga dimensi yaitu Pendidikan,

kesehatan dan ekonomi, Dimensi pendidikan ditunjukkan dengan angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, Data Tahun 2023. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Temanggung menunjukkan capaian pada angka 7,50 tahun dan belum mencapai target Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 12 Tahun. Oleh karena itu, mewujudkan kesempatan belajar yang merata bagi seluruh anak usia sekolah perlu menjadi perhatian semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat terutama dalam hal penanganan anak usia sekolah tidak sekolah, peningkatan angka partisipasi anak sekolah pada setiap jenjang pendidikan. Manusia yang berkualitas, tidak hanya dilihat dari pendidikan tetapi juga derajat kesehatannya. Oleh karena itu mewujudkan kesehatan masyarakat yang baik perlu terus menjadi perhatian seluruh pihak terutama kesehatan ibu, bayi dan anak.

Pembangunan manusia yang berkualitas harus sejalan dengan perwujudan manusia yang berdaya saing. Sumber daya manusia yang berdaya saing dapat ditinjau dari sisi ketenagakerjaan yang ditunjukkan dengan tidak adanya gap ketersediaan tenaga kerja (*demand*) dengan lapangan kerja (*supply*). Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 menunjukkan capaian yang cukup baik dengan angka 2,32% untuk tingkat pengangguran terbuka. Meski demikian, capaian tersebut menunjukkan masih ada sebagian angkatan kerja yang belum terserap dalam lapangan kerja. Di sisi lain, terjadinya bonus demografi menjadi tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama untuk menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing sehingga mampu memberikan kontribusi dan manfaat bagi kemajuan pembangunan daerah.

4. Percepatan Pemulihan Ekonomi

Momentum pemulihan ekonomi tahun 2022 seiring dengan perkembangan perekonomian yang semakin membaik, menjadi landasan untuk mendorong akselerasi ekonomi guna mengembalikan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih baik. Meski perekonomian Kabupaten Temanggung belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19, namun seiring dengan sistem kesehatan yang semakin membaik untuk penanganan pandemi Covid-19 serta vaksinasi yang semakin merata, percepatan pemulihan ekonomi menjadi perhatian pemerintah daerah untuk pembangunan pasca pandemi Covid-19. Sejumlah tantangan ke depan akan dihadapi dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi Kabupaten Temanggung, seperti rendahnya investasi, tingginya inflasi dan kurangnya pemakaian produk dalam negeri serta keterbatasan dalam penyediaan sarana prasarana kewilayahan diperkirakan akan mempengaruhi pertumbuhan

ekonomi.

5. Tata Kelola pemerintahan yang baik

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Langkah awal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM aparatur.

Menghadapi tantangan revolusi industri 4,0 pemerintah daerah harus mampu memenuhi tuntutan masyarakat yaitu digitalisasi pelayanan publik di semua sektor, baik di tingkat kabupaten, kecamatan serta desa/kelurahan. Digitalisasi pelayanan publik diimplementasikan dengan mengusung sistem kerja berbasis *information, communication, dan technology* (ICT) untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, transparan, akuntabel, tanpa batas waktu dan *excellent*. Sebagai kelembagaan di era modern, maka efisiensi dan efektivitas kerja dengan memangkas biaya dan waktu; meminimalisasi terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel; dan meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Menghadapi tantangan era disrupsi, maka pemerintah daerah harus mampu melakukan pelayanan berbasis digital namun tidak meninggalkan sisi kemanusiaan terutama pelayanan yang bersifat langsung berinteraksi dengan masyarakat. Tuntutan masyarakat di era ini adalah adanya pemerintah yang lebih dekat, hadir dan bisa mencukupi kebutuhan masyarakatnya sehingga terwujud kepuasan masyarakat.

Kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi di Pemerintah Kabupaten Temanggung masih perlu ditingkatkan lagi. Hal ini antara lain karena keterbatasan kualitas SDM aparatur sehingga mempengaruhi kualitas kinerja pemerintahan. Perkembangan teknologi belum sepenuhnya diimplementasikan di Pemerintah Kabupaten Temanggung antara lain digitalisasi administrasi kependudukan mulai dari tingkat desa sampai dengan kabupaten.

2.4 INOVASI DAERAH

Inovasi Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan

efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan berorientasi untuk kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya serta tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Inovasi dalam pelaksanaannya melalui beberapa tahapan yang dimulai dari pengusulan, penetapan, uji coba, sampai pada penerapan inovasi terkait. Selanjutnya, terhadap penerapan inovasi dilakukan penilaian dan pemberian penghargaan oleh Menteri kepada Pemerintah Daerah atau oleh Pemerintah Daerah kepada individu dan Perangkat Daerah yang inovasinya berhasil diterapkan. Inisiatif inovasi dapat berasal dari Kepala Daerah, DPRD, ASN, Perangkat Daerah maupun masyarakat.

Pemerintahan pada era saat ini memberikan harapan besar terhadap upaya peningkatan kemandirian daerah yang berimplikasi pada pelaksanaan pelayanan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Agar Pemerintah Daerah dapat mandiri dan mensejahterakan masyarakatnya, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimilikinya, serta mampu melakukan percepatan dalam rangka mendorong peningkatan pelaksanaan kebijakan di seluruh aspek, melalui kebijakan-kebijakan yang kreatif dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan serta kearifan lokal di daerahnya masing-masing.

Diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah melalui inovasi, mempunyai pengaruh sangat besar terhadap perkembangan inovasi di Kabupaten Temanggung dalam mendukung program-program pemerintah maupun mencari solusi pemecahan masalah yang dihadapi di masyarakat, Untuk mendukung terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah, diterbitkanlah Peraturan Bupati Temanggung Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Inovasi Daerah.

Pemerintah Kabupaten Temanggung setiap tahunnya memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah dan masyarakat yang mempunyai inovasi-inovasi terbaiknya melalui ajang lomba Kreativitas dan Inovasi (Krenova). Selanjutnya para pemenang lomba krenova tingkat Kabupaten akan mengikuti lomba Krenova tingkat Provinsi dan mendapatkan uang pembinaan serta fasilitasi HAKI (Hak Kekayaan Intelektual berupa paten, hak cipta).

Melalui kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah

Kabupaten Temanggung berhasil menghimpun dan melakukan Inovasi Daerah secara berkesinambungan dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kemandirian, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah sehingga memperoleh penghargaan sebagai Kabupaten Sangat Inovatif, dengan nilai Indeks Inovasi daerah 80,87

Penerapan inovasi dari masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung dicantumkan di dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dan disampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Program dan Kegiatan. Kreativitas dan inovasi (krenova) yang tercatat dalam dokumen RKPD sampai dengan bulan Maret 2024, berjumlah 826 krenova yang terdiri dari 228 krenova yang berasal dari masyarakat, 576 krenova yang berasal dari Perangkat Daerah, dan 22 krenova berasal dari penjangkaran masyarakat.

Tabel 2.274
Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2024

No	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
1	MUSRENBANG KITA BEDA RKPD Tahun 2019	Pemerataan Pembangunan Wilayah Kompetisi Perencanaan Pembangunan dalam Musrenbang lebih Hidup, karena didukung dengan anggaran Tematik Mengurangi permasalahan kemiskinan, Pengangguran, kesehatan dll, dapat diatasi secara bersama-sama (linsek)	Adaya Semangat Baru dalam kompetisi Perencanaan Pembangunan Adanya Inovasi Perencanaan Pembangunan Tematik Kecamatan, Penyelesaian permasalahan Kemiskinan, Pengangguran dan Pembangunan bisa merata di 20 Kecamatan	Inventor : BAPPEDA DPRD, BUPATI, Semua Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan, Lembaga Desa, Masyarakat Ormas, Komunitas, Akademisi, Media Sosial
2	IKAT RAJUT (Inovasi Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Berkelanjutan) RKPD Tahun 2020	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam ikut berpartisipasi penanggulangan kemiskinan Semua Elemen masyarakat, pemerintah dan Stakeholder dapat bekerja bersama dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pembangunan di Kabupaten Temanggung	Penurunan Kemiskinan dapat teratasi lebih cepat Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Temanggung dapat berjalan sesuai dengan harapan	Inventor : BAPPEDA, DPRD, BUPATI, Semua Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan, Lembaga Desa, Masyarakat Ormas, Komunitas, Akademisi, Media Sosial
3	MUSTIKA DESA (Masyarakat Unggul Sejahtera dengan Tani Pekarangan, Konservasi dan Desa Bebas Sampah) RKPD Tahun 2021	Tumbuhnya Petani Pekarang di Semua Desa dan Kecamatan di Kabupaten Temanggung Terjadinya gerakan pelestarian lingkungan dengan penghijauan Sabuk Gunung Adanya Gerakan Masyarakat Pengelolaan Sampah Didesa dan Kecamatan	Peningkatan Ekonomi masyarakat Tumbuhnya UMKM Penurunan lahan Kritis dan penurunan Lahan Longsor Lingkungan Desa sampai Kota terbentuk pengelola Sampah Terjadinya Penurunan kemiskinan	Inventor : BAPPEDA DPRD, BUPATI, Semua Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan, Lembaga Desa, Masyarakat Ormas, Komunitas, Akademisi, Media Sosial, TJSPL/CSR
4	KABAR PENTING DESAKU (Kerja Bareng Penanggulangan Stunting, Desa Bebas Sampah dan Konservasi Lingkungan Hidup) RKPD Tahun 2022	Penanganan stunting dapat dilaksanakan secara bersama-sama Terjadinya Peningkatan gerakan pelestarian lingkungan dengan penghijauan Sabuk Gunung Adanya Gerakan Masyarakat Pengelolaan Sampah Didesa dan Kecamatan	Terjadi Penurunan angka Stunting Penurunan lahan Kritis dan penurunan Lahan Longsor Lingkungan Desa sampai Kota terbentuk pengelola Sampah Terjadinya Penurunan kemiskinan	Inventor : BAPPEDA, DPRD, BUPATI, Semua Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan, Lembaga Desa, Masyarakat Ormas, Komunitas, Akademisi, Media Sosial, TJSPL/CSR
5	GERBANG EMAS (Gerakan Pembangunan untuk Peningkatan Kesehatan ,	Peningkatan kesejahteraan masyarakat Terbukanya lapangan kerja baru Tertanganinya Lahan Kritis	Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pelestarian lingkungan Peningkatan kesehatan masyarakat	Inventor : BAPPEDA,

No	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat) RKPD Tahun 2023	Peningkatan Pelayanan Kesehatan		DPRD, BUPATI, Semua Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan, Lembaga Desa, Masyarakat Ormas, Komunitas, Akademisi, Media Sosial, TJSPL/CSR
6	BUMI MOETIARA RKPD Tahun 2024	Meningkatkan pengunjung Pasar Pasar lebih tertib dan bersih Meningkatkan penjualan produk UMKM	Peningkatan PAD Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pengurangan Pengangguran	DINKOPDAG, DKPPP, DINBUDPAR, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKES, BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani dan Komunitas lainnya,

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Tabel 2.275
KRENOVA dan Penjaringan Inovasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung 2023

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
1,	SUMBING SINDORO INNOVATIVE (SUSI) AWARD KABUPATEN TEMANGGUNG	Upaya meningkatkan Inovasi Daerah untuk mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Temanggung, Memacu dan memotivasi Perangkat Daerah untuk meningkatkan inovasi dan kreatifitas dalam pelayanan masyarakat; Mendorong masyarakat untuk selalu berinovasi dalam usaha dan produksi dalam meningkatkan perekonomiannya,	Meningkatkan Antusias Perangkat Daerah, ASN dan Masyarakat dalam melaksanakan inovasi	Inventor : BAPPEDA, DPRD, BUPATI, Semua Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan, Lembaga Desa, Masyarakat Ormas, Komunitas, Akademisi, Media Sosial, TJSPL/CSR
2,	BUMI MOETIARA	Meningkatkan pengunjung Pasar Pasar lebih tertib dan bersih Meningkatkan penjualan produk UMKM	Peningkatan PAD Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pengurangan Pengangguran	DINKOPDAG, DKPPP, DINBUDPAR, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKES, BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
				Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani dan Komunitas lainnya,
3,	KUDA KEPANG EMAS (Kearifan Unggulan Daerah Sebagai Kekuatan Pembangunan Ekonomi Masyarakat)	Ragam unggulan daerah semakin dikenal Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat Produktifitas unggulan daerah semakin memasyarakat Terbukanya lapangan kerja baru	Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Penurunan pengangguran Meningkatkan daya saing daerah	DINKOPDAG, DKPPP, DINBUDPAR, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKES, BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani dan Komunitas lainnya,
4,	WAYANG KEDU	Melestarikan Budaya Wayang Asli Daerah Meningkatkan Rasa Cinta masyarakat terhadap kesenian wayang kedu Wayang Kedu semakin dikenal	Diakunya Wayang Kedu sebagai warisan budaya tak benda dari Kabupaten Temanggung Meningkatkan percaya diri bagi pelaku kesenian wayang kedu	DINBUDPAR, BAPPEDA, DINPERMADES, Kecamatan, Pemdes, Komunitas Seni
5,	SIJADINTERTIB (Aplikasi Perjalanan Dinas Tertib)	Meningkatkan tertib administrasi Mempermudah bagi anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam SPJ Meningkatkan kepercayaan publik	DPRD, SEKWAN, DPPKAD, BAPPEDA
6,	POKIRMESRA (Pokok-Pokok Pikiran DPRD Mewujudkan Aspirasi Masyarakat)	Mempermudah dalam mewujudkan Aspirasi Masyarakat Pelayanan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD lebih efektif dan efisien	Pemantauan Aspirasi Masyarakat terhadap Pokok-pokok Pikiran DPRD lebih mudah dipantau Meningkatkan kepercayaan masyarakat	DPRD, BAPPEDA, DPPKAD, ORMAS, Komunitas, Masyarakat
7,	PEMURNIAN JARAN KEPANG	Melestarikan jaran kepeng asli Temanggung Jaran kepeng Temanggung menjadi salah satu media pariwisata yang juga bisa menghasilkan manfaat ekonomis, Mempermudah dalam melakukan pembinaan terhadap para pelaku budaya terutama jaran kepeng,	Jaran kepeng khas Temanggung menjadi budaya yang semakin dicintai masyarakat Jaran Kepang Temanggung menjadi edukasi pembelajaran mata pelajaran kearifan lokal di SD dan SMP Se Kabupaten Temanggung	DINBUDPAR, BAPPEDA, DINDIKPORA, DINPERMADES, Komunitas Seni

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
8	GENDHIS EMAS (Gerakan Desa Harapan Berinisiatif untuk Masyarakat Sejahtera)	Membantu pemetaan potensi lokal untuk menentukan arah dan model pengembangan yang tepat Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	meningkatkan perekonomian di wilayah adanya kebijakan yang bisa diterapkan dan dikembangkan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Pemerataan Pembangunan wilayah	DPRD, Bupati, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Komunitas, TJSLP
9	OPTIMALISASI PENERAPAN BUDAYA KERJA 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat Dan Rajin) Dengan Media Promosi Vipol (Vidio, Poster Dan Leaflet) Pada Petugas Kesehatan Di Ruang Tulip RSUD Kabupaten Temanggung	Memudahkan staff ruang untuk melakukan sosialisasi tentang budaya kerja 5R, Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, Terwujudnya Rumah Sakit yang terpercaya sebagai pusat Layanan dan Pendidikan	Budaya kerja lebih efektif, efisien, dan aman Kurangnya risiko penularan infeksi antar petugas Kesehatan, pasien, dan pengunjung Meningkatnya nilai kepuasan masyarakat terhadap mutu pelayanan publik di bidang kesehatan,	Dinkes, RSUD, Tenaga Kesehatan, Masyarakat secara umum
10	Optimalisasi Layanan Penerbitan Identitas Penduduk Secara Online Dengan Google Form Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung	Bermanfaat sebagai backup data apabila fisik dokumen BAST tercecer atau hilang, Memudahkan petugas dalam menerima rekam data permohonan E-KTP dari operator SIAK di kecamatan, Memberikan alternatif pelayanan selain dengan pelayanan secara konvensional,	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas, Memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan online penerbitan identitas penduduk, Tingkat kepuasan masyarakat naik terhadap pelayanan penerbitan identitas penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah terluar mudah mendapat akses layanan	Dukcapil, Kecamatan, Desa, Masyarakat secara umum, Ahli IT, Media Massa & Wartawan
11	Optimalisasi Budaya Discharge Planning Dengan Menggunakan Video Project Di Ruang Wijaya Kusuma I RSUD Kabupaten Temanggung	Sebagai pengingat dalam bekerja sehari-hari dalam memberikan layanan kesehatan kepada pasien, Menjamin ketersediaan dan mutu sumber daya kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan Profesionalisme	Pencapaian fungsi Kesehatan pasien maksimal Pemahaman pasien dan keluarga tentang masalah kesehatan dan kemungkinan adanya komplikasi dari penyakitnya dan hal-hal yang perlu pembatasan yang akan diberlakukan pada pasien di rumah,	Dinkes, Puskesmas, Tenaga Kesehatan, Klinik Umum, Rumah Sakit, Media Masa, Ahli IT, Masyarakat secara umum,

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
		Meningkatkan pemahaman serta pengetahuan tentang optimalisasi budaya Discharge Planning sesuai Panduan dan SPO yang ada di RSUD Kabupaten Temanggung, Meningkatkan pengetahuan keluarga dan pasien di rumah setelah perawatan di Rumah Sakit,	Kemampuan pasien dan keluarga untuk merawat dan memenuhi kebutuhan pasien dan memberikan lingkungan yang aman untuk pasien di rumah,	
12	Optimalisasi Pelayanan Perpustakaan Menggunakan Aplikasi Slims 9 Bulan Di SMP NEGERI 3 Bulu Kabupaten Temanggung	Perpustakaan SMPN 3 Bulu bisa secara optimal memanfaatkan teknologi dan menggunakan platform sosial media sebagai sarana promosi perpustakaan, Memudahkan pelayanan keperpustakaan dan lebih efektif dari sebelumnya	Kemudahan pelayanan peminjaman dan pengembalian bahan Pustaka kepada pemustaka, Kinerja dan produktifitas pegawai lebih maksimal,	Dindikpora, Dinpusip, Lembaga Pendidikan, Pustakawan / Pemustaka, Pelajar
13	Peningkatan Pengolahan Dan Analisis Data Surveilans Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) Melalui Mapping Dan Trend Penyakit Untuk Meningkatkan Kewaspadaan Dini Klb Bagi Pemangku Kepentingan Di Wilayah Kerja Puskesmas Bansari Kabupaten Temanggung	Menjadi acuan untuk bidan desa dalam pelaporan pelaporan dan pengumpulan data penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB), SDM pelayanan kesehatan yang inovatif, Puskesmas yang dapat diandalkan oleh Masyarakat	Sistem kewaspadaan dini optimal sehingga jika terjadi kejadian luar biasa penanganan dapat lebih baik, Memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan kesehatan di wilayah kerja, Memper memudahkan perencanaan program pemberantasan penyakit potensial KLB di Puskesmas Bansari dan kabupaten Temanggung,	Dinkes, Puskesmas, Kecamatan, Dinpermades, Desa, TP-PKK, Tenaga Kesehatan, Masyarakat
14	Optimalisasi Pengarsipan Data Surat Tanda Registrasi (STR) Dan Surat Ijin Praktik (Sip) Menggunakan Media Digital Di Puskesmas Tretap Kabupaten Temanggung	Arsip surat tertata rapi dan tidak mudah hilang, Pemamfaatan IT lebih maksimal Memberikan informasi persyaratan pengurusan STR dan SIP	Klaim pembayaran BPJS Kesehatan untuk pasien dirawat bisa dicairkan, Kelengkapan dokumen administrasi tenaga kesehatan sangat dibutuhkan sehingga memudahkan pengurusan kredensialing, Efisien dan keefektifan mengurus STR dan SIP, sehingga tenaga kesehatan dimudahkan	Dinkes, Puskesmas, BPJS, BKPSDM, Fasyankes & Tenaga Kesehatan

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
15	Optimalisasi Pencegahan Resiko Jatuh Dengan Sop Wader (Sosialisasi, Pembuatan Media Reminder, Dan Pembuatah Wadah/ Tempat Peletakan Segitiga Pengaman Dan Label Resiko Jatuh) Di Igd Rsud Kabupaten Temanggung	Bermanfaat untuk perawat, sehingga perawat dapat melakukan pengkajian dan intervensi yang benar, Meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan dan meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia Melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan optimal, berkomitmen selalu meningkatkan kemampuan sesuai dengan profesi,	Pemahaman tentang antisipasi jatuh pada pasien resiko jatuh tinggi berkurang, Berkurang kejadian jatuh akibat informasi antisipasi bagi tenaga kesehatan dan keluarga pasien dengan pemasangan segitiga pengaman dan label resiko jatuh,	Dinkes, RSUD & RSU, Tenaga Medis, Masyarakat umum
16	Optimalisasi Pembelajaran Matematika Dengan Model Guided Discovery Learning Pada Program Paket B Kelas Vii Di SKB Temanggung	Rencana pembelajaran dapat tersusun lebih sistematis sesuai alur pikir dalam menemukan konsep matematika, sehingga akan dapat melatih proses berpikir siswa Menjadi referensi dalam perencanaan pembelajaran matematika yang bisa membuat siswa menjadi lebih aktif, Meningkatkan kualitas dan relevansi layanan guna tercapainya tujuan Program PAUD dan Dikmas	Pemahaman siswa terhadap materi menjadi lebih optimal, Menaikan semangat belajar siswa dengan hasil ujian yang baik, Hasil AKM yang baik berpengaruh pada akreditasi sekolah (SKB Temanggung)	SKB, Dindikpora, Tenaga Pendidik, Pelajar
17	Optimalisasi Akses Dan Pembaruan Data Berbasis Google Drive Di Upt Laboratorium Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	Tersedianya kumpulan data dan dokumen laboratorium sebagai bahan bank data memudahkan bidang lain di DPRKPLH Kabupaten Temanggung dalam memperoleh data dan dokumen laboratorium lingkungan, Memperkuat capaian nilai DPRKPLH Kabupaten Temanggung yaitu Berdayaguna dengan berkomitmen tinggi dan memiliki kemampuan dalam pelaksanaan tugas	Data dan dokumen yang terinventarisasi dengan baik memudahkan ketika pencarian data dibutuhkan, Data tersimpan lebih lama dan aman Mempermudah pelayanan laborat	DPRPKLH, Dinsos, DPUPR, Dinpermades, Labaorat, Penggiat Lingkungan
18	Implementasi Petik Gitar (Pemantau Jentik Tanggi Sekitar) Dengan Sistem G1r1j (Gerakan 1	Memudahkan untuk memetakan penyebaran jentik nyamuk para surveilans	Kasus DBD menurun Kualitas lingkungan yang sehat	Dinkes, Puskesmas, DPRKPLH, Dinpermades, Kecamatan, Desa,

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
	Rumah 1 Jumantik) Untuk Mencegah Penyakit Dbd Di Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung	Menciptakan natural leader di masyarakat Dan meningkatkan sadar masyarakat akan PSN, Pelaporan yang jelas dan akurat sesuai dengan kriteria PSN	SDM yang sadar Kesehatan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	PKK, Karang Taruna, Komunitas Terkait, Masyarakat
19	Optimalisasi Layanan Pemustaka Perpustakaan Dengan Albakarma (Labeling Barcode Warna, E-Book, Dan Promosi Layanan) Di SMP Negeri 3 Temanggung Kabupaten Temanggung	Kegiatan pengolahan bahan pustaka menggunakan 53 SLIMS 8 ini dapat memudahkan pemustaka di SMPN 3 Temanggung dalam mencari/mengakses/temu kembali informasi/bahan pustakan yang mereka butuhkan, Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan public yang berkualitas	Kemudahan bagi pemustaka maupun pengunjung dalam melakukan pencarian buku yang diinginkan atau dibutuhkan, Anggota perpustakaan sama-sama merasa bertanggung jawab terhadap kelangsungan layanan perpustakaan, Perpustakaan lebih optimal dalam mendukung pembelajaran,	Dindikpora, Dinpusip, Lembaga Pendidikan, Pustakawan, Pelajar
20	Implementasi Aplikasi Senayan Library Management System Untuk Pengolahan Bahan Pustaka Di Perpustakaan SMP N 2 Wonobojo Satu Atap Kabupaten Temanggung	SOP perpustakaan tentang pengolahan bahan pustaka bermanfaat bagi pengelola perpustakaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pustakawan pelayanan teknis, Pelayanan keperpustakaan menjadi lebih efisien	Layanan yang cepat dan akurat kepada pemusta, Keamanan bahan pustaka yang dimiliki lebih terjamin	Dindikpora, Dinpusip, Lembaga Pendidikan, Pustakawan, Pelajar
21	Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Siswas-P3dn Melalui Media Belajar E-Book Dan Media Digital Sebagai Wadah Pengumpulan Dokumen Pada Inspektorat Kabupaten Temanggung	Auditor dapat menentukan konten yang akan digunakan dalam membuat e-book, Instansi memiliki perencanaan yang baik dalam pembuatan e-book penggunaan Aplikasi SISWAS-P3DN, BPKP sebagai pembuat aplikasi dan pengguna sistem informasi mendapatkan hasil yang sesuai,	Pelaksanaan reuiu P3DN menjadi lebih optimal, Lebih sedikit koreksi atas data yang diinput dalam aplikasi SISWAS-P3DN sehingga pelaksanaan lebih tepat waktu sesuai yang telah ditentukan, Pemerintah Kabupaten Temanggung terhindar dari sanksi	Inspektorat, Bappeda, BPKPAD, Pemda Temanggung,
22	Peningkatan Pelayanan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah	Sebagai bahan referensi bersama dalam menentukan langkah atau menjawab	Pengurusan SPP-IRT oleh pelaku usaha lebih mudah dimengerti sehingga pemenuhan	DPMPSTS, Dinkopdag, Dinpermades, PKK, Kelompok

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
	Tangga Melalui Rumah Digital Di Kabupaten Temanggung	<p>pertanyaan dari para Pelaku Usaha terkait SPP-IRT,</p> <p>Mengumpulkan data dari sumber terpercaya sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam pembuatan media,</p> <p>Memperoleh solusi yang dibutuhkan pada masa kini maupun masa yang akan datang terkait layanan SPP-IRT,</p>	<p>komitmen sesuai system OSS-RBA dapat lebih optimal,</p> <p>Peningkatan jumlah produk lokal Temanggung berizin SPP-IRT dan keamanan pangan yang baik sebelum diedarkan ke masyarakat,</p>	Usaha, Penggiat UMKM, Masyarakat Secara Umum
23	Optimalisasi Temu Kembali Informasi Menggunakan Sistem Otomasi Slims Di Perpustakaan SMP Negeri 3 Kedu Kabupaten Temanggung	<p>Mengetahui prosedur pengolahan buku hingga siap untuk dilayankan di Perpustakaan SMP Negeri 3 Kedu,</p> <p>Menjadi pelengkap kelengkapan sekolah sehingga dapat menunjang dalam hal penilaian sekolah,</p>	<p>layanan perpustakaan dapat berjalan dengan efisien dan optimal,</p> <p>pemanfaatan koleksi yang dimiliki perpustakaan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin</p> <p>Peningkatan angka kunjungan perpustakaan</p>	Dindikpora, Dinpusip, Pustakawan, Guru, Pelajar
24	Optimalisasi Pengelolaan Perpustakaan Menggunakan "Senayan Library Management System" Versi 8 Di SMP Negeri 1 Parakan Kabupaten Temanggung	<p>mempermudah rekan petugas perpustakaan untuk melakukan pengolahan bahan pustaka,</p> <p>sekolah mampu memenuhi standar pengelolaan sesuai standar nasional pendidikan,</p>	<p>Absensi pengunjung, peminjaman buku, dan pengembalian buku dilayani lebih efektif</p> <p>proses temu kembali buku di perpustakaan lebih mudah</p>	Dindikpora, Dinpusip, Pustakawan, Guru, Pelajar
25	Optimalisasi Digitalisasi Pemetaan Vaksinasi Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) Dengan Aplikasi Arc Gis Di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung	<p>Medik Veteriner dapat mengetahui data capaian vaksinasi PMK, sehingga dapat digunakan untuk menentukan langkah evaluasi terhadap kegiatan vaksinasi,</p> <p>Petugas vaksinasi menjadi paham persentase vaksinasi yang telah tercapai, sehingga dapat disusun rencana kerja selanjutnya pada pelaksanaan vaksinasi,</p> <p>Setelah diketahui data capaian vaksinasi, maka instansi dapat merencanakan program selanjutnya yang berkaitan dengan monitoring vaksinasi,</p>	<p>Status vaksinasi tiap dusun menjadi mudah untuk di monitoring,</p> <p>kesehatan ternak baik sehingga berefek pada kenaikan ekonomi peternak,</p>	DKPPP, Puskesmas, Peternak, Dinkopdag, Dokter Hewan, Masyarakat Secara umum

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
26	Optimalisasi Pembelajaran PPKN Dengan Problem Based Learning Pada Program Pendidikan Kesetaraan Paket B SPNF SKB Temanggung	Materi pembelajaran yang berhubungan langsung dengan peserta didik, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan dapat lebih mudah diterima dan dipahami oleh peserta didik, bermanfaat sebagai bahan referensi dalam penyusunan rencana pembelajaran yang lebih efektif dan efisien,	Peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya pelajar sesuai amanat Undang-Undang tidak dapat terlaksana, Sanggar kegiatan belajar memiliki peserta didik bersemangat, dan kegiatan pembelajaran berlangsung optimal, Program pendidikan kesetaraan dapat berfungsi sebagai Pendidikan alternatif dan pelengkap pendidikan formal,	SKB, Dindikpora, Dinsos, Kesbangpol, Guru, Pelajar
27	Optimalisasi Informasi Pengolahan Limbah Kotoran Ternak Menjadi Pupuk Organik Vermikompos Pada Desa Binaan Di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Selompampang, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung	Bermanfaat pada kegiatan penyuluhan khususnya untuk menilai tercapai atau tidaknya tujuan penyuluhan Petani mendapatkan perhatian dari Penyuluh dengan memperhatikan kegiatan penunjang demi meningkatkan pengetahuan petani Instansi mendapatkan referensi pretest dan posttest untuk dapat diterapkan pada kegiatan lain yang sejalan dengan kegiatan pembuatan pupuk organik vermikompos	Petani menerima informasi terbaru mengenai dunia pertanian Petani bekerja dengan cara yang baru yang lebih efisien dan ramah lingkungan, Pada lingkungan, tanah / lahan pertanian akan meningkat kesuburannya,	DKPPP, Dinkopdag, Dinpermades, Kelompok Tani, Bumdes, Kecamatan, Desa, Masyarakat penggiat pertanian, Sosmed, SMK Pertanian
28	Optimalisasi Pengolahan Dan Analisis Data Penyakit Yang Berpotensi Menyebabkan Kejadian Luar Biasa (KLB) Sebagai Kajian Kewaspadaan Dini Di Puskesmas Kledung Kabupaten Temanggung	sebagai acuan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan, sebagai dasar untuk menentukan prioritas dalam upaya pencegahan dan penanggulangan, menjadi sumber informasi terkait dengan kasus penyakit yang menjadi fokus diwilayah kerja	adanya peringatan dini terkait Kejadian Luar Biasa (KLB) mengetahui masalah kesehatan prioritas di Puskesmas Pengolahan data dapat menggambarkan besarnya masalah masing-masing penyakit di Puskesmas, Kegiatan surveilans berjalan optimal	Puskesmas, Dinkes, PKK, Tenaga Kesehatan, Masyarakat secara umum,
29	Optimalisasi Penerapan Operan Jaga Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Unit PSC 119	Bermanfaat bagi petugas PSC 119 untuk meningkatkan Kerjasama tim dan meningkatkan mutu pelayanan,	pelayanan kesehatan dapat berjalan sempurna dan berkesinambungan,	Dinkes, RSUD, Klinik, Puskesmas, Tenaga Kesehatan, Masyarakat

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
	Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	mewujudkan pelayanan public yang berkualitas,	Tingkat penyelamatan dan keselamatan pasien meningkat	
30	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Melalui Program UKGS (Usaha Kesehatan Gigi Sekolah) SD Di Wilayah Kerja Puskesmas Bulu Kabupaten Temanggung	Meningkatnya kunjungan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas Bulu Kabupaten Temanggung meningkatnya pengetahuan siswa tentang kesehatan gigi dan mulut Meningkatnya derajat kesehatan gigi dan mulut masyarakat Bulu Kabupaten Temanggung	Masyarakat periksa gigi secara rutin Kasus penyakit gigi dan mulut tertangani dengan baik Peningkatan Kesehatan gigi & mulut masyarakat secara umum	Dinkes, Puskesmas, Dindikpora, Lembaga Pendidikan, Pelajar, Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan, Masyarakat, Sosmed
31	Optimalisasi Penggunaan Tracer (Out Guide) Di UPTD Puskesmas Banjarsari Kabupaten Temanggung	memudahkan rekan sejawat dalam proses pelacakan dokumen rekam medis, Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu	Pelayanan kesehatan lebih baik Dokumen rekam medis tersusun dengan rapi dan lebih optimal	Puskesmas, Dinkes, Tenaga Kesehatan
32	Upaya Peningkatan Pengetahuan Penggunaan Informed Consent Melalui Sosialisasi Pada Petugas Di Ruang UGD Dan Video Edukasi Kepada Pasien Di Puskesmas Tepusen Kabupaten Temanggung	meningkatkan pengetahuan lebih kepada pasien dan keluarga terhadap pelayanan yang diberikan, tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	pemberian informasi yang jelas dan rinci mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terdapat perlindungan hukum bagi petugas medis terhadap akibat yang tidak terduga	Dinkes, Puskesmas, RSUD, Klinik, BKPSDM, Tenaga Kesehatan, Ahli IT, Sosmed, Pasien / Masyarakat
33	Pembuatan Pelayanan IVA Mobile Untuk Meningkatkan Cakupan Deteksi Dini Kanker Serviks Di Wilayah Puskesmas Wonobojo Kabupaten Temanggung	program IVA Mobile mempermudah bidan dalam mendeteksi kanker serviks 77 dan meningkatkan kunjungan pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) IVA Mobile dapat membantu wanita usia subur dalam mendeteksi dini kanker serviks dan memudahkan,	meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan deteksi dini kanker serviks Kesadaran perempuan akan kanker serviks meningkat Mengurangi Angka kematian perempuan akibat kanker serviks	Puskesmas, Dinkes, RSUD, Kominfo, Ahli IT, PKK, Dharmawanita, Media Masa, Sosmed, Komunitas Perempuan lain, Masyarakat
34	Optimalisasi Ketepatan Surat Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional Sekolah Menggunakan "SIAP BOS"	pembuatan laporan SPJ BOS dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu,	Pengelolaan keuangan sekolah menjadi lebih baik	Dindikpora, Sekolah & Lembaga Pendidikan, BPKPAD, BKPSDM, Perbankan, Tenaga Pendidik

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
	(Sistem Aplikasi Pertanggung Jawaban BOS) Di Smp Negeri 1 Pringsurat Kabupaten Temanggung	meningkatkan pelaporan penggunaan dana secara tertib, rapi, teratur, transparan, dan akuntabel dapat dilihat di laporan keuangan,	Dana yang dapat digunakan dengan baik berdasarkan dari pelaporan BOS yang baik,	
35	Optimalisasi Pelayanan Pemeriksaan Antenatal Care (ANC) Terpadu Dengan Pemberian Stempel "ANC TERPADU" Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Rejosari Kabupaten Temanggung Tahun 2022	meningkatkan kualitas pelayanan Antenatal Care (ANC) Terpadu karena adanya pedoman pelayanan ANC Terpadu, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu, terjangkau dan merata, melakukan segala tindakan sesuai dengan prosedur,	Masyarakat merasa puas berobat ke Puskesmas SPO yang sesuai dengan ketentuan dan terpercaya	Dinkes, Puskesmas, Bidan, Tenaga Kesehatan
36	Optimalisasi Sistem Keamanan Web Application Melalui Kegiatan Penetration Testing Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Temanggung	kualitas penetration testing akan lebih baik dari sebelumnya tools akan berjalan lebih optimal dan menghasilkan naiknya kualitas kegiatan Laporan hasil kegiatan penetration testing akan lebih baik	nilai Indeks KAMI yang akan naik Berkurangnya kejahatan siber Tata Kelola pemerintahan lebih efektif dan aman	Kominfo, BKPSDM, Ahli IT, ASN
37	Terbentuknya KCM (Kawasan Cerdas Merokok) Sebagai Pilot Project Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Merokok Usia < 18 Tahun Di Desa Jlegong Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung	memaksimalkan upaya pemberdayaan masyarakat terkait pencegahan merokok usia <18 tahun, media KIE untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat,	Menurunnya Kasus merokok pada usia <18 tahun Menurunkan tingkat kerugian negara karena beban penyakit akibat rokok SDM berkualitas, produktif dan sehat untuk memaksimalkan bonus demografi dan mendukung Indonesia Emas 2045	Dinkes, Puskesmas, RSUD, Klinik Terpadu, Dinsos, Dindikpora, Kesbangpol, Dinbudpar, Kecamatan, Desa, DPPAPPKB, Duta Genre, Duta BNN, Duta Wisata, Kecamatan, Desa, Aktivistik Sosial, Lembaga Pendidikan, Pelajar, Masyarakat
38	Optimalisasi Pembelajaran Ekonomi Dengan Problem Based Learning Pada Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket C SPNF SKB Temanggung	pendidik menjadi lebih fokus dalam merancang kegiatan pembelajaran, Pembelajaran menjadi lebih dekat dan mudah diterima,	peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai amanat Undang – Undang Pendidikan kesetaraan berfungsi menjadi pendidikan alternatif dan saling melengkapi dengan pendidikan formal,	Dindikpora, SKB, Dinsos, Tenaga Pendidik, LKB, Masyarakat

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
		sebagai bahan referensi dalam perencanaan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien,	Warga belajar berkeinginan tinggi untuk datang dalam kegiatan pembelajaran,	
39	Optimalisasi Pelayanan Perijinan Pelaksanaan Pengumpulan Uang Atau Barang (PUB) Di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung	membuat pelayanan perijinan di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung lebih baik dan terarah, menambah pengetahuan PSM mengenai Pengumpulan Uang atau Barang (PUB), pelaksanaan kegiatan PUB akan lebih akuntabel, transparan, dan berguna untuk masyarakat yang membutuhkan	Memudahkan organisasi sosial atau masyarakat yang akan mengakses perijinan PUB, organisasi sosial atau masyarakat melakukan perijinan saat melakukan kegiatan PUB sehingga kegiatan lebih terarah dan jelas, Terdapat data rekap administrasi peserta yang melakukan Perijinan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)	Dinsos, Organisasi / komunitas Sosial, LSM, Masyarakat, Sosmed, Media Masa
40	Optimalisasi Proses Pembangunan Aplikasi Android Melalui E-Book Dan Template Project Di Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Temanggung	pembuatan aplikasi android tidak memakan waktu lama dan penggunaannya relative lebih mudah, Programmer lebih mengerti tentang tata cara penggunaan template project dan instalasi Flutter, mendapat bantuan langsung apabila terjadi kendala dalam pembuatan aplikasi android,	Programmer Dinkominfo bisa mendapatkan aplikasi android dari sebuah aplikasi web yang sudah ada, Memudahkan pengguna membuka website untuk membuka aplikasi website, kepuasan masyarakat dan OPD lain terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung yang meningkat	Dinkominfo, Bappeda, BKPSDM, Programmer, Ahli IT
41	Optimalisasi Pelayanan Informasi Obat Pada Sediaan Khusus Dengan Leaflet Dan Konten Media Sosial Di Puskesmas Tepusen Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung	Memudahkan tenaga kefarmasian dalam melakukan kegiatan pelayanan informasi obat, Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu di Puskesmas Tepusen, Mendapatkan informasi obat dari sumber yang akurat dan mudah dalam memahami cara menggunakan atau pengetahuan mengenai obat yang diterima dengan baik dan benar,	pasien memahami mengenai informasi obat sediaan khusus yang diterimanya yang nantinya juga berpengaruh pada keberhasilan terapi, tujuan pengobatan tercapai secara optimal,	Dinkes, RSUD, Puskesmas, Klinik Umum, Apotik, Apoteker, Masyarakat
42	Optimalisasi Pelaporan IKPD; SPM-Kesehatan Dan Evaluasi Kinerja Melalui Manajemen Laporan Berbasis Google	mempermudah monev pelaporan data IKPD, SPM-Kesehatan, dan Evaluasi Kinerja peningkatan pemahaman alur pelaporan data IKPD; SPM-Kesehatan dan Evaluasi Kinerja ,	tugas dan fungsi Dinas Kesehatan berjalan sesuai visi dan misi kepala daerah	Dinkes, Puskesmas, RSUD, Bappeda, Setda

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
	Spreadsheet Di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	dapat dijadikan dasar evaluasi dalam perencanaan dan penganggaran Puskesmas dan Dinas Kesehatan,	capaian program nasional dan internasional (SPM dan SDG's) lebih dapat terealisasi dengan baik capaian kinerja Dinas Kesehatan yang baik	
43	Optimalisasi Penerapan Dokumentasi Asuhan Keperawatan Perioperatif Yang Sesuai SDKI, SLKI Dan SIKI Berdasarkan Regulasi Organisasi Profesi PPNI Di Instalasi Bedah Sentral RSUD Kabupaten Temanggung	mendapatkan dokumentasi perioperatif yang sesuai dengan panduan dan regulasi yang berlaku di rumah sakit, Sebagai nilai rujukan dalam penyusunan lembar dokumentasi kajian/review spo dan form dokumentasi yang baru mengetahui spo dan form dokumentasi yang sesuai panduan,	pelayanan kepada pasien diharap semakin optimal dan professional, Proses dokumentasi keperawatan perioperative lebih optimal dengan standar baru Menghindari perbedaan Tindakan oleh perawat lain Tingkat kepatuhan terhadap organisasi profesi PPNI (Persatuan perawat Nasional Indonesia) yang tinggi	Dinkes, RSUD, Klinik Umum, Puskesmas, BKPSDM, Tenaga Kesehatan
44,	Pelaksanaan Terapi Bermain Untuk Menurunkan Hospitalisasi Pada Pasien Anak Di Bangsal Cempaka 2 RSUD Kabupaten Temanggung	pasien anak tidak mengalami traumatic saat proses pengobatannya media pembelajaran yang ada dapat digunakan untuk sosialisasi ulang, mempermudah rekan sejawat Perawat dalam menerapkan asuhan keperawatannya sesuai dengan SPO yang sudah ada, Mutu Ruang Cempaka 2 yang baik berupa evaluasi kepatuhan Perawat Cempaka 2 dalam pelaksanaan terapi bermain,	terlaksananya kegiatan terapi bermain pada pasien anak sehingga pasien menjadi lebih tenang , Hospitalitas pada pasien anak oleh Tenaga Kesehatan lebih baik Menghindari traumatic hospital pada pasien anak	Dinkes, RSUD, Puskesmas, Klinik Umum, Tenaga Kesehatan, Psikolog & psikiater, Masyarakat umum
45,	Optimalisasi Pembuatan Dan Pemanfaatan Nitrobacter Untuk Tanaman Padi Pada Kelompok Tani Lambang Bibit Desa Gondangwayang Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung	menambah pengetahuan, sikap, dan ketrampilan sehingga akan mempengaruhi dalam kegiatan berusaha tani, Meningkatkan pemahaman petani dalam kegiatan penyuluhan dan juga merupakan sumber informasi untuk menambah pengetahuan, sikap, dan ketrampilan,	Meningkatkan kesuburan tanah pertanian Mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia Mendukung program pemerintah, yaitu pertanian ramah lingkungan	DKPPP, DLH, Dinkopdag, Dinpermades, UMKM, Kelompok Tani, Masyarakat Secara umum, komunitas penggiat lingkungan,

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
46,	Optimalisasi Pencatatan Dan Pengelolaan Data Klien Dengan Memanfaatkan Google-Workspace Di Uptd Rumah Singgah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung	pencatatan dan pengelolaan data klien semakin menjadi lebih mudah, Data klien akan dapat terdata dengan baik, memperkuat capaian nilai organisasi yaitu Excellence,	Kemudahan akses data klien yang sudah terlayani Terdapat back up data klien jika terjadi kerusakan Data dukung yang dapat diakses secara online guna pemberian layanan sosial lanjutan	Dinsos, UPTD, BKPSDM, Masyarakat
47,	Optimalisasi Pelaporan Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media Sosial Instagram Di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Temanggung	masyarakat akan mengetahui perkembangan harga secara periodik serta mengetahui kenaikan dan penurunan harga di atas batas normal, Menunjang pencapaian kinerja Bidang Perdagangan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya untuk pemantauan harga barang kebutuhan pokok, Mengetahui disparitas harga antar daerah, menyusun bahan masukan kebijakan tentang distribusi kebutuhan pokok dalam rangka pengendalian inflansi di daerah,	Pemantauan dan pengawasan harga lebih mudah dilaksanakan Adanya publikasi informasi harga barang kebutuhan pokok kepada masyarakat Penyajian informasi harga kebutuhan pokok yang cepat dan akurat Menaikan kualitas kinerja OPD	Dinkopdag, DKPPP, UPT, Pasar, Pedangang, Ahli IT, Media Masa, Media Sosial, Masyarakat
48,	Optimalisasi Edukasi Tentang Mobilisasi Pada Pasien Pasca Operasi Menggunakan Lembar Balik Di Ruang Nusa Indah RSUD Kabupaten Temanggung	mudah melakukan edukasi dan pasien juga lebih mudah dalam memahami Tersedianya media edukasi bagi perawat memudahkan petugas dan perawat untuk memantau perkembangan mobilisasi pada pasien pasca operasi,	Pengetahuan pasien mengenai mobilisasi pasca Proses pemulihan yang lebih cepat karena pengetahuan pasien yang memadai Hari perawatan yang lebih pendek dan biaya perawatan lebih efisien Kepuasan pasien & keluarga terhadap pelayanan	Dinkes, RSUD, Klinik, Puskesmas, Tenaga Kesehatan, Masyarakat
49,	Optimalisasi Pemantauan Jentik Melalui Pemberdayaan Kader Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (G1R1J) Dengan Metode On Job Training	mendapatkan angka bebas jentik yang lebih akurat	Nilai Angka Bebas Jentik (ABJ) menggambarkan kondisi yang sebenarnya	Dinkes, Puskesmas, RSUD, Klinik Kesehatan, Kecamatan, Desa, PKK, Karang Taruna, Tenaga Kesehatan,

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
	Koordinator G1R1J Di Wilayah Kerja Puskesmas Temanggung	Kader G1R1J mendapatkan bekal untuk pelaksanaan dan pemantauan jentik dilapangan pelaksanaan hari G1R1J di desa / kelurahan lebih terpantau, meningkatkan kesiapsiagaan dan pencegahan DBD	Peningkatan ABJ yang berbanding terbalik dengan Peningkatan Kasus DBD, sistem kewaspadaan dini penyakit dapat dilaksanakan dengan optimal Angka kasus DBD menurun	Penyuluh Kesehatan, DLH, Masyarakat
50,	Optimalisasi Pembuatan Laporan Program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Berbasis Digital Di Puskesmas Jumo Kabupaten Temanggung	memudahkan petugas UKP untuk melakukan pembuatan laporan setiap bulannya, memudahkan dalam permintaan laporan bulanan sebagai bahan untuk kegiatan lokakarya mini Puskesmas Jumo, tersedia laporan yang telah terpusat sebagai bahan untuk melaksanakan laporan Penilaian Kinerja Puskesmas,	Permintaan data program UKP lebih cepat dan efisien Laporan program UKP berjalan tepat waktu Memudahkan koordinasi antara Petugas UKP dan PJ Program UKP	Dinkes, Puskesmas, Tenaga Kesehatan
51	Optimalisasi Pendampingan Kepada Keluarga Yang Merokok Melalui Poli Berhenti Merokok Di Puskesmas Temanggung Kabupaten Temanggung	mengetahui factor yang menyebabkan seseorang merokok menjadi motivasi untuk mengurangi atau bahkan berhenti merokok	mejadi motivasi untuk mengurangi atau bahkan berhenti merokok Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kesehariannya,	Dinkes, Puskesmas, BNN, PKK, Dinsos, Dindikpora, Kesbangpol, Pelajar, Mahasiswa, Masyarakat umum,
52	Optimalisasi Publikasi Informasi Pada Media Sosial Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Dengan Manajemen Produksi Konten Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Temanggung	mengetahui konten apa saja yang akan dipublikasikan kepada masyarakat melihat jadwal publikasi konten media sosial, serta melakukan monitoring, mempermudah dalam melakukan pengecekan proses editing dan design mempermudah pembaca untuk memahami pesan yang disampaikan,	meningkatkan efektifitas publikasi informasi di masyarakat Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global,	Dinkominfo, Ahli IT, Bappeda, BKPSDM, Media Masa, Sosial Media, Masyarakat

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
53	KANCING PERMATA (Kampung Cacing Berdaya untuk Masyarakat Sejahtera)	Meningkatkan pemasukan bagi anggota peternak cacing Keberagaman jenis produk UMKM pada masyarakat Sumber pangan alternatif baru	Membuka peluang baru bagi UMKM Sebagai alternatif makanan pengganti dengan gizi bai, sebagai pencegahan stunting di masyarakat	DKPPP, Dinkopdan, Dinpermades, Petani & Peternak, Akademisi, Bappeda, Masyaraat
54	Festival Wiwit mbako	Melestarikan Budaya lokal Khas Temanggung Mempublikasikan Produk Tembakau Temanggung	Meningkatkan nilai Tambah dari kegiatan pertembakauan Meningkatkan persatuan, guyup rukun dan gotong-royong Meningkatkan ekonomi masyarakat Budaya tradisional yang sudah ada tidak punah	DINKOPDAG, DKPPP, DINBUDPAR, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES, BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
55	Festival Petik merah	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kualitas kopi mutu buah tang terpetik hanya yang bagus, sehingga biji kering bermutu baik,	Meningkatkan harga kopi semakin tinggi	DINKOPDAG, DKPPP, DINBUDPAR, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES, BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
56	Festival Seribu kupat	Nguri-uri budaya lokal Desa Ngemplak Kandangan Temanggung agar tetap lestari dan tidak terdesak oleh perkembangan modernisasi, Menjaga dan melindungi sumber irigasi Lembang Dawuhan silenging Desa Ngemplak Kecamatan Kandangan, Tercatatnya "GREBEG KUPAT SEWU":dalam Ekspresi Budaya Tradisional di Kemenkumham RI	Meningkatkan persatuan, guyup rukun dan gotong-royong Meningkatkan ekonomi masyarakat Budaya tradisional yang sudah ada tidak punah	DINKOPDAG, DKPPP, DINBUDPAR, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES, BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
57	Festival nguleg bawang	Mempublikasikan Kabupaten Temanggung merupakan salah satu penghasil bawang terbesar di Indonesia Mengangkat produk unggulan Temanggung Meningkatkan harga bawang	Bawang temanggung semakin terkenal Adanya nilai tambah dari bawang Meningkatkan daya beli masyarakat Meningkatkan ekonomi masyarakat	DINKOPDAG, DKPPP, DINBUDPAR, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES, BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
58	Festival plabengan	Nguri-uri dan publikasi budaya lokal rejepan Desa Pagergunung Temanggung agar tetap lestari dan tidak terdesak oleh perkembangan modernisasi, Meningkatkan rasa persatuan dan gotong-royong	Budaya plabengan di Pagergunung menjadi terkenal dan familier Meningkatkan rasa cinta budaya daerah Meningkatkan ekonomi masyarakat	DINKOPDAG, DKPPP, DINBUDPAR, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES, BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
59	Festival Seribu Tenong	Nguri-uri budaya lokal Desa Kembangsari Kandangan Temanggung agar tetap lestari dan tidak terdesak oleh perkembangan modernisasi, Media Publikasi Budaya Daerah Temanggung Tercatatnya “ Festival Seribu Tenong”: dalam Ekspresi Budaya Tradisional di Kemenkumham RI	Meningkatkan persatuan, guyup rukun dan gotong-royong Meningkatkan ekonomi masyarakat Budaya tradisional yang sudah ada tidak punah	DINKOPDAG, DKPPP, DINBUDPAR, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES, BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
60	Festival Seribu 1000 penari jaran kepeng	Melakukan regenerasi seni dan juga menjaga jati diri dan harga diri masyarakat Temanggung Sebagai penyambung persaudaraan antara penggiat seni jaran kepeng Mempublikasikan tari jaran kepeng Temanggungan	Tari Jaran Kepang Temanggungan semakin dikenal oleh masyarakat baik dalam daerah maupun luar Temanggung Tari jaran kepeng menjadi pembelajaran kearifan lokal di semua SD dan SMP di Kabupaten Temanggung	DINKOPDAG, DKPPP, DINBUDPAR, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES, BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani,

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
				PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
61	Festival 1000 tumpeng	Nguri-uri budaya khas Temanggung agar tetap lestari dan tidak terdesak oleh perkembangan modernisasi, Media Publikasi Budaya Daerah Temanggung Tercatatnya “ Festival Seribu Tumpeng”:dalam Ekspresi Budaya Tradisional Temanggung di Kemenkumham RI	Meningkatkan persatuan, guyup rukun dan gotong-royong Meningkatkan ekonomi masyarakat Temanggung menjadi tujuan wisata budaya	DINKOPDAG, DKPPP, DINBUDPAR, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
62	SOBAT BIMA (Solusi Hebat Bina Marga)	masyarakat bisa langsung melaporkan aduan kerusakan jalan melalui nomor WhatsApp 085888777654	masalah kerusakan jalan bisa direspons dengan lebih cepat	DPUPR, GAPENSI, PERTANAHAN, PERBANKAN, MASYARAKAT
63	SIPASDA (Sistem Informasi Pasar Daerah)	Meningkatkan transaksi non tunai Pengendapan dana murah	Penaanganan Retribusi Pasar lebih mudah dan cepat	DINKOPDAG, KOMUNITAS PEDAGANG, PERBANKAN, KOMINFO
64	E-Retribusi Pasar	Menanggulangi keterbatasan SDM Mempermudah Pembayaran Retribusi Pasar	Retribusi dapat berjalan dengan tertib Meningkatkan kepercayaan masyarakat	DINKOPDAG, KOMUNITAS PEDAGANG, PERBANKAN, KOMINFO
65	SEMUT MERAH (Setiap Jumat Minum Tablet Tambah Darah)	Untuk Mendorong Masyarakat Minum Tblet Tambah Darah	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	Puskesmas, Dinkes, RSUD, Kominfo, Ahli IT, PKK, Dharmawanita, Media Masa, Sosmed, Komunitas Perempuan lain, Masyarakat
66	KELAS AYU TING-TING (Ayo Cegah Stunting Sejak Bunting)	Mencegah Stunting	Terjadinya penurunan angka stunting	Puskesmas, Dinkes, RSUD, Kominfo, Ahli IT, PKK, Dharmawanita, Media Masa, Sosmed, Komunitas Perempuan lain, Masyarakat
67	GEMAR ASIK (Generasi Remaja Anti Rabi Gasik)	Menanggulangi Pernikahan Dini	Menurunnya angka pernikahan dini	Puskesmas, Dinkes, RSUD, Kominfo, Ahli IT, PKK, Dharmawanita, Media Masa,

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
				Sosmed, Komunitas Perempuan lain, Masyarakat
68	KURSI BIRU (Kursus Singkat Ibu Menyusui Baru)	Menanggulangi terjadinya Stunting	Penurunan angka stunting	Puskesmas, Dinkes, RSUD, Kominfo, Ahli IT, PKK, Dharmawanita, Media Masa, Sosmed, Komunitas Perempuan lain, Masyarakat
69	SUSCANTIN (Kursus Calon Pengantin)	Pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan, dalam waktu singkat kepada calon tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga,	Calon pengantin mendapat pengetahuan terkait suatu pernikahan, Pengurangan terjadinya perceraian,	Puskesmas, Dinkes, RSUD, Kominfo, Ahli IT, PKK, Dharmawanita, Media Masa, Sosmed, Komunitas Perempuan lain, Masyarakat
70	MAS BAMBANG (Massage Bayi Balita Untuk Stimulasi Tumbuh Kembang)	Mendorong perkembangan dan pertumbuhan balita	Bayi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik Meningkatkan Daya tahan tubuh bayi,	Puskesmas, Dinkes, RSUD, Kominfo, Ahli IT, PKK, Dharmawanita, Media Masa, Sosmed, Komunitas Perempuan lain, Masyarakat
71	Festival Ruwat Rigen	Nguri-uri budaya khas Temanggung di Kecamatan Kledung agar tetap lestari dan tidak terdesak oleh perkembangan modernisasi, Media Publikasi Budaya Daerah Temanggung Tercatatnya “ Festival Ruwat Rigen”:dalam Ekspresi Budaya Tradisional Temanggung di Kemenkumham RI	Meningkatkan persatuan, guyup rukun dan gotong-royong Meningkatkan ekonomi masyarakat Temanggung menjadi tujuan wisata budaya	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES, BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
72	Grebeg Mangkukuhan	Nguri-uri budaya khas Temanggung Grebeg Mangkukuhan agar tetap lestari dan tidak terdesak oleh perkembangan modernisasi, Media Publikasi Budaya Daerah Temanggung	Meningkatkan persatuan, guyup rukun dan gotong-royong Meningkatkan ekonomi masyarakat Temanggung menjadi tujuan wisata budaya	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES, BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani,

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
		Tercatatnya “ Grebeg Mangkukuhan”:dalam Ekspresi Budaya Tradisional Temanggung di Kemenkumham RI		PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
73	Grebeg Parakan	Melestarikan Kota Parakan sebagai Kota Pusaka Mempublikasikan Budaya dan UMKM Temanggung Tercatatnya “ Grebeg”:dalam Ekspresi Budaya Tradisional Temanggung di Kemenkumham RI	Meningkatkan persatuan, guyup rukun dan gotong-royong Kota Parakan semakin dikenal oleh masyarakat luar terkait dengan kota pusaka dan produk UMKM Meningkatkan ekonomi masyarakat Temanggung menjadi tujuan wisata budaya	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
74	Grebeg Mangkuyudo Jumo Temanggung	Nguri-uri budaya khas Temanggung Mangkuyudo Jumo agar tetap lestari dan tidak terdesak oleh perkembangan modernisasi, Media Publikasi Budaya Daerah Temanggung Tercatatnya “Mangkuyudo Jumo”:dalam Ekspresi Budaya Tradisional Temanggung di Kemenkumham RI	Meningkatkan persatuan, guyup rukun dan gotong-royong Meningkatkan ekonomi masyarakat Temanggung menjadi tujuan wisata budaya	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
75	Grebeg Agung Liyangan	Nguri-uri budaya khas Temanggung Grebeg Agung Liyangan agar tetap lestari dan tidak terdesak oleh perkembangan modernisasi, Media Publikasi Budaya Daerah Temanggung Tercatatnya “Grebeg Agung Liyangan”:dalam Ekspresi Budaya Tradisional Temanggung di Kemenkumham RI	Meningkatkan persatuan, guyup rukun dan gotong-royong Meningkatkan ekonomi masyarakat Temanggung menjadi tujuan wisata budaya	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
76	Grebeg Duren Ngropoh	Melestarikan Durian Kranggan Temanggung Media Publikasi Durian Keranggan dan Budaya Daerah Temanggung	Durian Temanggung Semakin Dikenal Masyarakat Meningkatkan persatuan, guyup rukun dan gotong-royong	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar,

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
			Meningkatkan ekonomi masyarakat Temanggung menjadi tujuan wisata Horticultura	Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
77	Grebeg Besar Sesaji Puji Jagad Kec, Tlogomulyo	Nguri-uri budaya khas Temanggung Sesaji Puji Jagad agar tetap lestari dan tidak terdesak oleh perkembangan modernisasi, Media Publikasi Budaya Daerah Temanggung Tercatatnya “Sesaji Puji Jagad”:dalam Ekspresi Budaya Tradisional Temanggung di Kemenkumham RI	Meningkatkan persatuan, guyup rukun dan gotong-royong Meningkatkan ekonomi masyarakat Temanggung menjadi tujuan wisata budaya	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
78	Grebeg Kembang Arum	Nguri-uri budaya khas Temanggung Grebeg Kembang Arum agar tetap lestari dan tidak terdesak oleh perkembangan modernisasi, Media Publikasi Budaya Daerah Temanggung Tercatatnya “Grebeg Kembang Arum”:dalam Ekspresi Budaya Tradisional Temanggung di Kemenkumham RI	Meningkatkan persatuan, guyup rukun dan gotong-royong Meningkatkan ekonomi masyarakat Temanggung menjadi tujuan wisata budaya	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
79	Grebeg Suran sedekah bumi Traji	Nguri-uri budaya khas Temanggung Suran sedekah bumi Traji agar tetap lestari dan tidak terdesak oleh perkembangan modernisasi, Media Publikasi Budaya Daerah Temanggung Tercatatnya “Suran sedekah bumi Traji”:dalam Ekspresi Budaya Tradisional Temanggung di Kemenkumham RI	Meningkatkan persatuan, guyup rukun dan gotong-royong Meningkatkan ekonomi masyarakat Temanggung menjadi tujuan wisata budaya	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
80	Grebeg Suro SendangKali Progo	Nguri-uri budaya khas Temanggung Grebeg Agung Liyangan agar tetap lestari dan tidak terdesak oleh perkembangan modernisasi, Media Publikasi Budaya Daerah Temanggung Tercatatnya “Grebeg Agung Liyangan”:dalam Ekspresi Budaya Tradisional Temanggung di Kemenkumham RI	Meningkatkan persatuan, guyup rukun dan gotong-royong Meningkatkan ekonomi masyarakat Temanggung menjadi tujuan wisata budaya	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
89	Grebeg Suro Paseban Malowopati	Nguri-uri budaya khas Temanggung Grebeg Agung Liyangan agar tetap lestari dan tidak terdesak oleh perkembangan modernisasi, Media Publikasi Budaya Daerah Temanggung Tercatatnya “Grebeg Agung Liyangan”:dalam Ekspresi Budaya Tradisional Temanggung di Kemenkumham RI	Meningkatkan persatuan, guyup rukun dan gotong-royong Meningkatkan ekonomi masyarakat Temanggung menjadi tujuan wisata budaya	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
90	Layanan SMARTBILITAS (Siap Makaryo Untuk Disabilitas) di Kabupaten Temanggung	Fasilitas/Membantu Disabilitas Siap Kerja	Meningkatkan Disabilitas yang mendapat kesempatan kerja	DINSOS, DINPERINAKER, FTJSLP, BAPPEDA, KOMUNITAS DISABILITAS
91	Budidaya Uceng	memproduksi biota akuatik untuk memenuhi kebutuhan manusia akan pangan, terutama protein, dan bukan pangan Melestarikan ikan uceng	Domestikasi Ikan Uceng berpotensi meningkatkan penghasilan masyarakat Meningkatkan jumlah populasi ikan uceng mendukung keberhasilan pemenuhan gizi masyarakat	DKPPP, DINKOPDAG, Komunitas, Kominfo, Mensos,
92	Budidaya Ikan Nila dengan BIOFLOK	mengurangi penggunaan air dalam budidaya ikan , mengurangi pembuangan air ke lingkungan serta untuk meningkatkan produktivitas ikan lele yang dihasilkan oleh para peternak ikan,	Kualitas air kolam lebih terjaga, pH air lebih stabil, Limbah di dalam kolam jadi sedikit dan lebih ramah lingkungan, Menghemat penggunaan air	BAPPEDA, DKPPP
93	SINTA MERIT (Sistem Informasi Talenta Dan Sistem Merit)	Mempermudah pengambilan keputusan pengembangan karir	ASN mengetahui arah jalur pengembangan karir masing-masing	BKSDM, SEMUA OPD, ASN

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
94	MASKUPIS (Masker Kulit Pisang)	Mencegah penuaan dini, Mengatasi kerutan, Melembapkan kulit wajah, Mengurangi bengkak atau sembab pada mata, Mengurangi lingkaran hitam di bawah mata, Mengurangi peradangan pada jerawat, Menghilangkan rasa gatal pada penderita psoriasis, Memudarkan bekas jerawat,	Membuka lapangan kerja baru Limbah kulit pisang mempunyai nilai tambah	BAPPEDA, DINKOPDAG, DINPERINAKER, DKPPP
95	Dessert "PUPPI" Puding Pelelah Pisang Alternatif Pengobatan Anemia Defisiensi Besi	meningkatkan hemoglobin dan zat besi dalam darah, mengurangi kasus anemia di Kabupaten Temanggung sehingga, kasus stunting mengalami penurunan	Membuka peluang usaha baru dengan obat alternatif Meningkatkan kesehatan masyarakat Pemanfaatan limbah pelepas pisah	BAPPEDA, DINKOPDAG, DINPERINAKER, DKPPP
96	Mentelsi " Permen telang penurunan hipertensi "	Memanfaatkan Tanaman Telang untuk bahan permen Membuka Usaha Baru	Meningkatkan ekonomi masyarakat	BAPPEDA, DINKOPDAG, DINPERINAKER, DKPPP
97	SIWANGI BUMBON PAWON (Inovasi Bawang Merah dari Biji)	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dan masyarakat dalam budidaya bawang merah dari biji, Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani bawang merah, karena dapat menghemat biaya produksi, Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi budidaya bawang merah,	Membuka peluang usaha dan Meningkatkan ekonomi masyarakat	BAPPEDA, DINKOPDAG, DINPERINAKER, DKPPP

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
98	Pesawat Aerotek I	Peningkatan kualitas sumber Daya manusia dengan meningkatkan daya saing melalui pendidikan dan edukasi, dengan inovasi kan kreativitas anak Temanggung di bidang industri dan teknologi	Meningkatkan motivasi masyarakat Temanggung untuk selalu berinovasi Adanya Pesawat Sport buatan anak Kabupaten Temanggung Mengangkat Nama baik Temanggung	BAPPEDA, DINPERINAKER, FTJSLP, KOMUNITAS DRONE, KOMINFO, MENSOS
99	Pemanfaatan Bunga Putri Malu Carmyosa	membantu melindungi sel-sel tubuh dari efek buruk radikal bebas, penyebab stres oksidatif meningkatkan kadar testosteron, Testosteron sendiri berkaitan dengan hormon seksual pria	Putri malu yang tadinya gulma menjadi tanaman yang bermanfaat,	BAPPEDA, DINKOPDAG, DINPERINAKER, DKPPP
100	Ekspresi Budaya Wulan Sunu	Menjaga Tari Wulan Sunu sebagai kesenian rakyat Kabupaten Temanggung dari pengaruh budaya asing, sehingga tetap terjaga dan lestari, Sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur, Tari Wulan Sunu yang unik membuat Kabupaten Temanggung dikenal di Nusanatara bahkan Dunia yang kaya akan budaya dan tradisi, Menjadi wisata budaya bagi turis mancanegara maupun domestik, Terdaftar Tari Wulan Sunu sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Kabupaten Temanggung	Sebagai upaya pengenalan Budaya Tari Wulan Sunu yang merupakan salah satu kekayaan budaya Kabupaten Temanggung kepada masyarakat, dan sebagai sarana pelestarian budaya dengan melakukan revitalisasi (penguatan) budaya, Menambah kekayaan seni tari khas Kabupaten Temanggung, Dapat meningkatkan minat dan bakat untuk belajar dan mengembangkan Tari Wulan Sunu	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES, BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
101	Ekspresi Budaya Gatho Loco	1. Pelestarian budaya lokal Tari Gatholoco agar tetap lestari dan tidak terdesak oleh perkembangan modernisasi, 2. Menjaga dan melindungi Tari Gatholoco,	Sebagai upaya pengenalan Budaya Tari Gatholoco yang merupakan salah satu kekayaan budaya Kabupaten Temanggung kepada masyarakat, dan sebagai sarana pelestarian budaya dengan melakukan revitalisasi (penguatan) budaya,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES, BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar,

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
		3. Tercatatnya “Tari Gatholoco”:dalam Ekspresi Budaya Tradisional di Kemenkumham RI	Menambah kekayaan seni tari khas Kabupaten Temanggung, Dapat meningkatkan minat dan bakat untuk belajar dan mengembangkan Tari Gatholoco,	Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
102	Ekspresi Budaya Koncer	Menjaga dan melestarikan Tari Tari Koncer sebagai kesenian rakyat Kabupaten Temanggung dari pengaruh budaya modernisasi, sehingga tetap terjaga dan lestari, Bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur, Tari Tari Koncer yang unik membuat Kabupaten Temanggung dikenal di Nusanatara bahkan di dunia yang kaya akan budaya dan tradisi, Terdaftarnya Tari Tari Koncer sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Kabupaten Temanggung	Tari Koncer tidak punah karena budaya-budaya modern, Menjadi salah satu kekayaan kesenian tak benda Kabupaten Temanggung, Sebagai salah satu atraksi hiburan khas Temanggung yang dapat menjadi, suguhan hiburan, tamu resmi ataupun turis mancanegara maupun domestic Dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap adanya Tari Koncer,,,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
103	Ekspresi Budaya Bangilun	Menjaga dan melestarikan Tari Tari Bangilun sebagai kesenian rakyat Kabupaten Temanggung dari pengaruh budaya modernisasi, sehingga tetap terjaga dan lestari, Bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur, Tari Tari Bangilun yang unik membuat Kabupaten Temanggung dikenal di Nusanatara bahkan di dunia yang kaya akan budaya dan tradisi,	Tari Bangilun tidak punah karena budaya-budaya modern, Menjadi salah satu kekayaan kesenian tak benda Kabupaten Temanggung, Sebagai atraksi hiburan khas Temanggung yang dapat menjadi suguhan hiburan, tamu resmi ataupun turis mancanegara dan domestic Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap adanya Tari Bangilun,,,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
		Terdافتarnya Tari Tari Koncer sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Kabupaten Temanggung		
104	Ekspresi Budaya Jaran Kepang	Tercatatnya Ekspresi Budaya Tradisional Jaran Kepang di kemenkumham	Meningkatkan dan menguatkan nilai-nilai seni Jaran Kepang di Masyarakat	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES, BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
105	Ekspresi Budaya Anak Sukerta	Tercatatnya Ekspresi Budaya Tradisional Anak Sukerta di kemenkumham	Meningkatkan dan menguatkan nilai-Budaya Anak Sukerta di Masyarakat Menjadi salah satu tujuan wisata	
106	Ekspresi Budaya Ruwat Rigen	Tercatatnya Ekspresi Budaya Tradisional Ruwat Rigen di kemenkumham	Meningkatkan dan menguatkan nilai-Budaya Ruwat Rigen di Masyarakat Menjadi salah satu tujuan wisata	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES, BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
107	Ekspresi Budaya Wayang Kedu	Tercatatnya Ekspresi Budaya Tradisional Wayang Kedu di kemenkumham Melestarikan dan melindungi Kesenian wayang asli Temanggung	Wayang kedu semakin diminati masyarakat Wayang kedu semakin dikenal oleh masyarakat dalam maupun luar Temanggung	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES, BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
108	Ekspresi Budaya Cengklungan	Tercatatnya Ekspresi Budaya Tradisional Cengklungan di kemenkumham Melestarikan dan melindungi Kesenian Cengklungan Temanggung	Cengklungan semakin diminati masyarakat Cengklungan semakin dikenal oleh masyarakat dalam maupun luar Temanggung	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
109	Ekspresi Budaya Prajurititan	Menjaga Tari Prajurititan Sebagai Kesenian Rakyat Kabupaten Temanggung Dari Pengaruh Budaya Asing, Sehingga Tetap Terjaga Dan Lestari, Sebagai Bentuk Penghargaan Dan Penghormatan Terhadap Leluhur, Tari Prajurititan Yang Unik Membuat Kabupaten Temanggung Dikenal Di Nusanatara Bahkan Dunia Yang Kaya Akan Budaya Dan Tradisi, Menjadi Wisata Budaya Bagi Turis Mancanegara Maupun Domestik, Terdaftar Tari Prajurititan Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Kabupaten Temanggung	1. Agar tidak punah karena budaya-budaya modern 2. Menjadi salah satu kekayaan kesenian tak benda Kabupaten Temanggung 3. Sebagai salah satu atraksi hiburan khas daerah	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
110	Ekspresi Budaya Thethek Bengek	1. Menjaga dan melestarikan Tari Tethek Bengek sebagai kesenian rakyat Kabupaten Temanggung dari pengaruh budaya modernisasi, sehingga tetap terjaga dan lestari, 2. Bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur, 3. Terdaftar Tari Tethek Bengek sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Kabupaten Temanggung	1. Tethek Bengek tetap terjaga di antara pesatnya pertumbuhan budaya modern, 2. Menjadi salah satu kekayaan kesenian tak benda Kabupaten Temanggung, 3. Sebagai salah satu atraksi hiburan khas Temanggung yang dapat menjadi, suguhan hiburan, tamu resmi ataupun turis mancanegara maupun domestic 4. Dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap adanya Tethek Bengek	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
111	Ekspresi Budaya Adat Mertitani	Menumbuhkembangkan/membangkitkan nilai-nilai keagamaan, menciptakan rasa aman, tentram dan selamat dalam wujud syukur Kepada Allah SWT Pengolahan Pertanian	Meningkatkan dan menguatkan nilai-Budaya mertani di Masyarakat Menjalin rasa persatuan, kerukunan dan gotong-royong di masyar Menjadi salah satu tujuan wisata	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
112	Ekspresi Budaya Brokohan Sapi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nguri-uri budaya lokal Brokohan Sapi agar tetap lestari dan tidak terdesak oleh perkembangan modernisasi, 2. Menjaga dan melindungi Brokohan Sapi menjadi budaya lokal, 3. Tercatatnya "Brokohan Sapi":dalam Ekspresi Budaya Tradisional di Kemenkumham RI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai upaya pengenalan Budaya Brokohan Sapi yang merupakan salah satu kekayaan budaya Kabupaten Temanggung kepada masyarakat, dan sebagai sarana pelestarian budaya dengan melakukan revitalisasi (penguatan) budaya, 2. Dapat meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap Budaya Brokohan Sapi 3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mengembangkan Brokohan Sapi, 	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
113	Ekspresi Budaya Warokan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nguri-uri budaya lokal Tari Warok'an agar tetap lestari dan tidak terdesak oleh perkembangan modernisasi, 2. Menjaga dan melindungi Tari Warok'an, 3. Tercatatnya "Tari Warok'an":dalam Ekspresi Budaya Tradisional di Kemenkumham RI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai upaya pengenalan Budaya Tari Warok'an yang merupakan salah satu kekayaan budaya Kabupaten Temanggung kepada masyarakat, dan sebagai sarana pelestarian budaya dengan melakukan revitalisasi (penguatan) budaya, 2. Dapat meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap Tari Warok'an 3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mengembangkan Tari Warokan, 	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
114	Ekspresi Budaya Pisungsung Tuk Sari Bumi Gelang	Nguri-uri budaya lokal Desa Tlogomulyo agar tetap lestari dan tidak terdesak oleh perkembangan modernisasi, Menjaga dan melindungi sumber mata Air Tuk Sari Tlogomulyo,	Sebagai upaya pengenalan Budaya Desa Tlogomulyo yang merupakan salah satu kekayaan budaya Kabupaten Temanggung kepada masyarakat, dan sebagai sarana pelestarian budaya dengan melakukan revitalisasi (penguatan) budaya,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani,

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
		Tercatatnya “Gelaran Ritual Pisungung Tuk Sari Bumi Gelang”:dalam Ekspresi Budaya Tradisional di Kemenkumham RI	Meningkatkan rasa kebersamaan, saling andarbeni dan persatuan diantara masyarakat Desa Tlogomulyo, Terpeliharanya Mata Air Tuk Sari	PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
115	Ekspresi Pengetahuan Tradisional Tempong	Mengangkat kuliner Tempong khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat, Melalui “Ekspresi Pengetahuan Tradisional Tempong” mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, Tercatatnya Tempong sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,	Melindungi Pengetahuan Tradisional Tempong merupakan identitas dari masyarakat Temanggung, Meningkatkan rasa cinta Tempong di masyarakat luas, Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
116	Ekspresi Pengetahuan Tradisional Segogono	Mengangkat kuliner Segogono khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat, Melalui “Ekspresi Pengetahuan Tradisional Segogono” mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, Tercatatnya Segogono sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,	Melindungi Pengetahuan Tradisional Segogono merupakan identitas dari masyarakat Temanggung, Meningkatkan rasa cinta Segogono di masyarakat luas, Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
117	Ekspresi Pengetahuan Tradisional Balung Kuwuk	Mengangkat kuliner Balung Kuwuk khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat, Melalui “Ekspresi Pengetahuan Tradisional Balung Kuwuk” mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, Tercatatnya Balung Kuwuk sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,	Melindungi Pengetahuan Tradisional Balung Kuwuk merupakan identitas dari masyarakat Temanggung, Meningkatkan rasa cinta Balung Kuwuk di masyarakat luas, Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
118	Ekspresi Pengetahuan Tradisional Ndas Borok	<p>Mengangkat kuliner Ndas Borok khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat,</p> <p>Melalui “Ekspresi Pengetahuan Tradisional Ndas Borok” mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat,</p> <p>Tercatatnya Ndas Borok sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,</p>	<p>Melindungi Pengetahuan Tradisional Ndas Borok merupakan identitas dari masyarakat Temanggung,</p> <p>Meningkatkan rasa cinta Ndas Borok di masyarakat luas,</p> <p>Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,</p>	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
119	Ekspresi Pengetahuan Tradisional Empis-Empis	<p>Mengangkat kuliner Empis-empis khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat,</p> <p>Melalui “Ekspresi Pengetahuan Tradisional Empis-empis” mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat,</p> <p>Tercatatnya Empis-empis sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,</p>	<p>Melindungi Pengetahuan Tradisional Empis-empis merupakan identitas dari masyarakat Temanggung,</p> <p>Meningkatkan rasa cinta Empis-empis di masyarakat luas,</p> <p>Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,</p>	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
	Ekspresi Pengetahuan Tradisional Kuliner Bajingan	<p>Mengangkat kuliner Bajingan khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat,</p> <p>Melalui “Ekspresi Pengetahuan Tradisional Bajingan” mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat,</p> <p>Tercatatnya Bajingan sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,</p>	<p>Melindungi Pengetahuan Tradisional Bajingan merupakan identitas dari masyarakat Temanggung,</p> <p>Meningkatkan rasa cinta Bajingan di masyarakat luas,</p> <p>Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,</p>	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
120	Ekspresi Pengetahuan Tradisional Angka Wolu	<p>Mengangkat kuliner Ongko Wolu khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat,</p>	<p>Melindungi Pengetahuan Tradisional Ongko Wolu merupakan identitas dari masyarakat Temanggung,</p>	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK,

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
		Melalui “Ekspresi Pengetahuan Tradisional Ongko Wolu” mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, Tercatatnya Pisang Aroma sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,	Meningkatkan rasa cinta Ongko Wolu di masyarakat luas, Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,	Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
121,	Ekspresi Pengetahuan Tradisional Ndok Bulus	Mengangkat kuliner nDok Bulus khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat, Melalui “Ekspresi Pengetahuan Tradisional nDok Bulus” mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, Tercatatnya nDok Bulus sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,	Melindungi Pengetahuan Tradisional nDok Bulus merupakan identitas dari masyarakat Temanggung, Meningkatkan rasa cinta nDok Bulus di masyarakat luas, Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
122,	Ekspresi Pengetahuan Tradisional Kue Pelok	Mengangkat kuliner Kue Pelok khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat, Melalui “Ekspresi Pengetahuan Tradisional Kue Pelok” mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, Tercatatnya Kue Pelok sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,	Melindungi Pengetahuan Tradisional Kue Pelok merupakan identitas dari masyarakat Temanggung, Meningkatkan rasa cinta Kue Pelok di masyarakat luas, Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
123,	Ekspresi Pengetahuan Tradisional Emping Jet	Mengangkat kuliner Emping Jet khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat, Melalui “Ekspresi Pengetahuan Tradisional Emping Jet” mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat,	Melindungi Pengetahuan Tradisional Emping Jet merupakan identitas dari masyarakat Temanggung, Meningkatkan rasa cinta Emping Jet di masyarakat luas, Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani,

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
		Tercatatnya Emping Jet sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,		PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
123,	Ekspresi Pengetahuan Tradisional Ketan Jali	Mengangkat kuliner Ketan Jali khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat, Melalui “Ekspresi Pengetahuan Tradidional Ketan Jali” mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, Tercatatnya Ketan Jali sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,	Melindungi Pengetahuan Tradisional Ketan Jali merupakan identitas dari masyarakat Temanggung, Meningkatkan rasa cinta Ketan Jali di masyarakat luas, Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
124,	Ekspresi Pengetahuan Tradisional Waroeng Jadoel	Mengangkat kuliner Waroeng Jadoel khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat, Melalui “Ekspresi Pengetahuan Tradidional Waroeng Jadoel” mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, Tercatatnya Waroeng Jadoel sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,	Melindungi Pengetahuan Tradisional Waroeng Jadoel merupakan identitas dari masyarakat Temanggung, Meningkatkan rasa cinta Waroeng Jadoel di masyarakat luas, Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
125,	Ekspresi Pengetahuan Tradisional Kupat Batoar	Mengangkat kuliner Kupat Batoar khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat, Melalui “Ekspresi Pengetahuan Tradidional Kupat Batoar” mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, Tercatatnya Kupat Batoar oma sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,	Melindungi Pengetahuan Tradisional Kupat Batoar merupakan identitas dari masyarakat Temanggung, Meningkatkan rasa cinta Kupat Batoar di masyarakat luas, Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
126,	Ekspresi Pengetahuan Tradisional Pipes Kopyor	<p>Mengangkat kuliner Pipes Kopyor khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat,</p> <p>Melalui “Ekspresi Pengetahuan Tradisional Pipes Kopyor” mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat,</p> <p>Tercatatnya Pipes Kopyor sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,</p>	<p>Melindungi Pengetahuan Tradisional Pipes Kopyor merupakan identitas dari masyarakat Temanggung,</p> <p>Meningkatkan rasa cinta Pipes Kopyor di masyarakat luas,</p> <p>Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,</p>	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
127,	WISATA WALITIS	<p>Melindungi dan menjaga pohon walitis dilereng sumbing yang usianya sudah lebih dari ratuasan tahun dikenal dengan pohon purba</p>	<p>Pohon walitis menjadi asset peninggalan pohon purba</p> <p>Pohon wakitis sebagai salah satu media edukasi hutan</p> <p>Menjadi salah satu tujuan wisat di Temanggung</p>	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
128,	BAKSO ULEG	<p>Mengangkat kuliner Bakso Uleg khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat,</p> <p>Melalui “Ekspresi Pengetahuan Tradisional Bakso Uleg” mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat,</p> <p>Tercatatnya Bakso Uleg sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,</p>	<p>Melindungi Pengetahuan Tradisional Bakso Uleg merupakan identitas dari masyarakat Temanggung,</p> <p>Meningkatkan rasa cinta Bakso Uleg di masyarakat luas,</p> <p>Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,</p>	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
129,	BRONGKOS MENGGORO	<p>Mengangkat kuliner Brongkos Menggoro khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat,</p>	<p>Melindungi Pengetahuan Tradisional Brongkos Menggoro merupakan identitas dari masyarakat Temanggung,</p> <p>Meningkatkan rasa cinta Brongkos Menggoro di masyarakat luas,</p>	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani,

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
		Melalui “Ekspresi Pengetahuan Tradisional Brongkos Menggoro” mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, Tercatatnya Brongkos Menggoro sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,	Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,	PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
130,	Membangun Sinergitas Kinerja Stakeholder Food Estate Holtikultura Untuk Ketersediaan Pangan Nasional Di Kabupaten Temanggung	Meningkatkan produksi pertanian Membangun jejaring pasar	Produksi Pertanian meningkat Adanya penjaminan harga produksi pertanian	DKPPP, BAPPEDA, DINBUDPAR, DINKOPDAG, DINPERINAER, KECAMATAN, DESA, KELOMPOK TANI, KOMINFO, FTJSLP, AKADEMISI
131,	SENTRA PASAR ENTHO	Melestarian Pasar kuliner Entho Parakan, Melalui “Ekspresi Budaya Tradisional Pasr Entho” mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, Tercatatnya Pasar Entho Parakan sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Budaya Tradisional,	Melindungi Pasar Entho merupakan identitas pasar parakan Temanggung, Meningkatkan rasa cinta belanja di Pasar Entho, Menjadi Pasar Wisata Tradisional	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES, BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Kluster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
132,	LAPAK KITA	Fasilitasi publikasi bagi para petani untuk menyampaikan hasil pertanian dan olahannya Media Pemasaran hasil pertanian	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	DINPERMADES, DINKOPDAG, DINKOMINFO, DKPPP, BAPPEDA, DINBUDPAR, DINDIKPORA, PKK, KECAMATAN, DESA, MEDIA MASA, FTJSLP
133,	TAMASYA SEJAHTERA (Tani Maju Masyarakat Sejahtera)	Meningkatkan Pertanian Di Temanggung	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	DKPPP, DINPERMADES, DINKOPDAG, DINKOMINFO, BAPPEDA, DINBUDPAR, DINDIKPORA, PKK, KECAMATAN, DESA, MEDIA MASA, FTJSLP
134,	KANCING PERMATA (Kampung Cacing Berdaya Pemberdayaan Masyarakat Sejahtera)	Pengembangan Budidaya Cacing di Temanggung	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	DKPPP, DINPERMADES, DINKOPDAG, DINKOMINFO, BAPPEDA, DINBUDPAR, DINDIKPORA, PKK, KECAMATAN,

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
				DESA, MEDIA MASA, FTJSLP, AKADEMISI, KELOMPOK TANI
135,	GERAKAN BELANJA UMKM TEMANGGUNG	Promosi Produk UMKM dalam bentuk paket Lebaran Cinta produk lokal Mengimbau kepada seluruh ASN/non-ASN di lingkungan dinas/instansi yang dipimpinnya untuk berbelanja produk UMKM	Meningkatkan ekonomi pelaku UMKM Meningkatnya permintaan produk UMKM Produk UMKM mampu bersaing dipasaran	DINKOPDAG, DKPPP, DINBUDPAR, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani dan Komunitas lainnya,
136,	Klinik PHT Desa Bansari	Meningkatkan pertanian Ramah Lingkungan Agen Pengendalian Hayati Media konseling pertanian	Berkembangnya Pertanian Organik Petani mendapat informasi pertanian lebih mudah	DKPPP, KECAMATAN, DESA, KELOMPOK TANI
137,	Green House Melon dengan Internet Of Things	Mampu memaksimalkan produk atau hasil pertanian, Pemanfaatan sumber daya secara efektif, Menangani dan mengendalikan hama menjadi lebih mudah dan efisien, Memaksimalkan operasi produksi dalam bidang pertanian	Hasil Pertanian lebih maksimal Harga Buah Melon tinggi Tanaman melon lebih sehat	DKPPP, KECAMATAN, DESA, KELOMPOK TANI
138,	ANTING EMAS (Cegah Stunting dengan Program Inovasi Kesehatan)	membantu mengatasi Balita yang mengalami stunting dan membantu mengurangi angka stunting di Kabupaten Temanggung	Ada kepedulian penanganan stunting secara bersama-sama Menurunkan angka stunting	DINKES, PUSKESMAS, KECAMATAN, KOMINFO, KADER, DESA, MASYARAKAT
139,	KELANTING (Kelas Balita Stunting)	membantu mengatasi Balita yang mengalami stunting dan membantu mengurangi angka stunting di Kabupaten Temanggung	Ada kepedulian penanganan stunting secara bersama-sama Menurunkan angka stunting	DINKES, PUSKESMAS, KECAMATAN, KOMINFO, KADER, DESA, MASYARAKAT
140,	POSBINDU MILENIAL Untuk Meningkatkan Upaya Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular Pada Remaja Di Wilayah Kerja	Meningkatkan kesadaran remaja untuk lebih menjaga kesehatan Dapat memantau kondisi kesehatan remaja	Mengurangi dan mencegah factor risiko PTM sejak remaja, Meningkatnya kesadran Remaja dalam menghadapi masa Puber;	DINKES, PUSKESMAS, KECAMATAN, KOMINFO, KADER, DESA, MASYARAKAT

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
	Puskesmas Wonoboyo Kabupaten Temanggung		Meningkatkan mutu pelayanan	
141,	Ekspresi Pengetahuan Tradisional Keripik Kepompong	<p>Mengangkat kuliner Kepompong khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat,</p> <p>Melalui “Ekspresi Pengetahuan Tradisional Kepompong” mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat,</p> <p>Tercatatnya Kepompong sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,</p>	<p>Melindungi Pengetahuan Tradisional Kepompong merupakan identitas dari masyarakat Temanggung,</p> <p>Meningkatkan rasa cinta Kepompong di masyarakat luas,</p> <p>Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,</p>	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES, BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
142,	Ekspresi Pengetahuan Tradisional Keripik Stik Tales	<p>Mengangkat kuliner Stik Tales khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat,</p> <p>Melalui “Ekspresi Pengetahuan Tradisional Stik Tales” mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat,</p> <p>Tercatatnya Stik Tales sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,</p>	<p>Melindungi Pengetahuan Tradisional Stik Tales merupakan identitas dari masyarakat Temanggung,</p> <p>Meningkatkan rasa cinta Stik Tales di masyarakat luas,</p> <p>Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,</p>	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES, BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
143,	Ekspresi Pengetahuan Tradisional Klemet Maron	<p>Mengangkat kuliner Klemet Maron khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat,</p> <p>Melalui “Ekspresi Pengetahuan Tradisional Klemet Maron” mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat,</p>	<p>Melindungi Pengetahuan Tradisional Klemet Maron merupakan identitas dari masyarakat Temanggung,</p> <p>Meningkatkan rasa cinta Klemet Maron di masyarakat luas,</p> <p>Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,</p>	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES, BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
		Tercatatnya Klemet Maron sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,		
144,	Ekspresi Pengetahuan Tradisional Pisang Aroma	Mengangkat kuliner Pisang Aroma khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat, Melalui “Ekspresi Pengetahuan Tradisional Pisang Aroma” mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, Tercatatnya Pisang Aroma sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,	Melindungi Pengetahuan Tradisional Pisang Aroma merupakan identitas dari masyarakat Temanggung, Meningkatkan rasa cinta Pisang Aroma di masyarakat luas, Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
145,	Ekspresi Pengetahuan Tradisional entho cotot	Mengangkat kuliner entho cotot khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat, Melalui “Ekspresi Pengetahuan Tradisional Entho Cotot” mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, Tercatatnya Entho Cotot sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,	Melindungi Pengetahuan Tradisional Entho Cotot merupakan identitas dari masyarakat Temanggung, Meningkatkan Citara entho cotot di masyarakat luas, Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
146,	RAKAI PIKATAN (Gerakan Penghapusan Kemiskinan untuk Terwujudnya Perekonomian Mapan)	1. Percepatan penanganan kemiskinan dan percepatan pertumbuhan ekonomi, 2. Terbangunnya sinergitas dengan lembaga non pemerintah 3. Meningkatkan citra positif perusahaan, Sebagai media promosi perusahaan	Penurunan Kemiskinan dan Peningkatan Ekonomi masyarakat	BAPPEDA, DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
		<p>4. Memberikan ruang bagi Perguruan Tinggi untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada masyarakat</p> <p>5. Dapat menjadi sarana promosi dan memberikan semangat / motivasi atas pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan dan percepatan pertumbuhan ekonomi serta menjadi media kontrol pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan dan percepatan pertumbuhan ekonomi</p> <p>6. Tumbuhnya saling sinergitas dan gerakan antara masyarakat dan pemerintah</p>		Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan
147,	LINTANG ASMARA (Layanan Informasi Tentang Penjangkaran Aspirasi Masyarakat)	<p>Memudahkan masyarakat untuk memberikan usulan pembangunan,</p> <p>Memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi perencanaan pembangunan</p> <p>Memudahkan Tim Bappeda dalam menghimpun aspirasi masyarakat</p>	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	BAPPEDA, SEMUA OPD, KECAMATAN, DESA, MASYARAKAT
148,	HOME CARE SIMANDA Pelayanan Puskesmas (Siap Datang Kerumah Anda)	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Masyarakat mendapat akses pelayanan kesehatan lebih mudah dan cepat	DINKES, PUSKESMAS, DESA, POSBINDU
149,	SI PETAK (Sistem Informasi Pendataan Perpustakaan)	efektivitas pendataan dan pengumpulan data semua jenis Perpustakaan di wilayah Kabupaten Temanggung dalam rangka memenuhi target indikator kinerja yang berupa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Mempermudah system informasi pendataan Perpustakaan di Temanggung	DINPUSIP, DINDIKPORA, DINPERMADES, KOMUNITAS LITERASI, AKADEMISI
150,	LAYANAN KOPI (Layanan Konsultasi Kepustakawanan Dan Literasi)	<p>Memudahkan pengelola perpustakaan untuk mengelola dan mengembangkan perpustakaan</p> <p>Meningkatkan Gemar membaca masyarakat</p>	<p>Meningkatnya minat masyarakat dalam membaca dan pengetahuan literasi</p> <p>Pelayanan semakin mudah</p>	DINPUSIP, DINDIKPORA, DINPERMADES, KOMUNITAS LITERASI, AKADEMISI

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
		Meningkat pengetahuan ke[ada masyarakat dibidang literasi		
151,	TAMASYA PUSTAKA (Layanan Ekstensi Perpustakaan)	Memberi pelayanan langsung ke Masyarakat Meningkatkan daya minat membaca masyarakat Meningkatkan pembangunan literasi masyarakat	Terpenuhinya kebutuhan informasi pemustaka di Kabupaten Temanggung Meningkatnya minat baca masyarakat	DINPUSIP, DINDIKPORA, DINPERMADES, KOMUNITAS LITERASI, AKADEMISI
152,	NASI KEBULI (Nakes Atasi Dengan Kelas Bumil Keliling) Untuk Meningkatkan Pengetahuan Tanda Bahaya Selama Kehamilan Di Puskesmas Gemawang Kabupaten Temanggung	Meningkatkan pemahaman masyarakat terkait tanda bahaya ibu hamil Membuat media informasi terkait tanda bahaya ibu hamil yang lebih menarik	Penanganan Ibu Hamil lebih cepat tertangani Meningkatkan Mutu Pelayanan Puskesmas	DINKES, PUSKESMAS, KECAMATAN, KOMINFO, KADER, DESA, MASYARAKAT
153,	Optimalisasi Pendamping Kube (Kelompok Usaha Bersama) Di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung	Peningkatan Kompetensi Pendamping KUBE; Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif; Terbentuknya Pendamping Usaha Ekonomi Produktif; Terlaksananya Bimbingan Teknis	Terjadinya Peningkatan SDM Pendamping KUBE Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif; Diterbitkannya SK Bupati tentang Pendamping Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama	DINSOS, BAPPEDA, DINPERMADES, DINKOPDAG, DKPPP, DINKOMINFO, KECAMATAN, PKH, RELAWAN, KOMUNITAS MASYARAKAT, DESA, FTJSLP
154,	Membuat Aplikasi E-Damkar Edukasi Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Dan Non Kebakaran Di Kabupaten Temanggung	Trerciptannya aplikasi edukasi pencegahan kebakaran dan non kebakaran, Mempermudah masyarakat dalam menyampaikan pengaduan di bidang Pemadam Kebakaran	Mempercepat Penanggulangan dan penanganan Kebakaran	SATPOL PP DAN DAMKAR, KECAMATAN, DESA, MASYARAKAT, RELAWAN
155,	SIPENDI (Sistem Pengarsipan Digital) Untuk Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Ruang	Mempermudah dan mempersingkat pencarian arsip di ruang arsip,	Membuat arsip lebih tertata dan terstruktur sesuai kategori	INSPEKTORAT, KOMINFO

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
	Arsip Auditor dan Sekretariat Inspektorat Kab,Temanggung	Dokumen bisa terekam untuk waktu yang lama dan bisa diakses kapanpun dan oleh siapapun karyawan Menambah nilai dari bagian kearsipan untuk menunjang pekerjaan yang lebih baik lagi dan berkelanjutan untuk menjadi sistem yang dibutuhkan	Ruang penyimpanan arsip menjadi lebih efisien Pencarian arsip menjadi lebih cepat Resiko kerusakan arsip menjadi lebih kecil	
156,	Sekolah Kebencanaan	Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana Terlaksananya Upaya Pengurangan Risiko Bencana menuju Kabupaten Tangguh Bencana,	Penanganan Bencana Lebih Cepat Teratasi Terjadinya Penuruna Risiko Bencana	BPBD, DINPERMADES, KECAMATAN, DESA, RELAWAN, MASYARAKAT,
157,	Edukasi Pada Ibu Hamil Tentang Pentingnya Pemantauan Gerakan Janin Dengan Menggunakan Tabel Perhitungan Gerakan Janin Mandiri (PAGER JARI) di PUSKESMAS Kedu Kabupaten Temanggung	pemantauan kesejahteraan janin bisa dilakukan ibu hamil secara mandiri yaitu dengan menghitung gerakan janin, Terciptanya media yang menarik dan mudah dipahami untuk melakukan edukasi mengenai pemantauan gerakan janin,	Pemantauan Janin Lebih Mudah dilaksanakan dan dapat dilaksanakan secara mandiri	DINKES, PUSKESMAS, KECAMATAN, KOMINFO, KADER, DESA, MASYARAKAT
158,	Pelestarian Sego Jagung Khas Temanggung	Mengangkat kuliner Sego Jagung khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat, Melalui "Pengembangan Sego Jagung Temanggung" mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, Tercatatnya Sego Jagung sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,	1. Melindungi Pengetahuan Tradisional Sego Jagung merupakan identitas dari masyarakat Temanggung, 2. Meningkatkan rasa cinta Sego Jagung di masyarakat luas, 3. Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
159,	Pelestarian Kuliner Bajingan Khas Temanggung	Mengangkat kuliner Bajingan khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat,	1. Melindungi Pengetahuan Tradisional Bajingan merupakan identitas dari masyarakat Temanggung, 2. Meningkatkan rasa cinta Bajingan di masyarakat luas,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES,BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK,

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
		Melalui "Pengembangan Bajingan Temanggung" mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, Tercatatnya Bajingan sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,	3. Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,	Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
160,	Digitalisasi Sistem PENTOL TANTRI (Pendaftaran Pasien Dengan Sistem Pendaftaran Pasien Online Tanpa Antri) Di Puskesmas Candiroto Kabupaten Temanggung	Pasien tidak perlu antri ketika melakukan pendaftaran petugas tidak terburu – buru dalam mempersiapkan berkas rekam medis karena berkas rekam medis sudah disiapkan setelah pasien melakukan pendaftarann online meningkatkan mutu pendidikan	Pendaftaran Pasien lebih mudah dan tidak perlu antri	DINKES, PUSKESMAS, KECAMATAN, KOMINFO, KADER, DESA, MASYARAKAT
161,	SIP TENAN (Sakit Pinggang Tenang Dan Nyaman) untuk Pelayanan Fisioterapi Pada Kasus Low Back Pain Di Puskesmas Kranggan Kabupaten Temanggung	Menambah pengetahuan nakes tentang low back pain Mempermudah pasien dalam proses fisioterapi low back pain Mengatasi keterbatasan alat fisioterapi	Meningkatkan pelayanan menjadi lebih berkualitas, Pasien, yaitu merasa lebih nyaman saat dilakukan tindakan pengobatan dan pemeriksaan, karena ada layanan fisioterapi	DINKES, PUSKESMAS, KECAMATAN, KOMINFO, KADER, DESA, MASYARAKAT
162,	Makanan Kuliner Sawut	Mengangkat kuliner Sawut khas Temanggung menjadi makanan favorit masyarakat, Melalui "Pengembangan Sawut Temanggung" mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, Tercatatnya Sawut sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal ekspresi Pengetahuan Tradisional,	1. Melindungi Pengetahuan Tradisional Sawut merupakan identitas dari masyarakat Temanggung, 2. Meningkatkan rasa cinta Sawut di masyarakat luas, 3. Meningkatkan rasa cinta terhadap makanan tradisional,	DINBUDPAR, DINKOPDAG, DKPPP, DINPERMADES, DPRKPLH, DINKOMINFO, DINKES, BAPPEDA, Lintas Sektoral, Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Desa, Pedagang Pasar, Klaster UMKM, Kelompok Tani, PWI, FTJSLP dan Komunitas lainnya,
163,	SARBON (Pasar Kebon)	Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin;	Percepatan peningkatan ekonomi masyarakat;	DINSOS, DINKOPDAG, DINPERMADES, BAPPEDA,

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
		Edukasi peningkatan usaha ekonomi produktif	Kelompok PKH mampu meningkatkan ekonomi secara mandiri	KECAMATAN DESA, KUBE, PKH, RELAWAN, MASYARAKAT
164,	Kos-Kosan Sapi	<ol style="list-style-type: none"> Mempermudah bagi orang yang punya modal ingin berternak tapi tidak punya tempat dan tenaga Membuka lapangan kerja baru Menjadi salah satu tujuan wisata ternak 	Meningkatkan ekonomi masyarakat	DKPPP, BAPPEDA, KELOMPOK TANI TERNAK, Mensos
165,	Optimalisasi Edukasi Pemasangan Akses Vaskuler Dengan Menggunakan E-Busavaler (Elektronik Buku Saku Akses Vaskuler) Di Ruang Hemodialisa Rsud Kabupaten Temanggung	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan pengetahuan dalam upaya mengoptimalkan proses hemodialisis serta peningkatan kualitas hidup pasien hemodialisis; Meningkatnya kerjasama antar teman sejawat sehingga menciptakan suasana kerja yang harmonis dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada pasien dan keluarga; Meningkatnya mutu dan kualitas pelayanan di ruang hemodialisa dengan tersedianya materi edukasi akses vaskuler hemodialisis; Berkontribusi dalam pencapaian visi misi rumah sakit terutama dalam hal meningkatkan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, 	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	DINKES, RSUD, KOMINFO, BAPPEDA, MASYARAKAT
166,	Optimalisasi Penyuluhan Dan Bimbingan Jenjang Karir Bagi Siswa Kelas 9 Smp Di Kabupaten Temanggung	Meningkatkan pemahaman siswa dalam menentukan jenjang karir sesuai dengan minat, bakat dan potensi yang dimiliki sehingga siswa dapat menentukan pekerjaan apa yang diharapkan dimasa depan dan jenjang Pendidikan lanjutan untuk mencapai pekerjaan tersebut,	Siswa mengetahui Jenjang karir yang harus dipilih	DINDIKPORA
167,	Optimalisasi Pemanfaatan Akun Belajar,Id (Platform Merdeka Mengajar) Untuk Guru Jenjang	Meningkatkan minat dan motivasi belajar, serta pemahaman siswa,	Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa dan guru mudah dalam menyusun instrument pembelajaran	DINDIKPORA

NO	NAMA INOVASI	MANFAAT	DAMPAK	STAKEHOLDER TERKAIT
	Sd Di Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung	<p>Mempermudah guru dalam menentukan/menyusun instrumen asesmen siswa,</p> <p>Memaksimalkan implementasi kurikulum merdeka jenjang SD di Kabupaten Temanggung,</p>		

Sumber: Litbang BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

2.5 PENGHARGAAN YANG DITERIMA KABUPATEN TEMANGGUNG

Kabupaten Temanggung mempunyai prestasi dan menerima banyak penghargaan baik skala provinsi, nasional maupun internasional dari berbagai bidang lomba/kompetisi. Pencapaian tersebut merupakan apresiasi sekaligus memberikan semangat untuk berkarya dan berprestasi yang lebih baik di masa mendatang. Berikut penghargaan yang diterima Kabupaten Temanggung pada tahun 2019-2023.

Tabel 2.276
Jumlah Penghargaan yang diterima Kabupaten Temanggung
Tahun 2019 – 2023

No	Tahun	Jumlah Penghargaan		
		Regional	Nasional	Internasional
1.	2019	10	26	5
2.	2020	8	17	6
3.	2021	15	20	2
4.	2022	34	19	3
5.	2023	38	35	5

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Daftar penghargaan yang diterima Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Tabel 2.277
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	SKALA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	Internasional GACC Open di Malaysia	Federasi Catur Malaysia (MAS)	Internasional	Dindikpora
2	Kejuaraan Renang Internasional Thailand Sport School Games	Kementrian Pariwisata dan Olahraga Thailand	Internasional	Dindikpora
3	Kejuaraan Karate Internasional di Surakarta (<i>South East Asean University Karate Championship</i>) Juara II	Rektor Universitas Sebelas Maret	Internasional	Dindikpora
4	Internasional Kejuaraan Sepatu Roda di Surakarta	Walikota Surakarta	Internasional	Dindikpora
5	Kejuaraan Karate Internasional di Surakarta (<i>South East Asean University Karate Championship</i>) Juara III	Rektor Universitas Sebelas Maret	Internasional	Dindikpora

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	SKALA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
6	Juara II Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Nasional	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Nasional	Bappeda
7	Juara Harapan I Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Regional II Tahun 2019	Menteri Dalam Negeri	Nasional	Dinpermades
8	Kabupaten Stop BABS/ODF	Menteri Kesehatan	Nasional	Dinas Kesehatan
9	STBM Berkelanjutan Tahun 2019	Menteri Kesehatan	Nasional	Dinas Kesehatan
10	Sanitarian Puskesmas Terbaik Kabupaten SBS (ODF) 100% Tahun 2019	Dirjen Kesmas Kemenkes RI	Nasional	Dinas Kesehatan
11	Penghargaan Kabupaten Terbaik Pendataan ERDKK dan Implementasi Kartu Tani 2019 (Kriteria Kecepatan, Komunikasi, & Koordinasi, Kerjasama, Realisasi Penggunaan kartu Tani)	Kementerian Pertanian	Nasional	Dintanpangan
12	Maturitas Penyelenggaraan SPIP Level 3	Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah	Nasional	Inspektorat
13	Pengembangan Hilirisasi dan Kewirausahaan Bidang Perkebunan	Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian	Nasional	Dintanpangan
14	Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Pratama Tahun 2019	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Nasional	DPPKBPPA
15	BUMD Terbaik di Indonesia Tahun 2019	Top Business	Nasional	PD Bank Pasar Temanggung
16	Top Pembina BUMD 2019	Top Business	Nasional	Bupati Temanggung
17	Penghargaan Adipura Kategori Kota Kecil 2019	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nasional	Kabupaten Temanggung
18	Juara I Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Dinpermades
19	Peringkat II kategori Pembina Ketahanan Pangan Adhikarya Pangan Nusantara Provinsi Jawa Tengah	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Dinas Pertanian

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	SKALA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	2019			
20	Juara I Kabupaten Kota Bertransaksi Kartu Tani Terbanyak	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Dintanpangan
21	Duta Lingkungan Sehat STBM Kategori Anak Sekolah	Gubernur Jawa Tengah	Regional Peringkat I	Dinas Kesehatan
22	Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi di Jawa Tengah Tahun 2019	Gubernur Jawa Tengah	Regional Peringkat II	Dinas Kesehatan
23	Pelaksana Terbaik PHBS Tk Provinsi Jawa tengah	Gubernur Jawa Tengah	Regional (Juara Harapan III)	Dinas Kesehatan
24	Juara II Stand Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah 2019	Gubernur Jawa Tengah	Regional	DinPerindag Kop dan UMKM
25	Juara III Pesona Produk Kriya Dekranasda Tingkat Provinsi Jawa Tengah 2019	Gubernur Jawa Tengah	Regional	DinPerindag Kop dan UMKM
26	Juara III Penghargaan <i>Central Java's Potensial Investment Challenge (CJPIC)</i>	Keris Jateng	Regional	DPMPSTP
27	Nasional Catur Piala Ketua DPR RI di Jakarta	Ketua DPR Republik Indonesia	Nasional	Dindikpora
28	Kejurnas Atletik di Cibinong Bogor Juara I	PB PASI (Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia)	Nasional	Dindikpora
29	Nasional Kejuaraan Renang Terbuka se Indonesia di Yogyakarta Juara I	Walikota Yogyakarta	Nasional	Dindikpora
30	Nasional Wushu Junior di Pangkalpinang	Piala Bergilir Presiden Republik Indonesia	Nasional	Dindikpora
31	Nasional Wushu Junior di Semarang Juara I	Rektor Universitas Negeri Semarang	Nasional	Dindikpora
32	Nasional Wushu Championsip di Yogyakarta	Asosiasi Pemersatu Orangtua Siswa Sasana Wushu Indonesia Sinduadi (APASI)	Nasional	Dindikpora

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	SKALA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
33	Nasional Kemah Budaya di Jakarta	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Nasional	Dindikpora
34	Nasional Kejuaraan Renang terbuka se Indonesia di Yogyakarta Juara II	Walikota Yogyakarta	Nasional	Dindikpora
35	Nasional Wushu Junior di Semarang Juara II	Rektor Universitas Negeri Semarang	Nasional	Dindikpora
36	Nasional Lomba O2SN Tingkat Nasional di Semarang	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Nasional	Dindikpora
37	Nasional Lemkari Piala Menpora di Jakarta	Menteri Pemuda dan Olahraga	Nasional	Dindikpora
38	Kejurnas Atletik di Cibinong Bogor Juara II	PB PASI (Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia)	Nasional	Dindikpora
39	Nasional Championship BMX di Temanggung	Gubernur Jawa Tengah	Nasional	Dindikpora
40	Nasional Kejuaraan Renang Antar Sekolah dan Mahasiswa di Yogyakarta	Gubernur AAU Cup	Nasional	Dindikpora
41	Tari Konceran, Juara I Festival Tari Tingkat Provinsi Jateng	Gubernur Jateng	Regional	Dinas Pariwisata

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2019

Penghargaan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2020, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.278
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Juara I Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Provinsi Jawa Tengah	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Bappeda
2	Juara I Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Nasional	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Nasional	Bappeda
3	IGA (Inovation Government Award) Nominasi 10 besar Kabupaten Terfavorit Tingkat Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Nasional	Bappeda
4,	Juara Utama (Drone Semprot Pertanian Otomatis) dan Juara	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Bappeda

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
	Favorit (Hidroponik Organik) Krenova masyarakat Tingkat Provinsi			
5	Juara III Kategori Pasar Anugerah IDSD Tingkat Prov, Jateng	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Bappeda
6	Pemilihan Duta Genre tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2020	Gubernur Jawa Tengah	Regional	DPPAPPKB
7	Pemilihan kelompok Bina Keluarga Remaja Mutiara Kasih juara terbaik II	Gubernur Jawa Tengah	Regional	DPPAPPKB
8	OPINI WTP yang ke 7	BPK RI	Nasional	BPPKAD
9	OPINI WTP yang ke 8	BPK RI	Nasional	BPPKAD
10	Juara I Kategori Desa Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Dinpermades
11	Juara III tingkat Provinsi Jawa Tengah Kategori Pelayanan Masyarakat Tahun 2020	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Satpol
12	Juara 1 Nasional Wushu Online (7 medali emas)	Wushu Indonesia Provinsi Bali	Internasional	Dindikpora
13	Nasional Taekwondo Poomsae virtual juara 1	Taekwondo Indonesia Provinsi Banten	Internasional	Dindikpora
14	Juara 2 Nasional Wushu Online Se Indonesia (3 medali perak)	Wushu Indonesia Provinsi Bali	Internasional	Dindikpora
15	Juara 1 dan 2 Balap sepeda Internasional Sirkuit BMX di Banyuwangi (2 medali emas dan 3 medali perak)	Banyuwangi Internasional BMX	Internasional	Dindikpora
16	Juara 2 Balap Sepeda tingkat Nasional pada PON	PB PON	Nasional	Dindikpora
17	Juara 1 Balap Sepeda pada International Sirkuit BMX di Jakarta	DISPORA Provinsi DKI	Internasional	Dindikpora
18	Juara 3 Wushu pada Wushu Tournamen	Brunei Wushu Federation	Internasional	Dindikpora
19	Juara 3 Sepakbola Putri	Special Olympics Indonesia	Nasional	Dindikpora
20	Juara 1 Renang tingkat Nasional	Akademi angkatan Udara	Nasional	Dindikpora

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
21	Juara 1 menembak	Yon Armed 13 Kostrad Sukabumi	Nasional	Dindikpora
22	Juara 1 Wushu	UNNES	Nasional	Dindikpora
23	Juara 1 Renang	PARASWIM Indonesia	Nasional	Dindikpora
24	Juara 1 Pencak silat	IPSI Yogyakarta	Nasional	Dindikpora
25	Juara 1 Tenis	PELTI kabupaten Bogor, Jabar	Nasional	Dindikpora
26	Juara 1 Tenis	PELTI kabupaten Pati, Jateng	Nasional	Dindikpora

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2020

Pada tahun 2019 Kabupaten Temanggung berhasil menjadi juara 2 lomba Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Nasional untuk kategori Kabupaten Terbaik, Prestasi ini berlanjut pada tahun 2020, Kabupaten Temanggung berhasil menjadi juara 1 lomba Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Nasional, Pengumuman disampaikan oleh Kepala Bappenas bersamaan dengan pelaksanaan Musrebangnas Tahun 2020 secara virtual pada hari Kamis tanggal 30 April tahun 2020.

Penghargaan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2021, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.279
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Juara I Lomba Penerapan Hygiene Sanitasi Pada Unit Usaha Produk Hewan oleh CV, Sumber Gizi Desa Kedu Kec, Kedu tingkat Provinsi Jawa Tengah	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2	Juara II Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terendah tingkat Provinsi Jawa Tengah	Sekda Provinsi Jawa Tengah	Regional	Diperinaker
3	Kategori Kabupaten Inovatif	Kemendagri	Nasional	Bappeda
4	Kota Layak Anak Kategori Madya	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nasional	BKPBPPPA
5	Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Utama	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nasional	BKPBPPPA
6	OPINI WTP yang ke 9	BPK RI	Nasional	BPKPAD

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
7	Shibiru Pewarna Alam dari tanaman Stobilantes Cusia,	Juara 2 (dua) tingkat Provinsi Jateng	Regional	Bappeda
8	Lift Cor Beton Ekonomis (LCBE)	10 besar tingkat Provinsi Jawa Tengah	Regional	Bappeda
9	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (SBM)	Terbaik Pertama di Tingkat Nasional	Nasional	DKK
10	Sekolah Adiwiyata Nasional kepada SMP N 1 Kandangan	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nasional	Dindikpora
11	Medali Perak bidang Lomba Matematika pada kompetisi Sains Nasional (KSN) jenjang SMP tingkat Nasional	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Nasional	Dindikpora
12	juara 1 (emas) kejuaran Nasional Championship Karate	Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI)	Nasional	Dindikpora
13	juara 1 (emas) Open virtual Wushu Tournament 2021 Putra	Pengurus Besar Wushu Indonesia	Nasional	Dindikpora
14	juara 1 (emas) Open virtual Wushu Tournament 2021 Putri	Pengurus Besar Wushu Indonesia	Nasional	Dindikpora
15	Juara 1 (emas) Taekwondo Championship Menpora Cup	Pengurus Besar Taekwondo Indonesia	Nasional	Dindikpora
16	Juara 2 (perak) Open Virtual Wushu Tournament 2021	Pengurus Besar Wushu Indonesia	Nasional	Dindikpora
17	Juara 2 (perak) tenis lapangan Walikota Tegal Cup XIII tahun 2021	Pengkab PELTI (Persatuan Lawn Tenis Indonesia) Kabupaten Tegal	Nasional	Dindikpora
18	Juara 3 (perunggu) Open Virtual Wushu Tournament 2021	Pengurus Besar Wushu Indonesia	Nasional	Dindikpora

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2021

Tabel 2.280
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	eRTe FM Raih Penghargaan Terbaik Radio Ramah Anak dalam Indonesia Persada, ID Award III Tahun 2022	Wakil Ketua Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Indonesia Persada	Nasional	KOMINFO
2	Temanggung Menerima Penghargaan Indikasi Geografis Terbanyak se Indoensia	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	Nasional	BAPPEDA
3	Temanggung Raih	PANITIA SEA GAMES	Nasional	DINDIKPORA

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
	penghargaan atlet taekwondo SEA Games			
4	KPU Temanggung Dapat Penghargaan Menuju Informatif	Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jateng	Nasional	KPU
5	Artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul PROFIL Bupati Temanggung Muhammad Al Khadziq, Penerima Penghargaan Tribun Inspiring Award	Tribun Inspiring Award	Nasional	KOMINFO
6	Ketiga Kalinya Temanggung Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (Kemen PPPA)	Nasional	DPPPAPPKB
7	DINDA PUTRI LESTARI, ATLET TAEKWONDO TEMANGGUNG RAIH MEDALI EMAS PON XX PAPUA	Penyelenggara PON XX PAPUA	Nasional	DINDIKPORA
8	Wahyu Jati Atlet Paralympic Asal Temanggung Juara Dunia Cabang Atletik	Ketua Nasional Paralympic Committee Indonesia	Nasional	DINDIKPORA
9	Lomba Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan (KRAP) Taruna se-Jawa Tengah	Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan (KRAP) Taruna se-Jawa Tengah Bupati Batang Cup 2022	Regional	DINDIKPORA
10	Kontingen Kabupaten Temanggung Raih 3 Medali Dalam Pospeda Tingkat Provinsi Jawa Tengah	POSPEDA PROVINSI JAWA TENGAH	Regional	DINDIKPORA
11	Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan (KRAP) Wali Kota Magelang Cup 2022	Wali Kota Magelang Cup 2022	Regional	DINDIKPORA
12	Empat Santri Ponpes Al Mu'min Raih Prestasi Tingkat Nasional	Penyelenggara Olympiade Ahmad Dahlan (OlympicAD) dan Pekan Taaruf Seni Budaya dan Olahraga (Pentasbora) ke V	Nasional	DINDIKPORA
13	Temanggung raih Olimpiade Sains Nasional 2022	Penyelenggara Olimpiade Sains	Nasional	DINDIKPORA
14	Kompetisi Bahasa Arab Nasional, Chilya `Ainul Jamilah berhasil menjadi Juara Harapan II sebagai wakil Jawa Tengah ke tingkat Nasional	Penyelenggara Olimpiade Bahasa Arab Tingkat Nasional	Regional	DINDIKPORA
15	Bela Rahma Sayida, warga Kabupaten Temanggung berhasil meraih prestasi di	Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspekindo)	Nasional	DINDIKPORA

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
	tingkat nasional, Ia menjadi juara kedua di ajang Duta Maritim Indonesia 2022			
16	Kontingen dari Kabupaten Temanggung berhasil meraih Juara Umum Lomba Mata Pelajaran dan Seni Islami (MAPSI) SMP X Tingkat Jawa	Penyelenggara MAPSI Jateng	Regional	DINDIKPORA
17	Alhamdulillah kontingen Kabupaten Temanggung dapat meraih peringkat VII se-Provinsi Jawa Tengah	Penyelenggara Gelaran MTQ XXIX	Regional	DINDIKPORA
18	MTs Al-Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung kembali meraih juara, Kali ini kejuaraan datang dari cabang olahraga (cabor) Panahan Perorangan Putra	Penyelenggara OlympiadicAD dan Pentasbora	Regional	DINDIKPORA
19	MTs Al-Mu'min Muhammadiyah Tembarak meraih penghargaan cabang olahraga (cabor) Judo	Penyelenggara OlympiadicAD dan Pentasbora	Regional	DINDIKPORA
20	RSUD Temanggung Memperoleh Piagam Penghargaan dari BPJS Cabang Magelang Sebagai Juara 1 Lomba Pelayanan Prima	BPJS Jateng	Regional	DINKES
21	Paduan Suara Dewasa Campuran	PESPARAWI Jawa Tengah	Regional	DINDIKPORA
22	Olimpiade Ma arif Tingkat Provinsi	Penyelenggara Olimpiade Makarif Jawa Tengah	Regional	DINDIKPORA
23	Siswa SMP Ngadirjo Juara Lari Atletik Lari	Popda Jateng	Regional	DINDIKPORA
24	ASN Terinovative (Dwi Sukarimei, ST,,MT,)	JAWA POS	Regional	BAPPEDA
25	Ketiga Kalinya Temanggung Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (Kemen PPPA),	Nasional	DPPPAPPKB
26	Sertifikat Warisan Tak Benda	KEMENDIKBUD	Nasional	DINBUDPAR
27	Kampoeng Pro Iklim Utama Nasional	Kementrian LHK	Nasional	DPRKPLH
28	Inovasi Rasa Mesra Mendapat Penghargaan Human Raights In	Human Raights In Southeasty Asia	Nasional	BAPPEDA

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
	Southeasty Asia			
29	Ammar Amrullah merupakan salah satu atlit Wushu MI Negeri 1 Temanggung yang meraih medali Emas pada lomba yang dilaksanakan secara virtual oleh Pusaka Tantra pada tanggal 10-15 Mei 2021, Sebagai Juara 1 GS PA Group 5 tingkat nasional	Pusaka Tantra	Nasional	DINDIKPORA
30	Kepala daerah Yang Berkontribusi Nominasi LPM Award	penghargaan oleh LPM Award 2022	Nasional	DINPERMADES
31	Penghargaan Anugrah PDSD Juara 1 Ekosistem Inovasi Jawa Tengah	Gubernur Jateng	Regional	BAPPEDA
32	Penghargaan Anugrah Innovation Government Award 2022 Kabupaten Temanggung Terinovatif	Kementrian Dalam Negeri	Nasional	BAPPEDA
33	Penghargaan Krenova Minyak Kopi Herbal 10 besar Utama Tingkat Jawa Tengah	Gubernur Jateng	Regional	BAPPEDA
34	PPID Pemkab Temanggung Raih Penghargaan pada KIP Award	KIP Award	Nasional	KOMINFO
35	Bela Rahma Sayida, juara ke dua di ajang Duta Wisata Indonesia tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspekindo),	Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspekindo),	Nasional	DINBUDPAR
36	Kurnia Setyo Wulandari Kabupaten Temanggung berhasil meraih Juara I Lomba Baca Puisi Kreatif (LBPK) Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Yayasan Gaperto Jepara,	Yayasan Gaperto Jepara,	Nasional	DINDIKPORA

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022

Penghargaan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.281
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	SKALA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	Juara 2 Piala Presiden Kontes Kambing PE th 2023 tk Nasional Kelas Pejantan (Kelompok ternak cabe Farm Desa Tretep kecamatan Tretep)	Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI)	Nasional	DKP3
2	Juara 3 piala Presiden Kontes Kambing PE th 2021 tingkat Nasional kelas anakan indukan-Kelompok ternak Jalu Farm Desa Kertosari Kecamatan Jumo	Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI)	Nasional	DKP3
3	Juara 1 Tembakau varietas Kemloko 4 Festival Tembakau Lembutan Kategori Gunung pada Soropadan Agro Festival II tahun 2023(Bapak Chadik Mubarok) desa Bansari Kecamatan Bansari	Soropadan Agro Expo Festival II tahun 2023	Regional	DKP3
4	Juara 1 Kelompok Tani Ternak Berprestasi tingkat Provinsi Jawa tengah- KTT Taruna Karya Mudha	Provinsi Jawa Tengah	Regional	DKP3
5	Juara 1 Tingkat Nasional Penghargaan Mitra Bhakti Usaha - perusahaan yg telah melaksanakan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP)- PT Shoenary Javanesia Inc Kab Temanggung	Direktorat Jendral Masyarakat Kementrian RI	Nasional	PT Shoenary Javanesia Inc/ Dinkes/ Puskesmas Pare
6	Peringkat ke 4 tingkat Nasional Penghargaan Profil Kesehatan Kabupaten Temanggung tahun 2023	Sekretaris Jenderal Kementrian Kesehatan RI	Nasional	Dinkes
7	Sertifikasi Akreditasi Paripurna Puskesmas Parakan	Kementrian Kesehatan Republik Indonesia	Nasional	Dinkes/ puskesmas Parakan
8	Sertifikat Bebas Frambusia-Apresiasi Kepala Daerah berhasil menangani penyebaran Neglected Tropical Disease (NTD)	Kementrian Kesehatan RI	Nasional	Dinkes
9	Penghargaan kategori Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas terstandarisasi dan sebagai rujukan	DKPPPAPPKB Provinsi Jateng	Regional	DKPPPAPPKB Tmg/ Dinkes Tmg/ Puskesmas Tmg

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	SKALA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	Nasional tahun 2022-Puskesmas Temanggung			
10	Sekolah Adiwiyata Mandiri - SMP 6 Temanggung	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	Nasional	DPRKPLH
11	Sekolah adiwiyata Nasional - SDN 3 Tuksongo	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	Nasional	DPRKPLH
12	Sekolah Adiwiyata Provinsi - SD Muhammadiyah Parakan, MI Muhammadiyah Purwodadi Tembarak, SMP N 1 Kaloran, MTs Ma'arif Jumo	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	Regional	DPRKPLH
13	Green Leadership Nirwasita Tantra-Pemerintah Daerah dan Ketua DPRD untuk Kategori Kabupaten Sedang	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	Nasional	DPRKPLH
14	Green Leadership Nirwasita Tantra-Ketua DPRD untuk Kategori Kabupaten Sedang	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	Nasional	DPRKPLH
15	Lomba Habitat Tingkat Provinsi Jawa Tengah-Juara 4 (Kel. Manggong Kec. Ngadirejo)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Regional	DPRKPLH
16	LOMBA WANA LESTARI- terbaik I Kategori Kader Konservasi Alam Tingkat Nasional dan Kategori Kader Konservasi Alam Tingkat Provinsi (An. R. Gravita Eka Purnama)	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	Nasional	DPRKPLH
17	Program Kampung Iklim (ProKlim) Kategori Utama- 1. Desa Ketitang Kec. Jumo 2. Desa Batusari Kec. Kledung	Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan kebakaran hutan dan lahan wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara	Nasional	DPRKPLH
18	Program Kampung Iklim (ProKlim) Kategori Madya- Desa Petarangan Kec. Kledung	Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan kebakaran hutan dan lahan wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara	Nasional	DPRKPLH

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	SKALA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
19	Nominator Penghargaan Kalpataru Nasional- Fatah Syaifur Rochman	Kementrian Lingkungan Hidup	Nasional	DPRKPLH
20	Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Jateng Kategori Perintis Lingkungan Hidup- Fatah Syaifur Rochman	Provinsi Jawa Tengah	Regional	DPRKPLH
21	Penghargaan Kalpataru Provinsi Jateng Kategori Penyelamat Lingkungan Hidup- Bank Sampah Bumi Asri, Desa Banaran Kecamatan Tembarak	Provinsi Jawa Tengah	Regional	DPRKPLH
22	Juara 1 Kategori Pelestarian Lingkungan Hidup dalam acara Anugerah Penyuluh Agama Islam Award tingkat Jawa Tengah- An Al Imron	Kementrian Agama Provinsi Jawa Tengah	Regional	DPRKPLH
23	Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 11 atas Laporan Keuangan tahun 2022 Pemerintah Daerah Kab Temanggung	Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI	Nasional	BPKPAD
24	Kabupaten Terbaik 1 Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat Nasional tahun 2023	Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas	Nasional	Bappeda
25	Kabupaten Terbaik 1 Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2023	Gubernur Jawa Tengah	Nasional	Bappeda
26	Juara terbaik III tingkat Nasional SDG's award	Menteri PPN/ Bappenas	Nasional	Bappeda
27	Juara 1 Tingkat Nasional kategori News Anchor Anugerah Persada. Id Award ke IV – Lembaga penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Erte FM	Persada.Id (Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia)	Nasional	Radio Erte FM/ Dinkominfo
28	Juara 1 dalam Lomba Pertunjukan Rakyat (Petunra) FK Metra Tingkat Jawa tengah	FK Metra (Forum Komunikasi Media Tradisional)/ Dinkominfo Provinsi Jateng	Regional	Dinkominfo

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	SKALA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
29	Desa Anti Korupsi dengan Predikat Istimewa-Desa Tanurejo Kecamatan Bansari	Provinsi Jateng	Regional	Inspektorat/ Dinpermades/ Dinkominfo
30	Opini Kualitas tinggi pada Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022	Ombudsman Republik Indonesia	Nasional	Ortala
31	Peringkat 4 Penilaian Evaluasi Smart City se Indonesia tahun 2022	Kementrian Kominfo	Nasional	Dinkominfo
32	Penghargaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terbaik Provinsi Jawa Tengah tahun 2023	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Bagian Hukum
33	Medali Emas Cabor Balap Sepeda BMX di ajang Asian Games 2023 di Hangzhou, China (amellya Nur Sifa)	Asian Games	Internasio nal	KONI/ Dindikpora
34	Medali Emas Cabor Catur tingkat Asia di Paragames Kamboja An. Farah Yumna Budiati (2 emas P dan 2 emas B)	Paragames Kamboja	Internasio nal	Dindikpora
35	Medali Perak Cabor Atletik tingkat Asia di Paragames Kamboja An. Slamet Wahyu Jati (1 Perak P dan 1 Perak B)	Paragames Kamboja	Internasio nal	Dindikpora
36	Medali Perak Cabor Wushu kejuaran Asia di Macau China An. Intan Anindya	Macau Cina	Internasio nal	Dindikpora
37	Medali Perunggu Cabor Wushu kejuaran Asia di Macau China An. Genta Ganda Prakoso	Macau Cina	Internasio nal	Dindikpora
38	Medali Emas Cabor Wushu di POPNAS Palembang An. Intan Anindya	POPNAS Palembang	Nasional	Dindikpora
39	Medali Emas Cabor Wushu di POPNAS Palembang An. Genta Ganda Prakoso	POPNAS Palembang	Nasional	Dindikpora
40	Medali Perak Cabor Wushu di POPNAS Palembang An. Pandu Dian Saputra	POPNAS Palembang	Nasional	Dindikpora

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	SKALA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
41	Medali Perak Cabor Kempo di POPNAS Palembang An. Talin Nabilla Putri	POPNAS Palembang	Nasional	Dindikpora
42	Medali Emas Cabor Atletik di Lari Trail Run Gunung Gajah An. Diva Setiyawan	Turnamen Jawa Tengah	Regional	Dindikpora
43	Medali Emas Cabor Lompat jauh di PEPARPEDA Surakarta An Nicholas Arya Naufal putra	PEPARDA Surakarta	Regional	Dindikpora
44	Medali Emas Cabor Lompat jauh di PEPARPEDA Surakarta An. Diva Setiyawan	PEPARDA Surakarta	Regional	Dindikpora
45	Medali Emas Cabor Atletik tuna runggu di PEPARPEDA Surakarta An. Navilla Ardiana	PEPARDA Surakarta	Regional	Dindikpora
46	Medali Emas Cabor Atletik tuna runggu di PEPARPEDA Surakarta An. Zulaika	PEPARDA Surakarta	Regional	Dindikpora
47	Medali Emas Cabor Judo di POPDA Provinsi An. Dwiki Hepto	POPDA Provinsi	Regional	Dindikpora
48	Medali Emas Cabor Kempo di POPDA Provinsi (7)	POPDA Provinsi	Regional	Dindikpora
49	Medali Emas Cabor Wushu di POPDA Provinsi An. Pandu Dian Saputra	POPDA Provinsi	Regional	Dindikpora
50	Medali Emas Cabor Wushu di POPDA Provinsi An. Intan Anindya	POPDA Provinsi	Regional	Dindikpora
51	Medali Emas Cabor Wushu di POPDA Provinsi An. Intan Anindya	POPDA Provinsi	Regional	Dindikpora
52	Medali Emas Cabor Renang O2SN Provinsi An. Intan Anindya	O2SN Provinsi	Regional	Dindikpora
53	Medali Emas Cabor Renang O2SN Provinsi An. M. Attar Pandu Affandi	O2SN Provinsi	Regional	Dindikpora
54	Medali Emas Cabor Renang O2SN Provinsi An. Indira Ferinza Jasmine	O2SN Provinsi	Regional	Dindikpora

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	SKALA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
55	Medali Emas Cabor Atletik 100 M lari gawang putra di PORPROV XVI Jateng An. Ayub Kabri	PORPROV XVI Jateng	Regional	Dindikpora
56	Medali Emas Cabor Atletik sapta putra di PORPROV XVI Jateng An. Ayub Kabri	PORPROV XVI Jateng	Regional	Dindikpora
57	Medali Emas Cabor catur beregu di PORPROV XVI Jateng An. Abdul jalil, M Fidyhan, Oka satria	PORPROV XVI Jateng	Regional	Dindikpora
58	Medali Emas Cabor judo di PORPROV XVI Jateng An. Dwikie Hepto Januartika	PORPROV XVI Jateng	Regional	Dindikpora
59	Medali Emas Cabor kick boxing full contact putri di PORPROV XVI Jateng An. Siska Ayu VAlentina	PORPROV XVI Jateng	Regional	Dindikpora
60	Medali Emas Cabor Tarung drajat di PORPROV XVI Jateng An. Deni Cahya N	PORPROV XVI Jateng	Regional	Dindikpora
61	Medali Emas Cabor Taekwondo di PORPROV XVI Jateng An. Dinda putri lestari	PORPROV XVI Jateng	Regional	Dindikpora
62	Medali Emas Cabor Tenis lapangan di PORPROV XVI Jateng An. M Hilmy Abdulrahman	PORPROV XVI Jateng	Regional	Dindikpora
63	Medali Emas Cabor Gita Ariesta di PORPROV XVI Jateng An. Gita Ariesta	PORPROV XVI Jateng	Regional	Dindikpora
64	RSUD Temanggung penghargaan dalam bidang keselamatan dan keamanan nuklir kegiatan Radiologi Diagnostik dan Intervensial - Anugerah BAPETEN 2023	BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir)	Nasional	RSUD Tmg
65	RSUD Temanggung sertifikat Akreditasi Rumah Sakit status paripurna	Direktur Utama Lembaga Akreditasi Rumah sakit DHP (LARS-DHP)	Nasional	RSUD Temanggung
66	Krenova Provinsi-Ijuk Ulir Ranjau Binatang-juara Harapan	Bappeda Provinsi Jateng	Regional	Bappeda

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	SKALA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
67	Olimpiade sains nasional tingkat provinsi (osn-p) jenjang sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (smp/mts) tahun 2023 An. M Ridwan Damarjati Wijaya (SMP2 Temanggung)	Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	Regional	Dindikpora
68	Kabupaten/ Kota Sehat (KKS) atau Swasti Saba Kategori Padapa Tahun 2023	Kementrian Kesehatan Republik Indonesia	Nasional	Dinkes
69	Kabupaten Terinovatif Tingkat Nasional Innovation Government Award (IGA) Tahun 2023	Kementrian Dalam Negeri	Nasional	Bappeda
70	Penghargaan atas tercapainya angka jaminan kesehatan masyarakat atau Universal Health Coverage (UHC) sebesar 95,44 % di Kabupaten Temanggung tahun 2023	BPJS kesehatan	Regional	Dinkes/ Pemkab Temanggung
71	Anugerah Meritokrasi 2023	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Nasional	BKPSDM
72	Pemenuhan Tingkat Kematangan UKPBJ Level 3 Proaktif	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Regional	PBJ
73	Penghargaan Anugrah PDSD dengan kategori Sangat Tinggi (3,952)	Gubernur Jateng	Regional	BAPPEDA
74	Penghargaan Anugrah PDSD untuk Dokumen Evaluasi PDSD Terbaik I Provinsi Jawa Tengah tahun 2023	Gubernur Jateng	Regional	BAPPEDA
75	Juara I Medali Emas Olimpiade Pendidikan Agama Islam Nasional ke 2 Zona Jawa Tengah An Husna Dzakiyyah (SDN I Jampiroso)	DPP AGPAII (Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia)	Regional	Dindik
76	Badan Publik Informatif kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam Keterbukaan Informasi Award 2023 Jawa Tengah	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	Regional	Dinkominfo
77	Badan Publik Pemerintah desa di Provinsi Jawa Tengah kategori informatif (Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	Regional	Dinkominfo

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	SKALA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	Desa Gilingsari, Kec. Temanggung dalam Keterbukaan Informasi Award 2023 Jawa Tengah			
78	Desa Bansari, Kecamatan Bansari, Juara 1 dalam Kompetisi Nugraha Karya Desa BRILian Tahun 2023	BRI	Nasional	Pemdes Bansari

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2023

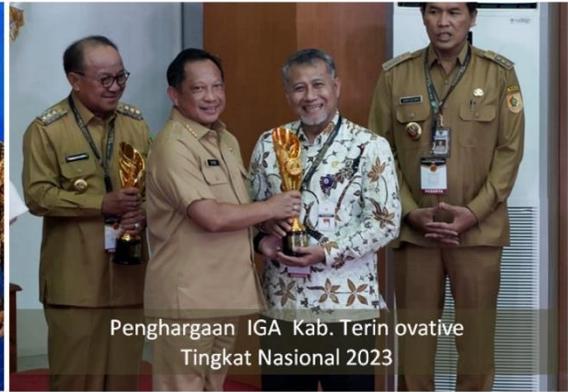
DOKUMENTASI KOMPETISI DAN PIAGAM PENGHARGAAN KABUPATEN TEMANGGUNG







Penghargaan Juara I PPD Tingkat Nasional 2023



Penghargaan IGA Kab. Terin ovative Tingkat Nasional 2023



Penghargaan Juara III SDGs Tingkat Nasional 2023



Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra dari KLHK 2022



Penghargaan Juara I PPD Tingkat Jateng 2023



Shibiru Menerima Penghargaan Kalapataru Tingkat Jateng 2023

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024 menggambarkan kebijakan perekonomian daerah yang diambil sebagai dasar pencapaian bagi sasaran indikator ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi ini memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Temanggung yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global, sedangkan kerangka pendanaan daerah memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan daerah tahun 2024.

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perumusan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung dilakukan dengan memperhatikan kondisi perekonomian global, nasional, dan daerah serta mengacu arah kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Tengah serta sesuai arah dan kebijakan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

3.1.1. Kondisi Perekonomian Global dan Nasional

Pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut pada tahun 2023 ditengah pertumbuhan ekonomi dunia yang menurun dan ketidakpastian pasar keuangan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 tetap tinggi ditopang oleh permintaan domestik yang kuat, stabilitas perekonomian yang terjaga, neraca pembayaran yang baik, stabilitas nilai tukar rupiah yang terjaga dan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran.

Tantangan dan kondisi yang mewarnai ekonomi global tahun 2023 serta berpotensi masih akan terjadi di Tahun 2024 yang menjadi perhatian antara lain:

1. Konflik geopolitik (perang Ukraina-Rusia, Israel-Palestina, konflik Semenanjung Korea, tensi AS-Tiongkok-Taiwan, perang dagang Amerika-Tiongkok) yang mempengaruhi rantai pasok, meningkatkan volatilitas harga komoditas;
2. Pertumbuhan ekonomi global yang melemah dan disertai melebarnya divergensi pertumbuhan antar negara (*slower and divergent growth*);
3. Penurunan inflasi yang melambat (*gradual disinflation*);
4. Suku bunga yang tinggi dalam waktu yang lama (*higher interest for longer*);
5. Arus modal keluar karena lonjakan *yield* USD mendorong *capital outflow* dari *Emerging Market*;
6. Nilai tukar Dollar AS tetap kuat (*strong dollar*);
7. Peningkatan kebijakan perdagangan dan industri yang proteksionis (*Geoeconomic fragmentation*);
8. Perubahan iklim (cuaca ekstrem dan bencana).

Proyeksi pertumbuhan ekonomi baik dari *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank* (WB), *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan *Asian Development Bank* (ADB) menunjukkan pelemahan. IMF (rilis Oktober 2023) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 Global/Dunia tumbuh sebesar 2,9 persen, negara Amerika Serikat tumbuh sebesar 1,5 persen, Negara Eropa tumbuh sebesar 1,2 persen, Jepang tumbuh sebesar 1,0 persen, Tiongkok tumbuh sebesar 4,2 persen, India tumbuh sebesar 6,3 persen dan Indonesia tumbuh sebesar 5,0 persen.

World Bank (WB) (rilis Januari 2024) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 Global/Dunia tumbuh sebesar 2,4 persen, negara Amerika Serikat tumbuh sebesar 1,6 persen, negara Eropa tumbuh sebesar 0,7 persen, Jepang tumbuh sebesar 0,9 persen, Tiongkok tumbuh sebesar 4,5 persen, India tumbuh sebesar 6,4 persen dan Indonesia tumbuh sebesar 4,9 persen.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (rilis November 2023) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 negara Amerika Serikat tumbuh sebesar 1,5 persen, negara Eropa tumbuh sebesar 0,9 persen, Jepang tumbuh sebesar 1,0 persen, Tiongkok tumbuh sebesar 4,7 persen, India tumbuh sebesar 6,1 persen dan Indonesia tumbuh sebesar 5,2 persen.

Asian Development Bank (ADB) (rilis September 2023) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 negara Tiongkok tumbuh sebesar 4,5 persen, Vietnam tumbuh sebesar 6,0 persen, Thailand tumbuh sebesar 3,7 persen, Malaysia tumbuh sebesar 4,9 persen, India tumbuh sebesar 6,7 persen dan Indonesia tumbuh sebesar 5,0 persen, selanjutnya IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2025 tumbuh sebesar 3,0 persen, pertumbuhan negara maju sebesar 1,7 persen, pertumbuhan negara berkembang sebesar 3,8 persen.

Meskipun terdapat perlambatan ekonomi global, masih terdapat harapan terjadinya perbaikan ekonomi global di Tahun 2024. Tanda-tanda membaik (*upside risks*) dapat dilihat dari: (1) Tekanan inflasi telah mereda namun melambat penurunannya; (2) Perlambatan laju pengetatan moneter; (3) Potensi sumber pertumbuhan baru (ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru). Disisi lain terdapat beberapa resiko (*downside risk*) antara lain: (1) Peningkatan tensi geopolitik; (2) Geo-economic fragmentation; (3) Pelemahan ekonomi Tiongkok; (4) Terbatasnya *policy space* (fiskal); (5) Peningkatan resiko *debt distress*; (6) Shock akibat perubahan iklim.

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,83 persen. Kontributor yang penting dalam mendukung kuatnya ekonomi Indonesia adalah konsumsi rumah tangga yang masih terjaga tumbuh di 4,82 persen dari sisi pengeluaran dan sektor manufaktur tumbuh 4,64 persen dari sisi produksi. Aktivitas konsumsi

yang tetap kuat ini didukung oleh inflasi yang terkendali dan peran APBN sebagai shock absorber dalam menjaga daya beli masyarakat.

Selain angka pertumbuhan ekonomi nasional tersebut, gambaran membaiknya kondisi kualitas ekonomi nasional juga terlihat pada sektor ketenagakerjaan dan angka kemiskinan. Tingkat Pengangguran Terbuka per Agustus tahun 2023 turun menjadi 5,32 persen dibandingkan capaian tahun 2022 yaitu sebesar 5,86 persen. Sedangkan angka kemiskinan nasional juga mengalami perkembangan yang positif per Maret tahun 2023 yaitu turun menjadi sebesar 9,36 persen dibandingkan per September tahun 2022 yaitu 9,57 persen.

Hal yang perlu menjadi perhatian khusus adalah meningkatnya angka inflasi tahun 2023 yang berada pada posisi sebesar 2,61 persen, mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan capaian tahun 2022 yaitu sebesar 5,51 persen.

3.1.2. Proyeksi dan dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat ditengah kondisi ketidakpastian global. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2023 tetap tumbuh sebesar 5,05 persen (c-to-c), sedikit melambat dibanding Tahun 2022 sebesar 5,31 persen (c-to-c). Seluruh komponen pengeluaran tumbuh positif pada Tahun 2023, kecuali impor yang mengalami kontraksi sebesar 1,65 persen. Komponen Konsumsi LNRT tumbuh tinggi didorong aktivitas persiapan Pemilu baik dilakukan oleh Peserta Pemilu maupun Penyelenggara Pemilu. Kemudian Konsumsi Rumah Tangga dan PMTB (Investasi) masih merupakan penyumbang utama PDB pada Tahun 2023 dengan akumulasi kontribusi sebesar 82,51 persen. Sedangkan menurut lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap PDB adalah industri pengolahan (18,67 persen), perdagangan (12,94 persen), pertanian (12,53 persen), pertambangan (10,52 persen), dan konstruksi (9,92 persen) melanjutkan tren pertumbuhan positif.

Perekonomian Indonesia Tahun 2023 tetap tumbuh baik dan berdaya tahan, ditengah perlambatan global dan ketidakpastian yang tinggi. Kondisi perlambatan global dan ketidakpastian yang tinggi seperti

(1) Pertumbuhan ekonomi global yang melemah; (2) Penurunan inflasi global yang melambat; (3) Suku bunga yang tinggi dalam waktu yang lama; (4) Perdagangan global tumbuh negatif yang utamanya disebabkan penurunan nilai perdagangan barang, harga komoditas unggulan perdagangan Indonesia (Kelapa Sawit, Batubara, Nikel, Gas Alam, Minyak Mentah) nilainya mengalami penurunan; (5) Prompt Manufacturing Index (PMI) atau Indeks Manufaktur Global masih berada di zona ekspansif.

Peningkatan kualitas pemulihan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 5,32 persen pada tahun 2023 dari 5,86 persen pada tahun 2022. Sementara, angka kemiskinan nasional pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, turun dibandingkan September 2022 sebesar 9,57 persen. Tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur menggunakan Rasio Gini meningkat dari sebelumnya 0,381 pada September 2022, menjadi 0,388 pada maret 2023. Berbagai program afirmasi pada pada kelompok miskin dan rentan serta program-program perlindungan sosial lainnya terus dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan.

Saat ini ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga walaupun menghadapi gejolak perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi di Tahun 2023 mencapai 5,05 persen (c-to-c). Laju inflasi dalam tren yang menurun, tercatat sebesar 2,61 persen (yoy) pada tahun 2023. PDB Perkapita 2023 meningkat sebesar 74,96 juta jiwa. Dengan mempertimbangkan berbagai resiko, game changers transformasi ekonomi (Industrialisasi, Transisi Energi, Integrasi Infrastruktur Konektivitas, Super Platform, Pembangunan IKN, dan Anggaran IPTEKIN) dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan, target indikator makro nasional Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1.
Kondisi Eksisting dan Kerangka Ekonomi Makro Nasional
Tahun 2018-2025

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,1-5,5
2	Inflasi	%	2,5 ± 1
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,0
4	Angka Kemiskinan	%	6,0-7,0
5	Rasio Gini	Angka	0,379 –
6	Indeks Modal Manusia (GNI) Per Kapita	USD	5.500

Sumber: BPS, 2024

3.1.3. Kondisi Perekonomian Jawa Tengah

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 tumbuh positif sebesar 5,31 persen (c-to-c). Ekonomi Jawa Tengah terus tumbuh sedikit melambat pada Tahun 2023 sebesar 4,98 persen (c-to-c), pemulihan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah terus berlanjut ditengah pelambatan ekonomi global.

Struktur Perekonomian Jawa Tengah didukung oleh sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, jasa Pendidikan serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pariwisata. Tahun 2023 semua sektor dalam lapangan usaha tumbuh positif dan yang mencatat pertumbuhan tertinggi adalah sektor akomodasi makan minum sebesar 11,24 persen dan informasi dan komunikasi sebesar 10,67 persen hal tersebut seiring meningkatnya kunjungan wisatawan ke Jawa Tengah dan aktivitas Pemilu.

Sementara itu, dari sisi komponen pengeluaran pertumbuhan terbesar didukung dari pengeluaran konsumsi LNRT (7,34 persen), pengeluaran konsumsi rumah tangga (5,68 persen), dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (4,36 persen). Sementara ekspor Jawa Tengah hanya sebesar 0,87 persen akibat perekonomian di negara mitra dagang yang mengalami perlambatan.

Laju pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 5,13 persen pada tahun 2023 dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 5,57 persen. Angka kemiskinan Jawa Tengah juga konsisten menurun, dari sebelumnya 10,98 persen di tahun 2022, turun menjadi 10,77 persen pada Maret 2023. Sedangkan inflasi di Jawa Tengah pada tahun 2023 sebesar 2,89 persen (y-o-y), turun dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 5,63 persen (y-o-y). Tingkat ketimpangan pengeluaran di Jawa Tengah yang diukur menggunakan Rasio Gini membaik, dari sebelumnya 0,392 (September 2022) turun menjadi 0,369 (Maret 2023).

Salah satu upaya meningkatkan pemerataan ekonomi adalah melalui peningkatan inklusi keuangan, adanya ketersediaan akses terhadap berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022, tingkat literasi keuangan Jawa Tengah meningkat dari tahun 2019 sebesar 47,38 persen menjadi 51,69 persen pada tahun 2022 dan inklusi keuangan di Jawa Tengah meningkat dari 65,71 persen menjadi 85,97 persen pada tahun 2022.

3.1.4. Proyeksi dan Arah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

Mendasarkan pada kondisi-kondisi tersebut, maka perekonomian Jawa Tengah tahun 2025 diproyeksikan pada kisaran angka 4,80–5,60 persen. Sedangkan inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 2,5 + 1 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah. Tahun 2025, angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 9,28-8,08 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 5,20-4,60 persen. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 47,60 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan TPT

diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,362 di tahun 2025.

Tabel 3.2.
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah
Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,80-5,60
2	PDRB per kapita	Juta Rp	48,53-48,66
3	Inflasi	%	2,5 ± 1
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,81-4,42
5	Angka Kemiskinan	%	9,28-8,08
6	Rasio Gini	Angka	0,362

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Pembangunan perekonomian Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan pada Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas; Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata; Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada:

- 1) Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah;

- 2) Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar;
- 3) Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
- 4) Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi yang memadai;
- 5) Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatandatabase petani dan peningkatan kompetensi dan ketrampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran;
- 6) Mendorong upaya pembangunan ekonomi hijau (green economy) untuk menciptakan peluang kerja baru dan investasi baru khususnya pada green jobs dan green investment dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 7) Mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan rantai nilai
- 8) halal, penguatan sektor keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro, Kecil dan
- 9) Menengah (UMKM), serta pemanfaatan dan penguatan ekonomi digital.

3.1.5. Kondisi Perekonomian Kabupaten Temanggung

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 tumbuh positif sebesar 5,2 persen, namun sedikit melambat pada Tahun 2023 menjadi sebesar 5,0 persen. Namun demikian kondisi perekonomian Kabupaten Temanggung sebagaimana kondisi Jawa Tengah maupun Indonesia, diperkirakan akan tumbuh positif dibandingkan tahun sebelumnya.

Struktur Perekonomian Kabupaten Temanggung didukung oleh sektor-sektor unggulan yang menjadi penggerak utama ekonomi di Kabupaten Temanggung, yaitu industri pengolahan, pertanian dan perdagangan. Pada tahun 2023 semua sektor dalam lapangan usaha tumbuh positif dan yang mencatat pertumbuhan tertinggi adalah sektor akomodasi makan minum sebesar 12,49 persen dan informasi dan komunikasi sebesar 11,25 persen hal tersebut seiring meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Temanggung dan aktivitas Pemilu.

Pertumbuhan Ekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 2,32 persen pada tahun 2023 dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 2,54 persen. Angka kemiskinan juga konsisten menurun, dari sebelumnya 9,33 persen di tahun 2022, turun menjadi 9,26 persen pada tahun 2023. Sedangkan inflasi pada tahun 2023 sebesar 2,89 persen (y-o-y), turun dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 5,63 persen (y-o-y). Tingkat ketimpangan pengeluaran di Jawa Tengah yang diukur menggunakan angka ketimpangan Pendapatan membaik, dari sebelumnya 18,46 pada tahun 2022 naik menjadi 19,52 pada tahun 2023.

3.1.6 Proyeksi dan dan Arah Pembangunan Kabupaten Temanggung

Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung tetap diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan daerah terutama yang bertumpu pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, industri pengolahan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sedangkan di sisi lain, pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi dan peningkatan

sumber daya manusia diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia.

Mendasarkan pada kondisi-kondisi di atas, maka perekonomian Kabupaten Temanggung tahun 2025 diproyeksikan pada kisaran angka 5,28 persen. Sedangkan inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 2,5+1 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Kabupaten Temanggung. Tahun 2025, angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 9,00-8,70 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 2,30-2,17 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,76 persen. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 47,60 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,362 di tahun 2025

Keberhasilan pencapaian target pembangunan ke depan diharapkan dapat menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka menuju angka proyeksi 2,30-2,17 persen, hal ini didukung oleh beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki tingkat pengangguran, diantaranya:

- a. Penciptaan kesempatan kerja baru melalui penumbuhan industri padat karya maupun pengembangan UMKM;
- b. Perluasan kerja di sektor informal;
- c. Peningkatan keahlian dan kompetensi tenaga kerja;
- d. Meningkatkan kemauan berwirausaha masyarakat melalui program tenaga kerja mandiri dengan fasilitas dukungan seperti peralatan usaha, pelatihan kerja serta kemudahan akses permodalan;
- e. Memperkuat sistem informasi pasar kerja; dan
- f. Perlindungan sosial bagi pekerja.

3.1.5.1. Pertumbuhan Ekonomi

Untuk menentukan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan perkembangan di Kabupaten Temanggung, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan target di tingkat provinsi dan nasional. Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2025 berada pada kisaran 5,1-5,5%. Hal ini didasarkan atas berbagai pertimbangan baik di dalam negeri maupun luar negeri, misalnya mulai adanya pemulihan ekonomi global, meningkatnya investasi, meningkatnya ekspor terutama dari sektor manufaktur, meningkatnya mobilisasi penduduk, serta peningkatan konsumsi masyarakat. Sementara itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memproyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 menjadi 4,90–5,60%.

Dengan memperhatikan kondisi di tingkat provinsi dan nasional, maka terbaca adanya optimisme bahwa pada 2025 ekonomi akan tumbuh dan diharapkan aktivitas perekonomian kembali normal. Optimisme inilah yang menjadi dasar bagi proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada tahun 2025, meskipun harus mempertimbangkan beberapa faktor yang pada akhirnya menyebabkan besaran pertumbuhan ekonomi tidak akan setinggi proyeksi pemerintah pusat maupun provinsi.

Faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung berupa investasi fisik maupun investasi modal manusia yaitu pendidikan. Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi tidak mengutamakan sisi konsumsi namun lebih ke sisi produksi yaitu peningkatan dalam jumlah maupun kualitas produksi barang dan jasa, sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dapat naik dengan meningkatkan produktivitas di setiap sektor perekonomian.

Tabel 3.3.
Pertumbuhan Ekonomi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2025

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)		
	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
2018	5,13	5,31	5,20
2019	5,05	5,36	5,00
2020	-2,13	-2,65	-2,10

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)		
	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
2021	3,34	3,33	3,70
2022	5,20	5,31	5,30
2023	5,00	4,98	5,30
2024*	5,27	5,20 - 5,60	5,30 - 5,70
2025*	5,28	4,90 - 5,60	5,1-5,5

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir menunjukkan kondisi yang fluktuatif, pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 dan puncaknya turun sampai posisi -2,13 pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 dan tahun 2022 sudah mulai menunjukkan perkembangan yang positif hingga mencapai angka 5,2%. Namun pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung tahun 2023 kembali mengalami penurunan dimana pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 turun pada angka 5,00%, begitu juga yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Beberapa upaya yang akan dilakukan guna memastikan pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan lebih baik lagi diantaranya peningkatan produktivitas sektor kearifan lokal seperti pertanian yang dapat ditingkatkan dengan cara:

- a. Mendorong minat berusaha di bidang pertanian;
- b. Peningkatan teknologi pertanian;
- c. Mendorong persaingan yang sehat dalam jual beli sektor pertanian;
- d. Pengembangan jenis komoditas agar berhasil guna;
- e. Membuka peluang ekspor ke daerah lain;
- f. Mendorong ekonomi kreatif semakin berkembang
- g. Digitalisasi usaha produk pertanian, dan lain-lain.

3.1.5.2. Struktur Ekonomi

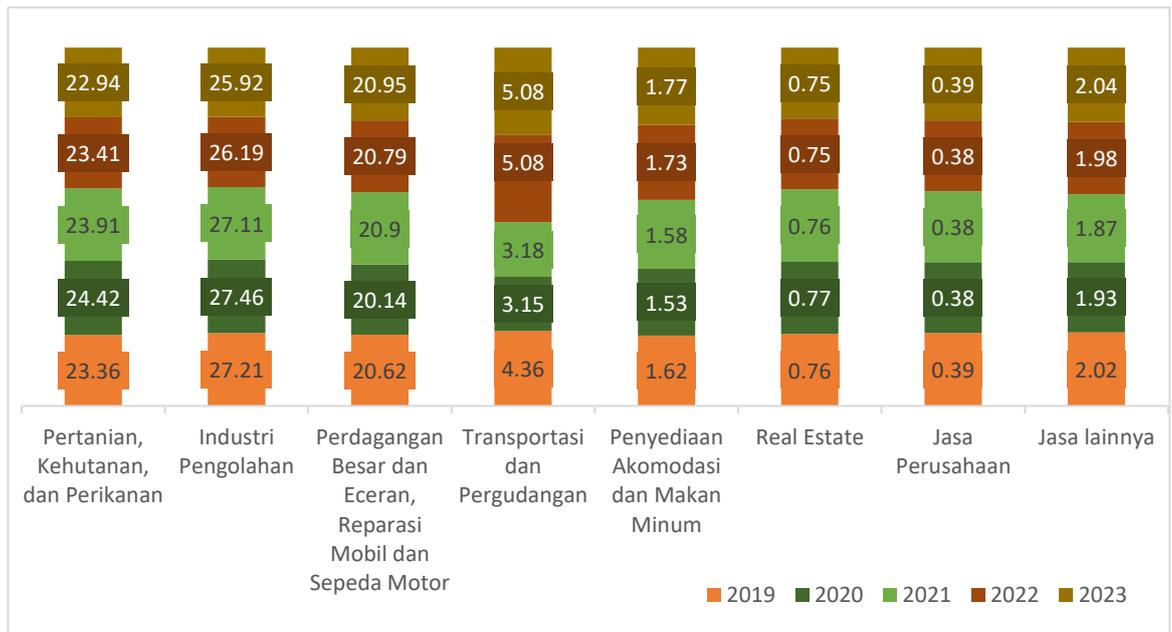
Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung atas dasar harga konstan selama jangka waktu 5 tahun terakhir menunjukkan pergerakan dan pergeseran di beberapa sub sektor. Struktur ekonomi Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.4.
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung ADHK
Tahun 2018-2023

	LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.36	1.73	1.86	0.86	2,92	1,82
B	Pertambangan dan Penggalian	3.61	4.24	2.11	6.75	-3.94	3,12
C	Industri Pengolahan	5.63	4.39	-0.62	2.00	1,09	4,32
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.62	4.22	2.87	4.84	5,26	5,86
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.67	4.74	2.02	5.62	0,22	4,36
F	Konstruksi	5.79	8.15	-2.01	7.54	3,72	7,77
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.79	5.39	-3.79	7.40	4,30	5,82
H	Transportasi dan Pergudangan	4.53	9.29	-30.59	2.37	65,39	7,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.24	9.41	-6.81	6.03	15,04	12,49
J	Informasi dan Komunikasi	11.05	15.69	14.14	5.98	2,24	11,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.17	3.73	2.01	3.42	0,51	2,91
L	Real Estate	4.65	7.21	-0.10	2.32	5,80	8,36
M,N	Jasa Perusahaan	8.77	10.21	-6.32	3.01	5,65	8,82
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.11	3.41	-1.61	-0.26	1,60	5,11
P	Jasa Pendidikan	5.98	8.16	-0.19	0.54	1,63	6,96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.86	8.22	7.70	0.59	2,59	8,32
R,S,T,U	Jasa lainnya	7.87	8.33	-6.22	0.98	10,95	8,83
	PDRB	5,13	5,05	-2,13	3,34	5,20	5,00

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penentuan pertumbuhan ekonomi adalah sektor pendukung utama. Tiga sektor utama yang menjadi penggerak utama ekonomi di Kabupaten Temanggung, yaitu industri pengolahan, pertanian dan perdagangan. Meskipun 3 sektor tersebut adalah penggerak utama perekonomian Kabupaten Temanggung, akan tetapi 3 sektor tersebut tidak memiliki pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya.



Sumber: BPS Kab Temanggung 2024

Gambar 3.1.
Persentase Sumbangan Sektor Utama terhadap PDRB
Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023



Sumber: BPS Kab Temanggung 2024

Gambar 3.2.
Lapangan Usaha dengan Pertumbuhan Tertinggi
di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

Struktur lapangan usaha Kabupaten Temanggung mulai tahun 2018 sedikit bergeser dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan ke lapangan usaha industri pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya peranan lapangan usaha kategori Industri Pengolahan tahun 2018 sampai 2023 yang nilainya lebih besar dibandingkan dengan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Meningkatnya permintaan akan produk barang jadi dan barang setengah jadi baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional telah mendorong perkembangan Industri Pengolahan menjadi lapangan usaha yang terbesar kontribusinya dalam pembentukan PDRB Kabupaten Temanggung. Hal ini didukung dengan pertumbuhan lapangan usaha sektor Transportasi Pergudangan dengan sektor pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 65,39% diikuti oleh sektor Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 15,04% yang didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat serta peningkatan kunjungan wisatawan, baik wisatawan lokal maupun daerah tetangga.

3.1.5.3. PDRB per Kapita

PDRB Perkapita menggambarkan rata-rata besarnya output barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk pada suatu daerah selama satu tahun. Semakin besar PDRB Perkapita suatu daerah dapat menggambarkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut. Penghitungan pendapatan yang benar-benar diterima oleh penduduk Kabupaten Temanggung sampai saat ini belum dapat dilakukan, karena belum tersedianya data arus pendapatan yang mengalir antar kabupaten atau kota. Namun demikian PDRB Perkapita masih cukup relevan untuk menggambarkan apakah secara rata-rata, pendapatan masyarakat mengalami peningkatan atau tidak.

Tabel 3.5.
Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung
Tahun 2018-2023

TAHUN	NILAI (Rp)	Pertumbuhan (%)
2018	26.682.478,77	5,13
2019	28.052.969,06	5,05
2020	27.702.750,00	-2,13
2021	28.484.021,00	3,34
2022	30.930.000,00	5,20
2023	33.290.000,00	5,00

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Nilai PDRB perkapita selalu naik hal ini menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan penduduk Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun semakin membaik. Namun demikian data tersebut belum dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena produk barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Temanggung tidak hanya dimiliki/ dinikmati oleh penduduk Kabupaten Temanggung saja, akan tetapi ada yang dimiliki/ dinikmati oleh penduduk dari luar Kabupaten Temanggung yang melakukan investasi di Kabupaten Temanggung.

Pada tahun 2023 PDRB Perkapita mengalami peningkatan dengan pertumbuhannya menjadi 5,00%.

Peningkatan pendapatan perkapita dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

- a. Menaikkan investasi berdasarkan potensi daerah sampai kepada komoditas;
- b. Meningkatkan program kewirausahaan / pengembangan UMKM / pengembangan ekonomi kreatif;
- c. Memaksimalkan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri maupun sektor penggerak perekonomian;
- d. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan keterampilan; dan
- e. Meningkatkan produksi bagi sektor potensial daerah.

3.1.5.4. Inflasi

Pentingnya kestabilan harga dan pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Angka Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan menurun sehingga standar hidup dari masyarakat juga akan ikut turun dan akhirnya akan semakin menambah berat beban ekonomi masyarakat. Tingkat inflasi yang lebih tinggi dibanding tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai mata uang rupiah.

Sejak tahun 2020 BPS hanya berwenang menghitung laju inflasi sampai level provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi daerah sampel, sedangkan Kabupaten Temanggung tidak masuk ke dalam daerah sampel sehingga angka inflasi Temanggung mengikuti inflasi Jawa Tengah.

Tabel 3.6.
Inflasi Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional

LOKASI	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*
Temanggung	2,89	2,66	1,9	2,18	5,63	2,89	3+/-1	3,0 ± 1
Jawa Tengah	2,82	2,81	1,56	1,28	5,63	2,89	3+/-1	3,0 ± 1
Nasional	3,13	2,72	1,9	1,6	5,51	2,61	3+/-1	3,0 ± 1

*Keterangan : *Proyeksi | Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2024*

Laju inflasi di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023 cukup fluktuatif. Tinggi rendahnya angka inflasi salah satunya dipengaruhi oleh gejolak perubahan harga yang diantaranya disebabkan ketersediaan atau stok barang yang tidak sesuai dengan jumlah permintaan dan juga karena adanya kenaikan biaya produksi misalnya kenaikan bahan baku maupun kenaikan biaya untuk pekerja. Pada tahun 2023 inflasi di Tingkat Kabupaten Temanggung, Provinsi dan Nasional mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2022. Pencapaian ini tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi yang kuat berbagai pihak melalui TPIP-TPID dalam mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian yang masih tinggi salah satunya gangguan cuaca dari El Nino.

Dengan mendasarkan atas data kondisi ekonomi Kabupaten Temanggung di atas dan arah kebijakan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, maka arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah:

- 1) Meningkatkan investasi berdasarkan potensi daerah dalam rangka menciptakan lapangan kerja;
- 2) Optimalisasi pemakaian produk dalam negeri guna menguatkan potensi produk lokal unggulan daerah;
- 3) Penekanan laju inflasi melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
- 4) Pengembangan pariwisata dan kebudayaan berwawasan lingkungan.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan daerah diatur oleh pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Keuangan daerah disusun setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah dengan berdasarkan pada program (*money follow program*), penyelesaian isu strategis dan permasalahan di daerah, serta mendukung pencapaian target RPD tahun 2024-2026. APBD merupakan salah satu instrumen penting kebijakan fiskal daerah, di mana kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan

penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu daerah.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dan mendukung pemulihan serta penguatan ekonomi daerah, diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengedepankan kriteria kinerja yang dinamis dan strategis untuk mendorong daerah lebih kompetitif, seperti penurunan angka pengangguran, kinerja pengendalian inflasi, indeks pencegahan korupsi;
- b. Mendorong kemandirian daerah dan peningkatan kualitas belanja APBD;
- c. Mempertajam indikator yang selaras dengan pencapaian prioritas nasional;
- d. Memperkuat indikator yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional;
- e. Penyaluran berdasarkan kinerja tahun sebelumnya dan kinerja tahun berjalan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang berimplikasi pada kebijakan daerah dan desentralisasi fiskal sebagai akibat adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah. Tujuannya adalah untuk semakin meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) diharapkan dapat mengoptimalkan dan menguatkan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pemerataan kesejahteraan di daerah.

Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemampuan daerah akan mencerminkan daya dukung manajemen

pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.

Memperhatikan berbagai kondisi obyektif masyarakat, aspirasi yang berkembang dan mensinergikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan 8 arah kebijakan prioritas yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kebijakan keuangan daerah yang erat kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah serta mendukung arah kebijakan pembangunan RPD Kabupaten Temanggung tahun 2025 yaitu **“Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif,**

percepatan pertumbuhan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik”, dengan fokus utama pada:

1. Prioritas dan fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yaitu:
 - a. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif melalui peningkatan prestasi pemuda dan olahraga, optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi;
 - b. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan;
 - c. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik.
2. Dukungan implementasi kebijakan nasional pada:
 - a. penurunan stunting menjadi 14 persen;
 - b. penurunan angka kemiskinan;
 - c. pengendalian inflasi daerah;

Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPD tahun 2025 melalui peningkatan penerimaan daerah, dan penajaman alokasi belanja serta upaya-upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

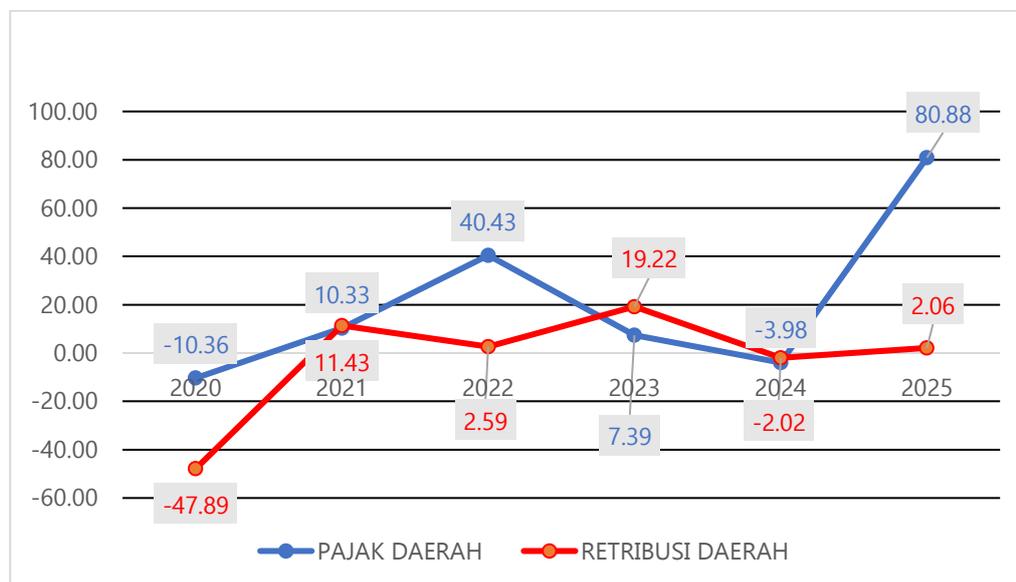
Penerimaan Pendapatan Daerah di tahun 2025 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan penerimaan pendapatan tahun 2024. Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang pemungutannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan peraturan perundang-undangan. Kemampuan untuk menghimpun PAD dipengaruhi oleh beberapa hal, namun yang paling krusial adalah seberapa besar pertumbuhan sektor konsumsi, khususnya untuk barang kena Pajak Daerah. Pendapatan Transfer merupakan penyaluran pendapatan dari Pemerintah yang sifatnya sangat dinamis artinya memperhatikan penerimaan Pendapatan Negara, serta pemenuhan terhadap prioritas belanja yang ditentukan oleh Pemerintah. Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah yang bersumber selain dari PAD.

Kebijakan Pemerintah dalam menetapkan proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2025 tetap mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan dari pada pertumbuhan yang agresif, sehingga proses perhitungan proyeksi Pendapatan Daerah pada Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2025 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi dengan memertimbangkan berbagai perkembangan perekonomian dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Optimalisasi pemungutan PAD merupakan prioritas, yang terdiri atas 4 jenis dan memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu: (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang sah, di mana sampai dengan saat ini sektor Pajak Daerah masih menjadi sumber penerimaan utama bagi PAD Kabupaten Temanggung selain Pendapatan BLUD.

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Proyeksi Penerimaan dari Pendapatan Transfer sepenuhnya tergantung pada Pemerintah Pusat, karena data penetapan pembagian sementara dan pembagian definitif untuk Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan,

sehingga hanya bersifat koordinasi dan konfirmasi. Sedangkan untuk pemetaan potensi objek pajak tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah fungsinya hanya melaksanakan pencocokan atau rekonsiliasi kas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.



Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung, 2024.

Gambar 3.3.
Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025

Pertumbuhan Pajak Daerah di Kabupaten Temanggung mengalami kondisi yang fluktuatif, mengalami penurunan pada tahun 2020 karena dampak pandemi *Covid-19* namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan 2022, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2024 dan naik kembali pada tahun 2025. Pajak daerah didominasi oleh pajak penerangan jalan dan pajak bumi dan bangunan. Pertumbuhan Retribusi daerah juga mengalami kondisi yang fluktuatif, pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi *Covid-19*, kemudian naik pada tahun 2021 dan turun kembali pada tahun 2022. Pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan dan turun kembali pada tahun 2024, sedangkan pada tahun 2025 diproyeksikan naik sebesar 2,06%. Retribusi terbanyak pada retribusi jasa umum yaitu retribusi pelayanan pasar.

Beberapa asumsi yang digunakan dalam melakukan proyeksi terhadap komponen pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

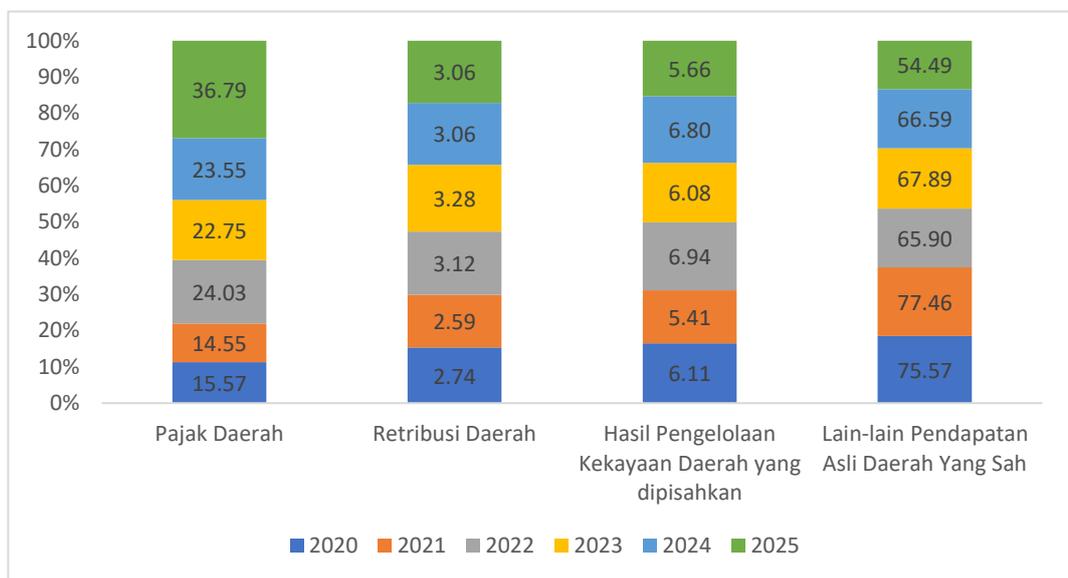
1. Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat dikatakan belum proporsional, karena prosentase proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah masing sangat rendah. Kontributor terbesar PAD berasal dari sektor Lain-lain PAD yang Sah yaitu Pendapatan BLUD. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan PAD pada RKPD Tahun 2025 adalah dengan memperhatikan karakteristik masing-masing jenis pungutan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pertumbuhan objek pajak daerah (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)) diperkirakan sama atau sedikit lebih tinggi dari tahun 2024;
 - b. Optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah, berasal dari penambahan objek baru dan penyesuaian tarif Retribusi Daerah. Digitalisasi penerimaan pendapatan retribusi yang terus digalakkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memudahkan transaksi pembayaran dan pengawasan realisasi pendapatan khususnya pada pendapatan retribusi Los/Kios Pasar;
 - c. Optimalisasi penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yaitu dengan meningkatkan kinerja BUMD sehingga dapat menghasilkan Dividen atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
 - d. Optimalisasi Penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yaitu dengan Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan.
2. Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan transfer diproyeksikan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Perimbangan (DBH dan DAU diperkirakan sama atau naik sedikit dibanding dengan Tahun Anggaran 2024, DAK Fisik dan Non Fisik yang bersifat in out, Dana Insentif Fiskal, dan Dana Desa diperkirakan sama dengan Tahun Anggaran 2024);

- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diperkirakan naik sedikit dibanding dengan Tahun Anggaran 2024, namun untuk Bantuan Keuangan yang bersifat in out dianggarkan sesuai dengan usulan/hasil verifikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah ini belum dapat diproyeksikan dikarenakan:
 - a. Pendapatan hibah belum dapat dipastikan perolehannya pada Tahun Anggaran 2025 karena pengalokasian pendapatan ini berdasarkan perjanjian hibah daerah antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Pihak Ketiga. Pendapatan hibah yang berasal dari sumbangan pihak ketiga juga belum dapat dipastikan karena pengalokasian pendapatan ini berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Pihak Ketiga.
 - b. Dana Darurat selama ini Pemerintah Kabupaten Temanggung belum pernah mendapatkan;
 - c. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tidak bisa diprediksi karena merupakan dana dari pemerintah yang bersifat insidesial.

Pendapatan daerah tidak terlepas dari asumsi-asumsi, diantaranya: kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional; Kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah diantaranya alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM; Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya; dan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

Dari Tabel 3.8 dapat dilihat bahwa proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan pendapatan tahun anggaran sebelumnya. Kenaikan pendapatan tertinggi yaitu pada pendapatan transfer. Sedangkan untuk PAD hanya naik sedikit dimana Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berupa pendapatan BLUD menjadi salah satu penyumbang kenaikannya.

Gambar 3.4.
Pendapatan Kabupaten Temanggung



Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2024

Tabel 3.7
Realisasi Pendapatan Kabupaten Temanggung

URAIAN	TAHUN ANGGARAN						PROYEKSI 2025
	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	APBD Penetapan 2024	
PENDAPATAN DAERAH	1.878.383.823.68₂	1.830.846.293.34₇	1.971.005.990.029	1.895.472.010.883	2.003.870.332.66₄	1.961.368.868.95₁	1.946.935.976.641
1 Pendapatan Asli Daerah	278.313.775.793	307.488.084.365	363.128.342.571	308.693.982.914	350.283.014.437	329.883.442.623	376.195.806.669
a. Pajak Daerah	53.424.094.046	47.887.604.813	52.832.020.942	74.191.559.232	79.677.967.921	76.510.647.700	138.389.282.596
b. Retribusi Daerah	16.189.001.249	8.436.169.882	9.400.033.763	9.643.158.066	11.496.721.044	11.264.340.000	191.392.376.170
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	14.571.585.064	18.800.858.165	19.633.082.917	21.426.146.839	21.311.076.903	22.109.728.797	21.311.076.903
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	194.129.095.434	232.363.451.505	281.263.204.949	203.433.118.777	237.797.248.569	219.998.726.126	25.103.071.000
2 Pendapatan Transfer	1.530.401.293.30₆	1.451.579.818.98₂	1.537.846.595.458	1.585.778.027.969	1.653.587.318.22₇	1.631.485.426.32₈	1.570.740.169.972
a. Transfer Pemerintah Pusat	1.416.959.014.266	1.350.758.939.77₃	1.385.928.637.379	1.448.787.218.335	1.517.163.835.08₇	1.501.341.698.14₉	1.489.425.840.035
1) Dana Perimbangan	1.133.246.263.266	1.046.565.618.773	1.120.897.599.379	1.223.724.012.200	1.245.317.994.087	1.245.002.504.149	1.250.105.264.035
a) Dana Transfer Umum-DBH	45.213.757.136	52.880.696.555	66.832.564.275	50.975.465.200	75.150.038.079	70.916.484.149	76.020.400.035
b) Dana Transfer Umum-DAU	828.948.502.000	762.027.309.000	753.140.119.000	753.174.275.000	791.039.886.585	820.750.031.000	820.750.031.000

URAIAN	TAHUN ANGGARAN						PROYEKSI 2025
	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	APBD Penetapan 2024	
c) Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	92.570.658.000	55.578.330.000	131.534.286.845	153.727.447.000	109.544.079.906	71.224.680.000	71.223.524.000
d) Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik	166.513.346.130	176.079.283.218	169.390.629.259	265.846.825.000	269.583.989.517	282.111.309.000	282.111.309.000
2) Dana Insentif Daerah	41.768.103.000	56.311.496.000	17.149.213.000	2.438.134.000	29.383.259.000	-	-
3) Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-
4) Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-	-	-
5) Dana Desa	241.944.648.000	247.881.825.000	247.881.825.000	245.879.771.000	242.462.582.000	239.320.576.000	239.320.576.000
6) Insentif Fiskal						17.018.618.000	-
b) Transfer antar Daerah	113.442.279.040	100.820.879.209	151.917.958.079	136.990.809.634	136.423.483.140	130.143.728.179	81.314.329.937
1) Pendapatan Bagi Hasil	102.323.566.038	94.165.118.971	114.087.366.818	117.486.242.600	123.749.375.637	130.143.728.179	81.314.329.937
2) Bantuan Keuangan	11.118.713.002	6.655.760.238	37.830.591.261	15.975.000.000	12.674.107.503	0	0
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	69.668.754.583	71.778.390.000	70.031.052.000	1.000.000.000	0	0	0
a. Hibah	0	0	571.300.000	1.000.000.000	0	0	0

URAIAN	TAHUN ANGGARAN						PROYEKSI 2025
	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	APBD Penetapan 2024	
b. Dana Darurat	0	0	0	0	0	0	0
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	69.668.754.583	71.778.390.000	69.459.752.000	0	0	0	0

Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung, 2024

Dari gambar 3.7 terlihat bahwa komponen pembentuk pendapatan daerah terbesar bersumber dari pendapatan transfer. Pendapatan transfer memberikan kontribusi yang paling tinggi terhadap pendapatan daerah yaitu rata-rata sebesar 81,10%, kemudian dari sektor PAD rata-rata sebesar 17,10% dan sisanya berupa Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah rata-rata sebesar 1,61%. Pada tahun 2023 realisasi pendapatan daerah mengalami peningkatan, baik di sektor Pendapatan Asli Daerah maupun dari sektor Pendapatan Transfer. Peningkatan yang tinggi pada proyeksi pendapatan Tahun Anggaran 2025 di komponen pajak daerah adalah adanya pendapatan opsen PKB dan opsen BBNKB. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Sedangkan peningkatan sektor Retribusi Daerah disebabkan pengalihan pencatatan pendapatan pelayanan kesehatan BLUD yang semula pada rekening Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ke rekening Retribusi Daerah.

Dalam rangka mendukung upaya-upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah, maka ditetapkan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemutakhiran data subyek/obyek sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memperbaiki sistem, mekanisme, dan prosedur pengelolaan dan pelayanan pendapatan asli daerah;
- c. Melakukan review atas peraturan yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah dan melakukan kajian guna mengembangkan dan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah;
- d. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pemungut dan pengelola pendapatan asli daerah;
- e. Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi, serta memberikan penghargaan dan sanksi guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak;
- f. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan;

- g. Memperbaiki sistem pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi yang dilakukan pihak lain;
- h. Peningkatan pendayagunaan aset milik pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
- i. Meningkatkan tata kelola dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- j. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal dengan perangkat daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat berjalan efektif.

Mengingat kemampuan pendapatan asli daerah yang sangat terbatas, maka pemerintah daerah perlu menggali sumber-sumber pendanaan lain di luar APBD Kabupaten Temanggung seperti mengoptimalkan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan, badan- badan sosial, komunitas, dan organisasi yang ada di Kabupaten Temanggung termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan daerah, serta sumber pembiayaan lain.

3.2.2 Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah, disebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah dan disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD. Sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

1. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Prioritas kebijakan belanja operasi pada RKPD Tahun 2025 ini fokus pada:
 - a. belanja rutin Perangkat Daerah seperti belanja gaji pegawai dan belanja barang dan jasa operasional pada program penunjang urusan perangkat daerah;
 - b. belanja hibah kepada kelompok yang menunjang Prioritas Nasional dan capaian kinerja yang masih dalam status upaya keras seperti belanja hibah bibit tanaman produktif, bibit ikan, bibit ternak, dan peralatan pengolahan hasil pertanian;
 - c. belanja bantuan sosial dalam rangka pencapaian target kemiskinan ekstrem pada angka 0 pada tahun 2025 dan penurunan angka stunting melalui bantuan sosial jaminan kesehatan masyarakat miskin, bantuan sosial kepada KUBE, dan Bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni
2. Belanja Modal, adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya

pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset lainnya dan aset tak berwujud. Prioritas kebijakan belanja modal pada RKPD Tahun 2025 ini fokus pada:

- a. Belanja modal jalan yang mendukung Pengembangan Wilayah gelangmanggung;
 - b. Belanja modal jaringan dan irigasi yang mendukung pemerataan insfrastruktur wilayah guna peningkatan pertumbuhan ekonomi;
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dirinci atas jenis belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Prioritas kebijakan belanja transfer pada RKPD Tahun 2025 ini fokus pada:
- a. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa melalui Dana Desa, Alokasi Dana Desa, BPJS Perangkat Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan pemberian insentif bagi Ketua RT/RW;
 - b. Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan insfrastruktur perdesaan.

Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah Tahun 2025 untuk peruntukkannya fokus pada program-program prioritas yang akan dicapai, antara lain:

1. Melaksanakan program prioritas sesuai sasaran dan arah kebijakan prioritas pembangunan daerah;

2. Melaksanakan program prioritas yang mendukung arah kebijakan Prioritas Nasional dan prioritas Provinsi Jawa Tengah;
3. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
4. Pemenuhan belanja daerah yang bersifat wajib untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat;
5. Melaksanakan program dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan minimal; dan
6. Melaksanakan program pembangunan daerah yang merupakan aspirasi masyarakat melalui tahapan Musrenbang.

Target dan realisasi belanja daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, APBD 2024, dan proyeksi Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah secara lengkap terinci pada tabel 3.9 dan tabel 3.10 sebagai berikut :

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019-2020

URAIAN	TAHUN ANGGARAN			
	TARGET 2019	REALISASI 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020
Belanja Tidak Langsung	1.168.792.735.222	1.138.907.139.719	1.270.761.798.151	1.213.289.339.823
Belanja pegawai	700.110.120.312	676.939.397.280	716.635.962.801	671.072.509.371
Belanja bunga	0	0	0	
Belanja subsidi	0	0	0	
Belanja hibah	62.473.200.000	58.690.565.000	71.157.887.850	68.809.177.692
Belanja bantuan sosial	23.579.612.500	22.228.162.500	8.782.520.000	7.162.252.000
Belanja bagi hasil kepada pemerintah desa / kelurahan	5.290.146.750	5.259.573.640	6.502.600.000	6.484.504.647
Belanja bantuan keuangan	376.839.655.660	375.789.441.299	411.446.563.600	409.802.732.000
Belanja tidak terduga	500.000.000	0	56.236.263.900	49.956.004.113
Belanja langsung	777.872.643.706	702.126495.551	632.656.988.840	569.915.609.275
Belanja pegawai	108.344.310.197	101.536.316.068	132.227.665.531	122.876.914.568
Belanja barang dan jasa	407.120.036.216	377.340.991.916	384.614.415.039	344.955.640.184
Belanja modal	262.408.297.293	223.249.187.567	115.814.908.270	102.083.054.523
Total Jumlah Belanja	1.946.665.378.928	1.841.033.635.270	1.903.418.786.991	1.783.204.949.098

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2024

Tabel. 3.9
Target dan Realisasi Tahun 2021 - 2023, APBD 2024 dan Proyeksi Tahun 2025
Belanja Daerah Kabupaten Temanggung

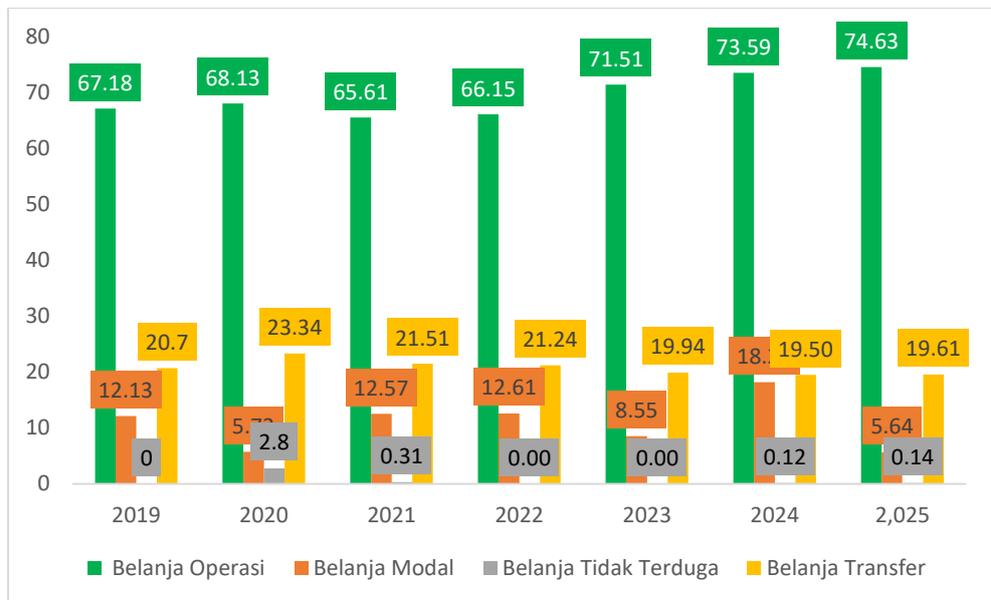
URAIAN	TAHUN ANGGARAN							PROYEKSI 2025
	TARGET 2021	REALISASI 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023	APBD 2024 Penetapan	
BELANJA DAERAH	2.053.340.949.247	1.877.969.167.294	2.163.271.983.090	1.958.748.409.806	2.156.455.999.239	2.042.295.812.083	2.098.911.972.717	2.076.390.105.919
1. Belanja Operasi	1.373.906.713.450	1.232.194.234.987	1.455.371.245.698	1.295.686.749.508	1.545.029.674.070	1.460.421.030.081	1.549.564.934.300	1.540.590.671.300
a. Belanja Pegawai	717.818.927.664	681.107.527.533	785.276.004.360	710.731.632.791	803.840.649.421	889.665.000.241	891.973.887.571	889.802.050.241
b. Belanja Barang dan Jasa	545.881.225.141	458.561.990.957	575.681.578.758	492.943.591.757	584.018.730.999	500.030.196.074	552.080.765.984	499.861.283.074
c. Belanja Bunga	0	0	0	0	0	-	0	-
d. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	-	0	-
e. Belanja Hibah	92.739.551.295	89.546.728.997	86.988.194.080	85.102.866.541	152.954.275.650	147.097.157.985	111.182.630.126	138.154.757.985
f. Belanja Bantuan Sosial	17.467.009.350	2.977.987.500	7.425.468.500	6.908.658.419	4.216.018.000	12.772.580.000	12.147.203.000	12.772.580.000
2. Belanja Modal	239.836.719.621	235.995.614.408	287.510.501.396	247.089.139.440	202.902.736.362	174.714.127.567	117.183.905.255	116.565.770.255
a. Tanah	9.000.000.000	58.015.740	9.000.000.000	3.908.713.890	1.028.850.000	-	0	-
b. Peralatan dan Mesin	83.896.202.382	75.015.739.240	115.562.797.305	95.059.501.590	61.726.992.797	39.043.136.469	38.311.179.922	39.016.761.469
c. Bangunan dan Gedung	92.585.878.990	83.641.790.248	114.551.721.981	102.564.048.329	54.577.028.997	46.317.439.145	43.104.932.470	46.317.439.145
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	74.198.762.300	71.894.050.162	42.260.159.121	39.768.985.023	77.837.411.000	28.446.629.250	39.674.426.000	27.854.869.250
e. Aset tetap lainnya	5.792.569.901	5.309.106.018	6.113.272.989	5.766.890.608	7.691.853.568	3.279.550.391	7.609.116.519	3.279.550.391
f. Aset lainnya	321.000.000	76.913.000	22.550.000	21.000.000	40.600.000	97.150.000	46.500.000	97.150.000
3. Belanja Tidak Terduga	8.704.328.802	5.779.500.000	2.000.000.000	0	800.000.000	0	2.500.000.000	2.500.000.000

URAIAN	TAHUN ANGGARAN							PROYEKSI 2025
	TARGET 2021	REALISASI 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023	APBD 2024 Penetapan	
4. Belanja Transfer	404.662.493.422	403.999.817.899	418.390.235.996	415.972.520.858	397.911.846.807	407.160.654.435	407.141.266.364	406.731.266.364
a. Belanja Bagi Hasil	5.675.400.000	5.656.124.477	7.951.000.000	7.936.684.862	7.997.804.000	14.988.600.364	8.777.498.770	14.988.600.364
b. Belanja Bantuan Keuangan	398.987.093.422	398.343.693.422	410.439.235.996	408.035.835.996	389.914.042.807	392.152.666.000	391.153.832.355	391.742.666.000

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel 3.8 dan tabel 3.9 dapat dilihat perbandingan data target dengan realisasi belanja daerah Tahun 2019-2023. Pada besaran total belanja, terdapat kenaikan belanja daerah pada Tahun Anggaran 2023 jika dibandingkan dengan belanja daerah pada tahun anggaran sebelumnya. Hal ini terjadi karena atas pertimbangan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan rutin, kegiatan prioritas penyelesaian permasalahan pembangunan, penyelesaian kegiatan yang mendukung capaian kinerja yang masih dalam status Upaya keras, dan kegiatan yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Proyeksi belanja Tahun 2025 terbesar pada belanja operasi di mana belanja pegawai menjadi salah satu penyebabnya. Besaran proyeksi belanja pegawai terhadap total belanja operasi tahun 2025 sebesar 57,41 %, hal ini disebabkan karena ada tambahan beban belanja pegawai dari penerimaan CPNS sebanyak 884 orang dan PPPK sebanyak 2.084 orang pada tahun 2022 serta tambahan PPPK sejumlah 389 pada tahun 2024. Belanja modal dan belanja transfer juga mengalami kenaikan. Belanja modal terjadi kenaikan pada belanja bangunan dan gedung serta Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan karena menyesuaikan pada belanja DAK fisik. Untuk belanja transfer kenaikan terjadi karena penyesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk Belanja Tidak Terduga masih sama dengan tahun sebelumnya.

Apabila data belanja daerah tersebut dilihat menggunakan grafik batang, maka akan jelas terlihat bahwa belanja operasi merupakan belanja yang paling tinggi dan mencapai lebih dari 50% dari total Belanja daerah selama kurun waktu 4 tahun. Keadaan belanja daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat seperti pada gambar 3.5.



Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 3.5.
Belanja Daerah Kabupaten Temanggung

Berdasarkan gambar 3.5 terlihat bahwa belanja daerah Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 7 tahun anggaran didominasi oleh belanja Operasi. Komposisi belanja operasi paling tinggi terjadi yaitu pada tahun anggaran 2025, hal ini disebabkan karena sebagian besar anggaran belanja daerah dipergunakan pemenuhan belanja gaji pegawai. Belanja operasi pada Tahun Anggaran 2025 diprediksi mencapai 74,63% dari total belanja daerah.

3.2.2.1 Persentase Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Persentase realisasi belanja operasi terhadap belanja daerah Kabupaten Temanggung dari tahun 2019–2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Persentase Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Daerah	Persentase
2019	1.236.735.432.764	1.841.033.635.270	67,18
2020	1.214.876.493.815	1.783.204.949.098	68,13
2021	1.232.194.234.987	1.877.969.167.294	65,61
2022	1.295.686.749.508	1.958.748.409.806	66,15

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Daerah	Persentase
2023	1.460.421.030.081	2.042.295.812.083	71,51
2024	1.567.384.486.681	2.098.911.972.717	74,68
2025	1.549.564.934.300	2.076.390.105.919	74,63

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2024

Proporsi belanja operasional Kabupaten Temanggung terhadap Belanja Daerah rata-rata adalah 69,67%. Persentase belanja operasi tertinggi selama lima tahun terakhir adalah tahun 2024 yaitu sebesar 74,68% dan terendah pada tahun 2021 yaitu sebesar 65,61%.

3.2.2.2 Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya dan aset lainnya.

Tabel 3.11
Persentase Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah

Tahun	Belanja Modal	Belanja Daerah	Persentase
2019	223.249.187.567	1.841.033.635.270	12,13
2020	102.083.054.523	1.783.204.949.098	5,72
2021	235.995.614.408	1.877.969.167.294	12,57
2022	247.089.139.440	1.958.748.409.806	12,61
2023*	174.714.127.567	2.042.295.812.083	8,55
2024**	128.746.154.911	2.098.911.972.717	6,13
2025***	117.183.905.255	2.076.390.105.919	5,64

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2024

Proporsi belanja modal Kabupaten Temanggung terhadap Belanja Daerah mencapai rata-rata sebesar 9,11%. Persentase belanja modal tertinggi selama lima tahun terakhir adalah tahun 2022 yaitu sebesar 12,61 % dan terendah pada tahun 2025 yaitu sebesar 5,64 %.

3.2.2.3 Persentase Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Tabel 3.12
Persentase Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah

Tahun	Belanja Transfer	Belanja Daerah	Persentase
2019	381.049.014.939	1.841.033.635.270	20,70
2020	416.287.236.647	1.783.204.949.098	23,34
2021	403.999.817.899	1.877.969.167.294	21,51
2022	415.972.520.858	1.958.748.409.806	21,24
2023*	407.160.654.435	2.042.295.812.083	19,94
2024**	399.931.331.125	2.098.911.972.717	19,05
2025***	407.141.266.364	2.076.390.105.919	19,61

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2024

Proporsi belanja transfer Kabupaten Temanggung terhadap Belanja Daerah mencapai rata-rata sebesar 20,72%. Persentase belanja transfer tertinggi selama lima tahun terakhir adalah tahun 2020 yaitu sebesar 23,34% dan terendah pada tahun 2024 yaitu sebesar 19,05%.

3.2.2.4 Persentase Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya

Tabel 3.13
Persentase Belanja Tidak Terduga terhadap Belanja Daerah

Tahun	Belanja Tidak Terduga	Belanja Daerah	Persentase
2019	0	1.841.033.635.270	0,00
2020	49.956.004.113	1.783.204.949.098	2,80
2021	5.779.500.000	1.877.969.167.294	0,31
2022	0	1.958.748.409.806	0,00
2023*	800.000.000	2.042.295.812.083	0,04
2024**	2.850.000.000	2.098.911.972.717	0,14
2025***	2.850.000.000	2.076.390.105.919	0,14

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2024

Proporsi belanja tidak terduga Kabupaten Temanggung terhadap Belanja Daerah mencapai rata-rata sebesar 0,48%. Persentase belanja

tidak terduga tertinggi selama lima tahun terakhir adalah tahun 2020 yaitu sebesar 2,80 % dan terendah pada tahun 2019 dan tahun 2022 yaitu sebesar 0%.

3.2.2.5 Konsistensi Rencana Belanja Daerah dengan Total Belanja Seluruh Perangkat Daerah

Konsistensi rencana belanja daerah dengan total belanja seluruh perangkat daerah adalah konsistensi antara belanja pada dokumen RKPD dengan total belanja yang ada di APBD.

Tabel 3.14
Konsistensi Rencana Belanja Daerah dengan Total Belanja

Tahun	Rencana Belanja	Total Belanja	Persentase
2019	1.946.665.378.928	1.841.033.635.270	94,57
2020	1.903.418.451.221	1.783.204.949.098	93,68
2021	2.053.340.949.247	1.877.969.167.294	91,46
2022	2.163.271.983.090	1.958.748.409.806	90,55
2023*	2.156.455.999.239	2.042.295.812.083	94,71
2024**	2.098.911.972.717	2.098.911.972.717	100,00
2025***	2.076.390.105.919	2.076.390.105.919	100,00

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2024

Konsistensi rencana belanja daerah dengan total belanja dari tahun 2019 sampai tahun 2023 tidak lebih dari 100%. Ini berarti bahwa total belanja yang dimuat dalam penetapan APBD tidak semua direalisasikan dalam proses realisasi pelaksanaannya.

3.2.3 Arah Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup kekurangan defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Anggaran defisit adalah anggaran belanja lebih besar daripada anggaran pendapatan, dan sebaliknya anggaran surplus adalah manakala anggaran belanja lebih kecil daripada anggaran pendapatan.

3.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

- a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA). Besarnya SiLPA yang akan diperhitungkan dalam pembiayaan Tahun Anggaran berkenaan adalah hasil perhitungan SiLPA pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran sebelumnya setelah diaudit BPK dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- b) Penerimaan pinjaman daerah dilakukan manakala terjadi defisit anggaran, sedangkan SiLPA dan pencairan dana cadangan tidak dapat menutup keseluruhan defisit, maka akan dicukupi dengan penerimaan pinjaman daerah. Pinjaman ini dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lain, maupun dari pihak ketiga.
- c) Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- d) Penerimaan Pembiayaan ini dapat berupa penerimaan kembali atas investasi non permanen dan penerimaan perhitungan pihak ketiga berupa retensi.

3.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan dapat berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan yang lain. Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan pada tahun Anggaran 2025 dilakukan untuk pembangunan poliklinik RSUD yang akan dimulai pada Tahun 2026.

- b. Penyertaan modal pemerintah daerah;
Investasi yang akan dilakukan pemerintah daerah adalah investasi jangka panjang yang bersifat permanen, yaitu bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
- c. Pembayaran pokok hutang;
Pengeluaran pembiayaan guna pembayaran pokok hutang pemerintah daerah pada Pusat Investasi Pemerintah.
- d. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Pengeluaran Pembiayaan berupa pengeluaran perhitungan pihak ketiga berupa retensi atas pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.

Tabel 3.15
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Temanggung

URAIAN	TAHUN ANGGARAN						PROYEKSI 2025
	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023*	APBD 2024	
PEMBIAYAAN DAERAH	86.044.884.418	114.804.704.856	161.211.637.352	243.671.402.772	180.203.716.352	137.543.103.766	119.451.731.278
1. Penerimaan Pembiayaan	91.129.078.155	124.692.881.503	162.455.516.962	254.301.081.892	182.011.130.352	137.543.103.766	139.451.731.278
a. SiLPA	85.356.884.193	123.395.072.830	162.448.209.105	254.248.460.087	180.406.907.044	134.088.073.766	139.392.477.970
b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman	55.857.857	50.489.211	7.307.857,00	52.621.805	59.253.308	0	59.253.308
c. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	5.716.336.105	1.247.319.462	0	0	0	0	0
d. Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	1.544.970.000	3.455.030.000	0
2. Pengeluaran Pembiayaan	5.084.193.737	9.888.176.647	1.243.879.610	10.629.679.120	1.807.414.000	0	20.000.000.000
a. Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	5.000.000.000	0	0	20.000.000.000
b. Penyertaan Modal Daerah	-	4.171.840.542	0	0	1.807.414.000	0	0

URAIAN	TAHUN ANGGARAN						PROYEKSI 2025
	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023*	APBD 2024	
Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai c. dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	5.084.193.737	5.716.336.105	1.243.879.610	5.629.679.120	0	0	0
PEMBIAYAAN NETTO	86.044.884.418	114.804.704.856	161.211.637.352	243.671.402.772	180.203.716.352	137.543.103.766	119.451.731.278

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel 3.15 dapat dilihat bahwa Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 memproyeksikan besaran SiLPA sebesar Rp139.392.477.970,00 lebih besar dibandingkan besaran SiLPA pada APBD Tahun 2024.

Pengeluaran Pembiayaan tahun 2025 hanya terdiri dari 2 komponen yaitu Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal Daerah. Pembentukan Dana Cadangan digunakan untuk rencana pembangunan gedung poliklinik RSUD yang akan dimulai pada Tahun 2026.

Informasi dan data sebagai suatu sistem informasi yang memuat perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah tertuang dan telah dilaksanakan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau disingkat SIPD.

3.3 Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

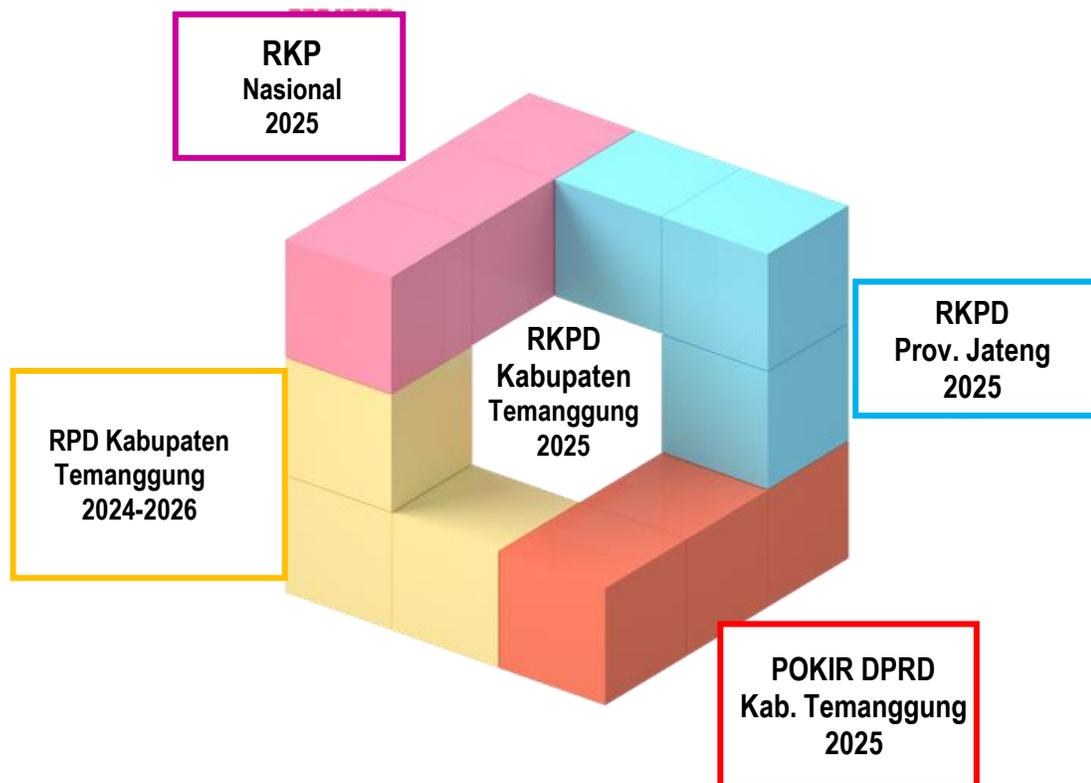
Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung menunjukkan prestasi yang bagus karena memperoleh WTP sebanyak 12 kali pada tahun 2012-2023.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah disusun dengan mempertimbangkan RPD 2024-2026 sebagai pijakan kondisi yang ada untuk merumuskan target sasaran RKPD Tahun 2025. Prioritas Daerah yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2025 disusun berdasarkan:

1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025;
2. Prioritas RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
3. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026; dan
4. Pokok-pokok pikiran DPRD.

Proses integrasi penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2025 digambarkan sebagai berikut.



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022

Gambar 4.1

Komponen penyusun RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Secara garis besar substansi bab ini terdiri dari:

- A. Visi dan Misi Rencana Jangka Panjang Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Temanggung 2005-2025
- B. Tujuan dan Sasaran, serta Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
- C. Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025;

- D. Kontribusi Kabupaten Temanggung dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 pada Tahun 2025;
 - E. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur pada Tahun 2025;
 - F. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Target SDG's Kabupaten Temanggung;
 - G. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Penanganan Stunting Kabupaten Temanggung;
 - H. Dukungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 - I. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG);
 - J. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim;
 - K. Fasilitasi Perubahan Iklim
 - L. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan
 - M. Kebijakan dan Strategi Hasil Musrenbang RKPD 2025.
- Secara detail diuraikan sebagai berikut.

4.1. Visi dan Misi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Temanggung 2005-2025

4.1.1. Visi

Visi Kabupaten Temanggung dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 adalah **“Temanggung Makin Maju, Mandiri, Aman, Adil dan Sejahtera”**.

Visi pembangunan daerah Tahun 2005-2025 mengarah pada pencapaian cita-cita dan harapan masyarakat. Penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung yaitu:

1. **Temanggung**, diartikan sebagai suatu daerah otonom yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. **Maju**, diartikan bergerak dan meningkat serta menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kemajuan suatu masyarakat dapat dinilai dari aspek ekonomi yang berpusat pada peningkatan pendapatan dan kemakmuran, dari aspek sosial yang berpusat pada peningkatan kualitas dan intelektualitas sumber daya manusia, dan dari aspek

kependudukan yang berpusat pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk. Muara dari suatu kemajuan adalah daerah dan masyarakat yang memiliki Tingkat produktivitas yang tinggi. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan daerah adalah laju pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran, kemampuan keuangan daerah, dan Indeks Pembangunan Manusia.

3. **Mandiri**, diartikan dalam berdiri sendiri, dapat mengurus atau mengatasi kepentingannya sendiri tanpa bergantung pada pihak lain. Kemandirian mandiri tidak diartikan sebagai menutup diri, melainkan ditekankan pada masyarakat yang mampu mengoptimalkan berbagai kekuatan dan potensi yang dimiliki untuk kemajuan daerah, mampu menjadi pusat pertumbuhan baru tanpa mengabaikan pentingnya aspek *networking*. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemandirian daerah adalah peningkatan kontribusi PAD dan nilai swadaya masyarakat dalam pembangunan.
4. **Aman**, diartikan sebagai keadaan yang bebas dari ketakutan akan bahaya atau hal-hal yang membahayakan. Keamanan suatu daerah berarti suasana daerah yang tidak terancam baik bagi penduduknya maupun bagi wilayahnya, masyarakat dapat beraktifitas tanpa merasakan kecemasan. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur faktor keamanan adalah angka kriminalitas dan jumlah konflik vertical dan horizontal, serta penurunan jumlah bencana alam dan kesiapan menghadapinya.
5. **Adil**, diartikan sebagai tiadanya kesenjangan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan. Kondisi keadilan juga ditekankan pada adanya kesamaan perlakuan terhadap setiap anggota masyarakat atau penduduk di segala sektor kehidupan termasuk keadilan dalam memperoleh kepastian dan penegakan hukum dan hak asasi manusia. Indikator yang digunakan untuk mengukur keadilan adalah angka kesenjangan antar penduduk dan angka kesenjangan antar wilayah serta nilai jaminan sosial masyarakat.
6. **Sejahtera**, diartikan sebagai kondisi kemakmuran suatu masyarakat yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi maupun sosial secara adil dan merata. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur Tingkat kesejahteraan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pendapatan per kapita, Indeks Kemiskinan Masyarakat (IKM).

4.1.2. Misi

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, dijabarkan melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM,** yaitu makin mantapnya penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Temanggung dalam era otonomi daerah, semakin optimalnya aplikasi prinsip-prinsip *good governance*, makin baiknya kondisi kapasitas daerah dalam berbagai aspek seperti kewenangan, kelembagaan, aparatur dan kemampuan keuangan daerah, makin berkembangnya kerjasama pemerintah daerah dengan kelompok usaha dan masyarakat baik pada Tingkat lokal, regional, nasional dan internasional, makin meningkatnya kepuasan masyarakat akan kinerja pelayanan pemerintah, makin mantap kebijakan dan regulasi di berbagai bidang, khususnya politik dan hukum, makin matangnya kondisi kepemimpinan lokal yang mampu membawa dan menciptakan suasana politik daerah yang demokratis dan kondusif bagi pelaksanaan pembangunan, makin tegaknya supremasi hukum dan HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan sehari-hari, makin berkurangnya Tingkat kriminalitas dan konflik menuju daerah yang aman, tertib dan tenteram.
- 2. Mewujudkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan keagamaan dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin** adalah suasana kehidupan perikehidupan bermasyarakat yang berasaskan pada nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta nilai-nilai luhur budaya bangsa, tumbuhnya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja tinggi, menghormati dan menghargai serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, menjadi masyarakat yang berkualitas, manusia yang cerdas dan sehat serta masyarakat yang sejahtera dan mandiri.
- 3. Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah dan**

cluster usaha Tingkat perdesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah yaitu semakin mantap dan kuatnya kondisi perekonomian daerah yang tumbuh dan ditopang struktur ekonomi berbasis sektor unggulan yang kuat, semakin mantapnya pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis pada sinergitas antara pelaku ekonomi kuat dan lemah, semakin kuatnya peranan sektor basis daerah yang tumbuh dalam model linkage, tumbuh dan berkembangnya kawasan-kawasan dan pusat-pusat ekonomi baru pada Tingkat perdesaan berbasis cluster usaha yang terintegrasi.

- 4. Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan prasarana dan sarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar wilayah** yaitu semakin kuatnya kemampuan daerah yang mengutamakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam pembangunan, penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan berbagai prasarana dan sarana publik, terutam prasarana dan sarana pelayanan dasar masyarakat yang berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, makin mantapnya pengembangan prasarana dan sarana pada pusat-pusat ekonomi untuk mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian daerah, yang berdampak pada pengurangan Tingkat kesenjangan antar wilayah.
- 5. Mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara Lestari berbasis pada partisipasi aktif segenal pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang** adalah makin meningkatnya kesadaran dan partisipasi aktif dari semua komponen masyarakat pelaku pembangunan akan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada pengawalan yang ketat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan fungsi lingkungan hidup, makin mantapnya peranan dokumen rencana tata ruang yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah disertai dengan langkah-langkah yang tegas dan konsisten untuk menegakkan hukum atas pelanggaran aspek sumber daya alam, lingkungan hidup dan tata ruang.

4.2. Visi dan Misi Rencana Jangka Panjang Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Temanggung 2025-2045

4.2.1 Visi

Visi Kabupaten Temanggung dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 adalah “**Kabupaten Temanggung yang Berbudaya, Maju dan Sejahtera pada Tahun 2045**”.

Visi pembangunan daerah Tahun 2025-2045 mengarah pada pencapaian cita-cita dan harapan masyarakat. Penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung yaitu:

1. Berbudaya dalam visi Kabupaten Temanggung 2045 diarahkan pada pembentukan sistem sosial budaya yang memiliki nilai tambah bagi kehidupan masyarakat melalui pelestarian nilai budaya, penciptaan masyarakat dengan karakter dan perilaku budaya yang kuat, pelayanan publik yang baik dan cerdas dengan budaya profesional dan berintegritas, serta lingkungan dengan daya dukung memadai, berkelanjutan dan berketahanan.
2. Maju dalam visi Kabupaten Temanggung 2045 diarahkan pada penciptaan ekonomi yang produktif dan berdaya saing dengan nilai tambah dan rantai nilai lokal yang tinggi, adaptif terhadap perubahan dengan orientasi investasi terhadap pasar, ditunjang dengan teknologi, digital dan konektivitas yang optimal mendukung produktivitas wilayah.
3. Sejahtera dalam visi Kabupaten Temanggung 2045 diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengurangan kesenjangan ekonomi dan sosial, didukung oleh sumber daya manusia yang berkembang dan optimal.

4.2.2 Misi

1. Mewujudkan Masyarakat yang Berbudaya

Membentuk masyarakat yang berbudaya merupakan hal mendasar dalam pembangunan daerah. Perkembangan teknologi yang cukup pesat menjadi ancaman luntarnya nilai budaya masyarakat. Terwujudnya Masyarakat yang berbudaya diharapkan akan meningkatkan pembangunan kebudayaan, kualitas keluarga dan kerukunan umat beragama. Dengan membangun dan memelihara masyarakat yang berbudaya, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, kreatif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

2. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas

Mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional dan berintegritas membutuhkan komitmen yang kuat dari segenap unsur Pemerintah Daerah, serta dukungan dari masyarakat. Tuntutan agar birokrasi menjadi lebih dinamis dan mampu beradaptasi cepat terhadap perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga integritasnya. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

3. Mewujudkan Lingkungan yang Memiliki Daya Dukung Memadai, Berketahanan dan Berkelanjutan

Merupakan upaya menciptakan kondisi agar ekosistem dan sumber daya alam dapat dipertahankan dan dimanfaatkan secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. Lingkungan yang berketahanan berarti memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan kondisi, seperti perubahan iklim, fluktuasi cuaca, atau gangguan alam lainnya. Lingkungan hidup yang berkelanjutan diwujudkan dengan memastikan bahwa pembangunan tidak merusak lingkungan, tidak meningkatkan ketimpangan sosial, dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.

4. Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Adaptif dan Berdaya Saing

Peningkatan produktivitas ekonomi daerah dilakukan dengan meningkatkan kemampuan daerah untuk menghasilkan barang dan jasa secara efisien melalui pengembangan industri, pertanian, pariwisata, dan sektor potensial lainnya dengan menggunakan sumber daya secara optimal. Perekonomian daerah yang berdaya saing mencakup pengembangan keunggulan kompetitif di sektor-sektor kunci, peningkatan infrastruktur, inovasi teknologi, serta peningkatan kualitas SDM dan ketersediaan tenaga kerja yang terampil.

5. Mengembangkan Pemanfaatan Kemajuan Teknologi Digital dan Peningkatan Konektivitas Wilayah

Pengembangan pemanfaatan kemajuan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, industri, pariwisata, dan pelayanan publik lainnya. Peningkatan konektivitas wilayah mencakup pembangunan infrastruktur baik jaringan

transportasi, telekomunikasi, energi, air, sanitasi, kesehatan dan pendidikan.

6. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera

Upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dilakukan dengan meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, kompetensi sumber daya manusia, dan penyerapan tenaga kerja, serta menurunkan ketimpangan ekonomi – sosial.

4.3. Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

4.3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJPD 2005-2025. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, yaitu:

1. Tujuan 1 (Pertama) “Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, Berkarakter, dan Berdaya”

Tujuan Pertama adalah “Terwujudnya Masyarakat yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya”, dengan memperhatikan indikator tujuan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang didukung dengan **sasarannya** meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan, meningkatnya toleransi masyarakat, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak dengan indikator sasaran yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Indeks Pembangunan Pemuda, Indeks Pembangunan Olahraga, Indeks Pembangunan Kebudayaan, Indeks Toleransi, Angka Harapan Hidup dan Indeks Pembangunan Gender.

2. Tujuan 2 (Kedua) “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan”.

Tujuan Kedua adalah “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan”, dengan memperhatikan indikator tujuan yaitu Pertumbuhan Ekonomi yang didukung dengan **sasarannya**

meningkatnya perekonomian daerah dan meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas dengan indikator sasaran yaitu Pendapatan perkapita, Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Infrastruktur, Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH) dan Indeks Rasa Aman.

3. Tujuan 3 (Ketiga) “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Bebas KKN”

Tujuan ketiga adalah “Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN”, dengan memperhatikan indikator tujuan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi yang didukung dengan **sasarannya** meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi, meningkatnya pengelolaan SDM aparatur, dan meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani dengan indikator sasaran yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Indeks Merit System, Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Masing-masing tujuan dan sasaran telah diukur dengan indikator tujuan dan sasaran yang secara rinci dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Keterkaitan Indikator Tujuan dan Sasaran Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025	Bidang
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Angka	72,76	
		Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,95	Pendidikan
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,65	Pendidikan
		Meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan	Indek Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	5,00	Pemuda dan Olahraga
			Indeks Pembangunan Olahraga	Angka	3,81	Pemuda dan Olahraga
			Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	4,66	Perpustakaan dan Kebudayaan
		Meningkatnya toleransi masyarakat	Indeks Toleransi	Angka	4,51	Bankesbangpol
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75,72	Kesehatan
		Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	95,77	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi			%	5,28	
		Meningkatnya perekonomian Daerah	Pendapatan per Kapita	Ribu Rp	33,50	Koperasi dan UKM, Pangan Kelautan dan Perikanan
			Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	Angka	19,00	Pertanian, Pangan, Kelautan Perikanan, Perdagangan, Pariwisata, Perindustrian, Penanaman modal Koperasi Usaha Kecil Menengah
			Angka Kemiskinan	%	8,10	Sosial
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,51	Tenaga kerja
		Meningkatnya penyediaan sarana prasarana	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Angka	75,20	PUPR, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Indeks Kualitas	Angka	64,05	Lingkungan Hidup

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025	Bidang
		wilayah yang berkualitas	lingkungan hidup (IKLH) Indeks Rasa Aman	Angka	4,69	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN	Indeks Reformasi Birokrasi			Predikat	B/>60-70	
		Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi.	IPKD	Angka	66	Fungsi Penunjang Perencanaan , Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan , Penunjang Keuanagna , Bidang Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya pengelolaan SDM aparatur	Indeks Merit System	Angka	0,55	Fungsi Penunjang – Kepegawaian
		Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Level	B/>60-70	Fungsi Lainnya -Sekretaris Daerah, Komunikasi dan Informatika, Kearsipan, Fungsi Lainnya Sekretariat DPRD
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	B/76,61 – 88,30	Fungsi Lainnya -Sekretaris Daerah

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 memperhatikan target indikator makro dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Adapun penyelarasan target kinerja makro daerah pada dokumen RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Keselerasan Target Indikator Makro RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Target	
			RPD 2024-2026 ^{*)}	RPJMN 2020-2024 ^{**)}
1	Pertumbuhan ekonomi	Angka	5,28	5,7-6,0
2	Tingkat kemiskinan	Angka	8,10	6,0-7,0
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	2,51	3,6-4,3
4	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	72,77	75,54

Sumber : ^{*)} RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

^{**)} Perpres Nomor 18 Tahun 2020 – Lampiran I

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa target indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 selaras dengan target pada RPJMN Tahun 2020-2024.

4.3.2.Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi, maka dirumuskan penyesuaian strategi dan arah kebijakan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dijabarkan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya
 - Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya adalah:
 - 1) Meningkatkan kualitas dan akses layanan pendidikan;
 - 2) Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga;
 - 3) Peningkatan literasi masyarakat;
 - 4) Peningkatan pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal;
 - 5) Penurunan konflik di masyarakat;
 - 6) Peningkatkan kesehatan keluarga;
 - 7) Peningkatkan kebijakan *reponsif gender*.
 - Sedangkan arah kebijakannya adalah:
 - 1) Pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang memadai;

- 2) Pemenuhan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 3) Pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum;
 - 4) Peningkatan peran masyarakat dalam pendidikan;
 - 5) Peningkatan pembinaan dan pemenuhan sarana prasarana pemuda dan olahraga;
 - 6) Peningkatan sarana dan kapasitas sumber daya manusia perpustakaan;
 - 7) Pembudayaan gemar membaca di masyarakat;
 - 8) Peningkatan pembinaan pelaku seni budaya dan pengelolaan cagar/warisan budaya;
 - 9) Peningkatan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebhinekaan kepada masyarakat;
 - 10) Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik;
 - 11) Peningkatan pemberdayaan dan pengawasan ormas;
 - 12) Peningkatan pelayanan kesehatan primer;
 - 13) Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan;
 - 14) Peningkatan sistem ketahanan kesehatan rujukan;
 - 15) Peningkatan sistem pembiayaan kesehatan;
 - 16) Peningkatan sumber daya kesehatan;
 - 17) Peningkatan kapasitas PUG dan perlindungan perempuan dan anak.
- b. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan

Strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan adalah:

- 1) Meningkatkan produksi hasil pertanian dan peternakan;
- 2) Meningkatkan nilai usaha perdagangan;
- 3) Meningkatkan jumlah pendapatan sektor pariwisata;
- 4) Meningkatkan nilai usaha industri;
- 5) Meningkatkan laju investasi dan kualitas pelayanan perizinan;
- 6) Meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM;
- 7) Meningkatkan kedaulatan dan kemandirian pangan;
- 8) Meningkatkan produksi perikanan;
- 9) Meningkatnya pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- 10) Pertumbuhan penduduk yang terkendali;

pertumbuhan penduduk yang terkendali diharapkan akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang mantap, karena akan mengurangi indeks ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif, sehingga akan menaikkan penghasilan dan investasi.

- 11) Pemberdayaan ekonomi keluarga;
- 12) Meningkatnya pemberdayaan berbasis masyarakat;
- 13) Meningkatnya kompetensi angkatan kerja;
- 14) **Meningkatnya kepesertaan jamsostek baik di sektor formal maupun non formal;**
- 15) Meningkatnya infrastruktur dan sarana dan prasarana wilayah;
- 16) Optimalisasi pemanfaatan kawasan sesuai peruntukannya;
- 17) Optimalisasi pemanfaatan kawasan sesuai kewenangan, yaitu kawasan budidaya untuk industri, produksi, pertanian, dan pariwisata, yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
- 18) Meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat, yang merupakan upaya untuk mewujudkan indeks rasa aman yang tinggi, sehingga sangat mendukung terwujudnya iklim investasi.

Sedangkan arah kebijakannya adalah:

- 1) Peningkatan pemenuhan penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pertanian dan peternakan;
- 2) Peningkatan pengendalian kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan penanggulangan bencana pertanian dan peternakan;
- 3) Peningkatan dan pembinaan sumber daya manusia pertanian dan peternakan;
- 4) Optimalisasi sistem dan jaringan perdagangan;
- 5) Peningkatan akses pemasaran dan penggunaan produk lokal;
- 6) Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
- 7) Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 8) Peningkatan kelembagaan, permodalan, dan pemberdayaan industri;
- 9) Peningkatkan pelayanan dan promosi investasi;
- 10) Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
- 11) Peningkatan kelembagaan, permodalan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM;

- 12) Peningkatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
 - 13) Peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan;
 - 14) Peningkatan penyediaan dan distribusi pangan pokok atau pangan lainnya;
 - 15) Peningkatan sertifikasi keamanan pangan;
 - 16) Peningkatan kapasitas pembudidaya ikan dan nelayan;
 - 17) Peningkatan mutu dan keamanan hasil perikanan;
 - 18) Peningkatan pengendalian dan pengawasan penyediaan benih ikan;
 - 19) Peningkatan cakupan sasaran pemberdayaan PPKS melalui bantuan sosial usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama;
 - 20) Peningkatkan pelayanan dan KIE Keluarga Berencana serta pembangunan keluarga;
 - 21) Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
 - 22) Penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui pemberdayaan Bumdes;
 - 23) Peningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan penempatan tenaga kerja;
 - 24) Pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi infrastruktur dan sarana prasarana wilayah;
 - 25) Pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana wilayah;
 - 26) Optimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya;
 - 27) Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan lingkungan hidup sebagai dasar pengelolaan lingkungan hidup;
 - 28) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - 29) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup;
 - 30) Peningkatan pengelolaan sampah. Sampah yang dikelola oleh kelompok masyarakat, khususnya bank sampah memberikan dampak terhadap peningkatan penghasilan rumah tangga; dan
 - 31) Peningkatan kapasitas sumber daya dan partisipasi masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan.
- c. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN

Strategi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN adalah:

- 1) Meningkatnya infrastruktur dan sarana dan prasarana wilayah;
- 2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
- 3) Meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat;
- 4) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan inovasi daerah;
- 5) Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
- 6) Meningkatkan keterbukaan informasi publik;
- 7) Terwujudnya SDM aparatur yang berkinerja tertinggi;
- 8) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel;
- 9) Meningkatnya kualitas pengembangan layanan sistem pemerintahan secara elektronik;
- 10) Meningkatnya pengelolaan kearsipan;
- 11) Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- 12) Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual;
- 13) Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum;
- 14) Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi;
- 15) Meningkatnya pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang terfasilitasi;
- 16) Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- 17) Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- 18) Meningkatnya layanan perhubungan;
- 19) Meningkatnya tertib administrasi kependudukan.

Sedangkan arah kebijakannya adalah:

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya perencanaan;
- 2) Peningkatan peran serta *multihelix* dalam perencanaan pembangunan;
- 3) Peningkatan budaya inovasi di lingkungan perangkat daerah dan masyarakat;
- 4) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengelolaan barang milik daerah;
- 5) Peningkatan layanan pemerintah berbasis teknologi informasi;
- 6) Peningkatan tata kelola manajemen ASN berdasarkan sistem merit;

- 7) Peningkatan upaya pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah;
- 8) Optimalisasi integrasi layanan sistem pemerintahan secara elektronik;
- 9) Peningkatan kapasitas pengelola layanan sistem pemerintahan secara elektronik;
- 10) Peningkatan tata kelola arsip daerah;
- 11) Pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Temanggung, ditetapkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan prioritas dan fokus pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 yaitu **Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik.**

4.4. Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025

4.4.1. Tema Pembangunan Tahun 2025

Tabel 4.3
Tema RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Tema RKP Nasional Tahun 2025	Tema RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	Tema RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025
Penguatan Fondasi Transformasi	Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan didukung dengan sumber daya manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024
RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, 2023
RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, 2023

Berdasarkan tabel tersebut, tema pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 selaras dengan tema pembangunan baik RKP Nasional dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. **Tema RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2025** bersumber dari arah kebijakan pembangunan RPD 2024-2026 yaitu **“Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik.”**

4.4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2025

a. Prioritas Nasional dalam RKP 2025

Kebijakan di tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan 7 Prioritas Nasional (7 PN) yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1);
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2);
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3);
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN 4);
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN 5);
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN 6);
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7).

b. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana berikut:

- 1) Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada:
 - a) Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal , emningkatkan rasiokemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga konduktivitas wilayah melalui:
 - i. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, serta meningkatkan daya saing dan kelembagaan koperasi dan UMKM;

- ii. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, berbasis korporasi;
 - iii. Pengelolaan dan pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
 - iv. Peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan;
 - v. Peningkatan iklim penanaman modal berbasis sektor unggulan, pengembangan industri berbasis *green investment*, pengembangan Kawasan Industri/Kawasan Peruntukan Industri (KI/KPI), pemetaan potensi sumberdaya pendukung industri berbasis wilayah, penguatan rantai pasok sektor unggulan, pemenuhan infrastruktur keras dan lunak yang memadai, serta pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal di daerah;
 - vi. Optimalisasi sumber-sumber dan potensi pendapatan daerah, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, serta optimalisasi sumber pembiayaan alternatif;
 - vii. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban wilayah dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah;
 - viii. Penerapan pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) yang diawali dengan penyusunan dokumen pembangunan hijau di Provinsi Jawa Tengah dan ekonomi sirkular (*circular economy*) secara bertahap sebagai tools untuk mencapai pembangunan rendah karbon.
- b) Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur melalui:
- i. Peningkatan pelayanan perizinan, akses permodalan, subsidi bunga, jaminan usaha, dan akses pasar bagi pelaku rintisan usaha (ultra mikro), serta penciptaan lapangan kerja yang layak;
 - ii. Peningkatan rumah layak huni, peningkatan kualitas kawasan permukiman, fasilitasi pengelolaan SPAM kabupaten/kota, pembangunan sarana prasarana SPAM perdesaan, dan fasilitasi pengelolaan air limbah domestik kabupaten/kota;

- iii. Pemenuhan kebutuhan layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), pemenuhan secara bertahap kebutuhan SDM pekerja sosial, rehabilitasi sarana prasarana panti, peningkatan kemandirian penerima manfaat dalam panti, peningkatan ketepatan sasaran penyelenggaraan perlindungan sosial, Peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan peningkatan pendapatan kelompok fakir miskin, peningkatan kapasitas petugas Puskesmas;
 - iv. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan.
- c) Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan tim pengendali inflasi daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
 - d) Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, mutu pendidikan vokasi melalui peningkatan sarana praktek pembelajaran sesuai standar dunia usaha dan dunia industri (DUDI), kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai DUDI; pemberdayaan angkatan kerja; penempatan tenaga kerja; dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi
 - e) Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan keterampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran. Meningkatkan daya saing tenaga kerja;
- 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata, dengan fokus pada:
- a) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata, peningkatan kualitas pembelajaran berbasis softskill dan IT secara adaptif dan inklusif, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, penguatan pendidikan karakter menekankan pada nilai kearifan lokal, budaya literasi, budaya hidup sehat dan bugar, etos kerja, anti perundungan, diskriminasi, kesadaran mengenai kesehatan mental, serta peduli lingkungan dan tanggap bencana; Pemenuhan sarana prasarana

- pendidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang didukung pemanfaatan teknologi informasi; serta Perluasan implementasi strategi penanganan ATS di wilayah kemiskinan ekstrem berbasis pendataan dan kerjasama multipihak;
- b) Meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan dengan pemenuhan prasarana dan sarana, pemenuhan jumlah dan distribusi sumber daya manusia (SDM) kesehatan secara bertahap, penyusunan kebijakan, perbaikan baseline data, pemenuhan SOP; pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; penguatan implementasi digitalisasi layanan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang terhubung dengan sistem layanan provinsi; identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM kesehatan; peningkatan dukungan kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular khususnya TB, malaria dan DBD, penyakit tidak menular khususnya jantung dan stroke, masalah kesehatan jiwa serta kejadian luar biasa (KLB)/krisis kesehatan; pemetaan kapasitas fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) dalam pemberian layanan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; revitalisasi pelaksanaan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga; serta pendampingan keluarga dalam penyediaan dan pengolahan pangan bergizi dan berkualitas;
 - c) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hidup bugur, meningkatkan penyediaan sarpras olahraga memadai dan terjangkau, pembinaan dan pelatihan atlet.
 - d) Peningkatan kualitas prasarana sarana literasi dan kapasitas SDM;
 - e) Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan, dan pemberdayaan pemuda;
 - f) Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat melalui peningkatan perlindungan dan pengembangan warisan budaya termasuk implementasi nilai agama, serta peningkatan literasi dan ekspresi budaya dalam berbagai platform termasuk platform digital;
 - g) Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek dengan didukung ketersediaan data pilah gender;

- h) Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak melalui fasilitasi pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) perlindungan perempuan dan anak (PPA) kabupaten/kota, penguatan jejaring penyelenggaraan pelayanan terpadu milik provinsi, peningkatan pemahaman aparat mengenai penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender, pendidikan anti kekerasan sejak usia dini, pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor, peningkatan kualitas penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak (KLA), serta peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- 3) Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan
- a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara ambien, penyediaan sarana prasarana pengolah limbah dan persampahan (TPST Regional, IPLT Regional, TPS 3R, IPAL Komunal), peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, peningkatan kapasitas kelembagaan konservasi partisipatif multipihak dan rehabilitasi hutan dan lahan berbasis DAS dengan peran aktif masyarakat, peningkatan kepatuhan penatausahaan hasil hutan, penguatan dan kepatuhan kelembagaan perhutanan sosial, peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim, penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon, dan penyusunan perencanaan tata ruang, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. Meningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif melalui pengembangan dan pembangunan infrastruktur aneka Energi Baru Terbarukan (EBT) sesuai kewenangan provinsi, perluasan akses untuk masyarakat terhadap listrik dan energi, perluasan pemanfaatan elektrifikasi

- rumah tangga, serta edukasi masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif;
- c. Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan, peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah serta pembangunan prasarana sarana konservasi air tanah, pengembangan SPAM Regional, serta pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir;
 - d. Menurunkan risiko bencana melalui penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana, perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini/*early warning system* (EWS), pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB), pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, peningkatan kesiapan klaster penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota, penyusunan kebijakan mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana, penyusunan kebijakan perlindungan sosial adaptif, serta penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi.
- 4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada:
- a. Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk didalamnya penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi, evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, memetakan kesenjangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik, serta penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis teknologi informasi.

- b. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui peningkatan peran masyarakat melalui *co-creator*.

c. Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Prioritas pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratik, dan politik. Proses perencanaan partisipatif, teknokratik dan politik merupakan hal yang sangat penting ketika usulan perencanaan dari Musrenbang maupun Forum Khusus dengan penyelarasan dan sinkronisasi dengan pokok pikiran DPRD (aspirasi DPRD) dalam mencapai tujuan pembangunan sesuai arahan peraturan perundangan yang berlaku.

Selain itu, prioritas pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 juga disusun dengan menerapkan konsep *Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial* (THIS). Dalam perencanaan pembangunan perlu merumuskan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tema pembangunan dalam jangka waktu 1 tahun. Selanjutnya, penjabaran tema dari program ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif dari hulu ke hilir (dalam sebuah kegiatan). Tidak luput pula, perencanaan pembangunan juga melibatkan beberapa pemangku kepentingan seperti Perangkat Daerah maupun *stakeholder* non Perangkat Daerah dalam sebuah sinergi untuk pelaksanaan perencanaan prioritas pembangunan. Tersedianya lokasi dari prioritas pembangunan tersebut juga harus jelas dengan menerapkan kesatuan kewilayahan sehingga satu lokasi dengan lainnya saling berkaitan erat.



Gambar 4.2

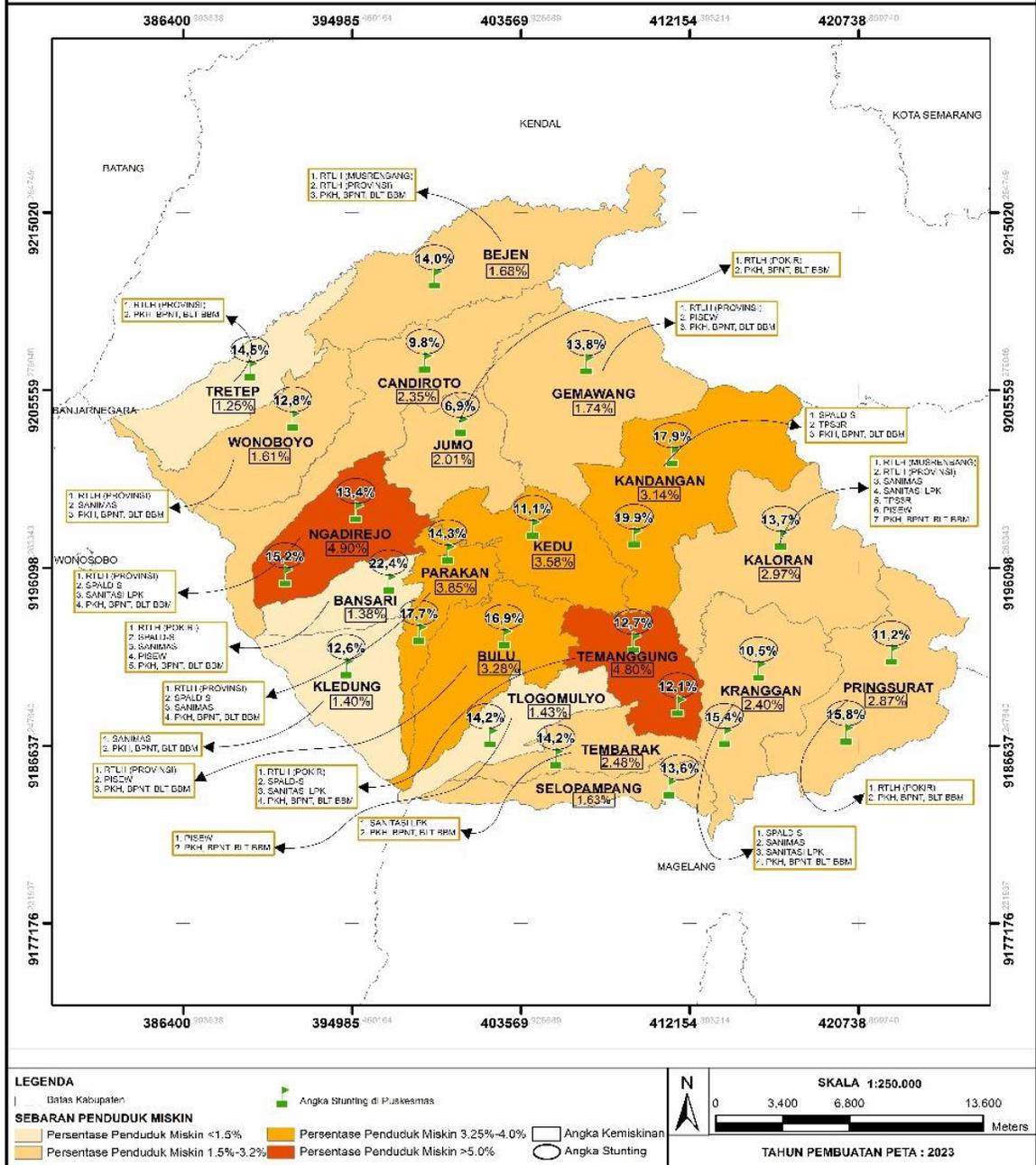
Konsep THIS dalam Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Temanggung Kode pos 56221 Telepon : 0293 - 492154, Faximili : 0293 - 491801
Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

**PETA SEBARAN PENDUDUK MISKIN DAN STUNTING PER KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023**



Gambar 4.3

Peta Sebaran Penduduk Miskin dan Stunting Kabupaten Temanggung Tahun 2023

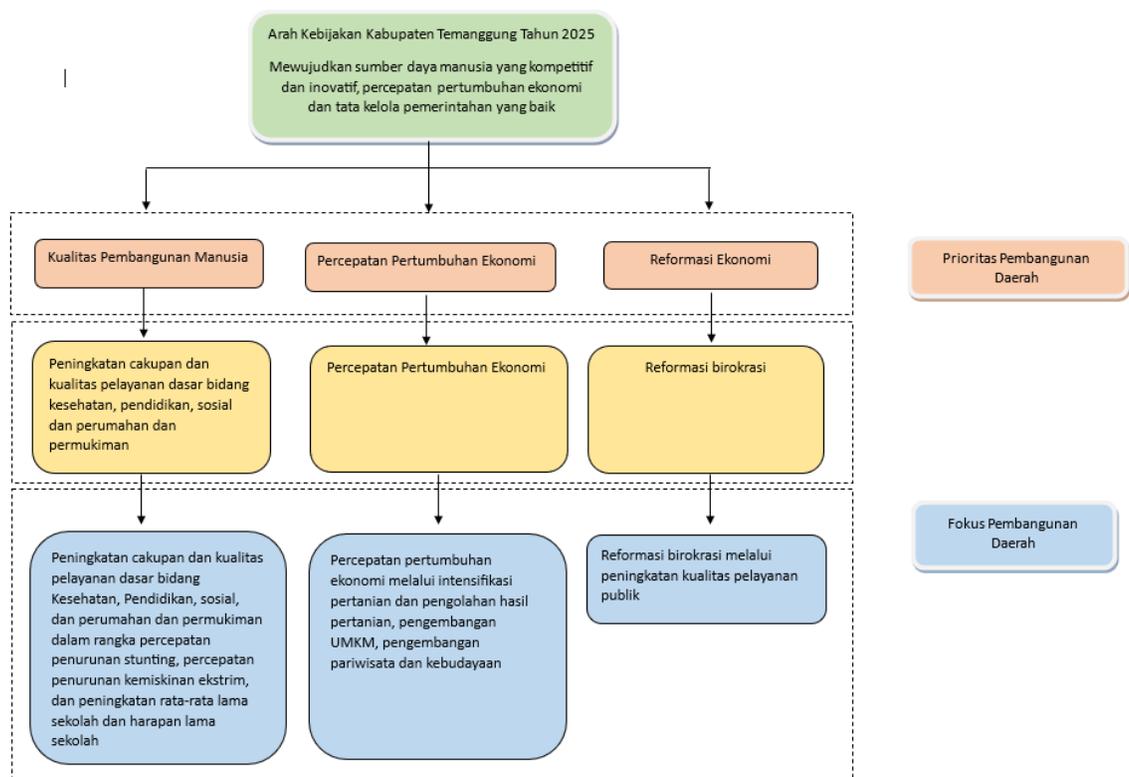
Oleh karena itu, pembangunan tahun 2025 ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia, pemulihan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik dengan **prioritas pembangunan** sebagaimana berikut:

Tabel 4.4
Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan	Fokus Pembangunan
1	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang Kesehatan, Pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, dan peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, pencapaian WAJAR 13 Tahun dan penanganan ATS.
2	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan
3	Pemantapan reformasi birokrasi	Reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RKPD Tahun 2025 dengan arah kebijakan RPD 2024-2026 dapat dijelaskan melalui gambar berikut:



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 4.4
Keterkaitan dan Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Temanggung dengan Arah Kebijakan RPD

Prioritas pembangunan Kabupaten dalam RKPD Tahun 2025 terkait erat dan selaras dengan arah kebijakan tahun 2025 pada RPD 2024-2026. Prioritas pembangunan Kabupaten Temanggung dalam RKPD 2025 sejumlah 3 prioritas seluruhnya terkait dan mendukung pada penjabaran

masing-masing dari arah kebijakan meningkatkan kualitas pembangunan manusia, percepatan ekonomi, dan pemantapan reformasi birokrasi.

Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RKPD 2025 dengan arah kebijakan RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026 dapat dilihat pada gambar 4.2 bahwa seluruh prioritas pembangunan daerah mendukung arah kebijakan RPD yang telah ditetapkan pada tahun 2025 dimana arah kebijakan menjadi pedoman dan acuan penentuan prioritas pembangunan daerah.

Perumusan prioritas RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dengan mempertimbangkan sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RPD, prioritas nasional, prioritas Provinsi Jawa Tengah, permasalahan pembangunan/isu strategis Kabupaten Temanggung, dan pokok-pokok pikiran DPRD. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah RPD Kabupaten Temanggung dengan Prioritas Nasional RPJMN

Dalam perumusan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Temanggung 2024 perlu memperhatikan keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah RPD dengan prioritas nasional RPJMN. Keselarasan antara sasaran pembangunan daerah RPD dengan prioritas nasional RPJMN dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Persandingan antara Sasaran Pembangunan Daerah RPD Kabupaten Temanggung dengan Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029

Prioritas Nasional RPJMN	Sasaran Pembangunan Daerah RPD	Indikator Sasaran
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan per Kapita • Angka Kemiskinan • Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia • Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Infrastruktur • Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH) • Indeks Rasa Aman
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatnya perekonomian Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan per Kapita • Angka Kemiskinan • Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia • Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
	Meningkatnya kualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata Lama

Prioritas Nasional RPJMN	Sasaran Pembangunan Daerah RPD	Indikator Sasaran
	pendidikan masyarakat	Sekolah (RLS) • Harapan Lama Sekolah (HLS)
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)
	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)
	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	• Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) • Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)
	Meningkatnya perekonomian Daerah	• Pendapatan per Kapita • Angka Kemiskinan • Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia • Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	• Rata-rata Lama Sekolah (RLS) • Harapan Lama Sekolah (HLS)
	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
	Meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan	• Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) • Indeks Pembangunan Olahraga • Indeks Pembangunan Kebudayaan
	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	• Rata-rata Lama Sekolah (RLS) • Harapan Lama Sekolah (HLS)
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatnya toleransi masyarakat	Indeks Toleransi
	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Rasa Aman
	Meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan	• Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) • Indeks Pembangunan Olahraga • Indeks Pembangunan Kebudayaan
	Meningkatnya kualitas	• Rata-rata Lama

Prioritas Nasional RPJMN	Sasaran Pembangunan Daerah RPD	Indikator Sasaran
	pendidikan masyarakat	Sekolah (RLS) • Harapan Lama Sekolah (HLS)
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	• Angka Harapan Hidup (AHH)
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	• Indeks Pembangunan Infrastruktur • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi	IPKD
	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	• Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) • Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	• Indeks Pembangunan Infrastruktur • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi	IPKD
	Meningkatnya pengelolaan SDM aparatur	Indeks Merit System
	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	• Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) • Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	Meningkatnya toleransi masyarakat	• Indeks Toleransi
	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	• Indeks Rasa Aman
Jumlah PN		7
Jumlah Indikator Sasaran		20
Keterkaitan		100%

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026 dengan prioritas nasional RPJMN sebesar 100%.

2. Keselarasan prioritas pembangunan dengan prioritas nasional RPJMN

Dalam perumusan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Temanggung 2025 perlu memperhatikan keselarasan antara prioritas

pembangunan dengan prioritas nasional RPJMN. Keselarasan antara prioritas pembangunan daerah RPD dengan prioritas nasional RPJMN dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6
Persandingan antara Prioritas Nasional RPJMN dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung

Prioritas Nasional RPJMN	Prioritas Pembangunan Daerah
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan pertumbuhan ekonomi
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman 2. Percepatan pertumbuhan ekonomi
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman 2. Pemantapan reformasi birokrasi
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman 2. Percepatan pertumbuhan ekonomi
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman 2. Percepatan pertumbuhan ekonomi
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan reformasi birokrasi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sejumlah 3 prioritas dengan 7 prioritas nasional RPJMN, dimana keseluruhan prioritas pembangunan daerah tersebut selaras dengan 7 prioritas nasional RPJMN. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam RPD Kabupaten Temanggung dengan prioritas nasional RPJMN sebesar 100%.

3. Keselarasan dan keterkaitan dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Tengah

Sebagaimana penjelasan di atas, arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2024 secara nasional dituangkan ke dalam 7 Prioritas Nasional yang secara rinci dijabarkan di sasaran pada masing-masing PN. Keterkaitan sasaran indikator sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RKPD 2025

dengan sasaran PN RKP 2025 dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.7

Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Sasaran PN RKP Tahun 2025

No	Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP *)	Sasaran RKPD Temanggung **)	Indikator Sasaran RKPD Temanggung
PN 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			
1	Terwujudnya transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi sebagai pendukung pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya perekonomian daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan per Kapita • Angka Kemiskinan • Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia • Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
		Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Infrastruktur • Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH) • Indeks Rasa Aman
2	Terwujudnya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui upaya revitalisasi industri dan penguatan daya saing usaha	Meningkatnya perekonomian daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan per Kapita • Angka Kemiskinan • Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia • Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
		Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Infrastruktur • Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH) • Indeks Rasa Aman
PN 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan			
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)	Tidak ada (karena Kabupaten Temanggung berada di Kawasan Barat Indonesia)	Tidak ada (karena Kabupaten Temanggung berada di Kawasan Barat Indonesia)
2	Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)	Meningkatnya perekonomian Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan per Kapita • Angka Kemiskinan • Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia • Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
		Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata Lama Sekolah (RLS) • Harapan Lama Sekolah (HLS)

No	Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP *)	Sasaran RKPD Temanggung **)	Indikator Sasaran RKPD Temanggung
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	• Angka Harapan Hidup (AHH)
		Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	• Indeks Pembangunan Gender (IPG)
PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing			
1	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	• Angka Harapan Hidup (AHH)
		Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	• Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) • Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	• Angka Harapan Hidup (AHH)
		Meningkatnya perekonomian Daerah	• Angka Kemiskinan
3	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	• Rata-rata Lama Sekolah (RLS) • Harapan Lama Sekolah (HLS)
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	• Angka Harapan Hidup (AHH)
4	Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	• Indeks Pembangunan Gender (IPG)
		Meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan	• Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) • Indeks Pembangunan Olahraga • Indeks Pembangunan Kebudayaan
5	Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	Meningkatnya perekonomian Daerah	• Pendapatan per Kapita • Angka Kemiskinan • Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia • Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
		Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	• Indeks Pembangunan Infrastruktur • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
6	Meningkatnya produktivitas dan daya saing	Meningkatnya perekonomian Daerah	• Pendapatan per Kapita • Angka Kemiskinan • Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia

No	Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP *)	Sasaran RKPD Temanggung **)	Indikator Sasaran RKPD Temanggung
			<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Penganguran Terbuka (TPT)
		Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Harapan Lama Sekolah (HLS)
PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan			
1	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	Meningkatnya toleransi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Indek Toleransi
		Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> Indek Rasa Aman
2	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	Meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
3	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	Meningkatnya toleransi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Indek Toleransi
		Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> Indek Rasa Aman
4	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	Meningkatnya toleransi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Indek Toleransi
		Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> Indek Rasa Aman
5	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Harapan Lama Sekolah (HLS)
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Angka Harapan Hidup (AHH)
6	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Harapan Lama Sekolah (HLS)
		Meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Indeks Pembangunan Olahraga Indeks Pembangunan Kebudayaan
PN 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar			

No	Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP *)	Sasaran RKPD Temanggung **)	Indikator Sasaran RKPD Temanggung
1	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Infrastruktur • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
2	Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Infrastruktur
3	Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Infrastruktur • Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH)
4	Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Infrastruktur • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
5	Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi.	<ul style="list-style-type: none"> • IPKD
		Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) • Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim			
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Infrastruktur • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
2	Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Infrastruktur • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
3	Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi (Gas Rumah Kaca) GRK terhadap <i>baseline</i>	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Infrastruktur • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
PN 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik			
1	Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas Lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi.	<ul style="list-style-type: none"> • IPKD
		Meningkatnya pengelolaan SDM aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Merit System
		Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) • Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

No	Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP *)	Sasaran RKPD Temanggung **)	Indikator Sasaran RKPD Temanggung
2	Optimalnya kebijakan luar negeri	Meningkatnya perekonomian daerah	<ul style="list-style-type: none"> Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Pendapatan per Kapita
3	Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	<ul style="list-style-type: none"> Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi.	<ul style="list-style-type: none"> IPKD
		Meningkatnya pengelolaan SDM aparatur	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Merit System
		Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	<ul style="list-style-type: none"> Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
5	Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	Meningkatnya toleransi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Indek Toleransi
		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	<ul style="list-style-type: none"> Indek Rasa Aman

Sumber: *) Peraturan Menteri PPN/BAPPENAS RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024

**) RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026

BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023

Sebagaimana telah tercantum pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 bahwa sasaran pembangunan daerah berjumlah 10 sasaran. Sedangkan, sasaran tiap prioritas nasional tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 yang berjumlah 29 sasaran. Melihat kepada penjelasan keterkaitan sasaran pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan dari 10 sasaran pembangunan Kabupaten Temanggung terkait dan sesuai dengan 28 sasaran prioritas nasional tahun 2023. Terdapat 1 sasaran prioritas nasional yang tidak dapat didukung oleh sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) pada PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Hal ini dikarenakan secara kewilayahan Kabupaten Temanggung berada di wilayah barat Indonesia. Secara persentase tingkat kes daerah RKPD dengan sasaran PN RKP Tahun 2025 sebesar 100% dikarenakan keseluruhan sasaran RKPD terkait dengan sasaran PN RKP Tahun 2025 meskipun terdapat 1 sasaran PN tidak terkait dikarenakan kewilayahan.

Keselarasn prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RKPD 2025 dengan prioritas nasional dan prioritas Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan
Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi Jawa Tengah 2025	Prioritas Kabupaten Temanggung 2025
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas	1. Percepatan Perumbuhan ekonomi
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman 2. Percepatan Perumbuhan ekonomi
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 2. Perbaiki tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman 2. Pemantapan reformasi birokrasi
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman 2. Percepatan Perumbuhan ekonomi
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman 2. Percepatan Perumbuhan ekonomi Pemantapan reformasi birokrasi melalui

No	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi Jawa Tengah 2025	Prioritas Kabupaten Temanggung 2025
			peningkatan kualitas pelayanan publik
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaiki tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	1. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung tahun 2024 yang berjumlah 3 prioritas selaras dengan 7 prioritas nasional dan 4 prioritas Provinsi Jawa Tengah. Tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dengan prioritas nasional RKP tahun 2024 dapat dinilai 100% (karena keseluruhan prioritas pembangunan daerah selaras dengan prioritas nasional).

4. Konsistensi dengan Permasalahan/Isu Strategis

Permasalahan pembangunan Kabupaten Temanggung telah diidentifikasi berdasarkan kaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sedangkan isu strategis Kabupaten Temanggung memperhatikan gambaran kondisi daerah dan permasalahan, capaian indikator kinerja serta arah kebijakan. Penyusunan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung berdasarkan isu strategis yang ada. Adapun permasalahan pembangunan/isu strategis telah tertuang pada bab II. Selanjutnya, permasalahan pembangunan tersebut diklasifikasikan kembali menurut masing-masing isu strategis yang ada guna pemetaan konsistensi terhadap prioritas pembangunan, strategi, dan arah kebijakan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.9
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis,
Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
1	Penurunan Kemiskinan Ekstrim	<ul style="list-style-type: none"> • Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung • Masih adanya masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan pemerlu jaminan dan perlindungan sosial • Pendataan PPKS belum optimal • Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Temanggung • Masih adanya kasus gizi buruk • Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal • Masih adanya pengangguran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman 2. Percepatan pertumbuhan ekonomi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan kebijakan bantuan sosial, keberpihakan kepada masyarakat miskin, rentan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 2. Meningkatkan pemberdayaan PPKS 3. Meningkatkan kesehatan keluarga 4. Pemberdayaan ekonomi keluarga 5. Meningkatkan pemberdayaan berbasis masyarakat 6. Meningkatkan kompetensi angkatan kerja 7. Meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM 8. Meningkatkan laju berinvestasi dan kualitas pelayanan perizinan 9. Meningkatkan nilai usaha industri 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan cakupan sasaran pemberdayaan PPKS melalui bantuan sosial usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama ➤ Peningkatan pelayanan kesehatan primer ➤ Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan ➤ Peningkatan sistem ketahanan kesehatan rujukan ➤ Peningkatan sistem pembiayaan kesehatan ➤ Peningkatan sumber daya kesehatan ➤ Pengembangan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) ➤ Penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui BUMDes ➤ Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan Pelatihan ➤ Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dan pengoptimalan keberadaan UMKM serta kemauan berwirausaha ➤ Peningkatan pelayanan dan promosi

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> Masih adanya angka putus sekolah SD sederajat dan SMP sederajat Masih terdapat Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS) Masih adanya infrastruktur dalam kondisi kurang baik seperti jembatan dan jaringan irigasi Masih adanya RTLH Masih diperlukannya upaya untuk meningkatkan akses sanitasi layak menuju akses sanitasi aman Masih diperlukan upaya-upaya untuk tetap mencukup ketersediaan pangan di Kabupaten Temanggung Diversifikasi pangan masih banyak menemui masalah 		<p>10. Pemberdayaan ekonomi keluarga</p> <p>11. Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan</p> <p>12. Meningkatkan infrastruktur dan sarana prasarana wilayah</p> <p>13. Meningkatkan kedaulatan dan kemandirian pangan</p>	<p>investasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kelembagaan, permodalan dan pemberdayaan industri Pengembangan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) Pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang memadai Pemenuhan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum Peningkatan peran masyarakat dalam pendidikan karakter Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur dan sarana prasarana wilayah Pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana wilayah Peningkatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan Peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan Peningkatan penyediaan dan distribusi pangan pokok atau pangan lainnya Peningkatan sertifikasi keamanan pangan
2	Penurunan Stunting	<ul style="list-style-type: none"> Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung 	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar	1. Penyempurnaan kebijakan bantuan sosial, keberpihakan kepada masyarakat miskin, rentan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan cakupan sasaran pemberdayaan PPKS melalui bantuan sosial usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Temanggung Masih adanya kasus gizi buruk Masih tingginya kasus kematian ibu Masih adanya kasus kematian bayi dan balita Masih perlunya peningkatan layanan ibu hamil, ibu bersalin dan kesehatan balita sesuai standar Masih adanya fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah yang belum terakreditasi utama Masih terdapat Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS) Masih adanya angka putus sekolah SD sederajat dan SMP sederajat Masih adanya rumah tidak sehat Masih adanya RTLH Masih diperlukannya upaya untuk meningkatkan akses sanitasi layak menuju akses sanitasi aman Masih diperlukan upaya-upaya untuk tetap mencukupi ketersediaan pangan di Kabupaten Temanggung Diversifikasi pangan masih banyak menemui masalah 	bidang kesehatan, Pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	<p>Sosial (PPKS)</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemberdayaan PPKS Meningkatkan kesehatan keluarga Optimalisasi intervensi spesifik percepatan penurunan stunting Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan Meningkatkan infrastruktur dan sarana prasarana wilayah Meningkatkan kedaulatan dan kemandirian pangan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelayanan kesehatan primer Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan Peningkatan sistem ketahanan kesehatan rujukan Peningkatan sistem pembiayaan kesehatan Peningkatan sumber daya kesehatan Peningkatan intervensi spesifik percepatan penurunan stunting melalui sinergi perangkat daerah Pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang memadai Pemenuhan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum Peningkatan peran masyarakat dalam pendidikan karakter Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur dan sarana prasarana wilayah Pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana wilayah Peningkatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan Peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pelaksanaan gerakan sayang ibu dan bayi 		8. Meningkatkan kebijakan responsive gender	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan penyediaan dan distribusi pangan pokok atau pangan lainnya Peningkatan sertifikasi keamanan pangan Peningkatan kapasitas PUG dan perlindungan perempuan dan anak
3	Kualitas Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Temanggung Masih adanya kasus gizi buruk Masih tingginya kasus kematian ibu Masih adanya kasus kematian bayi dan balita Masih perlunya peningkatan layanan ibu hamil, ibu bersalin, dan kesehatan balita sesuai standar Masih tingginya angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup Masih adanya sasaran <i>unmetneed</i> Perlunya peningkatan penanganan persampahan di Kabupaten Temanggung Masih tingginya lahan potensial kritis Perlunya peningkatan konservasi lingkungan hidup Masih adanya lahan potensial kritis yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung Adanya fenomena perubahan iklim yang berpotensi memberikan dampak merugikan Angka rata-rata lama sekolah belum mencapai Wajib Dikdas 9 Tahun Masih adanya angka putus sekolah 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman Percepatan pertumbuhan ekonomi 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kesehatan keluarga Optimalisasi intervensi spesifik percepatan penurunan stunting Optimalisasi pemanfaatan kawasan sesuai peruntukannya Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelayanan kesehatan primer Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan Peningkatan sistem ketahanan kesehatan rujukan Peningkatan sistem pembiayaan kesehatan Peningkatan sumber daya kesehatan Peningkatan intervensi spesifik percepatan penurunan stunting melalui sinergi perangkat daerah Optimalisasi pemanfaatan budidaya Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan lingkungan hidup sebagai dasar pengelolaan lingkungan hidup Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup Peningkatan pengelolaan sampah Pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang memadai Pemenuhan kualitas dan kuantitas

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>SD sederajat dan SMP sederajat</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih adanya fasilitas pendidikan ruang kelas dalam kondisi kurang baik Masih terdapat SMP yang belum terakreditasi minimal Masih adanya peserta pendidikan kesetaraan yang belum lulus Masih adanya penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Masih terdapat Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS) Belum optimalnya cakupan anak usia sekolah dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar <p>Masih adanya tenaga kerja yang belum memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan</p> <p>Belum optimalnya pemberdayaan terhadap perempuan</p> <p>Belum optimalnya pemenuhan hak anak</p> <p>Masih minimnya prestasi bidang Kepemudaan dan Olah Raga</p> <p>Athlet berprestasi dari tahun ke tahun cenderung menurun</p> <p>Masih rendahnya capaian peminjam buku di perpustakaan</p> <p>Belum optimalnya upaya pelestarian koleksi nasional dan koleksi naskah kuno di Temanggung</p>		<p>6. Meningkatkan kompetensi angkatan kerja</p> <p>7. Meningkatkan kebijakan responsif gender</p> <p>8. Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga</p> <p>9. Meningkatkan literasi masyarakat</p> <p>10. Meningkatkan pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal</p>	<p>tenaga pendidik dan tenaga kependidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum Peningkatan peran masyarakat dalam pendidikan karakter <p>Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan Pelatihan</p> <p>Peningkatan kapasitas PUG dan perlindungan perempuan dan anak</p> <p>Peningkatan pembinaan dan pemenuhan sarana prasarana pemuda dan olahraga</p> <p>Peningkatan sarana dan kapasitas sumber daya manusia perpustakaan</p> <p>Pembudayaan gemar membaca di masyarakat</p> <p>Peningkatan pembinaan pelaku seni budaya dan pengelolaan cagar / warisan budaya</p>

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
4	Percepatan Pemulihan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman Percepatan pertumbuhan ekonomi 	<ol style="list-style-type: none"> Pemberdayaan ekonomi keluarga Meningkatkan pemberdayaan berbasis masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) Penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui BUMDes
		<ul style="list-style-type: none"> Masih adanya infrastruktur dalam kondisi kurang baik seperti jembatan dan Jaringan irigasi Masih adanya RTLH 		<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan infrastruktur dan sarana prasarana wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur dan sarana prasarana wilayah Pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana wilayah
		<ul style="list-style-type: none"> Penanganan bencana kebakaran belum optimal Tingkat waktu taggap dalam merespon setiap laporan kejadian bencana juga perlu ditingkatkan, termasuk penanganan korban pasca bencana Masih diperlukan peningkatan penanganan bencana untuk mencapai target risiko bencana, cakupan desa tangguh bencana, desa mitigasi terhadap desa rawan bencana 		<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan perlindungan dan keamanan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas sumberdaya dan partisipasi masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan
		<ul style="list-style-type: none"> Masih adanya pengangguran 		<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kompetensi angkatan kerja Meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dan

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
				9. Meningkatkan laju berinvestasi dan kualitas pelayanan perizinan 10. Meningkatkan nilai usaha industri 11. Pemberdayaan ekonomi keluarga	pengoptimalan keberadaan UMKM serta kemauan berwirausaha ➤ Peningkatan pelayanan dan promosi investasi ➤ Peningkatan kelembagaan, permodalan dan pemberdayaan industri ➤ Pengembangan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)
		<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan Masih ditemukannya kendaraan bermotor yang tidak laik jalan serta masih adanya terminal tipe C dalam kondisi kurang baik 		12. Meningkatkan layanan perhubungan	➤ Peningkatan kapasitas SDM dan sarpras layanan perhubungan
		<ul style="list-style-type: none"> Masih terdapat koperasi tidak sehat yang memerlukan pengawasan Banyak usaha kecil dan menengah muncul namun tidak naik kelas Masih diperlukannya penguatan dalam pembinaan, pendidikan dan Pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif Pelunya peningkatan pemberian dukungan fasilitasi pengembangan usaha bagi usaha mikro Masih rendahnya investasi penanaman modal asing (PMA) Perkembangan jumlah pelaku/ kelompok seni dan budaya belum berbanding lurus dengan penyelenggaraan even-even seni dan budaya Kualitas SDM yang belum merata Masih ditemukan kelompok kesenian yang tidak produktif Masih belum optimalnya pembinaan 		13. Meningkatkan nilai usaha perdagangan 14. Meningkatkan jumlah pendapatan sektor pariwisata 15. Meningkatkan nilai usaha industry 16. Meningkatkan laju investasi dan kualitas pelayanan perizinan 17. Meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM 18. Pemberdayaan ekonomi keluarga 19. Meningkatkan pemberdayaan berbasis masyarakat 20. Meningkatkan pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	➤ Optimalisasi sistem dan Jaringan perdagangan ➤ Peningkatan akses pemasaran dan penggunaan produk lokal ➤ Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata ➤ Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif ➤ Peningkatan kelembagaan, permodalan, dan pemberdayaan industri ➤ Peningkatan pelayanan dan promosi investasi ➤ Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi ➤ Pengembangan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) ➤ Penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui pemberdayaan BUMDes ➤ Peningkatan pembinaan pelaku seni budaya dan pengelolaan cagar / warisan budaya

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		sejarah Kabupaten Temanggung <ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan objek wisata kurang optimal • Masih rendahnya ketertarikan dan pemahaman desa untuk membentuk desa wisata • Masih rendahnya sumber daya pelaku wisata dan ekonomi kreatif pendukung wisata • Kualitas sarana dan prasarana pasar belum kompetitif untuk bersaing dengan pasar modern • Ketertiban pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan masih kurang • Diperlukan perbaikan pada sarana prasarana pendukung pasar • Belum optimalnya pembinaan industri penghasil cukai 			
		<ul style="list-style-type: none"> • Perlu peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum • Masih perlunya peningkatan swasembada pada ikan konsumsi • Masih perlunya peningkatan pembinaan nelayan perairan umum • Penurunan luas panen tanaman pangan • Penurunan produksi tanaman pangan • Produktivitas tanaman pangan mengalami penurunan berbanding lurus dengan berkurangnya jumlah produksi dan luas panen • Produktivitas hasil peternakan mengalami penurunan • Terbatasnya pengetahuan petani dalam pengendalian OPT 		21. Meningkatkan produksi hasil pertanian dan peternakan 22. Meningkatkan kedaulatan dan kemandirian pangan 23. Meningkatkan produksi perikanan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan pemenuhan penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pertanian dan peternakan ➤ Peningkatan pengendalian kesehatan hewan, kesehatan, masyarakat veteriner, dan penanggulangan bencana pertanian dan peternakan ➤ Peningkatan dan pembinaan sumber daya manusia pertanian dan peternakan ➤ Peningkatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan ➤ Peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan ➤ Peningkatan penyediaan dan distribusi pangan pokok atau pangan lainnya ➤ Peningkatan sertifikasi keamanan pangan

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
					<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan kapasitas pembudidaya ikan ➤ Peningkatan mutu dan keamanan hasil perikanan ➤ Peningkatan pengendalian dan pengawasan penyediaan benih ikan
5	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil harus dijaga selalu konsistensinya • Masih adanya penduduk yang belum memiliki KTP El • Belum optimalnya pelayanan komunikasi dan informatika untuk masyarakat • Masih terdapat area publik yang belum mendapat fasilitasi akses internet dari sejumlah area publik yang ada • Masih adanya PPID Badan Publik yang tidak aktif • Masih adanya dualisme data statistik yang berasal dari kegiatan sektoral yang dikelola Pemkab dan data statistik yang sama yang dikelola BPS dari kegiatan statistik dasar • Perlu peningkatan pengelolaan data statistik sektoral • Perlu peningkatan validitas data produsen • Perlunya peningkatan koordinasi dalam pengumpulan data dari produsen data di luar Pemkab Temanggung • Belum optimalnya kualitas keamanan informasi Pemerintah 	Pemantapan reformasi birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan 2. Meningkatkan keterbukaan informasi publik 3. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel 4. Meningkatkan kualitas pengembangan layanan sistem pemerintahan secara elektronik 5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan kapasitas SDM dan sarpras administrasi kependudukan ➤ Peningkatan layanan pemerintah berbasis teknologi informasi ➤ Peningkatan upaya pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah ➤ Optimalisasi integrasi layanan Sistem Pemerintahan secara elektronik ➤ Peningkatan kapasitas pengelola layanan Sistem Pemerintah secara elektronik ➤ Peningkatan kapasitas SDM dan sarpras pelayanan publik

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya jumlah sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan dan penilaian resiko • Diperlukan peningkatan perbaikan dalam pengelolaan arsip • Masih adanya Peraturan Daerah yang belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati • Dokumentasi perundangan melalui JDIH belum berjalan dengan efektif • Upaya implementasi Reformasi Birokrasi masih perlu ditingkatkan • Kualitas pelayanan publik oleh masing-masing perangkat daerah belum optimal • Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung masih memerlukan perbaikan dan peningkatan • Masih terdapat pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang terhambat • Belum seluruh BUMD yang mendapatkan opini WTP atas pemeriksaan KAP • Diperlukan pengoptimalan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa • Diperlukan pengoptimalan dalam penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan • Perlunya peningkatan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa 		<ol style="list-style-type: none"> 6. Meningkatkan pengelolaan kearsipan 7. Meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 8. Meningkatkan kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual 9. Meningkatkan kualitas bantuan hukum, layanan hukum dan layanan informasi pelayanan hukum 10. Meningkatkan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi 11. Meningkatkan pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang terfasilitasi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan tata kelola arsip daerah ➤ Pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD ➤ Peningkatan kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual ➤ Peningkatan kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum ➤ Peningkatan kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan ➤ Peningkatan dukungan pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengesahan raperda yang tepat waktu cenderung menurun • Masih rendahnya jumlah perda inisiatif dibandingkan dengan raperda yang diusulkan oleh eksekutif • Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan aspirasi sesuai dengan yang direncanakan • Perlunya peningkatan keoptimalan persentase ketercapaian kinerja pembangunan daerah • Perlunya peningkatan konsistensi kegiatan rencana pembangunan • Perlunya peningkatan kualitas pengendalian monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan • Perlu peningkatan indeks pengelolaan keuangan daerah (IKPD) • Perlunya peningkatan penyusunan dokumen penganggaran tepat waktu • Perlu peningkatan konsistensi penganggaran terhadap perencanaan • Belum optimalnya penerapan sistem merit dalam pengelolaan kepegawaian di Kabupaten Temanggung • Perlu peningkatan keterwakilan jumlah perempuan dalam JPT, JA, dan JP dalam rangka pengarusutamaan gender • Belum optimalnya pelaksanaan updating data kepegawaian • Belum optimalnya pengikutsertaan 		<p>12. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan inovasi daerah</p> <p>13. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel</p> <p>14. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel</p> <p>15. Mewujudkan SDM aparatur yang berkinerja tinggi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Peningkatan kualitas sumber daya perencanaan ➢ Peningkatan peran serta pentahelix dalam perencanaan pembangunan ➢ Peningkatan budaya inovasi di lingkungan perangkat daerah dan masyarakat ➢ Peningkatan upaya pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah ➢ Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengelolaan Barang Milik Daerah ➢ Peningkatan tata kelola manajemen ASN berdasarkan sistem merit

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>ASN dalam diklat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya sumber daya manusia khususnya fungsional peneliti bidang penelitian dan pengembangan • Upaya peningkatan indeks persepsi anti korupsi • Perlu peningkatan optimalisasi maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Perlu peningkatan pengawasan baik perencanaan, keuangan maupun penyelenggaraan kinerja <ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya sarana dan prasarana lokal kelurahan di kecamatan dalam kondisi baik • Masih ditemukan lembaga masyarakat kelurahan yang tidak aktif • Perlu pengoptimalan kualitas layanan publik di kecamatan • Perlunya upaya untuk mendorong masyarakat melakukan pembayaran PBB tepat waktu <ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan peningkatan cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan • Pencegahan penyalahgunaan narkoba • Sumber daya pengelola yang masih rendah • Potensi desa masih dipandang rendah dan belum mampu menopang hidup 		<p>16. Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah</p> <p>17. Meningkatkan kualitas pelayanan publik</p> <p>18. Meningkatkan perlindungan dan keamanan masyarakat</p> <p>19. Meningkatkan kualitas pelayanan publik</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan kualitas dan kuantitas APIP ➤ Peningkatan kapasitas SDM dan sarpras pelayanan publik ➤ Peningkatan kapasitas sumberdaya dan partisipasi masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan ➤ Peningkatan kapasitas sumber daya dan partisipasi masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023

5. Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD

Berdasarkan amanat Pasal 178 Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran, selanjutnya hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan.

Dalam rangka memberikan masukan terhadap Penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025, DPRD Kabupaten Temanggung memberikan sumbangan pokok-pokok pikiran yang harus diperhatikan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yang selaras dengan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Temanggung.

DPRD memberikan penekanan khususnya pada isu strategis percepatan penanganan stunting dan percepatan penurunan kemiskinan ekstrem sesuai target Presiden 0% pada tahun 2025 serta pemulihan ekonomi, percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi agar dilakukan secara sinergi antar Perangkat Daerah, Perangkat Daerah dengan masyarakat, maupun sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah di atasnya (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), di samping itu, juga dilakukan dukungan terhadap pengembangan potensi sumber daya unggulan lokal (hortikultura, Kopi, Tembakau, Panili, Ternak dan lain-lain) dan peningkatan jejaring pemasaran yang selama ini masih menjadi kendala dari pengembangan potensi unggulan lokal tersebut.

Prioritas pembangunan daerah memuat pokok-pokok pikiran tahunan DPRD Kabupaten Temanggung. Keterkaitan prioritas pembangunan Kabupaten Temanggung yang memuat janji tahunan

kepala daerah dan pokok-pokok pikiran tahunan DPRD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.10
Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan
Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD Tahun 2025

NO	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN	POKOK-POKOK PIKIRAN TAHUNAN DPRD
1.	Penurunan Kemiskinan Ekstrem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman 2. Percepatan pertumbuhan ekonomi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi 2. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem 3. Percepatan Penanganan Stunting 4. Pengembangan Potensi Sumber Daya Unggulan Lokal (Holtikultura, Kopi, Tembakau, Panili, Ternak Dan Lain-Lain) 5. Peningkatan Jejaring Pemasaran
2.	Stunting	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman 	
3.	Kualitas pembangunan manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman 2. Percepatan pertumbuhan ekonomi 	
4.	Pemulihan Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman 2. Percepatan pertumbuhan ekonomi 	
5.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan reformasi birokrasi 	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023

Prioritas pembangunan daerah dijabarkan menjadi **program prioritas** sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4. Program Penyelenggaraan Jalan
5. Program Kawasan Permukiman
6. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
8. Program Peningkatan Kerjasama Desa
9. Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
10. Program Perlindungan Perempuan
11. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
12. Program Pengelolaan Persampahan
13. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
14. Program Informasi dan Komunikasi Publik
15. Program Aplikasi Informatika
16. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
17. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
18. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
19. Program Pengembangan Kebudayaan
20. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
21. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
22. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
23. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
24. Program Kepegawaian Daerah
25. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
26. Program Penyelenggaraan Pengawasan
27. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
28. Program Peningkatan Ketenteraman, dan Ketertiban Umum
29. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program prioritas merupakan program yang diselenggarakan untuk mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan

sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah mempunyai indikator sasaran dan penanggungjawab (OPD) untuk masing-masing program prioritas, dimana keterkaitannya dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 4.11
Keterkaitan Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah, Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Pagu Anggaran	Penanggung Jawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,95	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman	Program Pengelolaan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase APM PAUD (5-6 tahun) • Persentase APK PAUD (0-6 tahun) • Persentase APK PAUD (4-6 tahun) • Persentase APK PAUD (5-6 tahun) • Persentase Pendidik PAUD • Berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi • Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik • Persentase Jumlah Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD • Persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik • Persentase APM SD Sederajat • Persentase APK SD Sederajat • Angka Putus Sekolah SD Sederajat • Rasio Siswa/Guru SD • Rasio Siswa/Rombel SD • persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4 • persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik • persentase Kepala SD memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak • persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat • Rasio Jumlah Pengawas SD • Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik • Persentase APM SMP Sederajat • Persentase APK SMP Sederajat • Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat • Angka Putus Sekolah SMP Sederajat 	151.865.540.775	Dindikpora	<p>Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3)</p> <p>Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan pelayanan Dasar (PN 5)</p>
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,65						

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Pagu Anggaran	Penanggung Jawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional	
					<ul style="list-style-type: none"> Rasio Siswa/Guru SMP Rasio Siswa/Rombel SMP Persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik Persentase Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak Persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat Rasio Jumlah Pengawas SMP Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik Persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu Persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4 Persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri) 				
Meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan	Indek Pembangunan Pemuda (IPP)	4,23	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman 2. Pemulihan ekonomi	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	260.000.000	Dindikpora	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN 4)	
	Indeks Pembangunan Olahraga	3,81							Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3)
	Indeks Pembangunan	4,66		Program Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kelompok Budaya yang Teregister Persentase kelompok kesenian yang produktif 	7.580.000.000	Dinbudpar		

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Pagu Anggaran	Penanggung Jawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
	Kebudayaan (IPK)			Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pelestarian Sejarah Lokal Persentase Pelestarian Cagar Budaya 			
Meningkatnya toleransi masyarakat	Indeks Toleransi	4,51	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan 	700.000.000	Kesbangpol	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN 4) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7)
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	75,72	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Bayi (AKB) Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar Prevalensi anemia pada ibu hamil Cakupan Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani Angka Kematian Neonatal Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Angka Kematian Balita Prevalensi ballita gizi buruk Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan) Persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan 	226.145.645.214	Dinkes	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan pelayanan Dasar (PN 5)

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Pagu Anggaran	Penanggung Jawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
					<ul style="list-style-type: none"> sesuai standar Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase fasyankes rujukan yang memenuhi standar mutu Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar <i>Incident Rate</i> DBD (Demam Berdarah Dengue) Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan Persentase rumah sehat Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan 			
Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,77	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Perlindungan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kasus kekerasan terhadap anak perempuan Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan 	42.842.200	DPPPAPPKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3)
				Program Pemenuhan Hak Anak	<ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Layak Anak 	45.000.000		
Meningkatnya perekonomian Daerah	Pendapatan per Kapita	33,50	Percepatan pertumbuhan ekonomi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Produktivitas padi Produktivitas jagung Produktivitas bawang putih Produktivitas bawang merah Produktivitas cabai rawit Produktivitas cabai besar Produktivitas tembakau Produktivitas kopi robusta Produktivitas kopi arabika Produktivitas ternak sapi Produktivitas ternak domba Produktivitas ternak kambing Produktivitas ternak ayam ras pedaging Produktivitas ternak ayam petelur 	18.460.436.207	DKPPP	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Pagu Anggaran	Penanggung Jawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
					<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kelahiran pedet 			
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase IKM Industri berbasis pada komoditas unggulan • Persentase pembinaan IKM Tembakau Lembutan 	343.670.713	Disnaker	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan • Lama tinggal wisatawan • Persentase peningkatan desa wisata • Persentase peningkatan pelaku Ekraf 	190.000.000	Dinbudpar	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan • Persentase perusahaan yang bermitra 	7.000.000	DPMPPTSP	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan	330.000.000	Dinkopdag	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)
Angka Kemiskinan		8,10%	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial • Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota 	24.340.334.214	Dinsos	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Pagu Anggaran	Penanggung Jawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
			permukiman 2. Pemulihan ekonomi		<ul style="list-style-type: none"> Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 			Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)
	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	19	Percepatan pertumbuhan ekonomi	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang melakukan kerja sama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	15.000.000	Dinpermades	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,51 %	Percepatan pertumbuhan ekonomi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina 	613.000.000	Dinperinaker	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)
Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	75,20	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman 2. Percepatan pertumbuhan ekonomi	Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari 	9.081.058.000	DPUPR	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan pelayanan Dasar (PN 5)
				Program Penyelenggaraan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> persentase jalan Kondisi Mantap persentase jembatan dalam kondisi baik persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan 	22.697.649.250	DPUPR	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Pagu Anggaran	Penanggung Jawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
								Pengembangan Ekonomi dan pelayanan Dasar (PN 5)
				Program Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • persentase rumah layak huni • persentase kawasan kumuh perkotaan • persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) • persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM) 	6.113.909.000	DPUPR	<p>Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2)</p> <p>Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan pelayanan Dasar (PN 5)</p>
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,05	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman 2. Percepatan pertumbuhan ekonomi 	Program Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase sampah yang tertangani • Cakupan layanan persampahan 	3.525.000.000	DPRKPLH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN 6)
	Indeks Rasa Aman	4,69	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman 2. Percepatan pertumbuhan ekonomi 	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kamtibmas dan bencana alam	946.000.000	Satpol PP	<p>Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN 6)</p> <p>Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7)</p>

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Pagu Anggaran	Penanggung Jawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi.	IPKD	66	Pemantapan reformasi birokrasi	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu 	509.474.400	BAPPEDA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7)
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD Persentase dokumen penganggaran tepat waktu Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu 	410.851.694.364	BKPAD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7)
				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik Persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo 	1.029.911.600	Dinkominfo	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7)
Meningkatnya pengelolaan SDM aparatur	<i>Indeks Merit System</i>	0,55	Pemantapan reformasi birokrasi	Program Kepegawaian Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan Pengembangan SDM Aparatur Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan layanan Aparatur 	330.762.000	BKPSDM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7)
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	B/>6 0-70	Pemantapan reformasi birokrasi	Program Penyelenggaraan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi Persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD dan pengadaan barang/jasa Persentase penanganan aduan masyarakat Persentase tindak lanjut hasil temuan 	628.546.400	Inspektorat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7)
				Program Aplikasi Informatika	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik Persentase layanan publik secara elektronik 	1.274.889.125	Dinkominfo	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Pagu Anggaran	Penanggung Jawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
								Transformasi Pelayanan Publik (PN 7)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B/>6 0-70		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan Persentase pelunasan pembayaran PBB tepat waktu 	2.010.980.556	Kecamatan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7)
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terpeliharanya sarpras SIAK untuk pelayanan administrasi kependudukan Persentase pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan digital 	100.848.300	Dindikcapil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7)

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel di atas, keterkaitan indikator sasaran prioritas pembangunan dengan indikator kinerja program prioritas dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator kinerja program prioritas terkait dengan indikator sasaran prioritas pembangunan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa tingkat keterkaitan indikator sasaran prioritas pembangunan dengan indikator kinerja program prioritas sebesar 100%.

Sebagaimana tabel di atas pula, dapat terlihat bahwa indikator dampak digunakan sebagai indikator kinerja sasaran pembangunan daerah. Selain itu, keseluruhan program prioritas mempunyai indikator kinerja di mana indikator tersebut menggunakan indikator hasil. Tingkat penggunaan indikator hasil sebagai indikator kinerja program prioritas daerah sebesar 100%.

4.5. Arah Kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045

Tahun 2025 menjadi landasan dalam kerangka kerja pembangunan jangka panjang daerah. Untuk itu perlu penyelarasan kebijakan antara RKPD 2025 dengan RPJPD 2025-2045. Arah kebijakan jangka panjang daerah yang tertuang dalam RKPD adalah sebagai berikut :

4.5.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

- 1. Peningkatan peserta didik yang mencapai WAJAR 13 Tahun;**
- 2. Penurunan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS);**
- 3. Penguatan kebijakan dan regulasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;**
- 4. Perluasan dan pengembangan akses beserta sarana dan prasarana layanan pendidikan PAUD;**
- 5. Peningkatan kompetensi tenaga pengajar secara berkelanjutan;**
- 6. Perluasan pendidikan formal maupun non formal yang inklusif, adaptif dan humanis;**
- 7. Peningkatan revitalisasi bangunan kuno dan cagar budaya;**
- 8. Peningkatan peran masyarakat dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal;**
- 9. Meningkatnya masyarakat yang berbudaya;**
- 10. Kebebasan berpendapat untuk masyarakat.**

4.5.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan jembatan;
- 2) Pengendalian pemanfaatan ruang;
- 3) Peningkatan sarana dan prasarana bidang tata ruang;
- 4) Penyediaan sarana air minum dan sanitasi aman bagi masyarakat;
- 5) Peningkatan kualitas dan perluasan jaringan infrastruktur transportasi.

4.5.3 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas dengan optimalisasi pemetaan daerah rawan pelanggaran dan bencana;
- 2) Peningkatan kapasitas tenaga keamanan dan pemadam kebakaran.

4.5.4 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

- 1) Peningkatan pelestarian kawasan lindung;
- 2) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
- 3) Pemanfaatan kawasan budidaya dengan tidak melampaui daya dukung dan daya ruang.;
- 4) Peningkatan sarana prasarana pengelolaan persampahan yang menjangkau seluruh wilayah;
- 5) Pembentukan kelompok masyarakat pengelola sampah berbasis 5R;
- 6) Penerapan *green economy*;
- 7) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.

4.5.5 Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

- 1) Peningkatan akses terhadap listrik terutama pada masyarakat yang kurang mampu;
- 2) Penguatan dan pemerataan jaringan listrik yang terpadu;
- 3) Penyediaan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.

4.5.6 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian;
- 2) Peningkatan kebijakan kemandirian pangan;

- 3) Peningkatan pengelolaan pertanian yang modern yang didukung dengan peningkatan kualitas SDM pertanian;
- 4) Penguatan kebijakan yang mendukung keterjangkauan pangan masyarakat ;
- 5) Penguatan kebijakan untuk mendukung pertanian yang alami dan meminimalisir pencemaran lingkungan;
- 6) Penurunan ahli fungsi lahan pertanian dan mendukung.

4.5.7 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Peningkatan dan pemerataan infrastruktur dasar layanan perdesaan;
- 2) Peningkatan konektivitas antar kawasan;
- 3) Pengembangan dan penguatan desa mandiri melalui ekonomi sektor unggulan;
- 4) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
- 5) Penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan desa.

4.5.8 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM

- 1) peningkatan kualitas produk unggulan UMKM dan IKM;
- 2) Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM;
- 3) Penguatan kebijakan yang mendukung kelembagaan koperasi;
- 4) Peningkatan produktivitas BUMD.

4.5.9 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

- 1) Peningkatan konektivitas infrastruktur layak antar destinasi wisata;
- 2) Peningkatan sarana parasarana yang layak untuk mendukung pariwisata;
- 3) Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata;
- 4) Penguatan kebijakan untuk mendukung pariwisata yang terintegrasi;
- 5) Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan.

4.5.10 Urusan Pemerintahan Bidang Industri

- 1) Peningkatan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan logistik pendukung industri;
- 2) pengembangan industri dengan bahan baku lokal;

- 3) Penguatan kebijakan untuk memudahkan iklim investasi dan industri ;
 - 4) Penguatan kebijakan untuk mendukung pengembangan kawasan industri dengan memperhatikan *green economy*.
- 4.5.11 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 1) Optimalisasi digital dalam tata kelola pemerintahan;
 - 2) Peningkatan pelayanan publik yang cepat dan tepat;
 - 3) Penyederhanaan regulasi yang mendukung pelayanan yang optimum;
 - 4) Penguatan integritas SDM pelayanan publik.
- 4.5.12 Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum
- 1) Penguatan kebijakan untuk mendukung keterbukaan pelayanan pengaduan masyarakat;
 - 2) Penguataan lembaga pemerintahan yang efektif dan efisien;
 - 3) Peningkatan kerjasama dan kolabaris antar daerah ataupun instansi baik secara vertikal maupun horizontal.
- 4.5.13 Urusan Pemerintahan Bidang Penunjang
- 1) Penguatan integritas untuk ASN;
 - 2) Fasilitasi peningkatan kompetensi ASN;
 - 3) Penguatan manajemen ASN;
- 4.5.14 Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan
- 1) Penguatan pengawasan yang independen dan berintegritas.
 - 2) Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan dan fungsi intansi Pemerintah.

Tabel 4.12
Keterkaitan arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2045 dengan RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2025

Arah Kebijakan RPJD Kabupaten Temanggung 2025-2045	Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025	Bidang
Penguatan nilai budaya di dalam aktivitas kehidupan masyarakat (internalisasi)	1. Penguatan kemandirian dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas dengan optimalisasi pemetaan daerah rawan pelanggaran dan bencana;	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
	2. Peningkatan kapasitas tenaga kemandirian dan pemadam kebakaran	
	1. Peningkatan konektivitas infrastruktur layak antar destinasi wisata;	Pariwisata
	2. Peningkatan sarana prasarana yang layak untuk mendukung pariwisata;	
	3. Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata;	
	4. Penguatan kebijakan untuk mendukung	

	<p>pariwisata yang terintegrasi;</p> <p>5. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan</p>		
	<p>1. Peningkatan revitalisasi bangunan kuno dan cagar budaya;</p> <p>2. Peningkatan peran masyarakat dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal;</p> <p>3. Meningkatnya masyarakat yang berbudaya;</p> <p>4. Kebebasan berpendapat untuk masyarakat.</p>	Pendidikan	
Pemerataan dan penguatan sarana prasarana dan infrastruktur pendukung pelayanan publik	<p>1. Perluasan dan pengembangan akses beserta sarana dan prasarana layanan pendidikan PAUD</p> <p>2. Peningkatan kompetensi tenaga pengajar secara berkelanjutan</p>	Pendidikan	
	<p>1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;</p> <p>2. Penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan desa</p>	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	<p>1. Penguatan kebijakan untuk mendukung keterbukaan pelayanan pengaduan masyarakat;</p> <p>2. Penguatan lembaga pemerintahan yang efektif dan efisien;</p> <p>3. Peningkatan kerjasama dan kolaborasi antar daerah ataupun instansi baik secara vertikal maupun horizontal</p>	Pemerintahan Umum	
	<p>1. Penguatan integritas untuk ASN;</p> <p>2. Fasilitasi peningkatan kompetensi ASN;</p> <p>3. Penguatan manajemen ASN</p>	Penunjang	
	<p>1. Penguatan pengawasan yang independen dan berintegritas.</p> <p>2. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah.</p>	Pengawasan	
Penguatan kualitas pelayanan lingkungan, mitigasi bencana dan dampak perubahan iklim	<p>1. Peningkatan sarana dan prasarana bidang tata ruang;</p> <p>2. Penyediaan sarana air minum dan sanitasi aman bagi masyarakat;</p>	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	<p>1. Penguatan kemandirian dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas dengan optimalisasi pemetaan daerah rawan pelanggaran dan bencana;</p> <p>2. Peningkatan kapasitas tenaga kemandirian dan pemadam kebakaran</p>	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
	<p>1. Peningkatan pelestarian kawasan lindung;</p> <p>2. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup;</p> <p>3. Pemanfaatan kawasan budidaya dengan tidak melampaui daya dukung dan daya ruang;</p> <p>4. Peningkatan sarana prasarana pengelolaan persampahan yang menjangkau seluruh wilayah;</p> <p>5. Pembentukan kelompok masyarakat pengelola sampah berbasis 5R;</p> <p>6. Penerapan green economy;</p> <p>7. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya</p>	Lingkungan Hidup	
	<p>1. Penyediaan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan</p>	Energi dan Sumber daya air mineral	
	<p>1. Penguatan kebijakan untuk mendukung pertanian yang alami dan meminimalisir pencemaran lingkungan;</p> <p>2. Penurunan ahli fungsi lahan pertanian dan mendukung</p>	Pertanian	
Penguatan produktivitas dan skala ekonomi untuk seluruh sektor ekonomi	<p>1. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian;</p> <p>2. Peningkatan kebijakan kemandirian pangan;</p> <p>3. Peningkatan pengelolaan pertanian yang modern yang didukung dengan peningkatan kualitas SDM</p>	Pertanian	

	<p>pertanian;</p> <p>4. Penguatan kebijakan yang mendukung keterjangkauan pangan masyarakat</p>	
	<p>1. Peningkatan konektivitas infrastruktur layak antar destinasi wisata;</p> <p>2. Peningkatan sarana parasarana yang layak untuk mendukung pariwisata;</p> <p>3. Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata;</p> <p>4. Penguatan kebijakan untuk mendukung pariwisata yang terintegrasi;</p> <p>5. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan</p>	Pariwisata
	<p>1. Pengembangan dan penguatan desa mandiri melalui ekonomi sektor unggulan</p>	Pemberdayaan masyarakat dan desa
	<p>1. Peningkatan kualitas produk unggulan UMKM dan IKM;</p> <p>2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM;</p> <p>3. Penguatan kebijakan yang mendukung kelembagaan koperasi;</p> <p>4. Peningkatan produktivitas BUMD</p>	Koperasi dan UMKM
	<p>1. Peningkatan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan logistik pendukung industri;</p> <p>2. pengembangan industri dengan bahan baku lokal;</p> <p>3. Penguatan kebijakan untuk memudahkan iklim investasi dan industri ;</p> <p>4. Penguatan kebijakan untuk mendukung pengembangan kawasan industri dengan memperhatikan green economy</p>	Industri
Penguatan akses dan konektivitas wilayah untuk menunjang sistem keterkaitan wilayah	<p>1. Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan jembatan</p> <p>2. Peningkatan kualitas dan perluasan jaringan infrastruktur transportasi</p>	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	<p>1. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur dasar layanan perdesaan;</p> <p>2. Peningkatan konektivitas antar kawasan</p>	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	<p>1. Optimalisasi digital dalam tata kelola pemerintahan</p>	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	<p>1. Penguatan dan pemerataan jaringan listrik yang terpadu</p>	Energi dan Sumberdaya Mineral
Penguatan dan Pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial	<p>1. Peningkatan peserta didik yang mencapai WAJAR 13 Tahun;</p> <p>2. Penurunan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS);</p> <p>3. Penguatan kebijakan dan regulasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;</p> <p>4. Perluasan dan pengembangan akses beserta sarana dan prasarana layanan pendidikan PAUD;</p> <p>5. Peningkatan kompetensi tenaga pengajar secara berkelanjutan;</p> <p>6. Perluasan pendidikan formal maupun non formal yang inklusif, adaptif dan humanis</p>	Pendidikan
	<p>1. Peningkatan akses terhadap listrik terutama pada masyarakat yang kurang mampu;</p> <p>2. Penguatan dan pemerataan jaringan listrik yang terpadu</p>	Energi dan Sumberdaya Mineral

4.6. Kontribusi Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 pada Tahun 2024

Pemerintah Kabupaten Temanggung mendukung terlaksananya Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal–Semarang–Salatiga–Demak–Grobogan, Kawasan Purworejo–Wonosobo–Magelang–Temanggung dan Kawasan Brebes–Tegal–Pemalang. Kabupaten Temanggung masuk dalam percepatan Kawasan Puwomanggung. Program kegiatan yang direncanakan dalam mendukung percepatan tersebut melalui:

1. Peningkatan sektor ketenagakerjaan, di antaranya melalui:
 - a. Penciptaan/peluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha khususnya di sektor perdagangan dan jasa (*handycraft*, makanan minuman, produk hasil pertanian) serta pariwisata;
 - b. Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi
 - c. *Upskilling* terhadap instruktur dan *upgrading* sarana prasarana BLK dan SMK
 - d. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
2. Pemantapan ketahanan pangan, di antaranya melalui: pembangunan jaringan irigasi usaha tani, Pengembangan *Food Estate* dimana aspek hilirisasi yang sudah dilakukan yaitu peningkatan kapasitas jalan Bansari, pelatihan penyimpanan komoditas, dan pengawalan *oftaker*.
3. Peningkatan daya saing pariwisata, di antaranya melalui: Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi kompetensi
4. Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, di antaranya melalui:
 - a. Pendampingan promosi dan pengemasan produk, serta jaminan kualitas kelayakan produk;
 - b. Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku dan akses permodalan
 - c. Pelatihan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis digital;
 - d. Pendampingan pelatihan digital marketing bagi pelaku UMKM
5. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah, di antaranya melalui peningkatan sistem jaringan jalan.

4.7. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur pada Tahun 2024

Program pembangunan infrastruktur pada RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 difokuskan untuk mendukung terwujudnya peningkatan kualitas pembangunan manusia, pemulihan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan infrastuktur yang direncanakan tidak sebatas bidang pekerjaan umum, tetapi juga bidang kesehatan, pendidikan, dan pertanian.

Perencanaan pembangunan infrastruktur di DPUPR bertujuan meningkatkan kualitas jalan sehingga memperlancar arus transportasi yang akan berdampak dalam pergerakan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan, meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan daya saing daerah. Selain itu, pembangunan infrastruktur diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kesesuaian rencana tata ruang.

Perencanaan pembangunan infrastruktur di Dinas Kesehatan bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat melalui puskesmas dan diarahkan mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia, khususnya pencegahan stunting.

Perencanaan pembangunan infrastruktur di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan bertujuan meningkatkan produktivitas pangan, pertanian, dan perikanan dan diarahkan mendukung prioritas peningkatan kualitas pembangunan manusia dan pemulihan ekonomi.

Perencanaan pembangunan infrastruktur di Dindikpora bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat dan diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia.

4.8. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Target SDGs Kabupaten Temanggung

Pemerintah Kabupaten Temanggung sepenuhnya mendukung dan berkomitmen dalam mendukung terwujudnya tujuan SDGs sejumlah 17 tujuan melalui beberapa program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Temanggung. Ada satu tujuan yaitu tujuan 10 yang tidak secara langsung berkontribusi karena hal tersebut merupakan kewenangan pusat.

Tabel 4.13
Keterkaitan Tujuan SDGs, Sasaran Daerah dan Prioritas Daerah
di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat - Meningkatnya perekonomian Daerah - Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman - Percepatan pertumbuhan ekonomi
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat - Meningkatnya perekonomian Daerah - Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman - Percepatan pertumbuhan ekonomi
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat - Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman - Percepatan pertumbuhan ekonomi
4	Menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan belajar sepanjang hayat	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat - Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman - Pemantapan reformasi birokrasi
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman - Percepatan pertumbuhan ekonomi
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan	tidak ada indikator di Pemerintah Kabupaten Temanggung karena ESDM bukan kewenangan kabupaten/kota	

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH
	modern		
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya perekonomian Daerah - Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman Percepatan pertumbuhan ekonomi
9	Membangun infrastruktur yang tangguh meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman Percepatan pertumbuhan ekonomi
10	Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak - Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman - Percepatan pertumbuhan ekonomi
11	Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	- Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	- Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya perekonomian Daerah - Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman Percepatan pertumbuhan ekonomi
13	Mengatasi langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman
14	Melakukan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk	Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak ada indikator berikut karena tidak mempunyai laut	

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH
	pembangunan yang berkelanjutan		
15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan	Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak ada indikator berikut karena bukan merupakan indikator di tingkat kabupaten/kota	
16	Mewujudkan Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	Meningkatnya toleransi masyarakat	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi. - Meningkatnya pengelolaan SDM aparatur - Meningkatkan kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani 	Pemantapan reformasi birokrasi

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023

4.9. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Penanganan Stunting Kabupaten Temanggung

Pemerintah telah menetapkan stunting menjadi isu prioritas nasional dengan target 14% pada tahun 2024 terlebih lagi capaian stunting tahun 2022 di angka 28,90% yang tentunya hal tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan secara nasional. Kabupaten Temanggung sangat berkomitmen untuk mencapai target nasional tersebut, hal ini ditunjukkan dengan arah kebijakan pada RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2024.

Sasaran, prioritas daerah dan program dalam mendukung Penanganan Stunting Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 4.14

Sasaran, Prioritas Pembangunan, dan Program yang mendukung Penanganan Stunting

NO	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Pelaksana
1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pengelolaan Pendidikan	Dindikpora
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan,	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	Dinas Kesehatan

NO	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Pelaksana
		pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Upaya Kesehatan Masyarakat	
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Dinas Kesehatan
4	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPRKPLH
5	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
6	Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	DPPPAPPKB
7	Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
8	Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
9	Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
10	Meningkatnya perekonomian Daerah	Percepatan pertumbuhan ekonomi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana	DKPPP
11	Meningkatnya perekonomian Daerah	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Dalam mendukung aksi percepatan penurunan dan penanganan stunting, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung memperkuat peran Tim Percepatan Penurunan Stunting serta Satgas Percepatan Penurunan Stunting (satgas dibentuk dari tingkat kabupaten, kecamatan dan tingkat desa/kelurahan yang melibatkan berbagai pihak mulai dari Pemerintah

Desa, PKK, Camat, Puskesmas, Babinsa, Babinkamtibmas, pendamping KB, pendamping desa, petugas PLKB, PLD, pendamping PKH, pendamping TKSK, relawan masyarakat dan organisasi masyarakat baik dari Aisyiyah, Muslimat, Ansor, Banser, Pemuda Muhammadiyah, dan GPK) dalam mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara konvergen hingga tingkat desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung.

Hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung sejak tahun 2023 yaitu intervensi spesifik percepatan penurunan stunting melalui sinergitas perangkat daerah diantaranya skrining anemia, konsumsi tablet tambah darah remaja putri, pemeriksaan kehamilan, konsumsi tablet tambah darah bagi ibu hamil, PMT bagi ibu hamil KEK (berbahan pangan lokal bagi ibu hamil KEK dan balita gizi kurang), pemantauan tumbuh kembang balita, pemberian ASI eksklusif, pemberian MPASI kaya protein hewani bagi baduta serta tata laksana balita weight faltering dan pemberian PMT gizi kurang, balita gizi buruk dan rujukan balita stunting.

4.10. Dukungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Ekstrem yang menargetkan angka kemiskinan 0% maka Pemerintah Kabupaten Temanggung menerapkan 3 strategi yaitu:

- 1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi yaitu kelompok program/kegiatan seperti Bantuan Sosial Reguler (PKH dan Sembako), Bantuan Sosial Khusus (BLT DD, BST, top up bansos regular), PBI JKN, Bantuan Siswa Miskin, Iuran Jaminan Sosial, Kartu Jateng Sejahtera, RTLH dan jamban, instalasi dan subsidi listrik, bantuan dan rehabilitasi kelompok berkebutuhan khusus.
- 2) Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat seperti program padat karya, program vokasi dan Pelatihan, peningkatan akses aset produktif, akses modal dan akses penggunaan lahan, peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pemberian modal usaha pada UEP dan KUBE.
- 3) Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar seperti jambanisasi, air minum, dan sanitasi layak, peningkatan akses layanan dan

infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan konektivitas antarwilayah seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

Strategi tersebut dilakukan dengan peningkatan validitas data yang memanfaatkan infrastruktur teknologi komunikasi dan pendataan secara *bottom up* untuk menjadi dasar intervensi yang akan dilakukan. Intervensi berbasis individu dan kewilayahan yang dilakukan secara kolaboratif, fokus dan tepat sasaran sesuai dengan potensi dan permasalahan yang ada. Fokus intervensi yang dilakukan adalah pemberian bantuan secara tepat sasaran, peningkatan akses layanan dan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat dengan pengembangan wisata dan pemberdayaan produk lokal.

Pemerintah Kabupaten Temanggung sangat berkomitmen dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, hal tersebut ditunjukkan dengan arah kebijakan RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2025 yang juga sebagai penerapan dari 3 strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Sasaran, prioritas daerah dan program dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 4.15
Sasaran, Prioritas Pembangunan, dan Program yang mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem

NO	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Pelaksana
1.	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman	Program Penanganan Bencana	BPBD
2.	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
3.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
4.	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Pemantapan reformasi birokrasi	Program Pencatatan Sipil	DINDUKCAPIL
5.	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	DINHUB
6.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya	DINKES

NO	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Pelaksana
		dan perumahan dan permukiman	Kesehatan Masyarakat	
7.	Meningkatnya perekonomian daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	DINKOPDAG
8.	Meningkatnya perekonomian daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengembangan UMKM	DINKOPDAG
9.	Meningkatnya perekonomian daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	DINPERINAKER
10.	Meningkatnya perekonomian daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Penempatan Tenaga Kerja	DINPERINAKER
11.	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Pemantapan reformasi birokrasi	Program Administrasi Pemerintahan Desa	DINPERMADES
12.	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Pemantapan reformasi birokrasi	Program Penataan Desa	DINPERMADES
13.	Meningkatnya perekonomian daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	DINPERMADES
14.	Meningkatnya perekonomian Daerah	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman	Program Pemberdayaan Sosial	DINSOS
15.	Meningkatnya perekonomian Daerah	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	DINSOS
16.	Meningkatnya perekonomian Daerah	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman	Program Rehabilitasi Sosial	DINSOS
17.	Meningkatnya perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Penanganan Kerawanan Pangan	DKPPP
18.	Meningkatnya perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DKPPP
19.	Meningkatnya perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKPPP
20.	Meningkatnya perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	DKPPP
21.	Meningkatnya perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	DKPPP
22.	Meningkatnya perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	DKPPP
23.	Meningkatnya perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPPP
24.	Meningkatnya perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPPP
25.	Meningkatnya perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Penyuluhan Pertanian	DKPPP
26.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (SS)	DPPPAPPKB
27.	Meningkatnya perekonomian Daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	DINPERMADES
28.	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman	Program Kawasan Permukiman	DPRKPLH

NO	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Pelaksana
29.	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPRKPLH
30.	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	DPUPR

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem Pemerintah Kabupaten melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten bersinergi dengan berbagai pihak seperti lembaga amal zakat, CSR dan TJSLP dalam membantu intervensi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

4.11. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Temanggung

Strategi pengarusutamaan gender di Kabupaten Temanggung tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 tahun 2018 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Temanggung. Sesuai Perbup ini, seluruh perangkat daerah dan desa wajib menyusun perencanaan penganggaran responsive gender pada semua program dan kegiatan secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada menggunakan Teknik analisis gender berupa GAP (*Gender Analysis Pathway*) dan GBS (*Gender Budget Statement*). Adapun penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender dilaksanakan setiap tahun sebelum penyusunan rencana kerja anggaran.

Tabel 4.16
Sasaran dan Prioritas Daerah yang Mendukung Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Temanggung Tahun 2025

NO	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Indeks Pembangunan Gender	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DPPAPPPKB
				Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DPPAPPPKB
				Program Perlindungan Perempuan	DPPAPPPKB
				Program Pengendalian	DPPAPPPKB

				Penduduk	
				Program Pembinaan Keluarga Berencana	DPPAPPPKB
				Program Pembinaan dan Fasilitas Perencanaan, Evaluasi, Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa	DINPERMADES
				Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat/Desa dan Perberdayaan Kawasan Perdesaan	DINPERMADES
				Program Pendaftaran Penduduk	DINDUKCAPIL
				Program Pencatatan Sipil	DINDUKCAPIL
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	DINKOPDAG
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DINKOPDAG
				Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	DINKOPDAG
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro	DINKOPDAG
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DINPERINAKEK
				Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD
				Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	SETDA
				Program Perekonomian dan Pembangunan	SETDA
				Program Pembinaan	DINPUSIP

				Perpustakaan	
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
				Program Pendidikan Politik Masyarakat	KESBANGPOL
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	INSPEKTORAT
				Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPEDA
				Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	BAPPEDA
				Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	BAPPEDA
				Program Pelayanan Penanaman Modal	DPM
				Program Penanganan Fakir Miskin	DINSOS
				Program Pemberdayaan Sosial	DINSOS
				Program Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	DINKOMINFO
				Program pemeliharaan Kentetraman Dan Ketertiban Umum	SATPOL PP DAMKAR
				Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	DINKES
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD
				Program Pengelolaan dan	DPUPR

				Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
				Program Pengembangan Permukiman	DPUPR
				Pogram Pengembangan Perumahan	DPRKPLH
				Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh	DPRKPLH

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 01 Tahun 2012 termuat definisi desa/kelurahan tangguh bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Hal tersebut sangat berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, RPD Kabupaten Temanggung pada tahun 2024-2026 menempatkan pengarusutamaan kerentanan bencana dan perubahan iklim pada tujuan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan pada sasaran meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas.

Sasaran Daerah dalam mendukung pengarusutamaan kerentanan bencana dan perubahan iklim yaitu meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas. Hal tersebut terlihat dari indikator sasaran Indeks Rasa Aman dimana sasaran tersebut didukung dengan indikator sasaran Perangkat Daerah berupa Indeks Resiko Bencana, Persentase peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Cakupan Pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/Kota, dan Cakupan Penanganan Bencana Non Kebakaran Kabupaten.

Sasaran, prioritas daerah, dan program dalam mendukung pengarusutamaan kerentanan bencana dan perubahan iklim sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 4.17

Sasaran dan Prioritas Daerah yang Mendukung Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim di Kabupaten Temanggung Tahun 2025

NO	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	STRATEGI	PROGRAM
1.	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	a. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman b. Pemantapan reformasi birokrasi	a. Meningkatkan infrastruktur dan sarana dan prasarana wilayah b. Optimalisasi pemanfaatan kawasan sesuai peruntukannya c. Optimalisasi pemanfaatan kawasan sesuai kewenangan	a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat b. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan c. Program Penanganan Kerawanan Pangan d. Program Pengawasan Keamanan Pangan e. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian f. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian g. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian h. Program Penyuluhan Pertanian i. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner j. Program Perencanaan Lingkungan Hidup k. Program Pengendalian Pencemaran l. Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup m. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

4.12. Fasilitasi Perubahan Iklim

Dalam upaya melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional dan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim, berikut beberapa hal yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung:

1. Gas Rumah Kaca

Perubahan iklim global yang terjadi disebabkan karena terganggunya keseimbangan energi antara bumi dan atmosfer. Keseimbangan tersebut dipengaruhi antara lain oleh peningkatan gas-gas asamarang

atau karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄) dan nitrous oksida (NO) yang lebih dikenal dengan gas rumah kaca (GRK).

Perubahan iklim global tersebut telah mendorong sektor pemerintahan untuk berperan aktif dalam upaya penurunan emisi GRK. Pada tingkat Provinsi Jawa Tengah capaian kinerja penurunan emisi GRK tahun 2021 sebesar 6.028,02 ton CO₂eq (CO₂ *equivalen*) yang berasal dari sektor pengelolaan limbah. Kabupaten Temanggung dalam konteks perubahan iklim menghasilkan GRK dari kegiatan ekonomi, utamanya dari kegiatan penggunaan energi, industri, pertanian, peternakan, kehutanan dan pengelolaan limbah.

Pada tahun 2018 Kabupaten Temanggung memulai untuk melakukan inventarisasi GRK dan ditindaklanjuti pada Tahun 2020 melalui *updating* data dan analisis. Penyusunan dokumen ini dilakukan dengan pelibatan unsur dari berbagai pemangku kepentingan dan mempertimbangkan karakteristik, potensi emisi serta prioritas rencana pembangunan daerah. Pelibatan OPD di Kabupaten Temanggung sejak dari awal proses sampai dengan akhir dimaksudkan sebagai upaya menjaga kualitas dan akurasi data sumber emisi GRK.

Emisi GRK Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, sedangkan mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan emisi Tahun 2018. Emisi di Tahun 2019 termasuk kategori tinggi dikarenakan keberadaan data tentang sektor peternakan, lahan dan pertanian (terutama pada sub sector perubahan lahan yang tinggi). Emisi Kabupaten Temanggung berfluktuatif dengan emisi tertinggi pada tahun 2019 sebesar 2.746,1 Gg CO₂e. Sektor AFOLU (*Agriculture, Forestry, and Land Use*) berkontribusi paling besar terhadap emisi GRK di Kabupaten Temanggung disusul oleh sektor pengadaan dan penggunaan energi, pengelolaan limbah, kemudian IPPU (*Industrial Process and Product Use*). Berikut merupakan sumber yang menjadi prioritas dalam sistem inventarisasi GRK, yaitu: 1) Transportasi, 2) Industri Pengolahan, 3) Ternak, 4) Pengolahan limbah cair, 5) N₂O langsung dari pengolahan tanah, 6) Pengolahan Sawah, 7) Pembakaran Biomassa, 8) N₂O Tak langsung dari pengolahan tanah dan 9) Limbah Padat.

2. Sabuk Gunung

Sabuk Gunung merupakan gerakan konservasi penanaman pohon di lereng Gunung Sumbing, Sindoro, dan Prah. Konservasi ini merupakan upaya menanggulangi kondisi lingkungan hidup di

Kabupaten Temanggung dinilai kritis. terdapat 13.000 hektare lahan di lereng Gunung Sumbing, Sindoro, dan Prahua masuk dalam kategori lahan kritis mengakibatkan banyak mata air yang mulai mati dan berkurang debitnya. Hal ini menyebabkan permintaan bantuan air bersih ke desa-desa yang terus meningkat setiap tahunnya.

Mulai akhir tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menanam pohon konservasi sekurangnya ada 500 ribu pohon dan dari non pemerintah 220 ribu pohon. Kebutuhan riil pohon untuk penanaman ini di atas 15 juta bibit pohon untuk seluruh Kabupaten Temanggung, sebagai upaya dalam penataan lingkungan hidup sehingga dengan konservasi lahan, diharapkan dapat meminimalkan polusi dan pencemaran lainnya sehingga bumi ini menjadi lestari.

3. Komitmen Adaptasi Perubahan Iklim melalui Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim

Pemerintah Kabupaten Temanggung merupakan salah satu kabupaten yang rentan terhadap dampak perubahan iklim mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat maka pada tahun 2022 melalui fasilitasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Temanggung berkomitmen terhadap kegiatan adaptasi perubahan iklim.

Sebagai langkah awal, Pemerintah Kabupaten Temanggung sedang menyusun Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim. Selain itu, pada tahun 2020 di Temanggung telah dilaksanakan kegiatan Sekolah Lapang mitigasi perubahan iklim yang difasilitasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung.

4.13. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Prioritas pembangunan Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 juga dalam mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), hal ini sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dan komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Pemerintah Kabupaten Temanggung memprioritaskan pemenuhan SPM dalam menyelenggarakan pelayanan dasar melalui beberapa program di perangkat daerah dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*. Pemenuhan SPM juga diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena terkait dengan pelayanan dasar dan memprioritaskan penyediaan layanan dasar sesuai target SPM tidak hanya dalam hal jenis melainkan juga mutu (kuantitas dan kualitas layanan).

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial.

Ketersediaan komponen SPM RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 4.18
Ketersediaan Komponen SPM RPD Kabupaten Temanggung

Komponen SPM sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018	Komponen SPM Kabupaten Temanggung
Pendidikan	Pendidikan
Kesehatan	Kesehatan
Pekerjaan umum	Pekerjaan umum dan penataan ruang
Perumahan rakyat	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
Sosial	Sosial

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel diatas, keselarasan SPM RPD Kabupaten Temanggung mencapai 100% dengan SPM RPJMN yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

Program yang mendukung terlaksananya pemenuhan SPM sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 4.19
Sasaran, Prioritas Daerah, dan Program yang Mendukung Pemenuhan SPM
di Kabupaten Temanggung Tahun 2025

NO	SPM BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM
1	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program pengelolaan pendidikan
		Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			
		Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD			
2	Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat - Meningkatkan kualitas Hidup Perempuan dan Anak 	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan Dasar	Presentase anak usia pendidikan dasar yang sesuai mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan	Cakupan warga negara indonesia			

NO	SPM BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM
		Kesehatan pada usia produktif	usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Cakupan warga negara indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Presentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan penderita DM	Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan ODGJ berat	Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan pada orang terduga tuberkulosis	Presentase orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan			
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari- hari	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	- Indeks Pembangunan Infrastruktur - Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Pemulihan ekonomi	a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik			
4	Perumahan	Penyediaan dan	Persentase warga Negara korban	Indeks Pembangunan	Pemulihan ekonomi	a. Program Kawasan

NO	SPM BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM
	Rakyat dan Kawasan Permukiman	rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	bencana yang memperoleh rumah layak huni	Infrastruktur		Permukiman.
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni			
5	Ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas - Meningkatnya toleransi masyarakat 	Pemulihan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum b. Program Penanggulangan Bencana
		Pelayanan informasi rawan bencana	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara			
		Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
6	Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Meningkatnya perekonomian Daerah	Pemulihan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pemberdayaan Sosial; b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;

NO	SPM BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM
		Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			c. Program Rehabilitasi Sosial; d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; e. Program Penanganan Bencana.
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis rehabilitasi di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti			
		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial			

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023

4.14. Kebijakan dan Strategi Hasil Musrenbang RKPD 2025

Dalam perencanaan pembangunan daerah, melalui berbagai tahapan kegiatan, salah satunya musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RKPD 2024. Adapun hasil Musrenbang sebagai berikut.

Tabel 4.20
Hasil Musrenbang RKPD Kecamatan Tahun 2025 Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan

NO	TEMA TAHUNAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PD PENGAMPU	KECAMATAN
1	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Bimtek pendidikan pengasuhan, ketrampilan menjadi orang tua, ketrampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga, dan penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga	Bimtek pendidikan pengasuhan, ketrampilan menjadi orang tua, ketrampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga, dan penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga	DPPPAPPKB	Kelurahan Kranggan
2	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan	Program Penempatan Tenaga Kerja	Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader	Terlaksananya penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader	Dinperinaker	Desa Pingit
3	Mewujudkan	Percepatan	Program	Pelatihan dan	Jumlah Pengawasan	DKPPP	TEMANGGUNG

NO	TEMA TAHUNAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PD PENGAMPU	KECAMATAN
	sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	pengembangan anggrek di wilayah Kelurahan Jampirejo (Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian)	Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		
4	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman	Pembangunan Gedung UMKM untuk Display dan Pengadaan Sarpras Pendukung UMKM (kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan)	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	DINKOPDAG	BANSARI
6	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif,	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial,	Program Pembinaan Perpustakaan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan (pembelian mebeler buku dan PC)	Tersedianya Sarpras Perpustakaan	DINPUSIP	TEMANGGUNG

NO	TEMA TAHUNAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PD PENGAMPU	KECAMATAN
	percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	dan perumahan dan permukiman					
7	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Revitalisasi Lapangan Jaten (senderan lapangan sebelah timur dan sebelah selatan)	Terlaksanannya revitalisasi Lapangan Jaten	DINDIKPORA	Kel. Madureso
8	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan/Rehab Gedung SD	Meningkatkan kegiatan belajar	DINDIKPORA	Desa Jambu
9	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan	Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian,	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengadaan lampu jalan ruas jalan Jumo - Ketitang	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Terbangun	DINHUB	JUMO

NO	TEMA TAHUNAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PD PENGAMPU	KECAMATAN
	ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan					
10	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Kawasan Permukiman	Perbaikan RTLH	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	DPRKPLH	KALORAN
11	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelebaran jalan ruas jalan Kebraman – Gemawang	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	DPUPR	GEMAWANG
12	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Rehabilitasi jalan ruas jalan ruas jalan Kacepit- Bumiayu	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	DPUPR	SELOPAMPANG

NO	TEMA TAHUNAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PD PENGAMPU	KECAMATAN
	kelola pemerintahan yang baik						
13	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelebaran jalan ruas jalan Ngimbrang - batas Bansari	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	DPUPR	BULU
14	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Rehabilitasi jalan ruas jalan Jurang-Salamsari (lanjutan BanGub)	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	DPUPR	NGADIREJO
15	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Rehabilitasi jalan ruas jalan Kalirejo-Bansari	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	DPUPR	KEDU

NO	TEMA TAHUNAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PD PENGAMPU	KECAMATAN
	yang baik						
16	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Rekonstruksi jalan ruas jalan Bejen – Congkrang	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	DPUPR	KLEDUNG
17	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelebaran jalan ruas jalan Pingit - Wonokerso (batas kabupaten)	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	DPUPR	BEJEN
18	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyediaan Sarpras Posyandu	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Jalan Menuju Standar	DPUPR	PRINGSURAT

NO	TEMA TAHUNAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PD PENGAMPU	KECAMATAN
19	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Rehabilitasi jaringan Irigasi Permukaan Kalimandang	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	DPUPR	KRANGGAN
20	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Rehabilitasi jalan ruas jalan Wonobojo - Pringlegi	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	DPUPR	WONOBOYO
21	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Rekonstruksi jalan ruas jalan Rowoseneng – Sirandu (Batas Kabupaten)	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	DPUPR	KANDANGAN
22	Mewujudkan sumber daya	Peningkatan cakupan dan kualitas	Program Penyelenggaraan	Pelebaran jalan ruas jalan Parakan-	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran	DPUPR	PARAKAN

NO	TEMA TAHUNAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PD PENGAMPU	KECAMATAN
	manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Jalan	Bansari	Jalan Menuju Standar		
23	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelebaran jalan ruas jalan Candiroto - Plosogaden	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Jalan Menuju Standar	DPUPR	CANDIROTO
24	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Rehabilitasi jalan ruas jalan Campurejo – Tretep	Panjang jalan yang direhabilitasi	DPUPR	TRETEP
25	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan,	Program Penyelenggaraan Jalan	Pemeliharaan berkala ruas jalan Karangwuni - Tlogomulyo	Panjang Jalan yang Dipelihara secara berkala	DPUPR	TLOGOMULYO

NO	TEMA TAHUNAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PD PENGAMPU	KECAMATAN
	inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman					
26	Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelebaran jalan ruas jalan Menggoro-Kemloko	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Jalan Menuju Standar	DPUPR	TEMBARAK

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan hasil Musrenbang RKPD 2024 sebagaimana tabel diatas, terlihat bahwa terdapat penyelarasan antara arah kebijakan, prioritas pembangunan dan program dengan usulan kegiatan Musrenbang. Hasil Musrenbang tersebut selanjutnya menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu.

4.15. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

Dalam mendorong keterbukaan informasi publik pemerintah Kabupaten Temanggung menggunakan portal Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung untuk menghasilkan data dan informasi yang berkualitas. Portal Satu Data Indonesia terhubung dengan Portal Data Daerah yang bisa diakses di <https://data.temanggungkab.go.id/>. Penyelenggaraan Satu Data di Kabupaten Temanggung diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung. Berdasarkan SK Bupati Temanggung No 050/273 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia, Forum Satu Data Indonesia, dan Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung, Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas sebagai Walidata. Salah satu tugas Walidata adalah menyelenggarakan Forum Satu Data. Pada Tahun 2023 Dinkominfo telah menyelenggarakan forum Pengumpulan Data Statistik Sektoral turut mengundang BPS Kabupaten Temanggung dan Perangkat Daerah sebagai Produsen Data. Dalam mengintegrasikan kebijakan pusat yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.115/M.PPN/HK/07/2022 tentang Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024. Kabupaten Temanggung telah membuat Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Temanggung dalam SK Bupati Temanggung Nomor 050/291 Tahun 2023.

Dalam penyelenggaraan statistik sektoral Walidata berkoordinasi dengan pembina data (BPS Kabupaten Temanggung) untuk menetapkan data prioritas, standar data, dan metadata telah ditetapkan berdasarkan SK Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung Nomor 050/004.1/2023 Tentang Data Prioritas Statistik Sektoral, Standar Data, dan Metadata Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung selaku Walidata telah memiliki akun Satu Data Indonesia dengan kode akun 330562. Sementara itu, penyelenggaraan Satu Data Indonesia dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah dengan menggunakan portal <https://gis.temanggungkab.go.id/> yang merupakan portal Pemerintah Kabupaten Temanggung yang menyediakan data-data sektoral. Data dukung terkait penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia di Kabupaten Temanggung dapat diakses pada link berikut <https://s.id/BuktiSDI03>.

4.16. Penyelenggaraan Pengendalian Pemerintah Daerah

Dalam penyelenggaraan pengendalian pemerintah daerah di Kabupaten Temanggung, keberadaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) didukung melalui Keputusan Bupati Temanggung Nomor 710/363 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024 untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Program Kerja Pengawasan Tahunan tersebut merupakan acuan, pedoman, serta sasaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Temanggung tahun 2024.

Selain itu, dalam penyelenggaraan pengendalian pemerintah di Kabupaten Temanggung juga didukung dengan tersedianya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam rangka peningkatan secara berkelanjutan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu dilakukan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan ditetapkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 712/0000825 Tahun 2023 tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintahan daerah, diperlukan pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Bentuk dukungan regulasi daerah terhadap manajemen risiko diwujudkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Perkada tersebut menjadi pedoman pengelolaan risiko dan menjadi acuan bagi pejabat/seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk melakukan pengelolaan risiko.

5.1 RENCANA KERJA DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 serta seiring dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah. RKPD disusun dengan mensinkronkan perencanaan dan penganggaran melalui tiga langkah yaitu pertama, melanjutkan implementasi *money follows program*, dengan cara mengintegrasikan sumber pendanaan untuk pencapaian sasaran pembangunan. Kedua, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, pemerintah provinsi maupun pusat. Ketiga, memperkuat kendali program dengan melakukan pengendalian, monitoring serta evaluasi.

Tahapan penyusunan program merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan analisis dan metodologi perumusan sasaran pembangunan daerah. Indikasi rencana program disusun untuk menjabarkan sasaran pembangunan daerah dan dalam rangka pencapaian indikator sasaran serta dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pemerintah pusat menyatakan bahwa upaya pemerataan pembangunan yang dilakukan pemerintah di tahun 2025 ini ditempuh dengan tema yang diusung dalam RKP 2025 yaitu “Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”. Seiring dengan RKP 2025 yang ditetapkan pemerintah pusat, maka RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 menyelaraskan programnya sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas dalam RKP 2025.

5.1.1 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Terhadap Nasional

5.1.1.1 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional RKP 2025

Pemerintah Kabupaten Temanggung sepenuhnya mendukung terhadap 8 Prioritas Pemerintah Pusat yang tercantum dalam RKP 2025 melalui dukungan beberapa program beserta anggarannya. Dukungan program beserta anggaran tersebut juga mendukung tema RKP 2025 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Dukungan program dan anggaran dalam RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 terhadap Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 5. 8
Rekapitulasi Dukungan Program Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional RKP Tahun 2025

No	Prioritas Nasional RKP Tahun 2025	Jumlah Program Yang Mendukung Prioritas RKP Tahun 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	11	28.803.442.911	Bankestbangpol
				Dinsos
				DPPPAPPKB
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	17	51.563.654.107	Satpol PP dan Damkar
				Dinkominfo
				DKPPP
				DPUPR
				DPRKPLH
Dinkopdag				
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	13	436.361.014.327	DPUPR
				Dinperinaker
				Dinkopdag
				BKPAD
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	13	395.496.156.189	Dindikpora
				DPPPAPPKB
				Dinkes

No	Prioritas Nasional RKP Tahun 2025	Jumlah Program Yang Mendukung Prioritas RKP Tahun 2025	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
	kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas			Dinperinaker
5	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	6	1.178.650.326	Dinperinaker Dinkopdag
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	13	37.115.922.376	Dinpermades DPRKPLH Dinkopdag Dinsos
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	6	35.369.960.460	Bankesbangpol Sekretariat Daerah
8	memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur	9	10.883.862.000	Bankesbangpol Dinbudpar Satpol PP dan Damkar
JUMLAH			996.772.662.696	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Tabel 5. 9
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 1:
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
1	Bankesbangpol	1 Kesatuan Bangsa dan Politik	1 PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	90	%	700.000.000
			2 PROGRAM Peningkatan PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	persentase pelaksanaan pendidikan politik	90	%	1.528.595.335
			3 PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan ORGANISASI KEMASYARAKATAN	persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	16,67	%	20.000.000
			4 PROGRAM Peningkatan KEWASPADAAN NASIONAL DAN Peningkatan KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah	100	%	579.000.000
			5 PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	%	135.000.000

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
2	Dinsos	2	Sosial	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100	%	640.000.000
				7	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	100	%	20.000.000
				8	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	732.671.162
						Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	
				Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	%	
			8 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100	%	24.340.334.214
				persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	100	%	
				Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	100	%	
				persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan	60	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
3	DPPPAPPKB	3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48	%		
				9	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	2,66	%	10.000.000
						Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD	100	%	
				10	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten Layak Anak	Nindya	Kategori	45.000.000
				11	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	persentase kasus kekerasan terhadap anak	0,0039	%	52.842.200
Jumlah							28.803.442.911		

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah.

Tabel 5. 10

Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 2:

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
1	Satpol PP dan Damkar	1 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase Satlinmas yang teratih	6,92	%	946.000.000
				persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	100	%	
				persentase penegakan Perda/Perbup	100	%	
2	Dinkominfo	2 Persandian	2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	persentase penilaian resiko keamanan informasi	66,7	%	47.000.000
				persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah	60	%	
3	DKPPP	3 Kelautan dan Perikanan	3 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktivitas ikan nila	1,3	kg/m2	235.000.000
				Produktivitas ikan lele	12,7	kg/m2	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
		4	Pertanian	4	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	10	%	10.000.000
				5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas padi	61,5	Kuintal/ha	18.460.436.207
				Produktivitas jagung	54,6	Kuintal/ha			
				Produktivitas bawang putih	61	Kuintal/ha			
				Produktivitas bawang merah	69	Kuintal/ha			
				Produktivitas cabai rawit	50,5	Kuintal/ha			
				Produktivitas cabai besar	65,5	Kuintal/ha			
				Produktivitas tembakau	6,2	Kuintal/ha			
				Produktivitas kopi robusta	7,15	Kuintal/ha			
				Produktivitas kopi arabika	6,5	Kuintal/ha			
				Produktivitas ternak sapi	177,5	Kg/Ekor			
				Produktivitas ternak	13,71	Kg/Ekor			

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				domba			
				Produktivitas ternak kambing	13,71	Kg/Ekor	
				Produktivitas ternak ayam ras pedaging	0,75	Kg/Ekor	
				Produktivitas ternak ayam petelur	10,88	Kg/Ekor	
				persentase kelahiran pedet	56	%	
			6 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya	100	%	8.047.730.900
			7 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	persentase penanganan penyakit hewan	87	%	651.725.000
				persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	77	%	
			8 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	persentase Kelompok Tani yang naik kelas	1,3	%	260.000.000

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	
4	DPUPR	5 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	persentase jaringan irigasi kondisi baik	59,37	%	9.164.704.000	
				Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi	97,97	%		
			10 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	95,7	%		9.081.058.000
				Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	100	%		
5	DINKOPDAG	6 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	11 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	persentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan	6,67	%	330.000.000	
				12 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	persentase UMKM yang difasilitasi	0,96		%
6	DPRKPLH	7 Lingkungan Hidup	13 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	53,3	Angka	250.000.000	
				Indeks Kualitas Udara	83,87	Angka		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				persentase Luas Lahan Kritis Tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	0,067	%	380.000.000
			14 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani	65	%	
			15 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	100	%	10.000.000
			16 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	30	%	70.000.000
			17 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	persentase sampah yang tertangani	60,5	%	3.525.000.000
				Cakupan layanan persampahan	66,44	%	
Jumlah							51.563.654.107

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025, data diolah.

Tabel 5. 11

Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 3:
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
1	DPUPR	1 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	persentase saluran drainase kondisi baik	69,34	%	200.000.000
			2 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	persentase terbangunnya gedung pemerintah	100	%	200.000.000
			3 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	persentase Trotoar Kondisi Baik	73,97	%	200.000.000
			4 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	persentase Jalan Kondisi Mantap	89,5	%	22.697.649.250
				persentase Jembatan dalam kondisi baik	94	%	
				persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	19,61	%	
	5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	89,51	%	300.000.000		
2	DINPERINAKER	2 TENAGA KERJA	6 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN	persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan	72,56	%	613.000.000

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
			PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	berbasis kompetensi			
			7 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	81	%	425.000.000
				persentase pencari kerja yang ditempatkan	36	%	
				persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	31	%	
				persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja	1,2	%	
				persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	92	%	
			8 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	persentase kepersertaan program BPJS Ketenagakerjaan	83,37	%	80.000.000

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
3	DINKOPDAG	3	Perindustrian	9	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	70	%	
						persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	46	%	
						persentase perselisihan hubungan industrial yang selesai melalui mediasi	100	%	
		4	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	9	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	persentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	78,2	%	343.670.713
						persentase Pembinaan IKM Tembakau Lembutan	20,95	%	
				10	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	persentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan	6,67	%	330.000.000
						11	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	persentase UMKM yang difasilitasi	0,96
12	PROGRAM PENGAWASAN DAN	persentase koperasi sehat	48	%	25.000.000				

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
4	BPKPAD	5	Keuangan	13	PEMERIKSAAN KOPERASI			410.851.694.364	
					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan pengalokasian anggaran belanja mandatory spending dalam APBD	100		%
						persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100		%
						persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100		%
						Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	100		%
	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	100	%						
Jumlah							436.361.014.327		

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025, data diolah

Tabel 5. 12

Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 4:
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
1	DINDIKPORA	1	Pendidikan	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	persentase APM PAUD (5-6 tahun)	81,72	%	151.865.540.775
						persentase APK PAUD (0-6 tahun)	44,55	%	
						persentase APK PAUD (4-6 tahun)	77,75	%	
						persentase APK PAUD (5-6 tahun)	90,55	%	
						persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi	100	%	
						persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	49,99	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				persentase Jumlah Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%	
				Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD	0,03	Angka	
				persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik	100	%	
				persentase APM SD Sederajat	98,7	%	
				persentase APK SD Sederajat	104,69	%	
				Angka Putus Sekolah SD Sederajat	0,01	Angka	
				Rasio Siswa/Guru SD	0,06111	Angka	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				Rasio Siswa/Rombel SD	0,06111	Angka	
				persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4	100	%	
				persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	61,32	%	
				persentase Kepala SD memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%	
				persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%	
				Rasio Jumlah Pengawas	0,1	Angka	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				SD			
				persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	91,49	%	
				persentase APM SMP Sederajat	89	%	
				persentase APK SMP Sederajat	98,77	%	
				Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	98,9	%	
				Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	0,16	Angka	
				Rasio Siswa/Guru SMP	0,06389	Angka	
				Rasio Siswa/Rombel SMP	0,06389	Angka	
				persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4	100	%	
				persentase Pendidik SMP	66,25	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				yang			
				memiliki sertifikat pendidik			
				persentase Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%	
				persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%	
				Rasio Jumlah Pengawas SMP	0,08	Angka	
				persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	96,67	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu	100	%	
				persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4	100	%	
				persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%	
				persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	90	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
2	DPPPAPPKB	2	Kepemudaan dan Olahraga	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri)	20	%	260.000.000 4.094.000.000 10.000.000 42.842.200
						persentase organisasi pemuda yang aktif	95,5	%	
				3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	persentase pelatih olahraga bersertifikat	96,5	%	
					persentase prestasi olahraga	62	%		
		3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	2,66	%	
						Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD	100	%	
		5	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	persentase kasus kekerasan terhadap anak perempuan	0,0028	%			

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				persentase kasus kekerasan terhadap perempuan	0,0028	%	
		4 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten Layak Anak	Nindya	Kategori	45.000.000
	7 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase Pasangan Usia Subur(PUS) yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	88,6	%	7.293.884.000	
			Persentase Kepesertaan KB Aktif	75,8	%		
			Persentase Keberhasilan Pemakaian Kontrasepsi Jangka Panjang	46,15	%		
			Persentase Kampung KB Berkembang dan Mandiri	45,45	%		
			8 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga	55,99	%	4.245.900.000

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
3	DINPERINAKER	5	Tenaga Kerja	9	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	72,56	%	613.000.000
					persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	81	%		
			10	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	persentase pencari kerja yang ditempatkan	36	%	425.000.000	
					persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	31	%		
					persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja	1,2	%		
					persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	92	%		
4	DINKES	6	Kesehatan	11	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI)	72	per 100.000 KH	226.145.645.214
					Angka Kematian Bayi (AKB)	12,8	per 1000 KH		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	100	%	
				Prevalensi anemia pada ibu hamil	13,44	% maksimal	
				Cakupan Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	%	
				Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	%	
				persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	100	%	
				persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
				Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				ditangani			
				Angka Kematian Neonatal	9,15	per 1.000 KH	
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	%	
				Angka Kematian Balita	15,6	per 1.000 KH	
				Prevalensi ballita gizi buruk	0,3	%	
				Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	14	% maksimal	
				persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	82,6	% minimal	
				persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%	
				Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%	
				persentase fasyankes rujukan yang memenuhi standar mutu	64	%	
				persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
				persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%	
				persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%	
				persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%	
				Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	7	Maks per 100.000 penduduk	
				Presentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	85	%	
				persentase rumah sehat	87,6	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	
				persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	98,4	%		
			12 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	persentase Puskesmas dengan SDM kesehatan yang memenuhi standar	26,9	%	10.000.000	
			13 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar	100	%	445.344.000	
Jumlah								395.496.156.189

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025, data diolah.

Tabel 5. 13
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 5 :
Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
1	DINKOPDAG	1 Perdagangan	1 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	persentase fasilitasi pelaku usaha informal	27,42	%	674.979.613
				persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	67	%	
				persentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	2,41	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
2	DINPERINAKER	2	Tenaga Kerja	2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	79,63	%	30.000.000
						persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	75	%	
				3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	cakupan pelaku usaha yang di bina	2,31	%	20.000.000
				4	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	99,41	%	30.000.000
				5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	persentase kepersertaan program BPJS Ketenagakerjaan	83,37	%	80.000.000
						persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	70	%	
						persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	46	%	
						persentase perselisihan hubungan industrial yang selesai melalui mediasi	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
		3 Perindustrian	6 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	persentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	78,2	%	343.670.713
				persentase Pembinaan IKM Tembakau Lembutan	20,95	%	
Jumlah							1.178.650.326

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025, data diolah.

Tabel 5. 14
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 6:
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
1	DINPERMADES	1 Pemberdayaan Masyarakat desa	1 PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Peraturan Desa Tentang Pungutan yang sesuai dengan Kewenangan Desa	60	%	25.000.000
			2 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	9	%	15.000.000
			3 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kepatuhan Pelaporan Aset Desa	60	%	3.993.000.000

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				dalam Aplikasi Sipades			
				Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD	80	%	
				Persentase penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	100	%	
				persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa	39	%	
				persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa	39,47	%	
			4 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	4	%	494.917.000

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
2	DPRKPLH	2	Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	55	%	316.091.000
						persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	4,11	%	
						Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	88,4	%	
				6	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	persentase rumah layak huni	95,89	%	6.113.909.000
						persentase kawasan kumuh perkotaan	4,82	%	
						persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
3	DINKOPDAG	3 Koperasi, Usaha Kecil Menengah	7 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100	%	
				persentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan	6,67	%	330.000.000
				persentase UMKM yang difasilitasi	0,96	%	95.000.000
				Cakupan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100	%	640.000.000

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
4	DINSOS	4	Sosial	10	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	100	%	20.000.000
				11	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	732.671.162
						Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	
						Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
			12 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	%	24.340.334.214
				persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100	%	
				persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	100	%	
				Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	100	%	
				persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan	60	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
			13 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48	%	
				persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	100	%	167.500.000
Jumlah							37.115.922.376

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025, data diolah.

Tabel 5. 15

Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 7:

Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
1	Bankesbangpol	1 Kesatuan Bangsa dan Politik	1 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	%	135.000.000
			2 PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	90	%	700.000.000
			3 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	persentase pelaksanaan pendidikan politik	90	%	1.528.595.335
			4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	16,67	%	20.000.000
2	Sekretariat Daerah	2 Sekretariat Daerah	5 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	persentase Kerjasama yang diimplementasikan	100	%	31.896.029.325
				persentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu	100	%	
				persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	90	%	
				persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	60	%	
				persentase produk hukum yang difasilitasi	100	%	
				persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	100	%	
				persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	100	%	
				persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
			6 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100	%	1.225.335.800
				persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	100	%	
				persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	83,33	%	
				persentase paket pekerjaan selesai tepat waktu	100	%	
				persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	100	%	
				persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	100	%	
				persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (tender)	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	
				persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (PL > 100 juta)	100	%		
				persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	98	%		
Jumlah								35.369.960.460

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025, data diolah.

Tabel 5. 16

Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 8:

Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
1	Bankesbangpol	1 Kesatuan Bangsa dan Politik	1 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	%	135.000.000
			2 PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	90	%	700.000.000
			3 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	16,67	%	20.000.000
			4 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah	100	%	579.000.000
2	Dinbudpar	2 Kebudayaan	5 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	persentase kelompok Budaya yang Teregister	8,2	%	7.580.000.000
				persentase kelompok kesenian yang produktif	44	%	
				persentase pelestarian Sejarah Lokal	9,25	%	
				persentase Pelestarian Cagar Budaya	13,18	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
3	Satpol PP dan Damkar	3	Pariwisata	6	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	0,04	%	190.000.000
						Lama Tinggal Wisatawan	1	Hari	
						persentase Peningkatan Desa Wisata	14,76	%	
		4	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase Peningkatan pelaku Ekraft	10	%	946.000.000
						persentase Satlinmas yang teratih	6,92	%	
						persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	100	%	
						persentase penegakan Perda/Perbup	100	%	
8	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	80	%	538.568.000				

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	%	330.294.000
				persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran oleh relawan kebakaran	100	%	
				persentase Bangunan/Gedung/Lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi	6,15	%	
			9 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	%	
				persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	%	
Jumlah							10.883.862.000

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025, data diolah.

5.1.2 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan pembangunan berkolaborasi dengan semua unsur baik pemerintah maupun non-pemerintah yang berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, yaitu Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Non-Pemerintah, Akademisi, media massa, perusahaan, komunitas, dan masyarakat.

Kebijakan pembangunan daerah menerapkan konsep tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan prioritas kegiatan yang berdaya ungkit besar pemantapan reformasi birokrasi, percepatan pengurangan kemiskinan, pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi kerakyatan dan pemerataan pembangunan wilayah dan lingkungan.

Tabel 5. 18
Rekapitulasi Dukungan Program dan Anggaran Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No	Prioritas Kabupaten Temanggung	Jumlah Program Yang Mendukung	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial	8	183.675.299.151	1. Dinas Kesehatan
				2. Dinas Pendidikan
				3. Dinas Sosial
				4. DPRKPLH
2	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	20	87.897.646.293	1. Dinsos
				2. Dinperinaker
				3. Dinkopdag
				4. Dinbudpar
				5. BPBD
				6. DKPPP
				7. DPM
3	Reformasi Birokrasi	27	501.176.728.299	1. BKPSDM
				2. Bappeda
				3. Inspektorat
				4. BPKPAD

No	Prioritas Kabupaten Temanggung	Jumlah Program Yang Mendukung	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
				5. Dinas Kominfo
				6. Dindukcapil
				7. Bakesbangpol
				8. DPM
				9. Sekretariat daerah
				10. Dinpusip
				11. Sekretariat DPRD
				12. Satpol PP Damkar
	JUMLAH		772.749.673.743	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Tabel 5. 19
 Dukungan Program Daerah Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung:
 Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
1	DPRKPLH	1 Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman	1 Program Kawasan Permukiman	persentase rumah layak huni	95.89	%	6.113.909.000
				persentase kawasan kumuh perkotaan	4.82	%	
				persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100	%	
				persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
2	Dinas Sosial	2	Sosial	2	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	732.671.162
						Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	
						Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	
					Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	%	
			3 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100	%	24.340.334.214
					persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	100	%	
					Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
					persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan	60	%		
					persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48	%		
			4	Program Penanganan bencana	persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	100	%	167.500.000	
4	Dinas Pendidikan	4	Pendidikan	5	Program Pengelolaan Pendidikan	persentase APM PAUD (5-6 tahun)	81.72	%	151.865.540.775
					persentase APK PAUD (0-6 tahun)	44.55	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				persentase APK PAUD (4-6 tahun)	77.75	%	
				persentase APK PAUD (5-6 tahun)	90.55	%	
				persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi	100	%	
				persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	49.99	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				persentase Jumlah Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%	
				Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD	0.03	Angka	
				persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik	100	%	
				persentase APM SD Sederajat	98.7	%	
				persentase APK SD Sederajat	104.69	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				Angka Putus Sekolah SD Sederajat	0.01	Angka	
				Rasio Siswa/Guru SD	0.0611111	Angka	
				Rasio Siswa/Rombel SD	0.0611111	Angka	
				persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4	100	%	
				persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	61.32	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				persentase Kepala SD memilikikualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%	
				persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%	
				Rasio Jumlah Pengawas SD	0.1	Angka	
				persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	91.49	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				persentase APM SMP Sederajat	89	%	
				persentase APK SMP Sederajat	98.77	%	
				Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	98.9	%	
				Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	0.16	Angka	
				Rasio Siswa/Guru SMP	0.0638889	Angka	
				Rasio Siswa/Rombel SMP	0.0638889	Angka	
				persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4	100	%	
				persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	#N/A	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				persentase Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%	
				persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%	
				Rasio Jumlah Pengawas SMP	0.08	Angka	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	96.67	%	
				persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu	100	%	
				persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%	
				persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	90	%	
				persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri)	20	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
5	Dinas Kesehatan	5	Kesehatan	6 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Peorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	72	per 100.000 KH	
					Angka Kematian Bayi (AKB)	12.8	per 1000 KH	
					Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	100	%	
					Prevalensi anemia pada ibu hamil	13.44	% maksimal	
					Cakupan Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	%	
				persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	100	%	
				persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
				Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	100	%	
				Angka Kematian Neonatal	9.15	per 1.000 KH	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	%	
				Angka Kematian Balita	15.6	per 1.000 KH	
				Prevalensi ballita gizi buruk	0.3	%	
				Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	14	% maksimal	
				persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	82.6	% minimal	
				persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%	
				Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%	
				persentase fasyankes rujukan yang memenuhi standar mutu	64	%	
				persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
				persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%	
				persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%	
				Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	7	Maks per 100.000 penduduk	
				Presentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	85	%	
				persentase rumah sehat	87.6	%	
				persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	98.4	%	
			7 Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan SDM kesehatan yang memenuhi standar	26.9	%	10.000.000

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
			8 Program sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan Minuman	Cakupan puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar	100	%	445.344.000
Jumlah							183.675.299.151

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah.

Tabel 5. 20

Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung : Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
1	DPM	1 Penanaman Modal	1 Program Promosi Penanaman Modal	persentase promosi penanaman modal	50	%	7.000.000
			2 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan	100	%	7.000.000

No	Perangkat Daerah		Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						persentase perusahaan yang bermitra	60	%	
				3	Program Pelayanan Penanaman Modal	persentase Pelayanan Perizinan secara Elektronik	100	%	342.403.510
						persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	100	%	
						persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani	100	%	

No	Perangkat Daerah		Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
2	Dinperinaker	2	Perindustrian	4	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	persentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	78	%	343.670.713
						persentase Pembinaan IKM Tembakau Lembutan	21	%	
		3	Tenaga Kerja	5	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	73	%	613.000.000

No	Perangkat Daerah		Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	81	%	
				6	Program Penempatan Tenaga Kerja	persentase pencari kerja yang ditempatkan	36	%	425.000.000
						persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	31	%	

No	Perangkat Daerah		Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja	1	%	
						persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	92	%	
				7	Program Hubungan Industrial	persentase kepersertaan program BPJS Ketenagakerjaan	83	%	80.000.000

No	Perangkat Daerah		Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	70	%	
						persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	46	%	
						persentase perselisihan hubungan industrial yang selesai melalui mediasi	100	%	

No	Perangkat Daerah		Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
3	Dinbudpar	4	Kebudayaan	8	Program Pengembangan Kebudayaan	persentase kelompok Budaya yang Teregister	8	%	7.580.000.000
						persentase kelompok kesenian yang produktif	44	%	
						persentase pelestarian Sejarah Lokal	9	%	
						persentase Pelestarian Cagar Budaya	13	%	

No	Perangkat Daerah		Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
		5	Pariwisata	9	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	0	%	190.000.000
						Lama Tinggal Wisatawan	1	hari	
						persentase Peningkatan Desa Wisata	15	%	
						persentase Peningkatan pelaku Ekraft	10	%	
4	Dinkopdag	6	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10	Program Pengembangan UMKM	persentase UMKM yang difasilitasi	1	%	95.000.000

No	Perangkat Daerah		Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				11	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	persentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan	7	%	
				12	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	persentase koperasi sehat	48	%	25.000.000
		7	Perdagangan	13	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	persentase fasilitasi pelaku usaha informal	27	%	674.979.613

No	Perangkat Daerah		Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	67	%	
						persentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	2	%	
						persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	80	%	

No	Perangkat Daerah		Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				14	Program Pengembangan Ekspor	cakupan pelaku usaha yang di bina	2	%	20.000.000
				15	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	75	%	30.000.000
				16	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	100	%	

No	Perangkat Daerah		Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
5	DKPPP	8	Pertanian	17	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas padi	62	Kuintal/ha	18.460.436.207
						Produktivitas jagung	55	Kuintal/ha	
						Produktivitas bawang putih	61	Kuintal/ha	
						Produktivitas bawang merah	69	Kuintal/ha	
						Produktivitas cabai rawit	51	Kuintal/ha	
						Produktivitas cabai besar	66	Kuintal/ha	

No	Perangkat Daerah		Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						Produktivitas tembakau	6	Kuintal/ha	
						Produktivitas kopi robusta	7	Kuintal/ha	
						Produktivitas kopi arabika	7	Kuintal/ha	
						Produktivitas ternak sapi	178	Kg/Ekor	
						Produktivitas ternak domba	14	Kg/Ekor	
						Produktivitas ternak kambing	14	Kg/Ekor	
						Produktivitas ternak ayam ras pedaging	1	Kg/Ekor	

No	Perangkat Daerah		Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						Produktivitas ternak ayam petelur	11	Kg/Ekor	
						persentase kelahiran pedet	56	%	
				18	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya	100	%	8.047.730.900
				19	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	persentase penanganan penyakit hewan	87	%	

No	Perangkat Daerah		Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	77	%	
				20	Program Penyuluhan Pertanian	persentase Kelompok Tani yang naik kelas	1	%	260.000.000
		9	Kelautan dan Perikanan	21	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	23	kg/kapita/tahun	10.000.000

No	Perangkat Daerah		Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				22	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produktivitas ikan nila	1	kg/m2	235.000.000
						Produktivitas ikan lele	13	kg/m2	
6	DPUPR	10	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	persentase jaringan irigasi kondisi baik	59	%	9.164.704.000
						Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi	98	%	
				25	Program Penyelenggaraan Jalan	persentase Jalan Kondisi Mantap	90	%	22.697.649.250

No	Perangkat Daerah		Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						persentase Jembatan dalam kondisi baik	94	%	
						persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	20	%	
7	Dinpermades	11	Pemberdayaan Masyarakat Desa	26	Program Peningkatan Kerjasama Desa	persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	9	%	

No	Perangkat Daerah		Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				27	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	4	%	
						persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	55	%	

No	Perangkat Daerah		Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
8	Dinhub	12	Perhubungan	28	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	42	%	18.589.072.100
						persentase Angkutan umum yang memenuhi standar minimal pelayanan	35	%	

No	Perangkat Daerah		Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						persentase potensi titik parkir yang tertangani	99	%	
						persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	100	%	
						persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	100	%	
						persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	100	%	

No	Perangkat Daerah		Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	34	%	
						persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	64	%	
Jumlah									87.897.646.293

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025, data diolah.

Tabel 5. 21

Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung : Reformasi Birokrasi

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
1	BKPSDM	1	Kepegawaian	1	Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Pengembangan SDM Aparatur	42.36	%	330.762.000
						Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan layanan Aparatur	86.58	%	
2	BAPPEDA	3	Pendidikan dan Pelatihan	2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan pembinaan SDM aparatur	97	%	456.750.000
						Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian	100	%	
2	BAPPEDA	3	Penelitian dan Pengembangan	3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase inovasi daerah yang dikembangkan	100	%	606.932.500

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
3	Inspektorat	4	Inspektorat Daerah	4	Program Penyelenggaraan Pengawasan	persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	75	%	
						persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	53	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD dan pengadaan barang/jasa	79	%	
				persentase penanganan aduan masyarakat	100	%	
				persentase tindak lanjut hasil temuan	100	%	
			5 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	54	%	337.261.200

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				Persentase perangkat daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	100	%	
				Persentase tindak lanjut aduan Whistle blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
					Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan	3	Level	
4	BAPPEDA	5	Perencanaan	6 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	100	%	509.474.400
					Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	95	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
			7 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pembangunan manusia	90	%	
				Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	90	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang ekonomi dan sumber daya alam	90	%	
				Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang infrastruktur	90	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
5	BPKPAD	7	Keuangan	8	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pengalokasian anggaran belanja mandatory spending dalam APBD	100	%	410.851.694.364
						persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100	%	
						persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100	%	
						Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	100	%	
6	Dinkominfo	8	Komunikasi dan Informatika	9	Program Aplikasi Informatika	persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						persentase layanan publik secara elektronik	55	%	
		9	Persandian	10	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	persentase penilaian resiko keamanan informasi	66.7	%	47.000.000
						persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah	60	%	
		10	Statistik	11	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Ketersediaan data statistik sektoral	100	%	82.500.000
7	Dindukcapil	11	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12	Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	99.85	%	10.000.000

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
8	Dindikcapil	12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	persentase terpeliharanya Sarpras SIAK untuk pelayanan Administrasi Kependudukan	98.5	%	100.848.300
						persentase Pelaksanaan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital	1.3	%	
9	Bakesbangpol	13	Kesatuan Bangsa dan Politik	14	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikkan Melalui Pendidikkan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	persentase pelaksanaan pendidikan politik	90	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
10	DPM	14	Penanaman Modal	15	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan	100	%	7.000.000
						persentase perusahaan yang bermitra	60	%	
				16	Program Promosi Penanaman Modal	persentase promosi penanaman modal	50	%	7.000.000
				17	Program Pelayanan Penanaman Modal	persentase Pelayanan Perizinan secara Elektronik	100	%	342.403.510
						persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	100	%	
						persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				18	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian Penanaman Modal	16	%	404.961.000
11	Sekretariat Daerah	15	Sekretariat Daerah	19	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	33.391.297.995
						Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	100	%	
						Persentase SAKIP Perangkat Daerah berpredikat BB	23.9	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	
					Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah	100	%	
			20 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		persentase Kerjasama yang diimplementasikan	100	%	31.896.029.325
					persentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	100	%	
					persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu	100	%	
					persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	90	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	
				persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	60	%		
				persentase produk hukum yang difasilitasi	100	%		
				persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	100	%		
				persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	100	%		
				persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	100	%		
			21	Program Perekonomian dan Pembangunan	persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100	%	1.225.335.800

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	100	%	
				persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	83.33	%	
				persentase paket pekerjaan selesai tepat waktu	100	%	
				persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	100	%	
				persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (tender)	100	%	
				persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (PL > 100 juta)	100	%	
				persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	98	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
12	Dinpusip	16	Kearsipan	22	Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip vital konvensional yang dialih mediakan	60	%	20.000.000
						Persentase audit internal kearsipan	73.33	%	
13	Sekretariat DPRD	17	Sekretariat DPRD	23	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	persentase jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	90	%	19.680.615.905
						persentase kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana	#N/A	%	
						persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
					persentase kegiatan peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	100	%		
14	Satpol PP Damkar	18	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Dugandungan Masyarakat	24	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persentase Satlinmas yang teratih	6.92	%	
						persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	100	%	
						persentase penegakan Perda/Perbup	100	%	
				25	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	80	%	538.568.000

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	%	
				persentase Bangunan/Gedung/Lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi	6.15	%	
			26 Program Penanggulangan Bencana	persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	%	330.294.000

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
					persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	%		
					persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	%		
15	Dinkominfo	20	Komunikasi dan Informatika	27	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	35	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	100	%	
				persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	85	%	
Jumlah							501.176.728.299

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025, data diolah.

Adapun rekapitulasi pagu anggaran prioritas pembangunan daerah dijabarkan untuk setiap prioritas pembangunan daerah dan pagu anggaran prioritas pembangunan daerah dijabarkan untuk setiap program prioritas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. 22
Total Pagu Anggaran untuk Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Pagu Anggaran
1	Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan, Pendidikan, Sosial, dan Perumahan dan Permukiman	Program pengelolaan pendidikan	25.321.455.775
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	30.871.630.000
		Program kawasan permukiman	5.144.909.000
		Program Rehabilitasi Sosial	732.671.162
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	4.467.553.000
		Program Penanganan Bencana	167.500.000
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	400.000.000
Jumlah			67.105.718.937
2	Pemulihan Ekonomi	Program perlindungan dan jaminan sosial	4.467.553.000
		Program pelatihan dan produktivitas tenaga kerja	13.000.000
		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	10.000.000
		Program pengembangan daya tarik destinasi wisata	70.000.000
		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	30.000.000
		Program pengembangan iklim penanaman modal	95.000.000
Jumlah			4.665.553.000
3	Pemantapan Reformasi Birokrasi	Program Kepegawaian Daerah	330.762.000
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	536.194.215
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	377.519.400
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.723.383.200
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.848.300
		Program Pendaftaran Penduduk	693.500.000
		Program Pencatatan Sipil	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Pagu Anggaran
			10.000.000
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	95.000.000
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	346.000.000
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.029.911.600
Jumlah			4.539.618.715

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023, data diolah

5.1.3 Super Kebijakan Pembangunan Daerah yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)

Pemerintah Kabupaten Temanggung menerapkan konsep tematik, holistik, integratif dan spasial dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.

Konsep Tematik

Penerapan konsep tematik telah diterapkan dalam pembangunan daerah, hal ini dapat dilihat dari adanya prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan pada setiap tahunnya dan sesuai dengan arah kebijakan daerah.

Konsep tematik juga diwujudkan dalam penetapan prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Temanggung, pada tahun 2025 adalah : (1) Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial, (2) Percepatan Pertumbuhan Ekonomi, dan (3) Reformasi Birokrasi

Konsep Holistik

Tingkat penerapan konsep holistik terkait perencanaan yang komprehensif, Pemerintah Kabupaten Temanggung menerapkan konsep holistik yaitu perencanaan yang komprehensif dari hulu ke hilir, antara lain gerakan penanganan anak usia sekolah tidak sekolah, gerakan penanganan kemiskinan, dan gerakan penanganan stunting.

Konsep Integratif

Penerapan konsep integratif juga dilakukan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kebijakan pembangunan

daerah yang melibatkan semua perangkat daerah, antara lain kegiatan penanganan kemiskinan melalui 1 perangkat daerah 1 desa dampingan, penanganan stunting yang melibatkan semua perangkat daerah, kegiatan SDGs yang didukung banyak program dan anggaran di semua perangkat daerah.

Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah juga dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Temanggung berkolaborasi dengan aktor non pemerintah baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia dan pelaksanaan kegiatan, yaitu kegiatan penanganan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan (SDGs), penanganan stunting, penanganan anak usia sekolah tidak sekolah, pelaksanaan kabupaten sehat, TMMD dan masih banyak lainnya. Penerapan konsep integratif terkait pelibatan stakeholders di luar OPD di daerah Kabupaten Temanggung diantaranya aktor non pemerintah yang dilibatkan adalah akademisi, tim penggerak PKK, lembaga amal zakat, BAZNAS, komunitas tertentu, kelompok masyarakat, media massa, TJLSP dan masih banyak lagi. Selain itu, terdapat pula pemanfaatan media informasi kreatif dalam proses perencanaan dengan melibatkan media sosial/media massa.

Konsep Spasial

Penerapan konsep Spasial juga diterapkan dalam kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Temanggung. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan penanganan stunting, kemiskinan dan infrastruktur yang dilaksanakan di semua kecamatan dengan salah satu tujuannya tidak ada kesenjangan antar wilayah, dan hasilnya pemetaan juga dapat dilihat dalam bentuk peta/spasial.

Tabel 5. 23

Keruntutan Kebijakan Pembangunan Daerah RKPD 2025 yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETETIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
1	Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Dasar	1. Program Pengembangan Permukiman	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah	DPUPR

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETITIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
	Bidang Kesehatanm Pendidikan, dan Sosial		Kab/Kota	
			Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	DPUPR
			Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	DPUPR
		2. Program Kawasan Permukiman	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	DPRKPLH
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	DPRKPLH
			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	DPRKPLH
			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	DPRKPLH
			3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pembangunan Puskesmas
		Pengembangan Puskesmas		Dinas Kesehatan
		4. Program pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan pendidikan jenjang pendidikan dasar	Dinas Pendidikan
		5. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pembangunan, Peningkatan dan Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	DPUPR
			Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	DPUPR
		2	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			Dinsos
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial			Dinsos
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			Dinsos
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			Dinsos
	Pembinaan Lanjut Usia			Dinsos

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETETIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
			Terlantar Potensial	
		4. Program Penanganan Bencana	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dinsos
		5. Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Dinperinaker
		6. Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja	Dinperinaker
			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Dinperinaker
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Dinperinaker
			Job Fair/Bursa Kerja	Dinperinaker
		7. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinkopdag
			Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinkopdag
			Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dinkopdag
		8. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Dinkopdag
			Pemantauan harga stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Dinkopdag
			Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Dinkopdag
		9. Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Dinkopdag
		10. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dinkopdag
		11. Program Pengembangan Ekspor	Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten/kota	Dinkopdag
		12. Program Standardisasi dan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera	Dinkopdag

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETETIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
		Perlindungan konsumen	Ulang Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Dinkopdag
		13. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Dinperinaker
		14. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda
			15. Program	Pengelolaan data tarik

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETETIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
		Pengembangan Daya Tarik Destinasi Wisata	wisata kabupaten	
		16.Program Pemasaran Pariwisata	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Dinbudpar
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinbudpar
			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	Dinbudpar
			17.Program Pengendalian Penduduk	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
		18.Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DPPPAPPKB
			Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	DPPPAPPKB
			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	DPPPAPPKB
			Pembinaan Terpadu Kampung KB	DPPPAPPKB
		19.Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPPAPPKB
			Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPPAPPKB
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	DPPPAPPKB
			Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi	DPPPAPPKB

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETETIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
			Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
		20.Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air	DPUPR
			Rehabilitasi/Pemeliharaan /Pembinaan Petani Pemakai Air	DPUPR
			Penyusunan DED Irigasi	DPUPR
			Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi	DPUPR
			Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	DPUPR
			Fasilitasi DAK Penugasan Sub Bidang Irigasi	DPUPR
		21.Program Kawasan Permukiman	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	DPRKPLH
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	DPRKPLH
			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	DPRKPLH
			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	DPRKPLH
			Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	DPRKPLH
		22.Program Penanggulangan Bencana	Penanganan pasca Bencana Kabupaten	BPBD
		23.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pembangunan jamban keluarga	Dinas Kesehatan
			Pembangunan septic tank	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		24.Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	DKPPP
			Sarana Pendukung Lumbung Pangan Masyarakat - Lantai Jemur	DKPPP
			Sarana Pendukung Lumbung Pangan Masyarakat - Rice Milling Unit (RMU)	DKPPP
			Fasilitasi dan distribusi akses pangan	DKPPP
		25.Program	Pengembangan Kawasan	DKPPP

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETITIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
		Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rumah Pangan Lestari Tani pekarangan	
			Pemberdayaan lumbung Pangan masyarakat	DKPPP
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	DKPPP
			Pengisian gudang cadangan pangan dalam antisipasi kerawanan pangan	DKPPP
			Pengembangan Konsumsi Pangan B2SA	DKPPP
			Pendampingan P2KP	DKPPP
		26.Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pengembangan prasarana pertanian	DKPPP
		27.Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Bagian Perekonomian
			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Bagian Perekonomian
		28.Program Penataan Desa	Penyediaan Prasarana dan Sarana Transportasi antar Wilayah	Dinpermades
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Dindikpora
			Bantuan siswa miskin SMP/MTs	Dindikpora
			Fasilitasi bantuan beasiswa bagi siswa miskin	Dindikpora
			Bantuan siswa miskin masuk sekolah	Dindikpora
			Fasilitasi kegiatan BOS dan PIP SMP	Dindikpora
			BOS tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Dindikpora
		29.Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten	DPM
		30.Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasarandan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Dinkopdag
		31.Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan <i>matchmaking</i> dan pameran investasi	DPM
		32.Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan
			Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan	Dinas Perhubungan

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETETIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
			Kewenangan Kabupaten/ Kota	
		33.Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinperinaker
		34.Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dinbudpar
			Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinbudpar
			Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinbudpar
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinbudpar
		35.Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Upaya Khusus Mendukung Ketahanan Pangan	DKPPP
		36.Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengembangan Kawasan Hortikultura	DKPPP
			Pengembangan Tanaman Kopi	DKPPP
			Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Padi Unggul	DKPPP
			Pengembangan Padi Organik	DKPPP
			Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP2TT) Jagung	DKPPP
			Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat	DKPPP
			Pengembangan Buah unggulan	DKPPP
			Pengadaan Alat Pertanian Perkebunan dan Pelatihan pendidikan	DKPPP
			Pengembangan Sistem pembenihan Mandiri Tanaman Perkebunan	DKPPP
			Pengembangan Sistem Pembenihan Buah Unggulan	DKPPP
			Fasilitasi Pengembangan Informasi Pertanian Perkebunan dan Hortikultura (Statistik Pertanian)	DKPPP
			Pengelolaan Database Pertanian	DKPPP
			Perawatan Kebun dinas	DKPPP

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETETIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
			dan Kebun entres	
			Optimalisasi Kebun Pemda	DKPPP
			Intensifikasi Tanaman Cengkeh	DKPPP
			Introduksi dan Diversifikasi Komoditas Pertanian berpotensi	DKPPP
		37.Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Fasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian (PSP)	DKPPP
			Fasilitasi DAK Pertanian	DKPPP
			Fasilitasi Temu Usaha pelaku pasar Komoditas Hortikultura	DKPPP
			Fasilitasi Temu Usaha pelaku pasar Komoditas Perkebunan	DKPPP
			Fasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian (PSP)	DKPPP
			Diseminasi Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Tanaman Pangan	DKPPP
			Diseminasi Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan	DKPPP
			Promosi atas hasil produksi Tanaman Hortikultura	DKPPP
			Promosi atas hasil produksi Tanaman Perkebunan	DKPPP
			Peningkatan mutu Hasil Produksi dan pasca panen Hortikultura	DKPPP
			Peningkatan mutu Hasil Produksi dan pasca panen Perkebunan	DKPPP
			Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	DKPPP
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian	DKPPP
		38.Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian Hama Tikus	DKPPP
			Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Pangan	DKPPP
			Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Hortikultura	DKPPP
			Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dalam Menunjang Sistem Manajemen Lingkungan Pertanian di Daerah Tembakau	DKPPP
		39.Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kinerja Penyuluhan	DKPPP
			Fasilitasi Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Teknologi Pertanian	DKPPP

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETETIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani	DKPPP
			Visualisasi dan Display Hasil Penyuluhan	DKPPP
			Penumbuhan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Petani	DKPPP
		40.Program Penanggulangan Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	BPBD
			Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
			Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	BPBD
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten Temanggung	BPBD
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana di Kabupaten Temanggung	BPBD
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana di Kabupaten Temanggung	BPBD
3	Reformasi Birokrasi	1. Program Kepegawaian Daerah	Persentase penyusunan formasi pegawai	BKPSDM
			Persentase penyelesaian usulan pensiun PNS tepat waktu	BKPSDM
			Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu	BKPSDM
			Persentase Keterisian Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas	BKPSDM
			Persentase Perempuan pada Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas	BKPSDM
			Persentase Pelanggaran	BKPSDM

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETETIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
			disiplin ASN	
			Persentase Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN	BKPSDM
			Persentase Pelaksanaan Updating Data kepegawaian	BKPSDM
		2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM
		3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Bappeda
			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Bappeda
			Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Bappeda
			Penelitian, Pengembangan, dan Perekrutan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Bappeda
		4. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	Inspektorat
			Nilai maturitas SPIP	Inspektorat
			Persentase perangkat daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) / Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Inspektorat
			Persentase tindak lanjut aduan Whistle blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	Inspektorat
			Nilai Survey Penilaian Integritas	Inspektorat
		5. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai maturitas SPIP	Inspektorat
			Persentase perangkat daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) /	Inspektorat

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETETIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
			Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	
			Persentase tindak lanjut aduan Whistle blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	Inspektorat
			Nilai Survey Penilaian Integritas	Inspektorat
			Prosentase penanganan aduan masyarakat	Inspektorat
		6. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	Bappeda
			Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Bappeda
			Monitoring Program dan Daerah Kegiatan Perangkat Daerah	Bappeda
		7. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETITIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda
		8. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKPAD
			Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	BPKPAD
			Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD	BPKPAD
			Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	BPKPAD
			Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	BPKPAD
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKPAD
			Koordinasi Penyusunan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKPAD
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	BPKPAD
			Pelaksanaan Pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKPAD
		9. Program Aplikasi Informatika	Penatalaksanaan dan Pengawasan <i>e-government</i> dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Dinkominfo

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETETIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
			Kabupaten/Kota	
			Penatalaksanaan dan Pengawasan <i>e-government</i> dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinkominfo
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Dinkominfo
			Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dinkominfo
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinkominfo
		10.Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten	Dinkominfo
		11.Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Dinkominfo
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinkominfo
		12.Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan ketersediaan data makro daerah	Dinkominfo
		13.Program Pencatatan Sipil	Pencatatan, penata usahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dindukcapil
			Peningkatan dalam pelayanan Pencatatan sipil pengumpulan data kependudukan	Dindukcapil
		14.Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dindukcapil
		15.Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikkan Melalui Pendidikkan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Pelaksana Koordinasi di bidang pendidikan politik,etika budaya politik, peningkatan demokrasi,fasilitas kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik,pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	Badan Kesbangpol
		16.Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Fasilitasi pengembangan kawasan investasi dan kebijakan penanaman modal	DPM
			Pengkajian potensi investasi pariwisata	DPM

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETETIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
			Pengkajian potensi investasi UMKM	DPM
			Pengkajian potensi investasi pertanian	DPM
			Pengembangan potensi unggulan daerah	DPM
		17.Program Promosi Penanaman Modal	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan perizinan	DPM
			Sosialisasi kebijakan Penanaman modal kepada masyarakat dan dunia usaha dan Peraturan Perizinan	DPM
			Diseminasi promosi investasi	DPM
		18.Program Pelayanan Penanaman Modal	Fasilitasi percepatan pelayanan perizinan	DPM
			Peningkatan pelayanan perizinan satu pintu	DPM
			Penyempurnaan sarana dan prasarana perizinan	DPM
			Fasilitasi Pengaduan dan advokasi	DPM
		19.Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Penyelenggaraan Temu Usaha	DPM
			Pengawasan dan pengendalian penanaman modal dan perizinan	DPM
			Monev PATEN	DPM
			Monev dan Pelaporan LKPM	DPM
		20.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Organisasi
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bagian Organisasi
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi
			Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LkjIP	Bagian Organisasi
			Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan kepala daerah	Bagian Forkompim
			Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan kepala daerah	Bagian Pembangunan, Bagian PBJ
		21.Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum
			Fasilitasi Bantuan Hukum	Bagian Hukum
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Bagian Hukum

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETETIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
			Penataan Administrasi Pemerintahan	Bagian Pemerintahan
			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Bagian Pemerintahan
			Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Bagian Pemerintahan
			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bagian Kesra
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Bagian Kesra
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Bagian Kesra
		22.Program Pengelolaan Arsip	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Dinpusip
			Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Dinpusip
		23.Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sekretariat DPRD
			Pembahasan rancangan peraturan daerah	Sekretariat DPRD
			Penyelenggaraan Kajian Perundang undangan	Sekretariat DPRD
			Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik	Sekretariat DPRD
			Pembahasan KUA dan PPAS	Sekretariat DPRD
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sekretariat DPRD
			Pembahasan APBD	Sekretariat DPRD
			Pembahasan APBD Perubahan	Sekretariat DPRD
		24.Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	Satpol PP Damkar
			Rasio linmas per RT	Satpol PP Damkar
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	Satpol PP Damkar
		25.Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	Satpol PP Damkar
			Tingkat Waktu Tanggap (<i>response time rate</i>)	Satpol PP Damkar
			Cakupan penanganan	Satpol PP

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETETIF DAN INOVATIF, PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
			bencana non kebakaran kabupaten	Damkar
			Persentase aparaturnya yang memenuhi standar kualifikasi	Satpol PP Damkar
		26.Program Penanggulangan Bencana	Cakupan desa tangguh bencana	BPBD
			Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	BPBD
			Persentase Tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana	BPBD
			Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana	BPBD
			Persentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana	BPBD
			Persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana	BPBD
		27.Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan kebijakan perekonomian	Bagian Perekonomian

Sumber : Bappeda, data diolah, 2025.

5.1.4 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Terhadap Sasaran dan Prioritas Daerah

1. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 5. 24

Dukungan Program Kabupaten Temanggung Terhadap Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung SPM Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PELAKSANA
1	Program Pengelolaan Pendidikan	151.865.540.775	DINDIKPORA
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	226.145.645.214	DINKES
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	10.000.000	DINKES
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.081.058.000	DPUPR
5	Program Kawasan Permukiman	6.113.909.000	DPRKPLH
6	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	946.000.000	SATPOL PP dan DAMKAR

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PELAKSANA
7	Program Penanggulangan Bencana	330.294.000	BPBD
8	Program Pemberdayaan Sosial	640.000.000	DINSOS
9	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	20.000.000	DINSOS
10	Program Rehabilitasi Sosial	732.671.162	DINSOS
11	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	24.340.334.214	DINSOS
12	Program Penanganan Bencana	167.500.000	DINSOS
JUMLAH		420.392.952.365	

Sumber : Bappeda, data diolah, 2025.

2. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Hasil Musrenbang RKPD 2025

Tabel 5. 25
Dukungan Program Kabupaten Temanggung Terhadap Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Hasil Musrenbang RKPD 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	PD PENGAMPU	KECAMATAN
1	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahteran (KS)	Bimtek pendidikan pengasuhan, ketrampilan menjadi orang tua, ketrampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga, dan penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga	35.000.000	DPPPAPPKB	Kelurahan Kranggan, Kranggan
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader	78.000.000	Dinperinaker	Desa Pingit, Pringsurat
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pelatihan dan pengembangan anggrek di wilayah Kelurahan Jampirejo (Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian)	150.000.000	DKPPP	TEMANGGUNG
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman	Pembangunan Gedung UMKM untuk Display dan Pengadaan Sarpras Pendukung UMKM (kegiatan :		DINKOPDAG	BANSARI

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	PD PENGAMPU	KECAMATAN
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan)			
5	Program Pembinaan Perpustakaan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan (pembelian mebeler buku dan PC)	150.000.000	DINPUSIP	TEMANGGUNG
6	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Revitalisasi Lapangan Jaten (senderan lapangan sebelah timur dan sebelah selatan)	824.000.000	DINDIKPORA	Kel. Madureso, Temanggung
8	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengadaan lampu jalan ruas jalan Jumo - Ketitang	460.000.000	DINHUB	Jumo
9	Program Kawasan Permukiman	Perbaiki RTLH	714.000.000	DPRKPLH	Kaloran
10	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelebaran jalan ruas jalan Kebraman – Gemawang	563.000.000	DPUPR	Gemawang
11	Program Penyelenggaraan Jalan	Rehabilitasi jalan ruas jalan ruas jalan Kacepit-Bumiayu	365.000.000	DPUPR	Selopampang
12	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelebaran jalan ruas jalan Ngimbrang - batas Bansari	738.000.000	DPUPR	Bulu
13	Program Penyelenggaraan Jalan	Rehabilitasi jalan ruas jalan Jurang-Salamsari (lanjutan BanGub)	845.000.000	DPUPR	Ngadirejo
14	Program Penyelenggaraan Jalan	Rehabilitasi jalan ruas jalan Kalirejo-Bansari	605.000.000	DPUPR	Kedu
15	Program Penyelenggaraan Jalan	Rekonstruksi jalan ruas jalan Bejen – Congkrang	487.000.000	DPUPR	Kledung
16	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelebaran jalan ruas jalan Pingit - Wonokerso (batas kabupaten)	545.000.000	DPUPR	Pringsurat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	PD PENGAMPU	KECAMATAN
17	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyediaan Sarpras Posyandu	700.000.000	DPUPR	Pringsurat
18	Program Penyelenggaraan Jalan	Rehabilitasi jaringan Irigasi Permukaan Kalimantan	612.000.000	DPUPR	Kranggan
19	Program Penyelenggaraan Jalan	Rehabilitasi jalan ruas jalan Wonobojo - Pringlegi	509.000.000	DPUPR	Wonobojo
20	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	800.000.000	DPUPR	Kandangan
21	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	693.000.000	DPUPR	Parakan
22	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	616.000.000	DPUPR	Candiroto
23	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	415.000.000	DPUPR	Tretep
24	Peningkatan	Program Penyelenggaraan	360.000.000	DPUPR	Tlogomulyo

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	PD PENGAMPU	KECAMATAN
	cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Jalan			
25	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelebaran jalan ruas jalan Menggoro-Kemloko	495.000.000	DPUPR	Tembarak
JUMLAH		12.079.000.000			

Sumber : Bappeda, data diolah, 2025.

3. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Penanganan Percepatan Penghapusan Kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Temanggung juga berkomitmen mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia, sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. 26
Program Daerah yang Mendukung Penanganan Kemiskinan

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Anggaran	Perangkat Daerah
1	Program Pengelolaan Pendidikan	persentase APM PAUD (5-6 tahun)	81.72	%	151.865.540.775	Dindikpora
		persentase APK PAUD (0-6 tahun)	44.55	%		
		persentase APK PAUD (4-6 tahun)	77.75	%		
		persentase APK PAUD (5-6 tahun)	90.55	%		
		persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/ Bimbingan Konseling/Psikologi	100	%		
		persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	49.99	%		

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Anggaran	Perangkat Daerah
		persentase Jumlah Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%		
		Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD	0.03	Angka		
		persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik	100	%		
		persentase APM SD Sederajat	98.7	%		
		persentase APK SD Sederajat	104.69	%		
		Angka Putus Sekolah SD Sederajat	0.02	Angka		
		Rasio Siswa/Guru SD	0	Angka		
		Rasio Siswa/Rombel SD	0	Angka		
		persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4	100	%		
		persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	61.32	%		
		persentase Kepala SD memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%		
		persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%		

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Anggaran	Perangkat Daerah
		Rasio Jumlah Pengawas SD	0.1	Angka		
		persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	91.49	%		
		persentase APM SMP Sederajat	89	%		
		persentase APK SMP Sederajat	98.77	%		
		Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	98.9	%		
		Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	0.16	Angka		
		Rasio Siswa/Guru SMP	0	Angka		
		Rasio Siswa/Rombel SMP	0	Angka		
		persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4	100	%		
		persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	66.25	%		
		persentase Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%		
		persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%		
		Rasio Jumlah Pengawas SMP	0.08	Angka		
		persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	96.67	%		
		persentase Pendidik Kesetaraan memiliki	100	%		

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Anggaran	Perangkat Daerah
		kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu				
		persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4	100	%		
		persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%		
		persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	90	%		
		persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri)	20	%		
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	72	per 100.000 KH	226.145.645.214	Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan RSUD
		Angka Kematian Bayi (AKB)	12.8	per 1000 KH		
		Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	100	%		
		Prevalensi anemia pada ibu hamil	13.44	% maksimal		
		Cakupan Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	%		

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Anggaran	Perangkat Daerah
		Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	%		
		persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	100	%		
		persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%		
		Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	100	%		
		Angka Kematian Neonatal	9.15	per 1.000 KH		
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	%		
		Angka Kematian Balita	15.6	per 1.000 KH		
		Prevalensi ballita gizi buruk	0.3	%		
		Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	14	% maksimal		
		persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	82.6	% minimal		
		persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%		
		persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%		
		Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan	100	%		

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Anggaran	Perangkat Daerah
		skrining kesehatan sesuai standar				
		persentase fasyankes rujukan yang memenuhi standar mutu	64	%		
		persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%		
		persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%		
		persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%		
		persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%		
		persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%		
		Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	7	Maks per 100.000 penduduk		
		Presentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	85	%		
		persentase rumah sehat	87.6	%		
		persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	98.4	%		
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	95.7	%	9.081.058.000	DPUPR

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Anggaran	Perangkat Daerah
		Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	100	%		
4	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	88.4	%	316.091.000	DPRKPLH
5	Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	95.89	%	6.113.909.000	DPRKPLH
		Persentase kawasan kumuh perkotaan	4.82	%		
		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100	%		
6	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	732.671.162	Dinas Sosial
		Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%		
		Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%		
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	%		
7	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100	%	24.340.334.214	Dinas Sosial
		persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	100	%		
		Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	100	%		

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Anggaran	Perangkat Daerah
		persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan	60	%		
		persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48	%		
Jumlah					418.595.249.365	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah.

4. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Penanganan Stunting Kabupaten Temanggung

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 42/M.PPPN/HK/04/2020 Tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2022 Kabupaten Temanggung menjadi kabupaten percontohan penanganan perkawinan anak usia dini dan pencegahan stunting oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah 1) Rapat Koordinasi; 2) Sosialisasi dan 3) *Forum Group Discussion* (FGD)

Selain itu juga dilakukan penelitian secara khusus oleh Prof. Dr. Paulus Wirutomo, M.Sc dan tim di Desa Wadas Kecamatan Kandangan sebagai desa dengan kasus stunting tertinggi dan Desa Tanurejo Kecamatan Bansari sebagai desa dengan kasus stunting rendah. Universitas Diponegoro Semarang juga melakukan penelitian tentang indeks resiko stunting dan determinan penurunan kejadian stunting tahun 2018-2021 di Kabupaten Temanggung. Guna menunjang kegiatan sebagaimana di maksud, maka dukungan kegiatan yang bersumber dari APBD sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 5. 27

Program Daerah yang Mendukung Aksi Konvergensi Stunting
Tahun 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	PELAKSANA
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	226.145.645.214	Dinas Kesehatan
		2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		3. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
2	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.245.900.000	DPPPAPPKB
		2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	9.081.058.000	DPUPR
4	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	7.293.884.000	DPPPAPPKB
5	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.245.900.000	DPPPAPPKB
6	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	DPPPAPPKB
7	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	45.000.000	DPPPAPPKB

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	PELAKSANA
		Kabupaten/Kota		
8	Program Penyediaan dan Pengembangan sarana pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	18.460.436.207	DKPPP
9	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	24.340.334.214	Dinas Sosial
10	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	151.865.540.775	Dindikpora
Jumlah Total			445.733.698.410	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah.

5. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Target SDGs Kabupaten Temanggung

Pemerintah Kabupaten Temanggung juga berkomitmen dalam mendukung keberhasilan program pembangunan berkelanjutan/SDGs, pengarusutamaan tata kelola Pemerintahan yang baik, dan pengarusutamaan gender dan didukung oleh sebagian besar perangkat daerah beserta lembaga non pemerintah. Program daerah yang mendukung pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan (SDGs), pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik, dan pengarusutamaan gender sebagaimana tercantun dalam tabel berikut:

Tabel 5. 28

Program Daerah yang Mendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan Pengarusutamaan Gender

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
I	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan			
1	Program Pengelolaan Pendidikan	tujuan 1 tujuan 2 tujuan 4	V	V

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarus tamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarus tamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarus utamaan Gender
II	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan			
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	tujuan 1 tujuan 2 tujuan 3 tujuan 6 tujuan 13	V	V
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	tujuan 3	V	V
3	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	tujuan 3	V	V
III	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	tujuan 6	V	
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	tujuan 1 tujuan 6		V
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	tujuan 1	V	
4	Program Pengembangan Permukiman	tujuan 1	V	V
5	Program Penataan Bangunan Gedung	Tujuan 9	V	
6	Program Penyelenggaraan Jalan	tujuan 9	V	
7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tujuan 9 Tujuan 11 Tujuan 13	V	
8	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Tujuan 9	V	
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Tujuan 9	V	
IV	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman			
1	Program Pengembangan Perumahan	tujuan 1 tujuan 6		V

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarus tamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarus tamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarus utamaan Gender
2	Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	tujuan 1 tujuan 6 tujuan 11		V
V	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			
1	Program Penanggulangan Bencana	tujuan 1 tujuan 11 tujuan 13	V	
2	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana			V
3	Program Pemeliharaan Ketentraman dan ketertiban Umum			V
VI	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial			
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	tujuan 1 tujuan 2 tujuan 3	V	V
2	Program Rehabilitasi Sosial	tujuan 3	V	
3	Program Pemberdayaan Sosial			V
VII	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja			
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	tujuan 1 tujuan 8	V	V
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	tujuan 8	V	V
3	Program Hubungan Industrial	tujuan 8 tujuan 10	V	
VIII	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			
1	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	tujuan 5 tujuan 16	V	V
2	Program Perlindungan Perempuan	tujuan 16 tujuan 5 tujuan 10	V	V

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	tujuan 3		V
4	Program Pemenuhan Hak Anak	tujuan 16	V	
5	Program Perlindungan Khusus Anak	tujuan 10	V	
IX	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan			
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	tujuan 2 tujuan 13	V	
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	tujuan 2 tujuan 8 tujuan 13	V	
X	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup			
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	tujuan 6 tujuan 9 tujuan 12 tujuan 13	V	
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	tujuan 13	V	
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	tujuan 6 tujuan 11 tujuan 13 tujuan 15	V	
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	tujuan 6 tujuan 12 tujuan 13	V	
5	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	tujuan 6	V	
6	Program Pengelolaan Persampahan	tujuan 1 tujuan 12 tujuan 11 tujuan 13	V	V
XI	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarus tamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarus tamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarus utamaan Gender
1	Program Pencatatan Sipil	tujuan 1 tujuan 16 tujuan 17	V	V
2	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	tujuan 16	V	V
3	Program Pendaftaran Penduduk	tujuan 16	V	V
XII	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa			
1	Program Penataan Desa	tujuan 10	V	
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	tujuan 10	V	
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	tujuan 10	V	
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	tujuan 10	V	
5	Program Pembinaan dan Fasilitas Perencanaan, evaluasi, pengelolaan keuangan dan pembangunan desa			V
6	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat			V
XIII	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana			
1	Program Pengendalian Penduduk	tujuan 1 tujuan 3 tujuan 5		V
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana	tujuan 1 tujuan 3 tujuan 5		V
3	Program Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera	tujuan 3	V	V
XIV	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman			

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
	Modal			
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	tujuan 8 tujuan 9	V	
2	Program Pengembangan Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	tujuan 8	V	
3	Program Pelayanan Penanaman Modal			V
XV	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Publik			
1	Program nformasi dan Komunikasi Publik	tujuan 16	V	V
2	Program Aplikasi Informatika	tujuan 4 Tujuan 9	V	V
XVI	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan			
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tujuan 3 Tujuan 11	V	
XVII	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi			
1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Tujuan 8		V
XVIII	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga			
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	tujuan 1 tujuan 4 tujuan 8	V	
XIX	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			
1	Program Pengembangan Kebudayaan	tujuan 8	V	
2	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Tujuan 11	V	
3	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan		V	
4	Program Pembinaan Perpustakaan			V

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
XX	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan			
1	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	tujuan 2 tujuan 8	V	
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Tujuan 8	V	
XXI	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata			
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	tujuan 8	V	
2	Program Pemasaran Pariwisata	tujuan 8	V	
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	tujuan 8	V	
XXII	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	tujuan 2 tujuan 13	V	
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Tujuan 13	V	
3	Program Pengendalian bencana Pertanian	Tujuan 13	V	
4	Program Penyuluhan Pertanian	Tujuan 13	V	
XXIII	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan			
1	Program Pengembangan Ekspor	tujuan 17	V	
2	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Tujuan 12	V	
3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan			V
XXIV	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi			
1	Program Pengembangan	tujuan 8		V

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarus tamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarus tamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarus utamaan Gender
	Kawasan Transmigrasi			
XXV	Sekretariat Daerah			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tujuan 1 tujuan 4	V	
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tujuan 12 tujuan 16 tujuan 17	V	V
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	tujuan 16 tujuan 8	V	V
4	Program Administrasi Umum	tujuan 16	V	
XXVI	Perencanaan			
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tujuan 11	V	V
2	Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	tujuan 1 tujuan 11 tujuan 17	V	V
3	Program Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam			V
XXVII	Keuangan			
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	tujuan 16 tujuan 17	V	
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tujuan 16	V	
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tujuan 16 Tujuan 17	V	
XXVIII	Kepegawaian			
1	Program Kepegawaian Daerah		V	
XXIX	Pendidikan Dan Pelatihan			
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	tujuan 5 tujuan 16	V	V
XXX	Penelitian Dan Pengembangan			
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	tujuan 1 tujuan 9	V	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarus tamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarus tamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarus utamaan Gender
XXXI	Inspektorat Daerah			
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan		V	V
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		V	
XXXII	Kecamatan			
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		V	
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		V	
XXXIII	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	tujuan 5		V
2	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosial	Tujuan 3	V	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah.

Berdasarkan pemetaan Indikator SDG's dalam dokumen perencanaan daerah terdapat indikator tujuan, indikator sasaran, indikator program, dan indikator yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah. Beberapa indikator SDG's yang bukan merupakan kewenangan daerah otomatis tidak ada dukungannya di Renja maupun RKPD. Hasil pemetaan indikator SDG's sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 29
Pemetaan Indikator SDG's dalam Dokumen Perencanaan Daerah

No	Spesifikasi Indikator	Pilar Sosial	Pilar Ekonomi	Pilar Lingkungan	Pilar Hukum dan Tata Kelola	Jumlah Indikator
1	Indikator Kinerja Tujuan	1	4	-	-	5
2	Indikator Kinerja Sasaran	8	4	4	3	19
3	Indikator Kinerja Program	60	7	9	14	90
4	Indikator Pada Renstra PD	4	8	18	6	36
5	Indikator Bukan Kewenangan	6	5	-	4	15
Jumlah		79	28	31	27	165

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah.

6. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Temanggung

Strategi pengarusutamaan gender di Kabupaten Temanggung tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 tahun 2018 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Temanggung. Sesuai Perbup ini, seluruh perangkat daerah dan desa wajib menyusun perencanaan penganggaran responsive gender pada semua program dan kegiatan secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada menggunakan Teknik analisis gender berupa GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement). Adapun penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender dilaksanakan setiap tahun sebelum penyusunan rencana kerja anggaran.

Tabel 5. 30
Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Temanggung

NO	PROGRAM	Anggaran	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	10.000.000	DPPAPPPKB
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	10.000.000	DPPAPPPKB
3	Program Perlindungan Perempuan	42.842.200	DPPAPPPKB
4	Program Pengendalian Penduduk	423.256.000	DPPAPPPKB
5	Program Pembinaan Keluarga Berencana	7.293.884.000	DPPAPPPKB
6	Program Pendaftaran Penduduk	693.500.000	DINDUKCAPIL
7	Program Pencatatan Sipil	10.000.000	DINDUKCAPIL
8	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	674.979.613	DINKOPDAG
9	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	30.000.000	DINKOPDAG
10	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro	330.000.000	DINKOPDAG
11	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	613.000.000	DINPERINAKEK
12	Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	31.896.029.325	SETDA
13	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.225.335.800	SETDA
14	Program Pembinaan Perpustakaan	1.211.407.950	DINPUSIP
15	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	456.750.000	BKPSDM
16	Program Penyelenggaraan Pengawasan	628.546.400	INSPEKTORAT
17	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	509.474.400	BAPPEDA
18	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	509.474.400	BAPPEDA
19	Program Pelayanan Penanaman Modal	342.403.510	DPM
20	Program Pemberdayaan Sosial	640.000.000	DINSOS
21	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.029.911.600	DINKOMINFO

NO	PROGRAM	Anggaran	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
22	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.029.911.600	SATPOL PP DAMKAR
23	Program Pengelolaan Pendidikan	151.865.540.775	DINDIKPORA
24	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	226.145.645.214	RSUD
25	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.081.058.000	DPUPR
26	Program Kawasan Permukiman	6.113.909.000	DPUPR
27	Pogram Pengembangan Perumahan	316.091.000	DPRKPLH
	TOTAL	443.132.950.787	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah.

7. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Pemerintah Kabupaten Temanggung juga berkomitmen mendukung proses adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. 31
Program Daerah yang Mendukung Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PELAKSANA
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	226.145.645.214	Dinas Kesehatan
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	18.460.436.207	DKPPP
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	8.047.730.900	DKPPP
4	Program Penyuluhan Pertanian	260.000.000	DKPPP
5	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	50.000.000	DPRKPLH
6	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	250.000.000	DPRKPLH

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PELAKSANA
7	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	380.000.000	DPRKPLH
8	Program Pengelolaan Persampahan	3.525.000.000	DPRKPLH
Jumlah Total		257.118.812.321	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah.

8. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Destinasi Pribwisata Super Prioritas Brobudur

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur. Pemerintah Kabupaten Temanggung sangat mendukung kegiatan tersebut dan mengalokasikan program kegiatan terhadap pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata di kawasan pariwisata di Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 5. 32

Dukungan Program dan Kegiatan Kabupaten Temanggung Terhadap Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur Tahun 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PELAKSANA
1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	330.000.000	Dinkopdag
2	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	7.580.000.000	Dinbudpar

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PELAKSANA
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	1.274.889.125	Dinkominfo
4	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Jembatan	22.697.649.250	DPUPR
5	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	260.000.000	DKPPP
6	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	3.525.000.000	DPRKPLH
7	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pelaksanaan rehabilitasi	250.000.000	DPRKPLH

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PELAKSANA
8	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	697.772.800	Bappeda
JUMLAH				36.615.311.175	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025, data diolah.

Pengembangan Borobudur sebagai destinasi pariwisata super prioritas selain mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, juga membutuhkan dukungan dari daerah sekitarnya, salah satunya adalah Kabupaten Temanggung. Potensi yang mendukung pengembangan Borobudur yang berada di Kabupaten Temanggung salah satunya adalah event yang dilaksanakan secara rutin di Kawasan Borobudur yaitu pengambilan air suci, persemayaman air suci di Candi Mendut dan perayaan Hari Raya Waisak di Candi Borobudur. Sejumlah Biksu yang berasal dari 11 majelis agama Buddha di Indonesia, mengikuti ritual pengambilan air suci (berkah) untuk perayaan Hari Raya Waisak di Mata Air Jumprit Temanggung persisnya di Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Air berkah tersebut akan disemayamkan di Candi Mendut dan akan digunakan dalam perayaan detik-detik Waisak di Candi Borobudur.

Air di Umbul Jumprit memang bukan air biasa. Bagi Umat Budha, air Umbul Jumprit dianggap sebagai air suci pembersih jiwa manusia. Harapan pengambilan air suci ini untuk seluruh manusia di dunia agar sadar bahwa jiwa ini bagaikan jiwa Sang Buddha. Penuh cinta kasih tanpa memandang aliran dan agama. Salah seorang Wakil Bhikkhu, Dwi Virya, mengatakan dalam agama Buddha air suci mempunyai makna filosofis yang sangat tinggi.

9. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Temanggung mendukung terlaksananya Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-

Salatiga–Demak–Grobogan, Kawasan Purworejo–Wonosobo–Magelang–Temanggung dan Kawasan Brebes–Tegal–Pemalang. Program kegiatan yang direncanakan dalam mendukung percepatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 33
Dukungan Program Kabupaten Temanggung Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019

No	Program	Anggaran	Pelaksana
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	9.164.704.000	DPUPR
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	22.697.649.250	DPUPR
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	18.460.436.207	DKPPP
4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.047.730.900	DKPPP
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	330.000.000	DINKOPDAG
6	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	95.000.000	DINKOPDAG
7	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	190.000.000	DINBUDPAR
8	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	613.000.000	DINPERINAKER
9	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	425.000.000	DINPERINAKER
10	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	80.000.000	DINPERINAKER
11	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.225.335.800	BAG PEREKONOMIAN, BAG PEMBANGUNAN, BAG PBJ
	TOTAL	61.328.856.157	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025, data diolah.

10. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Pada Tahun 2025

Program pembangunan infrastruktur pada RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 difokuskan untuk mendukung terwujudnya peningkatan kualitas pembangunan manusia, pemulihan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan infrastuktur yang direncanakan tidak sebatas bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan perhubungan tetapi juga bidang kesehatan, pendidikan, dan pertanian.

Tabel 5. 34
Dukungan Program Kabupaten Temanggung Terhadap Pembangunan Infrastruktur Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Pelaksana
----	---------	----------	-----------

No	Program	Anggaran	Pelaksana
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	226.145.645.214	DINKES
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	9.164.704.000	DPUPR
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.081.058.000	DPUPR
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	200.000.000	DPUPR
5	Program Penataan Bangunan Gedung	200.000.000	DPUPR
6	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	200.000.000	DPUPR
7	Program Penyelenggaraan Jalan	22.697.649.250	DPUPR
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	300.000.000	DPUPR
9	Program Pengembangan Perumahan	316.091.000	DPRKPLH
10	Program Kawasan Permukiman	6.113.909.000	DPRKPLH
11	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	10.419.879.000	DPRKPLH
12	Program Pengelolaan Persampahan	3.525.000.000	DPRKPLH
13	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	18.589.072.100	DINHUB
14	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.274.889.125	DINKOMINFO
15	Program Pengelolaan Pendidikan	151.865.540.775	DINDIKPORA
16	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	8.047.730.900	DKPPP
	TOTAL	468.141.168.364	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025, data diolah.

11. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pembangunan Pintu Tol Bawen - Yogyakarta

Pada tahun 2022, Provinsi Jawa Tengah memiliki agenda pembangunan jalan tol ruas Bawen-Yogyakarta dengan pintu tol di Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung. Peluang tersebut ditangkap oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung

melalui kegiatan penataan ruang yaitu peninjauan kembali dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung 2011-2031 agar keberadaan pintu tol ini memungkinkan tumbuhnya ekonomi baru serta mendukung pengembangan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Temanggung. Harapannya Kabupaten Temanggung tidak sebatas dilewati tetapi bisa menjadi daerah tujuan.

5.1.5 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Terhadap Satu Data Indonesia

Pemerintah Kabupaten Temanggung juga berkomitmen mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia, sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. 35
Program Daerah yang Mendukung Satu Data Indonesia

No	Program	Anggaran	Pelaksana
1	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.029.911.600	Dinkominfo
2	Program pengelolaan aplikasi informatika	1.274.889.125	Dinkominfo
3	Program penyelenggaraan statistik sektoral	82.500.000	Dinkominfo
4	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	509.474.400	Bappeda
Jumlah total		2.896.775.125	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah.

5.2 PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2025 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung disusun dalam rangka memenuhi sasaran dan arah kebijakan RPD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2026 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022

tentang RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2026 dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan nasional sekaligus mempedomani tema pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yaitu Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu juga berdasarkan permasalahan dan hasil evaluasi capaian pembangunan daerah.

1.2.1 Kegiatan Prioritas Per Program Berdasarkan Urusan dan Bidang

Program dan kegiatan prioritas yang direncanakan dalam RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Bidang Pendidikan

➤ Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diprioritaskan pada beberapa capaian Bidang Pendidikan yang belum sesuai target yang ditetapkan oleh Pusat dan hasil Rakortek Provinsi mengenai arahan Kemendikbud untuk pencapaian SPM Pendidikan yang tertuang dalam Rapor Pendidikan sebagaimana Surat Kemdikbudristekdikti Nomor 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024 Tanggal 16 Februari 2024 tentang Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kab/Kota yaitu melalui kegiatan peningkatan angka partisipasi sekolah 5-6 tahun, angka partisipasi sekolah 7-15 tahun dan angka partisipasi sekolah 7-18 tahun, peningkatan satuan PAUD terakreditasi minimal B, peningkatan kemampuan numerasi dan literasi SD dan SMP. Terkait implementasi Pendidikan Pancasila dan Pendidikan karakter juga menjadi perhatian semua pihak baik perangkat daerah terkait, sekolah, Lembaga terkait Pendidikan dan masyarakat.

Identifikasi pemetaan dan kebutuhan guru juga secara berkala dilakukan dan dikoordinasikan dengan BKPSDM terkait formasi dan pengadaannya.

PAUD juga menjadi salah satu prioritas karena menjadi pijakan dasar terkait SDM generasi masa depan, yaitu melalui peningkatan kualitas dalam perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, adanya layanan pendampingan sehingga mampu mencegah perundungan, kekerasan dan intoleransi. Tidak hanya PAUD, berdasarkan data masih adanya anak usia sekolah yang tidak sekolah dan angka putus sekolah maka juga diprioritaskan untuk peningkatan kualitas layanan Pendidikan kesetaraan melalui perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, adanya layanan pendampingan sehingga mampu mencegah perundungan, kekerasan dan intoleransi.

Berdasarkan hasil evaluasi, program di bidang Pendidikan juga diarahkan pada kegiatan peningkatan angka rata-rata lama sekolah, pengurangan angka putus sekolah SD dan SMP sederajat, peningkatan kondisi fasilitas pendidikan ruang kelas, pencapaian target SMP dengan akreditasi minimal, pencapaian target kelulusan peserta pendidikan kesetaraan, peningkatan jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, pengurangan Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS) dan peningkatan APK PAUD.

2) **Bidang Kesehatan**

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan penurunan angka kematian bayi, penurunan angka kematian balita;

penurunan angka kematian neonatal,; dan penurunan jumlah rumah tidak sehat.

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan.

- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada kegiatan pemenuhan akreditasi utama fasilitas kesehatan tingkat pertama

- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan keamanan pangan sebagai langkah untuk peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor serta peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat.

3) **Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan dan pembangunan bendung dan jaringan irigasi.

- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagai upaya meningkatkan akses air minum layak menuju akses air minum aman.

- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
- Program ini diarahkan pada kegiatan penambahan jalan kabupaten yang dilengkapi dengan drainase agar meminimalisir resiko kerusakan jalan.

- Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat

Laik Fungsi Bangunan Gedung serta rehabilitasi bangunan gedung.

- Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas trotoar di sejumlah titik di Temanggung.
- Program Penyelenggaraan Jalan
Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan kualitas jalan dan jembatan di sejumlah titik di Temanggung.
- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), penyusunan dokumen pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah serta dokumen penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang.

4) **Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

- Program Pengembangan Perumahan
Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan rumah susun. Program ini dilakukan dalam rangka mewujudkan rumah susun yang bersih, sehat dan layak huni sehingga tercapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- Program Kawasan Permukiman
Program ini diarahkan pada kegiatan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan akses sanitasi layak

5) **Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**

- Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Program ini diarahkan pada penanganan kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan; penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; serta penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Program ini diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran agar sesuai dengan jangkauan wilayah.
- Program Penanggulangan Bencana
Program ini diarahkan pada Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana serta Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dalam upaya meningkatkan kinerja dalam merespon laporan kejadian bencana pada saat waktu tanggap.

6) **Bidang Sosial**

- Program Pemberdayaan Sosial
Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pelatihan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) dan fasilitasi program-program kegiatan PSM.
- Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
Program ini diarahkan pada penjemputan masyarakat yang termasuk warga migrant korban tindak kekerasan dan pemberian stimulan bagi korban.
- Program Rehabilitasi Sosial
Program ini diarahkan pada kegiatan rehabilitasi sosial pada masyarakat yang membutuhkan
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Program ini diarahkan pada kegiatan pemenuhan pelayanan pemerlu jaminan dan perlindungan sosial dan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat.
- Program Penanganan Bencana
Program ini diarahkan pada kegiatan pemenuhan kebutuhan sosial bagi masyarakat korban bencana alam dan sosial dan peningkatan pemberdayaan masyarakat terkait siap siaga jika terjadi bencana.
- Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional.

b. Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar

1) Bidang Tenaga Kerja

- Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program ini diarahkan pada kegiatan beberapa pelatihan untuk memperkaya skill bagi tenaga kerja yang belum memenuhi standar kompetensi sehingga mampu bersaing dalam mencari lapangan kerja
- Program Penempatan Tenaga Kerja
Program ini diarahkan pada kegiatan penyuluhan dan bimibingan serta pelatihan keterampilan bagi pencari kerja guna ikut serta menekan angka TPT.
- Program Hubungan Industrial
Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi dan mediasi apabila ada perselisihan hubungan industrial dan pembinaan kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

2) Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Program ini diarahkan pada kegiatan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten untuk menggaungkan potensi perempuan dan mengurangi paham atau budaya patriarki, serta meningkatkan pemberdayaan perempuan
- Program Perlindungan Perempuan
Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan dan mediasi bagi perempuan korban kekerasan serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan pelayanan, pengaduan dan penjangkauan korban.
- Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kesetaraan gender dan perlindungan anak bagi keluarga guna meningkatkan ketahanan keluarga.

➤ Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak serta pemenuhan hak-hak sesuai dengan kebutuhannya baik secara fisik maupun psikis.

➤ Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak dengan sosialisasi dan advokasi upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.

3) **Bidang Pangan**

➤ Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan seperti lumbung pangan, rantai jamur dan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya, pemanfaatan teknologi pangan serta diversifikasi pangan

➤ Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan informasi terkait kerentanan dan ketahanan pangan, serta dan mencukupi ketersediaan pangan

➤ Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan kelembagaan keamanan pangan serta peningkatan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan.

4) **Bidang Pertanahan**

➤ Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara tanah garapan.

5) **Bidang Lingkungan Hidup**

➤ Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini difokuskan untuk kegiatan penyusunan kebijakan yang mengatur penggunaan lahan sesuai dengan fungsinya sehingga sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan

➤ Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini difokuskan pada kegiatan pengujian parameter kualitas lingkungan hidup yang meliputi media tanah, air dan udara kemudian hasilnya akan dituangkan dalam dokumen hasil uji yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penentuan arah kebijakan terutama dalam penanganan lahan kritis, mitigasi adanya fenomena perubahan iklim, serta menjaga kualitas lingkungan hidup

➤ Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

Program ini difokuskan pada kegiatan pemeliharaan hutan kota, taman kota, dan terpenuhinya RTH

➤ Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi izin penyimpanan sementara limbah B3 sehingga mencegah pencemaran lingkungan

➤ Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini difokuskan untuk pengawasan terhadap usaha yang harus memiliki Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi sehingga tidak merusak lingkungan dan mencegah sengketa lingkungan

➤ Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan

Program ini difokuskan pada kegiatan yang penjangkauan kelestarian lingkungan hidup oleh berbagai stakeholders

serta fasilitasi sarana prasarana kegiatan adiwiyata (tempat sampah, biopori, tanaman)

- Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini difokuskan pada kegiatan penilaian terhadap kinerja stakeholders yang berperan dalam pelestarian lingkungan hidup

- Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini difokuskan pada kegiatan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat terhadap PPLH

- Program Pengelolaan Persampahan

Program ini difokuskan pada kegiatan pemeliharaan kebersihan, pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan kinerja pengelola persampahan, dan pemilahan sampah yang selanjutnya akan diolah.

6) **Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

- Program Pendaftaran Penduduk

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang meliputi penerbitan KTP dan KIA di Kabupaten Temanggung.

- Program Pencatatan Sipil

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil.

- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini difokuskan untuk meningkatkan kepemilikan masyarakat terhadap dokumen kependudukan dan catatan sipil.

7) **Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

- Program Penataan Desa

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana desa untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen desa sebagai upaya

mengembangkan kemandirian serta kesejahteraan desa sehingga terwujud desa berpredikat mandiri

- Program Peningkatan Kerjasama Desa
Program ini difokuskan pada kegiatan meningkatkan kerjasama antar desa untuk pembangunan desa sehingga tidak ada kesenjangan antar wilayah
- Program Administrasi Pemerintahan Desa
Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, pengelolaan aset desa, dan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa.
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
Program ini difokuskan pada kegiatan pendampingan serta peningkatan kapasitas sumber daya pengelola/lembaga kemasyarakatan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) guna identifikasi potensi desa swasembada dalam rangka pembangunan desa.

8) **Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**

- Program Pengendalian Penduduk
Program ini difokuskan pada kegiatan pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana serta data-data dan pelayanannya terhadap masyarakat
- Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya KB serta batasan PUS melalui pemberian advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) serta publikasi dan promoso program melalui media cetak, elektronik dan media luar ruang
- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini difokuskan pada kegiatan pengadaan BIB KIT pada 20 locus stunting serta Pembinaan PKBR di PIK Remaja dan BKR.

9) **Bidang Perhubungan**

- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sosialisasi SOP berkendara dan peningkatan sarana prasarana serta pengelolaan terminal tipe C.

10) **Bidang Komunikasi Dan Informatika**

- Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan pelayanan komunikasi dan informatika untuk masyarakat, fasilitasi akses internet di area publik yang ada, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelaku PPID.

- Program Aplikasi Informatika

Program ini difokuskan pada kegiatan Pembangunan jaringan fiber optik antar kecamatan, pengelolaan pusat data pemerintah daerah, dan pengembangan aplikasi.

11) **Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**

- Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan koperasi terutama koperasi yang tidak sehat.

- Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi melalui pendidikan dan latihan koperasi.

- Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi, sosialisasi dan pendampingan pembiayaan serta pemasaran usaha koperasi.

- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
Program ini difokuskan pada kegiatan pemberdayaan, pembinaan dan peningkatan kelas UMKM melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan, pemasaran dan pelatihan bagi pelaku Usaha Mikro.
- Program Pengembangan UMKM
Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi pengembangan UMKM sehingga terwujud peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

12) **Bidang Penanaman Modal**

- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Program ini difokuskan pada kegiatan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal.
- Program Promosi Penanaman Modal
Program ini difokuskan pada kegiatan menginformasikan tentang potensi dan peluang investasi penanaman modal yang ada pada daerah guna menarik investor.
- Program Pelayanan Penanaman Modal
Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem yang terintegrasi.
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman modal

13) **Bidang Kepemudaan Dan Olahraga**

- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas pemuda dan pembinaan pemuda sehingga terwujud peningkatan kapasitas pemuda

- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan pelatihan olahraga, pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi, pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga yang representatif, pembinaan cabang olah raga dan sistem informasi pendataan keolahragaan dan kepemudaan.

- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan yang adaptif terhadap perkembangan jaman

14) **Bidang Statistik**

- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan pengelolaan data statistik sektoral, peningkatan validitas data produsen, dan fasilitasi koordinasi pemerintah daerah dan BPS guna sinkronisasi data.

15) **Bidang Persandian**

- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam bidang pengamanan sistem informasi supaya terwujud kualitas keamanan informasi Pemerintah Daerah sesuai standar dan meningkatkan jumlah sistem elektronik sudah teruji keamanannya

16) **Bidang Kebudayaan**

- Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan jumlah pelaku/kelompok seni dan budaya yang produktif melalui pengembangan kualitas SDM, serta kegiatan pembinaan sejarah Kabupaten Temanggung melalui penggalian sejarah lokal temanggung melalui narasumber ahli.

17) **Bidang Perpustakaan**

- Program Pembinaan Perpustakaan
Program ini difokuskan pada kegiatan pembudayaan gemar membaca di kalangan masyarakat, serta pengelolaan perpustakaan desa/kelurahan, sekolah, TBM (Taman Bacaan Masyarakat) dan perpustakaan daerah untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan peminjam di perpustakaan.
- Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
Program ini difokuskan pada kegiatan monitoring dalam rangka pengumpulan naskah kuno penambahan koleksi nasional di wilayah Kabupaten Temanggung.

18) **Bidang Kearsipan**

- Program Pengelolaan Arsip
Program ini difokuskan pada kegiatan perbaikan dalam pengelolaan arsip untuk meningkatkan indeks manajemen kearsipan.

c. **Urusan Pemerintahan Pilihan**

1) **Bidang Kelautan dan Perikanan**

- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Program ini difokuskan pada kegiatan swasembada pada ikan konsumsi, pengembangan kapasitas kelompok pembudi daya ikan kecil, dan penyediaan prasarana pembudidayaan ikan.
- Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Program ini difokuskan pada penyusunan dokumen hasil pengawasan sumber daya perikanan tangkap di dilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di wilayah Kabupaten Temanggung.
- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini difokuskan pada kegiatan penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko, penyediaan ikan untuk konsumsi dan pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil.

2) Bidang Pariwisata

➤ Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini difokuskan pada kegiatan perencanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan destinasi wisata dan kegiatan pembinaan atau pendampingan desa wisata serta peningkatan kapasitas pelaku wisata

3) Bidang Pertanian

➤ Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan melalui pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan

➤ Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini difokuskan pada kegiatan pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B, penyediaan peta lahan LP2B dan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya.

➤ Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini difokuskan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis, kegiatan pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner untuk meningkatkan produktivitas hasil peternakan.

➤ Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini difokuskan pada kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan petani dalam pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) penyebab bencana pertanian.

➤ Program Penyuluhan Pertanian

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan lembaga penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa, penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, dan pembentukan sekolah lapang kelompok tani.

4) Bidang Perdagangan

➤ Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini difokuskan pada kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana prasarana di pasar daerah, perbaikan pada sarana prasarana pendukung pasar untuk memperlancar informasi dan komunikasi antara pasar dengan dinas dan penertiban pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan.

➤ Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini difokuskan pada kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar daerah dan penyusunan laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan, kegiatan pengendalian pengawasan pasar untuk mengantisipasi kenaikan harga/inflasi bahan pokok di masyarakat serta pelaksanaan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang.

➤ Program Pengembangan Ekspor

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan pelaku usaha produk ekspor unggulan.

➤ Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini difokuskan pada kegiatan metrologi legal berupa tera ulang alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan.

5) Bidang Perindustrian

➤ Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi pembinaan IKM unggulan daerah, pameran produk IKM, dan pembinaan industri penghasil cukai.

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1) Sekretariat Daerah

➤ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini difokuskan pada kegiatan penyempurnaan rumusan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja utama pada setiap level organisasi agar lebih berorientasi hasil dan memiliki indikator yang relevan maupun terukur sehingga ada keselarasan dalam penjabaran kinerja mulai dari level Kabupaten, Perangkat Daerah, hingga individu dan penyusunan SAKIP.

➤ Program Pemerintahandan Kesejahteraan Rakyat

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum, fasilitasi bantuan hukum, koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam pendokumentasian perundangan di JDIIH secara tepat waktu, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pelayanan publik oleh masing-masing perangkat daerah, dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memenuhi standar.

➤ Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini difokuskan pada kegiatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan mempersiapkan secara baik perencanaan dari OPD serta kebijakan dari masing masing kepala OPD dalam pelaksanaan kegiatan,

pengoptimalan dalam penggunaan *e-procurement* terhadap belanja pengadaan, pencatatan non-tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu, kerjasama yang efektif dengan dewan pengawas dalam pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja BUMD.

2) **Sekretariat DPRD**

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini difokuskan pada kegiatan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan keuangan dan kesejahteraan anggota DPRD, serta pemenuhan kegiatan tertib administrasi.

- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini difokuskan pada kegiatan percepatan pembahasan dan penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, optimalisasi kegiatan aspirasi DPRD, serta fasilitasi Tugas DPRD.

e. **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

1) **Perencanaan**

- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan optimalisasi ketercapaian kinerja pembangunan daerah, kegiatan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, serta fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di

semua perangkat daerah agar terwujud konsistensi perencanaan pembangunan.

2) **Penelitian dan Pengembangan**

➤ Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas SDM penelitian dan pengembangan, kegiatan fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan daerah, kegiatan penjangkaran dan fasilitasi serta pemanfaatan hasil kreaativitas dan inovasi, serta kegiatan pemetaan daya saing daerah, serta penguatan kelembagaan kelitbangan

3) **Keuangan**

➤ Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi penyusunan IKPD, kegiatan penyusunan dan pengelolaan keuangan serta perbendaharaan daerah sehingga dokumen penganggaran tepat waktu, serta kegiatan koordinasi dan komunikasi dengan perangkat daerah terkait dalam mewujudkan konsistensi penganggaran dengan perencanaan.

➤ Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan inventarisasi dan penataan barang milik daerah.

➤ Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan pengelolaan pendapatan daerah dan kegiatan peningkatan pendapatan asli daerah.

4) **Kepegawaian**

➤ Program Kepegawaian Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan pelayanan terhadap kebutuhan dan kesejahteraan pegawai di semua perangkat daerah, kegiatan fasilitasi dan motivasi pegawai perempuan

dalam beberapa jabatan struktural, kegiatan optimalisasi updating pegawai secara mandiri, dan kegiatan fasilitasi sistem merit di lingkungan pegawai.

5) **Pendidikan dan Pelatihan**

- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi kepesertaan pegawai dalam pengembangan kompetensi manajerial dan non manajerial

f. **Unsur Pengawasan Urusan pemerintahan**

1) **Inspektorat Daerah**

- Program Penyelenggaraan Pengawasan
Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program pemerintah dan kegiatan pencegahan korupsi
- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
Program ini difokuskan pada kegiatan pendampingan dan asistensi terhadap semua pelaksana program pemerintah

g. **Unsur Kewilayahan**

1) **Kecamatan**

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Program ini difokuskan pada kegiatan optimalisasi pelayanan publik di kecamatan, pengadaan sarana dan prasarana kecamatan, serta kegiatan peningkatan kapasitas SDM kecamatan
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Program ini difokuskan pada kegiatan penguatan kelembagaan desa, kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kelurahan, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat

- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Program ini difokuskan pada kegiatan penegakan Perda, dan kegiatan fasilitasi ketenteraman dan ketertiban umum
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa serta kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat terkait kepemilikan KPT-Elektronik dan pembayaran PBB.

h. Pemerintahan Umum

1) Kesatuan Bangsa dan Politik

- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Program ini difokuskan pada kegiatan sosialisasi dan pengembangan wawasan kebangsaan pada masyarakat semua elemen.
- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
Program ini difokuskan pada kegiatan pendidikan politik terutama bagi pemilih pemula.
- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan pengaawasan organisasi kemasyarakatan.
- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Program ini difokuskan pada kegiatan pencegahan perkembangan aliran sesat, kegiatan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, kegiatan pembinaan terhadap penghayat aliran kepercayaan, kegiatan monitoring dan evaluasi

- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan penanganan konflik sosial.

1.2.2 Pagu Indikatif Per Program Berdasarkan Urusan dan Bidang

Berikut adalah rekapitulasi pagu indikatif pada setiap program berdasarkan urusannya di RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Secara rinci untuk penjabaran program/kegiatan/sub kegiatan beserta indikator kinerja dan pagunya dituangkan dalam lampiran RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

Tabel 5. 36
Rekapitulasi Anggaran Per Urusan dan Per Bidang

NO	URUSAN	TOTAL ANGGARAN
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.181.067.316.041
1	PENDIDIKAN	686.780.619.473
2	KESEHATAN	388.535.537.367
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	54.291.892.640
4	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.430.000.000
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	13.105.714.026
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	31.923.552.535
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	233.686.529.181
1	TENAGA KERJA	7.818.911.799
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	160.684.400
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	49.410.893.754
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	22.537.379.584
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.341.904.315

NO	URUSAN	TOTAL ANGGARAN
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.053.389.258
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	16.539.501.471
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	25.792.290.508
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.261.851.489
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	16.002.407.753
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4.553.709.773
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	4.454.000.000
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	129.500.000
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	12.481.227.229
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	12.481.227.229
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.622.927.662
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	20.000.000
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	245.000.000
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	190.000.000
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	27.419.892.107
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	16.307.387.366
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	343.670.713
III	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	117.715.258.749
1	SEKRETARIAT DAERAH	66.512.663.120
2	SEKRETARIAT DPRD	51.202.595.629
IV	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	450.668.165.655
1	PERENCANAAN	8.144.231.649
2	KEUANGAN	436.611.274.075
3	KEPEGAWAIAN	4.848.977.431
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	456.750.000
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	606.932.500

NO	URUSAN	TOTAL ANGGARAN
V	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	8.514.916.251
1	INSPEKTORAT DAERAH	8.514.916.251
VI	UNSUR KEWILAYAHAN	71.682.795.575
1	KECAMATAN	71.682.795.575
VII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	7.679.911.220
1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.679.911.220
Jumlah Total		2.076.390.105.919

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah.

Tabel 5. 37
Rencana Pembiayaan Per Urusan dan Program

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.181.067.316.041
A	PENDIDIKAN				686.780.619.473
1	Program Pengelolaan Pendidikan	persentase APM PAUD (5-6 tahun)	81.72	%	151.865.540.775
		persentase APK PAUD (0-6 tahun)	44.55	%	
		persentase APK PAUD (4-6 tahun)	77.75	%	
		persentase APK PAUD (5-6 tahun)	90.55	%	
		persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi	100	%	
		persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	49.99	%	
		persentase Jumlah Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%	
		Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD	0.03	Angka	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
		persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik	100	%	
		persentase APM SD Sederajat	98.7	%	
		persentase APK SD Sederajat	104.69	%	
		Angka Putus Sekolah SD Sederajat	0.01	Angka	
		Rasio Siswa/Guru SD	0.061111	Angka	
		Rasio Siswa/Rombel SD	0.061111	Angka	
		persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4	100	%	
		persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	61.32	%	
		persentase Kepala SD memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%	
		persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%	
		Rasio Jumlah Pengawas SD	0.1	Angka	
		persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	91.49	%	
		persentase APM SMP Sederajat	89	%	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
		persentase APK SMP Sederajat	98.77	%	
		Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	98.9	%	
		Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	0.16	Angka	
		Rasio Siswa/Guru SMP	0.063889	Angka	
		Rasio Siswa/Rombel SMP	0.063889	Angka	
		persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4	100	%	
		persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	66.25	%	
			-		
		persentase Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%	
		persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%	
		Rasio Jumlah Pengawas SMP	0.08	Angka	
		persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	96.67	%	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
		persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu	100	%	
		persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4	100	%	
		persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%	
		persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	90	%	
		persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri)	20	%	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	100	%	534.915.078.698
B	KESEHATAN	143.365.867.097			388.535.537.367
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	72	per 100.000 KH	226.145.645.214
		Angka Kematian Bayi (AKB)	12.8	per 1000 KH	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
		Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	100	%	
		Prevalensi anemia pada ibu hamil	13.44	% maksimal	
		Cakupan Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	%	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	%	
		persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	100	%	
		persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
		Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	100	%	
		Angka Kematian Neonatal	9.15	per 1.000 KH	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	%	
		Angka Kematian Balita	15.6	per 1.000 KH	
		Prevalensi ballita gizi buruk	0.3	%	
		Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	14	% maksimal	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
		persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	82.6	% minimal	
		persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
		persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%	
		Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%	
		persentase fasyankes rujukan yang memenuhi standar mutu	64	%	
		persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
		persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
		persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%	
		persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
		persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%	
		Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	7	Maks per 100.000 penduduk	
		Presentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	85	%	
		persentase rumah sehat	87.6	%	
		persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	98.4	%	
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	persentase Puskesmas dengan SDM kesehatan yang memenuhi standar	26.9	%	10.000.000
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	162.379.892.153
C	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				54.291.892.640
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	persentase jaringan irigasi kondisi baik	59.37	%	9.164.704.000
		Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi	97.97	%	
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	95.7	%	9.081.058.000

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
		Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	100	%	
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	persentase saluran drainase kondisi baik	69.34	%	200.000.000
5	Program Penataan Bangunan Gedung	persentase terbangunnya gedung pemerintah	100	%	200.000.000
6	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	persentase Trotoar Kondisi Baik	73.97	%	200.000.000
7	Program Penyelenggaraan Jalan	persentase Jalan Kondisi Mantap	89.5	%	22.697.649.250
		persentase Jembatan dalam kondisi baik	94	%	
		persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	19.61		
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	89.51	%	300.000.000
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	12.448.481.390
D	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.401.000.000			6.430.000.000
1	Program Pengembangan Perumahan	persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	4	%	316.091.000
		Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	88	%	
2	Program Kawasan Permukiman	persentase rumah layak huni	96	%	6.113.909.000

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
		persentase kawasan kumuh perkotaan	5	%	
		persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100	%	
		persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100	%	
E	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				13.105.714.026
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persentase Satlinmas yang teratih	7	%	946.000.000
		persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	100	%	
		persentase penegakan Perda/Perbup	100	%	
2	Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	80	%	538.568.000

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
		persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	%	
		persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran oleh relawan kebakaran	100	%	
		persentase Bangunan/Gedung/Lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi	6	%	
3	Program Penanggulangan Bencana	persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	%	330.294.000
		persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	%	
		persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	%	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	11.290.852.026
F	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				31.923.552.535

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
1	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100	%	640.000.000
2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	100	%	20.000.000
3	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	732.671.162
		Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	
		Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	%	
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100	%	24.340.334.214

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
		persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	100	%	
		Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	100	%	
		persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan	60	%	
		persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48	%	
4	Program Penanganan Bencana	persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	100	%	167.500.000
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	100	%	97.500.000
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	5.925.547.159
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				233.686.529.181
A	TENAGA KERJA				7.818.911.799
1	Program Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja	persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	73	%	613.000.000

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
		persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	81	%	
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	persentase pencari kerja yang ditempatkan	36	%	425.000.000
		persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	31	%	
		persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja	1	%	
		persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	92	%	
3	Program Hubungan Industrial	persentase kepersertaan program BPJS Ketenagakerjaan	83	%	80.000.000
		persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	70	%	
		persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	46	%	
		persentase perselisihan hubungan industrial yang selesai melalui mediasi	100	%	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	6.700.911.799
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				160.684.400

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	2.66	%	10.000.000
		Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD	100	%	
2	Program Perlindungan Perempuan	persentase kasus kekerasan terhadap anak perempuan	0.0028	%	42.842.200
		persentase kasus kekerasan terhadap perempuan	0.0028	%	
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	persentase desa sayang ibu dan bayi	62.63	%	10.000.000
		persentase pelayanan ramah anak di rumah sakit dan puskesmas	100	%	
4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kabupaten Layak Anak	Nindya	Kategori	45.000.000
5	Program Perlindungan Khusus Anak	persentase kasus kekerasan terhadap anak	0.0039	%	52.842.200
C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				49.410.893.754
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rasio ketersediaan pangan	100	%	-
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	persentase penanganan kerawanan pangan	100	%	10.000.000
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	90	%	20.000.000

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	49.380.893.754
D	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				22.537.379.584
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100	%	50.000.000
		persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	100	%	
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	53.3	Angka	250.000.000
		Indeks Kualitas Udara	83.87	Angka	
		persentase Luas Lahan Kritis Tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	0.067	%	
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani	65	%	380.000.000
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	100	%	10.000.000

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
5	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	100	%	70.000.000
6	Program Pengelolaan Persampahan	persentase sampah yang tertangani	60.21	%	3.525.000.000
		Cakupan layanan persampahan	64.71	%	
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	18.252.379.584
F	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				6.341.904.315
1	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA	89.73	%	693.500.000
2	Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	99.85	%	10.000.000
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	persentase terpeliharanya Sarpras SIAK untuk pelayanan Administrasi Kependudukan	98.5	%	100.848.300
		persentase Pelaksanaan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital	1.3	%	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	5.537.556.015
G	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				8.053.389.258

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
1	Program Penataan Desa	Persentase Peraturan Desa Tentang Pungutan yang sesuai dengan Kewenangan Desa	60	%	25.000.000
2	Program Peningkatan Kerja sama Desa	persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	9	%	15.000.000
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kepatuhan Pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi Sipades	60	%	3.993.000.000
		Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD	80	%	
		Persentase penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	100	%	
		persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa	39	%	
		persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa	39.47	%	
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	4	%	494.917.000
		persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	55	%	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	3.525.472.258
H	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				16.539.501.471
1	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki data mikrokeluarga	100	%	423.256.000
		Persentase Pasangan Usia Subur yang Ingin BerKB yang Tepenuhi (unmetneed)	10.3	%	
		Persentase Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah Usia 20 Tahun	1.85	%	
		Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 tahun)	12.5	%	
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Pasangan Usia Subur(PUS) yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	88.6	%	7.293.884.000
		Persentase Kepesertaan KB Aktif	75.8	%	
		Persentase Keberhasilan Pemakaian Kontrasepsi Jangka Panjang	46.15	%	
		Persentase Kampung KB Berkembang dan Mandiri	45.45	%	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga	55.99	%	4.245.900.000
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	4.576.461.471
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				25.792.290.508
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	42.03	%	18.589.072.100
		persentase Angkutan umum yang memenuhi standar minimal pelayanan	35	%	
		persentase potensi titik parkir yang tertangani	99.12	%	
		persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	100	%	
		persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	100	%	
		persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	99.66	%	
		persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	33.86	%	
		persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	64.09	%	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	7.203.218.408
J	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				9.261.851.489
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	40	%	1.029.911.600
		persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	100	%	
		persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	90	%	
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik	100	%	1.274.889.125
		persentase layanan publik secara elektronik	55	%	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	40	%	6.957.050.764
K	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				16.002.407.753
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	persentase koperasi sehat	48	%	25.000.000

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	persentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan	6.67	%	330.000.000
3	Program Pengembangan UMKM	persentase UMKM yang difasilitasi	0.96	%	95.000.000
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	15.552.407.753
L	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				4.553.709.773
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan	100	Milyar	7.000.000
		persentase perusahaan yang bermitra	60	%	
2	Program Promosi Penanaman Modal	persentase promosi penanaman modal	50	%	7.000.000
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	persentase Pelayanan Perizinan secara Elektronik	100	%	342.403.510
		persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	100	%	
		persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani	100	%	
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	persentase pengendalian penanaman modal	16	%	404.961.000
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	3.792.345.263

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
M	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				4.454.000.000
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	persentase organisasi pemuda yang aktif	95.5	%	260.000.000
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	persentase pelatih olahraga bersertifikat	96.5	%	4.094.000.000
		persentase prestasi olahraga	62	%	
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	persentase gugus depan yang aktif	100	%	100.000.000
N	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	82.500.000			129.500.000
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Ketersediaan data statistik sektoral	100	%	82.500.000
-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	47.000.000			
1	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	persentase penilaian resiko keamanan informasi	66.7	%	47.000.000
		persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah	60		
P	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4.511.227.229			12.481.227.229
1	Program Pengembangan Kebudayaan	persentase kelompok Budaya yang Teregister	8.2	%	7.580.000.000

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
		persentase kelompok kesenian yang produktif	44	%	
		persentase pelestarian Sejarah Lokal	9.25	%	
		persentase Pelestarian Cagar Budaya	13.18	%	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	4.901.227.229
Q	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.432.927.662			5.622.927.662
1	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pertumbuhan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan	0.026	%	1.211.407.950
		persentase pertumbuhan jumlah peminjam di perpustakaan	42	%	
		Persentase perpustakaan yang aktif	35	%	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	4.411.519.712
R	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	20.000.000			20.000.000
1	Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip vital konvensional yang dialih mediakan	60	%	20.000.000
		Persentase audit internal kearsipan	73.33	%	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
S	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	20.000.000			245.000.000
1	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produktivitas ikan nila	1.3	kg/m2	235.000.000
		Produktivitas ikan lele	12.7	kg/m2	
2	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	22.52	%	10.000.000
T	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	70.000.000			190.000.000
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	0.04	%	190.000.000
		Lama Tinggal Wisatawan	1	Hari	
		persentase Peningkatan Desa Wisata	14.76	%	
		persentase Peningkatan pelaku Ekraft	10	%	
U	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	218.276.500			27.419.892.107
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas padi	61.5	Kuintal/ha	18.460.436.207
		Produktivitas jagung	54.6	Kuintal/ha	
		Produktivitas bawang putih	61	Kuintal/ha	
		Produktivitas bawang merah	69	Kuintal/ha	
		Produktivitas cabai rawit	50.5	Kuintal/ha	
		Produktivitas cabai besar	65.5	Kuintal/ha	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
		Produktivitas tembakau	6.2	Kuintal/ha	
		Produktivitas kopi robusta	7.15	Kuintal/ha	
		Produktivitas kopi arabika	6.5	Kuintal/ha	
		Produktivitas ternak sapi	177.5	Kg/Ekor	
		Produktivitas ternak domba	13.71	Kg/Ekor	
		Produktivitas ternak kambing	13.71	Kg/Ekor	
		Produktivitas ternak ayam ras pedaging	0.75	Kg/Ekor	
		Produktivitas ternak ayam petelur	10.88	Kg/Ekor	
		persentase kelahiran pedet	56	%	
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya	100	%	8.047.730.900
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	persentase penanganan penyakit hewan	87	%	651.725.000
		persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	77	%	
4	Program Penyuluhan Pertanian	persentase Kelompok Tani yang naik kelas	1.3	%	260.000.000
V	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				16.307.387.366
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	persentase fasilitasi pelaku usaha informal	27.42	%	674.979.613

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
		persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	67	%	
		persentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	2.41	%	
		persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	79.63	%	
2	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	75	%	30.000.000
4	Program Pengembangan Ekspor	cakupan pelaku usaha yang di bina	2.31	%	20.000.000
3	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	99.41	%	30.000.000
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	15.552.407.753
W	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	18.670.713			343.670.713
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	persentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	78.2	%	343.670.713
		persentase Pembinaan IKM Tembakau Lembutan	20.95	%	
III	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				117.715.258.749
A	SEKRETARIAT DAERAH	9.837.401.284			66.512.663.120

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	33.391.297.995
		Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	100	%	
		Persentase SAKIP Perangkat Daerah berpredikat BB	23.9	%	
		Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah	100	%	
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	persentase Kerjasama yang diimplementasikan	100	%	31.896.029.325
		persentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	100	%	
		persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu	100	%	
		persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	90	%	
		persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	60	%	
		persentase produk hukum yang difasilitasi	100	%	
		persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	100	%	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
		persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	100	%	
		persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	100		
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100	%	1.225.335.800
		persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	100	%	
		persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	83.33	%	
		persentase paket pekerjaan selesai tepat waktu	100	%	
		persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	100	%	
		persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	100	%	
		persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (tender)	100	%	
		persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (PL > 100 juta)	100	%	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
		persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	98	%	
B	SEKRETARIAT DPRD				51.202.595.629
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	31.521.979.724
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	persentase jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	90	%	19.680.615.905
		persentase kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana	95	%	
		persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	100	%	
		persentase kegiatan peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	100		
IV	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				470.668.165.655
A	PERENCANAAN				8.144.231.649
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	100	%	509.474.400
		persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	95	%	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pembangunan manusia	90	%	697.772.800
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	90	%	
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang ekonomi dan sumber daya alam	90	%	
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang infrastruktur	90	%	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	6.936.984.449
B	KEUANGAN				436.611.274.075
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pengalokasian anggaran belanja mandatory spending dalam APBD	100	%	410.851.694.364
		persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100	%	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
		persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100	%	
		Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	100	%	
		Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	100	%	
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu	100	%	1.390.608.125
		persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	80	%	
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah	9	%	619.828.400
		persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	100	%	
		persentase realisasi penerimaan pajak daerah	95.5	%	
		Penyampaian Laporan Pendapatan Daerah tepat waktu	100	%	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	23.749.143.186
C	KEPEGAWAIAN				4.848.977.431
1	Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Pengembangan SDM Aparatur	42.36	%	330.762.000

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
		Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan layanan Aparatur	86.58	%	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	4.518.215.431
D	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				456.750.000
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan Pembinaan SDM Aparatur	97	%	456.750.000
E	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	251.932.500			606.932.500
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian	100	%	606.932.500
		persentase kreativitas dan inovasi daerah yang diterapkan atau diimplementasikan	100	%	
V	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				8.514.916.251
A	INSPEKTORAT DAERAH	8.214.916.251			8.514.916.251
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	75	%	628.546.400
		persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	53	%	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
		persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD dan pengadaan barang/jasa	79	%	
		persentase penanganan aduan masyarakat	100	%	
		persentase tindak lanjut hasil temuan	100		
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	100	%	337.261.200
		persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	100	%	
		persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	54	%	
		Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan	3	Level	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	7.549.108.651

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
VI	UNSUR KEWILAYAHAN				71.682.795.575
A	KECAMATAN				71.682.795.575
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	54.471.908.292
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan	100	%	2.010.980.556
		persentase realisasi penerimaan PBB	95	%	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak	100	%	14.381.360.632
		Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif	100	%	
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam	100	%	360.991.000
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase penyelesaian pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa	100	%	457.555.095
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu	100	%	
		persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPDes tepat waktu	100	%	

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU UNDIKATIF
VII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				7.679.911.220
A	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				7.679.911.220
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	90	%	700.000.000
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	persentase pelaksanaan pendidikan politik	90	%	1.528.595.335
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	16.67	%	20.000.000
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	%	135.000.000
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah	100	%	579.000.000
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	4.717.315.885
JUMLAH TOTAL					2.076.390.105.919

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah.

Selain itu, juga terdapat dukungan pembiayaan non APBD yang mendukung program prioritas pemerintah daerah diantaranya USAID IUWASH Tangguh, Baznas, APBN, dll. Sebagai contoh, Kabupaten Temanggung mendapatkan Program USAID IUWASH Tangguh Tahun 2022 - 2027 (5 Tahun). Program tersebut bertujuan untuk mencapai target air minum dan sanitasi aman serta perubahan perilaku hygiene. Untuk mencapai tujuan tersebut sampai dengan Maret 2025 sudah dilakukan beberapa kegiatan antara lain (1) Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tahun 2022-2027, (2) Penyusunan Raperbup Pengelolaan Air Limbah Domestik, (3) Penyusunan Governance Index dan Sanitation Index Tahun 2022-2027, (4) Rangkaian kegiatan bersama masyarakat untuk perubahan perilaku hygiene dan peningkatan akses air minum sanitasi di lokasi percontohan Kabupaten Temanggung, (5) Workshop kesadaran bagi pemangku kepentingan Pengelolaan Sumber Daya Air mengenai Adaptasi Perubahan Iklim, (6) Workshop operasional dan pemeliharaan bagi penerima manfaat SPALDS/T, (7) Training enumerator dan survei Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) : Penyusunan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) oleh PDAM, Penyusunan Rencana Bisnis oleh PDAM, Kajian Delineasi Mata Air yang digunakan oleh PDAM baru dilakukan di satu lokasi yaitu mata air Tuk Mulyo, Pandemulyo, Training pemicuan untuk kader di lokasi percontohan dan Training pembuatan jamban untuk KSM yang mendapat DAK.

Selain itu, dalam mendukung pembangunan daerah dibutuhkan kolaborasi antara Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah yang terdiri dari Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Lembaga Sosial lainnya. Khusus untuk TJSLP Kabupaten Temanggung telah menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 126 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. TJSLP dan Lembaga Sosial lainnya sudah mendukung pembangunan daerah

dan perannya dapat dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat di berbagai bidang. Pemerintah Kabupaten Temanggung mengapresiasi kebijakan Forum TJSLP dan Lembaga sosial lainnya yang telah berperan aktif mendukung pembangunan di Kabupaten Temanggung di berbagai bidang. Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung bersama Forum TJLSP melaksanakan kegiatan pertemuan bersama membahas agenda kegiatan pembangunan daerah yang memerlukan kerjasama dengan TJSLP secara rutin tiap tiga bulan sekali. TJSLP di Kabupaten Temanggung berkomitmen sebagian laba untuk program pembangunan daerah, dengan 2 (dua) mekanisme, yaitu dapat menyalurkan sendiri atau dikumpulkan melalui Forum TJSLP. Pemerintah Daerah berfungsi menyediakan *database* baik berupa program/kegiatan, lokus, dan calon penerima manfaat.

Forum TJSLP merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya, melainkan sebagai sarana meraih keuntungan serta mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Temanggung, sehingga dapat mewujudkan kesamaan persepsi, komitmen dan kepedulian perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Temanggung serta mampu mewujudkan program TJSLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Kabupaten Temanggung.

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diperlukan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu parameter yang dibentuk untuk mengetahui keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis dari suatu organisasi yang berfungsi untuk memperoleh informasi kinerja yang dinilai penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja serta ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis (Permen PAN, 2007).

IKU berfungsi untuk memperoleh informasi kinerja yang dinilai penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis. Kedua fungsi tersebut dapat digunakan untuk evaluasi dalam rangka memperbaiki kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja dimana aspek akuntabilitas kinerja ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di Kabupaten Temanggung. Pengimplementasian indeks kinerja utama di Kabupaten Temanggung dalam perencanaan akan menghasilkan dampak secara simultan baik positif maupun negatif.

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran pada tahun 2025. Penyajian Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada bab ini meliputi: indikator kinerja, satuan, dan penetapan target kinerja Tahun 2025.

6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah

Indikator Kinerja Utama Daerah merupakan Gambaran kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berkaitan dengan ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran. Adapun Indikator Kinerja Utama Daerah yang menjabarkan indikator kinerja sasaran pembangunan

daerah dan indikator tujuan pembangunan daerah yang ditetapkan dapat dilihat sebagaimana tabel 6.1 berikut:

Tabel 6. 1
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjabarkan Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2025	Perangkat Daerah Pengampu
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	72,27	Dinkominfo
a	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,95	Dindikpora
b	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,65	Dindikpora
c	Indek Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	4,23	Dindikpora
d	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Angka	3,81	Dindikpora
e	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	4,66	Dinbudpar
f	Indeks Toleransi	Angka	4,51	Bankesbangpol
g	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75,72	Dinas Kesehatan
h	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	95,77	DPPPAPPKB
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,28	Dinkominfo
a	Pendapatan per Kapita	Ribu Rp	33,50	Dinkominfo
b	Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	Angka	19	BPKPAD
c	Angka Kemiskinan	Angka	8,10	Dinas Sosial
d	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Angka	2,51	Dinkominfo
e	Indeks Pembangunan Infrastruktur	%	75,20	DPUPR
f	Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Angka	64,05	DPRKPLH
g	Indeks Rasa Aman	Angka	4,69	Satpol PP & Damkar
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	Sekretariat Daerah
a	IPKD	Angka	66	BPKPAD
b	Indeks <i>Merit System</i>	Angka	0,55	BKPSDM
c	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Predikat	B	Sekretariat Daerah
d	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	B	Kecamatan

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023

Dalam hal ini, dalam menetapkan indikator kinerja, penggunaan indikator dampak sebagai indikator kinerja sasaran pembangunan daerah maupun indikator kinerja tujuan pembangunan daerah.

6.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama tersebut secara langsung mendukung capaian Indikator Kinerja Utama Daerah. Adapun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 6.2 berikut ini.

Tabel 6. 2

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN, DAN OLAHRAGA			
	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	%	57,10
		Persentase SD terakreditasi minimal B	%	98,39
		Persentase SMP terakreditasi minimal B	%	91,57
		Persentase Satuan Pendidikan Non-Formal terakreditasi minimal B	%	36,00
	Meningkatnya Akses layanan pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 5-6 tahun	%	100
		Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-12 tahun	%	100
		Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 13-15 tahun	%	100
		Persentase Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100
	Meningkatnya Pembangunan pemuda dan kebudayaan	Meningkatnya prestasi pemuda	Persentase pemuda berprestasi	%
Meningkatnya Atlet berprestasi		Persentase atlet berprestasi	%	36,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP				
Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Angka	30,2
Meningkatnya pengelolaan kearsipan		Indeks Manajemen Kearsipan	Angka	70
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target
	Meningkatnya Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya Lokal	Presentase kelompok seni dan budaya yang aktif	Angka	26,10
	Meningkatnya jumlah pendapatan sektor pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	2,10
Meningkatnya toleransi masyarakat	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	Menurunnya konflik di masyarakat	Persentase tertanganinya konflik di masyarakat	%	100
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	DINAS KESEHATAN			
	Meningkatnya kesehatan keluarga	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,15
Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA			
	Meningkatkan keadilan dan kesejahteraan Gender	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	%	10,22
	Pertumbuhan penduduk yang terkendali	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,60
Meningkatnya perekonomian Daerah	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN			
	Meningkatnya produksi pertanian	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	23,30
	Meningkatnya keberagaman pola konsumsi masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	78,7
	Meningkatnya produksi perikanan	Nilai produksi perikanan	Ribu Rp	349,500
	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN			
	Meningkatnya Nilai Usaha Perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	20,80
	Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Sehat	%	48
		Persentase UMKM yang difasilitasi	%	0,96
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA			
	Meningkatnya nilai usaha industri	Kontribusi sektor industri Terhadap PDRB	%	27,20
	Meningkatnya kompetensi angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	76,20
	DINAS PENANAMAN MODAL			
	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	Pertumbuhan realisasi investasi	%	3
	DINAS SOSIAL			
	Meningkatnya pelayanan terhadap PPKS	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	63
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target
	Meningkatnya pemberdayaan berbasis masyarakat	Persentase desa yang berpredikat mandiri	%	11,65
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	Meningkatnya infrastruktur sarana dan prasarana masyarakat	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	%	84,64
Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang		%	89,51	
Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
	Meningkatnya infrastruktur sarana dan prasarana masyarakat	Persentase perumahan dan Permukiman layak huni	%	99,03
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	53,30
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	83,87
	DINAS PERHUBUNGAN			
	Meningkatnya infrastruktur sarana dan prasarana wilayah	Persentase infrastruktur keselamatan jalan raya	%	42,03
	Meningkatnya Layanan Perhubungan	Persentase Layanan Perhubungan	%	68,72
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	Meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat	Indek Resiko Bencana	Angka	141,50
	SATPOL PP DAN DAMKAR			
Meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Angka	100	
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Angka	100	
	Cakupan Penanganan Bencana non Kebakaran Kabupaten	Angka	305	
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan inovasi daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	4,55
		Management Resiko Indeks (MRI)	Level	Level 3
		Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Sangat Inovatif
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH				

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target
	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK atas LPKD	WTP	WTP
		Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan	%	15,75
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	90,15
	Meningkatnya kualitas pengembangan layanan Sistem Pemerintahan Secara Elektronik	Indeks SPBE	Angka	3,35
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
Meningkatnya kualitas SDM aparatur	Meningkatnya kualitas pengelolaan SDM Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	52,95
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	SEKRETARIAT DAERAH			
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Kategori	Sangat Tinggi
	SEKRETARIAT DPRD			
	Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100
	INSPEKTORAT			
	Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase capaian <i>Monitoring Center for Prevention</i> (MCP) KPK	%	93,8
		Maturitas SPIP	Nilai	3,10
		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Nilai	2,975
		Kapabilitas APIP	Level	3
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	93,70
20 KECAMATAN				
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Angka	B	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023

6.3 Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah

Indikator kinerja program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah merupakan hasil akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator

kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (*outputs*). Keberhasilan capaian kinerja program Perangkat Daerah secara langsung mendukung capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. Adapun Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah yang ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 6.3.

Tabel 6. 3
Indikator Kinerja Program Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
PENDIDIKAN					
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase APM PAUD (5-6 tahun)	81,72	%	Dindikpora
		Persentase APK PAUD (0-6 tahun)	44,55	%	
		Persentase APK PAUD (4-6 tahun)	77,75	%	
		Persentase APK PAUD (5-6 tahun)	90,55	%	
		Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi	100	%	
		Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	49,99	%	
		Persentase Jumlah Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%	
		Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD	0,03	%	
		Persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik	100	%	
		Persentase APM SD Sederajat	98,70	%	
		Persentase APK SD Sederajat	104,69	%	
		Angka Putus Sekolah SD Sederajat	0,01	%	
		Rasio Siswa/Guru SD	01:28	%	
		Rasio Siswa/Rombel SD	01:28	%	
		Persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4	100	%	
		Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	61,32	%	
		Persentase Kepala SD memiliki kualifikasi akademik minimal	100	%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak			
		Persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%	
		Rasio Jumlah Pengawas SD	0,1	%	
		Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	91,49	%	
		Persentase APM SMP Sederajat	89,00	%	
		Persentase APK SMP Sederajat	98,77	%	
		Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	98,90	%	
		Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	0,16	Angka	
		Rasio Siswa/Guru SMP	01:32	Angka	
		Rasio Siswa/Rombel SMP	01:32	Angka	
		Persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4	100	%	
		Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	66,25	%	
		Persentase Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%	
		Persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%	
		Rasio Jumlah Pengawas SMP	0,08	%	
		Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	96,67	%	
		Persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan	100	%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu			
		Persentase Kepala Satuan Pendidikan Non-Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4	100	%	
		Persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non-Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%	
		Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	90,00	%	
		Persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari Dudi	20,00	%	
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	95,5	%	
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase pelatih olahraga bersertifikat	96,5	%	
		Persentase prestasi olahraga	62	%	
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase gugus depan yang aktif	100	%	
KESEHATAN					
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	72	per 100.000 KH	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi (AKB)	12,80	per 1000 KH	
		Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	100	%	
		Prevalensi anemia pada ibu hamil	13,44	% maksimal	
		Cakupan Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	%	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	%	
		Persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	100	%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
		Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	100	%	
		Angka Kematian Neonatal	9,15	per 1.000 KH	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	%	
		Angka Kematian Balita	15,60	per 1.000 KH	
		Prevalensi balita gizi buruk	0,30	%	
		Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	14	% maksimal	
		Persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	82,6	% minimal	
		Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
		Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%	
		Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%	
		Persentase fasyankes yang memenuhi standar mutu	64	%	
		Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
		Persentase penderita <i>Diabetes Melitus</i> (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
		Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan	100	%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		pelayanan TBC sesuai standar			
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%	
		<i>Incident Rate</i> DBD (Demam Berdarah <i>Dengue</i>)	7	Maks per 100.000 penduduk	
		Presentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	85	%	
		Persentase rumah sehat	87,6	%	
		Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	98,4	%	
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan SDM kesehatan yang memenuhi standar	26,9	%	
7	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman	Cakupan puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar	100	%	
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan	persentase Rumah Tangga Sehat (PHBS Rumah Tangga) Strata Utama dan Paripurna	84,03	%	
9	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan nilai akreditasi RSUD	100	%	
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
10	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	59,37	%	DPUPR
		Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi	97,9	%	
11	Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	95,7	%	
		Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	100	%	
12	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Presentase saluran drainase kondisi baik	69,34	%	
13	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Trotoar Kondisi Baik	73,97	%	
14	Program penataan bangunan gedung	Persentase terbangunnya gedung pemerintah	100	%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu	
15	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kondisi Mantap	89,5	%		
		Persentase Jembatan dalam kondisi baik	94	%		
		Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	19,61	%		
16	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	89,51	%		
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
17	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	4,46	%		DPRKPLH
		Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	88,4	%		
18	Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	95,89	%		
		Persentase kawasan kumuh perkotaan	4,82	%		
		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100	%		
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100	%		
19	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	100	%		
PERTANAHAN						
20	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	100	%		
LINGKUNGAN HIDUP						
21	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100	%		
		Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	100	%		
22	Program Pengendalian Pencemaran	Indeks Kualitas Air	53,33	Angka		
		Indeks Kualitas Udara	83,87	Angka		

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
	dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Luas Lahan Kritis Tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	0,067	%	
23	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani	63,90	%	
24	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase usaha yang memiliki Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3	100	%	
25	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	100	%	
26	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	30,00	%	
27	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	100	%	
28	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	%	
29	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	60,50	%	
		Cakupan layanan persampahan	66,44	%	
SOSIAL					
30	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100	%	Dinas Sosial
31	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	100	%	
32	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	
		Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	%	
33	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100	%	
		Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	100	%	
		Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	100	%	
		Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan	60	%	
		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48	%	
34	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	100	%	
35	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	100	%	
TENAGA KERJA					
36	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	72,56	%	Dinperinaker
		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	81	%	
37	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	36	%	
		Persentase pencari kerja yang mendapat	31	%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		penyuluhan dan bimbingan jabatan			
		Persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja	1,2	%	
		Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	92	%	
38	Program Hubungan Industrial	Presentase kepersertaan program BPJS Ketenagakerjaan	83,37	%	
		Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	70	%	
		Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	46	%	
		Persentase perselisihan hubungan industrial yang selesai melalui mediasi	100	%	
39	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	78,2	%	
		Persentase Pembinaan IKM Tembakau Lembutan	20,95	%	
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
40	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	2,66	%	DPPPAPPKB
		Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD	100	%	
41	Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap anak perempuan	0,0028	%	
		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan	0,0028	%	
42	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase desa sayang ibu dan bayi	62,63	%	
		Persentase pelayanan ramah anak di rumah sakit dan puskesmas	100	%	
43	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kabupaten Layak Anak	Nindya	kategori	
44	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	0,0039	%	
45	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Desa/kelurahan yang memiliki Data Mikro Keluarga	100	%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	10,3	%	
		Persentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	1,85	%	
		Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)	12,5	%	
46	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	88,6	%	
		Persentase kepesertaan KB aktif	75,8	%	
		Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	46,15	%	
		Persentase kampung KB Berkembang dan mandiri	45,45	%	
47	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indek Pembangunan Keluarga	55,99	%	
PERHUBUNGAN					
48	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	42,03	%	Dinas Perhubungan
		Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar minimal pelayanan	35	%	
		Persentase potensi titik parkir yang tertangani	99,12	%	
		Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif	100	%	
		Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	100	%	
		Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	99,66	%	
		Persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	33,86	%	
		Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	64,09	%	
KEUANGAN					
49	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pengalokasian	100	%	BPKPAD

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		anggaran belanja dalam APBD			
		Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100	%	
		Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100	%	
		Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas daerah	100	%	
		Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	100	%	
50	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu	100	%	
		Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	80	%	
51	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah	9	%	
		Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	100	%	
		Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	95,5	%	
		Penyampaian Laporan Pendapatan Daerah tepat waktu	100	%	
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
52	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	40	%	Dinkominfo
		Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	100	%	
		Persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	90,00	%	
53	Program Aplikasi Informatika	Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik	100	%	
		Persentase layanan publik secara elektronik	55,00	%	
STATISTIK					
54	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Ketersediaan data statistik sektoral	100	%	Dinkominfo
PERSANDIAN					
55	Program Penyelenggaraan Persandian untuk	Persentase penilaian resiko keamanan informasi	66,7	%	Dinkominfo

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
	Pengamanan Informasi	Persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah	60	%	
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					
56	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Prosentase koperasi sehat	48	%	Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan
57	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Prosentase kenaikan koperasi cukup sehat menjadi sehat	2,33	%	
58	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif	93,71	%	
59	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	prosentase koperasi tidak aktif yang diusulkan untuk dibubarkan	100	%	
60	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	prosentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan	6,67	%	
61	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang difasilitasi	0,96	%	
62	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	prosentase fasilitasi pelaku usaha informal	27,42	%	
		Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	67	%	
		Presentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	2,41	%	
		Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	79,63	%	
63	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Prosentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	75	%	
64	Program Pengembangan Ekspor	Cakupan pelaku usaha yang di bina	2,31	%	
65	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	99,41	%	
66	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Prosentase fasilitasi promosi produk dalam negeri	100	%	
PENANAMAN MODAL					
67	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan	100	%	Dinas Penanaman Modal

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		presentase perusahaan yang bermitra	60	%	
68	Program Promosi Penanaman Modal	presentase promosi penanaman modal	50	%	
69	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan secara Elektronik	100	%	
		Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	100	%	
		Persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani	100	%	
70	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	presentase pengendalian penanaman modal	16	%	
71	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	presentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	100	%	
KEPEGAWAIAN					
72	Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Pengembangan SDM Aparatur	42,36	%	BKPSDM
		Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan layanan Aparatur	86,58	%	
73	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	Cakupan Pembinaan SDM Aparatur	97	%	
KEBUDAYAAN					
74	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kelompok Budaya yang Teregister	8,2	%	Dinbudpar
		Persentase kelompok kesenian yang produktif	44	%	
		Persentase pelestarian Sejarah Lokal	9,25	%	
		Persentase Pelestarian Cagar Budaya	13,18	%	
PARIWISATA					
75	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	0,04	%	Dinbudpar
		Lama Tinggal Wisatawan	1	Hari	
		Persentase Peningkatan Desa Wisata	14,76	%	
		Persentase Peningkatan pelaku Ekraft	10	%	
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
76	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA	89,73	%	Dindukcapil
77	Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	99,85	%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
78	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase terpeliharanya Sarpras SIAK untuk pelayanan Administrasi Kependudukan	98,5	%	
		Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital	1,3	%	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
79	Program penataan Desa	Persentase Peraturan Desa tentang Pungutan yang sesuai dengan kewenangandesa	60	angka	Dinpermades
80	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	9	%	
81	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kepatuhan pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi SIPADES	60	%	
		Persentase penyelenggaraan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	100	%	
		Persentase laporan Pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD	80	%	
		Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa	39	%	
		Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa	39,47	%	
82	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	4	%	
		Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	55	Angka	
PERPUSTAKAAN					
83	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pertumbuhan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan	0,025	%	Dinpusip
		Persentase peminjam perpustakaan	42	%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		Persentase perpustakaan yang aktif	35	%	
84	Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip konvensional yang dialih mediakan	60	%	
		Persentase audit internal kearsipan	73,33	%	
85	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase penelusuran naskah kuno	100	%	
PANGAN					
85	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rasio ketersediaan pangan	100	%	DKPPP
86	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan	100	%	
87	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	90	%	
KELAUTAN DAN PERIKANAN					
88	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase nelayan perairan umum yang terbina	10	%	DKPPP
89	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produktivitas ikan nila	1,3	kg/m ²	
		Produktivitas ikan lele	12,7	kg/m ²	
90	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan	Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	10	%	
91	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	22,52	kg/kapita/tahun	
PERTANIAN					
92	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas padi	61,5	Kuintal/ha	
		Produktivitas jagung	54,6	Kuintal/ha	
		Produktivitas bawang putih	61	Kuintal/ha	
		Produktivitas bawang merah	69	Kuintal/ha	
		Produktivitas cabai rawit	50,5	Kuintal/ha	
		Produktivitas cabai besar	65,5	Kuintal/ha	
		Produktivitas tembakau	6,2	Kuintal/ha	
		Produktivitas kopi robusta	7,15	Kuintal/ha	
		Produktivitas kopi arabika	6,5	Kuintal/ha	
		Produktivitas ternak sapi	177,5	Kg/Ekor	
		Produktivitas ternak domba	13,71	Kg/Ekor	
		Produktivitas ternak kambing	13,71	Kg/Ekor	
		Produktivitas ternak ayam ras pedaging	0,75	Kg/Ekor	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		Produktivitas ternak ayam petelur	10,88	Kg/Ekor	
		Persentase kelahiran pedet	56	%	
93	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya	100	%	
94	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penanganan penyakit hewan	87	%	
		Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	77	%	
95	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	42	%	
96	Program Penyuluhan Pertanian	Presentase Kelompok Tani yang naik kelas	1,30	%	
PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
97	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	75	%	Inspektorat
		Persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	53	%	
		Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD dan pengadaan barang/jasa	79	%	
		Persentase penanganan aduan masyarakat	100	%	
		Persentase tindak lanjut hasil temuan	100	%	
98	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	100	%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		Persentase tindak lanjut aduan <i>Whistle Blowing</i> , Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	100	%	
		Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	54	%	
		Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan	3	%	
SEKRETARIAT DAERAH					
99	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	Sekretariat Daerah
		Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	100	%	
		Persentase SAKIP Perangkat Daerah berpredikat BB	23,9	%	
		Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah	100	%	
100	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kerjasama yang diimplementasikan	100	%	
		Persentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	100	%	
		Persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu	100	%	
		Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	86	%	
		Persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	60	%	
		Persentase produk hukum yang difasilitasi	100	%	
		Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	100	%	
		Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	100	%	
		Persentase penyelesaian	100	%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		permasalahan hukum secara litigasi			
101	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100	%	
		Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	100	%	
		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	83,33	%	
		Persentase paket pekerjaan selesai tepat waktu	100	%	
		Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	100	%	
		Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	100	%	
		Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (tender)	100	%	
		Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (PL > 100 juta)	100	%	
		Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	98	%	
		PERENCANAAN			
102	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	100	%	BAPPEDA
		Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	100	%	
103	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pembangunan manusia	98,82	%	
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat	90,56	%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat			
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang ekonomi dan sumber daya alam	91,96	%	
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang infrastruktur	95,76	%	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
104	Program penelitian dan pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian	100	%	BAPPEDA
		Persentase kreativitas dan inovasi daerah yang diterapkan atau diimplementasikan	100	%	
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
105	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Satlinmas yang teratih	6,92	%	Satpol PP & Damkar
		presentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	100	%	
		persentase penegakan Perda/Perbup	100	%	
106	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	80	%	
		Presentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	%	
		Presentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran oleh relawan kebakaran	100	%	
		presentase Bangunan/Gedung/Lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi	6,15	%	
107	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan	100	%	BPBD

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		informasi rawan bencana			
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	%	
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	%	
SEKRETARIAT DPRD					
108	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	90	%	Sekretariat DPRD
		Persentase kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana	95	%	
		Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	100	%	
		Persentase kegiatan peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	100	%	
KECAMATAN					
109	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan	100	%	20 Kecamatan
		Persentase realisasi penerimaan PBB	95	%	
110	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak	81	%	
		Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif	100	%	
111	Program Koordinasi, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam	100	%	
112	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan perangkat Desa	100	%	
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu	100	%	
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu	100	%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
113	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Presentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	90	%	Bankesbangpol
114	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	prosentase pelaksanaan pendidikan politik	90	%	
115	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	16,67	%	
116	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	%	
117	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah	100	%	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

6.4 Indikator Kinerja Program Prioritas Daerah

Indikator kinerja program prioritas daerah memperhatikan penggunaan indikator hasil. Tingkat penggunaan indikator hasil sebagai indikator kinerja program prioritas daerah sebesar 100% dimana semua indikator kinerja. Adapun Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. 4
Indikator Kinerja Program Prioritas Daerah

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
PENDIDIKAN					
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase APM PAUD (5-6 tahun)	81,72	%	Dindikpora
		Persentase APK PAUD (0-6 tahun)	44,55	%	
		Persentase APK PAUD (4-6 tahun)	77,75	%	
		Persentase APK PAUD (5-6 tahun)	90,55	%	
		Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi	100	%	
		Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	49,99	%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		Persentase Jumlah Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%	
		Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD	0,03	%	
		Persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik	100	%	
		Persentase APM SD Sederajat	98,70	%	
		Persentase APK SD Sederajat	104,69	%	
		Angka Putus Sekolah SD Sederajat	0,01	%	
		Rasio Siswa/Guru SD	01:28	%	
		Rasio Siswa/Rombel SD	01:28	%	
		Persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4	100	%	
		Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	61,32	%	
		Persentase Kepala SD memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%	
		Persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%	
		Rasio Jumlah Pengawas SD	0,1	%	
		Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	91,49	%	
		Persentase APM SMP Sederajat	89,00	%	
		Persentase APK SMP Sederajat	98,77	%	
		Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	98,90	%	
		Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	0,16	Angka	
		Rasio Siswa/Guru SMP	01:32	Angka	
		Rasio Siswa/Rombel SMP	01:32	Angka	
		Persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4	100	%	
		Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	66,25	%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		Persentase Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%	
		Persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%	
		Rasio Jumlah Pengawas SMP	0,08	%	
		Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	96,67	%	
		Persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu	100	%	
		Persentase Kepala Satuan Pendidikan Non-Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4	100	%	
		Persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non-Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%	
		Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	90,00	%	
		Persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari Dudi	20,00	%	
KESEHATAN					
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	72	per 100.000 KH	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi (AKB)	12,80	per 1000 KH	
		Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	100	%	
		Prevalensi anemia pada ibu hamil	13,44	% maksimal	
		Cakupan Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	%	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		Persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	100	%	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
		Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	100	%	
		Angka Kematian Neonatal	9,15	per 1.000 KH	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	%	
		Angka Kematian Balita	15,60	per 1.000 KH	
		Prevalensi balita gizi buruk	0,3	%	
		Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	14	% maksimal	
		Persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	82,6	% minimal	
		Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
		Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%	
		Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%	
		Persentase fasyankes yang memenuhi standar mutu	64	%	
		Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
		Persentase penderita <i>Diabetes Melitus</i> (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
		Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		<i>Incident Rate</i> DBD (Demam Berdarah <i>Dengue</i>)	7	Maks per 100.000 penduduk	
		Presentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	85	%	
		Persentase rumah sehat	87,6	%	
		Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	98,4	%	
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
3	Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	95,7	%	DPUPR
		Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	100	%	
4	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kondisi Mantap	89,5	%	
		Persentase Jembatan dalam kondisi baik	94,00	%	
		Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	19,61	%	
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
5	Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	95,89	%	DPRKPLH
		Persentase kawasan kumuh perkotaan	4,82	%	
		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100	%	
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100	%	
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
6	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Satlinmas yang teratih	6,92	%	Satpol PP & Damkar
		presentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	100	%	
		persentase penegakan Perda/Perbup	100	%	
SOSIAL					
7	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100	%	Dinas Sosial
		Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	100	%	
		Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	100	%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan	60	%	
		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48	%	
TENAGA KERJA					
8	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	72,56	%	Dinperinaker
		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	81	%	
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
9	Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap anak perempuan	0,0028	%	DPPPAPPKB
		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan	0,0028	%	
10	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kabupaten Layak Anak	Nindya	kategori	
KEUANGAN					
11	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	100	%	BPKPAD
		Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100	%	
		Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100	%	
		Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas daerah	100	%	
		Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	100	%	
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
12	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	40	%	Dinkominfo
		Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	100	%	
		Persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	90,00	%	
13	Program Aplikasi Informatika	Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik	100	%	
		Persentase layanan publik secara elektronik	55,00	%	
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					
14	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha	prosentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan	6,67	%	Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
	Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)				
15	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Prosentase fasilitasi promosi produk dalam negeri	100	%	
PENANAMAN MODAL					
16	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan	100	%	Dinas Penanaman Modal
		presentase perusahaan yang bermitra	60	%	
KEPEGAWAIAN					
17	Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Pengembangan SDM Aparatur	42,36	%	BKPSDM
		Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan layanan Aparatur	86,58	%	
KEBUDAYAAN					
18	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kelompok Budaya yang Teregister	8,2	%	Dinbudpar
		Persentase kelompok kesenian yang produktif	44	%	
		Persentase pelestarian Sejarah Lokal	9,25	%	
		Persentase Pelestarian Cagar Budaya	13,18	%	
PARIWISATA					
19	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	0,04	%	Dinbudpar
		Lama Tinggal Wisatawan	1	Hari	
		Persentase Peningkatan Desa Wisata	14,76	%	
		Persentase Peningkatan pelaku Ekraft	10	%	
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
20	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase terpeliharanya Sarpras SIAK untuk pelayanan Administrasi Kependudukan	98,5	%	Dindikcapil
		Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital	3,3	%	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
21	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	9	%	Dinpermades
PERTANIAN					
22	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas padi	61,5	Kuintal/ha	
		Produktivitas jagung	54,6	Kuintal/ha	
		Produktivitas bawang putih	61	Kuintal/ha	
		Produktivitas bawang merah	69	Kuintal/ha	
		Produktivitas cabai rawit	50,5	Kuintal/ha	
		Produktivitas cabai besar	65,5	Kuintal/ha	
		Produktivitas tembakau	6,2	Kuintal/ha	
		Produktivitas kopi robusta	7,15	Kuintal/ha	
		Produktivitas kopi arabika	6,5	Kuintal/ha	
		Produktivitas ternak sapi	177,5	Kg/Ekor	
		Produktivitas ternak domba	13,71	Kg/Ekor	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Perangkat Daerah Pengampu
		Produktivitas ternak kambing	13,71	Kg/Ekor	
		Produktivitas ternak ayam ras pedaging	0,75	Kg/Ekor	
		Produktivitas ternak ayam petelur	10,88	Kg/Ekor	
		Persentase kelahiran pedet	56	%	
PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
23	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	75	%	Inspektorat
		Persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	53	%	
		Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD dan pengadaan barang/jasa	79	%	
		Persentase penanganan aduan masyarakat	100	%	
		Persentase tindak lanjut hasil temuan	100	%	
PERENCANAAN					
24	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	100	%	BAPPEDA
		Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	95	%	
KECAMATAN					
25	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan	100	%	20 Kecamatan
		Persentase realisasi penerimaan PBB	95	%	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
26	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Presentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	90	%	Bankesbangpol
LINGKUNGAN HIDUP					
27	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	60,50	%	DPRKPLH
		Cakupan layanan persampahan	66,44	%	
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
28	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	95,5	%	Dindikpora

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

6.5 Indikator Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah

Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan pemerintah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) digunakan sebagai tolok ukur kinerja pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat, sedangkan pelaporan capaian kinerja setiap tahunnya dikoordinasikan oleh Bagaian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung. Adapun Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.5
Indikator Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah

NO	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	PD Pengampu
1	PENDIDIKAN	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	100	DINDIKPORA
		Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	DINDIKPORA
		Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	DINDIKPORA
2	KESEHATAN	Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	%	100	DINKES
		Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	100	DINKES
		Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100	DINKES
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	DINKES
		Presentase anak usia pendidikan dasar yang sesuai mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	DINKES

NO	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	PD Pengampu
		Presentase warga negara indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	DINKES
		Cakupan warga negara indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	DINKES
		Presentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	DINKES
		Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	DINKES
		Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	DINKES
		Presentase orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	%	100	DINKES
		Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan Kesehatan	%	100	DINKES
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	%	100	DPUPR
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	DPRKPLH
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni korban bencana	%	100	DPRKPLH
		Persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100	DPRKPLH
5	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	BPBD
		jumlah warga Negara yang memperoleh	%	100	SATPOL DAMKAR

NO	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	PD Pengampu
		layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada			
		jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	BPBD
		jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	BPBD
		jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	SATPOL DAMKAR
6	SOSIAL	jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	DINSOS
		jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	DINSOS
		jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	DINSOS
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	DINSOS
		jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	%	100	DINSOS

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025 merupakan perencanaan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dengan memuat kebijakan umum dan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan Tema Pembangunan Tahun 2025 adalah Mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dokumen RKPD nantinya menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang mempunyai 4 (empat) fungsi utama yaitu: (1) menjadi pedoman oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan pemerintah daerah tahun 2025; (2) sebagai landasan bagi penyusunan KUA-PPAS untuk menyusun RAPBD Kabupaten Temanggung Tahun anggaran 2025; (3) menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan; (4) sebagai dokumen perencanaan strategis sehingga berdampak pada pencapaian indikator kinerja daerah Kabupaten Temanggung dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Pencapaian indikator kinerja daerah Kabupaten Temanggung dilihat dari capaian 8 indikator kinerja utama tahun 2021 sebagai berikut:

1. **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** mencapai 70,77 meningkat daripada tahun 2021 (69,88). Capaian angka ini melebihi dari target yang ditetapkan pada RKPD tahun 2022.
2. **Angka Kemiskinan** mencapai 9,33% lebih baik pencapaiannya dari Provinsi Jawa Tengah.
3. **Pertumbuhan Ekonomi** mencapai 5,20% menunjukkan geliat perekonomian sudah mulai bangkit kembali pasca pandemi Covid-19, bahkan mampu tumbuh melebihi pertumbuhan ekonomi

sebelum pandemi Covid-19.

4. **Pendapatan per Kapita** meningkat menjadi 30,93 juta rupiah, lebih tinggi daripada dibanding pencapaian tahun 2021 dan target tahun 2022.
5. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** mencapai 2,54% lebih baik dibandingkan pencapaian TPT kawasan Purwomanggung, Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.
6. **Ketimpangan Pendapatan** mencapai 18,46%
7. **Indeks Reformasi Birokrasi** mencapai 64,61 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 (63,42)
8. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** meningkat menjadi 83,41 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 (82,06).

Pencapaian indikator tujuan dan sasaran serta target kinerja program/kegiatan dengan melalui serangkaian program dan kegiatan prioritas dalam penjabarannya mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah Kabupaten Temanggung, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pusat, swasta dan masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergitas pentahelix guna mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Dari hasil evaluasi RKPD tahun 2022 rekapitulasi capaian kinerja indikator sebagai berikut:

1. Capaian **Indikator Tujuan** Kabupaten Temanggung ada 8 indikator dengan status Telah Tercapai sejumlah 6 indikator (75%) dan status Akan Tercapai sejumlah 2 indikator (25%);
2. Capaian **Indikator Sasaran** Kabupaten Temanggung antara lain:
 - a. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ada 10 indikator sasaran, dengan status Telah Tercapai sejumlah 7 indikator (70%) dan 3 indikator dengan status Akan Tercapai (30%);
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ada 20 indikator sasaran, dengan status telah tercapai sejumlah 12 indikator (60%) dan status Akan Tercapai ada 8 indikator (40%);
 - c. Urusan pemerintahan pilihan ada 7 indikator, terdapat 5 indikator dengan status telah tercapai (71,43%) dan 2 indikator dengan status akan tercapai (28,57%);
 - d. Unsur pendukung urusan pemerintahan ada 4 indikator,

- terdapat 1 indikator dengan status telah tercapai (25%) dan 3 indikator dengan status akan tercapai (75%);
- e. Unsur penunjang urusan pemerintahan ada 8 indikator, terdapat 5 indikator dengan status telah tercapai (62,50%), 1 indikator dengan status akan tercapai (12,50%) dan 2 indikator dengan status upaya keras (25%);
 - f. Unsur pengawasan urusan pemerintahan ada 1 indikator dengan status akan tercapai (100%);
 - g. Unsur kewilayahan ada 1 indikator dengan status telah tercapai (100%).
 - h. Unsur pemerintahan umum ada 2 indikator dengan status telah tercapai (100%).
3. Capaian **Indikator Program** Kabupaten Temanggung antara lain:
- a. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ada 124 indikator program, terdapat 89 indikator dengan status Telah Tercapai (71,77%), 30 indikator dengan status Akan Tercapai (24,919%) dan 5 indikator dengan status perlu Upaya Keras (4,03%);
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ada 116 indikator program, terdapat 87 indikator program Telah Tercapai (75%), 24 indikator Akan Tercapai (20,69%), dan 5 indikator perlu Upaya Keras (4,31%);
 - c. Urusan pemerintahan pilihan ada 45 indikator program, terdapat 26 indikator telah tercapai (57,78%), 16 indikator akan tercapai (35,56%) dan 1 indikator perlu upaya keras (2,22%);
 - d. Unsur pendukung urusan pemerintahan ada 24 indikator program, terdapat 22 indikator telah tercapai (91,67%), 1 indikator akan tercapai (4,17%) dan 1 indikator perlu upaya keras (4,17%);
 - e. Unsur penunjang urusan pemerintahan ada 32 indikator program, terdapat 22 indikator telah tercapai (68,75%), 8 indikator akan tercapai (25%) dan 2 indikator perlu upaya keras (6,25%);
 - f. Unsur pengawasan urusan pemerintahan ada 9 indikator program, terdapat 7 indikator telah tercapai (77,78%) dan 2 indikator akan tercapai (22,22%);
 - g. Unsur kewilayahan ada 9 indikator program, terdapat 5

indikator telah tercapai (55,56%) dan 4 indikator akan tercapai (44,44%);

- h. Unsur pemerintahan umum ada 10 indikator program, dengan status telah tercapai (100%).

Pelaksanaan program dan kegiatan pada RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 diharapkan mampu menjadi pedoman dan motivasi bagi semua pihak terutama Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan daerah sesuai RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.





PEMERINTAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN
TEMANGGUNG
TAHUN 2025



MULTI HELIX



www.temanggungkab.go.id



info@temanggungkab.go.id